

Laporan Tahunan
PosIND 2024

Jl. Banda No. 30
Bandung 40115
Jawa Barat - Indonesia

POS
IND
Logistik Indonesia

Towards »»
an ESG-based
logistics company

Laporan Tahunan
PosIND 2024

BUMN
UNTUK
INDONESIA

Laporan Tahunan
PosIND 2024

POS
IND
Logistik Indonesia



Towards »»
an ESG-based
logistics company

POS iND

Logistik Indonesia



Kesinambungan Tema



Highlight

Tahun 2024 menjadi tonggak penting bagi PosIND dalam melanjutkan perannya sebagai tulang punggung logistik nasional. Dengan semangat inovasi dan komitmen terhadap pelayanan, PosIND berhasil meraih berbagai penghargaan bergengsi. Transformasi perusahaan terus menjadi prioritas utama PosIND. Langkah transformasi PosIND didorong oleh visi Indonesia untuk menurunkan biaya logistik nasional menjadi 8% dari PDB pada tahun 2045.

Transformasi yang dilakukan oleh PosIND menjadi langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, menerapkan prinsip keberlanjutan lingkungan, dan mewujudkan sistem logistik yang inklusif serta kompetitif sesuai dengan Asta Cita Pemerintah dalam Logistik Nasional.

Komitmen PosIND untuk menjangkau wilayah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal menunjukkan misi sosial yang kuat, mendukung pemerataan ekonomi dan informasi seluruh wilayah Indonesia.

PosIND
Logistik Indonesia



Daftar Isi >>>

Highlight 2023

Pengantar	3
Daftar Isi	4
Pencapaian	6
Kinerja Bisnis	7
Ikhtisar Keuangan	8
Informasi Hasil Usaha	9
Rasio Keuangan	10
Informasi Harga Saham	11
Kaleidoskop	18

Laporan Kepada Pemegang Saham

Sambutan Dewan Komisaris	22
Sambutan Direksi	30
Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi	36

Profil Perusahaan

Identitas Perusahaan	40
Riwayat Singkat	45
Bidang Usaha	47
Struktur Organisasi	48
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	50
Dewan Komisaris	55
Direksi	62
Sumber Daya manusia	70
Pengembangan Kompetensi Karyawan	72
Komposisi Pemegang saham	74

Anak Perusahaan dan Entitas Asosiasi	75
Struktur Grup Perusahaan	75
Kronologi Penerbitan Saham	77
Kronologi Penerbitan Dan/Atau Pencatatan Efek Lainnya	77
Lembaga dan Profesi Penunjang	77
Penghargaan dan Sertifikasi	78
Alamat Anak Perusahaan dan Kantor Regional	80
Informasi pada <i>Website</i> Pos Indonesia	81
Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris, Komite-Komite dan Unit Audit Internal	82
Wilayah Operasi	84

Pembahasan dan Analisis Manajemen

Tinjauan Kinerja Operasi	88
Kinerja Keuangan Perusahaan	93
Kemampuan Membayar Utang Dan Tingkat Kolektibilitas Piutang	97
Permodalan	99
Ikatan Yang Material Untuk Investasi Barang Modal	101
Investasi	101
Kebijakan Dividen	101

V Tata Kelola Perusahaan

<i>Good Corporate Governance</i>	106
Struktur Tata Kelola	109
RUPS	111
Dewan Komisaris	113
Komisaris Independen	123
Direksi	124
Penilaian Penerapan GCG 2024	133
Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	134
Rapat Dewan Komisaris	140
Rapat Direksi	144
Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dan Direksi	155
Hubungan Afiliasi Antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dan Pemegang Saham	157
Komite Audit	158
Komite Nominasi Dan Remunerasi	173
Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha Dan Investasi	186
Sekretaris Perusahaan	204
Internal Audit	207
Akuntan Perseroan	221
Manajemen Risiko	222
Sistem Pengendalian Internal	236
Perkara Penting	240
Akses Informasi Dan Data Perusahaan	241
Kode Etik	242
<i>Whistleblowing System</i>	257
Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Dan Direksi	262

VI Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	266
Kinerja Program TJSL	271
Kinerja Program PUMK	264

VII Lampiran

Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan Audit TJSL

**PosIND**

melakukan transformasi digital dalam operasional, meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan, memperkuat profitabilitas dan kepercayaan pelanggan, serta menerapkan praktik keberlanjutan lingkungan dan tata kelola perusahaan yang transparan untuk menjadi salah satu pemimpin di industri logistik.



Kinerja Keuangan

Pada periode 2024 Perusahaan telah meraih pendapatan dan laba sebagai dengan capaian kinerja utama tahun 2024 sebagai berikut:

Net Income

747,13 Milliar
up 2,60% dari 2023

Pendapatan

5.017,86 Milliar
down 8,42% dari 2023

EBITDA

1.015,67 Milliar
down 14,93% dari 2023

Realisasi Capex

274,82 Milliar
up 4,99% dari 2023

2,60%

(8,42%)

(14,93%)

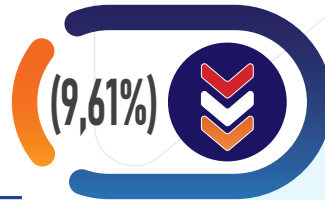
4,99%



Kinerja Bisnis >>>

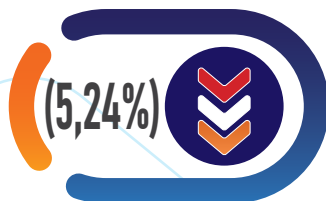
Pendapatan CEP

2024	1.711,93
2023	1.893,87



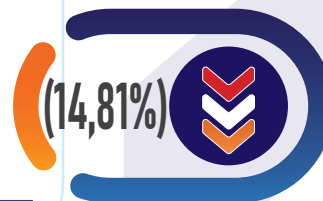
Pendapatan Logistik

2024	2.061,93
2023	2.176,04



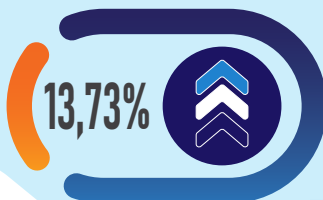
Pendapatan Jasa Keuangan

2024	1.070,50
2023	1.256,66



Pendapatan Properti

2024	173,49
2023	152,54



Rating Tingkat Kesehatan

78,50
Sehat
A

89,04

Sangat
Baik

Skor GCG





Ihktisar Keuangan

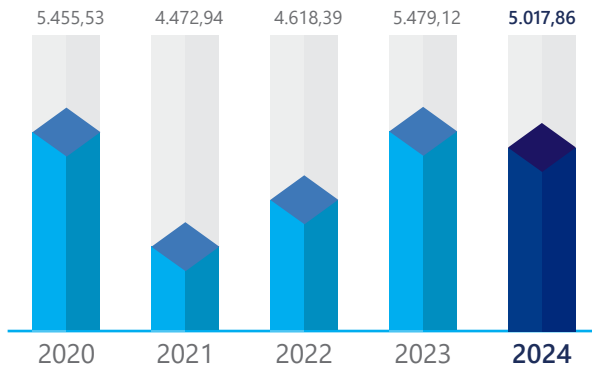


Uraian	YoY 2023 -2024		2024	2023	2022	2021	2020
	Rp.	%					
Aset							
Aset lancar	2.463,86	45,86	7.836,56	5.372,71	3.623,29	3.531,05	4.003,64
Aset Tidak Lancar	343,14	4,14	8.629,27	8.286,13	7.515,03	6.158,11	5.442,44
Jumlah Aset	2.807,00	20,55	16.465,84	13.658,84	11.138,31	9.689,16	9.446,08
Liabilitas							
Liabilitas Jangka Pendek	2.108,02	53,98	6.103,47	3.905,45	2.104,70	2.777,65	3.725,50
Liabilitas Jangka Panjang	(120,13)	(7,42)	1.498,19	1.618,32	2.084,04	1.318,03	1.655,38
Jumlah Liabilitas	1.987,89	35,99	7.511,66	5.523,77	4.188,74	4.095,68	5.380,88
Ekuitas							
Modal saham			455,02	455,02	455,02	455,02	455,02
Saldo laba (<i>Appropriated</i>)	755,61	23,15	4.019,92	3.264,31	2.613,94	2.024,40	1.576,34
Saldo Laba (<i>Unappropriated</i>)	(28,70)	(3,80)	726,93	755,63	650,37	589,54	120,20
Komponen Ekuitas Lainnya	92,00	2,48	3.794,78	3.702,78	3.245,45	2.528,74	1.912,31
Kep non pengendali	0,19	(0,42)	(44,84)	(45,02)	(17,56)	(4,23)	1,30
Jumlah Ekuitas	819,10	10,07	8,954,17	8,135,07	6,949,57	5,593,47	4,065,19
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	2.807,00	20,55	16,465,84	13,658,84	11,138,31	9,989,16	9,446,08

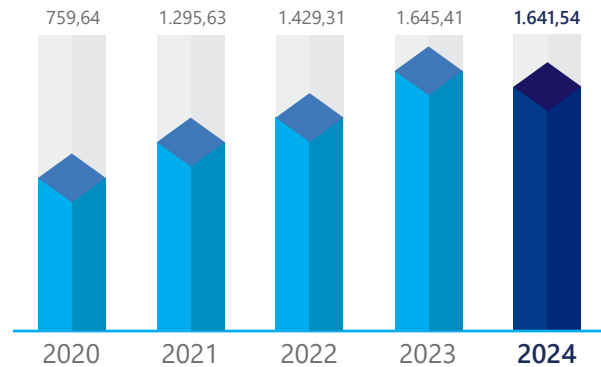


Informasi Hasil Usaha >>>

Pendapatan usaha

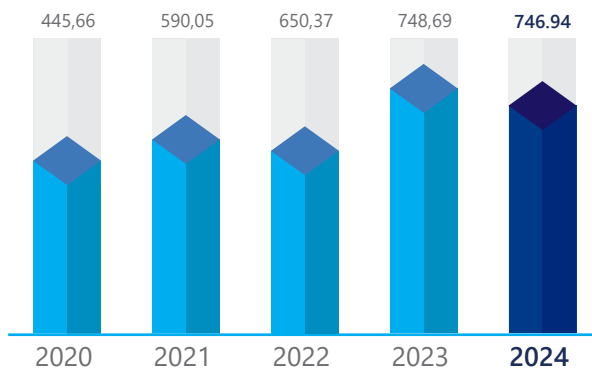


Laba per saham

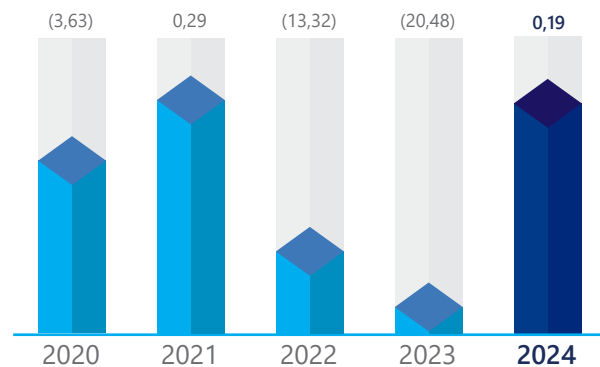


Laba rugi

a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk

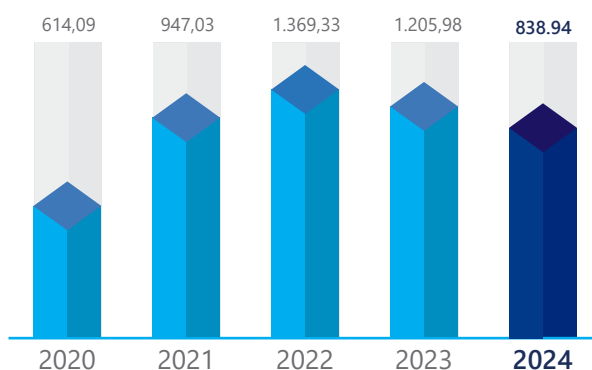


b. Diatribusikan kepada kepentingan non pengendali

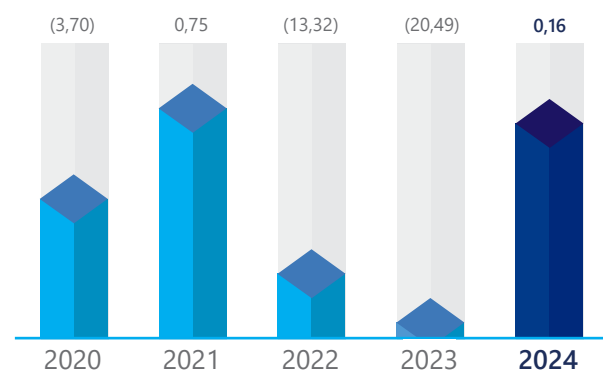


Penghasilan komprehensif periode berjalan

a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk



b. Diatribusikan kepada kepentingan non pengendali





Rasio Keuangan

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020
Likuiditas					
Rasio Lancar (%)	130,32	137,57	174,86	127,12	108,40
Rasio Kas (%)	34,31	68,00	109,49	68,76	66,28
Rasio Cepat (%)	129,74	136,45	172,28	124,79	106,22
Aktifitas					
Perputaran Aset (%)	30,47	40,11	48,57	54,71	60,15
Perputaran Modal Kerja (kali)	11,03	12,04	2,93	6,13	20,84
Perputaran Aset Tetap (kali)	0,59	0,69	0,76	0,94	4,94
Perputaran Persediaan (hari)	2,53	2,91	3,97	5,37	71,36
Rata-rata Periode Penagihan (hari)	24,51	25,67	25,68	46,46	21,72
Profitabilitas					
Marjin Laba Kotor (%)	39,60	32,82	28,98	26,89	19,65
Marjin Laba Operasi (%)	15,78	11,26	16,75	15,63	9,72
Marjin Laba Bersih (%)	14,89	13,29	13,79	13,19	6,27
Rasio Laba terhadap Aset / ROA (%)	4,54	5,33	5,71	6,09	3,75
Marjin EBITDA (%)	20,24	15,10	18,73	17,27	14,24
Investasi					
Rasio Laba terhadap Ekuitas / ROE (%)	8,34	8,95	10,04	13,51	8,05
Rasio Laba Atas Investasi / ROI (%)	8,44	8,68	8,68	9,65	8,56
Solvabilitas					
Rasio Utang terhadap Ekuitas (kali)	0,84	0,68	0,60	0,73	0,96
Rasio Utang terhadap Aset (kali)	0,46	0,40	0,37	0,42	0,49
Rasio Cakupan Bunga (%)	266,90	402,46	405,12	497,76	277,79

Informasi Harga Saham »»

PT Pos Indonesia belum pernah melakukan penawaran umum saham kepada masyarakat dan sahamnya belum tercatat di Bursa Efek manapun. Kepemilikan saham seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia 100%. Sehingga tidak ada informasi mengenai harga saham perusahaan.

Informasi Mengenai Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konvertibel.

Pada tahun 2024 PT Pos Indonesia tidak melakukan penerbitan efek lain

MTN Posindo-03 Tahap 1 Tahun 2021

Nilai Penerbitan	: Rp.325.000.000.000,-
Tingkat Bunga	: 10,50%
Tanggal jatuh Tempo	: 30 Desember 2024
Peringkat Rating	: A(ind) (Fitch)

Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022 Seri A

Nilai Penerbitan	: Rp.100.000.000.000,-
Tingkat Bunga	: 10,90%
Tanggal jatuh Tempo	: 28 Desember 2025
Peringkat Rating	: A(ind) (Fitch)

Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022 Seri B

Nilai Penerbitan	: Rp.400.000.000.000,-
Tingkat Bunga	: 11,75%
Tanggal jatuh Tempo	: 28 Desember 2027
Peringkat Rating	: A(ind) (Fitch)

Telah mendapat surat izin efektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 27 Desember 2024 Sukuk Ijarah Berkelanjutan Tahap I tahun 2024 senilai satu triliun rupiah.





Milestone Portofolio Bisnis >>

LOGISTIK :

- 2021 STORI Logee
- 2022 *Freighter (Air CargoDomestic), Material Handling Equipment*
- 2023 *Logistik Gov BUMN/D Energi, Pasar Wholesale & International*
- 2022 - 2023 *Platform Digital Logistik, Infrastruktur kargo & warehousing*
- 2024 *Launching GLID*

CEP :

- 2021 PosAja!, CRM Tools, Oranger Mawar & Komunitas, *New platform bisnis end-to-end*
- 2022 *Database kurlog di Clouds, Uji coba EV/e-bike, New CRM*
- 2023 *Akuisisi 3 Juta UMKM, 1.000 AM Pasar Wholesale & International*
- 2021 - 2022 *Integrasi Pick Up Service PosAja!*
- 2022 - 2023 *SPP Jakarta Timur (RFID, RPA, conveyor), War room, Optimalisasi jam layanan*
- 2024 *PosAja UMKM, Integrasi PosAja dengan MyTelkomsel dan BRI mo*

JASA KEUANGAN :

- 2021 *Pospay Fitur QRIS di Pospay, Pospay Agen Platinum*
- 2022 *Fitur Syariah di Pospay, Fitur : Lending, Saving, Insurance & Investment di Pospay*
- 2023 *Digital Payment & Solution E-meterai di Pospay, Sistem Fronting di Pospay*
- 2022 - 2023 *SuperApps*
- 2021 - 2022 - 2023 *Fund Dist Pemerintah Pusat/Daerah*
- 2024 *Penambahan layanan umroh dan wisata halal pada Pospay*

PROPERTI :

- 2021 *Creative Hub (Pos Bloc Jkt)*
- 2022 *Creative Hub (Pos Bloc Mdn, Sby), Aset Management System*
- 2023 *Creative Hub (Pos Co Bdg), SIM Aset*
- 2022 - 2023 *Bisnis Konstruksi, Optimalisasi KC/KCU*
- 2024 *Launching Pos Bloc Surabaya*



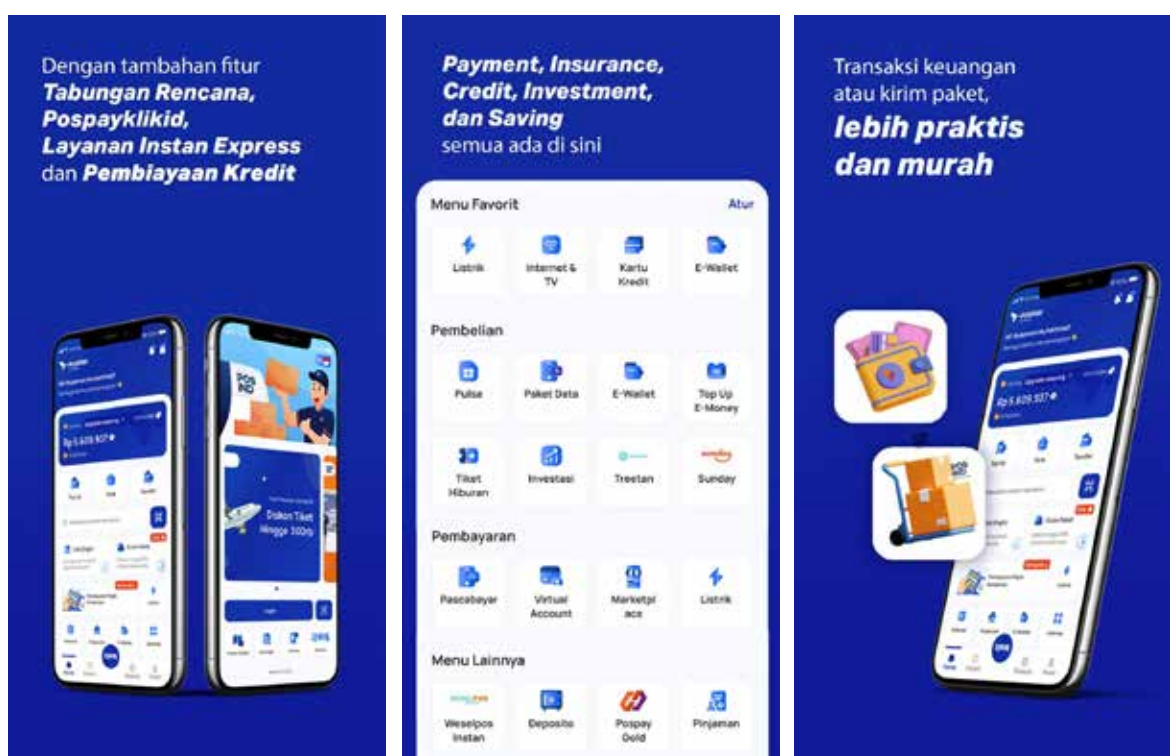
Selain bertransformasi menjadi *logistic company*, PosIND juga mengubah pendekatan dalam menjalankan bisnis yang semula dilakukan berdasarkan pendekatan produk (*product centric organization*) menjadi pendekatan berbasis pelanggan (*customer centric organization*), yang merupakan strategi bisnis yang berpusat pada kebutuhan pelanggan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, sehingga mereka loyal terhadap produk dan layanan Pos Indonesia.



Pospay

PosPay Mobile adalah platform layanan keuangan terintegrasi dengan layanan kurir yang diluncurkan oleh PosIND. Dengan Pospay Mobile, Anda diberikan kemudahan dan fasilitas layanan transaksi keuangan serta pengiriman barang secara mobile yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Berikut beberapa fitur yang bisa diakses:

- Fitur Pembayaran Digital: membayar tagihan listrik, PDAM, cicilan Motor, cicilan mobil, BPJS, pembelian pulsa, token listrik, pembayaran *E-commerce*, dan masih banyak lagi.
- Fitur Transfer Uang
- Fitur Tabungan dan Investasi
- Fitur Pinjaman dan Pembiayaan
- Fitur Pengiriman Paket dan Pelacakan Pengiriman.
- Fitur Scan QR Code untuk pembayaran/pembelian *via merchant/Micro*
- dan lainnya

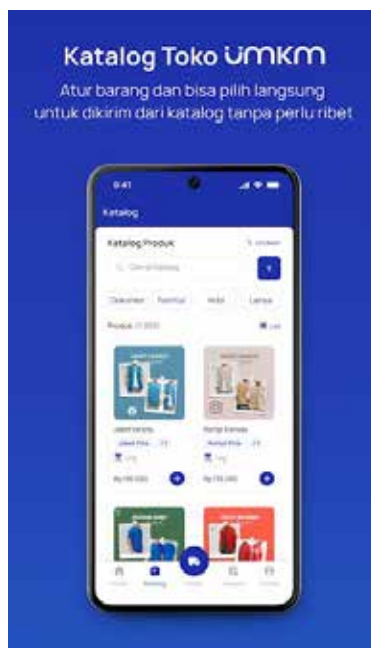
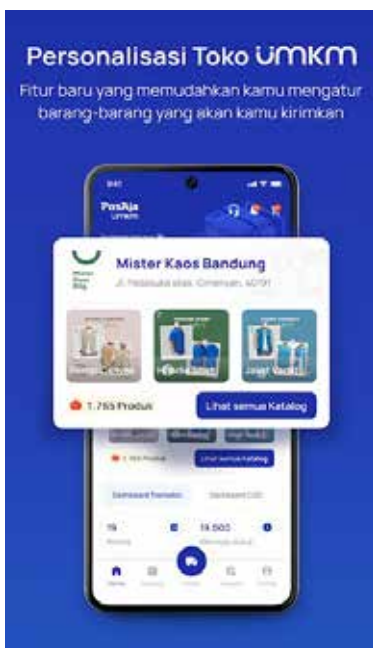


PosAja umkm

PosAja UMKM

PosAja UMKM adalah platform layanan pengiriman barang untuk pelaku UMKM yang baru diluncurkan oleh PT Pos Indonesia (Persero). Layanan ini dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan user pelaku UMKM akan layanan kurir dalam mengembangkan bisnis mereka. Dengan didukung tampilan baru yang lebih fresh dan sistem teknologi yang mumpuni, aplikasi ini mendorong user untuk dengan mudah menggunakan berbagai fitur di aplikasi ini dan menemukan berbagai solusi akan kebutuhan layanan kurir. Berikut beberapa fitur dari aplikasi PosAja UMKM:

- Fitur *Order*. Pelanggan dapat melakukan pemesanan kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi mobile atau website.
- Fitur Penyimpanan Data Kiriman untuk menyimpan alamat dan data kiriman di menu favorit dan katalog, memudahkan transaksi selanjutnya.
- Produk Kiriman Sesuai Kebutuhan UMKM. Berbagai pilihan produk layanan pengiriman, seperti instan langsung sampai, *sameday*, *nextday*, dan *reguler*.
- Berbagai Pilihan Metode Pembayaran. Pelanggan dapat memilih metode pembayaran sesuai kebutuhan, seperti COD, *virtual account*, atau melalui Pospay.
- Fitur *Real-time Tracking* dan Dashboard untuk memonitor status kiriman.
- Fitur Promo. Berbagai promo layanan seperti diskon, poin, dan *voucher* dapat diakses secara teratur untuk mendapatkan penawaran menarik.
- dan lainnya





GLID

Glid adalah platform layanan logistik yang merupakan hasil dari Sinergi *Platform Project Management Office (PMO)* Logistik Indonesia. Glid diinisiasi oleh KBUMN dengan tujuan untuk menurunkan biaya logistik nasional. Terdapat 10 entitas BUMN *Logistic Service Provider (LSP)* yang bersinergi mendukung layanan Glid, yaitu: PosIND, Pelindo, Pelni, ASDP, KAI, Damri, SIER, InJourney, IAS, dan Garuda Indonesia

Glid dirancang dengan berbagai fitur, antara lain:

- a. *Analytical Dashboard*
- b. *Order Management*
- c. *Tracing & Tracking*
- d. *Vendor Management*
- e. *Transport Management*
- f. *Orchestrator Service*
- g. *AR & AP Management*
- h. *3rd Party Integration*

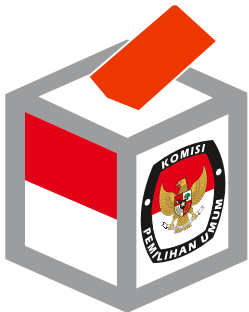
Prestasi Tahun 2024 >>>

1. ***Living Legend Company in Adaptability to Changes Through Business and Digital Transformation*** di ajang Indonesia *Living Legend Companies Awards 2024*. Jakarta, 31 Januari 2024
2. PosIND menerima Penghargaan **BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024** kategori "*Top Contributor BUMN for Communications*". Jakarta, 7 Maret 2024.
3. PosIND bersama PT Pos Properti Indonesia kembali meraih penghargaan dalam ajang **BUMN Award 2024**. Jakarta, 13 Maret 2024
4. PosIND berhasil meraih empat penghargaan **Indonesia CSR Excellence Award 2024**. Bogor, 20 Maret 2024
5. PosIND berhasil menyabet dua penghargaan pada ajang bergengsi **Top CSR Awards 2024** dari Majalah *Top Business* berkat isu *Environment Social and Governance (ESG)*. Jakarta, 29 Mei 2024
6. ***HR Excellence Award 2024 : Wellbeing Management , Reward Management & Talent Retention Strategy dan Learning & Development and Knowledge Management***. Jakarta, 24 Juli 2024
7. PT Pos Indonesia (Persero) mendapatkan Prominent Awards pada **Klaster BUMN dalam Kategori "Excellent Innovation in Digital Financial for Social Economic Mover"**. Jakarta, 9 Agustus 2024
8. ***Top GRC Awards 2024 with 5 star predicate***. Jakarta, 11 September 2024
 - *The Most Committed GRC Leader 2024 for President Director* Faizal Rochmad Djoemadi
 - *The High Performing Board of Commissioners on GRC 2024 by Pos Indonesia Commissioners*
 - *The High Performing Chief Financial Officer & Risk Management Director on GRC 2024 by Director of Finance and Risk Management* Endy Pattia Rahmadi Abdurrachman
9. PosIND meraih penghargaan **"Rising Star in Postal Development"** dari lembaga **internasional Universal Postal Union (UPU)**. Bern, Swis 9 Oktober 2024.

Peristiwa Penting Tahun 2024 >>

Dukungan Proyek Pemerintah dan BUMN

- Penyaluran Cadangan Bantuan Pangan (CBP) di 24 provinsi, berhasil menyalurkan kepada 119 juta penerima.
- Penyaluran Bantuan Penanganan Stunting di 6 provinsi, berhasil menyalurkan kepada 6,2 juta penerima.
- Penyaluran Bantuan AML (Alat Masak Listrik) KSDM, berhasil menyalurkan kepada 127 ribu penerima.
- Penyaluran Bantuan Sembako Tunai, berhasil menyalurkan kepada 17,5 juta penerima.
- Program Keluarga Harapan (PKH) berhasil menyalurkan kepada 3,5 juta penerima.



Logistik Pemilihan Umum (Pemilu 2024)

PosIND melaksanakan Logistik Pemilu baik Pemilu Presiden, DPR dan DPD yang dilaksanakan pada bulan Februari 2024 dengan jumlah KPUD Pilpres sebanyak 175 KPUD serta Pemilu Gubernur Bupati Walikota yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2024 dengan jumlah KPUD PILKADA sebanyak 183 KPUD. Aktivitas yang dilakukan adalah distribusi dari percetakan ke Gudang KPU RI dan KPUD, distribusi lintas negara ke KJRI, distribusi ke PPK/PPS/TPS serta penarikan Kembali logistik dari PPK/PPS/TPS ke Gudang KPUD.

Inovasi Product dan Channel

- Kargo Haji : Kerjasama dengan Mohsen Cargo Service (MCS) untuk penanganan kiriman cargo jamaah haji dari Arab Saudi ke Indonesia. Jumlah kiriman yg berhasil ditangani sebanyak 200 ton.
- BRILink : Pengembangan Agen PosAja! dan Agen BRILink serta integrasi pemanfaatan aplikasi PosAja! dan BRImo
- MyTelkomsel : Layanan "Kirim Barang" PosAja! hadir di MyTelkomsel SuperApp.

Productivity Enhancement

Program Siap Pensiun Dini (SiPenDi) merupakan Program *Productivity Enhancement* untuk meningkatkan produktivitas karyawan yang diikuti oleh 409 pegawai. Program ini berhasil mengefisiensikan biaya HC sebesar Rp 306M sampai dengan karyawan tersebut pensiun. Peserta program SiPenDi dibekali pelatihan *wisdom living*, *financial planning*, *entrepreneurship* serta pelatihan agenpos.

SiPenDi



Penerbitan Sukuk Ijarah

Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I senilai 1,5 triliun berdasarkan Surat ijin KBUMN No:S-577/MBU/11/2024 tanggal 9 Nov 2024 & surat OJK no.S-174/D.04/2024 tanggal 27 Des 2024. Pemeringkatan atas Sukuk Ijarah ini dilakukan oleh PT Fitch Ratings Indonesia, dengan hasil peringkat A(idn)+ atau Single A. Hasil Rating 'A' menunjukkan pertumbuhan *sustainable* didukung oleh tata kelola perusahaan yang semakin baik.

Penyetoran Dividen Pertama

Perseroan kembali dapat menyetorkan Dividen Kinerja tahun buku 2023 senilai Rp 20M, setelah sebelumnya menyetorkan dividen tahun buku 2013 sampai dengan tahun buku 2017.



PMO Logistik

Pengembangan *Platform Global Logistik Indonesia (GLID)* telah mengintegrasikan *database* LSP BUMN & selanjutnya akan dikembangkan menjadi Platform GLID *Ultimate* yaitu *platform aggregator* logistic BUMN berbasis *algoritma* melalui otomasi rute dan tarif *optimization engine*. Mulai tahun 2024, sinergi produk Bersama *Logistics Service Provider (LSP)* BUMN dapat ditransaksikan pada Platform GLID.

Lisensi PJP-1 (Penyedia Jasa Pembayaran Kategori-1)

Implementasi Lisensi PJP-1 (Penyedia Jasa Pembayaran Kategori-1) Bank Indonesia. Pencapaian ini menandai tonggak penting dalam transformasi digital perusahaan, memungkinkan Pos Indonesia untuk menyediakan layanan sistem pembayaran yang lebih luas & inovatif. Dengan lisensi ini, Pos Indonesia dapat memperluas jangkauan layanan keuangan digitalnya, termasuk pengembangan platform pembayaran, integrasi dengan ekosistem *fintech*, dan peningkatan inklusi keuangan di seluruh Indonesia. Langkah ini sejalan dengan upaya perusahaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional dan memperkuat posisi sebagai penyedia layanan keuangan yang berkelanjutan



Mesin Sortir *Robotic*

Implementasi Mesin Sortir *Robotic* berhasil meningkatkan kualitas operasional dan efisiensi biaya di SPP Jakarta Timur dan SPP Surabaya yang berimpact kepada peningkatan *operation speed* +50% dan efisiensi 260 *headcount* (-30%).



Leverage Aset

Perusahaan berhasil melakukan *leverage* atas *asset property* Investasi di 98 lokasi. *Leverage asset* tersebut berimplikasi terhadap selisih nilai revaluasi asset tahun 2024 sebesar Rp 198M dibanding tahun 2023 sebagai konsekuensi penerapan PSAK 240 tentang *Asset Properti Investasi*.





Kaleidoskop 2024



JANUARI

- Peluncuran Nusantara *Logistics* HUB oleh Presiden RI, Nusantara *Logistics* Hub dirancang sebagai *Green Logistics* Hub yang mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan untuk mendukung keberlanjutan operasional.



FEBRUARI

- Sinergi & Integrasi Logistik BUMN dan Launching GLID oleh Wamen BUMN



APRIL

- Pemberangkatan Terakhir Bilah Selubung Garuda Kantor Presiden IKN dg PT Siluet Nyoman Nuarta



MARET

- Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPKH Limited & PosIND terkait Kerja Sama Bisnis Ekosistem Haji & Umrah



MEI

- Peluncuran Prangko Seri Penanda Kota Buk Renteng yg dihadiri oleh Wamen Kominfo, Bupati Sleman & Dir Pos Ditjen PPI



JUNI

- *Launching* Layanan Umroh & Wisata Halal oleh Dir Bisjaskug dg PT Treetan Nusantara Network



JULI

- Launching Tiktok Creator House



AGUSTUS

- PosIND Perkuat Komitmen Keberlanjutan melalui Digitalisasi dan Otomasi Ramah Lingkungan bertepatan PosIND Goes Green di SPP Jakarta Timur yang di Resmikan Oleh Menkominfo, BoC, dan BoD.



OKTOBER

- Pemanfaatan Aplikasi BRImo untuk Transaksi Layanan PosAja!



SEPTEMBER

- Peraihan 4 Penghargaan Top GRC Awards dg Tema Leadership for Sustainable Impact: GRC, ESG, and SDGs dihadiri oleh Dir. Kugmanris
- Upacara Peringatan Hari Bhakti Posel ke-79 dihadiri oleh Wamen BUMN, BOC, & BOD



NOVEMBER

- Kolaborasi POSIND dan Bank BTPN, Penandatanganan Addendum Penerbitan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan



DESEMBER

- Kolaborasi PosIND dengan PT. CEDIFINDO dihadiri oleh Dirut, Dir. BDPM, dan Dir. Biskurlog
- PosIND meraih Penghargaan Top Digital Implementation dalam Ajang IT Works Top Digital Awards 2024 dihadiri oleh Dir. Opdis



—Laporan Kepada Pemegang Saham

Logistik Indonesia



**POS
iND**

Logistik Indonesia

Sambutan Dewan Komisaris



PosIND

telah berkembang secara signifikan dari masa ke masa, mengalami transformasi dari agen pemerintah hingga menjadi perusahaan berbasis logistik yang modern dan berorientasi pada pelanggan. Perjalanan panjang ini menunjukkan adaptasi yang kuat terhadap perubahan pasar serta kebutuhan pelanggan yang terus berkembang.

Pada tahun 2024, PosIND menegaskan visinya untuk menjadi perusahaan penyedia solusi logistik terbaik di Indonesia, dengan strategi yang fokus pada transformasi bisnis, peningkatan pengalaman pelanggan, serta penguatan tata kelola perusahaan yang berbasis teknologi digital

Di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi global dan risiko multidimensi, Dewan Komisaris meningkatkan pengawasan terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko sehingga dapat tercipta pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Perseroan telah memiliki sistem pengendalian internal yang berstandar internasional yaitu Sistem Pengendalian Internal yang dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission* (COSO) yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta aktivitas pemantauan.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Kami Hormati,

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami selaku Dewan Komisaris menyampaikan laporan Pengawasan pengurusan PT Pos Indonesia (Persero) tahun buku 2024. Ditengah persaingan yang semakin ketat pada industri kurir logistik dan jasa keuangan, PT Pos Indonesia (Persero) berupaya memperbesar pangsa pasarnya. Tentu saja upaya ini perlu dilakukan dengan hati-hati dan

disertai dengan pengawasan yang baik. Dewan Komisaris terus mendorong Direksi agar program transformasi terus berfokus pada tujuh aspek utama :

1. Transformasi Bisnis
2. Transformasi Pengalaman Pelanggan
3. Transformasi ESG (*Environmental, Social, Governance*)
4. Transformasi Proses & Teknologi
5. Transformasi Kompetensi
6. Transformasi Organisasi
7. Transformasi Budaya Perusahaan

Dengan strategi yang fokus pada transformasi bisnis, peningkatan pengalaman pelanggan, serta penguatan tata kelola perusahaan yang berbasis teknologi digital, PosIND diharapkan dapat berkembang secara signifikan dari masa ke masa, bertransformasi menjadi perusahaan berbasis logistik yang modern dan berorientasi pada pelanggan. Perjalanan panjang ini menunjukkan adaptasi yang kuat terhadap perubahan pasar serta kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Peningkatan kualitas SDM, perbaikan *cashflow*, tata kelola perusahaan dan penguatan penjualan merupakan pekerjaan rumah yang harus bisa diselesaikan untuk menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan

Dewan Komisaris yakin segala upaya dan strategi yang dijalankan Direksi beserta seluruh jajarannya mampu menjadikan PT Pos Indonesia (Persero) lebih baik, menuju Perusahaan logistik yang terkemuka sesuai dengan aspirasi Pemegang Saham.

Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan Perusahaan dan dasar penilaiannya.

Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris yaitu memastikan proses transformasi berkelanjutan tetap konsisten dan sesuai dengan koridor yang disepakati baik dalam rencana jangka pendek (RKAP) maupun jangka panjang (RJPP). Sepanjang 2024 Dewan Komisaris melakukan pengawasan melalui evaluasi atas Laporan Manajemen bulanan, triwulanan dan laporan lainnya dalam Rapat Internal Dewan Komisaris. Penyampaian saran/pendapat maupun nasihat kepada Manajemen dilakukan pada Rapat Komisaris dengan Direksi (Rakomdir) dan Rapat Komisaris/ Komite dengan Manajemen.

Ringkasan evaluasi Dewan Komisaris untuk Direksi antara lain:

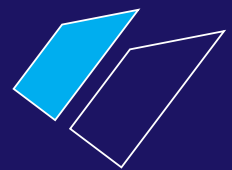
1. Melakukan langkah-langkah eksekusi yang kuat dan konsisten untuk memastikan tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam RKAP.
2. Merealisasikan program kerja untuk menjaga pertumbuhan bisnis dan target pendapatan.
3. Meningkatkan efektivitas strategi pengembangan pendapatan Perusahaan, melalui produk-produk yang telah didukung aplikasi agar diikuti dengan tenaga operasional dan infrastruktur jaringan yang memadai.
4. Realisasi anggaran modal (*capital expenditure*) dilakukan berbasis outcome dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan dampak langsung terhadap pendapatan.
5. Memanfaatkan *Data Analytic* untuk menetapkan strategi yang tepat, serta menaikkan profit margin dengan menambah pangsa pasar yang spesifik, fokus kepada kebutuhan pelanggan.
6. Melakukan evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga agar dipastikan saling menguntungkan, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
7. Melakukan evaluasi kinerja berbasis regional dan produk agar pertumbuhan kinerja menjadi lebih baik di tahun-tahun berikutnya.
8. Menjaga *governance* dalam pengelolaan biaya agar pengeluaran biaya lebih efisien dan memberikan dampak positif terhadap laba.
9. Melakukan percepatan penyelesaian NPP (Nota Permintaan Pembayaran) dalam upaya pengendalian biaya.
10. Untuk perbaikan mutu produk dan layanan yang diindikasikan oleh perbaikan kinerja SWP (Standar Waktu Penyerahan) dan CCH (*Customer Complain Handling*), Direksi agar lebih intens meningkatkan citra perusahaan guna meningkatkan volume penjualan.
11. Memastikan pelaksanaan Program Transformasi dan Inovasi yang telah ditetapkan agar dapat berdampak positif terhadap kinerja dan pendapatan PT Pos Indonesia (Persero).
12. Optimalisasi ekspansi bisnis logistik dan jasa keuangan melalui kolaborasi dengan Pemerintah/ BUMN/ BUMD.

13. Mengefektifkan tugas *Task Force* piutang yang telah dibentuk untuk melakukan upaya penagihan piutang perusahaan.
14. Perlu adanya fungsi di organisasi yang melakukan *A/B Testing Marketing* secara berkala agar dapat menemukan formulasi terbaik untuk memaksimalkan layanan retail yang berpotensi menjadi *product champion*.
15. Meningkatkan transformasi human capital pada kompetensi digital talent untuk mendukung *Data Driven Decision Making*.
16. Memperbaiki sistem pengendalian internal dan manajemen risiko untuk melakukan pengawasan yang bersifat proaktif, sehingga dapat mencegah adanya penyimpangan yang bisa merugikan perusahaan (*early warning system*).
17. Menerapkan sanksi atau penindakan disiplin yang tegas atas setiap fraud yang terjadi, sehingga bisa terbangun wibawa Manajemen serta terciptanya *control environment* yang baik.
18. Melakukan percepatan dan penguatan transformasi perusahaan dalam rangka peningkatan *revenue*, efisiensi biaya dan peningkatan *company value*.
19. Menjalankan kegiatan perusahaan dengan selalu mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sesuai peraturan yang berlaku.

Pandangan atas prospek usaha Perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya.

Dewan Komisaris telah melakukan telaah atas Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RRKAP) Tahun 2025 yang termasuk di dalamnya prospek usaha Perusahaan. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2025 mengusung tema

**“Memperkuat
Kapabilitas dan
Sinergi untuk
Membangun
Kekuatan Daya
Saing yang
Berjangka
Panjang”**



RKAP disusun dengan memperhatikan Analisis Strategi yang mencakup perubahan lingkungan bisnis Perusahaan, berpedoman kepada Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal (APS).

Dewan Komisaris menegaskan PT Pos Indonesia (Persero) untuk fokus menerapkan strategi berkelanjutan dalam operasional perusahaan. Hal ini mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang saling terkait dan berkontribusi terhadap penciptaan nilai jangka panjang bagi perusahaan serta masyarakat

Dewan Komisaris menyampaikan bahwa komitmen yang kuat serta upaya yang sungguh-sungguh dari manajemen dan segenap jajaran PT Pos Indonesia (Persero) adalah prasyarat agar seluruh program kerja dan target yang ditetapkan dalam RKAP Tahun 2025 dapat tercapai, sehingga harapan seluruh *stakeholders* dapat terpenuhi. Berkenaan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris menyarankan kepada Direksi hal-hal sebagai berikut:

1. Memohon persetujuan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas perbedaan target keuangan dan besaran jumlah peruntukan anggaran Investasi (CAPEX) RKAP Tahun 2025 dengan target dan anggaran Tahun 2025 dalam RJPP Tahun 2025-2029.
2. Segera menyosialisasikan RKAP Tahun 2025 agar menjadi pedoman dalam kegiatan operasional perusahaan sehari-hari oleh seluruh insan Pos.
3. Segera melakukan cascading dan menjabarkan RKAP Tahun 2025 kedalam rencana bulanan, menurunkan *key performance indicator* kepada unit-unit kerja dan target kinerja individual. Hendaknya matriks RACI (*Responsible, Accountable, Consulted, Informed*) dapat terimplementasikan dengan baik di Regional dan Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang.
4. Mempersiapkan kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan dari berbagai aspek untuk bertransformasi menjadi Orkestrator BUMN Logistik seperti aspek: Leadership, SDM, Teknologi dan Operasional.
5. Menerapkan *performance management* berbasis *outcome* per kuartal dan menetapkan *profile* dari *digital capabilities front liner* beserta targetnya.
6. Melakukan percepatan digitalisasi dan digitisasi secara terintegrasi pada seluruh proses bisnis, terutama bisnis kurir, logistik dan jasa keuangan yang mampu menyediakan fitur-fitur layanan yang sesuai kebutuhan pelanggan.
7. Meningkatkan *brand awareness* atas layanan unggulan PT Pos Indonesia (Persero) kepada generasi milenial dan gen-z melalui strategi komunikasi marketing yang jelas, tertata dan konsisten.

8. Mengusahakan peningkatan jumlah transaksi yang berkelanjutan pada Pospay (PDAM, Pulsa, PLN, PBB, KAI dan lain-lain)
9. Meningkatkan kualitas pengelolaan kas (*cash management*), melalui perbaikan pengelolaan piutang usaha termasuk administrasi penagihan piutang usaha.
10. Meningkatkan kualitas:
 - a. Penguatan dan penerapan manajemen risiko dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang mungkin mempengaruhi pencapaian target RKAP. Implementasi manajemen risiko dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri BUMN RI Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
 - b. Peran SPI dalam mengevaluasi sistem pengendalian internal dengan cara yang lebih tajam dan tuntas, sehingga dapat diidentifikasi sebab-sebab mendasar kelemahan yang ada.
 - c. Penerapan GCG yang lebih baik dan konsisten sesuai Peraturan Menteri BUMN RI Nomor : PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
 - d. Meningkatkan akuntabilitas dan tertib administrasi dengan menindaklanjuti seluruh temuan dari auditor eksternal (BPK dan Kantor Akuntan Publik) maupun auditor internal perusahaan (SPI).

Dewan Komisaris berkeyakinan seluruh rencana kerja dan prospek usaha yang disampaikan oleh Direksi telah melalui proses analisis yang baik, sehingga target-target yang telah ditetapkan akan tercapai dan dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Pandangan atas penerapan/ pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) di Perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut.

Dewan Komisaris mendorong penerapan WBS yang efektif dan optimal serta terus memperbarui acuan penerapan WBS sesuai dengan best practice yang berlaku umum. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi Pos Indonesia pada tahun 2022 menerbitkan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.026/DIRUT/0322 dan Nomor 072/DEKOM/0322 tanggal 31 Maret 2022 tentang *Whistleblowing system* di PT Pos Indonesia (Persero) sebagai acuan dalam penerapan WBS yang efektif.

WBS berperan memberikan pedoman kepada seluruh Insan Pos atas diketahuinya tindak pidana korupsi, kecurangan dan/atau pelanggaran terhadap perusahaan. Memberikan pedoman pimpinan perusahaan, sehingga memiliki kesempatan untuk mengatasi permasalahan secara internal terlebih dahulu, sebelum permasalahan tersebut merebak ke ruang publik yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan. WBS harus menjadi pedoman bagi seluruh Insan Pos dalam menindaklanjuti terjadinya pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).

Untuk itu penerapan WBS secara efektif diperlukan sebagai sarana untuk mendorong partisipasi karyawan dan masyarakat melaporkan pelanggaran, serta memberikan rasa aman dan perlindungan dalam mencegah terjadinya pelanggaran, kecurangan dan korupsi di perusahaan. Komite audit selaku pengadministrasi WBS selalu mengawasi pengelolaan WBS, laporan administrasi pengelolaan WBS dibuat tiap triwulan dan dikirimkan kepada Dewan Komisaris yaitu:

1. Laporan Pengelolaan Administrasi WBS Triwulan IV tahun 2023 dikirim kepada Dewan Komisaris dengan surat Ketua Komite Audit nomor: C.Pos.7968/KAD 100/KA/2024 tanggal 6 Februari 2024, perihal : Laporan Pengelolaan Administrasi *Whistle Blowing System* (WBS) PT Pos Indonesia (Persero), Triwulan IV Tahun 2023.

2. Laporan Pengelolaan Administrasi WBS Triwulan I tahun 2024 dikirim kepada Dewan Komisaris dengan surat Ketua Komite Audit nomor: C.Pos.29749/KAD 100/KA/2024 tanggal 21 Mei 2024, perihal : Laporan Pengelolaan Administrasi *Whistle Blowing System* (WBS) PT Pos Indonesia (Persero), Triwulan I Tahun 2024.
3. Laporan Pengelolaan Administrasi WBS Triwulan II tahun 2024 dikirim kepada Dewan Komisaris dengan surat Ketua Komite Audit nomor: C.Pos.45538/KAD 100/KA/2024 tanggal 26 Juli 2024, perihal : Laporan Pengelolaan Administrasi *Whistle Blowing System* (WBS) PT Pos Indonesia (Persero), Triwulan II Tahun 2024.
4. Laporan Pengelolaan Administrasi WBS Triwulan III tahun 2024 dikirim kepada Dewan Komisaris dengan surat Ketua Komite Audit nomor: C.Pos.69649/KAD 100/KA/2024 tanggal 29 Oktober 2024, perihal : Laporan Pengelolaan Administrasi *Whistle Blowing System* (WBS) PT Pos Indonesia (Persero), Triwulan III Tahun 2024.

Dewan Komisaris menilai pengelolaan/ pelaksanaan WBS pada Tahun 2024 sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian penyempurnaan WBS tetap perlu dilakukan agar berjalan baik dan efektif.

Dewan Komisaris senantiasa melakukan pemantauan dan pengawasan secara periodik untuk

memastikan berjalannya sistem WBS dengan baik, dalam pelaksanaannya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Satuan Kerja Audit Internal dan unit-unit terkait lainnya dalam rangka melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas laporan yang diterima atas laporan yang diterima.



**POS
IND**

Logistik Indonesia

Sambutan >>> Dewan Direksi

Tahun 2024

merupakan fase terakhir dari RJPP 2020-2024 dan menjadi tonggak awal PosIND menjadi *Logistic Company*.

Melalui implementasi program transformasi dan inovasi yang dilakukan secara konsisten, PosIND berhasil menumbuhkan kinerja finansial RENI (*Revenue, Ebitda, Net Income*) tahun 2024 yaitu *Revenue +8,42%*, *Ebitda (14,93%)* dan *Net Income +2,60%*.

Strategic Results

hasil dari Program Transformasi Perusahaan tahun 2024, memberikan hasil yang baik sebagai berikut

Adaptability (Adaptabilitas)

- *Revenue* usaha 5.017,86 milyar, EBITDA 1.015,67 milyar, dan *Net Income* 747,1 milyar.
- Jumlah rekening di PosPay naik 8,4%, transaksi naik 12,5%, dan akun PosAja! naik 16,4%.

Competitiveness (Daya Saing)

- Market Share Logistik skor 0,1%.
- Market Share CEP skor 2,5%
- Market Share Jasa Keuangan skor 2,4%.

Cost Efficiency (Efisiensi Biaya)

- Biaya operasional turun 27,6%.
- Biaya sumber daya manusia turun 9,4%.

Productivity (Produktivitas)

- Produktivitas SDM naik 8,4%.

Customer Satisfaction (Kepuasan Pelanggan)

- Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) mencapai 8,12 (*Good*).
- *Net Promoter Score* (NPS) mencapai 35,0 (*Great*).

Employee Satisfaction (Kepuasan Karyawan)

- *Employee Engagement* (keterlibatan karyawan) naik menjadi 82,15.
- *Employee Satisfaction* (kepuasan karyawan) naik menjadi 79,04%.

Sedangkan indikator kualitas operasi perusahaan sebagai berikut:

1. SWP tepat waktu *Sameday* 100%, *Next Day* 99%; *Reguler* 98%, *Shopee* 98% (tingkat LDR <2%, nomor 1 dibandingkan kompetitor lain), dan LPU 99% dengan total kiriman rata-rata 6 juta kiriman/bulan;
2. *Broken & Loss* kurang dari 2 PPM atau 0,03% dari total produksi;
3. *Response time Customer Complaint Handling* di 24 jam mencapai 100%;
4. Pengaduan pelanggan dilayani 24 jam x 7 hari seminggu;
5. *War Room* Pengendalian Operasi dilakukan 24 jam x 7 hari seminggu untuk menjamin kualitas operasi semakin baik;
6. Selain itu juga dipastikan bahwa para petugas disiplin dalam proses collecting;
7. meningkatkan kualitas *Proof of Delivery* (POD) khususnya geotagging dan photo on location;
8. Disiplin monitoring penyelesaian kiriman terbuka, dan mitigasi kiriman COD (*Cash on Delivery*) sebagai potensi terjadinya fraud;
9. Kinerja Leg-1 Kiriman Internasional/EMS (perjalanan kiriman sejak diterima di loket hingga diberangkatkan dari kantor tukar) tercapai 93,7% dari standard UPU >=95%;

10. Kinerja Leg-3 Kiriman Internasional (perjalanan kiriman sejak diterima di kantor tukar hingga dilakukan proses antaran di Indonesia) tercapai 97,4% dari standard UPU >=95%

Sementara itu digitalisasi dan otomasi proses operasi terus dioptimalkan dengan penggunaan Mesin Sortir *Robotic* dan RFID di SPP Jakarta Timur dan SPP Surabaya, yang dapat meningkatkan kecepatan proses operasi sebesar 133% serta menurunkan biaya operasi sekitar 39% dibandingkan proses yang dilakukan secara manual.

Berdasarkan hasil pemeriksaan KAP terhadap Kinerja Perusahaan tahun 2024 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut,

1. Opini Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2024 disajikan secara WAJAR, dalam semua hal yang material, posisi Keuangan Konsolidasian PT Pos Indonesia (Persero) dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja Keuangan Konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 mencatat Total Aset sebesar 16,46 triliun atau terdapat pertumbuhan Aset sebesar 20,55% dari tahun 2023 sebesar 13,66 triliun. Ekuitas (hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban) tercatat sebesar 8,95 triliun atau terdapat perubahan ekuitas sebesar 10,07% dibanding tahun 2023 sebesar 8,14 triliun. Perubahan ekuitas selain dipengaruhi oleh kinerja laba Perusahaan, juga dipengaruhi oleh *Other Comprehensive Income* (OCI) yaitu bagian yang tidak terpisahkan dari penyajian Laporan Laba Rugi perusahaan secara keseluruhan akibat revaluasi Properti Investasi.
3. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain, mencatat *Revenue* sebesar 5,018 triliun. Terdapat penurunan beban pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 17,66% dibanding tahun 2023, sehingga Perusahaan bisa menutup tahun buku 2024 dengan Laba Bersih tahun berjalan (EAT) sebesar 747,13 miliar atau tumbuh sebesar 2,59% dibanding laba tahun 2023 sebesar 728,21 miliar.
4. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja menunjukkan Tingkat Kesehatan Perusahaan yang dihitung berdasarkan SK Menteri BUMN nomor: KEP-100/MBU/2002, dengan total skor atas hasil penilaian kinerja tahun 2024 sebesar 79,00 dengan predikat/ dikategorikan "SEHAT A".
5. Laporan Hasil Evaluasi *Key Performance Indicators* (KPI) menunjukkan bahwa Skor key performance indicator (KPI) atas hasil penilaian kinerja manajemen PT Pos Indonesia (Persero) secara Kolegial tercapai sebesar 87,37.

Dalam menjawab tantangan perusahaan di masa yang akan datang, tujuh pilar transformasi menjadi penopang perubahan dalam upaya menjadikan PosIND Perusahaan Logistik berskala global yang tanggung dan berorientasi pelanggan :

1. Transformasi Bisnis: Mencapai peringkat 5 besar perusahaan logistik nasional dengan strategi pertumbuhan yang mengintegrasikan bisnis logistik, kurir, jasa keuangan, dan properti.
2. Transformasi *Customer Experience* (Pengalaman Pelanggan): Berfokus pada peningkatan kepuasan pelanggan dengan mengoptimalkan indeks kepuasan serta merancang ulang tata ruang layanan, beralih dari model *teller* konvensional ke konsep *meeting room* yang lebih interaktif, memberikan kenyamanan, dan meningkatkan kualitas layanan secara personal.

3. Transformasi Bisnis Berkelanjutan: Mematuhi norma ESG (*Environment, Social, Governance*) dengan meningkatkan rasio kepatuhan serta mengadopsi kendaraan listrik (*Electric Vehicle*) dan material ramah lingkungan.
 4. Transformasi Proses & Teknologi: Digitalisasi dan otomatisasi untuk seluruh bisnis proses yang berdampak menekan biaya operasional secara signifikan.
 5. Transformasi Kompetensi: Mengembangkan talenta digital dan membangun *talent pool* yang berkualitas.
 6. Transformasi Organisasi: Beralih dari struktur organisasi berbasis produk ke organisasi yang berorientasi pada pelanggan guna meningkatkan fokus layanan dan responsivitas, melalui pembentukan Direktorat Ritel, UMKM, *Government, Enterprise* serta *Wholesale and International*.
 7. Transformasi Budaya Membangun karakter wirausaha dengan pola pikir digital dan global, serta menanamkan budaya integritas untuk mencegah dan menekan tindakan yang merugikan perusahaan.
- PosIND terus melakukan program-program yang sesuai dengan perkembangan jaman diantaranya :
1. Menjadi Perusahaan Logistik Berorientasi Pelanggan (*Customer Centric Company*)
 2. Menerapkan Budaya *Customer-Centric*
 - **People:** Setiap karyawan harus memiliki *customer-centric mindset*, yaitu memahami, mengutamakan, dan merespons kebutuhan pelanggan dalam setiap aspek pekerjaan.
 - **Process:** Menyederhanakan prosedur dan meningkatkan efisiensi layanan agar lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan harapan pelanggan.
 - **Technology:** Melakukan digitalisasi menyeluruh untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, termasuk pengembangan Pospay Superapps, Pos Aja UMKM dan GLID sebagai solusi layanan yang lebih terintegrasi dan yang lebih *user-friendly*.
 3. Melakukan Perubahan Secara Cepat, Terstruktur, dan Masif agar perusahaan tetap relevan dengan kebutuhan pelanggan dan dinamika pasar. Setiap langkah perubahan harus dirancang secara terstruktur, dengan strategi yang jelas dan terukur. Implementasinya pun harus masif, mencakup seluruh unit kerja dan ekosistem bisnis Pos Indonesia, sehingga transformasi dapat berjalan efektif dan memberikan dampak yang nyata.
 4. Mengubah Sistem Penilaian Kinerja KPI berbasis SKA (*Sender Keep All*)

5. Meningkatkan Reputasi Perusahaan Aktif menyebarkan pesan positif melalui akun resmi dan pribadi, sesuai dengan tiga tema Asta Cita dan selaras dengan arahan Kementerian BUMN, yaitu Dukungan Ekonomi Kerakyatan, Pembangunan Berkelanjutan, dan Kontribusi BUMN terhadap negara.
- Perubahan ini menjadi tanggung jawab manajemen dan seluruh Insan Pos. Dengan semangat gotong royong, inovasi, dan dedikasi, kita akan menjadikan Pos Indonesia lebih kuat, lebih modern, dan lebih dicintai pelanggan.

Susunan Direksi PT Pos Indonesia pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Faizal Rochmad Djoemadi sebagai Direktur Utama,
2. Tonggo Marbun sebagai Direktur Bisnis Kurir dan Logistik,
3. Haris sebagai Direktur Bisnis Jasa Keuangan,
4. Prasabri Pesti sebagai Direktur *Business Development* dan *Portfolio Management*,
5. Hariadi sebagai Direktur Operasi dan *Digital Services*,
6. Asih Kurniasari Komar sebagai Direktur *Human Capital Management*,
7. Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

Semoga apa yang telah kita capai selama tahun 2024 dapat memberikan sumbangsih terbaik bagi seluruh *stakeholder* PosIndonesia. Semoga di tahun-tahun yang akan datang menjadi lebih baik, lebih kompeten, lebih *Customer Centric*, dan menjadi perusahaan kebanggaan nasional.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi dan memberikan keberkahan kepada kita semua.

Aamiin

Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2024 PT Pos Indonesia (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Bandung, 01 Maret 2025

Dewan Komisaris

Rhenald Kasali
Komisaris Utama

Robben Rico
Komisaris

Gunawan Hutagalung
Komisaris

I Gde Made Kartikajaya
Komisaris

Muhammad Budi Djatmiko
Komisaris Independen

Fauzi Baadilla
Komisaris Independen

Direksi



Faizal Rochmad Djoemadi
Direktur Utama



Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko



Hariadi
Direktur Operasi dan Digital Services



Tonggo Marbun
Direktur Bisnis Kurir dan Logistik



Haris
Direktur Bisnis Jasa Keuangan



Prasabri Pesti
Direktur Business Development dan
Portfolio Management



Asih Kurniasari Komar
Direktur Human Capital Management

POS iND

Logistik Indonesia



— Profil Perusahaan



Identitas Perusahaan >>



Logistik Indonesia

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan : PT POS Indonesia (Persero)

Logo : PosIND

Dasar Hukum Pendirian Usaha

Akta Notaris Sutjipto, S.H nomor : 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 5 tanggal 5 Agustus 2024 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta. Dengan status sebagai perseroan terbatas, Perusahaan beroperasi sebagai perusahaan layanan publik yang berorientasi laba yang juga mengedepankan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan dalam operasionalnya.

Status :

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Perusahaan beroperasi sebagai entitas bisnis yang berorientasi laba, dan sebagai perusahaan layanan publik ditugaskan negara untuk menyelenggarakan *Public Service Obligation (PSO)* dengan memberikan Bantuan Operasional Layanan Pos Universal (BO LPU).

Modal Dasar :

Rp.1.500.000.000.000,00

Modal ditempatkan dan disetor penuh

Rp. 455.023.000.000,00

NPWP : 01.001.620.2-093.000

TDP : 9120405752938

Berdiri : 26 Agustus 1746

Beroperasi : 26 Agustus 1746

Telepon : (022) 421 3640

Faksimili : (022) 422 4552

E-mail : halopos@posindonesia.co.id

Website : www.posindonesia.co.id

Bidang Usaha

- Usaha jasa pos dan giro termasuk jasa keuangan secara tunai maupun berbasis giro (*account*);
- Usaha jasa komunikasi, jasa logistik, jasa ritel, jasa keagenan usaha jasa pos dan giro sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Usaha pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki untuk menunjang kegiatan utama Perseroan.

Alamat : Jl. Banda No. 30 Bandung 40115 Jawa Barat - Indonesia

Domisili Usaha : Jl. Banda No. 30 Bandung 40115 Jawa Barat - Indonesia

Perubahan Nama Perusahaan

Sejarah panjang Pos Indonesia bermula ketika Kantor Pos pertama didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) oleh Gubernur Jenderal G.W Baron Van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk menjamin keamanan surat surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa serta bagi mereka yang datang dari dan pergi ke Negeri Belanda. Sejak itulah pelayanan pos telah lahir mengemban peran dan fungsi pelayanan kepada publik.

Setelah Kantor Pos Batavia didirikan, maka empat tahun kemudian didirikan Kantor Pos Semarang untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antara kedua tempat itu dan untuk mempercepat pengirimannya. Rute perjalanan pos kala itu ialah melalui Karawang, Cirebon dan Pekalongan.

Pada awalnya Pos Indonesia berstatus Jawatan PTT (Post, Telegraph dan Telephone). Badan usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan ini operasinya tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik. Dinamika di sektor pos dan telekomunikasi berkembang begitu cepat membuat Pos Indonesia harus menyesuaikan diri maka pada tahun

1965 berganti menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro), dan pada tahun 1978 berubah menjadi Perum Pos dan Giro yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos dan giropos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri.

Masa-masa keemasan industri perposan ada di tahun-tahun 1970 hingga 1980an. Masyarakat pengguna jasa pos sangat setia memanfaatkan layanan pos. Namun pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perubahan gaya hidup, serta tren liberalisasi bisnis jasa pos membuat PT Pos Indonesia (Persero) mengalami pergeseran bisnis yang sangat signifikan. Seperti juga dialami banyak perusahaan pos di dunia, PT Pos Indonesia (Persero) sempat mengalami penurunan kinerja usahanya di tahun 2000–2007. Bisnis suratpos di tahun-tahun tersebut menurun drastis. Penggunaan pesan singkat melalui telepon selular dan internet menggantikan peran surat pos individu. Demikian juga persaingan kiriman barang dengan para perusahaan kurir swasta membuat pangsa pasar PT Pos Indonesia (Persero) tergerus. Keadaan tersebut memaksa PT Pos Indonesia (Persero) untuk berubah dan melakukan transformasi bisnis.



Dengan berjalannya waktu, Pos Indonesia kini telah mampu menunjukkan kreativitasnya dalam pengembangan bidang perposan Indonesia dengan memanfaatkan infrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24 ribu titik layanan yang menjangkau 100 persen kota/kabupaten, hampir 100 persen kecamatan dan 42 persen kelurahan/desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil dengan prinsip inklusifitas sosial dan mendukung pemerataan akses layanan berkelanjutan ke seluruh pelosok negeri. Seiring dengan perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi, jejaring Pos Indonesia sudah memiliki 3.870 Kantor Pos online, serta dilengkapi 23 *e-mobile* pos di beberapa kota besar, 266 loket *extension*, 13.878 agenpos kurir, 101.324 agenpos jasa keuangan (*jaskug*) 13.500 Oranger, Oranger mawar 1.166, serta PosAja! Drop Point 56.111. Semua titik merupakan rantai yang terhubung satu sama lain secara solid & terintegrasi. Sistem Kode Pos diciptakan untuk mempermudah *processing* kiriman pos dimana tiap jengkal daerah di Indonesia mampu diidentifikasi dengan akurat.

Sejak tahun 2009 hingga saat ini manajemen terus berbenah untuk membangun kompetensi perusahaan agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Melalui berbagai program transformasi internal dan bisnis perusahaan. Perkembangan teknologi yang semakin cepat telah menjadi pemicu percepatan proses komunikasi sehingga lebih cepat, praktis dan mudah. Sebagai salah satu penyedia jasa penyaluran informasi dan komunikasi, industri pos juga mengalami dampak dari perkembangan tersebut. Beberapa dampak yang dialami oleh perusahaan adalah terjadinya penurunan volume kiriman surat serta penurunan transaksi jasa keuangan akibat banyak

bermunculannya *provider payment poin online* bank (PPOB) berbasis aplikasi maupun web.

Terjadi perubahan signifikan pada pasar sejak 2020 sehingga Pos harus bergerak lebih cepat dan tepat diantaranya:

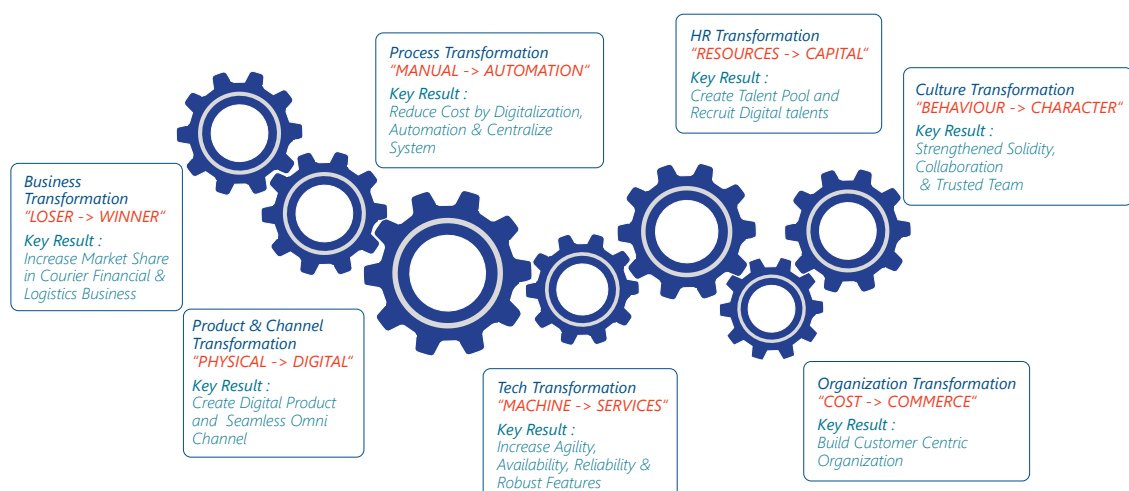
1. Pandemi mengakibatkan penurunan ekonomi makro yang sangat signifikan pada tahun 2020, akibatnya sempat terjadi perlambatan ekonomi pada banyak sektor bisnis di Indonesia yang mempengaruhi proyeksi pertumbuhan ekonomi beberapa tahun ke depan.
2. Layanan digital semakin berkembang pesat akibat perubahan gaya hidup masyarakat pasca pandemi. Akibatnya, solusi terhadap berbagai permasalahan masyarakat semakin banyak dikemas dalam bentuk digital yang mendorong bisnis untuk semakin fleksibel dalam berinovasi.
3. Kompetitor semakin gencar melakukan inovasi dan akuisisi.
4. Banyak korporasi akan mengurangi *space* untuk bisnisnya pada masa *New Normal* (*Virtual Activity*). Dampak dari *New Normal* setelah *pandemic* akan mempengaruhi perilaku dunia usaha dimana akan terjadi kolaborasi dan aktivitas secara virtual.
5. Terganggunya kegiatan ekspor dan impor akibat berkurangnya kegiatan *cargo* udara sehingga mendorong aktivitas melalui kontainer laut. Akibat *pandemic* menyebabkan kegiatan *cargo* udara banyak yang terhenti karena tidak adanya aktivitas penerbangan antarnegara, sehingga akan lebih banyak ekspor dan impor melalui jalur laut via kontainer.

6. Industri Kurir, Logistik, Jasa Keuangan dan Properti telah mengalami perubahan signifikan pada masa pandemi. Dampak dari kondisi pandemic telah merubah tatanan perekonomian dan kebiasaan baru dari masyarakat. Selain itu, pandemi mendorong transformasi digital yang berkelanjutan serta adaptasi bisnis yang responsif terhadap perubahan perilaku masyarakat, sejalan dengan upaya memperkuat sustainability perusahaan melalui inovasi teknologi hijau dan interaksi sosial yang lebih ramah lingkungan..
7. Meningkatnya *Touchless Interaction* Sehingga mendorong untuk inovasi dalam *Digital Service*, aktivitas *new normal* akan semakin didorong pada interaksi secara digital dan hal ini akan mendorong transaksi virtual.
8. Seiring dengan pesatnya perkembangan bisnis yang memicu kepada persaingan yang semakin kompetitif, maka PT Pos Indonesia (Persero) terus melakukan transformasi dan melakukan perubahan *landscape* bisnis, sehingga tetap dapat memiliki daya saing yang kuat untuk bersaing dengan seluruh kompetitor bisnisnya.

Pada tahun 2024, PosIND masih melanjutkan transformasi pada 7 elemen, antara lain:

1. Transformasi pada sektor bisnis, yang dilakukan demi meningkatkan pangsa pasar di bidang bisnis inti, yaitu kurir, jasa keuangan dan logistik.
2. Transformasi *product and channel*, yang dilakukan melalui pembaruan operasional dan layanan teknologi informasi dari semula fisik menjadi digital.
3. Transformasi proses, yaitu melakukan program transformasi proses dari manual menjadi otomasi dengan digitalisasi dan sentralisasi proses.
4. Transformasi teknologi. yaitu untuk meningkatkan kelincahan, ketersediaan, keandalan, dan penguatan fitur pada setiap platform yang dimiliki Pos Indonesia.
5. Transformasi sumber daya manusia (SDM), melalui program transformasi dengan membangun SDM yang kompetitif. Selain itu, membangun kinerja yang produktif, dengan membangun sistem manajemen karyawan.
6. Transformasi organisasi dengan memenuhi kebutuhan unit-unit bisnis sehingga memperkuat proses penjualan dan operasional.
7. Transformasi budaya, menerapkan *core values* AKHLAK sebagai nilai-nilai utama budaya perusahaan

Program Transformasi PosIND 2024



Pada 2020 – 2024 berbagai langkah transformasi yang dijalankan Pos Indonesia telah membuat proses bisnis dan internal terdigitalisasi sehingga layanan dan kinerja Perusahaan semakin baik dalam menghadapi tantangan yang semakin beragam. Komitmen PT Pos Indonesia (Persero) dalam memberi kontribusi maksimal bagi bangsa dan negara tercermin dari peran-peran PT Pos Indonesia (Persero) sebagai berikut:

1. PT Pos Indonesia (Persero) sebagai *community center*, yaitu untuk melayani masyarakat melalui jasa-jasa yang diberikan;
2. PT Pos Indonesia (Persero) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam melayani masyarakat;
3. PT Pos Indonesia (Persero) sebagai perantara komunikasi antar masyarakat, organisasi, hingga negara;
4. Menjadi salah satu infrastruktur negara, khususnya di bidang komunikasi dan logistik.

Sebagai BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas maka PT Pos Indonesia (Persero) tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, keberadaan PT Pos Indonesia (Persero) sebagai BUMN yang bergerak dalam layanan bisnis surat, logistik dan jasa keuangan juga tunduk kepada berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

Sebagai anggota Universal Postal Union (UPU), PT Pos Indonesia (Persero) harus memperhatikan dua prinsip dasar dalam penyelenggaraan layanan pos, yaitu:



1. *SINGLE POSTAL TERRITORY*

Berdasarkan prinsip ini, seluruh wilayah negara anggota UPU termasuk dalam wilayah pos tunggal sehingga Indonesia dianggap sebagai bagian dari wilayah pos tunggal yang merupakan kesatuan bagi pertukaran kiriman pos.

2. *FREEDOM OF TRANSIT*

Berdasarkan prinsip ini, PT Pos Indonesia (Persero) dalam kapasitasnya sebagai operator ditugaskan dan mewakili negara, wajib menyalurkan atau meneruskan seluruh kiriman pos negara lain dengan sarana yang paling aman dan rute tercepat

Perubahan Nama Perusahaan

1. PTT (Post, Telegraaf, en Telefoondienst) tahun 1875
2. Djawatan PTT (Pos, Telegrap, Telepon) pada tahun 1945;
3. Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) di tahun 1961
4. PN Pos & Giro di tahun 1965
5. Perum Pos dan Giro di tahun 1978.
6. PT Pos Indonesia (Persero) secara resmi digunakan pada tahun 1995.

1877 UNION POSTALE UNIVERSELLE

Sejak pemerintahan kolonial dinas pos pemerintahan Hindia Belanda sudah berhubungan dalam pengiriman surat dan barang secara internasional, sehingga tercatat sebagai anggota Union Postale Universelle (UPU).

1945 HARI BAKTI POSTEL

Pada saat pendudukan Jepang di Indonesia, jawatan PTT dikuasai oleh militer Jepang, 27 September 1945 Angkatan Muda PTT mengambil alih kekuasaan PTT dan secara resmi berubah menjadi Jawatan PTT Republik Indonesia. Peristiwa tersebut diperingati menjadi Hari Bakti PTT atau Hari Bakti POSTEL.

1978 PERUSAHAAN UMUM POS DAN GIRO

Pada tahun 1978 berubah menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas suratpos dan dinas giropos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri.

1991 PT DAPENSI DWI KARYA.

Salah satu unit usaha Dapenpos yang bergerak dibidang jasa layanan transportasi yang mendukung kegiatan PT Pos Indonesia (Persero) dan perusahaan-perusahaan lainnya

1995 PT POS INDONESIA (PERSERO)

Selama 17 tahun berstatus Perusahaan Umum. Pada tanggal 20 Juni 1995 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia (Persero).

2001 POLITEKNIK POS INDONESIA

Politeknik Pos Indonesia merupakan institusi yang didirikan oleh YBPPI berdiri dengan bidang Perguruan Tinggi pada jalur Diploma III dan Diploma IV

2013 PT POS PROPERTI INDONESIA

PT Pos Properti Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk memberikan solusi bisnis dalam bidang *property development* dan *property management consultant*.

2019 PT POS FINANSIAL INDONESIA

PT Bhakti Wasantara Net bertransformasi menjadi PT Pos Finansial Indonesia (PosFin) dengan wajah baru dengan layanan berbasis teknologi yaitu *digital payment* dan *digital solution*

1875 POST EN TELEGRAAFDIENST

Dinas pos disatukan dengan dinas telegraf dengan status jawatan dengan nama POST EN TELEGRAFDIENST.

1906 PTT (Post, Telegraaf, en Telefoondienst)

Pemerintah Hindia Belanda membentuk Dinas PTT

1965 PN POS DAN GIRO

Mengamati perkembangan zaman di mana sektor pos dan telekomunikasi berkembang sangat pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro).

1988 DANA PENSIUN POS INDONESIA

Berdiri sebagai Badan Hukum yang menyelenggarakan Program Pensiun yaitu suatu program yang menjajikan sejumlah uang yang pembayarannya dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu.

1992 PT DAPENSI TRIO USAHA

Salah satu unit usaha Dapenpos sekaligus sebagai afiliasi PT Pos Indonesia (Persero) dengan konsentrasi bisnis Business Process Outsourcing (BPO), Cleaning Service, Security Service, Main Agent Pospay dan General Trading.

2000 YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA (YPBPI)

(YPBPI) bernaung secara langsung dibawah pengawasan PT Pos Indonesia (Persero) berdiri dibidang institusi pendidikan tinggi.

2012 PT POS LOGISTIK INDONESIA

PT Pos Logistik Indonesia berdiri dengan bidang usaha jasa transportasi, jasa pergudangan, pengiriman kargo, dan regulated agent atau agen inspeksi.

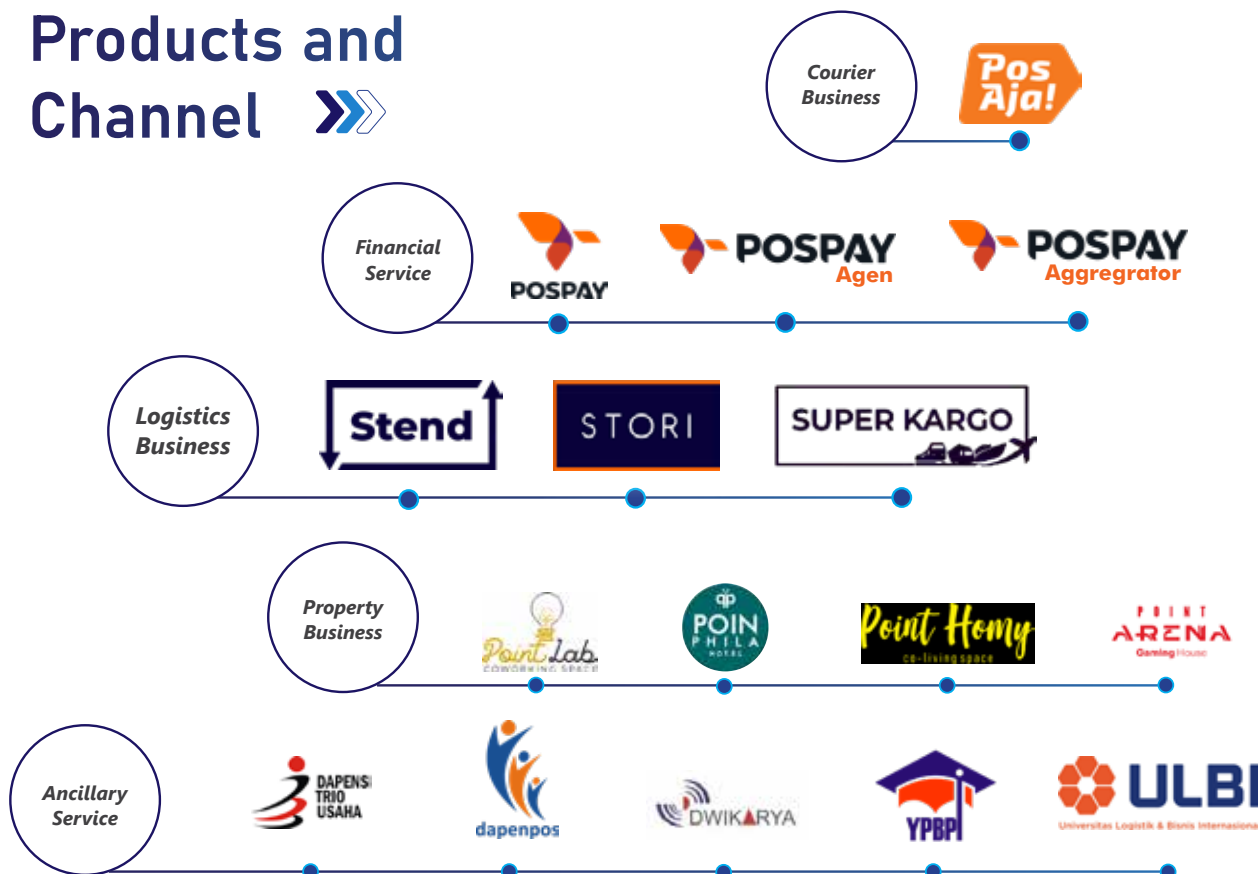
2013 SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN LOGISTIK (STIMLOG)

STIMLOG merupakan institusi yang didirikan oleh YBPPI, berdiri dengan bidang Perguruan Tinggi Manajemen Logistik untuk jenjang strata-1 (S1) yang pertama di Indonesia.

2021 PENATAAN DAN PENGUATAN PONDASI

Penataan kembali dan penguatan fondasi digitalisasi layanan Pos Indonesia dengan transformasi berkelanjutan untuk merebut kembali pangsa pasar dan menjadi "Top 25 Global Operator in UPU Rank" dan "Top 3 Domestic E-commerce Courier Provider"

Products and Channel



Physical Channel

International Coverage

232 Negara

Domestic Coverage

6.592
Kecamatan

74.954
Desa

6
Regional

2.214
KCP Non LPU

42
KCU

2.376
KCP LPU

168
KC

941
Mitra LPU

Digital Channel

1

Retail Customer

POSPAY

NOA
5,4 Juta

2

MSME's Customer

PosAja
UMKM

NOA
856,7 Ribu

3

Corporate Customer

GLID

NOA
207

Bidang Usaha >>>

Berdasarkan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 5 tanggal 5 Agustus 2024 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta. Dengan status sebagai perseroan terbatas, Perusahaan beroperasi sebagai perusahaan layanan publik dan entitas bisnis yang berorientasi laba.

PT Pos Indonesia (Persero) senantiasa bertekad untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga mampu turut serta memajukan perekonomian nasional melalui paduan layanan yang diberikan hingga ke seluruh pelosok negeri.

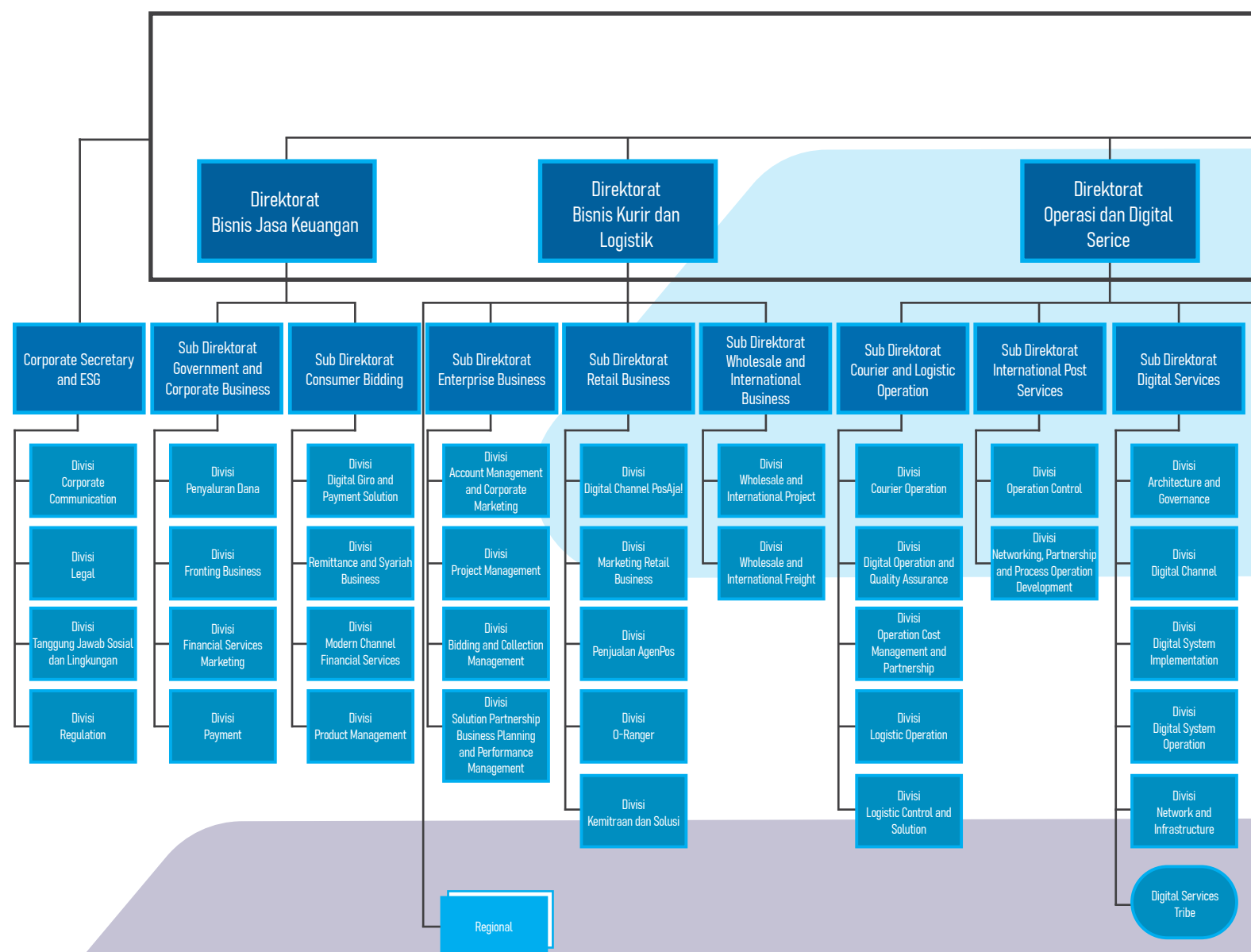
Hingga saat ini, PT Pos Indonesia (Persero) melaksanakan kegiatan pos dengan bertumpu kepada tiga bisnis inti yaitu layanan pengiriman surat dan paket, logistik, jasa keuangan, serta bisnis pendukung yaitu bisnis teknologi informasi dan bisnis ritel dan properti, dengan komitmen memperkuat aspek keberlanjutan sosial dan lingkungan sebagai bagian dari strategi bisnis terpadu. Di masa depan, melalui sebaran dan luasnya jaringan yang dimiliki, PT Pos Indonesia (Persero) akan memanfaatkan jaringan tersebut untuk mengembangkan keseluruhan portofolio bisnisnya, sehingga PT Pos Indonesia (Persero) tidak hanya menjadi penyelenggara pos, tetapi juga mampu bertransformasi menjadi perusahaan logistik yang terintegrasi dan mampu memberikan solusi.





Struktur organisasi >>>

Untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam bidang bisnis, keuangan dan aset, perlu dilakukan perubahan pada Direktorat Bisnis Kurir dan Logistik, Direktorat Operasi dan *Digital Services*, dan Direktorat Keuangan dan Manajemen Resiko, serta Corporate Secretary and ESG sebagai penguatan komitmen perusahaan dalam pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang berkelanjutan. maka dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (PERSERO) Nomor: KD.013/DIRUT/0323 Tentang Organisasi dan Tata Kerja, berikut Struktur organisasi yang telah diperbaharui.





Berdasarkan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 5 tanggal 5 Agustus 2024 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta. Dengan status sebagai perseroan terbatas, Perusahaan beroperasi sebagai perusahaan layanan publik dan entitas bisnis yang berorientasi laba.

Visi

“Menjadi postal operator, penyedia jasa kurir, logistik dan keuangan paling kompetitif”.

Misi

Bertindak efektif untuk mencapai performance terbaik.

Tujuan

Membangun bangsa yang lebih berdaya saing sejahtera.

Untuk mewujudkan visi dan misi, persyaratan utama (*key words*) yang perlu dilakukan adalah:

1. Memberikan produk yang relevan sesuai kebutuhan pasar;
2. Memberikan jasa layanan yang prima;
3. Menjalankan proses bisnis secara efisien;
4. Membangun solusi teknologi informasi yang prima dan *human capital* yang handal;
5. Memperkuat sistem pengendalian *internal, governance*, dan manajemen risiko untuk mencapai tingkat kematangan yang memadai untuk mengamankan pencapaian tujuan perusahaan.

OBJEKTIF STRATEGIS

Objektif Strategis dibagi menjadi dua kategori yaitu objektif strategis “*primary*” dan objektif strategis “*secondary*” sebagai berikut :

Primary : “*Top 25 Global Operator in UPU Rank*”
Secondary : “*Top 3 Domestic E-commerce Courier Provider*”

Budaya Perusahaan

Budaya perusahaan adalah karakter dan kepribadian dari Perusahaan. Budaya perusahaan juga merupakan ringkasan dari nilai-nilai perusahaan, tradisi, interaksi, sikap dan perilaku dari setiap Insan Pos Indonesia. Untuk mendorong kinerja yang positif maka budaya perusahaan haruslah selaras dengan strategi dan kepemimpinan. Untuk mendukung terwujudnya visi, misi tujuan dan strategi bisnis, Pos Indonesia telah menetapkan AKHLAK sebagai nilai utama Budaya Perusahaan.

AKHLAK

Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan

Kompeten

Terus belajar mengembangkan kapabilitas

Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan

Loyal

Berdedikasi & mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

Adaptif

Terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan ataupun menghadapi perubahan

Kolaboratif

Membangun kerjasama yang sinergis

Kami bekerja secara amanah dan kompeten, dengan membangun hubungan yang harmonis dan sikap loyal, menjalankan bisnis secara adaptif, serta mengembangkan kerjasama kolaboratif.

Nilai-nilai AKHLAK

Selanjutnya diinternalisasikan dan dilaksanakan oleh setiap insan Pos Indonesia sehingga menjadi budaya kerja, diintegrasikan ke dalam sistem dan prosedur yang berlaku, dan menjadi dasar pembentukan karakter Sumber Daya Manusia di PT Pos Indonesia.

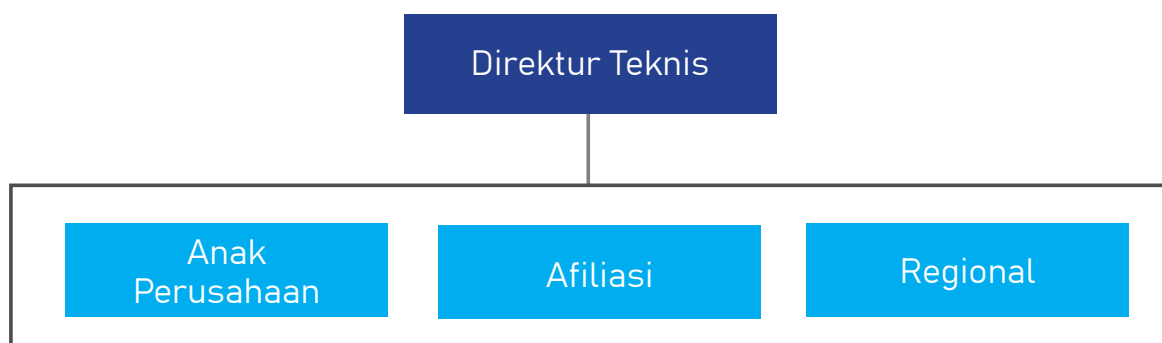
1. Memenuhi janji dan komitmen.
2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
4. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
5. Membantu orang lain belajar.
6. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
7. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
8. Suka menolong orang lain.
9. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
10. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara.
11. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
12. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
13. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
14. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
15. Bertindak proaktif.
16. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
17. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
18. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Parenting system - srategic control

Pengembangan organisasi perusahaan sangatlah diperlukan untuk mendukung bisnis supaya tetap bertahan dan berkembang. *Ambidextrous* – sebuah organisasi yang secara bersamaan mampu mengeksplorasi masa kini dan menciptakan masa depan. Saat ini, tampaknya ada kebutuhan mendesak bagi para pemimpin yang *ambidextrous*. Para pemimpin saat ini berada di bawah tekanan besar untuk berprestasi. Orientasi jangka pendek meresap, dan tampaknya tidak ada yang punya waktu untuk memikirkan jangka panjang. Di satu sisi, para pemimpin harus tegas – tentang segala hal mulai dari gangguan, keragaman, hingga pelecehan seksual. Jika melihat model pengambilan keputusan klasik, mereka memiliki banyak langkah yang terlibat. Mengumpulkan informasi, menganalisis alternatif, dan memikirkan konsekuensinya

semuanya dapat menghabiskan waktu yang berharga. Keputusan instant yang sebagian besar didasarkan pada intuisi mungkin modis tetapi dapat berakibat serius. Di sisi lain, pemimpin perlu menjadi pendengar yang baik. Kita tidak akan pernah bisa memprediksi di mana kabar baik (atau kabar buruk, dalam hal ini) akan muncul. Yang lebih sulit diprediksi adalah dampak waktu terhadap cara seorang pemimpin merespons berita.

Induk memiliki kontrol yang ketat terhadap strategi bisnis anak perusahaan & afiliasi agar tetap *inline* dengan strategi korporat. Oleh karena itu, direktur yang terkait langsung dengan bisnis anak perusahaan & layanan afiliasi ditunjuk sebagai komisaris anak perusahaan



Parenting Strategy

PT Pos Indonesia (Persero) menentukan *parenting strategy* dengan pilihan *Strategic Control*. Pilihan strategi yang mengutamakan hubungan induk dengan anak :

1. *Strategic control* dengan memberikan otonomi dan otoritas korporasi.
2. Mekanisme *control* dengan *score card company performance*
3. Membuka opportunity kolaborasi optimasi *resources* dan *economies of scale*
4. Sinergi *Business* lebih *flesxible* dan *focus*.
5. Pengembangan Korporasi dengan *inorganic*.

Strategic Control

- Filosofi Strategis
Sinergi dan Kompetensi inti
- Peran *Holding*
Menentukan strategi anak perusahaan berbasis potensi sinergi dan kompetensi antar anak perusahaan
- Peran Anak Perusahaan
Fokus di eksekusi operasional memberi masukan untuk strategi usaha
- Ekosistem Bisnis *Low Similiar Businesses*
- Metode Kendali
Corporate Scorecard yang komprehensif

Makna logo

POS
iND
Logistik Indonesia

POS Diambil dari "Pos Indonesia", membawa aspirasi perusahaan untuk menjadi solusi layanan logistik yang terintegrasi dan efisien.

IND Singkatan dari Integrated National Distribution. Kata "*Integrated*" mencerminkan sinergi dan kerja sama; "*National Distribution*" sebagai cerminan komitmen dan dedikasi untuk melayani berbagai kebutuhan logistik negara.

Merupakan deskripsi merek, sebagai penguat identitas dan tujuan perusahaan serta statement bahwa ini adalah Logistik Indonesia

DEWAN KOMISARIS >>

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN susunan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	SK Menteri
Rhenald Kasali	Komisaris Utama	SK-223/MBU/07/2021
Gunawan Hutagalung	Komisaris	SK-231/MBU/10/2022
Robben Rico	Komisaris	SK-85/MBU/04/2023
I Gde Made Kartikajaya	Komisaris	SK-14/MBU/01/2024
Muhammad Budi Djatmiko	Komisaris Independen	SK-176/MBU/07/2024
Fauzi Baadilla	Komisaris Independen	SK-176/MBU/07/2024





Lahir : Jakarta, 13 Agustus 1960
Usia : 64 Tahun
Kebangsaan : Indonesia
Domisili : Jakarta, Indonesia

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pos Indonesia (Persero) sejak 02 Juli 2021 berdasarkan SK-223/MBU/07/2021

Rhenald Kasali
Komisaris Utama**Pendidikan**

- S1 Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi & Bisnis, 1985
- S2 University of Illinois at Urbana & Champaign, USA, Faculty of Business Administration/MS, 1993
- S3 University of Illinois at Urbana & Champaign, USA, Faculty of Consumer Economics/Ph.D, 1998

Perjalanan Karir

- Director PT Djemat, Samhani & Partners, 1986-1988
- Kepala Bagian Publikasi & Data Lembaga Manajemen FEUI, 1998-1992
- PLH Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional, 2005-2006
- Komisaris PT Kemenangan Jaya, 2000- 2007
- Komisaris PT Radio Smart FM, 2002- 2009
- Pengajar Sespim dan Sespimti POLRI, 2000-sekarang
- Komisaris PT Dirgantara Indonesia, 2003- 2006
- Komisaris Independen PT Indofarma, Tbk, 2003-2006
- Yayasan Rumah Perubahan, 2007-sekarang
- Komisaris Independen PT Indomobil Finance Indonesia, 2004-2009
- Wakil Ketua, Tim Independen Reformasi Birokrasi dan Penataan Organisasi Pemerintahan RI di bawah pimpinan Wapres & Kementerian PAN RB, 2015-Sekarang
- Komisaris Utama PT. Angkasa Pura II (Persero), 2015-2019
- Komisaris Utama PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, 2019 -2021

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan di instansi, lembaga, atau perusahaan selain PT Pos Indonesia (Persero).



Lahir : Tarutung, 19 Agustus 1975
Usia : 49 tahun
Kebangsaan : Indonesia
Domisili : Tangerang, Indonesia

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) sejak 19 Oktober 2022 berdasarkan SK-231/MBU/10/2022.

Gunawan Hutagalung

Komisaris

Pendidikan

- Sarjana Teknik Informatika, STT Telkom, Bandung, 1998
- Magister Teknik Elektro, Universitas Indonesia, 2007

Perjalanan Karir

- Kasi Tarif Telekomunikasi di Direktorat Telekomunikasi, Ditjen Postel, Kemenkominfo, 2006–2011
- Koordinator Lelang Desa Berdering di Direktorat Telekomunikasi, Ditjen Postel, Kemenkominfo 2009
- Kasi Penerapan Teknologi Telekomunikasi di Direktorat Telekomunikasi, Ditjen PPI, Kemenkominfo, 2011 – 2016
- Kasubdit Telekomunikasi Khusus dan Kelayakan Penyelenggaraan Telekomunikasi di Direktorat Telekomunikasi, Ditjen PPI, Kemenkominfo, 2016–2018
- Kasubdit Jasa Telekomunikasi/Analisis Kebijakan Ahli Madya/Koordinator Jasa Telekomunikasi di Direktorat Telekomunikasi, Ditjen PPI, Kemenkominfo, 2018 – 2021
- Anggota Komite Auditee Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di BAKTI, Kemenkominfo, 2019 – Sekarang
- Direktur Pengendalian Pos dan Informatika di Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Ditjen PPI, Kemenkominfo 2021 – 5 Januari 2023
- Plt. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika, di Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Ditjen PPI, Kemenkominfo 6 Januari 2023 – Sekarang
- Direktur Pos di Direktorat Pos, Ditjen PPI, Kemenkominfo 6 Januari 2023 – Sekarang

Rangkap Jabatan

Merangkap jabatan sebagai Direktur Pos, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI), Kemkominfo dan Plt. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika, Ditjen PPI, Kemenkominfo



Lahir : Tabanan, 11 Desember 1966
Usia : 58 Tahun
Kebangsaan : Indonesia
Domisili : Depok, Indonesia

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) sejak 18 Januari 2024 berdasarkan SK-14/MBU/01/2024

I Gde Made Kartikajaya

Komisaris

Pendidikan

- S1 Manajemen Keuangan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Jayanegara, Malang, 1986
- S2 Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Daerah pada Universitas Sumatera Utara, 1996
- S2 Manajemen Institut Megister Manajemen Indonesia, 2007
- S2 Administrasi Publik Universitas Medan Area, 2009
- S3 Ekonomi Universitas Borobudur, 2017

Perjalanan Karir

- CO. Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) (1995)
- Kasubdit Ekonomi BIN (2011)
- Dosen Pengajar pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) (2014)
- Direktur Ekonomi BIN (2015)
- Deputi Intelijen Ekonomi BIN (2019 – sekarang)
- Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk (2022 – 2023)

Rangkap Jabatan

Deputi Intelijen Ekonomi BIN



Lahir : Madiun, 13 September 1980
Usia : 44 Tahun
Kebangsaan : Indonesia
Domisili : Surabaya, Indonesia

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) sejak 13 April 2023 berdasarkan SK-85/MBU/06/2023.

Robben Rico
Komisaris**Pendidikan**

- DIII LLAJ STTD Bekasi, 2002
- S1 Ilmu Hukum Universitas Merdeka Surabaya, 2005
- S1 Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2008
- S2 Ilmu Administrasi Universitas DR. Soetomo, 2018
- S3 Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, 2023

Perjalanan Karir

- Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Bidang Lalu Lintas, Dishub Kota Surabaya, 2010 - 2017
- Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Surabaya, Dishub Kota Surabaya, 2017 - 2018
- Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Setda Kota Surabaya, 2018 - 2019
- (Plt) Kepala Bagian Administrasi Perekonomian, Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kota Surabaya, 2019
- (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, 2019 - 2020
- Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, 2020 - 2021
- Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2021 - 2022
- (Plt) Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2022 - 2023
- Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2023

Rangkap Jabatan

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia



Lahir : Brebes, 16 September 1964
Usia : 60 Tahun
Kebangsaan : Indonesia
Domisili : Bandung, Indonesia

Menjabat sebagai Komisaris Independen PT Pos Indonesia (Persero) sejak 16 Juli 2024 berdasarkan SK-176/MBU/07/2024.

Muhammad Budi Djatmiko

Komisaris Independen

Pendidikan

- S1 Manajemen Universitas Terbuka 1987
- S1 Statistik Universitas Terbuka 1987
- S1 Teknik Manajemen Industri 1987
- S1 Matematika Institut Teknologi Bandung 1987
- S2 Administrasi Bisnis universitas Padjadjaran 2000
- S2 Ekonomi Islam Universitas Negeri Sunan Gunung Djati 2010
- S3 Ekonomi Pembangunan Universitas Indonesia 2004
- S3 Manajemen Strategik Universitas Padjadjaran 2004

Perjalanan Karir

- Pengurus KADIN Jawa Barat 1988 – 1991
- Pengurus GAPENSI Kota Bandung 1989 – 1992
- Komisaris Utama PT Kualitas Nasional Indonesia 1990 – 2005
- Ketua dan Pembina Rumah Yatim dan Tafizh Quran Madani 1997 – sekarang
- Direktur Utama PT Hafara Indonesia 1999 – 2005
- Guru Besar Bidang Inovasi Pemerintah China 2005 – 2005
- Ketua APTISI Jawa Barat 2012 – 2014
- Komisaris Utama PT Edu Sarana Informatika 2013 – sekarang
- Dewan Pembina ICMI Jawa Barat 2022 – sekarang

Rangkap Jabatan

Ketua dan Pembina Rumah Yatim dan Tafizh Quran Madani, Komisaris Utama PT Edu Sarana Informatika, Dewan Pembina ICMI Jawa Barat



Lahir : Cairo, 25 September 1979
Usia : 45 Tahun
Kebangsaan : Indonesia
Domisili : Jakarta, Indonesia

Menjabat sebagai Komisaris Independen PT Pos Indonesia (Persero) sejak 16 Juli 2024 berdasarkan SK-176/MBU/07/2024.

Fauzi Baadilla

Komisaris Independen

Pendidikan

- S1 Teknik Informatika Bina Mulya 2004

Perjalanan Karir

- TV Presenter 2000 – 2023
- Aktor 2000 – sekarang
- Produser film 2011 – sekarang
- Consultant Director 2018 – sekarang
- Aktivis Kemanusiaan 2018 – sekarang
- Koordinator Nasional Relawan 2023 – 2024

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan di instansi, lembaga, atau perusahaan selain PT Pos Indonesia (Persero).

Dewan Direksi

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Pos Indonesia (Persero), tanggal 23 Desember 2020 nomor: SK-301/MBU/09/2020, tanggal 18 Maret 2021 nomor: SK-91/MBU/03/2021, tanggal 16 April 2022 nomor: 97/DEKOM/0422, tanggal 25 Juli 2022 nomor: 192/DEKOM/0722, tanggal 19 Oktober 2022 nomor: SK-230/MBU/10/2022, dan tanggal 21 September 2023 SK-260/MBU/09/2023 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pos Indonesia (Persero), susunan jabatan sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Faizal Rochmad Djoemadi	Direktur Utama
Tonggo Marbun	Direktur Bisnis Kurir dan Logistik
Hariadi	Direktur Operasi dan <i>Digital Services</i>
Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Haris	Direktur Bisnis Jasa Keuangan
Prasabri Pesti	Direktur <i>Business Development</i> dan <i>Portfolio Management</i>
Asih Kurniasari Komar	Direktur <i>Human Capital Management</i>

Lahir : Blitar, 12 Desember 1967
Usia : 57 Tahun
Kebangsaan : Indonesia
Domisili : Jakarta, Indonesia

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) sejak 23 September 2020 berdasarkan SK-301/MBU/09/2020

**Faizal Rochmad Djoemadi**

Direktur Utama

Pendidikan

- Bachelor of Electrical Eng. – Telecommunication, Sepuluh Nopember Institute of Technology(ITS), Surabaya – Indonesia, 1991
- Master of Electrical Engineering, University of Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan – Canada, 1998
- Doctor of Management, Brawijaya University, Malang – Indonesia, 2019

Perjalanan Karir

- President Director – TELIN (2016–2019)
- EVP Wholesale Service Division – Telkom Indonesia (2015–2016)
- Board of Commisioner – Patrakom (2013–2015)
- Board of Commisioner – Mitratel (2015–2019)
- BoD Chairman – TELIN Singapore, Hongkong & Australia (2016–2019)
- BoC Chairman – Metranet (2019–2020)
- BoC Chairman – Telkom Sigma (2019–2020)
- Chief of Digital Business & Innovation Officer – Telkom Indonesia (2019–2020)

Rangkap Jabatan

Saat ini tidak memiliki rangkap jabatan di instansi atau perusahaan manapun selain di PT Pos Indonesia (Persero).

Lahir : Jakarta, 20 Desember 1970
Usia : 54 Tahun
Kebangsaan : Indonesia
Domisili : Jakarta, Indonesia

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia (Persero) sejak 21 September 2023 berdasarkan SK-260/MBU/09/2023.

**Tonggo Marbun**

Direktur Bisnis Kurir dan Logistik

Pendidikan

- IKIP, Jakarta (1994)
- *Talent Management & Succession Planning*, Asia Business Forum, Kualalumpur, Malaysia (2003)
- *Leadership for Senior Manager*, INSEAD (France) The Business School for the World, Jakarta (2008)
- *Great Leadership Program Cohort 2 Modul 1 & 2*, IESE Business School, Jakarta & Madrid, Spanyol (2018)
- *Great Leadership Program Cohort 2 Modul 3 & 4*, IESE Business School, Jakarta & Silicon Valley San Fransisco, Amerika Serikat (2019)

Perjalanan Karir

- VP ERO Government Relation PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018)
- SVP Government, Project Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019-2020)
- Komisariss PT Sumberdaya Andalas Mandiri (MPRO), 2020
- VP Human Capital Engagement PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2020)
- Direktur SDM & Umum PT Pos Indonesia (Persero) (2020 - 2023)

Rangkap Jabatan

Saat ini tidak memiliki rangkap jabatan di instansi atau perusahaan manapun selain di PT Pos Indonesia (Persero)

Lahir : Duri, 05 Oktober 1979
Usia : 45 Tahun
Kebangsaan : Indonesia
Domisili : Jakarta, Indonesia

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Operasi dan Digital Service PT Pos Indonesia (Persero) sejak 19 Oktober 2022 berdasarkan SK-230/MBU/10/2022

**Hariadi**

Direktur Operasi dan Digital Service

Pendidikan

- S1 Fakultas Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung, 2002
- Master of Science (M.Sc) Universitas Duisburg – Essen (Gerhard Mercator Universität Duisburg) Departement of Mechanical Engineering, Specialization in Production and Logistics (2006)

Perjalanan Karir

- Head of Strategy & Revenue Management Executive Assistant Managing Director, DHL Global Forwarding (2007 – 2010)
- Director of Contract Logistics – Logistics Management Services; Director of Oil & Energy – Industrial Project; Director of Domestic Freight; Board Member, DHL Global Forwarding (2011 – 2015)
- Director of Industrial Project : Board Member, DHL Global Forwarding (2015 – 2017)
- Country Head – Indonesia, Director Representative for PT Quantum Solutions Logistics Indonesia, a member of The Singapore Pos Group of Companies (2017 – 2020)

Rangkap Jabatan

Saat ini tidak memiliki rangkap jabatan di instansi atau perusahaan manapun selain di PT Pos Indonesia (Persero)



Lahir : Palembang, 03 Januari 1963
Usia : 61 Tahun
Kebangsaan : Indonesia
Domisili : Jakarta, Indonesia

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pos Indonesia (Persero) sejak 18 Maret 2021 Berdasarkan SK-91/MBU/03/2021

**Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman**

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

Pendidikan

- S1 Teknik Mesin, Roger William College Rhode island, Amerika Serikat (1984)
- S1 Teknik Mesin, Boston University, Amerika Serikat (1988)
- S2 Master of Business Administration, South New Hampshire University, Amerika Serikat (1989)

Perjalanan Karir

- Credit and Operational Risk Director, Bank Ekonomi Rakyat (2011–2014)
- Direktur Utama and CEO, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2014–2017)
- Komisaris Independen, PT Zurich Topaz Life Indonesia (2018)
- Komisaris Independen, FinAccel Indonesia (Kredivo) (2019)
- Komisaris Independen, PT Asuransi Adira Dinamika Tbk (2020)

Rangkap Jabatan

Saat ini tidak memiliki rangkap jabatan di instansi atau perusahaan manapun selain di PT Pos Indonesia (Persero).

Lahir : Medan, 21 November 1967
Usia : 57 Tahun
Kebangsaan : Indonesia
Domisili : Jakarta, Indonesia

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat Direktur Bisnis Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia Nomor: SK-230/MBU/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022

**Haris**

Direktur Bisnis Jasa Keuangan

Pendidikan

- Bachelor's degree, Keuangan, Universitas Sumatera Utara, 1988.
- Bachelor of Social Sciences, Administrasi Negara, STIA LPPN Padang, 2002.
- Magister Management, Administrasi Bisnis, Universitas Sumatera Utara, 2012.

Perjalanan Karir

- Manajer Pengembangan Usaha, 2005-2006
- Manajer Produk Keuangan Ritel dan Filateli, 2006-2009
- Manajer Pelatihan, SDM, 2012-2014
- Manajer Job Management, 2014-2015
- Manajer Pengembangan Karir, 2015-2016
- Manajer Pengelolaan Karir dan Assesmen, 2016-2017
- Vice President Pelatihan dan Pengembangan, 2017-2018
- Vice President Penyaluran Dana dan Kemitraan Perbankan, 2018-2021
- SVP Sales and Marketing Financial Service, 2021-2022

Rangkap Jabatan

Saat ini tidak memiliki rangkap jabatan di instansi atau perusahaan manapun selain di PT Pos Indonesia (Persero).

Lahir : Lampung, 11 September 1971
Usia : 53 Tahun
Kebangsaan : Indonesia
Domisili : Jakarta, Indonesia

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Business Development dan Portfolio Management PT Pos Indonesia (Persero) sejak 19 Oktober 2022 berdasarkan SK-230/MBU/10/2022

**Prasabri Pesti**

Direktur Business Development dan Portfolio Management

Pendidikan

- S1 Elektro Umum, STT Telkom, Bandung, Indonesia (1996)
- S2 Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia (2009)
- S3 Doktor Ilmu Manajemen, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia (2020)

Perjalanan Karir

- Dewan Komisaris, PT Finnet Indonesia (2014-2015)
- Executive General Manager Telkom Regional II, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (2014-2015)
- Dewan Komisaris, PT Telkom Akses (2015-2016)
- Executive Vice President Telkom Regional II, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (2015-2016)
- Direktur Utama, PT PINS Indonesia (2016-2017)
- Dewan Komisaris, PT Tiphone Mobile Indonesia, Tbk (2016-2017)
- Coordinator Group of Faculty Member, Telkom Corporate University (2017-2019)
- Head of Digital Vertical Ecosystem - Direktorat Digital Business, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (2019-2022)

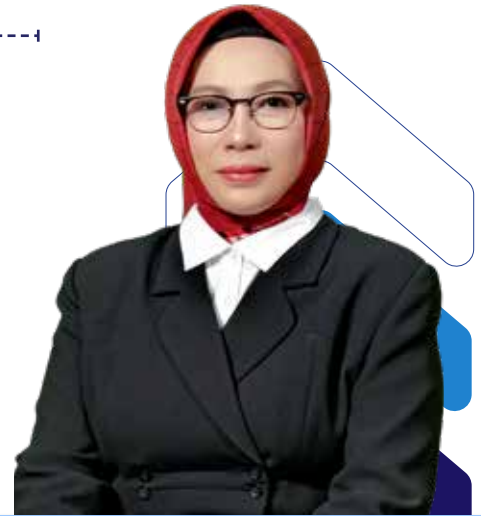
Rangkap Jabatan

Saat ini tidak memiliki rangkap jabatan di instansi atau perusahaan manapun selain di PT Pos Indonesia (Persero)

Lahir : Sukabumi, 29 Januari 1970
Usia : 55 Tahun
Kebangsaan : Indonesia
Domisili : Bandung

Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Human Capital Management PT Pos Indonesia (Persero) Sejak 21 September 2023 berdasarkan SK-260/MBU/09/2023



Asih Kurniasari Komar

Direktur Human Capital Management

Pendidikan

- S1 Akuntansi, Universitas Padjadjaran Bandung 1993
- S2 Magister Akuntansi, Universitas Padjadjaran Bandung 2004

Perjalanan Karir

- Vice President Manajemen Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) (2018-2021)
- Vice President Akuntansi PT Pos Indonesia (Persero) (2021-2022)
- Senior Vice President Financial Operations and Business Partner PT Pos Indonesia (Persero) (2022-2023)

Rangkap Jabatan

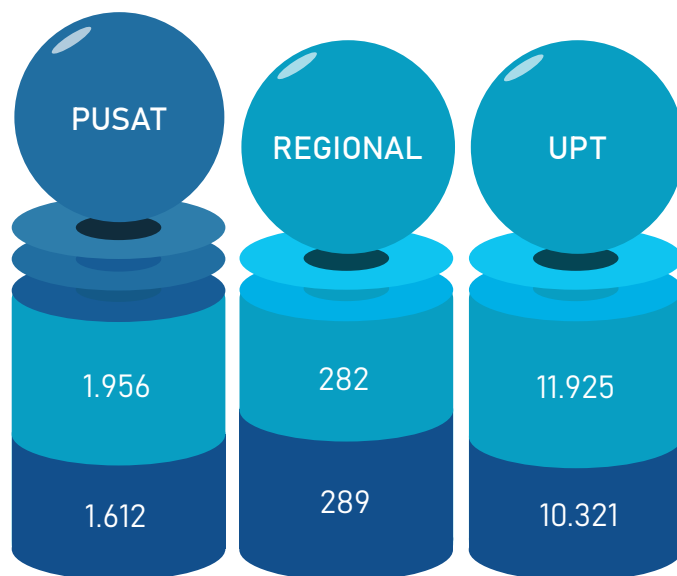
Saat ini tidak memiliki rangkap jabatan di instansi atau perusahaan manapun selain di PT Pos Indonesia (Persero)

SUMBER DAYA MANUSIA >>

Salah satu aset perusahaan yang akan menentukan keberhasilan dan keberlangsungan jalannya perusahaan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang handal, profesional dan berintegritas tinggi merupakan sumber daya yang diinginkan oleh setiap perusahaan. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang sesuai dengan harapan perusahaan tentunya dimulai dari proses rekrutmen yang tepat, dilanjutkan dengan proses pembelajaran/training yang dapat menjadi bekal untuk terjun di lapangan serta untuk kedepannya diperlukan program-program untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang mampu meningkatkan performa perusahaan.

Program peningkatan kompetensi tetap dilakukan di tengah suasana pandemi seperti saat ini tentunya dengan metode pembelajaran yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Sistem Manajemen Kinerja Individu (SMKI) yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya mulai tahun 2023 akan digantikan dengan *Objective Key Result* (OKR) untuk menjamin penilaian yang objektif dan terukur. Selain itu lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Sinergi yang bagus antara Serikat Pekerja dan manajemen salah satunya ditandai dengan pertemuan secara berkala antara Manajemen dan Serikat Pekerja ditengarai mampu menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

Komposisi SDM Pos Indonesia pada 2024



Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Usia dan Masa Kerja

BERDASARKAN PENDIDIKAN	S.D TRIWULAN IV 2024	S.D TRIWULAN IV 2023	GROWTH (%)
S3	3	7	(57)
S2	161	166	(3)
S1	3.323	3.384	(2)
DIPLOMA	1.882	1.895	(1)
SMA	8.346	9.690	(14)
SMP	316	473	(33)
SD	16	33	(52)
JUMLAH	14.047	15.648	(10)

BERDASARKAN USIA	S.D TRIWULAN IV 2024	S.D TRIWULAN IV 2023	GROWTH (%)
> 51	3.595	4.570	(21)
45-50	1.922	2.113	(9)
40-44	2.354	2.175	8
35-39	3.384	3.375	0
30-34	2.178	2.694	(19)
25-29	437	602	(27)
< = 24	177	119	49
JUMLAH	14.047	15.648	(10)

BERDASARKAN MASA KERJA	S.D TRIWULAN IV 2024	S.D TRIWULAN IV 2023	GROWTH (%)
>31 Th	2.660	3.242	(18)
26 Th - 30 Th	638	1.282	(50)
21 Th - 25 Th	1.669	1.881	(11)
16 Th - 20 Th	175	167	5
11 Th - 15 Th	1.841	1.255	47
6 Th - 10 Th	6.498	7.319	(11)
0 Th - 5 Th	566	502	13
JUMLAH	14.047	15.648	(10)



Susunan pegawai kontrak tergambar pada tabel berikut:

NO	STATUS PEKERJA	S.D TRIWULAN IV 2024	S.D TRIWULAN IV 2023	Growth (%)
1	Tenaga Alih Daya (TAD)	13	100	(87)
2	Tenaga Kerja Kontrak Layanan Pos Universal (TKK LPU)	198	-	100
3	Tenaga Kerja KOntrak Waktu Tertentu (TKKWT)	129	196	(34)
4	Pekerja Harian Lepas (PHL)	148	67	121
5	Tenaga Kerja Profesional Perusahaan (TKPP)	29	28	4
6	Talent Mobility (TM)	1	1	-
JUMLAH		518	392	32

Tahun 2024 jumlah TKK berjumlah 518 orang sedangkan untuk tenaga Oranger secara keseluruhan berjumlah 18.133 orang yang terdiri dari Oranger Loret 1.724 orang, Oranger Mobile 7.912 orang, Oranger Mawar 1.390 orang, *Drop Point* 45.723 titik, Oranger Antaran 5.172 orang, Oranger Antaran LPU 1.354 orang, dan Oranger *Pick up* 581 orang.

KEIKUTSERTAAN DALAM PROGRAM BPJS KESEHATAN

Sejak adanya program wajib BPJS bagi perusahaan-perusahaan termasuk BUMN di Indonesia, PT Pos Indonesia (Persero) sdh mendaftarkan diri dalam Program Jaminan Kesehatan - BPJS Kesehatan tersebut. Menunjuk pada Surat Edaran Meneg BUMN tanggal 11 Oktober 2017 Nomor: SE-06/MBU/10/2017 tentang Kepesertaan BUMN dalam Program BPJS, dengan ini disampaikan bahwa dalam tahun 2024 jumlah total karyawan Pos Indonesia beserta keluarga yang sudah menjadi Peserta BPJS Kesehatan dimaksud sebanyak 39.525 orang. Dengan jumlah dana BPJS Kesehatan yang dikeluarkan oleh Pos Indonesia selama tahun 2024 sebesar Rp 52.869.282.598,-

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Program peningkatan kompetensi berupa pelatihan internal maupun eksternal tetap dilakukan di tengah suasana pandemi seperti saat ini tentunya dengan metode pembelajaran yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. SDM Pos Indonesia terdiri dari berbagai jenjang pendidikan dan usia yang didukung program peningkatan kompetensi berkelanjutan, dengan fokus pengembangan kapabilitas dalam menerapkan prinsip ESG dan keberlanjutan bisnis.. Penyempurnaan Sistem Manajemen Kinerja Individu (SMKI) yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya mulai tahun 2021 disempurnakan dengan *Key Performance Indicators* (KPI) Individu untuk menjamin penilaian yang obyektif dan terukur dengan mengacu kepada KPI Korporat. Lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis dapat meningkatkan produktivitas

karyawan, sinergi yang bagus antara Serikat Pekerja dan manajemen salah satunya ditandai dengan pertemuan secara berkala antara Manajemen dan Serikat Pekerja ditengarai mampu menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

Selama tahun 2024 kegiatan pelatihan/seminar/*workshop* baik untuk peserta MT (*Management Trainee*) maupun untuk pegawai yang bertujuan peningkatan kompetensi baik di dalam negeri maupun luar negeri yang sesuai dengan aspek sosial keberlanjutan, tersaji pada tabel berikut ini:

Komposisi dan Jumlah Pelatihan Tahun 2024

NO	PROGRAM KERJA	JUMLAH PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
1	Pelatihan Fungsi	28	12.410
2	<i>Corporate Inspiring Forum (CIF)</i>	1	393
3	Pelatihan <i>Leadership</i>	1	101
4	Pelatihan Luar Negeri (APPU, APPC)	1	1
5	Sertifikasi Fungsi	1	2
TOTAL		32	12.907

Daftar Pelatihan 2024

No	Nama Pelatihan	Jumlah
1	Pelatihan <i>Financial Modeling for Feasibility Study</i>	1
2	<i>Certified Risk Management Officer Subdit Consumer Business</i>	2
3	Implementasi <i>Cloud</i> dan AI pada Industri Jasa Keuangan	103
4	APPC Course " <i>Postal Financial Service</i> "	1
5	<i>Oranger Mobile Academy</i>	2.670
6	<i>Account Manager Academy (Development Reg 2 & 3)</i>	227
7	<i>Account Manager Academy (Development Reg 4)</i>	1
8	<i>Regional Workshop on Drug Controls in the Mail Channel</i> di Bangkok	100
9	Sertifikasi BNSP <i>Supply Chain Manager</i>	1
10	Bootcamp Logistik	1
11	<i>Account Manager (Development Reg 5 - Jawa Timur)</i>	20
12	<i>Account Manager (Development Reg 1 - Banda Aceh dan Medan)</i>	20
13	<i>Supply Chain Innovation Summit 2024</i>	75
14	<i>EMS Symposium</i>	60
15	<i>Account Manager (Development Reg 6 Sulawesi - Maluku)</i>	12
16	Seminar Nasional: "Peningkatan Kinerja Logistik di Indonesia: Refleksi, Tantangan, dan Peluang <i>System Logistik Nasional</i> "	1
17	<i>Intensive EMS Course</i>	1
18	<i>Project Management with Ms Project Application</i>	3
19	<i>30th Asean Postal Business Meeting (APBM) and Aseanpost++ Meeting</i>	1
20	Pelatihan <i>Bidding Management</i>	2



21	Workshop on Drug Controls in the Mail Channel	1
22	AM Development Regional I Medan (wilayah Sumatera Barat dan Selatan)	1
22	Pelatihan Project Management	22
23	Smart Supply Chain and Logistics Innovation SSCL SEA 2024	78
24	Refreshment Frontliner 2024 - Layanan Kurir	10.105
25	CFP Level 1, CFA and Management Project	2
26	Enterprise Risk Management	61
27	Pelatihan aplikasi sistem informasi manajemen risiko	72
28	Certified Risk Governance Professional (CRGP)	1
29	Certified Risk Management Professional (CRMP) Level III	1
30	Certified Risk Management Officer (CRMO) Level II	3
31	Sosialisasi dan Uji Pemahaman Kebijakan Manajemen Risiko	13.377
32	Sosialisasi dan Uji Pemahaman Kebijakan Fraud Awareness	13.309
33	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Keuangan dan Akuntansi Reg 2 Jakarta dan Reg 3 Bandung	83
34	Pelatihan Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	1
35	Pelatihan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS/OE)	1
36	APPC Workshop "Disaster Risk Management"	3
37	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Keuangan dan Akuntansi Regional VI Makassar	101
38	Pelatihan dan Exam / Uji Certified Risk Management Officer (CRMO) ISO 31000 & COSO	3
39	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Keuangan dan Akuntansi Reg 1 Medan	103
40	Ketentuan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran (SK SP)	3
41	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Keuangan dan Akuntansi Regional IV Semarang	101
42	Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (PBK SPPUR) Jenjang Kualifikasi 1 Tahun 2024	1
43	Sosialisasi Budaya Risiko	1
44	Pelatihan Penyusunan Pengelolaan Aset BUMN	270
45	Pelatihan Perpajakan Tahun 2024	3
46	Pelatihan Manajemen Aset ISO 55001:2014	1

Komposisi Pemegang Saham

PT Pos Indonesia (Persero) belum pernah melakukan penawaran umum saham kepada masyarakat dan sahamnya belum tercatat di Bursa Efek manapun sehingga baik masyarakat dan pihak lain selain Pemerintah Republik Indonesia tidak mempunyai kepemilikan saham atas PT Pos Indonesia (Persero). Kepemilikan saham seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia 100%. Kepemilikan Saham

oleh Karyawan atau Manajemen PT Pos Indonesia (Persero) tidak memiliki program opsi kepemilikan saham oleh karyawan atau manajemen sehingga baik karyawan, direksi, maupun dewan komisaris PT Pos Indonesia (Persero) tidak mempunyai kepemilikan saham atas PT Pos Indonesia (Persero). Kepemilikan saham seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia 100%.

Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi

PT Pos Indonesia (Persero) tercatat memiliki penyertaan saham di tiga perusahaan anak. Kepemilikan saham di tiga anak perusahaan tersebut merupakan kepemilikan yang mayoritas, dengan persentase kepemilikan Perseroan dan jumlah aset Entitas Anak adalah PT Pos Finansial Indonesia (54,76%), PT Pos Logistik Indonesia (99,80%) dan PT Pos Properti Indonesia (99,00%)



PT Pos Finansial Indonesia

Beroperasi sejak **2001**

POSFIN

PT Pos Finansial Indonesia (d/h PT Bhakti Wasantara Net) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 7 dari Notaris Ivonne Barnetha Sinyal, SH. Notaris di Jakarta tanggal 2 April 2001. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C-02567.HT.01.01.Th. 2001 tanggal 28 Juni 2001. Pada tanggal 24 April 2019, Perseroan mengubah nama PT Bhakti Wasantara Net menjadi PT Pos Finance Indonesia melalui Akta Notaris No. 69 dari Notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0022339. AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 24 April 2019. Berbekal

pengalaman selama 18 tahun, kini POSFIN melakukan diversifikasi bisnis pada layanan jasa keuangan berbasis teknologi. Menggunakan Spesialisasi dalam bidang IT solution, membuat dan menyediakan platform pembayaran yang lengkap dan sederhana untuk konsumen. Melalui dukungan dari PT Pos Indonesia (Persero) sebagai induk perusahaan, dengan mendayagunakan 4.146 Kantor pos dan jumlah titik layanan sebanyak 58.700 titik, memberikan kesempatan untuk POSFIN memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dengan pelayanan yang Prima dan harga kompetitif. Melalui peran serta ini, diharapkan mampu berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat kelas menengah.

PT Pos Logistik Indonesia

Beroperasi sejak **2012**

PT Pos Logistik Indonesia adalah anak perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) yang dalam aktivitas bisnisnya menangani jasa transportasi, jasa pergudangan, pengiriman kargo, dan regulated agent atau agen inspeksi. Pos Logistik Indonesia berusaha mengembangkan bisnis dengan mengutamakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan baik dengan mitra internal maupun eksternal, serta membangun jaringan bisnis secara fokus dan tumbuh bersama pelanggan. PT Pos Logistik Indonesia mengembangkan strategi fokus pada penciptaan nilai tambah bagi pelanggan dengan sasaran penurunan biaya, peningkatan mutu layanan, serta eksekusi proses bisnis yang lebih

cepat dan fleksibel untuk kepuasan pelanggan. PT Pos Logistik Indonesia bersinergi mengerahkan sumber daya baik milik PT Pos Indonesia (Persero) sendiri maupun mitra 3PL Logistics yang bisa diandalkan. Didukung dengan pekerja dan tim profesional dalam merumuskan strategi dan positioning bisnis, maka PT Pos Logistik Indonesia optimis mampu menjadi Indonesia's #1 *Logistics. Solutions Provider* yang beroperasi secara independen untuk dapat memaksimalkan peluang bisnis logistik di Indonesia, sekaligus mengoptimalkan jaringan dari Pos Indonesia yang sudah terbangun di seluruh Indonesia, dengan 4.147 Kantor pos dan 33.000 titik penjualan.

PT Pos Properti Indonesia

Beroperasi sejak **2013**

Pada tahun 2014 PT Pos Indonesia (Persero) membentuk Unit/SBU Real Property PT Pos Properti Indonesia adalah unit bisnis di bawah PT Pos Indonesia (Persero) yang dikelola secara fokus dan mandiri dalam menyelenggarakan usaha *Real Property Management*. Jasa penyewaan properti PT Pos Properti Indonesia untuk dimanfaatkan oleh institusi bisnis dalam mengembangkan jaringannya, baik untuk penyewaan lahan, penyewaan gedung, maupun

ruangan atas seluruh properti PT Pos Indonesia (Persero) yang tersebar di tanah air. Karakteristik properti PT Pos Indonesia (Persero) memiliki lokasi yang cukup strategis, sehingga potensial untuk dikembangkan utilitasnya. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang properti baik dalam skala nasional maupun internasional, PT Pos Properti berkomitmen untuk memberikan solusi bisnis dalam bidang *property development* dan *property management consultant*.

Tahapan Penerbitan dan Pencatatan Saham

PT Pos Indonesia (Persero) belum pernah melakukan penawaran umum saham kepada masyarakat dan sahamnya belum tercatat di Bursa Efek manapun. Oleh sebab itu, informasi kronologis pencatatan saham dan jenis aksi korporasi yang menyebabkan perubahan jumlah saham tidak tersedia.

Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya

Pada tahun 2021 Pos Indonesia menerbitkan:

Nama MTN	: MTN Posindo-03 Tahap 1
Nilai Penerbitan	: Rp. 325.000.000.000,-
Imbal Hasil	: 10,50%
Tanggal Jatuh Tempo	: 30 Desember 2024
Peringkat	: A(idn) (Fitch)
Bursa Pencatatan	: Bursa Efek Indonesia

Pada tahun 2022 Pos Indonesia Menerbitkan:

Nama Obligasi	: Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022 Seri A
Nilai Penerbitan	: Rp.100.000.000.000,-
Tingkat Bunga	: 10,90%
Tanggal jatuh Tempo	: 28 Desember 2025
Peringkat	: A(idn) (Fitch)
Bursa Pencatatan	: Bursa Efek Indonesia

Nama Obligasi	: Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022 Seri B
Nilai Penerbitan	: Rp.400.000.000.000,-
Tingkat Bunga	: 11,75%
Tanggal jatuh Tempo	: 28 Desember 2027
Peringkat	: A(idn) (Fitch)
Bursa Pencatatan	: Bursa Efek Indonesia

Lembaga dan Profesi Penunjang

Kantor Akuntan Publik
Kanaka Puradiredja Suhartono
The Royal Palace
Jl. Prof.Dr.Soepomo No.178A – C29
Jakarta 12810 Indonesia
Telp : 62-21-8313861
Fax : 62-21-8313871

Pemeringkat Efek

PT FITCH RATINGS INDONESIA
DBS Bank Tower, 24th Floor, Suite 2403
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta 12940, Indonesia

Penghargaan 2024 >>

Top 10 Awards



BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024 (7 Maret 2024) “Top Contributor BUMN for Communications”

13th Anugerah BUMN Track Award 2023 (13 Maret 2024)

- Inovasi Binis Perusahaan Terbaik (PosIND)
- BUMN Strategi Pemulihan Terbaik I (PosIND)
- Best CEO in Optimisation Assets to Real Estate Industry* (Junita Roemawi - Pospro)

CSR Excellence Award 2024 (20 maret 2024)

- The Best Program in Education or Scholarship Category*
- The Best Sustainability CSR Program*
- The Best CSR In MSME Program*
- The Best Leadership and Commitment on Sustainability CSR Program* (Tata Sugiarta)



HR Excellence Award 2024 (26 Juli 2024)

- Wellbeing Management
- Reward Management & Talent Retention Strategy*
- Learning & Development and Knowledge Management*

TJSL & CSR Award 2024 (30 Juli 2024)

- Pilar Sosial (Platinum) Bintang 5.
- Pilar Lingkungan (Gold) Bintang 4.
- Pilar Ekonomi (Gold) Bintang 4.
- Strong Commitment Senior Officer On Social Economic, and Environment Program Of CSR*



Best Foreign CEO & Top Green Leaders Award 2024 (30 Juli 2024)

Indonesia Green Leader for Green Orientation in Strengthening Business Transformation through the Implementation of Environmentally Friendly Business Operation (Faizal Rochmad Djoemadi)

Human Capital on Resilience Excellence Award 2024 (1 Agustus 2024)

- The Best in Team Building Management*
- The Best in HC Change Management & Communication Strategy*
- The Best in Team Building Engagement*
- The Best CEO Committed HC of The Year 2024 (Faizal R Djoemadi)*
- The Best Leadership in Human Capital Development (Asih Kurniasari)*



ESG Initiative Award 2024 (8 Agustus 2024)

- Best ESG Reporting and Transparency Best Millennial*
- Gen Z Engagement Leadership*
- Best Corporate Secretary for ESG Initiatives (Tata Sugiarta)*

Prominent Award 2024 (9 Agustus 2024)

Excellent Innovation in Digital Financial for Social Economic Mover



Top GRC Awards 2024 with 5 star predicate (11 September 2024)

- The Most Committed GRC Leader 2024 for President Director Faizal Rochmad Djoemadi*
- The High Performing Chief Financial Officer & Risk Management Director 2024 diraih oleh Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman selaku Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Pos Indonesia*
- The High Performing Board of Commissioners on GRC 2024 by Pos Indonesia Commissioners*

World Post Day – Celebrating UPU's 150th Anniversary (9 Oktober 2024)

Rising Star in Postal Development

Appreciation Night 2024 (17 Oktober 2024)

Best Transporter

TOP Human Capital Awards 2024 (30 Oktober 2024)

- Top Human Capital 2024 5 Star*
- The Most Comitted Top Leadr on Human Capital 2024 (Faisal R Djoemadi)*

BUMN Branding & Marketing Awards 2024

- Platinum Award dalam kategori Brand Creative Communication & Activation*
- Gold Award dalam kategori Innovation & Technology Advancement*





NAMA, ALAMAT ENTITAS ANAK, ALAMAT KANTOR CABANG ATAU PERWAKILAN >>>

Anak Perusahaan

PT POS FINANSIAL INDONESIA

Jl. Jamuju No. 2 Cihapit,
Bandung Wetan Bandung 40114
Indonesia
Telp +62-22-7275001

PT POS LOGISTIK INDONESIA

Gedung Pos Ibukota, Lantai 4
Jl. Lapangan Banteng Utara No.1
Jakarta Pusat 10710
Telepon : +6221 3483 2552, +6221 352
0175 +6221 351 1144
Fax : +6221 3519 967
Email: info@poslogistics.co.id

PT POS PROPERTI INDONESIA

Graha Pos Indonesia, Lantai 5, Blok A
Jl. Banda No. 30 Bandung 40115
Jawa Barat - Indonesia
Tel. (022) 4212515, (022) 4218996,
Fax. (022) 4261569
Email: info@posproperti.co.id

Alamat Kantor Regional

KANTOR REGIONAL 1 MEDAN

 Jln. Prof. H.M. Yamin, S.H. No. 44,
Medan 20231

KANTOR REGIONAL 2 JAKARTA

 Jln. Gedung Kesenian No. 2, Jakarta
10710

KANTOR REGIONAL 3 BANDUNG

 Jln. Pahlawan No. 87, Bandung
40123

KANTOR REGIONAL 4 SEMARANG

 Jln. Sisingamangaraja No. 45,
Semarang 50253

KANTOR REGIONAL 5 SURABAYA

 Jln. Krembangan Barat 73 - 75,
Surabaya 60175

KANTOR REGIONAL 6 MAKASSAR

 Jln. A. P. Pettarani, Makassar
90222

Alamat Kantor Afiliasi



DANA PENSIUN POS

Jl. Tasikmalaya No. 1, Bandung 40271



YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Gedung YPBPI
Jl. Sari Asih No. 54, Bandung 40151



UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

Jl. Sari Asih No. 54, Bandung 40151

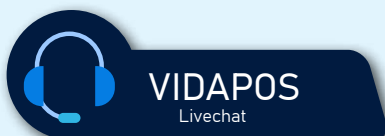
<https://www.posindonesia.co.id>

INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN >>>

Untuk memudahkan *stakeholders* dan *shareholder* maupun kepada masyarakat umum mengakses informasi tentang Pos Indonesia dan mengakses produk serta layanan Pos Indonesia sejak tahun 2020.

Pos Indonesia melakukan penyegaran dan perbaikan informasi pada website Perusahaan <https://www.posindonesia.co.id> dengan berbagai informasi terkini perusahaan. Selain informasi yang bersifat umum, website Perseroan juga memberikan informasi yang lebih spesifik diantaranya sebagai berikut:

- Profil perusahaan yang terdiri dari Profil Dewan Komisaris dan Profil Direksi
- Adanya Informasi pemegang saham sampai dengan kepemilikan akhir individu. (Tidak ada)
- Kode Etik Perusahaan yang terdiri berupa *e-book* kode etik yang bisa *download* di menu GCG atau bisa ditempatkan ditempat yang mudah diakses oleh pengunjung *website*.
- Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terdiri dari Agenda, Ringkasan Risalah, dan Tanggal (Pengumuman, Pemanggilan, RUPS, Ringkasan Risalah). (Tidak ada).
- Menampilkan informasi seputar Piagam/ *Charter* Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal. (tidak ada).
- Menampilkan Produk-produk dan Jasa yang diberikan oleh Pos Indonesia.
- Menampilkan Solusi Bisnis
- Menampilkan Media dan Informasi baik *news release*, *e-paper*, dan galeri pada kegiatan-kegiatan
- Adanya Informasi karir (lowongan kerja) pada Perusahaan.
- Menampilkan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan (*Annual Report*).
- Menampilkan Informasi kontak *center* yang bisa dihubungi dan memiliki media sosial perusahaan.
- Menampilkan menu Lacak Kiriman yang dapat dengan sangat mudah diakses. Dapat menghitung Tarif Pengiriman dengan sangat mudah.
- Terdapat menu Pencarian Kantor pos Terdekat.
- Menampilkan Program Pos Indonesia
- Memiliki menu bantuan yang memuat Informasi tentang *Frequently Asked Question* (FAQ) tentang seluruh produk dan layanan yang diberikan oleh Perusahaan.
- Menambah fitur *Livechat* VIDAPOS Untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, yaitu layanan informasi kepada pelanggan berbasis aplikasi *chatting* yang dapat diakses langsung oleh pengguna dengan cepat dan mudah.



PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, KOMITE-KOMITE, DAN UNIT AUDIT INTERNAL

Perseroan memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan daya saing dengan mengembangkan kapasitas kantor cabang pembantu dan kapabilitas Dewan Komisaris dan Komite-komite. Perseroan tiap tahunnya selalu mengalokasikan anggaran yang diperuntukkan untuk kegiatan pengembangan kompetensi manajemen seperti pendidikan, pelatihan, *workshop*, seminar dan kegiatan konstruktif lainnya. Perseroan menetapkan pengembangan kompetensi sebagai salah satu program kerja utama. Hal ini merupakan wujud komitmen Perseroan dalam upaya melahirkan kepemimpinan yang handal dan berkompeten sehingga mampu bersaing di level nasional bahkan internasional, serta mampu menjawab tuntutan bisnis Perseroan dalam usaha mencapai target seperti yang diharapkan oleh pemegang saham pemangku kepentingan. Beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan terkait pengembangan Dewan Komisaris, dan Komite-komite yang terealisasi selama tahun 2024 adalah Pendidikan dan/ atau pelatihan untuk Dewan Komisaris;

Dewan komisaris

1. Bapak Gunawan Hutagalung telah mendapatkan *Sertifikasi Qualified Internal Auditor* dari Dewan Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* pada 22 Juni 2024
2. Bapak Rubben Rico telah mendapatkan *Sertifikasi Qualified Internal Auditor* dari Dewan Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* pada 22 Juni 2024
3. Bapak I Gde Made Kartikajaya telah mendapatkan *Sertifikasi Qualified Internal Auditor* dari Dewan Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* pada 22 Juni 2024
4. Bapak I Gde Made Kartikajaya telah mendapatkan *Sertifikasi Qualified Government Internal Auditor* dari Dewan Sertifikasi *Qualified Government Internal Auditor* pada 16 November 2024
5. Bapak I Gde Made Kartikajaya telah mengikuti Seminar Nasional Internal Audit dengan tema *Cultural Transformation: Integrating ESG, Cybersecurity, and Innovative Risk Management*, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit pada 4 – 5 Desember 2024
6. Bapak Rubben Rico telah mengikuti Seminar Nasional Internal Audit dengan tema *Cultural Transformation: Integrating ESG, Cybersecurity, and Innovative Risk Management*, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit pada 4 – 5 Desember 2024

Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi

1. Pelatihan Manajemen Risiko
"Enterprise Risk Management" TW 4
2. Konferensi Nasional Professional
Manajemen Risiko TW
3. Pelatihan Dan Sertifikasi Cafo
(Certified Anti Fraud Officer) TW
4. Penyusunan Rjp Dan Rkat
Berbasis Risiko TW 1
5. Certified Risk Management Officer
(CRMO) Level II TW 3
6. Certified Risk Management
Professional (CRMP) Level III TW 3
7. Webinar Strategi Penanganan
Terhadap Pelaku Fraud Di
Perusahaan

Komite Nominasi dan Remunerasi Online

1. Webinar Hukum 2023
"Strategi dan Mekanisme Anti-
Fraud dalam Pengelolaan
Organisasi dan Badan Usaha"
(Online)
2. Financial Report for Non-Financial
Person (In house training)
3. Pelatihan Organ Pengelola Risiko
(CRGP)
4. Master Class Risk Governance

Internal Audit

1. Sertifikasi Auditor: QIA Manajerial
2. Sertifikasi Auditor: QIA Tingkat
Lanjutan
3. Sertifikasi Professional
Recognition Program (PRP) For
Qualified Internal Auditor (QIA)
4. Pelatihan QIA Tingkat Dasar
5. Forum Komunikasi Satuan
Pengawas Internal
6. Workshop Investigation & Fraud
Detection For Internal Auditors





Jaringan Internasional

Negara Tujuan

UPU	232
Quick International Xpress	27
Pos Cepat Internaional	211

1 REG I
Medan

2 REG II
Jakarta

3 REG III
Bandung

4 REG IV
Semarang

5 REG V
Surabaya

6 REG VI
Makasar



2

3

4

5

6 Regional

42 KCU
Kantor Cabang Utama

168 KC
Kantor Cabang

5.531 Kantor Cabang Pembantu + Mitra LPU

Jaringan Domestik

38 Provinsi
98 Kota
416 Kabupaten
6.592 Kecamatan
74.954 Desa

261
Loket

23
Mobile PosService

11.349
Agenpos Kurir

142.173
Agenpos Jaskug

18.133
Oranger





— Analisis Manajemen



TINJAUAN OPERASI

PRODUKSI

Fasilitas Fisik Layanan

Jumlah fasilitas fisik layanan perusahaan tidak banyak mengalami perubahan pada tahun 2024, berikut perinciannya :

No	Uraian	2024	2023	Pertumbuhan YoY (%)
1	KANTOR POS			
a	Revenue Center			
	- Kantor Cabang Utama (KCU)	42	42	-
	- Kantor Cabang (KC)	167	167	-
	- Kantor Cabang Pembantu (KCP)	3.680	3.715	(0,94)
	- Loker Ekstensi	257	264	(2,65)
	- Kantor Filateli	1	1	-
b	SUPPORT			
	- KTPU Jakarta soekarnohatta (Tipe C)	1	1	-
	- KTPL Tanjungpriok (Tipe D)	1	1	-
	- SPP	12	12	-
	- Pos Admail	1	1	-
	Jumlah Kantor Pos	4.162	4.203	(0,98)
2	UNIT PELAYANAN POS BERGERAK	95	22	-
3	UNIT PELAYANAN POS LAINNYA			
	Agenpos Kurir	11.351	10.701	6,07
	Agenpos Jaskug	188.336	179.152	5,13
	Jumlah Unit Pelayanan Pos Lainnya	199.687	189.853	5,18
	Total	203.944	194.073	5,09

Selain fasilitas fisik berupa gedung, perusahaan juga memiliki sarana alat angkutan khususnya untuk kegiatan operasi baik yang dimiliki sendiri melalui CAPEX ataupun sewa.

Kinerja Produksi

Pencapaian kinerja produksi Tahun 2024 dibandingkan periode yang sama tahun 2023 tersaji pada tabel berikut :

URAIAN	SATUAN	2024	2023	Pertumbuhan %
Dokumen Pos	pucuk	11.576.302	10.727.777	7,91
PaketPos	buah	15.618.061	16.921.276	(7,70)
Pos Internasional	buah	493.190	474.613	3,91
Kontrak dan Proyek	transaksi	31.051.841	32.722.982	(5,11)
Jasa Keuangan	transaksi	92.034.732	96.412.619	(4,54)
Ritel	keping	549.340.191	550.373.028	(0,19)

Inovasi teknologi yang telah dilakukan untuk menghasilkan dan meningkatkan kapasitas produksi serta penunjang untuk peningkatan kinerja perusahaan antara lain:

1. Inovasi *Digital Super Apps* sudah launching dan akan dilanjutkan dengan pengembangan *platform superapps* menggabungkan aplikasi mobile layanan kurir dan aplikasi mobile jasa keuangan.
2. Inovasi *Digital Super Apps* pada bagian *Human Capital Management* dengan nama aplikasi Livie

Selain itu, untuk mendukung keberlanjutan organisasi dan operasional perusahaan terdapat beberapa Sistem Informasi yang dimiliki oleh perusahaan yaitu:

1. Direktorat *Human Capital Management*
 - Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SIM-SDM) untuk pengelolaan karyawan organik.

- Sistem Informasi Manajemen Tenaga Kontrak Karya (SIM-TKK) untuk pengelolaan Tenaga Kontrak Karya.
- Pengembangan sistem SPPD Online untuk mengontrol dan mengendalikan biaya perjalanan dinas pegawai.
- Sistem aplikasi “livie” untuk mengontrol kehadiran karyawan.
- Edupos sebagai sarana pembelajaran bagi karyawan dalam rangka meningkatkan kompetensi.
- Sistem aplikasi “ihسان pos” untuk mendukung implementasi Sistem Manajemen Kinerja Individu karyawan berbasis OKR (*objective dan key result*)
- Sistem aplikasi “*job master*” memudahkan karyawan untuk mengakses informasi mengenai deskripsi pekerjaan suatu jabatan dan standar minimal pekerjaan yang harus dipenuhi dalam jabatan.

- Sistem aplikasi *talent* management untuk penilaian kenaikan level jabatan.
 - Sistem aplikasi “*explora*” untuk menghubungkan karyawan dengan berbagai pengetahuan dan informasi yang mendukung pengembangan karyawan secara berkelanjutan.
 - Sistem aplikasi “ITMS” membantu karyawan untuk menentukan *career* path yang sesuai aspirasinya.
 - Sistem aplikasi *e-Procurement* merupakan sistem aplikasi yang digunakan untuk sarana pendukung kinerja dan mengatur pengelolaan proses pengadaan.
2. Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko
- SAP HANA untuk pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan.
 - ITEMS untuk mengawasi arus kas seluruh Unit Pelaksana Teknis.
 - Sistem Informasi Perpajakan (SIP) untuk pengelolaan dan pengendalian pelaporan perpajakan secara terpusat
 - Sistem Informasi Manajemen Aset (SIM-ASET) untuk pengelolaan dan pengawasan aset perusahaan.
 - *Whistle Blower System* (WBS) untuk melaporkan dugaan tindak kecurangan.
- Sistem Pra NPP untuk pengelolaan proses pegajian NPP mulai dari KCU sampai dengan persetujuan di PA Pusat.
 - Sistem Pelimpahan Bank (VA)
 - Aplikasi Simaris (Sistem Manajemen Risiko), sistem pengendalian dan alat
 - Sistem Perencanaan Anggaran berbasis Program kerja, untuk proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dari level Kantor Cabang sampai dengan level Pemilik Anggaran dan Pemilik Program Kerja di tingkat pusat.
3. Direktorat Business Development dan Portfolio Management
- Sistem Informasi Manajemen KPC LPU (SIM-LPU) untuk reporting tagihan SO LPU.
 - Sistem RPA (*Robotic Process Automation*) untuk otomasi pertanggung jawaban dokumen sumber sebagai lampiran biaya di SIM LPU.
4. Direktorat Bisnis Jasa Keuangan
- Sistem Informasi Manajemen Konsinyasi dan Filateli (SIM-KONSFILA).
 - Aplikasi POSPAY untuk memudahkan transaksi pelanggan secara mobile.
 - Aplikasi POSPAY AGEN untuk memudahkan transaksi agenpos secara mobile
 - Aplikasi POSPAY superapp yang menggabungkan aplikasi kurir dan jasa keuangan.

5. Direktorat Bisnis Kurir dan Logistik
 - Sistem Informasi Manajemen O-Ranger *mobile* (SIM-O-Ranger *mobile*).
 - *Customer Complain Handling* (CCH) untuk mempercepat penanganan pengaduan pelanggan.
 - Aplikasi POS AJA untuk memudahkan pelanggan dalam mengirim barang dengan cara *pickup services*.
 - Aplikasi ADO Untuk mencatat data pelanggan, akuisisi umkm dan transaksi umkm.
 - Aplikasi PosAja UMKM untuk memudahkan UMKM dalam mengirim
6. Direktorat Operasi dan Digital Services
 - Sistem Informasi Manajemen O-Ranger Antaran (SIM-O-Ranger Antaran).

PENDAPATAN USAHA PER SEGMENT

PT Pos Indonesia (Persero) merumuskan sasaran, strategi, dan program-program untuk meningkatkan kinerja perusahaan pada tahun 2024 dengan tema “Mewujudkan Pos Indonesia sebagai Orkestrator Logistik yang terpercaya dan Terkemuka dalam Ekosistem BUMN”.

Dalam pencapaian kinerja perusahaan Tahun 2024, perusahaan masih mendapat dukungan dan dorongan pencapaian kinerja bisnis jasa keuangan yang bersumber dari kebijakan pemerintah yaitu penyaluran bantuan baik yang bersifat nasional maupun lokal di masing-masing kabupaten/kota.

Perusahaan juga diberi penugasan oleh negara untuk penyaluran bantuan Cadangan Beras Pemerintah, dimana 119 juta penerima sudah berhasil tersalurkan dengan kontribusi pendapatan sebesar Rp 1.104,30 miliar.

Implementasi program kerja tahun 2024 memberikan hasil yang cukup optimal terhadap target RKAP 2024 yang telah ditetapkan. Pencapaian growth pendapatan bisnis kurir logistik naik sebesar 10,47% dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Kontribusi Bisnis Kurir dan Logistik pada tahun 2024 sebesar 78,32% atau naik 4,04% dari tahun 2023, hal ini disebabkan antara lain kenaikan pendapatan surat domestik, surat internasional dan pendapatan logistik dikarenakan adanya proyek pendistribusian beras (CBP).



Sementara itu, pencapaian pendapatan Bisnis Layanan Jasa Keuangan, Meterai dan Ritel sebesar growth pendapatannya turun 14,91% dibanding periode yang sama tahun 2023. Kontribusi Bisnis Jasa Keuangan, Meterai dan Ritel pada tahun 2024 sebesar 18,63% atau turun 4,31% dari tahun 2023. Di tengah persaingan dari para kompetitor lama maupun baru yang semakin ketat, perusahaan terus melaksanakan program-program kerja yang simultan untuk mempertahankan dan mencari peluang bisnis baru langkah-langkah yang dilaksanakan oleh manajemen antara lain :

1. LAYANAN BISNIS KURIR DAN LOGISTIK

- a. Strategi penjualan yang agresif dan masif di semua channel baik channel fisik maupun digital
- b. *Launching Nusantara Logistics Hub & Services* pada 17 Januari 2024
- c. PosIND bekerjasama dg Shopee dalam program Garansi Tepat Waktu pada 26 Juni 2024
- d. Layanan Kargo Haji yang di launching pada musim haji 2024
- e. Kerjasama dengan BRImo pemanfaatan aplikasi BRImo sebagai akses *point* layanan PosAja
- f. Kerjasama dengan Telkomsel pemanfaatan aplikasi mytelkomsel sebagai akses point layanan PosAja

2. LAYANAN BISNIS JASA KEUANGAN

- a. Peningkatan kualitas layanan Pospay (*availability* : 99,5% dan *latency* < 3 detik).
- b. Launching layanan umroh dan wisata halal pada 5 Juni 2024

c. *Launching* layanan Pos Kios, Pospay Kolektor dan Syariah (layanan sosial, komersial dan perdagangan emas).

d. Fokus penyaluran Bantuan Langsung Tunai.

e. Modernisasi printer dot matrix untuk layanan jasa keuangan di seluruh loket KCU/KC/KCP

3. LAYANAN BISNIS PROPERTI

a. Salah satu penyebab bisnis Properti growth karena adanya pengalihan bisnis persewaan (inovasi) dari induk.

b. Layanan *Hospitality* tumbuh karena kenaikan pendapatan dari seluruh unit bisnis eksisting dan adanya penambahan pendapatan dari unit bisnis baru seperti Pos Bloc, PointMeal, PointBrew. Pos Bloc Surabaya diresmikan pada 19 Juli 2024.

4. LAINNYA

Tambahan pendapatan dalam Pendapatan lainnya terdiri dari tambahan penugasan Pemerintah dalam penyelenggaraan LPU (Layanan Pos Universal) dalam bentuk Bantuan Operasional Pemerintah melalui program PSO (*Public Service Obligation*). Ini merupakan komitmen dalam UPU (Universal Postal Union) yang menjamin terselenggaranya pelaksanaan program tersebut melalui penugasan kepada PT Pos Indonesia (Persero). Selain Penugasan Pemerintah terdapat penyesuaian dan terhadap kondisi kini dengan program Optimalisasi Aset dan *leverage* terhadap pendapatan Perusahaan melalui revaluasi aset. Program ini dilakukan pada aset potensial yang memberikan nilai tambah dan potensi komersialisasi pada aset utama dan strategis di beberapa kota besar di Indonesia.

KINERJA KEUANGAN

Pencapaian kinerja Perusahaan Tahun 2024 merupakan kinerja hasil konsolidasi antara induk dan anak perusahaan (PT Pos Finansial Indonesia, PT Pos Logistik Indonesia, dan PT Pos Properti Indonesia). Secara garis besar, capaian kinerja keuangan konsolidasian Tahun 2024 adalah:

- Pendapatan usaha tercapai sebesar Rp 5.017,86 Miliar.
- Beban Pokok Layanan terealisasi sebesar Rp 3.030,81 Miliar.
- Laba Kotor tercapai sebesar Rp 1.987,05 Miliar.
- EBITDA tercapai sebesar Rp 1.015,67 Miliar.
- Laba bersih tahun berjalan tercapai sebesar Rp 747,13 Miliar

Aset

Pada tahun 2024, jumlah aset Pos Indonesia tercatat sebesar Rp. 16.465,84 miliar, naik 20,55% dibandingkan Rp. 13.658,84 miliar pada tahun 2023. Hal ini terjadi karena peningkatan aset tidak lancar sebesar 4,14% ditambah dengan peningkatan aset lancar sebesar 45,85% .

Aset lancar

Total aset lancar PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2024 tercatat sebesar Rp. 7.836,56 miliar, naik 45,85% dari Rp. 5.372,71 miliar pada tahun 2023.

Aset tidak lancar

Pada tahun 2024 jumlah aset tidak lancar PT Pos Indonesia (Persero) tercatat sebesar Rp. 8.629,27 miliar, tumbuh 4,14% dari Rp.8.286,13 miliar pada tahun 2023.

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan YoY
Aset Lancar	7.836,56	5.372,71	45.85
Aset Tidak Lancar	8.629,27	8.286,13	4.14
Jumlah Aset	16.465,84	13.658,84	20.55

Liabilitas

Secara umum liabilitas perusahaan sepanjang tahun 2024 mengalami kenaikan dan masih terkendali dengan baik. Perusahaan mencatatkan jumlah liabilitas pada tahun 2024 sebesar Rp. 7.511,66 miliar dan terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 35,99% dengan jumlah liabilitas sebesar Rp. 5.523,77 miliar pada tahun 2023.

Liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan sebesar 53,97% kenaikan ini terutama disebabkan meningkatnya pinjaman bank jangka pendek sebesar 93,43% dibandingkan tahun 2023, Komponen terbesar dari liabilitas jangka pendek perusahaan adalah pinjaman bank jangka pendek dengan porsi 73,52% terhadap total liabilitas jangka pendek.

Liabilitas jangka panjang mengalami penurunan sebesar 7,42% dibandingkan tahun 2023. Komponen terbesar dari liabilitas jangka panjang adalah liabilitas imbalan kerja yang merupakan liabilitas imbalan kerja kepada karyawan atas jasa yang telah diberikan.

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan YoY
Liabilitas Jangka Pendek	6.013,47	3.905,45	53,97
Liabilitas Jangka Panjang	1.498,19	1.618,32	(7,42)
Jumlah Liabilitas	7.511,66	5.523,77	35,99

Ekuitas

Realisasi jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp 8.954,17 miliar, tumbuh sebesar 10,07% jika dibandingkan dengan tahun 2023. realisasi jumlah Ekuitas tercapai 108,83% dari RKAP 2024. Perubahan komponen ekuitas adalah sebagai berikut:

- Peningkatan saldo laba sudah ditentukan penggunaannya sebesar 23,15% menjadi Rp. 4.019,92 miliar
- Peningkatan komponen ekuitas lainnya sebesar 2,48% menjadi Rp. 3.794,78 miliar Realisasi kepentingan Rp 44,84 miliar

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan YoY
Modal Saham	455,02	455,02	-
Saldo Laba sudah ditentukan Penggunaannya	4.019,92	3.264,31	23,15
Saldo laba belum ditentukan Penggunaannya	726,94	755,63	(3,79)
Komponen ekuitas lainnya	3.794,78	3.702,78	2,48
Kep non pengendali	(44,84)	(45,02)	(0,42)
Jumlah Ekuitas	8.954,17	8.135,07	10,07

Profitabilitas

Uraian	Pendapatan	Beban Pokok Layanan	Profitabilitas
Surat Pos	457.650.739.942	382.649.769.003	16,39
Paket Pos	1.254.282.573.393	739.792.298.752	41,02
Logistik	2.061.931.398.556	1.106.845.846.656	46,32
Jasa Keuangan	1.070.500.710.572	727.653.780.368	32,03
Properti	173.495.586.234	64.352.580.960	62,91
Jumlah	5.017.861.008.697	3.030.806.140.057	39,60

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Secara garis besar, kinerja keuangan konsolidasian s.d. Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Usaha sebesar Rp 5.017,86 Miliar mengalami penurunan sebesar 8,42% dibandingkan periode yang sama tahun 2023.
2. Beban Pokok Layanan terealisasi sebesar Rp 3.030,81 Miliar mengalami penurunan sebesar 21,88% dibandingkan periode yang sama tahun 2023.
3. Laba Kotor sebesar Rp 1.987,05 Miliar mengalami kenaikan sebesar 24,24% dibandingkan periode yang sama tahun 2023.
4. Laba Usaha sebesar Rp 1148,86 Miliar mengalami kenaikan sebesar 24,88% dibandingkan periode yang sama tahun 2023.
5. EBITDA sebesar Rp 1.015,67 Miliar mengalami penurunan sebesar 14,93% dibanding periode yang sama tahun 2023.
6. Laba Sebelum Pajak (EBT) tercapai sebesar Rp 741,15 mengalami pertumbuhan sebesar 5,59% dibandingkan periode yang sama tahun 2023.
7. Laba Bersih Tahun Berjalan tercapai sebesar Rp 747,13 Miliar mengalami pertumbuhan sebesar 2,06% dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

Secara lengkap, potret pencapaian keuangan tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020	Pertumbuhan YoY (%)
Pendapatan Usaha	5.017,86	5.479,12	4.618,39	4.472,94	5.455,53	(8,42)
Beban Pokok Layanan	3.030,81	3.680,79	3.254,25	3.270,27	4.383,66	(21,88)
Laba Kotor	1.987,05	1.798,33	1.364,14	1.202,58	1.071,87	24,24
Beban Usaha						
Pemasaran	35,21	70,26	67,96	54,85	172,68	(49,89)
Umum Dan Administrasi	1.159,92	1.110,99	906,98	1.004,91	978,62	27,23
Pendapatan Lainnya	618,12	628,73	726,58	799,77	682,99	(1,69)
Beban Lainnya	(261,18)	(325,83)	(342,37)	(243,52)	(183,60)	(19,94)
Laba Usaha	1.148,86	919,98	773,40	699,07	530,29	24,88
Pendapatan Keuangan	31,53	43,56	58,84	63,20	56,78	(27,62)
Beban Keuangan	(439,23)	(261,65)	(213,52)	(155,15)	(211,92)	67,87
Laba Sebelum Pajak	741,15	701,89	618,72	607,12	375,15	5,59
Beban Pajak						
Pajak Kini	(2,55)	(1,39)	(0,19)	(1,42)	(0,96)	
Pajak Tangguhan	8,53	27,72	18,52	(15,94)	(32,16)	
Jumlah Manfaat Pajak	5,98	26,33	18,33	17,36	(33,12)	
Laba Tahun Berjalan	747,13	728,21	637,05	589,76	342,03	2,60
Jumlah Laba Komprehensif	91,97	457,27	718,96	357,20	268,40	(79,89)
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	839,11	1.185,49	1.356,01	946,96	610,43	(29,22)
EBITDA	1.015,67	1.193,87	925,82	772,27	776,62	(15,28)

Arus Kas

Pada tahun 2024, PT Pos Indonesia (Persero) mengalami penurunan kas dan setara kas sebesar Rp. 590,55 miliar, penurunan berasal dari kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi. Jumlah kas bersih yang diterima dari aktivitas operasi sebesar minus Rp. 1.204,56 miliar. Kas netto dari aktifitas investasi perusahaan turun yaitu sebesar Rp. 78,26 miliar atau turun 65,05%

dibandingkan dengan tahun 2023. Kas netto Perusahaan dari aktivitas pendanaan naik dari Rp. 508,34 miliar pada 2023 menjadi Rp. 683,31 miliar pada 2024, kenaikan kas netto dari aktivitas pendanaan disebabkan naiknya penerimaan pendanaan eksternal menjadi Rp. 15.503,80 miliar atau naik 54,66% bila dibandingkan tahun 2023 lalu.

Secara lengkap potret laporan arus kas konsolidasian Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan YoY
Arus kas dari Aktivitas Operasi	(1.204,56)	66,79	(1.903,50)
Arus kas dari Aktivitas Investasi	(78,26)	(223,89)	(65,05)
Arus kas dari Aktivitas Pendanaan	683,31	508,34	34,42
Arus kas bersih	(599,51)	351,24	(270,68)

Upaya untuk meningkatkan pengelolaan posisi arus kas dengan pendekatan efisiensi berkelanjutan dilakukan dengan cara:

1. Membentuk *task force* untuk percepatan penagihan piutang dan PYMHD.
2. Melakukan efisiensi pada beban operasi dan beban SDM yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.
3. Melakukan penjadwalan pembayaran kepada pihak mitra.
4. Bekerjasama dengan Bank Sinarmas dan BCA untuk menambah fasilitas pinjaman sebagai solusi untuk menutup *mis match* kas DPK dan pembiayaan operasional BPS.
5. Sentralisasi keuangan di Kantor Pusat sejak Juli 2021

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan perusahaan membayar utang, baik jangka pendek ataupun jangka panjang sangat dipengaruhi oleh sumber likuiditas perusahaan. Tingkat likuiditas yang baik mencerminkan perusahaan tidak mengalami kesulitan untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Hal tersebut diindikasikan oleh rasio lancar sebesar 130,32% turun dari 137,57% di tahun 2023 walau mengalami penurunan tetap mengindikasikan bahwa manajemen mampu menjaga dengan baik stabilitas hutang jangka pendek dan menjaga rasio aset lancar terhadap hutang jangka pendek untuk memastikan terjaminnya pembayaran hutang yang akan jatuh tempo 12 bulan ke depan. Secara keseluruhan kondisi keuangan perusahaan masih baik, hal ini tercermin dari rasio utang terhadap aset sebesar 0,46 kali, tidak terlalu jauh dibandingkan dengan tahun 2023 0,40 kali, mengindikasikan jumlah aset perusahaan lebih besar dari utang yang dimiliki dan menunjukkan upaya manajemen dalam mengendalikan pertumbuhan liabilitas agar dapat seimbang dengan asetnya.

Jangka Pendek

Kemampuan untuk membayar utang jangka pendek dapat dilihat antara lain dari rasio lancar, walau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 137,57% menjadi 130,32% di tahun 2024, rasio lancar perusahaan tetap terjaga dengan baik. Sedangkan posisi rasio kas mengalami penurunan dari 68,00% di tahun 2023 menjadi 34,31% tahun ini. Hal ini menunjukkan manajemen menjaga dengan baik stabilitas utang jangka pendek melalui pengelolaan rasio aset lancar terhadap hutang jangka pendek untuk memastikan terjaminnya pembayaran hutang yang akan jatuh tempo 12 bulan ke depan.

Kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitas jangka pendeknya dapat dilihat melalui rasio-rasio pada tabel berikut:

Rasio	2024	2023
Rasio Lancar (%)	130,32	137,57
Rasio Kas (%)	34,31	68,00

Jangka Panjang

Pada tahun 2024, Perusahaan memiliki kinerja liabilitas yang cukup baik terlihat dari terjaganya rasio liabilitas jangka pendek dan rasio liabilitas jangka panjang. Rasio utang terhadap ekuitas perusahaan terjaga dari 0,68 kali tahun 2023 menjadi 0,84 kali pada tahun 2024. Karakteristik bisnis PT Pos Indonesia (Persero) dengan layanan jasa keuangannya, cenderung memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi. Hal ini disebabkan sebagian besar dana yang dikelolanya adalah dana pihak ketiga, dimana secara akuntansi dianggap sebagai utang. Semakin besar modal pihak ketiga yang dikelola, maka kemungkinan untuk mendapat laba usaha juga semakin tinggi. Tahun 2024 posisi rasio utang terhadap ekuitas yang berada dibawah 1 kali, mengindikasikan permodalan yang tetap kuat.

Tahun 2024 posisi rasio utang terhadap ekuitas yang berada dibawah 1 kali, mengindikasikan permodalan yang semakin kuat

Kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka panjang dapat dilihat melalui rasio-rasio pada tabel:

Rasio	2024	2023
Rasio Utang Terhadap Ekuitas (kali)	0,84	0,68
Rasio Utang Terhadap Total Aset (kali)	0,46	0,40
Rasio EBITDA Terhadap Beban Bunga (%)	266,90	402,46

KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Perusahaan membedakan umur piutang usaha logistik dan non-logistik (ritel) dikarenakan jatuh tempo pelunasan yang berbeda. Jatuh tempo piutang logistik adalah 3 bulan, dan untuk piutang usaha nonlogistik jatuh tempo tagihan adalah 1 bulan. Pada 31 Desember 2024 dan 2023 Perusahaan telah membentuk provisi penurunan nilai piutang usaha berdasarkan tingkat penurunan historis secara kolektif dan historis kreditparapelanggansecara individual. Perusahaan tidak membedakan piutang usaha pihak berelasi (Pemerintah) dan piutang usaha pihak ketiga dalam menilai jumlah yang jatuh tempo. Dimana perusahaan telah melakukan telaah terkait dengan kolektibilitas piutang Pemerintah tersebut. Berdasarkan penelaahan terhadap kolektabilitas akun piutang usaha pada akhir periode pelaporan, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa pencadangan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutupi kerugian jika terdapat piutang yang tidak dapat tertagih pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Piutang usaha tidak digunakan sebagai jaminan utang bank.

PERMODALAN

Struktur permodalan

Pada 31 desember 2024 total ekuitas PT Pos Indonesia (Persero) tercatat Rp. 8.954,17 miliar sedangkan total liabilitas PT Pos indonesia (Persero) per 31 Desember 2024 adalah Rp. 7,511,66 miliar. Rasio Ekuitas terhadap jumlah liabilitas pada tahun 2024 berubah dari 0,65 kali pada 2023 menjadi 0,54 kali pada 2024, hal ini mengindikasikan struktur permodalan yang tetap kuat dan semakin baik untuk menjaga kelangsungan bisnis Perusahaan pada periode mendatang.

Pada 2024 total aset PT Pos Indonesia (Persero) tercatat sebesar Rp. 16.465,84 miliar sehingga pada akhir 2024 rasio modal sendiri terhadap total aset menjadi 0,54 kali turun jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 0,60 kali. Hal ini menunjukkan kebijakan permodalan yang dijalankan perusahaan berjalan dengan efektif sesuai dengan arahan dari pemegang saham.

Rincian struktur modal (*capital structure*) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas:

1. Ekuitas sebesar Rp. 8.954,17 miliar terdiri dari:
 - a. Modal saham Rp. 455,02 miliar;
 - b. Saldo laba sudah ditentukan penggunaannya Rp. 4.019,92 miliar;
 - c. Saldo laba belum ditentukan penggunaannya Rp. 726,94 miliar;
 - d. Komponen ekuitas lainnya Rp. 3.794,78 miliar;
 - e. Kepentingan non-pengendali Rp. (44,84) miliar.
2. Utang berbasis bunga/sukuk sebesar Rp. 7.511,66 miliar yang terdiri dari:
 - a. Pinjaman bank jangka pendek Rp. 4.421,13 miliar;
 - b. Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun :
 - i. Pinjaman Jangka Menengah Rp. 99,47 miliar;
 - ii. Utang sewa pembiayaan Rp. 42,14 miliar;
 - c. Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:
 - i. Imbalan Pasca Kerja Rp. 1.011,32 miliar
 - ii. Utang sewa pembiayaan Rp. 88,78 miliar.
 - iii. Obligasi Rp. 398,08 miliar

Kebijakan Dan Dasar Pemilihan Permodalan

Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Perseroan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Kebijakan Perseroan adalah untuk mempertahankan struktur permodalan yang sehat dalam rangka untuk mengamankan akses untuk membiayai dengan biaya yang wajar. Tabel di bawah merupakan ringkasan jumlah modal Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024.

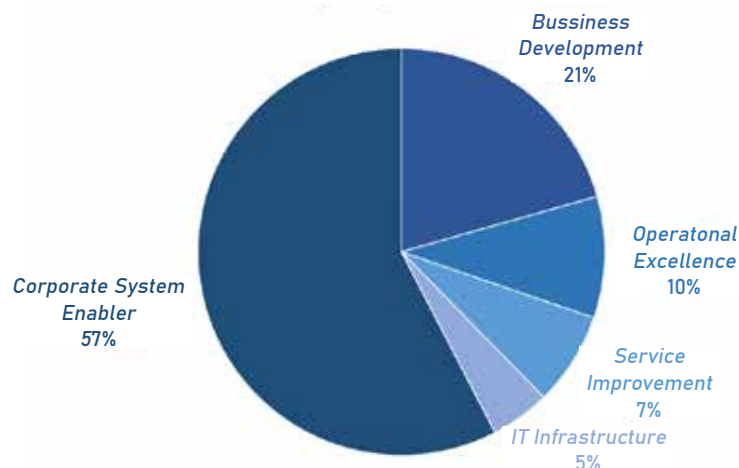
MODAL PERSEROAN			
Uraian	2024	2023	YoY (%)
Modal	455,02	455,02	
Saldo Laba ditahan	4.746,86	4.019,94	18,08
Komponen Ekuitas Lainnya	3.794,78	3.702,78	2,48
Kepentingan Non Pengendali	(44,84)	(45,03)	0,42
Jumlah	8.954,17	8.135,07	10,07



INVESTASI

Pencapaian CAPEX (*Capital Expenditure*) sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 terserap 274,82 milyar atau tercapai 49,8% dari target RKAP tahun 2024. Adapun progres kinerja investasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut ini:

Realisasi *Capital Expenditure* Tahun 2024



KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan pembagian dividen PT Pos Indonesia (Persero) mengacu kepada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) terkait jumlah yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pengembangan Perusahaan. Sepanjang perusahaan berdiri pembayaran dividen baru dimulai tahun 2024 atas kinerja tahun 2023. Berikut pembayaran dividen 5 (lima) tahun terakhir:

Tahun	Kebijakan	Jumlah Dividen	Tanggal Pembayaran
2019	RUPS	Tidak ada Pembagian	Tidak Ada
2020	RUPS	Tidak ada Pembagian	Tidak Ada
2021	RUPS	Tidak ada Pembagian	Tidak Ada
2022	RUPS	Tidak ada Pembagian	Tidak Ada
2023	RUPS	Rp. 20.000.000.000	03 September 2024

—Laporan Tata Kelola Perusahaan





Good Corporate Governance (GCG)

Komitmen PT Pos Indonesia (Persero) untuk melaksanakan praktik-praktik *Good Corporate Governance (GCG)* yang berorientasi pada prinsip ESG sebagai bagian integral dari bisnis untuk pencapaian visi dan misi perusahaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial. Salah satunya dengan menerbitkan Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance Code*) yang selalu ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.



Panduan penerapan *Good Corporate Governance* PT Pos Indonesia (Persero) dituangkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor:210/Dekom/0621 dan Nomor:KD.052/Dirut/0621 Tentang Panduan Penerapan *Good Corporate Governance* di PT Pos Indonesia (Persero) yang merupakan penjabaran dari kaidah-kaidah *Good Corporate Governance* berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan, Visi, Misi dan Kredo Perusahaan serta praktik-praktik terbaik dalam *Good Corporate Governance*.

Panduan Penerapan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu wujud komitmen tersebut dalam menjabarkan Tata Nilai Dasar PT Pos Indonesia (Persero) ke dalam interpretasi perilaku yang terkait dengan etika bisnis dan tata perilaku. PT Pos Indonesia (Persero) bertekad akan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam seluruh aktivitasnya. Komitmen ini ditegaskan karena diharapkan dengan penerapan *good corporate Governance* akan memberikan manfaat bagi Perusahaan dan seluruh *stakeholders*nya antara lain berupa:

1. Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik dan transparan.
2. Meningkatkan efisiensi operasional Perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
3. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan karena kepercayaan kreditur yang lebih tinggi terhadap Perusahaan.
4. Meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya.
5. Meningkatkan *Corporate Image*, kepuasan pelanggan dan *stakeholder* lainnya.

Good Corporate Governance

Code merupakan acuan kerja bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan PT Pos Indonesia (Persero)

Good Corporate Governance Code merupakan acuan kerja bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan PT Pos Indonesia (Persero). Dengan demikian diharapkan seluruh proses kerja dapat memiliki standar yang tinggi dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance Code* PT Pos Indonesia (Persero) dirumuskan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, visi dan misi Perusahaan serta praktik-pratik terbaik *Good Corporate Governance*.

Good Corporate Governance Code berlaku sebagai kebijakan dasar yang harus dipatuhi oleh segenap jajaran PT Pos Indonesia (Persero), dan PT Pos Indonesia (Persero) harus pula menginformasikan *Good Corporate Governance Code* kepada semua pihak yang berkepentingan, dengan demikian diharapkan semua pihak akan menghormati peraturan *Good Corporate Governance Code* dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai acuan bagi PT Pos Indonesia (Persero) dalam mencapai tujuan. PT Pos Indonesia (Persero) akan melakukan evaluasi dan revisi yang diperlukan atas peraturan ini untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi karena lingkungan bisnis yang dinamis.

Maksud dan Tujuan penerapan GCG di Perusahaan

1. Memaksimalkan nilai Perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun

internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan.
3. Mendorong agar manajemen Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan.
4. Meningkatkan kontribusi Perusahaan terhadap perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan nilai investasi Perusahaan.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Untuk mewujudkan kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang telah disusun dan dimiliki PT Pos Indonesia (Persero) mengatur antara lain:

1. Program pengenalan anggota dewan komisaris dan direksi baru.
2. Rencana jangka panjang perusahaan (RJPP).
3. Rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP).
4. Pendelegasian wewenang rups, dewan komisaris dan direksi.
5. Pengelolaan sumber daya manusia.
6. Integritas dalam aktivitas bisnis.
7. Data perusahaan, kerahasiaan dan keterbukaan informasi.
8. Penyelewengan dan benturan kepentingan.
9. Pengelolaan kegiatan pemasaran.
10. Manajemen risiko.
11. Tata kelola teknologi informasi (IT *governance*).
12. Pengelolaan keuangan.
13. Pengadaan barang dan jasa.
14. Manajemen mutu.
15. Sistem penilaian kinerja dan remunerasi.
16. Sistem audit.
17. Pengendalian gratifikasi.
18. Pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan.
19. Pelaporann harta kekayaan penyelenggara negara bagi dewan komisaris, direksi, pejabat setingkat dan dua tingkat dibawah direksi.
20. Tim sosialisasi, pelaksanaan dan sosialisasi GCG.
21. Pengaturan untuk anak perusahaan (*subsidiary governance*) dan/atau perusahaan patungan.
22. Pelaporan.
23. Tanggung jawab sosial perusahaan
24. Keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan lingkungan (K3LL).
25. Pengelolaan aset.
26. Penelitian dan pengembangan.

PRINSIP-PRINSIP GCG

Sebagai perusahaan BUMN, PT Pos Indonesia (Persero) secara terus-menerus meningkatkan penerapan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik guna memaksimalkan nilai perusahaan, mendorong pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan dan efisien dengan cara menerapkan prinsip TARIF yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and fairness*, yang selaras dengan nilai-nilai ESG untuk menjamin praktik bisnis yang berkelanjutan dan etis, sehingga dapat memenuhi kewajiban yang baik kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Mitra Bisnis serta pemangku Kepentingan lainnya. Kesadaran akan pentingnya GCG dan berupaya terus menerus dalam melakukan *improvement* dan menjadikannya sebagai bagian dari budaya perusahaan didalam menerapkan GCG, hal ini merupakan langkah-langkah komitmen yang dilakukan setiap insan PT Pos Indonesia (Persero) dalam menjalankan praktik-praktik bisnis yang sehat dan berkesinambungan dalam pengelolaan kegiatan usahanya. Dalam setiap aktivitasnya, PT Pos Indonesia (Persero) senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip GCG sebagai berikut :

1. *Transparency* (Transparansi)

Transparansi adalah keterbukaan mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Perseroan kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan akan menjamin akurasi informasi material menyangkut kinerja, keadaan keuangan, pengelolaan serta kepemilikan saham Perusahaan dan lain-lain informasi yang penting dan relevan serta akan mengungkapkannya secara terbuka, jelas dan tepat waktu. Perusahaan akan mengungkapkan informasi tersebut di atas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disarankan oleh praktik terbaik GCG.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, hak, tanggung jawab serta pelaksanaan dan mekanisme pertanggungjawaban organ perseroan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Perusahaan akan mendefinisikan dan mengkomunikasikan fungsi, hak, dan tanggung jawab serta kewajiban masing-masing Organ Perseroan. Oleh karenanya, setiap keputusan dalam perusahaan akan jelas aspek akuntabilitasnya. Disamping itu, Perusahaan senantiasa berupaya menjaga keseimbangan kepentingan Pemegang Saham, serta pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Perusahaan menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu cara untuk mengatasi persoalan yang timbul karena adanya pembagian tugas (*division of authority*) antar Organ Perseroan serta mengurangi dampak dari *agency problem* yang timbul akibat perbedaan kepentingan antar Organ Perusahaan.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

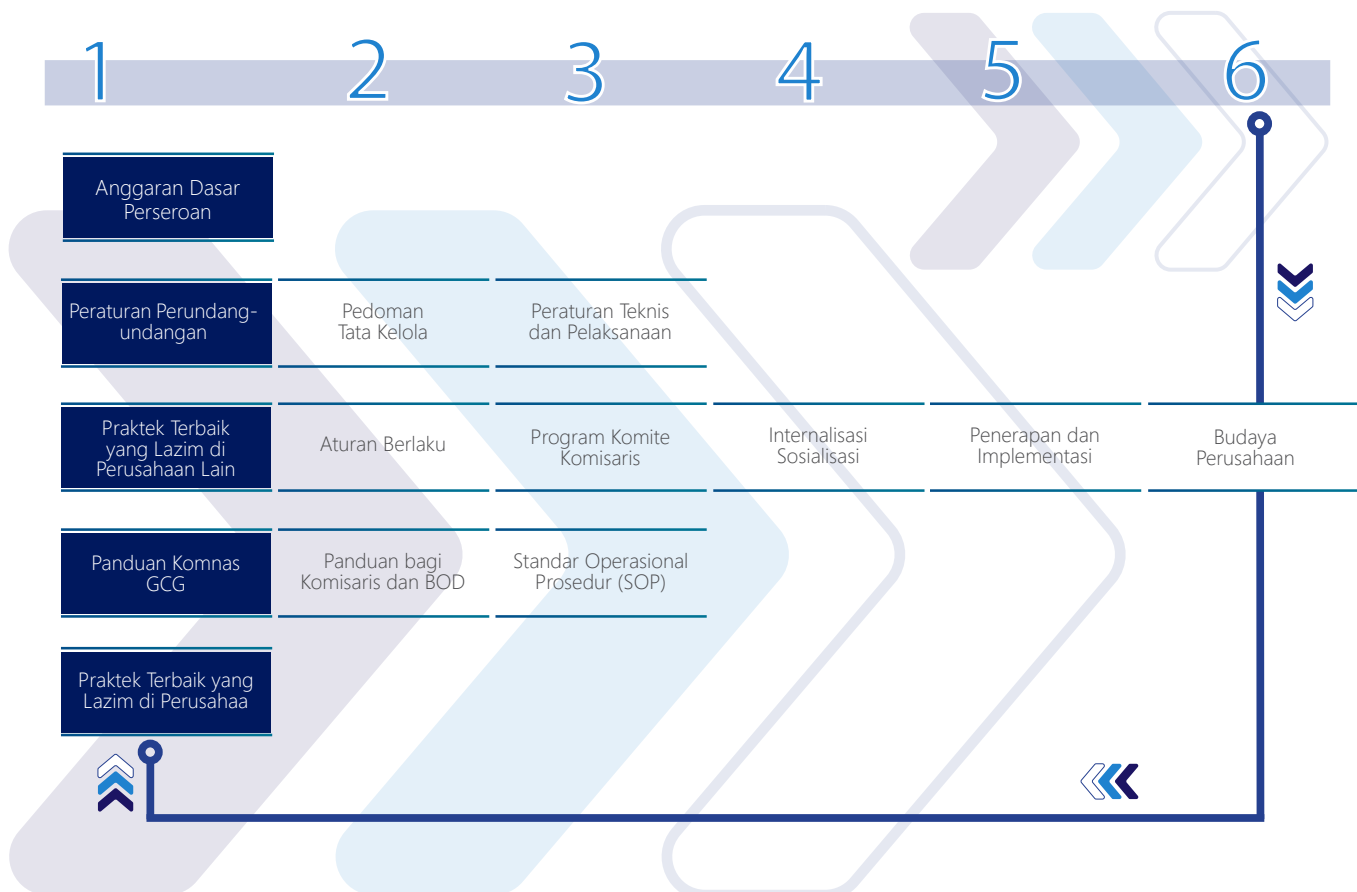
Pertanggungjawaban adalah penghormatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan komitmen untuk mengelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan akan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*). Perusahaan akan selalu mengupayakan kemitraan dengan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam batasbatas peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang sehat.

4. *Independency* (Kemandirian)

Kemandirian adalah pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar Organ Perseroan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang terbaik bagi Perusahaan. Setiap Organ Perseroan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Selain Organ Perseroan tidak boleh mencampuri pengurusan Perusahaan.

5. *Fairness* (keadilan)

Keadilan adalah kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan juga menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) akan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan akan selalu mengupayakan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

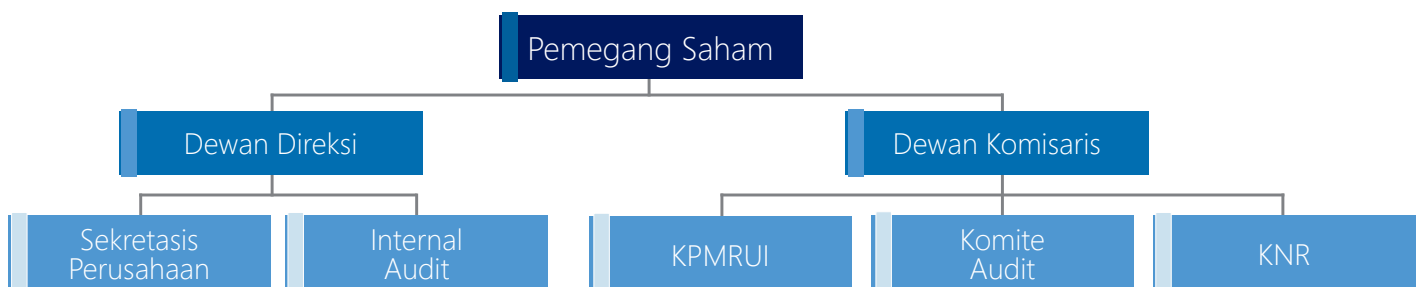


STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

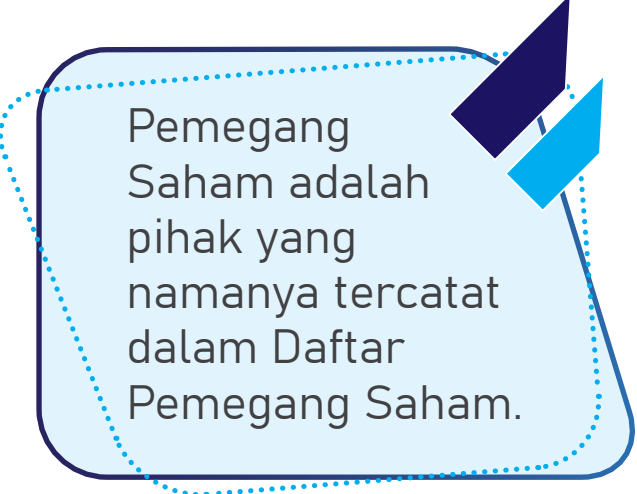
Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan organ utama perusahaan yang terdiri dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris serta Direksi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing yang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap organ mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Hal terpenting dalam kebijakan tata kelola perusahaan adalah adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara organ perusahaan. RUPS merupakan wadah para pemegang saham yang memiliki wewenang yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan

sesuai amanah yang diberikan, sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan yang memadai terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi serta melakukan penasihat agar kinerja perusahaan lebih baik.

Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite khusus yang bertugas membantu Dewan Komisaris dan memberi saran sesuai ruang lingkup tugas komite yang bersangkutan. Komite - komite di bawah Dewan Komisaris adalah Komite Audit, Komite Manajemen Risiko Usaha dan Investasi (KPMRU) dan Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR). Selain itu, Direksi telah membentuk organ-organ Pendukung yaitu Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.



PEMEGANG SAHAM



Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.

Hak Pemegang Saham

Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham memiliki hak yang harus dilindungi, antara lain adalah:

1. Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, dengan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
2. Memperoleh informasi material mengenai Perusahaan, secara tepat waktu, terukur, dan teratur sepanjang informasi tersebut tidak bersifat rahasia.
3. Memperoleh penjelasan tentang penerapan GCG.
4. Menerima pembagian dari keuntungan Perusahaan dalam bentuk dividen, dan sisa hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya.
5. Hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Pemegang Saham:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik.
3. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan.
4. Menetapkan Auditor Eksternal berdasarkan usulan yang diterima dari Dewan Komisaris.
5. Menetapkan remunerasi dan tantiem Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi melalui RUPS.
7. Memberikan persetujuan atas aksi korporasi Perusahaan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pemegang Saham:

1. Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak melakukan kegiatan pengawasan dan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, Perusahaan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat.
4. Melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi melalui mekanisme RUPS.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan Organ Perusahaan yang memiliki semua kewenangan yang tidak didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS merupakan wadah bagi pemegang saham dalam mempengaruhi dan menetapkan kebijakan bagi Perusahaan. RUPS merupakan forum di mana Dewan Komisaris dan Direksi melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas serta kinerjanya kepada Pemegang Saham. Berbagai agenda yang dibahas dalam RUPS antara lain adalah penetapan arah dan strategi jangka panjang perusahaan yang mengintegrasikan aspek *sustainability* dan tanggung jawab sosial, penilaian kinerja operasional dan keuangan, penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta remunerasi mereka dan agenda lain yang diusulkan oleh Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Perusahaan berkewajiban untuk memberikan penjelasan yang lengkap dan informasi yang akurat kepada Pemegang Saham berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, RUPS terdiri atas:

1. RUPS Tahunan untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) diselenggarakan selambat-lambatnya akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan.
2. RUPS Tahunan untuk mengesahkan Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan diselenggarakan selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
3. RUPS Luar Biasa yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Pemegang Saham atau atas usulan Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Wewenang RUPS

1. Menyetujui atau menolak Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
2. Menetapkan perhitungan alokasi laba Perusahaan untuk:
 - a. Laba yang ditahan dan cadangan;
 - b. Dividen kepada Pemegang Saham;
 - c. Bonus Direksi, Dewan Komisaris, dan Pekerja
3. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Menetapkan target kinerja masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Melakukan penilaian kinerja secara kolektif maupun Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Menetapkan auditor eksternal untuk melakukan audit keuangan atas laporan keuangan.
7. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
8. Menetapkan kebijakan mengenai kemungkinan adanya konflik kepentingan yang terkait dengan Dewan Komisaris.
9. Menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dirangkap oleh seorang Dewan Komisaris.
10. Menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dirangkap oleh Direksi pada Anak Perusahaan.
11. Mendelegasikan kepada Dewan Komisaris tentang pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi.

Penyelenggaraan RUPS

1. Perusahaan memberikan panggilan kepada Pemegang Saham tepat waktu yaitu dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, memberikan informasi mengenai agenda RUPS, termasuk usul yang diajukan oleh Direksi.
2. Perusahaan melengkapi surat undangan pemanggilan RUPS dengan pernyataan mengenai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.
3. Pemegang Saham mendapatkan penjelasan mengenai hal-hal lain dalam agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung.
4. Perusahaan menjamin keputusan RUPS yang diambil melalui prosedur yang transparan dan adil.
5. Perusahaan memberikan risalah RUPS kepada Pemegang Saham jika diminta. Risalah RUPS yang dibuat akan memuat pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung terhadap keputusan yang dibuat.
6. Perusahaan mengungkapkan kepada Pemegang Saham sistem penentuan honor/gaji dan fasilitas bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta rincian mengenai honor/gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
7. Perusahaan memberikan informasi mengenai rincian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan khusus untuk RUPS, Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
8. Perusahaan memberikan informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Perusahaan yang dimuat dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
9. Perusahaan memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung.
10. RUPS dalam acara lain-lain berhak mengambil keputusan sepanjang semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan dengan suara bulat dapat menyetujui tambahan mata acara RUPS.
11. Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS dan risalah RUPS ini wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Kewajiban untuk tanda tangan tersebut tidak di syaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan Akta Notaris

Keputusan RUPS Tahun Buku 2023 :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023.
2. Mengesahkan :
 - a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin dan Sumargo (Kreston Indonesia) sesuai laporannya Nomor : 00077/2.1127/AU.1/05/0797-1/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material"
 - b. Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin dan Sumargo (Kreston Indonesia) sesuai laporannya Nomor : 00043/2.1127/AU.2/05/0797-1/0/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material".
3. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar Rp 748.699.105.099,00 sebagai berikut :
 - a. Sebesar 2,675% dari laba bersih atau sebesar Rp 20.000.000.000,00 ditetapkan sebagai dividen tunai
 - b. Sebesar 97,33% dari laba bersih atau sebesar Rp 728.699.105.099,00 ditetapkan sebagai cadangan.
4. Penetapan Tantiem bagi Dewan Komisaris dan Direksi atas kinerja Tahun buku 2023, Gaji bagi Direksi, Honorarium bagi Dewan Komisaris, berikut fasilitas dan tunjangan untuk tahun 2024, akan ditetapkan secara tersendiri.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024, serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun Buku 2024, dilakukan secara tersendiri oleh RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
6. Arahan Rapat Umum Pemegang Saham :
 - a. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Perusahaan dalam rangka memanfaatkan peluang bisnis, yang tidak hanya berfokus pada volume penjualan akan tetapi juga kepada menarik pelanggan baru dengan promosi yang efektif.
 - b. Meningkatkan tata kelola dalam setiap transaksi penyediaan jasa logistik yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama khususnya yang terkait dengan pekerjaan pengadaan barang dan jasa dari pemerintah antara lain dengan memperbaiki dalam melakukan perjanjian dengan memperhatikan aspek legal dan operasional yang prudent untuk menghindari terjadinya wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian terhadap perusahaan.

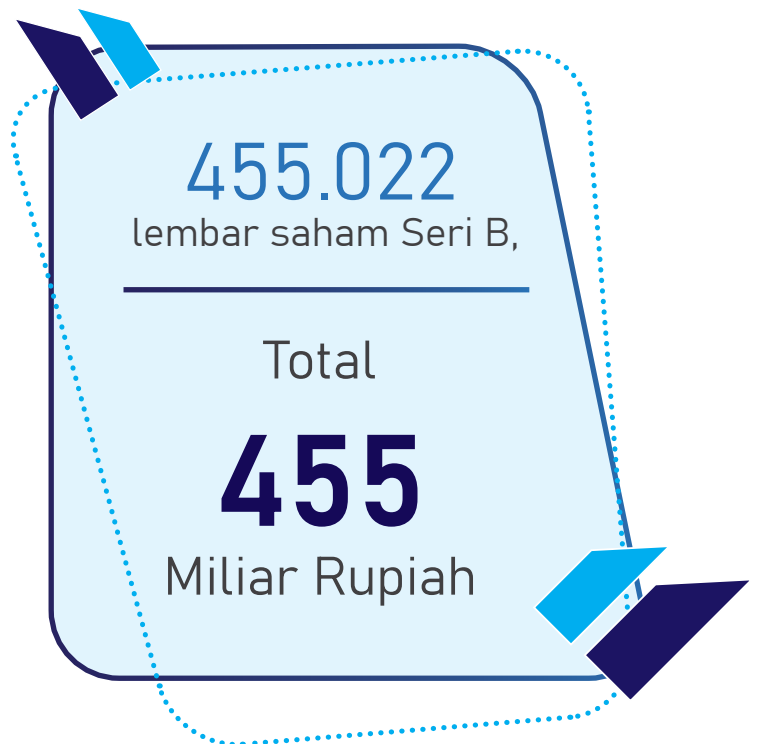
Keputusan RUPS Tahun Buku 2024

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada 31 Desember 2024.
2. Mengesahkan :
 - a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono (Nexia) sesuai laporannya nomor: 00139/3.0357/AU.1/05/0127-1/1/IV/2025 pada tanggal 8 April 2025 dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material”.
 - b. Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono (Nexia) sesuai laporannya Nomor: 00392/3.0357/AU.2/05/0127-1/1/V/2025 tanggal 5 Mei 2025 dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material”.



3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2024, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig, acquit, et de charge) kepada seluruh Anggota Direksi atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan telah tersermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.
4. Menetapkan penggunaan Laba Konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2024 sebesar Rp 746.936.851.666,00 sebagai berikut :
 - a. Sebesar 10,03% atau sejumlah Rp 76.412.425.284,00 ditetapkan sebagai dividen tunai yang pembayarannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Bagian dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan sebesar Rp 167.931,00 dibayarkah secara tunai ke rekening yang akan ditunjuk oleh Menteri BUMN.
 - ii. Bagian dividen atas Saham Seri B Perseroan sebesar Rp 76.412.257.353,00 dibayarkan ke rekening yang akan ditunjuk oleh PT Danantara Asset Management (Persero)
 - iii. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran Dividen Perseroan, termasuk untuk melakukan :
 - Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku dan
 - Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Sebesar 89,77% atau sejumlah Rp 670.524.426.382,00 ditetapkan sebagai laba ditahan.
5. Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja/ Insentif Khusus Tahun Buku 2024, Gaji untuk direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk tahun 2025 akan ditetapkan secara tersendiri oleh Pemegang Saham Seri B.
6. Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisari setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan

- Kuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual serta Laporan Hasil Evaluasi Komposit Risiko Tahun Buku 2025.
7. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B untuk menetapkan:
 - a. KAP pengganti apabila KAP yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun; dan
 - b. Kondisi persyaratan penunjukan dan honorarium KAP pengganti.
 8. Dewan Komisaris agar melakukan evaluasi setiap tahun atas kinerja KAP dan mengusulkan kembali untuk penetapan KAP Tahun 2026.
 9. Menyetujui perubahan pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dalam hal ini perubahan nama Pemegang Saham Perseroan yang sebelumnya adalah PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) menjadi PT Danantara Asset Management (Persero), sehingga susunan Pemegang Saham menjadi sebagai berikut :
 - a. Negara Republik Indonesia sebanyak 1 lembar saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya Rp 1.000.000,00
 - b. PT Dananara Asset Management (Persero) sebanyak 455.022 lembar saham Seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 455.022.000.000,00
 10. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.



DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang diangkat oleh RUPS yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi meliputi, namun tidak terbatas pada, rencana pengembangan Perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan peraturan perundangan yang berlaku. Dewan Komisaris akan selalu mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku serta dapat menggunakan saran profesional yang independen dan/atau dapat membentuk komite-komite, jika diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya.

Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris

Keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
2. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
3. Dalam hal Dewan Komisaris lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
4. Sekurang-kurangnya 20% dari anggota Dewan Komisaris harus berasal dari kalangan di luar Perusahaan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan:

- a. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham.
- b. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan atau perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada Perusahaan dan afiliasinya.
- c. Bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perusahaan.

Kriteria Dewan Komisaris

Kriteria Dewan Komisaris Pos Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-10/MBU/10/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang

Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

1. Persyaratan formal anggota Dewan Komisaris, yaitu:
 - a. orang perseorangan;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan; dan
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
2. Persyaratan materiil anggota Dewan Komisaris yaitu:
 - a. integritas;
 - b. dedikasi;
 - c. memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero dimana yang bersangkutan dicalonkan; dan
 - e. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
3. Persyaratan lain anggota Dewan Komisaris, yaitu:
 - a. bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II;
 - b. bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah;
 - c. tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
 - d. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter;
 - e. bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari instansi yang bersangkutan; dan
 - f. bagi bakal calon anggota Dewan Komisaris yang berasal dari penyelenggara negara harus melaporkan Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Bukti Laporan LHKPN kepada institusi yang berwenang.

Pengangkatan Dewan Komisaris

Pengangkatan Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-10/MBU/10/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Yaitu melalui beberapa ketentuan yaitu :

1. Sumber bakal calon Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN berasal dari :
 - a. Mantan Direksi BUMN;
 - b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
 - c. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemerintah;
 - d. Sumber Lain.
2. Penjaringan
 - a. Menteri, Sekretaris, Deputi Teknis, dan/atau Deputi mencari bakal calon dari berbagai sumber.
 - b. Semua bakal calon diadministrasikan oleh Deputi.

3. Penilaian

- a. Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Dewan Komisaris adalah seseorang yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal, Persyaratan Materiil, dan Persyaratan Lain.
- b. Evaluasi pemenuhan Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain dilakukan oleh Deputi. Dalam hal Deputi tidak memiliki data dan/atau informasi yang cukup, pembuktian dapat dilakukan dengan menandatangani pernyataan pemenuhan Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain oleh bakal calon yang bersangkutan.
- c. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan sebagaimana dimaksud pada poin b terbukti tidak benar, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan Menteri memproses pernyataan yang tidak benar tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Penilaian pemenuhan Persyaratan Materiil, dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri
- e. Penilaian pemenuhan Persyaratan Materiil, dilakukan dengan cara:
 - i. menilai daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung;
 - ii. khusus untuk menilai integritas dilakukan dengan pernyataan tertulis dari calon yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini; dan/atau
 - iii. wawancara.

- f. Hasil Penilaian disajikan dalam bentuk narasi kualitatif dengan kriteria “Disarankan” atau “Tidak Disarankan”.
 - g. Penilaian sebagaimana dimaksud pada poin e, tidak dilakukan apabila bakal calon merupakan pejabat ex officio dan pejabat Pemerintah yang diangkat dengan Keputusan Presiden.
 - h. Bagi BUMN tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan pengangkatan anggota Dewan Komisaris memerlukan penilaian oleh regulator, Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak diwajibkan, selanjutnya pemenuhan persyaratan materiil sepenuhnya disesuaikan dengan hasil penilaian regulator.
 - i. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris pada BUMN yang sama, dilakukan berdasarkan penilaian Deputi atas kemampuan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa jabatannya. Penyajian hasil penilaian dilakukan dalam bentuk narasi kualitatif.
4. Usulan Pengangkatan
- a. Bagi calon yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal, dan Persyaratan Lain serta telah dilakukan Penilaian dengan kriteria “Disarankan”, dapat ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris.
 - b. Bagi BUMN tertentu, penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus Penilaian sesuai ketentuan sektoral (sesuai ketentuan yang berlaku di bidang usaha BUMN yang bersangkutan). Dalam hal penetapan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum Penilaian sesuai ketentuan sektoral, maka dalam keputusan pengangkatannya dinyatakan bahwa pengangkatan yang bersangkutan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus Penilaian.
 - c. Penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat dilakukan melalui cara:
 - i. Keputusan Menteri apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh Negara;
 - ii. Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara.
 - d. Bagi BUMN terbuka, daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris.
 - e. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris (jika ada). Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam

jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN berakhir pada batas waktu tersebut.

- f. Dalam hal keputusan pengangkatan dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, maka setelah Keputusan ditetapkan, Deputy memproses penyerahan Surat Keputusan kepada anggota Dewan terpilih. Dalam proses penyerahan, Deputy dibantu oleh pejabat Eselon II yang bertanggung jawab di bidang hukum, Asisten Deputy yang membidangi manajemen sumber daya manusia, dan Asisten Deputy Sektor.
- g. Setelah penyerahan dilakukan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputy untuk diadministrasikan.
- h. Dalam hal pengangkatan akan ditetapkan dalam RUPS, penyampaian hasil Penilaian kepada Menteri disertai dengan surat penetapan calon dan surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS. Setelah RUPS dilaksanakan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputy untuk diadministrasikan.
- i. Deputy mengadministrasikan semua dokumen terkait dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, termasuk dokumentasi proses pengangkatan dan Penilaian.

- j. Anggota Dewan Komisaris terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan Menteri/RUPS.
- k. Anggota Dewan Komisaris mulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal penyerahan keputusan atau tanggal yang ditetapkan dalam keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler.

Pemberhentian (Masa Jabatan)

1. Masa jabatan Dewan Komisaris 5 (lima) tahun sejak tanggal diangkat oleh RUPS.
2. Jabatan Dewan Komisaris akan berakhir jika:
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Masa jabatan berakhir;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri/RUPS.
3. RUPS dapat memberhentikan jabatan Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan pemberhentian, setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dan hadir di RUPS yang diselenggarakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian tersebut. Jika RUPS tidak diselenggarakan

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka pemberhentian paruh waktu tersebut batal.

4. Apabila seorang Dewan Komisaris berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan Dewan Komisaris yang digantikannya, kecuali RUPS menetapkan lain.
5. Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham dengan tembusan kepada Dewan Komisaris lainnya dan Direksi Perusahaan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dewan Komisaris yang mengundurkan diri dan atau berhenti sebelum maupun setelah masa jabatan berakhir, kecuali karena meninggal dunia tetap dimintakan pertanggungjawaban sejak pengangkatannya sampai tanggal penetapan pengunduran dirinya dalam RUPS.
7. Dalam hal terdapat penambahan Dewan Komisaris, maka masa jabatan Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris lainnya yang telah ada, kecuali RUPS menetapkan lain.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pembagian tugas Anggota Dewan Komisaris diatur oleh Dewan Komisaris dan ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris, dengan tujuan untuk

meningkatkan kualitas pendalaman terhadap hal-hal yang menjadi topik pengawasan Dewan Komisaris. Pembagian tugas dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. cakupan tugas dari seluruh tugas Direksi;
2. latar belakang keahlian dan pengalaman Komisaris, untuk mendapatkan kualitas pengawasan yang optimal;
3. posisi anggota Dewan Komisaris yang sedang ditugaskan/menjabat sebagai Ketua Komite Dewan Komisaris;
4. pembagian tugas Dewan Komisaris ditetapkan dan dilakukan review terhadap pembagian tugas tersebut setiap 2 (dua) tahun.

Tanggung Jawab

1. Melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.
2. Menyusun rencana kerja tahunan Dewan Komisaris yang menjadi bagian dari RKAP dan melakukan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan rencana kerja dimaksud.
3. Memastikan kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai RJPP dan melakukan pengukuran dan penilaian kinerja Dewan Komisaris secara *self assessment*.
4. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta memberikan arahan kepada Direksi antara lain mengenai sistem pengendalian intern Perusahaan, manajemen risiko Perusahaan, sistem teknologi informasi yang digunakan Perusahaan, pengelolaan SDM,

- kebijakan pengelolaan keuangan dan akuntansi, pengadaan barang dan jasa, standar mutu dan pelayanan.
5. Memastikan kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku, pedoman tata kelola perusahaan dan perjanjian dengan pihak ketiga, serta memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Pengembangan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan.
 6. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada RUPS.
 7. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, dalam hal Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 8. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.
 9. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan RUPS.
 3. Melakukan fungsi dan tugas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa perusahaan dan pelaksanaannya.
 4. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJPP dan RKAP yang disiapkan Direksi.
 5. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP.
 6. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan.
 7. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
 8. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan atau kejadian penting lainnya yang perlu diketahui oleh RUPS.
 9. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan, memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai laporan tahunan, apabila diminta.
 10. Menyusun program kerja tahunan dan anggaran biaya Dewan Komisaris serta dimasukkan dalam RKAP, mengusulkan akuntan publik, membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
 11. Memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Kewajiban

Dalam melakukan pengawasan atas pengurusan perseroan, Dewan Komisaris berkewajiban :

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.
2. Melakukan fungsi dan tugas pengendalian dan pengawasan atas rencana investasi dan risiko usaha.

12. Memastikan bahwa dalam laporan tahunan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan.
13. Menetapkan kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya.
14. Menetapkan kebijakan mengenai informasi lingkungan bisnis dan permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada usaha dan kinerja Perusahaan yang perlu mendapatkan perhatian Dewan Komisaris.
15. Menetapkan kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya.
16. Menetapkan kebijakan pengusulan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan kebijakan penilaian kinerja Direksi Kolegial maupun Individual.
17. Menetapkan mekanisme untuk merespon/menindaklanjuti saran, permasalahan atau keluhan dari stakeholder dan menyampaikan kepada Direksi tentang saran penyelesaian yang diperlukan.
18. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, khususnya tentang manajemen karir di perusahaan, sistem dan prosedur

promosi, mutasi dan demosi di perusahaan dan pelaksanaannya.

19. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Board Charter / Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Untuk kejelasan sistem dan struktur hubungan antar organ perseroan, kewenangan, tugas dan hubungan kerja masing-masing organ perseroan agar sejalan dengan Prinsip GCG, maka Perseroan telah menyusun pedoman berupa Panduan Bagi Komisaris dan Direksi (Board Manual) sesuai dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: 317/Dekom/0921 dan KD.082/Dirut/0921 tanggal 08 September 2021 tentang Board Manual PT Pos Indonesia (Persero) yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris No.306/DEKOM/1222 tentang Piagam Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) tanggal 30 Desember 2022 yang berisikan :

1. Program Pengenalan Dewan Komisaris;
2. Program Pengembangan Kompetensi;
3. Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris;
4. Etika Jabatan;
5. Pembagian Tugas Dewan Komisaris;
6. Kewenangan Dewan Komisaris;
7. Kewajiban Dewan Komisaris;
8. Pengambilan Keputusan;
9. Perencanaan Kerja Dewan Komisaris;
10. Mekanisme Persetujuan RKAP dan RJPP;

11. Tata Tertib Rapat Dewan Komisaris;
12. Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi;
13. Rapat Komite – Komite;
14. Organ Pendukung Dewan Komisaris

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung komisaris yaitu Sekretariat Dewan Komisaris, Komite Audit (KA), Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) serta Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi (KPMRUI). Komite – komite yang dibentuk mempunyai tugas yang berkaitan dengan fungsi pengawasan Dewan Komisaris antara lain namun tidak terbatas pada aspek fungsi pengendalian internal, fungsi nominasi dan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, penerapan manajemen risiko dan penerapan prinsip-prinsip GCG sesuai peraturan yang berlaku.

Penilaian atas komite dibawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menilai bahwa kerja sama antara Komite Audit (KA), Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) serta Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi (KPMRUI) telah berjalan dengan sangat baik. Begitupun dukungan yang diberikan Dewan Komisaris kepada Komite Audit (KA), Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) serta Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi (KPMRUI) telah dilaksanakan sebaik mungkin melalui pemberian arahan kepada Komite Audit dalam menjalankan tugas sebagaimana telah ditetapkan di dalam Piagam Komite Audit PT Pos Indonesia (Persero), maupun Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi (KPMRUI) dan Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) sesuai fungsinya. Penilaian atas kinerja pada komite-komite dibawah Dewan Komisaris.

1. Penilaian Kinerja Komite Audit Pada tahun 2023 Skor KPI untuk Komite audit adalah sebesar 98.40 dari target yang direncanakan sebesar 100 dengan kategori “Sangat Baik

No	Kegiatan	Rencana	Realisasi	Bobot	Skor KPI
1	Penilaian Terhadap sistem Pengendalian Internal	6	3	6	6.00
2	Penilaian terhadap Internal Audit	13	8	16	14.40
3	Penilaian terhadap Auditor Eksternal (KAP 2022 dan KAP 2023)	20	13	22	22.00
4	Penilaian terhadap Prosedur Evaluasi atas Informasi yg dihasilkan oleh PT Pos Indonesia Hal-hal yang Memerlukan Perhatian Dewan	2	2	2	2.00
5	Komisaris dan Tugas-tugas Lainnya dari Dewan Komisaris	24	17	18	18.00
6	Peningkatan Kapasitas Komite Audit	2	2	2	2.00
7	Rapat	48	60	24	24.00
8	Pelaporan	9	6	10	10.00
Jumlah		124	108	100	98.40

Kriteria penilaian

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| > 95 (maksimal 100) Sangat Baik | > 65 s.d 80 Cukup |
| > 80 s.d 94 Baik | > 50 s.d. 65 Kurang |
| < 50 Sangat Kurang | |

2. Penilaian Kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi (KPMRUI)
Pencapaian Skor KPI untuk Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi sebesar 98.00 dari target yang ditetapkan sebesar 100 dengan kategori “Baik”.

No	Kegiatan	Target IPK	Realisasi IPK	Bobot	Skor IPK 2023				
					I	II	III	IV	Total
1	Membahas/mengevaluasi tentang Manajemen Risiko Perusahaan	5	5	13	2	2	2	7	13
2	Melakukan evaluasi atas pelaksanaan RKAP Tahun 2024 secara bulanan, triwulanan, semesteran, maupun tahunan	17	17	16	3,5	5,5	3,5	3,5	16
3	Memberikan arahan kepada Direksi atas kebijakan perusahaan lainnya	3	3	6	0	0	0	6	6
4	Membahas/mengevaluasi tentang pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/ perusahaan patungan	1	1	2	0	0	2	0	2
5	Memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan	1	1	2	0	0	2	14	14
6	Melakukan telaahan serta mempersiapkan tanggapan atas Rancangan RKAP Tahun 2025 yang disampaikan oleh Direksi	4	4	14	0	0	0	14	14
8	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perusahaan lainnya	2	2	8	8	0	0	0	8
10	Tugas-tugas lainnya dari Dewan komisaris	3	1	6	0	0	0	2	2
11	Peningkatan Kapasitas KPMRUI	2	2	4	0	0	0	4	4
12	Rapat	24	24	24	6	6	6	6	24
13	Pelaporan	5	5	5	1	1	1	2	5
TOTAL		104	52	100	21,5	12	0	0	96

Kriteria penilaian

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| > 95 (maksimal 100) Sangat Baik | > 50 s.d. 65 Kurang |
| > 80 s.d 94 Baik | < 50 Sangat Kurang |
| > 65 s.d 80 Cukup | |

3. Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) Pada tahun 2023 Skor KPI untuk Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebesar 100 dari target yang direncanakan sebesar 100 dengan kategori “Sangat Baik”.

KOMISARIS INDEPENDEN

Kriteria Komisaris Independen

Sesuai Kriteria Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Selain itu, Komisaris Independen harus memenuhi ketentuan:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham;
2. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan atau perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada Perusahaan dan afiliasinya;
3. Bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk

bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perusahaan. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen. Setiap Komisaris Independen telah menandatangani surat pernyataan independensinya pada saat pengangkatan sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh POJK No. 33/POJK.04/2014. Komisaris Independen berkomitmen menjunjung independensi dalam bertugas, mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok dan tidak dapat dipengaruhi dalam proses pengambilan keputusan untuk perusahaan.

Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.

Setiap Komisaris Independen telah menandatangani surat pernyataan independensinya pada saat pengangkatan sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh POJK No. 33/POJK.04/2014. Komisaris Independen berkomitmen menjunjung independensi dalam bertugas, mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok dan tidak dapat dipengaruhi dalam proses pengambilan keputusan untuk perusahaan.

DEWAN DIREKSI

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang berjumlah 7 orang, yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan 6 orang lainnya sebagai Direktur Bidang yaitu:

1. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
2. Direktur *Human Capital Management*;
3. Direktur Operasi dan *Digital Service*;
4. Direktur Bisnis Jasa Keuangan;
5. Direktur Bisnis Kurir dan Logistik;
6. Direktur *Business Development* dan *Portfolio Management*.

Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa Jabatan 5 Tahun. Pengangkatan Direksi melalui mekanisme penilaian kepatutan dan kelayakan yang pada waktu pengangkatannya berpedoman kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-7/MBU/09/2022 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, Dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik dan Negara dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara serta Anggaran Dasar Perseroan.

Persyaratan Direksi

1. Persyaratan Materiil

Persyaratan materiil yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Direksi yaitu

- a. keahlian;
- b. integritas;
- c. kepemimpinan;
- d. pengalaman;
- e. jujur;

- f. perilaku yang baik; dan
- g. dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.

2. Persyaratan Formal Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :

- a. Dinyatakan pailit.
- b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan dan/atau Perseroan dinyatakan pailit.
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Perseroan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

3. Persyaratan lain

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, selain memenuhi persyaratan materiil dan persyaratan formal, seseorang harus memenuhi persyaratan lain, yaitu:

- a. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota dan/atau anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- b. Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah.
- c. Tidak menjabat sebagai Direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut.

- d. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya.
 - e. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direksi BUMN), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter; dan.
 - f. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama dua tahun terakhir.
- c. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang karyawan perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.
 - d. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perusahaan, termasuk Sekretaris Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Menyusun dan menetapkan aturan hubungan antara Induk dan Anak Perusahaan (*Subsidiary Governance*).
 - g. Menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan Internal Perusahaan.
 - h. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai perusahaan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili perusahaan didalam dan diluar Pengadilan.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun diluar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi memiliki wewenang untuk:
 - a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan.
 - b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi, untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berkewajiban untuk :
 - a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan usahanya.
 - b. Menyiapkan dan memberikan penjelasan RJPP, RKAP dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk disahkan dalam RUPS.
 - c. Membuat, memelihara dan menyimpan daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan risalah rapat Direksi, serta membuat, menyampaikan dan memberikan penjelasan tentang laporan tahunan termasuk laporan keuangan dan Neraca serta Laporan Laba Rugi kepada RUPS untuk disahkan.
 - d. Menyusun sistem kebijakan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, memberikan laporan berkala, menyiapkan susunan organisasi Perusahaan, menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perusahaan.
 - e. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau diminta oleh anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.
 - f. Menetapkan tata kelola informasi yang efektif dan menyampaikan pelaksanaan tata kelola informasi tersebut secara periodik kepada Dewan Komisaris.
 - g. Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS.
4. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan pengurusan Perusahaan demi sebesar-besarnya kepentingan Perusahaan. Direksi akan mengelola bisnis dan urusan Perusahaan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perusahaan. Direksi akan bertindak secara cermat, berhati-hati dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi akan menggunakan wewenang yang dimiliki semata-mata untuk kepentingan Perusahaan.
5. Direksi akan menghindari kondisi dimana tugas dan kepentingan Perusahaan berbenturan atau memiliki potensi benturan dengan kepentingan pribadi. Apabila hal tersebut terjadi, maka anggota Direksi yang bersangkutan akan mengungkapkan (*disclose*) benturan kepentingan tersebut kepada Dewan Komisaris dan anggota Direksi lain, dan selanjutnya anggota Direksi yang bersangkutan tidak berwenang mewakili Perusahaan (*handoff*) dalam hal tersebut. Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua anggota Direksi, maka Perusahaan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau oleh seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Direksi tersebut, ditetapkan pembagian tugas berdasarkan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.072/DIRUT/0923 tanggal 11 September 2023 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.013/DIRUT/0323 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pos Indonesia (Persero) sebagai berikut :

1. Direktur Utama

Tugas Direktur Utama adalah sebagai berikut:

- a. Untuk dan atas nama Direksi menjalankan dan bertanggung jawab atas segala ketetapan RUPS.
- b. Bertindak atas nama Direksi sebagai wakil Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan melakukan segala tindakan/perbuatan baik yang berkaitan dengan kepengurusan maupun kepemilikan serta mengikat kerja sama dengan pihak lain.
- c. Mengendalikan pelaksanaan tugas Direktur, *Corporate Secretary Business Partner, Internal Auditor Business Partner* dan mengusulkan serta memimpin Rapat Direksi
- d. Menerima pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari *Corporate Secretary Business Partner* dan *Internal Auditor Business Partner*.
- e. Mengadakan hubungan dengan pihak luar terutama mengenai hal-hal yang menyangkut kebijakan pengembangan Perusahaan dan kebijakan lainnya yang bersifat umum.

- f. Bertanggung jawab atas kinerja Perusahaan.
- g. Melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaskan Direksi dalam kapasitas sebagai Anggota Direksi.
- h. Direksi Utama bertanggung jawab kepada Direksi

2. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko memiliki tanggung jawab utama yaitu

- a. Sebagai wakil Direksi untuk bidang keuangan, *governance, risk and compliance* dan aset.
- b. Menetapkan kebijakan bidang keuangan, *governance, risk and compliance* dan aset sebagai fungsi support bagi seluruh fungsi.
- c. Menyelenggarakan kegiatan operasi bidang keuangan, *governance, risk and compliance* dan aset sebagai fungsi support bagi seluruh fungsi.
- d. Penanggung jawab atas kinerja operasi bidang keuangan, *governance, risk and compliance* dan aset sebagai fungsi *support* bagi seluruh fungsi.
- e. Penanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi bidang keuangan, *governance, risk and compliance* dan aset.
- f. Mewakili Perusahaan didalam dan diluar pengadilan bidang keuangan, *governance, risk and compliance* dan aset.
- g. Sebagai pengendali operasi keuangan, *governance, risk and compliance* dan aset di Kantor Regional.

Untuk melaksanakan tanggung jawab Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko mempunyai tugas pokok :

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi terkait :
 - i. Perencanaan dan pengembangan keuangan, governance, risk and compliance dan aset sebagai fungsi support bagi seluruh fungsi;
 - ii. Perencanaan dan pengembangan operasi serta aplikasi sistem operasi keuangan, *governance, risk and compliance* dan aset;
 - iii. Perencanaan sarana, infrastruktur dan teknologi informasi pendukung operasi keuangan, *governance, risk and compliance* dan aset.
- b. Menetapkan kebijakan pelaporan transaksi keuangan.
- c. Menetapkan sistem dan metodologi pengukuran kinerja pengelolaan bidang keuangan, governance, risk and compliance dan aset dalam bentuk rumusan *key performance indicator*.
- d. Mengevaluasi kinerja Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi dalam bidang keuangan.
- e. Memastikan Perusahaan memenuhi Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*good corporate governance*)
- f. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku

- g. Memantau dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga.

3. Direktur *Human Capital Management*

Direktur *Human Capital Management* memiliki tanggung jawab utama yaitu

- a. Sebagai wakil Direksi untuk bidang sumber daya manusia dan umum.
- b. Menetapkan kebijakan bidang sumber daya manusia dan umum sebagai fungsi support bagi seluruh fungsi.
- c. Menyelenggarakan kegiatan perencanaan, rekrutmen, pengembangan, balas jasa, pemeliharaan dan keputusan hubungan kerja bidang sumber daya manusia dan umum sebagai fungsi support bagi seluruh fungsi.
- d. Penanggung jawab atas produktivitas sumber daya manusia dan umum.
- e. Penanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi produktivitas bidang sumber daya manusia dan umum.
- f. Mewakili Perusahaan didalam dan diluar Pengadilan bidang sumber daya manusia dan umum.
- g. Sebagai pengendali pengelolaan sumber daya manusia dan umum di Kantor Regional.

Untuk melaksanakan tanggung jawab Direktur Human Capital Management mempunyai tugas pokok :

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi terkait;
 - i. Perencanaan dan pengembangan pengelolaan sistem sumber daya manusia dan umum.
 - ii. Pengendalian pengelolaan sistem sumber daya manusia dan umum.
 - iii. Pengendalian kinerja, risk and compliance dan manajemen mutu bidang sumber daya manusia dan umum.
 - iv. Perencanaan sarana, infrastruktur dan teknologi informasi pendukung sistem sumber daya manusia dan umum.
- b. Menetapkan kebijakan dan strategi sistem sumber daya manusia dan umum serta Budaya Perusahaan.
- c. Menetapkan sistem dan metodologi pengukuran kinerja bidang sumber daya manusia dan umum dalam bentuk rumusan key performance indicator.

4. Direktur Operasi dan *Digital Services*

Tanggung jawab utama Direktur Operasi dan Digital Services adalah:

- a. Sebagai Wakil Direksi untuk bidang operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan pos internasional serta teknologi informasi.
- b. Menetapkan kebijakan operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan pos internasional serta teknologi informasi.

- c. Menyelenggarakan kegiatan operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan pos internasional serta teknologi informasi.
- d. Penanggung jawab sistem operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan pos internasional serta teknologi informasi.
- e. Penanggung jawab atas kinerja operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan pos internasional serta teknologi informasi.
- f. Penanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan pos internasional serta teknologi informasi.
- g. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan bidang operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan pos internasional serta teknologi informasi.
- h. Sebagai pengendali operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan pos internasional serta teknologi informasi di Kantor Regional.

Untuk melaksanakan tanggung jawab utama tersebut, Direktur Operasi dan Digital Services mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan mengelola kebijakan dan strategi terkait:
 - i. Pengelolaan operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan pos internasional serta teknologi informasi.
 - ii. Perencanaan, pengembangan operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan pos internasional serta teknologi informasi serta aplikasi operasi bisnis dan support.

- iii. Pengelolaan kinerja, kepatuhan operasi, postal security, manajemen mutu di bidang operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan pos internasional serta teknologi informasi.
 - iv. Perencanaan modernisasi dan mekanisasi sarana serta infrastruktur operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan pos internasional serta teknologi informasi.
 - b. Menetapkan sistem dan metodologi pengukuran kinerja pengelolaan operasi jasa keuangan, kurir, logistik dan pos internasional serta teknologi informasi dalam bentuk rumusan *key performance indicator*.
 - c. Menetapkan kebutuhan implementasi teknologi dan pengembangan infrastruktur.
 - d. Memantau seluruh operasional bisnis Perusahaan khususnya terkait dengan operasional teknologi informasi
 - f. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan bidang bisnis jasa keuangan.
 - g. Sebagai pengendali bisnis jasa keuangan di Kantor Regional.
- Untuk mendukung perannya Direktur Bisnis Jasa Keuangan mempunyai tugas pokok :
- a. Menetapkan kebijakan dan strategi terkait :
 - i. Perencanaan, pengembangan bisnis jasa keuangan.
 - ii. Pengelolaan bisnis jasa keuangan.
 - iii. Pengelolaan kinerja, *risk* dan *compliance* di bidang jasa keuangan.
 - iv. Perencanaan sarana, infrastruktur dan teknologi informasi pendukung bisnis jasa keuangan.
 - b. Menetapkan kebijakan dan strategi penjualan, pemasaran bisnis jasa keuangan.
 - c. Menetapkan sistem dan metodologi pengukuran kinerja penjualan dan pemasaran bisnis jasa keuangan dalam bentuk rumusan *key performance indicator*.
 - d. Menetapkan program dan sistem *sales and marketing* termasuk *customer management*, *product management*, *corporate account management*, *market place* and *new business channel* bisnis jasa keuangan.

5. Direktur Bisnis Jasa Keuangan

Direktur Bisnis Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab utama yaitu :

- a. Sebagai wakil Direksi untuk bidang bisnis jasa keuangan.
- b. Menetapkan kebijakan bisnis jasa keuangan.
- c. Menyelenggarakan kegiatan bisnis jasa keuangan.
- d. Penanggung jawab atas kinerja bisnis jasa keuangan.
- e. Penanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi bisnis jasa keuangan.

6. Direktur Bisnis Kurir dan Logistik

Direktur Bisnis Kurir dan Logistik memiliki tanggung jawab utama yaitu

- a. Sebagai wakil Direksi untuk bidang bisnis kurir, logistik dan pos internasional.
- b. Menetapkan kebijakan bisnis kurir, logistik dan pos internasional.
- c. Menyelenggarakan kegiatan bisnis kurir, logistik dan pos internasional.
- d. Penanggung jawab sistem bisnis kurir, logistik dan pos internasional.
- e. Penanggung jawab atas kinerja bisnis kurir, logistik dan pos internasional.
- f. Penanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi bisnis kurir, logistik dan pos internasional.
- g. Mewakili Perusahaan didalam dan diluar Pengadilan bidang bisnis kurir, logistik dan pos internasional.
- h. Sebagai pengendali bisnis kurir, logistik dan pos internasional di Kantor Regional.

Untuk melaksanakan tanggung jawab Direktur Bisnis Kurir dan Logistik mempunyai tugas pokok :

- a. Menetapkan dan mengelola kebijakan dan strategi terkait:
 - i. Pengelolaan Pengelolaan bisnis kurir, logistik dan pos internasional.
 - ii. Perencanaan dan pengembangan bisnis kurir, logistik dan pos internasional.
 - iii. Pengelolaan kinerja bisnis kurir, logistik dan pos internasional.
- b. Menetapkan kebijakan dan strategi penjualan, pemasaran bisnis kurir, logistik dan pos internasional.
- c. Menetapkan sistem dan metodologi pengukuran kinerja penjualan dan pemasaran bisnis kurir, logistik dan pos internasional dalam bentuk rumusan key performance indicator.
- d. Menetapkan program dan sistem sales and marketing termasuk *customer management, product management, corporate account management, market place and new business channel* bisnis kurir, logistik dan pos internasional.

7. Direktur Business Development dan Portfolio Management

Direktur Business Development dan Portfolio Management memiliki tanggung jawab utama yaitu :

- a. Sebagai wakil Direksi untuk bidang *strategic planning, business development, dan portfolio management*
- b. Menetapkan kebijakan bidang *strategic planning, business development, dan portfolio management* sebagai fungsi support bisnis.
- c. Menyelenggarakan kegiatan operasi bidang *strategic planning, business development, dan portfolio management* sebagai fungsi support bisnis.
- d. Penanggung jawab atas kinerja operasi bidang *strategic planning, business development, dan portfolio management*.
- e. Penanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi operasi bidang *strategic planning, business development, dan portfolio management*

- f. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan bidang *strategic planning, business development, dan portofolio management*
- g. Sebagai pengendali operasi bidang *strategic planning, business development, dan portofolio management* di Kantor Regional.

Untuk melaksanakan tanggung jawab Direktur *Business Development* dan *Portfolio Management* mempunyai tugas pokok :

- a. Menetapkan rencana kerja anggaran Perusahaan dan rencana jangka panjang Perusahaan.
- b. Menetapkan *Business Research Innovation*
- c. Menetapkan, mengendalikan pengembangan dan inkubasi bisnis untuk membina embrio inisiatif bisnis
- d. Menetapkan *performance management* dan *key performance indikator* korporasi
- e. Menetapkan dan mengendalikan pengelolaan *strategic portofolio and parenting*
- f. Mengendalikan *transformation management*
- g. Mengendalikan kegiatan diskusi terkait dengan isu yang muncul di organisasi

Board Charter / Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Untuk kejelasan sistem dan struktur hubungan antar organ perseroan, kewenangan, tugas dan hubungan kerja masing masing organ perseroan agar sejalan dengan Prinsip Tata Kelola

Perseroan yang baik maka Perseroan telah menyusun pedoman berupa Panduan Bagi Komisaris dan Direksi (Board Manual) sesuai dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: 317/DEKOM/0921 dan KD.082/DIRUT/0921 tanggal 8 September 2021 tentang Board Manual PT Pos Indonesia (Persero) yang mengatur tentang tugas, tanggung jawab masing-masing Direksi juga kode etik bagi seluruh Direksi yang berisikan :

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi;
2. Susunan dan Pembagian Kerja Direksi
3. Rapat Direksi;
4. Organ Pendukung Direksi;
5. Tata Laksana Hubungan Kerja Dewan Komisaris Dan Direksi;
6. Kegiatan Antar Organ Perseroan

Kode Etik Direksi

Kode etik Direksi PT Pos Indonesia (Persero) diatur dalam Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No. KD.42/DIRUT/0714 tentang Kode Etik Direksi PT Pos Indonesia (Persero) yaitu :

1. Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya Direksi wajib:
 - a. Menggunakan sumber daya Perusahaan secara efisien, efektif, dan tepat.
 - b. Melaksanakan ibadah dan ajaran-Nya sesuai agama dan kepercayaan yang diyakini.
 - c. Tidak akan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
 - d. Mematuhi ketentuan tentang gratifikasi.
 - e. Tegass dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan yang telah disepakati.

- f. Mendahulukan kepentingan dan menerima konsekuensi keputusan.
 - g. Berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan.
 - h. Selalu meningkatkan kompetensi diri.
 - i. Bersahaja dan rendah hati.
 - j. Saling mendukung dan menghilangkan sifat arogansi dalam mencapai target kinerja.
 - k. Mengidentifikasi setiap benturan kepentingan yang timbul atau kemungkinan akan timbul dan memberitahu kepada direksi lain sesegera mungkin.
 - l. Menempatkan pelayanan kepada pelanggan sebagai prioritas bersama.
 - m. Senantiasa membangun silaturahmi dan saling menghargai dengan para pemangku kepentingan.
 - n. Menjaga informasi yang disepakati untuk tidak dipublikasikan demi kepentingan perusahaan.
 - o. Mengembangkan transparansi informasi diantara direksi dalam rangka pencegahan terjadinya kesalahan.
2. Direksi PT Pos Indonesia (Persero) wajib menjalankan dan menjadikan Kode Etik Direksi tersebut sebagai jiwa dari tindakan dan perilaku baik secara pribadi maupun perusahaan.

PENILAIAN PENERAPAN GCG TAHUN 2024

Pengembangan dan penerapan GCG merupakan wujud komitmen perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitasnya dalam jangka panjang yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan berupa peningkatan kinerja dan penciptaan citra perusahaan yang baik. Assessment terhadap penerapan GCG pada Pos Indonesia dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik penerapan GCG, sehingga dapat diidentifikasi area yang memerlukan perbaikan/penyempurnaan melalui *self-assessment*. *Assessment* mencakup enam aspek *governance*, yaitu komitmen terhadap penerapan tata

kelola perusahaan secara berkelanjutan, pemegang saham dan RUPS, dewan komisaris, direksi, pengungkapan informasi dan transparansi, dan aspek lainnya. Guna menghindari kerancuan dalam penggunaan laporan dan pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan, perlu dijelaskan bahwa *assessment* terhadap penerapan GCG ini tidak ditujukan untuk memperbandingkan capaian penerapan GCG antar organ perusahaan, yaitu antara direksi dan dewan komisaris maupun antara keduanya dengan rapat umum pemegang saham (RUPS)/ pemegang saham. Masing-masing organ perusahaan diukur dengan kriteria sendiri sesuai dengan struktur dan proses terbaik atau ideal seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) dan Surat Keputusan Sekertaris Menteri Negara (BUMN) Nomor SK-16/S. MBU/2012 tanggal 6 juni 2012 tentang indikator/parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN.

Dengan masih berlangsungnya proses assesment penerapan praktik-praktik

GCG pada tahun buku 2024, berikut kami sertakan hasil *assesment* 2023 Berdasarkan *assesment* penerapan praktik-praktik GCG yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG pada Pos Indonesia Tahun 2023 mendapatkan predikat kategori “Sangat Baik” dengan Skor 89,04 Capaian skor untuk masing-masing aspek *Governance* terinci sebagai berikut :

No	Aspek Pengujian	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Skor Capaian	Tingkat Pemenuhan	Skor Capaian	Tingkat Pemenuhan	Skor Capaian	Tingkat Pemenuhan
1	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan	6,252	89,31%	6,366	90,94%	7,000	100%
2	Pemegang Saham dan RUPS	8,538	94,87%	8,243	91,59%	8,555	95,05%
3	Dewan Komisaris	33,454	95,58%	32,561	93,03%	33,822	96,63%
4	Direksi	31,495	89,99%	30,875	88,21%	30,810	88,03%
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	7,719	85,77%	7,187	79,85%	7,850	87,23%
Total Aspek 1 – 5		87,458	-	85,232	-	88,037	-
6	Aspek Lainnya	-	-	-	-	1,000	20,00%
SKOR KESELURUHAN		87,458	87,46%	85,232	85,23%	89,037	89,04%
KLASIFIKASI KUALITAS PENERAPAN GCG		SANGAT BAIK		SANGAT BAIK		SANGAT BAIK	

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

BUMN sebagai entitas bisnis (business entity) sebagaimana halnya dengan perusahaan swasta lainnya, harus dikelola secara profesional berlandaskan mekanisme korporasi. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagai organ yang secara langsung bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengawasan BUMN perlu diberikan penghargaan yang layak berupa penghasilan yang dapat

memberikan motivasi berkinerja lebih baik. Pos Indonesia memiliki struktur remunerasi Dewan komisaris dan Direksi yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana terakhir diubah dengan Nomor PER-13/MBU/09/2021 Tentang Perubahan Keenam

Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-04/Mbu/2014 serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara :

- Gaji/Honorarium
- Tunjangan
- Fasilitas
- Tantiem / Insentif Kinerja (IK)

Penyesuaian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan :

- Faktor skala usaha
- Faktor kompleksitas usaha
- Tingkat inflasi
- Kondisi dan kemampuan perusahaan

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Sebagai tindak lanjut Pasal 100 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara dan untuk memberikan penghargaan yang layak berupa penghasilan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2013 tanggal 19 April 2013.

Peraturan Menteri Negara BUMN tersebut di atas pada dasarnya telah mengatur tentang pemberian penghargaan yang layak bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagai salah satu faktor menumbuhkan motivasi dalam rangka meningkatkan kinerja. Namun demikian dalam beberapa hal Peraturan Menteri BUMN tersebut perlu dilengkapi dan disempurnakan dengan ketentuan yang lebih jelas, khususnya terkait penyempurnaan formula penetapan gaji/honorarium, formula tantiem/insentif kinerja baik berdasarkan pendekatan laba maupun berdasarkan pendekatan non laba, serta penyederhanaan dan reklasifikasi khususnya dalam pengaturan fasilitas dan tunjangan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN untuk menggantikan Peraturan Menteri BUMN tentang hal yang sama sebelumnya.

Selanjutnya untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia di BUMN serta mewujudkan keadilan dalam penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara peraturan tersebut beberapa kali diubah diantaranya :

1. Nomor PER-02/MBU/06/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-04/Mbu/2014;

2. Nomor PER-01/MBU/06/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-04/MBU/2014;
3. Nomor PER-06/MBU/06/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-04/Mbu/2014;
4. Nomor PER-01/MBU/05/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-04/Mbu/2014;
5. Nomor PER-12/MBU/11/2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-04/MBU/2014;
6. Nomor : Per-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-04/MBU/2014
7. Nomor : PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
8. Nomor : SK-181/MBU/07 /2023 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara Tahun 2023.

Mengatur bahwa penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada hasil RUPS dengan memperhatikan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Perusahaan Perseroan telah menetapkan indikator yang digunakan untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-13/MBU/09/2021 tentang pedoman penetapan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN , serta PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ

dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, adalah sebagai berikut:

1. Faktor skala usaha;
2. Faktor kompleksitas usaha;
3. Tingkat inflasi;
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan;
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada indikator-indikator sebagai berikut:

1. Remunerasi diberikan dalam hal perusahaan memperoleh keuntungan dalam tahun buku yang bersangkutan;
2. Remunerasi diberikan dengan mengacu pada perkembangan pasar industri konstruksi;
3. Remunerasi diberikan melalui hasil pengukuran kinerja Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;
4. Kinerja keuangan dan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Perseroan;
5. Prestasi kerja individu;
6. Kewajaran dengan *peer* perseroan lainnya;
7. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan;
8. Besaran remunerasi yang diterima adalah:
 - a. Komisaris Utama 45% dari remunerasi Direktur Utama;
 - b. Anggota Dewan Komisaris 90% dari remunerasi Komisaris Utama;
 - c. Direktur Utama 100%;
 - d. Anggota Direksi lainnya 85% dari Direktur Utama.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Honorarium komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris tahun 2024 ditetapkan oleh Kementerian BUMN melalui surat nomor: SR-36/Wk.MBU.11/08 /2024 tanggal 23 Agustus 2024 menyampaikan penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2024 serta tantiem/ insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja Tahun Buku 2023. Berikut adalah Nominal dari Komponen remunerasi Dewan Komisaris untuk Tahun 2024

Tunjangan	Komisaris Utama	Komisaris
Pendapatan Bulanan		
Honorarium	Rp 100.350.000	Rp 90.315.000
Tunjangan Transportasi	Rp 20.070.000	Rp 18.063.000
Pendapatan Bulanan / Tahun	Rp 1.445.040.000	Rp 1.300.536.000
Pendapatan Tahunan		
Tunjangan Hari Raya	Dibayarkan 1 kali Honorarium	
Asuransi Purna Jabatan	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari Honorarium dalam 1 Tahun	
Tantiem	Dibayarkan sebesar 45% dari Tantiem Direktur Utama dikali masa aktif	
Fasilitas		
Kesehatan	Penggantian biaya kesehatan	
Bantuan Hukum	Perusahaan menunjuk pengacara melalui proses pengadaan barang jasa	

Struktur Remunerasi Direksi

Gaji Direktur Utama dan anggota Direksi tahun 2023 ditetapkan oleh Kementerian BUMN melalui surat nomor: SR-36/Wk.MBU.11/08 /2024 tanggal 23 Agustus 2024 menyampaikan penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2024 serta tantiem/ insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja Tahun Buku 2023.

Tunjangan	Direktur Utama	Direktur
Pendapatan Bulanan		
Gaji	Rp 223.000.000	Rp 189.550.000
Tunjangan Perumahan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000
Pendapatan Bulanan / Tahun	Rp 2.976.000.000	Rp 2.574.600.000
Pendapatan Tahunan		
Tunjangan Hari Raya	Dibayarkan 1 kali Gaji	
Asuransi Purna Jabatan	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari gaji dalam 1 Tahun	
Tantiem	Berdasarkan penetapan RUPS/Menteri dalam pengesahan laporan tahunan	
Fasilitas		
Kendaraan	Diberikan 1 (satu) Unit beserta biaya pemeliharaan dan operasional	
Kesehatan	Penggantian biaya kesehatan	
Bantuan Hukum	Perusahaan menunjuk pengacara melalui proses pengadaan barang jasa	

Indikator Untuk Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Indikator yang digunakan untuk penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan melakukan penilaian kinerja Direksi secara keseluruhan dan masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No : PER-01/MBU/2011 tgl 1 Agustus 2011 (yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri BUMN No : KEP-117/ MMBU/2002 tgl 31 Juli 2002) hal Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance Indicator)

Key Performance Indicators (KPI) tahun 2024 yang telah disetujui dan disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja pada tahun 2024 serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris.

(KPI) PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2024 dihitung berdasarkan Kontrak Manajemen antara Kuasa Pemegang Saham dengan Direksi dan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) dengan mengacu pada surat Sekretaris Kementerian BUMN No.S-08/SMBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Penyampaian Pedoman Penentuan *Key Performance Indicator* (KPI) dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) pada BUMN. Skor *key performance indicator* (KPI) atas hasil penilaian kinerja manajemen PT Pos Indonesia (Persero) untuk 2024 tercapai sebesar 86,08 dengan predikat Cukup B-4.

KPI yang merupakan kontrak manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) dengan Pemegang Saham, telah dilakukan pembahasan beberapa kali dengan Pemegang Saham terkait dengan indikator-indikator yang akan dijadikan penilaian. Indikator yang telah disepakati dan ditetapkan menjadi KPI untuk tahun 2024 serta realisasinya adalah sebagai berikut:

No Perspektif	Indikator	Uraian	Satuan	Polarisasi	Bobot	Target Akhir Tahun	Realisasi 2024	Rasio	Nilai Maksimal Skor KPI
					1	2	3	4	5
I	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia				55				43,38
	Financial								
1	EBITDA	Rp Miliar	Maximize	5	1.063,86	1.015,67	95,07%		4,75
2	ROIC >= WACC	%	Maximize	4	0,14	2,98	2.130,29%		4,40
3	Interest Bearing Debt to EBITDA	Indeks	Minimize	4	2,77	4,86	0,00%		0,00
4	Interest Bearing Debt to Invested Capital	%	Minimize	4	26,37	35,46	51,23%		2,05
5	Cashflow from Operation (CFO)	Rp Miliar	Maximize	4	225,23	(1.204,56)	(534,82%)		0,00
	Operational								
6	SWP kiriman	%	Maximize	5	95,00	98,65	103,84%		5,19
7	Market share kurir	%	Maximize	5	3,27	2,48	75,75%		3,79
8	Market share logistic	%	Maximize	5	0,16	0,14	88,69%		4,43
9	Market share jasa keuangan	%	Maximize	4	2,95	2,44	82,60%		3,30
10	Pemanfaatan kendaraan listrik	%	Maximize	5	100,00	100,00	100,00%		5,00
	Sosial								
11	Pemenuhan pelaksanaan PSO	Rp Miliar	Maximize	5	369,80	366,84	99,20%		4,96
12	Peningkatan TKDN dibandingkan tahun sebelumnya	%	Maximize	5	40,00	78,10	195,25%		5,50
II	Inovasi Model Bisnis				15				14,09
13	Program Transformasi Tahun 2024	%	Maximize	3	100,00	89,60	89,60%		2,69
14	Digitalisasi Human Capital (ITMS, LMS & KMS)	%	Maximize	2	100,00	95,12	95,12%		1,90
15	Digitalisasi Finance (SAP)	%	Maximize	2	100,00	93,50	93,50%		1,87
16	Pemetaan sinergi dan integrasi logistik dalam ekosistem BUMN	%	Maximize	2	100,00	92,75	92,75%		1,86
17	Pengembangan Layanan Logistik	%	Maximize	3	100,00	92,56	92,54%		2,78
18	Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko	%	Maximize	3	100,00	100,00	100,00%		3,00
III	Inovasi Model Bisnis				10				9,50
19	Pengembangan platform Logistik	%	Maximize	5	100,00	90,00	90,00%		4,50
20	Pengembangan Pospay Superapps	%	Maximize	5	100,00	100,00	100,00%		5,00
IV	Peningkatan Investasi				5				5,00
21	Investasi processing center	%	Maximize	5	100,00	100,00	100,00%		5,00
V	Pengembangan Talenta				15				15,40
22	Rasio Top Talent Muda (<=42 tahun) dalam nominated talent	%	Maximize	3	10,00	18,18	181,82%		3,30
23	Rasio penerapan dalam nominated talent	%	Maximize	3	20,00	27,27	136,36%		3,30
24	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelolaan Risiko	%	Maximize	4	100,00	98,00	98,00%		3,92
25	Implementasi Roadmap Penyebaran Dana Pensiun	%	Maximize	5	100,00	97,55	97,55%		4,88
Jumlah I+II+III+IV+V					100				87,37

Bonus Kerja, Bonus Non Kerja, Opsi Saham

Kementerian BUMN melalui surat Nomor SR-36/Wk.MSU.11/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 menyampaikan penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2024 serta tantiem/insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja Tahun Buku 2023 ditetapkan bahwa Direksi dan Dewan komisaris Pos Indonesia (Persero) diberikan tantiem/insentif kinerja (IK) Sebesar Rp.24 Miliar atas kinerja tahun buku 2023.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Agenda rutin yang dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris meliputi evaluasi (*review*) kinerja bulanan dan triwulanan Perseroan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut permasalahan, dan membahas hal-hal khusus yang memerlukan persetujuan Komisaris serta permasalahan aktual yang perlu mendapat klarifikasi dari manajemen.

Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat minimal 1 kali dalam 2 bulan, dengan ketentuan rapat dilaksanakan setiap hari kamis tiap minggunya atau sesuai kesepakatan Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komsaris dianggap kuorum apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari separuh jumlah anggota Dewan Komisaris

Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai kemufakatan maka keputusan rapat Komisaris diambil dengan suara terbanyak. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pimpinan rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban.

Sepanjang 2024 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat

No	Tanggal	Agenda Rapat				
1	25 Januari 2024	1. Pembahasan RKAP 2024				
		3. Lain – lain :				
	Kehadiran	RK	GIN	GH	RR	IGMK
		√	X	√	√	X
2	30 Januari 2024	1. Progres Program Kerja Dewan Komisaris				
		2. Laporan Manajemen Ytd Desember 2023				
		3. Lain – lain				
	Kehadiran	RK	GIN	GH	RR	IGMK
		X	√	√	√	√

No	Tanggal	Agenda Rapat				
3	19 Februari 2024	1. Progres Program Kerja Dewan Komisaris RKAP 2024				
		2. Laporan Manajemen Ytd Januari 2024				
		3. Lain – lain				
	Kehadiran	RK	GIN	GH	RR	IGMK
		√	√	√	√	X
4	6 Maret 2024	1. Pembahasan Usulan Pergantian dan Penambahan Direksi PT Pos Logistik Indonesia				
		2. Lain – lain				
		RK	GIN	GH	RR	IGMK
	Kehadiran	√	√	√	√	X
5	28 Maret 2024	1. Progres Program Kerja Dewan Komisaris RKAP 2024				
		2. Laporan Manajemen Ytd Februari 2024				
		3. Lain – lain				
	Kehadiran	RK	GIN	GH	RR	IGMK
		X	√	√	√	√
6	4 April 2024	1. Pembahasan Selected Talent BOD-1 PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2024				
		2. Evaluasi BOD PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2024				
		3. Lain – lain				
	Kehadiran	RK	GH	RR	IGMK	
		√	X	√	√	
7	27 Apr 2024	1. Progres Program Kerja Dewan Komisaris RKAP 2024				
		2. Laporan Manajemen Ytd Maret 2024				
		3. Lain – lain				
	Kehadiran	RK	GH	RR	IGMK	
		X	√	√	√	
8	31 Mei 2024	1. Progres Program Kerja Dewan Komisaris RKAP 2024				
		2. Laporan Manajemen Ytd April 2024				
		3. Lain – lain				
	Kehadiran	RK	GH	RR	IGMK	
		X	√	√	√	
9	27 Juni 2024	1. Progres Program Kerja Dewan Komisaris RKAP 2024				
		2. Laporan Manajemen Ytd Mei 2024				
		3. Lain – lain				
	Kehadiran	RK	GH	RR	IGMK	
		X	√	√	√	

No	Tanggal	Agenda Rapat					
10	26 Juli 2024	1. Progres Program Kerja Dewan Komisaris RKAP 2024					
		2. Laporan Manajemen Ytd Juni 2024					
		3. Lain – lain					
11	4 Agustus 2024	RK	GH	RR	IGMK	MBD	FB
		X	√	√	X	√	√
12	22 Agustus 2024	1. Pembahasan Pembagian Tugas Dewan Komisaris					
		2. Penyampaian Job description Komite Dewan Komisaris					
		3. Pembahasan Permasalahan Akuisisi customer oleh DHL					
13	23 Agustus 2024	4. Pembahasan Permasalahan Double Presence					
		5. Pembahasan Proses Nota Permintaan Pembayaran					
		6. Pembahasan Kajian Risiko Penerbitan Obligasi dan atau sukuk (Syariah) Tahun 2024					
14	26 Agustus 2024	7. Lain – lain					
		RK	GH	RR	IGMK	MBD	FB
		√	√	√	√	√	√
12	22 Agustus 2024	1. Permohonan Persetujuan Penerbitan Obligasi dan atau sukuk (Syariah) Tahun 2024					
		2. Penghapusbukuan Akiva Tetap Sebagian Bangunan KCU Balikpapan 76100					
		3. Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan dalam bentuk Scrap Barang Investaris Milik PT Pos Inoensia (Persero) Tahun 2024					
13	23 Agustus 2024	4. Lain – lain					
		RK	GH	RR	IGMK	MBD	FB
		√	√	X	X	√	√
13	23 Agustus 2024	1. Permohonan Persetujuan Penerbitan Obligasi dan atau sukuk (Syariah) Tahun 2024					
		2. Penyesuaian Rancangan RJPP 2025-2029 dengan Arah Dewan Komisaris					
		3. Usulan Direksi PT Pos Logistik Indonesia					
14	26 Agustus 2024	4. Usulan Penetapan Direktur PT Pos Properti Indonesia					
		5. Lain – lain					
		RK	GH	RR	IGMK	MBD	FB
14	26 Agustus 2024	1. Progres Program Kerja Dewan Komisaris RKAP 2024					
		2. Laporan Manajemen Ytd Juli 2024					
		3. Lain – lain					
14	26 Agustus 2024	RK	GH	RR	IGMK	MBD	FB
		X	√	X	√	√	√

No	Tanggal	Agenda Rapat					
15	3 September 2024	1. Pembahasan Penyesuaian Rancangan RJPP 2025-2029 dengan Arahan Dewan Komisaris					
		2. Lain - lain					
	Kehadiran	RK	GH	RR	IGMK	MBD	FB
		√	X	X	X	√	√
16	27 September 2024	1. Progres Program Kerja Dewan Komisaris RKAP 2024					
		2. Laporan Manajemen Ytd Agustus 2024					
		3. Lain - lain					
	Kehadiran	RK	GH	RR	IGMK	MBD	FB
		√	√	√	√	√	√
17	29 Oktober 2024	1. Progres Program Kerja Dewan Komisaris RKAP 2024					
		2. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Dekom (RKA) 2025					
		3. Laporan Manajemen Ytd September 2024					
	Kehadiran	RK	GH	RR	IGMK	MBD	FB
		√	√	X	√	√	√
18	19 November 2024	1. Pemaparan Strategi Bisnis PT Pos Properti Indonesia					
		2. Lain - lain					
	Kehadiran	RK	GH	RR	IGMK	MBD	FB
		X	√	√	√	√	√
No	Tanggal	Agenda Rapat					
19	26 November 2024	1. Progres Program Kerja Dewan Komisaris RKAP 2024					
		2. Laporan Manajemen Ytd Oktober 2024					
		3. Lain - lain					
	Kehadiran	RK	GH	RR	IGMK	MBD	FB
		√	√	√	√	√	√

RAPAT DIREKSI

Direksi mengadakan rapat dan pertemuan baik rapat internal Direksi maupun rapat bersama Dewan Komisaris. Agenda rutin yang dibahas dalam Rapat Direksi meliputi evaluasi (*review*) kinerja bulanan dan triwulanan Perseroan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut permasalahan, dan membahas hal-hal khusus yang memerlukan persetujuan Direksi serta

permasalahan aktual yang perlu mendapat klarifikasi dari manajemen. Dalam pembahasan materi tertentu, dihadirkan pula Para *Vice President* dan pejabat yang terkait dengan materi pembahasan.

Sepanjang 2024 Direksi mengadakan 40 kali pertemuan atau rapat direksi dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda Rapat						
1	Thursday, 4 January 2024	1. Arahan Direksi						
		2. Performance Review Direktorat Operasi dan Digital Services						
		3. Performance Review Direktorat Bisnis Kurir dan Logistik						
		4. Performance Review Direktorat Bisnis Jasa Keuangan						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	x	√	x	√	√
2	Wednesday, 10 January 2024	1. Pelantikan Pejabat						
		2. Arahan Direksi						
		3. Performance Review Direktorat Human Capital Management						
		4. Performance Review Direktorat Business Development and Portofolio Management						
		5. Performance Review Internal Audit						
		6. Performance Review Corporate Secretary						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
3	Tuesday, 23 January 2024	1. Arahan Direksi						
		2. Performance Direktorat Keuangan Subdit Financial Operations and Business Partner						
		3. Performance Review Anak Perusahaan						
		4. Performance Review Badan Afiliasi						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
4	Tuesday, 30 January 2024	1. Arahan Direksi						
		2. Performance Review Direktorat Business Development dan Portofolio Management						
		3. Pemaparan materi dari Tim Dokter ULBI						
		4. Performance Review Direktorat Operasi dan Digital Services						
		5. Performance Review Direktorat Kurir dan Logistik						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√

No	Tanggal	Agenda Rapat						
1	Tuesday, 6 February 2024	1. Pelantikan Pejabat						
		2. Arahkan Direksi						
		3. Performance Review dan Laporan Capex 2024 Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko						
		4. Performance Review dan Laporan Capex 2024 Direktorat Business Development and Portofolio Management						
		5. Performance Review dan Laporan Capex 2024 Direktorat Bisnis Kurir dan Logistik						
		6. Performance Review dan Laporan Capex 2024 Direktorat Bisnis Jasa Keuangan						
		7. Performance Review dan Laporan Capex 2024 Anak Perusahaan						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
2	Monday, 12 February 2024	1. Arahkan Direksi						
		2. Performance Review Direktorat Human Capital Management						
		3. Performance Review Direktorat Business Development and Portofolio Management						
		4. Direktorat Operasi dan Digital Services						
		5. Corporate Secretary						
		6. Internal Audit						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
3	Tuesday, 27 February 2024	1. Arahkan Direksi						
		2. Performance Review Direktorat Operasi dan Digital Services						
		3. Presentasi Kerjasama Microsoft dengan PosIND						
		4. Performance Review Direktorat Kurir dan Logistik						
		5. Performance Review Direktorat Bisnis Jasa Keuangan						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
1	Tuesday, 5 March 2024	1. Pelantikan Pejabat						
		2. Arahkan Direksi						
		3. Performance Review Anak Perusahaan						
		4. Performance Review Badan Afiliasi						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
2	Tuesday, 12 March 2024	1. Arahkan Direksi						
		2. Performance Review Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko						
		3. Performance Review Direktorat Bisnis Kurir dan Logistik						
		4. Performance Review Direktorat Bisnis Jasa Keuangan						
		5. Performance Review Direktorat Operasi dan Digital Services						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√

No	Tanggal	Agenda Rapat						
3	Tuesday, 19 March 2024	1. Arahan Direksi						
		2. Review Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko						
		3. Performance Review Direktorat Human Capital Management						
4	Tuesday, 26 March 2024	4. Performance Review Direktorat Business Development and Portofolio Management						
		5. Corporate Secretary						
		6. Internal Audit						
1	Tuesday, 2 April 2024	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
		Kehadiran						
2	Wednesday, 17 April 2024	1. Pelantikan Pejabat						
		2. Arahan Direksi						
		3. Performance Review EVP						
3	Tuesday, 23 April 2024	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
		Kehadiran						
2	Wednesday, 17 April 2024	1. Arahan Direksi						
		2. Performance Review dan Laporan Capex 2024 Direktorat Operasi dan Digital Services						
		3. Performance Review dan Laporan Capex 2024 Direktorat Bisnis Jasa Keuangan						
3	Tuesday, 23 April 2024	4. Performance Review dan Laporan Capex 2024 Direktorat Bisnis Kurir dan Logistik						
		FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	x	√	√	√	√	√
2	Wednesday, 17 April 2024	1. Kick-Off Meeting Jasa Konsultan Diagnostik ICOFR						
		2. Arahan Direksi						
		3. Performance Review dan Laporan Capex 2024 Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko						
3	Tuesday, 23 April 2024	4. Performance Review dan Laporan Capex 2024 Anak Perusahaan						
		FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	x	√	√	√	√	√
3	Tuesday, 23 April 2024	1. Arahan Direksi						
		2. Performance Review Direktorat Human Capital Management						
		3. Performance Review Direktorat Business Development dan Portofolio Management						
3	Tuesday, 23 April 2024	4. Management Presentation Pemingkatan Obligasi PT Pos Indonesia (Persero) oleh Fitch Rating Indonesia						
		5. Performance Review YPBPI						
		6. Performance Review Badan Afiliasi						
3	Tuesday, 23 April 2024	7. Update Pos Indonesia Kargo Haji 2024						
		FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√

No	Tanggal	Agenda Rapat						
1	Thursday, 2 May 2024	1. Arahan Direksi						
		2. Performance Review Regional 1 Medan						
		3. Performance Review Regional 2 Jakarta						
		4. Performance Review Regional 3 Bandung						
		5. Performance Review Regional 4 Semarang						
		6. Performance Review Regional 5 Surabaya						
		7. Performance Review Regional 6 Makassar						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
2	Tuesday, 7 May 2024	1. Arahan Direksi						
		2. Progress Report Satgas Piutang						
		3. Performance Review dan Laporan Capex Direktorat Operasi dan Digital Services						
		4. Performance Review dan Laporan Capex Direktorat Bisnis Jasa Keuangan						
		5. Progress Report Proyek Kargo Haji PosIND 2024						
		6. Progress Report PosAja UMKM						
		7. Performance Review Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
3	Tuesday, 14 May 2024	1. Arahan Direksi						
		2. Progress Report GLID oleh Tim TELKOM						
		3. Monthly Review CAPEX 2024 Sub Dit Risk Management and Financial Policy						
		4. Performance Review Anak Perusahaan						
		5. Performance Review Badan Afiliasi						
		6. Presentasi Layanan Mitra Country Manager Google						
		7. Presentasi Sub Dit Strategic Planning and Business Development						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
4	Tuesday, 21 May 2024	1. Pelantikan Pejabat						
		2. Arahan Direksi						
		3. Performance Review Direktorat Human Capital Management						
		4. Performance Review Direktorat Business Development dan Portfolio Management						
		5. Performance Review Internal Audit						
		6. Performance Review Corporate Secretary						
		7. Progress Report Satgas Piutang						
		8. Progress Update UMKM Centre & Creator House						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√

No	Tanggal	Agenda Rapat						
1	Tuesday, 4 June 2024	1. Arahan Direksi						
		2. Performance Review Regional 1 Medan						
		3. Progress Satgas UMKM						
		4. Performance Review Regional 2 Jakarta						
		5. Performance Review Regional 3 Bandung						
		6. Performance Review Regional 4 Semarang						
		7. Performance Review Regional 5 Surabaya						
		8. Performance Review Regional 6 Makassar						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
2	Tuesday, 11 June 2024	1. Arahan Direksi						
		2. Performance Review Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko						
		3. Performance Review Direktorat Operasi dan Digital Services						
		4. Performance Review Direktorat Bisnis Jasa Keuangan						
		5. Performance Review Direktorat Bisnis Kurir dan Logistik						
		6. Performance Review Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	x	√	√	√	x
3	Tuesday, 18 June 2024	1. Arahan Direksi						
		2. Performance Review Anak Perusahaan						
		3. Performance Review Badan Afiliasi						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	x	√	√	√	√	√
4	Tuesday, 25 June 2024	1. Arahan Direksi						
		2. Performance Review Direktorat Human Capital Management						
		3. Performance Review Direktorat Business Development dan Portfolio Management						
		4. Performance Review Internal Audit						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
1	Tuesday, 2 July 2024	1. Arahan Direksi						
		2. Laporan War Room oleh Direktorat Digital Service						
		3. Performance Review Regional 1 Medan						
		4. Performance Review Regional 2 Jakarta						
		5. Performance Review Regional 3 Bandung						
		6. Performance Review Regional 4 Semarang						
		7. Performance Review Regional 5 Surabaya						
		8. Performance Review Regional 6 Makassar						
		9. Performance Review Penanganan Piutang oleh Proyek Penanganan Piutang						
		FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	x

No	Tanggal	Agenda Rapat						
2	Tuesday, 9 July 2024	1. Arahan Direksi 2. Penyerahan Surat Tanda Registrasi oleh Direktur BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) 3. Performance Review Direktorat Operasi dan Digital Services 4. Performance Review Direktorat Bisnis Jasa Keuangan 5. Performance Review Direktorat Bisnis Kurir dan Logistik 6. Strategic Partnership E-Katalog LKPP 7. Penanganan Piutang oleh Proyek Penanganan Piutang						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
3	Tuesday, 16 July 2024	1. Pelantikan Pejabat 2. Arahan Direksi 3. Performance Review Anak Perusahaan 4. Performance Review Badan Afiliasi						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
4	Tuesday, 23 July 2024	1. Arahan Direksi 2. Performance Review Direktorat Human Capital Management 3. Performance Review Direktorat Business Development dan Portfolio Management 4. Pengelolaan Museum TMII oleh Corporate Secretary and ESG 5. Performance Review Internal Audit 6. Performance Review Financial Operation and Business Partner						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		x	√	√	√	√	√	√
5	Tuesday, 30 July 2024	1. Arahan Direksi 2. Performance Review Direktorat Operasi dan Digital Services 3. Performance Review Direktorat Bisnis Jasa Keuangan 4. Performance Review Direktorat Bisnis Kurir dan Logistik 5. Performance Review Subdit Financial Operation and Business Partner 6. Performance Review Proyek Penanganan Piutang						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
1	Tuesday, 6 August 2024	1. Arahan Direksi 2. Performance Review Anak Perusahaan 3. Performance Review Badan Afiliasi						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		x	√	√	√	√	√	√

No	Tanggal	Agenda Rapat						
2	Tuesday, 20 August 2024	1. Arahan Direksi						
		2. Performance Review Direktorat Human Capital Management						
		3. Performance Review Direktorat Business Development dan Portfolio Management						
		4. Performance Review Corporate Secretary and ESG						
		5. Performance Review Internal Audit						
		6. Performance Review Proyek Penanganan Piutang						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
3	Tuesday, 27 August 2024	1. Arahan Direksi						
		2. Performance Review EVP Regional 6 Makassar						
		3. Performance Review EVP Regional 5 Surabaya						
		4. Performance Review EVP Regional 4 Semarang						
		5. Performance Review EVP Regional 3 Bandung						
		6. Performance Review EVP Regional 2 Jakarta						
		7. Performance Review EVP Regional 1 Medan						
		8. Performance Review Financial Operation and Business Partner						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	x	√	√	√	x
1	Tuesday, 10 September 2024	1. Arahan Direksi						
		2. Performance Review Direktorat Operasi dan Digital Services						
		3. Performance Review Direktorat Bisnis Jasa Keuangan						
		4. Performance Review Direktorat Bisnis Kurir dan Logistik						
		5. Performance Review Subdit Financial Operation and Business Partner						
		6. Performance Review Proyek Penanganan Piutang						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		x	√	x	√	√	√	√
2	Tuesday, 17 September 2024	1. Arahan Direksi						
		2. Performance Review Anak Perusahaan						
		3. Performance Review Badan Afiliasi						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		x	√	x	√	√	√	√
3	Tuesday, 24 September 2024	1. Arahan Direksi						
		2. Presentasi Progress Museum Pos di TMII oleh PT Pos Properti Indonesia						
		3. Performance Review Regional 1 Medan						
		4. Performance Review Regional 3 Bandung						
		5. Performance Review Regional 4 Semarang						
		6. Performance Review Regional 5 Surabaya						
		7. Performance Review Regional 6 Makassar						
		8. Proyek Penanganan Piutang						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√

No	Tanggal	Agenda Rapat						
1	Tuesday, 1 October 2024	1. Paparan Materi dari PT Kasee Digital Indonesia 2. Arahan Direksi 3. Performance Review Direktorat Human Capital Management 4. Performance Review Direktorat Business Development dan Portfolio Management 5. Performance Review dari Retail Business						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
2	Tuesday, 8 October 2024	1. Arahan Direksi 2. Performance Review Direktorat Operasi dan Digital Services 3. Performance Review Direktorat Bisnis Jasa Keuangan 4. Performance Review Direktorat Bisnis Kurir dan Logistik 5. Performance Review Subdit Financial Operation and Business Partner 6. Performance Review Proyek Penanganan Piutang						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		x	√	x	√	√	√	√
3	Tuesday, 15 October 2024	1. Arahan Direksi 2. Performance Review Anak Perusahaan 3. Performance Review Badan Afiliasi 4. Pendampingan Komite ESG PosIND 2024 5. Progress RKAP 2025						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
4	Tuesday, 22 October 2024	1. Arahan Direksi 2. Paparan RKAP 2025 + Tanya Jawab Direktorat Bisnis Kurir dan Logistik (Termasuk Poslog) 3. Paparan RKAP 2025 + Tanya Jawab Direktorat Bisnis Jasa Keuangan (Termasuk Posfin) 4. Paparan RKAP 2025 + Tanya Jawab Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko (Termasuk Pospro) 5. Paparan RKAP 2025 + Tanya Jawab Direktorat Operasi dan Digital Services 6. Paparan RKAP 2025 + Tanya Jawab Direktorat Human Capital Management 7. Paparan RKAP 2025 + Tanya Jawab Direktorat Business Development dan Portfolio Management						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√

No	Tanggal	Agenda Rapat						
5	Tuesday, 29 October 2024	1. Arahan Direksi;						
		2. Paparan RKAP 2025						
		3. Performance Review Direktorat Human Capital Management						
		4. Paparan Pospay Run 2024						
		5. Performance Review Direktorat Business Development dan Portfolio Management						
		6. Paparan Program Makan Bergizi Gratis						
		7. Launching New Pospay Superapps						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
1	Tuesday, 12 November 2024	1. Arahan Direksi						
		2. Progress IT Strategic Plan oleh Prof Eko Indrajit						
		3. Performance Review Direktorat Operasi dan Digital Services						
		4. Performance Review Bisnis Jasa Keuangan						
		5. Performance Review Bisnis Kurir dan Logistik						
		6. Performance Review Proyek Penanganan Piutang						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
2	Tuesday, 19 November 2024	1. Arahan Direksi						
		2. Performance Review Anak Perusahaan						
		3. Performance Review Badan Afiliasi						
		4. Performance Review Financial Operation and Business Partner						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		x	√	x	√	√	√	√
1	Wednesday, 04 December 2024	1. Arahan Direksi						
		2. Performance Review Direktorat Human Capital Management						
		3. Performance Review Kargo Haji						
		4. Performance Review Direktorat Business Development dan Portfolio Management						
		5. Performance Review Internal Audit						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	x	√	√	√	√	√

No	Tanggal	Agenda Rapat						
2	Thursday, December 12, 2024	1. Arahan Direksi						
		2. Performance Review Direktorat Operasi dan Digital Services						
		3. New Logo Proposal PT Pos Properti Indonesia						
		4. Presentasi dari Feedloop (Konsultan AI PT Posfin)						
		5. Performance Review Direktorat Bisnis Jasa Keuangan						
		6. Performance Review Direktorat Bisnis Kurir dan Logistik						
		7. Performance Review Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	x	√	√	√	√	√
3	Tuesday, December 17, 2024	1. Arahan Direksi						
		2. Performance Review Direktorat Bisnis Kurir dan Logistik						
		3. Performance Review PT Pos Logistik Indonesia						
		4. Performance Review PT Pos Finansial Indonesia						
		5. Performance Review PT Pos Properti Indonesia						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
4	Tuesday, December 24, 2024	1. Arahan Direksi						
		2. Presentasi dari KCU Jakarta Premier						
		3. Performance Review Regional 1 Medan						
		4. Performance Review Regional 2 Jakarta						
		5. Prognosa Tahun 2024						
		6. Performance Review Regional 3 Bandung						
		7. Performance Review Regional 4 Semarang						
		8. Performance Review Regional 5 Surabaya						
		9. Performance Review Regional 6 Makassar						
		10. Progress Report Sukuk Ijarah oleh SVP Risk Management						
	Kehadiran	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√

Ringkasan Rapat yang melibatkan Direksi

37 Radir / *Weekly meeting*

Rapat Direksi

- Monitoring kinerja mingguan masing-masing direktorat
- Membahas permasalahan aktual yang perlu mendapat klarifikasi dari manajemen
- Membahas hal-hal yang memerlukan persetujuan Direksi

14 Rakomdir / *Monthly meeting*

Rapat Komisaris dan Direksi

- Membahas Management Report
- Monitoring dan evaluasi tindak lanjut permasalahan
- Membahas hal-hal yang memerlukan persetujuan Direksi dan Komisaris

4 RAPIM / *Quarterly Meeting*

Rapat Pimpinan

- Membahas kinerja triwulanan masing-masing regional, anak perusahaan, dan afiliasi
- Menyampaikan kebijakan masing-masing direktorat yang harus dilaksanakan regional
- Membahas permasalahan aktual yang perlu mendapat klarifikasi dari regional
- Menetapkan Kontrak Manajemen

2 RUPS / *Yearly Meeting*

Rapat Umum Pemegang Saham

- Membahas kinerja tahunan perusahaan
- Mendapat pengesahan Pemegang Saham atas RKAP, RKA Dewan Komisaris, dan RKATJSL
- Mendapat penetapan Pemegang Saham atas Kontrak Manajemen yang memuat KPI Direksi secara Kolegial dan KPI Dewan Komisaris

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Rapat Gabungan dengan Direksi sebanyak 15 kali dengan kehadiran anggota Komisaris dalam rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi mencapai rata-rata 95,83% dari total rapat yang diselenggarakan. Agenda dan Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Pada Rapat Gabungan

No	Tanggal	Agenda Rapat						
1	25 Januari 2024	1. Rancangan RKAP 2024						
		2. Lain – lain :						
	Kehadiran Dewan Komisaris	RK	GIN	GH	RR	IGMK		
		√	X	√	√	X		
	Kehadiran Direksi	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
2	30 Januari 2024	1. Tindak Lanjut arahan Rakomdir bulan Desember 2023						
		2. Laporan Manajemen Ytd. Desember 2023						
		3. Manajemen Risiko Permen No. PER-02/MBU/03/2023						
	Kehadiran Dewan Komisaris	RK	GIN	GH	RR	IGMK		
		√	√	√	√	√		
	Kehadiran Direksi	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
3	29 Februari 2024	1. Tindak Lanjut arahan Rakomdir tanggal 30 Januari 2024						
		2. Pembahasan Management Report ytd Januari 2024						
		3. Lain – lain :						
	Kehadiran Dewan Komisaris	RK	GIN	GH	RR	IGMK		
		√	√	√	√	√		
	Kehadiran Direksi	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
4	14 Maret 2024	1. Pembahasan Strategic Grand Design PT Pos Logistik Indonesia						
		2. Pembahasan Rightsizing PT Pos Indonesia (Persero)						
		3. Lain – lain :						
		*) Catatan : hanya 4 direktur yang diundang						
	Kehadiran Dewan Komisaris	RK	GIN	GH	RR	IGMK		
		√	√	√	X	X		
	Kehadiran Direksi	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		X	X	√	√	X	√	√
5	28 Maret 2024	1. Tindak Lanjut arahan Dewan Komisaris pada rapat gabungan tanggal 29 Februari 2024						
		2. Pembahasan Management Report ytd Februari 2024						
		3. Lain – lain						
	Kehadiran Dewan Komisaris	RK	GIN	GH	RR	IGMK		
		√	√	√	√	√		
	Kehadiran Direksi	FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√

No	Tanggal	Agenda Rapat							
6	27 April 2024	1. Tindak Lanjut arahan Dewan Komisaris pada rapat gabungan tanggal 28 Maret 2024							
		2. Laporan Manajemen Ytd. Maret 2024							
		3. Lain – lain							
	Kehadiran Dewan Komisaris	RK	GH	RR	IGMK				
7	31 Mei 2024	1. Tindak Lanjut arahan Dewan Komisaris pada rapat gabungan tanggal 27 April 2024							
		2. Laporan Manajemen Ytd. April 2024							
		3. Lain – lain							
	Kehadiran Dewan Komisaris	RK	GH	RR	IGMK				
8	27 Juni 2024	1. Tindak Lanjut arahan Dewan Komisaris pada rapat gabungan tanggal 31 Mei 2024							
		2. Laporan Manajemen Ytd. Mei 2024							
		3. Lain-lain :							
	Kehadiran Dewan Komisaris	RK	GH	RR	IGMK				
9	26 Juli 2024	1. Tindak Lanjut arahan Dewan Komisaris pada rapat gabungan tanggal 27 Juni 2024							
		2. Laporan Manajemen Ytd. Juni 2024							
		3. Lain-lain :							
	Kehadiran Dewan Komisaris	RK	GH	RR	IGMK	MBD	FB		
10	28 Agustus 2024	1. Tindak Lanjut arahan Dewan Komisaris pada rapat gabungan tanggal 26 Juli 2024							
		2. Laporan Manajemen Ytd. Juli 2024							
		3. Lain-lain : Tidak ada							
	Kehadiran Dewan Komisaris	RK	GH	RR	IGMK	MBD	FB		
11	23 September 2024	1. . Pembahasan Permohonan Tanggapan RJPP 2025 – 2029							
		2. Lain-lain							
	Kehadiran Dewan Komisaris	RK	GH	RR	IGMK	MBD	FB		

No	Tanggal	Agenda Rapat						
12	30 September 2024	1. Tindak Lanjut arahan Dewan Komisaris pada rapat gabungan tanggal 28 Agustus 2024						
		2. Laporan Manajemen Ytd. Agustus 2024						
		3. Lain-lain :						
	Kehadiran Dewan Komisaris	RK	GH	RR	IGMK	MBD	FB	
13	18 Oktober 2024	√	√	√	X	√	√	
		FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
	Kehadiran Direksi	√	√	√	√	√	√	√
14	29 Oktober 2024	1. . Pembahasan Permohonan rekomendasi atas penerbitan SUKUK Ijarah PT Pos Indonesia (Persero)						
		2. Lain-lain						
	Kehadiran Dewan Komisaris	RK	GH	RR	IGMK	MBD	FB	
		√	√	√	√	√	√	
		FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
	Kehadiran Direksi	√	√	√	√	√	√	√
	29 Oktober 2024	1. . Tindak lanjut arahan Dewan Komisaris pada rapat gabunan tanggal 30 September 2024						
		2. Pembahasan Management Report ytd September 2024						
		3. Pembahasan RKAP 2025						
	Kehadiran Dewan Komisaris	RK	GH	RR	IGMK	MBD	FB	
		√	√	X	√	√	√	
		FRD	EPRA	TM	Hrd	Hrs	AK	PP
		√	√	√	√	√	√	√
	Kehadiran Direksi	√	√	√	√	√	√	√

HUBUNGAN AFILIASI ANGGOTA DIREKSI

Pos Indonesia dalam Penerapan GCG berupa transparansi dalam pengungkapan hubungan afiliasi antar para anggota Direksi, antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dan dengan pemegang saham, diungkapkan bahwa tidak terdapat hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Nama	Hubungan keluarga dengan			Hubungan keuangan dengan		
	Komisaris	Direksi	Pemegang saham	Komisaris	Direksi	Pemegang Saham
Faizal Rochmad Djoemadi	x	x	x	x	x	x
Tonggo Marbun	x	x	x	x	x	x
Hariadi	x	x	x	x	x	x
Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman	x	x	x	x	x	x
Haris	x	x	x	x	x	x
Prasabri Pesti	x	x	x	x	x	x
Asih Kurniasari Komar	x	x	x	x	x	x

HUBUNGAN AFILIASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris, sebanyak 6 (enam) orang, terdiri dari berbagai unsur di luar Perseroan. Antar anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu/ipar) sehingga dapat menjamin independensi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, dan tidak terdapat kemungkinan terjadinya kolusi dan nepotisme sebagai penerapan prinsip transparansi dalam penerapan *good corporate governance* (GCG)

Nama	Hubungan keluarga dengan			Hubungan keuangan dengan		
	Komisaris	Direksi	Pemegang saham	Komisaris	Direksi	Pemegang Saham
Rhenal Kasali	x	x	x	x	x	x
Robben Rico	x	x	x	x	x	x
I Gde Made Kartikajaya	x	x	x	x	x	x
Gunawan Hutagalung	x	x	x	x	x	x
Muhammad Budi Djatmiko	x	x	x	x	x	x
Fauzi Baadilla	x	x	x	x	x	x

KOMITE AUDIT

Pembentukan Komite Audit merupakan salah satu langkah penting untuk mewujudkan sistem dan pelaksanaan pengawasan yang kompeten dan independen dalam rangka menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang berlaku. Komite Audit Dewan Komisaris dibentuk sejak tahun 2003 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 08/Kep-KU/2003 tanggal 27 Oktober 2003 tentang Pembentukan Komite Audit. Pembentukan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-103/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara serta di perbaharui kembali dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-12/MBU/2012

tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Tujuan Pembentukan Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam pengurusan Perseroan di bidang sistem pengendalian internal Perseroan, pelaksanaan dan hasil audit oleh Internal Audit maupun Auditor eksternal, penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan Perseroan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit

Anggota Komite Audit diangkat atau diberhentikan oleh Komisaris Perusahaan berdasarkan saran/usulan dari Ketua Komite Audit. Pemberhentian Anggota Komite Audit dilakukan apabila jabatannya telah berakhir, mengundurkan diri, berhalangan tetap dalam melaksanakan tugasnya, atau sebab-sebab lain sesuai ketentuan yang berlaku. Komposisi Ketua dan Anggota Komite Audit ditetapkan Dewan Komisaris dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 Tentang: Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

PT Pos Indonesia (Persero) memiliki Komite Audit yang bekerja berdasarkan Piagam Komite Audit yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Pos Indonesia nomor 254/DEKOM/0721 dan nomor KD.064/DIRUT/0721 tanggal 28 Juli 2021 tentang Piagam Komite Audit PT Pos Indonesia (Persero).

Komposisi Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 84/DEKOM/0320 tanggal 20 Maret 2023 dan Nomor 258/DEKOM/1123 tanggal 6 November 2023 tentang pengangkatan kembali anggota komite audit PT Pos Indonesia (Persero), dan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pengalihan dan Pengangkatan Ketua Komite Audit PT Pos Indonesia (Persero) No. 139/DEKOM/0824 tanggal 28 Agustus 2024 Mengalihkan Robben Rico semula sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Audit menjadi sebagai Anggota Komite Audit PT Pos Indonesia (Persero) dan mengangkat Muhammad Budi Djatmiko sebagai ketua merangkap anggota Komite Audit PT Pos Indonesia (Persero).

Susunan keanggotaan Komite Audit PT Pos Indonesia (Persero) per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

JABATAN	NAMA	KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS	STATUS RANGKAP JABATAN
Ketuan Komite Audit	Muhammad Budi Djatmiko	130/DEKOM/0824	Komisaris Independen
Anggota	Robben Rico	130/DEKOM/0824	Komisaris
	Venoneta Monetera	258/DEKOM/1123	Anggota Independen
	Prasojo	84/DEKOM/0323	Anggota Independen

Profil Anggota Komite Audit

Prasojo

Anggota Independen

Lahir : 21 Juni 1965
Usia : 59 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili : Cibinong

Periode Jabatan

01 April 2020 – Sekarang

Riwayat Pendidikan

- 1994 Ekonomi jurusan Manajemen, Pendidikan Tinggi lanjutan Pos, Bandung, Indonesia
- 1998 Sarjana Akuntansi, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Pengalaman Kerja Komite Audit

- 1988 – 2008 Berbagai Jabatan Manajerial di Pos Indonesia
- 2019 – 2020 Pjs Kepala Satuan Pengawas Internal Pos Indonesia

Venoneta Monetera

Anggota Independen

Lahir : 1 Mei 1965
Usia : 59 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili : Jakarta

Periode Jabatan

12 Oktober 2020 – Sekarang

Riwayat Pendidikan

- 1991 Diploma IV Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta, Indonesia
- 1994 Sarjana Informatika, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan komputer Gunadarma di Jakarta, Indonesia

Pengalaman Kerja Komite Audit

- 1986 – 1989 Auditor pada Badan pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali, Denpasar
- 1993 – 1995 Auditor Pajak Pada Tim Gabungan BPKP dan Depkeu RI di Jakarta
- 1996 – 1997 Auditor Pajak Daerah Pada Tim Gabungan BPKP dan Pemda DKI Jakarta
- 1997 – 1999 Penyusun Modul Training dan Instruktur pada Proyek Audit Sistem Informasi Pusdiklat BPKP, Jakarta

- 1997 – 2002 Auditor pada Deputy Administrasi BPKP di Jakarta
- 2002 Penugasan Khusus untuk evaluasi internal control pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) di Jakarta
- 2002 – 2009 Auditor Investigasi pada Deputy Investigasi BPKP, di Jakarta Tugas Perbantuan untuk Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan Bareskrim –Mabes Polri, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- 2002 – 2020 Instruktur Audit dan Konsultan Senior pada Pusat Pengembangan Internal Audit (YPIA) dan PT Bina Audita Indonesia (BAI) di Jakarta.

Independensi anggota komite audit

Pos Indonesia mewajibkan seluruh anggota Komite Audit untuk memegang teguh independensi dan integritas untuk memastikan segala keputusan yang dihasilkan oleh Komite Audit selalu independen dan terhindar dari tekanan pihak lain dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Disamping itu semua Anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan sesama anggota Komite Audit, Dewan Komisaris dan Direksi. Berdasarkan Piagam Komite Audit yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Pos Indonesia nomor 254/DEKOM/0721 dan nomor KD.064/DIRUT/0721 tanggal 28 Juli 2021 tentang Piagam Komite Audit PT Pos Indonesia (Persero) mengatur persyaratan keanggotaan Komite Audit yaitu:

1. Persyaratan yang bersifat mandatori yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN dalam Peraturan Menteri BUMN tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN. Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
 - b. Tidak memiliki kepentingan/ keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
 - c. Mampu berkomunikasi secara efektif;
 - d. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;
 - e. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang lainnya harus memahami industri/ bisnis Perusahaan;
 - f. Bagi Anggota Komite Audit yang berasal dari luar Perusahaan, tidak boleh merangkap sebagai:
 - i. Anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada BUMN/ perusahaan lain;
 - ii. Sekretaris/Staf Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN/perusahaan lain;
 - iii. Anggota komite pada Komite Lain Dewan Komisaris di Perusahaan;
 - iv. Anggota komite pada BUMN/ perusahaan lain.

- g. Bagi anggota Komite Audit yang berasal dari luar Perusahaan, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan.
- 2. Persyaratan lain yang menurut Peraturan Menteri BUMN tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN jika diperlukan dapat ditetapkan oleh Dewan Komisaris dalam Piagam Komite Audit. Setiap anggota Komite Audit harus:
 - a. Memahami laporan keuangan secara komprehensif, serta bisnis dan proses bisnis Perusahaan.
 - b. Memahami proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perusahaan.
 - c. Mematuhi Kode Etik Komite Audit yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit.
 - d. Meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan, pelatihan, dan berbagai cara dan sarana lainnya.
 - e. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 - f. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
 - g. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
 - h. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
 - i. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan.
 - j. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Tugas Dan Tanggung Jawab

Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 Tentang: Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, serta berdasarkan Piagam Komite Audit yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) nomor 254/DEKOM/0721 dan nomor KD.064/DIRUT/0721 tanggal 28 Juli 2021 tentang Piagam Komite Audit PT Pos Indonesia (Persero) menetapkan tugas Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
2. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
3. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Tugas Yang bersifat mandatori berdasarkan peraturan Menteri BUMN Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN.
 - i. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.
 - ii. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal.
 - iii. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
 - iv. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.
 - v. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugastugas Dewan Komisaris lainnya.

- b. Tugas Yang bersifat mandatori berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Kementerian BUMN tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.
 - i. Melakukan berbagai telaah dalam rangka memberikan masukan kepada Dewan Komisaris sebagai bahan Dewan Komisaris melaksanakan tugas memberikan arahan kepada Direksi. Pelaksanaan telaah tersebut dilakukan oleh Komite Audit atau Komite Dewan Komisaris lainnya atau bersama, berdasarkan pembagian tugas dan/atau arahan untuk melakukan koordinasi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Arahan-arahan Dewan Komisaris kepada Direksi yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN tersebut adalah mengenai:
 - Penguatan sistem pengendalian intern Perusahaan
 - Manajemen risiko Perusahaan
 - Sistem teknologi informasi yang digunakan Perusahaan
 - Kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir
 - Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
 - Kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya
 - Kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - ii. Proses telaah harus dilakukan secara obyektif berdasarkan data yang faktual dan prinsip kehati-hatian profesional (*due professional care*) sehingga dapat menghasilkan masukan yang konstruktif untuk kemajuan perusahaan.
- c. Tugas lain dari Dewan Komisaris dan ditekankan dalam Piagam Komite Audit adalah
 - i. Mengevaluasi kinerja KAP tahun buku sebelumnya dengan metode yang terukur sebagai laporan dan sekaligus sebagai dasar pemberian saran kepada Dewan Komisaris apabila KAP yang bersangkutan akan diusulkan untuk ditunjuk kembali sebagai auditor eksternal.
 - ii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal untuk melaksanakan audit atas tahun buku berjalan, termasuk menghitung Estimasi Biayanya (*Engineer Estimate*) sebagai dasar penetapan Harga Perkiraan Sendiri (*Owner's Estimasi*). Dalam penyampaian rekomendasi tersebut harus disertai dengan uraian yang jelas dan obyektif mengenai alasan penunjukan, antara lain hasil evaluasi kinerja, independensi, ruang lingkup, dan imbal jasa penugasan (*fee*).

- iii. Memberikan pendapat independen dan obyektif dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Auditor Eksternal atas jasa yang diberikannya.
- iv. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari Internal Audit dan Auditor Eksternal (KAP, BPK, BPKP). Pelaksanaan tugas ini dilakukan berdasarkan informasi kegiatan monitoring tindak lanjut yang dilakukan oleh Internal Audit yang diperoleh dari laporan-laporan periodik Internal Audit dan rapat-rapat pembahasan dengan Internal Audit.
- v. Melakukan berbagai telaah dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris, antara lain terhadap:
 - Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
 - Pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan, dan pengaduan lainnya jika diminta oleh Dewan Komisaris.
 - Adanya indikasi potensi benturan kepentingan Perusahaan.
 - Laporan manajemen periodik (bulanan, triwulan, dan tahunan) dengan fokus terhadap pencapaian RKAP.
 - Draft RKAP yang disampaikan oleh Manajemen.
 - Draft RJPP yang disampaikan oleh Manajemen.
 - Permasalahan/kasus tertentu sesuai dengan permintaan dan arahan dari Dewan Komisaris.
- vi. Melakukan kunjungan/peninjauan ke kantor-kantor Regional dan/atau UPT-UPT dalam rangka antara lain: mendampingi kunjungan Dewan Komisaris, penugasan tertentu dari Dewan Komisaris, mengevaluasi kegiatan auditor internal dan auditor eksternal, meningkatkan pemahaman bisnis dan proses bisnis Perusahaan.
- d. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Komite Audit diberikan kewenangan oleh Dewan Komisaris untuk :
 - i. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.
 - ii. Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan audit eksternal terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

- iii. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya atas persetujuan Dewan komisaris.
- iv. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 6. Melakukan pembagian tugas, kerja sama, dan koordinasi yang baik dengan Komite Dewan Komisaris lainnya dalam ranah tugas yang beririsan dan/atau berdasarkan arahan khusus dari Dewan Komisaris.
- 7. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Audit (self assessment) secara periodik dengan metode yang terukur yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Kewajiban Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit berkewajiban :

1. Membuat pedoman kerja yang dituangkan dalam Piagam Komite Audit untuk diusulkan kepada Dewan Komisaris.
2. Membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Komite Audit sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan, untuk diusulkan kepada Dewan Komisaris dan disahkan sebagai kontrak kinerja Komite Audit dengan Dewan Komisaris.
3. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan.
4. Membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
5. Membuat Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan pelaksanaan kegiatan komite sebagai bahan evaluasi Dewan Komisaris dan sekaligus sebagai salah satu sumber informasi untuk penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan kelengkapan pengungkapan informasi dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Program kerja dan realisasi kegiatan Komite Audit tahun 2024 sebagaimana diamanatkan oleh Anggaran dasar Perusahaan dan Peraturan Menteri BUMN dan diselaraskan dengan sasaran dan target yang akan dicapai sebagaimana direncanakan dalam Rencana kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. PENILAIAN TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PT POS INDONESIA (PERSERO)
Tujuan utama dari kegiatan penilaian system pengendalian internal, yaitu:
 - a. Menghasilkan informasi yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan bagi seluruh stakeholder perusahaan (pemegang saham, manajemen, dewan pengawas, fiskus, karyawan, bank, dll).
 - b. Mengamankan seluruh asset perusahaan, baik fisik maupun non fisik, termasuk piutang, dokumen dan database.
 - c. Mendorong efisiensi operasional.
 - d. Mendorong ditaatinya kebijakan-kebijakan manajemen.

Hasil Telaah dan rekomendasi atas Sistem pengendalian perusahaan mengenai kelemahan sistem pengendalian internal perusahaan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris dan juga telah disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi.

2. PENILAIAN TERHADAP INTERNAL AUDIT PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kegiatan penilaian terhadap Internal Audit yang dilakukan oleh Komite Audit adalah dalam rangka membantu tugas Dewan Komisaris, untuk memastikan bahwa Internal Audit telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, termasuk di dalamnya menilai pelaksanaan dan hasil auditnya, dan kemudian memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

Kegiatan penilaian mencakup:

- a. Evaluasi atas dukungan Manajemen dan Dewan Komisaris terhadap posisi dan peran Internal Audit.
 - i. Posisi unit Internal Audit dalam struktur organisasi PT Pos Indonesia (Persero).
 - ii. Pengangkatan Kepala Internal Audit.
 - iii. Pelaksanaan Internal Audit Charter (IAC).
 - iv. Dukungan Manajemen terhadap alokasi sumber daya manusia dan dana untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Internal Audit.
- b. Efektivitas pelaksanaan penugasan audit:
 - i. Review terhadap Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Internal Audit dan progres pencapaiannya.
 - ii. Analisis terhadap lingkup kerja dan staf auditor yang tersedia (jumlah dan kapasitasnya)

- iii. Peninjauan secara langsung proses audit yang sedang dilakukan oleh Internal Audit (observasi lapangan)
 - iv. Penelaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Audit, termasuk Kertas Kerja Pemeriksaannya bila diperlukan.
 - v. Memastikan Internal Auditor melaksanakan tugasnya secara objektif dan independen serta menjunjung tinggi integritas.
 - vi. Evaluasi terhadap integritas pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pelaporan.
 - vii. Quality assurance atas pelaksanaan audit dan pelaporannya.
- c. Peran Internal Audit dalam pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Auditor dan Eksternal Auditor (BPK, BPKP, KAP)
 - i. Internal Audit mampu berperan sebagai Konsultan bagi auditee dalam menyelesaikan setiap temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan Internal Audit, BPK, BPKP dan KAP.
 - ii. Internal Audit mampu berperan aktif mendorong Direktur Utama untuk memberikan disposisi yang konstruktif dan segera atas semua temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan audit internal dan eksternal.

- d. Peran Internal Audit dalam mengoptimalkan Whistle Blowing System (WBS)
 - i. Internal Audit melakukan evaluasi, monitoring dan review terhadap efektifitas penerapan program Whistle Blowing System (WBS).
 - ii. Internal Audit membantu Komite Audit dalam pelaksanaan WBS
- e. Pelaksanaan audit berbasis risiko (Risk Based Audit)
 - i. Penilaian terhadap pemahaman auditor Internal Audit atas konsep-konsep RBIA.
 - ii. Peran Internal Audit dalam membangun risk management perusahaan.
- iii. Dukungan Manajemen atas hasil pemeriksaan Internal Audit, khususnya terhadap identifikasi risiko dan saran mitigasi yang diusulkan oleh Internal Audit.
- iv. Keselarasan penerapan audit Intern pada anak Perusahaan dengan kebijakan Audit Intern Induk.
- f. Pelaksanaan audit tujuan tertentu Pencapaian program kerja Internal Audit terkait dengan Program Kerja Audit Tujuan Tertentu yang dituangkan dalam PKAT Internal Audit.
- g. Rapat Rutin dengan Internal Audit minimal 3 (tiga) bulan sekali.
Rapat dengan Internal Audit untuk membahas antara lain:
 - i. Laporan Kinerja Internal Audit Triwulanan.
 - ii. Realisasi Program Kerja.

NO	KEGIATAN	IPK	Target IPK	Bobot	Mulai	Selesai	Realisasi IPK (per Triwulan)				Skor IPK s/d TW IV/2024
							I	II	III	IV	
1	Rapat Pembahasan dengan Internal Audit :										
	a. Rapat ke-1 (Kinerja Internal Audit Tw-IV 2023)	Rapat	1	1	15-Jan-24	31-Jan-24	1				1,0
	b. Rapat ke-2 (Kinerja Internal Audit Tw-I 2024)	Rapat	1	1	15-Apr-24	30-Apr-24	-	1			1,0
	c. Rapat ke-3 (Kinerja Internal Audit Tw-II 2024)	Rapat	1	1	15-Jul-24	31-Jul-24	-	-	1		1,0
	d. Rapat ke-4 (Kinerja Internal Audit Tw-III 2024)	Rapat	1	1	15-Okt-24	31-Okt-24	-	-	-	1	1,0
2	Penyusunan Laporan kepada Dekom :										
	a. Kinerja Internal Audit Tw IV-2022 / Tahun 2023	Laporan	1	1	15-Jan-24	28-Feb-24	1				1,0
	b. Kinerja Internal Audit Tw I-2024	Laporan	1	1	15-Apr-24	31-Mei-24	-	1			1,0
	c. Kinerja Internal Audit Tw II-2024	Laporan	1	1	15-Jul-24	31-Agu-24	-	-	1		1,0
	d. Kinerja Internal Audit Tw III-2024	Laporan	1	1	15-Okt-24	30-Nov-24	-	-	-	1	1,0
3	Observasi Lapangan :										
	Observasi Lapangan direncanakan 5 (lima) kali. Pelaksanaannya menyesuaikan dengan jadwal audit di Kantor-kantor Regional.	Observ.	5	8	1-Mar-24	31-Dec-24	1	1	1	2	8,0
Total		13 Lap./Aktivitas		16			3,0	3,0	3,0	4,0	16,0

*) Dijabarkan dari Program Kerja, IPK, dan Jadwal Kegiatan RKAT KA 2024.

Realisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Audit Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Kinerja Internal Audit Triwulan IV-2024

Rapat pembahasan kinerja Internal Audit selama Triwulan IV 2024 diselenggarakan secara Hybrid (*Offline sekaligus Online*) pada tanggal 19 Desember 2024, dimana dua orang anggota Komite Audit dan Ketua unit Internal Audit bersama para Deputinya hadir di Ruang Rapat Dewan Komisaris di GPI Jakarta, sedangkan Ketua Komite Audit hadir secara *Online*. Beberapa hal yang dibahas antara lain:

- i. Performance Reviu (Struktur Organisasi Internal Audit, Realisasi anggaran audit Triwulan III tahun 2024, Rencana dan Realisasi penugasan).
- ii. Highlight temuan audit dan tindak lanjut.
- iii. *Current Issue* (hasil audit investigasi, audit layanan logistic korporat, audit *security* aplikasi Jasa Keuangan).

b. Observasi Lapangan

Pada tanggal 15 November 2024 Komite Audit bersama Kepala unit Internal Audit menghadiri Exit Meeting Kegiatan Audit atas Kantor Regional 2 di kantor GPI Jakarta; Kemudian di tanggal 20 Desember 2024 Komite Audit juga ikut menghadiri Exit Meeting Kegiatan Audit atas Direktorat Jasa Keuangan di kantor GPI Jakarta.

3. PENILAIAN TERHADAP AUDITOR EKSTERNAL

Kegiatan penilaian terhadap auditor eksternal tahun buku 2023 telah selesai dilaksanakan pada bulan April tahun 2024. Sedangkan audit oleh KAP Kanaka Puradiredja Suhartono (Nexia) atas Laporan Keuangan PT :Pos Indonesia tahun buku 2024, pada Triwulan IV tahun 2024 ini baru mulai dilaksanakan, yaitu dilakukannya kick off meeting atas kegiatan audit tersebut pada tanggal 9 Desember 2024 di kantor GPI Bandung.

4. PENILAIAN TERHADAP KELAYAKAN PROSEDUR EVALUASI ATAS SEGALA INFORMASI YANG DIKELUARKAN OLEH PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kegiatan penilaian mencakup:

- a. Menilai draft informasi yang disampaikan, meliputi: kesesuaian struktur pelaporan dengan peraturan yang terkait, kecukupan/kejelasan informasi yang disampaikan, konsistensi antar informasi yang disajikan, dsb.
- b. Melakukan diskusi atau konfirmasi dengan pejabat yang menangani bidang yang terkait dengan draft informasi yang disampaikan.
- c. Melakukan penelaahan terhadap kesesuaian informasi dengan data pendukungnya dan dengan informasi lainnya yang terkait.

5. TUGAS-TUGAS LAINNYA DARI DEWAN KOMISARIS

Realisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Audit selama Triwulan IV-2024 adalah sebagai berikut :

a. Monitoring atas tindak lanjut temuan internal audit dan eksternal audit (BPK, BPKP dan KAP)

Monitoring atas temuan Internal Audit dan eksternal audit dan tindak lanjut atas rekomendasinya dilakukan oleh Komite Audit berdasarkan Laporan Triwulanan Internal Audit. Pembahasan temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal Audit dilakukan pada tanggal 19 Desember 2024.

b. Membantu Dewan Komisaris menganalisis kinerja bulanan perseroan.

Analisis terhadap kinerja Perusahaan sudah dilakukan oleh Komite Audit bersama sama dengan Komite yang lain (September 2024, Oktober 2024, dan November 2024), serta sudah dibahas dan dilaporkan dalam Rapat Dewan Komisaris dengan Komite pada rapat bulanan Dewan Komisaris bersama Organ Komite Dekom.

c. Menyusun tanggapan Dewan Komisaris atas laporan manajemen triwulanan dan tahunan Komite audit melakukan telaah terhadap Laporan Triwulanan Manajemen dan berdasarkan telaah Komite Audit tersebut disusun Surat Tanggapan Dewan Komisaris untuk dilaporkan kepada Kementerian BUMN selaku Kuasa Pemegang Saham. Laporan Manajemen triwulan III tahun 2024 Komite Audit melakukan telaah dan menyusun Surat Tanggapan Dewan Komisaris kepada Kementerian BUMN No. Pos.3867/DEK 100/DEKOM/2024 tanggal 08 Novmeber 2024 perihal: Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2024 PT Pos Indonesia (Persero).

d. Komite Audit ditugaskan sebagai pengelola *Whistle Blowing System* (WBS). Selama triwulan IV/2024 tidak ada laporan yang masuk ke WBS.

e. Analisis draft RKAP 2025 dan saran terhadap Tanggapan Dewan Komisaris Sampai dengan Triwulan IV/2024 Komite Audit bersama dengan Komite Dewan Komisaris yang lain melakukan pembahasan dan telaah atas RJPP 2025-2029 serta atas draft RKAP Manajemen tahun 2025. Kegiatan ini dimulai pada bulan Oktober 2024.

6. PENINGKATAN KAPASITAS KOMITE AUDIT

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas agar dapat melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, Komite Audit merencanakan untuk mengikuti workshop/seminar; baik yang dilakukan oleh pihak luar maupun internal Perseroan (inhouse training), baik yang terkait dengan keilmuan sebagaimana dipersyaratkan untuk Komite Audit maupun pemahaman terhadap bisnis dan proses bisnis PT Pos Indonesia (Persero) yang sangat diperlukan untuk dapat menjalankan tugas dengan baik.

Pada tahun 2024, anggota Komite Audit telah mengikuti pelatihan/workshop sebagai berikut :

- a. Tanggal 1 Agustus 2024 seminar "Peran Komite Audit dalam mewujudkan ranah siber yang aman" yang diselenggarakan IKAI (Ikatan Komite Audit Indonesia) di Jakarta.
- b. Tanggal 25 sampai dengan 26 Juli 2024 seminar "GRC Masterclass Program Series XXIII" yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR), di Bandung.
- c. Tanggal 1 Agustus 2024 seminar "Peran Komite Audit dalam mewujudkan ranah siber yang aman" yang diselenggarakan IKAI (Ikatan Komite Audit Indonesia) di Jakarta.
- d. Tanggal 25 sampai dengan 26 Juli 2024 seminar "GRC Masterclass Program Series XXIII" yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR), di Bandung.
- e. Tanggal 4 sampai dengan 5 Desember seminar 'SNIA (Seminar Nasional Internal Auditor) tahun 2024, dengan tema 'Cultural Transformation: Integrating ESG, Cybersecurity, and Innovative Risk Management, yang diselenggarakan oleh YPIA di Bali.

7. RAPAT

Kegiatan rapat terdiri dari :

- a. Rapat Rutin Internal Komite Audit.
Rapat internal Komite Audit diselenggarakan secara Virtual atau fisik bertempat di Kantor Dewan Komisaris di Jakarta dan diselenggarakan minimal 2 kali dalam 1 bulan. Realisasi penyelenggaraan rapat rutin internal Komite Audit selama tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 10 .
- b. Mengikuti Rapat Rutin Dewan Komisaris.
Jadwal Rapat Rutin Komite Audit dengan Dewan Komisaris minimal sebulan 1 kali. Realisasi penyelenggaraan rapat rutin Komite Audit dengan Dewan Komisaris selama tahun 2024 sebanyak 15 kali
- c. Rapat Insidentil Komite Audit.
Selain rapat-rapat di atas, dalam tahun 2023, KA menyelenggarakan dan mengikuti rapat-rapat lain dengan pihak Manajemen sebanyak 32 kali ..

8. PELAPORAN

Sesuai dengan RKAT Komite Audit, Komite Audit membuat laporan pelaksanaan tugas setiap triwulan dan laporan pelaksanaan Whistle Blower(WBS), terdiri dari:

- Laporan Triwulan pelaksanaan tugas Komite Audit kepada Dewan Komisaris sebanyak 4 Laporan.
- Laporan Triwulan Pengelolaan WBS oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris sebanyak 4 Laporan.

Indikator Pencapaian Kinerja Komite Audit 2024

Berdasarkan realisasi pelaksanaan tugas Komite Audit sampai dengan Triwulan IV-2024, Skor IPK kumulatif adalah sebesar 98,4 (sembilan puluh delapan koma empat), dengan rincian sbb:

NO	KEGIATAN	Kegiatan/Laporan		Bobot	Pencapaian Skor IPK 2023				Skor IPK s.d TW-IV/2024
		Rencana 2024	Realisasi s.d TW-IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Penilaian terhadap Sistem Pengendalian Internal	6	5	6	1,0	1,0	1,0	2,0	4,5
2	Penilaian terhadap Internal Audit	13	16	16	3,0	3,0	3,0	4,0	16,0
3	Penilaian terhadap Auditor Eksternal (KAP 2023 dan KAP 2024)	20	18	22	7,0	3,0	2,0	4,0	18,0
4	Penilaian terhadap Prosedur Evaluasi atas Informasi yang dihasilkan oleh PT Pos Indonesia	2	2	2	1,0		1,0		2,0
5	Hal-hal yang Memerlukan Perhatian Dewan Komisaris dan Tugas-tugas Lainnya dari Dewan Komisaris	24	18	18	5,0	7,0	7,0	5,0	18,0
6	Peningkatan Kapasitas Komite Audit	2	3	3			2,0	1,0	3,0
7	Rapat	48	55	24	21,0	21,0	15,0	7,0	26,9
8	Pelaporan	9	9	10	2,0	2,0	2,0	3,0	10,0
Jumlah		124	126	100	40,0	28,0	32,0	21,0	93,4

Kriteria dalam RKAT komite audit dalam 1 tahun

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| > 95 (maksimal 100) Sangat Baik | > 50 s.d. 65 Kurang |
| > 80 s.d 94 Baik | < 50 Sangat Kurang |
| > 65 s.d 80 Cukup | |

Skor KPI sampai dengan triwulan IV 2024 adalah sebesar 98,4. Skor ini kurang dari target triwulan IV tahun 2024 sebesar 100.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Bahwa dalam rangka transformasi human capital yang dilakukan melalui talent and succession Direksi BUMN, Menteri BUMN melalui Surat Nomor S-254/MBU/04/2020 tanggal 17 April 2020 mengarahkan kepada seluruh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN untuk membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi; Bahwa pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta fungsi pengawasan Dewan Komisaris atas penyelenggaraan perusahaan yang sehat dan menguntungkan serta meningkatkan kinerja perusahaan secara efektif, efisien, dan independen sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance pada PT Pos Indonesia (Persero).

Anggota Komite

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 Tentang: Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) Nomor 223/DEKOM/0822 tentang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, susunan

keanggotaan KNR adalah:

1. Komite NR sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
 - b. anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - i. anggota Dewan Komisaris;
 - ii. pihak yang berasal dari luar PT Pos Indonesia (Persero); atau
 - iii. pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
2. Ketua Komite NR adalah anggota Komite yang berasal dari anggota Dewan Komisaris Perseroan yang dapat bertindak independen.
3. Pengangkatan anggota Komite NR diangkat oleh Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan No.57/DEKOM/0424 tanggal 26 April 2024 memberhentikan dengan hormat Sdr. Roben Rico dan mengangkat Sdr. I Gde Made Kartikajaya sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan.

Perubahan terakhir Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pos Indonesia (Persero) No. 133/DEKOM/0924 tanggal 6 September 2024 Mengalihkan I Gde Made Kartikajaya semula sebagai ketua merangkap anggota, menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, Mengalihkan Fauzi Baadilla Semula Anggota menjadi Ketua Merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pos Indonesia (Persero).

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2024, sebagai berikut:

JABATAN	NAMA	KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS	STATUS RANGKAP JABATAN
Ketua KNR	Fauzi Baadilla	133/DEKOM/0924	Komisaris Independen
Anggota KNR	I Gde Made Kartikajaya	133/DEKOM/0924	Komisaris
	Oerip Soebagyo	113/DEKOM/0824	Anggota Independen
	Boy Bayu Idisondjaja	156/DEKOM/0523	Anggota Independen

Profil Anggota Komite Komite Nominasi Dan Remunerasi

Boy Bayu Idisondjaja

Anggota Independen

Lahir : 12 September 1974
 Usia : 50 Tahun
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Domisili : Bogor, Jawa Barat

Periode Jabatan

31 Mei 2023 – Sekarang

Riwayat Pendidikan

- 1994 Teknik Lingkungan , Fakultas Perencanaan dan Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung , Indonesia
- 2000 Sekolah Bisnis & Manajemen PPM : Program Studi Bisnis & Pemasaran, Jakarta, Indonesia
- 2013 Sekolah Pascasarjana Angkatan Laut, Monterey-California: Program Eksekutif dalam Pengambilan Keputusan Pertahanan
- 2014 Universitas Pertahanan Indonesia: Program Studi -Strategi Perang Total, M.Si.
- 2024 Fakultas Ekonomi & Bisnis: Doktor Manajemen Strategis, Universitas Indonesia

Pengalaman Kerja

- 2001-2005 PT L'OREAL-PARIS INDONESIA : Manajer Produk
- 2005-2007 PT CHEVRON OIL PRODUCT INDONESIA : Kategori Manajer Merek & Pemimpin Aliansi Strategis OEM
- 2007-2008 PT RISTRA INDOLAB : General Manager Pemasaran & Penjualan
- 2015 - 2022 Anggota Fakultas (Manajemen Strategis & Pemasaran) – Fakultas Manajemen PPM
- 2015 – sekarang Senior Associate – Institut Reformasi Kebijakan /Rumah Reformasi Kebijakan
- 2010 – sekarang Komisaris Independen dan Penasihat Perusahaan untuk Transformasi Organisasi dan ESG (Lingkungan,Sosial & Governance) di berbagai Perusahaan Nasional, Badan Usaha Milik Negara & Instansi Pemerintah
- 2023 – sekarang Anggota Komite Nominasi & Remunerasi – Dewan Komisaris PT. Pos Indonesia

Oerip Soebagyo

Anggota Independen

Lahir : 24 Desember 1960
Usia : 64 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili : Bekasi, Jawa Barat

Periode Jabatan

08 November 2021 – Sekarang

Riwayat Pendidikan

- 1984 Akabri Kepolisian
- 1988 Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
- 2000 SESPIM POLRI
- 2008 SESPATI POLRI
- 2013 LEMHANAS Republik Indonesia

Pengalaman Kerja

- Kadensus 88 Antiterror Polda Jatim
- Penyidik Utama Bareskrim Polri
- Wakapolda Sulawesi Tengah
- Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri
- Wakapolda Sumatera Selatan
- Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta
- Wakil Ketua Bidang PPITK STIK Lemdikpol
- Widya Iswara Utama Sespim Polri
- Ketua Tim Assesment Center Polri
- Staff Ahli Komisi Pengawas SKK Migas

Independensi Anggota KNR

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER - 06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 Tentang: Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-12/MBU/2012 Tentang

Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia(Persero) Nomor 223/DEKOM/0822 tentang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, semua

Anggota Komite tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan sesama anggota Komite, Dewan Komisaris dan Direksi. Dengan syarat sebagai berikut :

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Bersifat independen, baik dalam melaksanakan tugasnya, maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero).
3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan SDM, nominasi, dan remunerasi perusahaan.
4. Bukan merupakan karyawan di PT Pos Indonesia (Persero) dalam 1 (satu) Tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris menjadi anggota Komite NR.
5. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung di PT Pos Indonesia (Persero). Dalam hal anggota Komite NR memperoleh saham akibat peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
6. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Pos Indonesia (Persero), kecuali untuk anggota yang berasal dari manajerial PT Pos Indonesia (Persero).
7. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Komite NR pada emiten atau perusahaan lain pada periode yang sama.
8. Anggota Komite NR yang bukan Dewan Komisaris tidak boleh memiliki:
 - a. Hubungan keluarga sedarah dengan Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan derajat kedua baik dari garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu dan ipar).
 - b. Kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informasi materiil perseroan.
9. Anggota Komite NR yang bukan anggota Dewan Komisaris wajib membuat pernyataan secara tertulis atas segala sesuatu atau semua yang berpotensi menjadi benturan kepentingan di kemudian hari atau kesediaan memenuhi semua larangan sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas yang mempengaruhi kompetensi dan independensinya.
10. Anggota Komite NR dalam menjalankan tugasnya menganut Azas Good Corporate Governance:
 - a. Transparansi (transparency);
 - b. Akuntabilitas (accountability);
 - c. Responsibilitas (responsibility);
 - d. Independensi (independency);
 - e. Kewajaran dan kesetaraan (fairness).

Tugas dan Tanggung Jawab

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 Tentang: Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara Pasal 16C, Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi adalah:

1. Melakukan review secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (Talent Management System) perusahaan serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya.
2. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (Talent Classification) yang dilakukan oleh Direksi.
3. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (Selected Talent), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS/Menteri (Nominated Talent); Tugas ini tidak dilakukan oleh anggota komite yang berasal dari manajerial PT Pos Indonesia.
4. Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri.

5. Melakukan evaluasi atas usulan Key Performance Indicators Individu anggota Direksi.
6. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
7. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
8. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi pegawai yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
9. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan.

Pelaksanaan Program kerja KNR

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana diamanatkan oleh Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Menteri BUMN tersebut di atas dan diselaraskan dengan sasaran dan target yang akan dicapai sebagaimana direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2024.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Triwulan I-III Tahun 2024 ini merupakan realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi Pos Indonesia (Persero) Tahun 2024.

1. Evaluasi atas kebijakan dan pelaksanaan karir talent pool perusahaan:
 - a. Evaluasi kebijakan pengembangan karir (talent pool) Perusahaan;
 - b. Penyiapan rumusan rekomendasi Dewan Komisaris terkait kebijakan pengembangan karir (talent pool) Perusahaan,

Program ini belum dilaksanakan pada triwulan III tahun 2024.
2. Evaluasi dan Penyiapan rekomendasi Dewan Komisaris atas usulan calon talent pool yang diajukan oleh direksi. Program ini belum dilaksanakan pada triwulan III tahun 2024.
3. Evaluasi dan perumusan rekomendasi Dewan Komisaris terkait pemilihan calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/ perusahaan patungan yang diajukan oleh Direksi.
 - a. Berdasarkan Surat Direksi kepada Dewan Komisaris Nomor C.Pos.7043/SU 200 /P00/2024/Rhs tanggal 1 Februari 2024 perihal Usulan Penggantian dan Penambahan Direksi PT Pos Logistik Indonesia, Dewan Komisaris telah memberikan tanggapan atas usulan penggantian dan penambahan Direksi Poslog dengan surat yang ditujukan kepada Direktur utama Nomor 03/Dekom/Rhs/0224 tanggal 13 Februari 2024.
 - b. Dalam menanggapi balasan surat dari Direktur Utama Nomor C.Pos.11456/SU 200/P00/2024/Rhs maka KNR membuat Telaah Komite Nominasi dan Remunerasi atas Uuslan Penggantian Direktur Utama PT Pos Logistik Indonesia dengan Nomor 01/KNR/0324/Rhs.
 - c. Dilanjutkan dengan tanggapan atas Tindak Lanjut Penggantian dan Penambahan Direksi PT Pos Logistik Indonesia dengan surat kepada Direktur Utama dengan Nomor 06/Dekom/Rhs/0324 tanggal 08 Maret 2024 yang pada pokoknya Dewan Komisaris masih melakukan pendalaman atas usulan dimaksud.
 - d. Berdasarkan Surat Direksi C.Pos.18360/SU 200/P00/2024/Rhs tanggal 26 Maret 2024 tentang usulan perpanjangan kerjasama Kepala Internal Audit, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas usulan perpanjangan tersebut melalui Surat Dewan Komisaris Nomor C.Pos.19092/DEK 400/DEKOM/2024/Rhs tanggal 28 Maret 2024 perihal Persetujuan perpanjangan kerjasama Kepala Internal audit.
 - e. Pada tanggal 2 April Dewan Komisaris mengadakan Rapat dengan Jajaran Direksi dengan agenda membahas tentang Grand Design PT Pos Indonesia kedepan dan Posisi PT Pos Logistik Indonesia, Hasil rapat antara lain akan diusulkan kembali perubahan Nomenklatur Direksi pada PT Pos Logistik Indonesia dan PT Pos Property Indonesia serta akan dilakukan seleksi kembali calon Direksi PT Pos Logistik Indonesia.

- f. Pada tanggal 1 Juli 2024 menyelenggarakan Rekrutmen calon anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Investasi (KPMRUI) dan mengajukan Sdri Dewi Hanggraeni sebagai Calon yang memenuhi syarat kepada Dewan Komisaris melalui Surat Nomor 11/KNR/0724 tanggal 11 Juli 2024.
 - g. Berdasarkan Surat Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor C.Pos47206 /SU.200/P00/2024/Rhs tanggal 1 Agustus 2024 maka pada tanggal 10 Agustus 2024 Komite NR menyelenggarakan rapat dengan Direktur HCM membahas usulan Direksi PT Pos Logistik Indonesia. Pada tanggal 22 Agustus 2024 Komite NR Menyampaikan telaah dan Draft tanggapan tertulis atas usulan direksi dan atas Arahan dari Dewan Komisaris agar terhadap calon yang diusulan dilakukan wawancara maka pada tanggal 26 Agustus 2024 Komite NR menyelenggarakan wawancara terhadap calon dimaksud.
 - h. Pada tanggal 4 September 2024 Dewan Komisaris memberikan tanggapan tertulis atas Usulan Direksi PT Pos Logistik Indonesia kepada Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) melalui Surat Nomor 21/Dekom /Rhs/0924 tanggal 4 September 2024 perihal tanggapan atas Usulan Direksi PT Pos Logistik Indonesia.
 - i. Berdasarkan Surat Direksi Nomor C.Pos.48463/SU 200/P00/2024/Rhs tanggal 7 Agustus 2024 perihal Usulan Penetapan Direktur PT Pos Properti Indonesia, Dewan Komisaris melaksanakan audiensi dengan Komisaris Utama dan Direktur Utama pada tanggal 23 Agustus 2024 dan selanjutnya memberikan tanggapan tertulis melalui Surat Dewan Komisaris Nomor 20/Dekom/Rhs/0824 tanggal 23 Agustus 2024 yang pada pokoknya meminta kepada Direksi untuk melengkapi dengan Penilaian Kinerja calon dan mempresentasikan secara komprehensif tentang Strategi Bisnis Perusahaan beserta metode implementasinya untuk mencapai pertumbuhan bisnis pada 2 minggu setelah tanggal surat.
4. Validasi dan Kalibrasi talenta usulan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS/Menteri (nominated talent)
- a. Berdasarkan Surat dari Direktur Utama Nomor C.Pos 18029 /SU 100/P00 / 2024/Rhs.Prib tanggal 25 Maret 2024 perihal Pengajuan Selected Talent Talenta BOD-1 tahun 2024 dan Surat Nomor C Pos 1830 /SU 100/P 00/2024 /Rhs Prib tanggal 25 Maret 2024 perihal evaluasi BOD PT Pos Indonesia (Persero) dan Surat Undangan Nomor C Pos 18384 /KNR100 / KNR/2024 tanggal 26 Maret 2024, Komite NR telah mengadakan Rapat pada tanggal 27 Maret 2024 dengan Direktur Human Capital

- Management untuk melakukan Validasi terhadap usulan Selected Talent yang diajukan oleh Direksi.
- b. Dari Hasil Rapat tersebut diatas Direksi telah menindaklanjuti dengan surat Nomor C. Pos 19449 / SU 200/P 04/2024 /Rhs tanggal 1 April 2024 perihal selected talent dan Evaluasi BOD Eksisting tahun 2024.
 - c. Pada hari Kamis Tanggal 4 April 2024 di Bandung, Dewan Komisaris dan Komite NR melaksanakan rapat lanjutan membahas tentang Validasi Selected Talent dan Melakukan Evaluasi terhadap Direksi PT Pos Indonesia (Persero).
 - d. Melalui Surat Nomor 12/Dekom/Rhs/0424 Dewan Komisaris memberikan Tanggapan atas Selected Talent BOD-1 PT Pos Indonesia bahwa berdasarkan hasil dari Validasi yang dilakukan oleh dewan Komisaris terdapat 5 (lima) orang Talent yang tidak memenuhi syarat dan meminta Direksi untuk mengirimkan calon pengganti.
 - e. Setelah dilakukan pembahasan terhadap usulan 5 (lima) orang talent pengganti, Dewan Komisaris mengirimkan Nominated Talent tahun 2024 kepada Ketua Cluster Talent Committe (CTC) Logistik Angkutan Darat melalui Surat Nomor Pos 1221/DEK 400/DEKOM/2024/Rhs tanggal 18 April 2024 perihal Penyampaian Nominated Talent PT Pos Indonesia (Persero).
5. Melakukan Evaluasi atas Usulan Key Performnace Indicators Individu Anggota Direksi
 - a. Berdasarkan surat Direksi Nomor C Pos 10254 /KN 100/ B 1/2024 tanggal 17 Februari 2024 perihal Draft Kontrak Manajemen BOD Individual tahun 2024, Komite NR melalui surat undangan Nomor C pos 13432/KNR 100/KNR/ 2024 telah mengadakan rapat dengan Direktur Business Development dan Portofolio Manajemen pada tanggal 4 Maret 2024 untuk membahas dan mengevaluasi usulan Draft Kontrak manajemen individu Direksi tahun 2024 bersama dengan komite Audit dan Komite Manajemen risiko.
 - b. Dalam Rapat Evaluasi tersebut telah diberikan Rekomendasi kepada Tim Busdev untuk dilakukan perbaikan dan diajukan kembali kepada Dewan Komisaris .
 - c. Komite juga telah menyusun Telaah atas draft Kontrak manejemen 2024 yang telah dikirim kembali setelah dilakukan perbaikan oleh Tim Busdev kepada Dewan Komisaris melalui surat Nomor 07/KNR/0424 tanggal 24 April 2024 .
 - d. Direksi dan Dewan Komisaris telah menandatangani Kontrak Manajemen per tanggal 25 April tahun 2024 .

6. Menyiapkan Usulan Sistem Evaluasi Kinerja Individu bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris
 - a. Berdasarkan Surat Direksi Nomor C.Pos.18030/SU 100/P00/2024/Rhs-Pnb tanggal 25 Maret 2024 perihal Evaluasi BOD PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2024, Dewan Komisaris telah melakukan Rapat Dewan Komisaris Pada tanggal 4 April 2024 dengan Agenda evaluasi kinerja Direksi eksisting tahun 2024.
 - b. Dewan Komisaris telah melaporkan hasil evaluasi kinerja Direksi Eksisting dan mengirimkan kepada Ketua Cluster Talent Committe (CTC) Logistik Angkutan darat melalui Surat Nomor Pos 1221/DEK 400/DEKOM/2024/Rhs tanggal 18 April 2024 perihal Penyampaian Nominated Talent PT Pos Indonesia (Persero)
7. Evaluasi dan Penyiapan Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi atas Usulan Restrukturisasi Organisasi Perusahaan
 - a. Berdasarkan Surat Direksi Nomor C.Pos.31583/SU 200/P00/2024/Rhs tanggal 29 Mei 2024 Perihal Usulan perubahan Nomenklatur Jabatan pada Anak Perusahaan PT Pos Indonesia (Persero), Perubahan dimaksud adalah pada jabatan Direksi yang semula menggunakan nomenklatur Chief dirubah menjadi Direktur. Komite telah melakukan Kajian atas usulan tersebut dan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris pada tanggal 10 Juni 2024.
 - b. Dewan Komisaris telah memberikan Tanggapan tertulis atas Usulan tersebut pada tanggal 11 Juni 2024 melalui Surat Nomor 17/Dekom/Rhs/0624 perihal Tanggapan atas usulan perubahan nomenklatur Direksi pada Anak Perusahaan PT Pos Indonesia Persero.
8. Evaluasi dan Penyiapan Rekomendasi Dewan Komisaris Terkait Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Disampaikan Kepada Pemegang Saham
 - a. Berdasarkan Surat Direksi Nomor C.Pos.28788/SU 100/P00/2024/Rhs-Prib tanggal 16 Mei 2024 perihal Usulan Penghasilan BoD dan BoC tahun 2024. Dewan Komisaris dalam Hal ini Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengundang rapat Direktur HCM untuk membahas Kajian internal HCM terkait dengan usulan Penghasilan Direksi dan Dewan komisaris tahun 2024. Komite juga telah menyampaikan telaah kepada Dewan Komisaris melalui surat Nomor 08 /KNR/0524/Rhs tanggal 28 Mei 2024.
 - b. Dewan Komisaris telah membuat Surat Usulan Remunerasi tahun 2024 kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham melalui Surat Nomor 16/Dekom/0524/Rhs tanggal 29 Mei 2024 perihal Usulan Pembayaran Tantiem 2023 dan Penyesuaian Remunerasi tahun 2024 BoD dan BoC PT Pos Indonesia (Persero).

- c. Komite Nominasi dan Remunerasi mengundang Rapat Direktur HCM untuk membahas dan melakukan verifikasi terhadap pencairan Tantiem/IK yang ditangguhkan tahun 2022 pada tanggal 9 September 2024 dengan hasil tidak ditemukannya hal-hal yang menyebabkan dilakukannya tindakan penyesuaian terhadap tantiem yang akan dibayarkan. Dalam rapat tersebut Komite juga mengingatkan agar pelaksanaan pembayaran TYD mempedomani mekanisme yang sudah ditetapkan oleh Kementerian BUMN.
 - d. Pada tanggal 13 September 2024 telah menerima surat Direksi Nomor C.Pos 57939/SU 200/P04/2024 tentang Laporan Pembayaran Tantiem tahun 2023 dan TYD Tahun 2022.
 - e. Sesuai dengan Surat Asisten Deputy Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN selaku RUPS Nomor SR-36/Wk.MBU.11/082024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2024, Dewan Komisaris mengingatkan agar Direksi segera menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Surat Nomor 22/Dekom /Rhs /2024 tanggal 11 September 2024.
 - f. Berdasarkan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.009/Dirut/0224 tentang pembayaran Jasa Produksi tahun 2023 tanggal 20 Februari 2024, melalui Surat Nomor 23/Dekom/Rhs/2024 tanggal 11 September 2024 Dewan Komisaris mengingatkan kepada Direksi agar segala sesuatu yang menjadi Hak Sekretaris Dewan Komisaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris dapat dibayarkan sesuai ketentuan.
9. Tugas – tugas Lainnya dari Dewan Komisaris
 - a. Pada 2024 Komite KNR telah melakukan Rapat laporan manajemen :
 - i. KNR bersama KA, dan KPMRUI melakukan telaah atas Laporan Manajemen YTD Desember 2023 pada tanggal 26 Januari 2024.
 - ii. KNR bersama KA, dan KPMRUI melakukan telaah atas Laporan Manajemen YTD Januari 2024 pada tanggal 28 Februari 2024.
 - iii. KNR bersama KA, dan KPMRUI melakukan telaah atas Laporan Manajemen YTD Februari 2024 pada tanggal 27 Maret 2024.
 - iv. KNR bersama KA dan KPMRUI melakukan telaah atas Laporan Manajemen YTD Maret 2024 pada tanggal 26 April 2024.
 - v. KNR bersama KA dan KPMRUI melakukan telaah atas Laporan Manajemen YTD April 2024 pada tanggal 30 Mei 2024.

- vi. KNR bersama KA dan KPMRUI melakukan telaah atas Laporan Manajemen YTD Mei 2024 pada tanggal 25 Juni 2024.
- vii. KNR bersama KA dan KPMRUI melakukan telaah atas Laporan Manajemen YTD Juni 2024 pada tanggal 24 Juli 2024.
- viii. KNR bersama KA dan KPMRUI melakukan telaah atas Laporan Manajemen YTD Juli 2024 pada tanggal 24 Agustus 2024.
- ix. KNR bersama KPMRUI dan KA melakukan telaah atas Laporan Manajemen YTD Agustus 2024 pada tanggal 27 September 2024.
- b. Rapat Dewan Komisaris dengan Komite terkait Laporan Year to date :
 - i. Rapat Dewan Komisaris dan Komite membahas Management Report YTD Desember 2023 tanggal 30 Januari 2024.
 - ii. Rapat Dewan Komisaris dan Komite membahas Management Report YTD Januari 2024 tanggal 29 Februari 2024.
 - iii. Rapat Dewan Komisaris dan Komite membahas Management Report YTD Februari 2024 tanggal 28 Maret 2024.
 - iv. Rapat Dewan Komisaris dan Komite membahas Management Report YTD Maret 2024 tanggal 27 April 2024.
 - v. Rapat Dewan Komisaris dengan Komite membahas tentang Management Report YTD April 2024 tanggal 31 Mei 2024.
 - vi. Rapat Dewan Komisaris dengan Komite membahas Management Report YTD Mei tanggal 26 Juni 2024.
 - vii. Rapat Dewan Komisaris dengan Komite membahas tentang Management Report Juni 2024 pada tanggal 26 Juli 2024.
 - viii. Rapat Dewan Komisaris dan Organ Dekom membahas agenda Dewan Komisaris yang belum tuntas pada tanggal 23 Agustus 2024.
 - ix. Rapat Dewan Komisaris dengan Komite membahas tentang Management Report Juli 2024 pada tanggal 26 Agustus 2024.
 - x. Rapat Dewan Komisaris dengan Komite membahas tentang Management Report Agustus 2024 pada tanggal 27 September 2024.
- c. Rapat Monitoring :
 - i. Rapat monitoring RKAP Dit. Human Capital Management tanggal 17 Januari 2024.
 - ii. Rapat Monitoring RKAP Dit. Business Development & Portfolio Management 18 Januari 2024.
 - iii. Rapat monitoring RKAP Dit. Human Capital Management tanggal 15 Februari 2024.
 - iv. Rapat Monitoring RKAP Dit. Business Development & Portfolio Management 14 Februari 2024.
 - v. Rapat monitoring RKAP Dit. Human Capital Management tanggal 25 Maret 2024.

- vi. Rapat Monitoring RKAP Dit. Business Development & Portfolio Management 21 Maret 2024.
- vii. Rapat Monitoring RKAP Dit Human Capital Management tanggal 25 April 2024.
- viii. Rapat Monitoring RKAP Dit Business Development & Potofolio Management tanggal 25 April 2024.
- ix. Rapat Monitoring RKAP Dit Human Capital Management Tanggal 27 Mei 2024.
- x. Rapat Monitoring Dit Busdev tanggal 27 Mei 2024.
- xi. Rapat Moniting RKAP Dit Human Capital Management tanggal 24 Juni 2024.
- xii. Rapat Monitoring Dit Busdev tanggal 24 Juni 2024.
- xiii. Rapat Monitoring RKAP Dit Human Capital Management tanggal 17 Juli 2024.
- xiv. Rapat Monitoring RKAP Dit Busdev tanggal 17 Juli 2024.
- xv. Rapat Monitoring RKAP Dit Human Capital Management tanggal 19 Agustus 2024.
- xvi. Rapat Monitoring RKAP Dit Busdev tanggal 21 Agustus 2024.
- xvii. Rapat Monitoring RKAP Dit Human Capital Management tanggal 29 September 2024.
- xviii. Rapat Monitoring RKAP Dit Operasi dan Digital Services tanggal 26 September 2024.
- d. Rapat KNR dengan Komiteer Lainnya dan Kegiatan Lainnya :
 - i. Rapat Laporan Progress pelaksanaan Audit tahun buku 2023 oleh KAP tanggal 18 Januari 2024.
 - ii. Rapat Laporan Progress Pelaksanaan Audit tahun buku 2023 oleh KAP Tanggal 14 Maret 2024.
 - iii. Exit Meeting Audit tahun buku 2023 oleh KAP tanggal 28 Maret 2024.
 - iv. Bersama dengan KA dan KPMRUI mengadakan kunjungan ke Denpasar Bali dan Surabaya terkait dengan Double Presence dan berpindahkannya customer ke DHL pada tanggal 13 dan 16 Mei 2024.
 - v. Bersama dengan KPMRUI mengadakan kunjungan Ke Banda Aceh terkait dengan Penghapusan Aset pada tanggal 18 Februari 2024.
 - vi. Bersama dengan KA dan KPMRUI dan Tim Busdev melakukan pembahasan Draft Rencana Jangka Panjang Perusahaan taahun 2025 - 2029 pada tanggal 7 Juni 2024.
 - vii. Bersama denag KA dan KPMRUI mengikuti rapat membahas tentang RJPP 2025-2029 pada tanggal 3 September 2024.

10. Peningkatan Kapasitas Komite Nominasi dan Remunerasi

- a. Bapak Made Kartikajaya mengikuti pelatihan Profesional Recognition Program for Qualified internal Auditor (QIA) Certification pada tanggal 21- 22 Juni 2024 di Hotel Mercure Jakarta.
- b. Boy Bayu Idisondjaja mengikuti pelatihan Risk Assessment Techniques ISO 31010 (ISO 31000 Series 2), pada tanggal 20-22 May 2024 di Hotel Sensa, Bandung.
- c. Boy Bayu Idisondjaja mengikuti pelatihan dan sertifikasi Certified Sustainability Report Specialist + (CSRS+) of Global Report Initiative (GRI) & Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP), pada tanggal 14-16 May 2024 di Hotel Aston Priority TB Simatupang, Jakarta, dan Online Exam tgl. 2 Juni 2024.
- d. Oerip Soebagyo mengikuti Masterclass Program series XXIII tentang Life Cycle Assesment And Carbon Reduction Strategy pada tanggal 25 – 26 Juli 2024 di Bandung yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Manajemen Risiko (LSPMR).

Pedoman KNR

PT Pos Indonesia (Persero) menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan fairness/keadilan untuk mewujudkan visi perusahaan. Pedoman bagi KNR dalam menajalankan tugasnya diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia(Persero) Nomor 223/DEKOM/0822 tentang Piagam Komite penerapan manajemen risiko Nominasi dan Remunerasi. Dengan ditetapkannya Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menunjang tugas Dewan Komisaris dalam pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasehat guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Pedoman ditetapkan pada 26 Agustus 2022 yang berisi tentang:

1. Latar Belakang
2. Tujuan, Visi dan Misi
3. Keanggotaan KNR
4. Kedudukan, Wewenang dan Batasan Tugas
5. Tugas
6. Mekanisme dan Ketentuan Kerja
7. Pengendalian Mutu

Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi (KPMRUI)

Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi PT Pos Indonesia (Persero) (KPMRUI) adalah organ pendukung Dewan Komisaris yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko usaha dan rencana investasi yang diusulkan Direksi, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Direksi, serta mengidentifikasi risiko atas rencana investasi yang diajukan manajemen kepada Dewan Komisaris, serta melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi dibentuk oleh Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar penerapan manajemen risiko perseroan tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha dan rencana investasi perseroan tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima dan menguntungkan perseroan.

Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi adalah salah satu organ pendukung Komisaris yang dibentuk berdasarkan pada:

1. Pasal 121 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pembubaran BUMN;
3. Pasal 18 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.
4. Pasal 17 s/d 23 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 Tentang: Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara

Anggota KPMRUI

1. Pengangkatan dan Pemberhentian
 - a. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Dewan Komisaris harus membentuk Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi, yang terdiri dari ketua dan anggota.
 - b. Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
 - c. Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
 - d. Komposisi dan jumlah Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi:
 - i. Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi adalah Anggota Dewan Komisaris yang merupakan Anggota Komisaris Independen atau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen;
 - ii. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi dapat berasal dari Anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perusahaan. Namun seorang atau lebih Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi harus berasal dari Anggota Dewan Komisaris;
 - iii. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi yang bukan berasal dari Anggota Dewan Komisaris maksimal berjumlah 2 (dua) orang;
 - iv. Dewan Komisaris dapat menetapkan jumlah Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi yang bukan berasal dari Anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang, apabila diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau disetujui oleh Menteri berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas di Perusahaan.
 - e. Apabila Anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi berhenti sebagai Anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi wajib diganti oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - f. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi yang merupakan Anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris berakhir.

2. Persyaratan Anggota

- a. Mempunyai integritas yang tinggi dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang manajemen dan/ atau industri Perusahaan dan bidang-bidang yang relevan lainnya yang dianggap perlu sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara optimal.
- b. Mandiri terhadap manajemen Perusahaan dalam pelaksanaan tugasnya dan mandiri terhadap Dewan Komisaris dalam pelaporan hasil kerjanya.
- c. Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi bekerja secara kolegal profesional, efektif, dan efisien dengan mengutamakan musyawarah mufakat dalam proses pengambilan keputusan.
- d. Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dan efektif dalam melaksanakan fungsinya.
- e. Mempunyai komitmen yang tinggi dan menyediakan waktu yang memadai dalam menjalankan fungsinya secara optimal.
- f. Tidak mempunyai conflict of interest dalam menjalankan fungsinya.
- g. Bagi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi yang berasal dari luar Perusahaan, tidak boleh merangkap sebagai:
 - i. Anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada BUMN/ perusahaan lain;
 - ii. Sekretaris/Staf Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN / perusahaan lain;
 - iii. Anggota komite lain di Perusahaan;
 - iv. Anggota komite pada BUMN/ perusahaan lain.
- h. Bagi anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi yang berasal dari luar Perusahaan, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan.

Susunan Anggota KPMRUI sebagai berikut:

JABATAN	NAMA	KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS	STATUS RANGKAP JABATAN
Ketua KPMRUI	Gunawan Hutagalung	183/DEKOM/0623	Komisaris
Anggota KPMRUI	Dewi Hanggraeni	90/DEKOM/0724	Anggota Independen
	Syaiful Siliganda	92/DEKOM/0323	Anggota Independen

Profil Anggota KPMRUI diluar Anggota Dewan Komisaris

Syaiful Siliganda

Anggota Independen

Lahir : 08 April 1983
Usia : 41 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili : Jakarta

Periode Jabatan

10 April 2023 – Sekarang

Riwayat Pendidikan

- 2006 Teknik Elektro, ITS Surabaya, Indonesia
- 2020 Magister of Management (majoring in Risk Management), PPM School of Management Jakarta, Indonesia

Riwayat Jabatan

- Juli 2006 – Agustus 2007 Management Development Programme (MDP) BCA Finance
- Agustus 2007 – Juli 2008 GMAP (Graduate Management Associate Programme) PermataBank
- November 2009 – Juli 2012 Senior Manager – Operational Risk PermataBank
- Juli 2012 – November 2013 Sales Management PermataBank
- November 2013 – Oktober 2014 Operational Risk Management – Bank UOB Buana Indonesia
- Februari 2015 – Agustus 2016 Operational Risk Division Head, Bank Sinarmas
- Agustus 2016 – Mei 2017 Special Assignment for Acquiring Business (Merchant) & Credit Card, Bank Sinarmas
- Juni 2017 – Mei 2018 Head Of Operational & Risk Fintech – P2P Lending, PT Cicil Solusi Mitra Teknologi
- Mei 2018 – Februari 2020 Head Of Legal & Compliance – Fintech, PT Bluepay Digital International
- Februari 2020 – sekarang Director P2P Lending Company – Kredinesia

Dewi Hanggraeni

Anggota Independen

Lahir : 08 Januari 1967
Usia : 58 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili : Jakarta

Periode Jabatan

15 Juli 2024 – Sekarang

Riwayat Pendidikan

- S-1 (SE) dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI).
- S-2 (MBA) dari University of Arkansas di Fayetteville, Arkansas, USA, 1997 Finance & Marketing dan Economics Institute, Boulder, Colorado, USA, 1996
- S-3 (Doktor) dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, Maret 2009

Riwayat Jabatan

- Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis dan Fakultas Komunikasi & Diplomasi, Universitas Pertamina (2021-sekarang).
- Dosen FEB UI (1998-sekarang)
- Ketua Center of Excellence of Digital Transformation and Change Management.
- PT Daya Makara Universitas Indonesia sebagai Direktur (Mei 2009 – Mei 2018).
- PT Jamsostek/ BP JAMSOSTEK sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Februari 2007– Desember 2008).
- Lembaga Manajemen FEUI sebagai Direktur Keuangan, Administrasi dan Sumber Daya Manusia (Agustus 2006 – Pebruari 2007). Risk Center FEUI: Pendiri/Direktur Eksekutif (September 2005 – Pebruari 2007).
- LM FEUI sebagai Direktur Riset dan Konsultasi (Juli 2005 – Agustus 2006).
- Departemen Manajemen FEUI sebagai Wakil Kepala/ Sekretaris Departemen (September 2004 – Agustus 2005).
- Pusat Pengembangan Akuntansi FEUI sebagai Direktur (Januari 2002–Mei 2005).
- LM FEUI sebagai Kepala Divisi Riset dan Konsultasi (Juni 2001 – Pebruari 2002).
- LM FEUI sebagai Konsultan dan Trainer (Desember 1997 – Juni 2001).
- Hagabank (RaboBank) sebagai Kepala Sub Departemen Budget, selanjutnya sebagai Deputy Team Leader Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) (Maret 1990– Juli 1997)

Independensi KPMRUI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam membantu Dewan Komisaris, KPMRUI dituntut untuk selalu independen dan bebas dari tekanan pihak lain maupun kepentingan pribadi. Untuk menjaga Independensi, Anggota KPMRUI dibekali kode etik yang diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor 170/DEKOM/1024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi PT Pos Indonesia (Persero). Kode etik anggota KPMRUI yaitu:

1. Kode Etik Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi mengatur mengenai prinsip dasar sikap dan perilaku seluruh Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi, termasuk anggota yang merangkap sebagai Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi, yang dalam pelaksanaannya memerlukan penalaran dan penghayatan yang seksama dari masing masing Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi, karena menyangkut nilai-nilai (values). Setiap Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi dituntut untuk menerapkan standar perilaku yang terkandung dalam Kade Etik

Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi secara konsisten bahkan melebihi tuntutan peraturan perundang-undangan, karena seringkali nilai-nilai kebaikan belum diatur dalam hukum positif.

2. Mengingat beban tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi cukup berat dan bahwa dalam pelaksanaannya Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi bekerja secara kolektif, maka penerapan sikap dan perilaku yang diatur dalam Kade Etik Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi harus didasarkan pada tingkat empati yang tertinggi terhadap sesama Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi.
3. Sanksi terhadap pelanggaran Kade Etik Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi adalah peringatan lisan, peringatan tertulis, sampai dengan pemberhentian dari tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi.
4. Setiap Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi harus mematuhi ketentuan sikap dan perilaku sebagai berikut:
 - a. Sikap dan perilaku yang diwajibkan bagi anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi:

- i. Memahami, memegang teguh, dan mengaplikasikan secara maksimal dan konsisten prinsip bahwa seluruh standar perilaku harus diterapkan dalam melaksanakan tugas, karena standar tersebut melandasi kualitas pekerjaan Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi dalam rangka membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan;
- ii. Menjunjung tinggi integritas dan kejujuran sebagai nilai tertinggi dan menerapkan komitmen integritas secara amanah; “
- iii. Selalu berperilaku dan bersikap jujur, obyektif, dan cermat dalam melaksanakan tugas;
- iv. Melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional tanpa pengaruh dari kepentingan pribadi ataupun pengaruh/ tekanan dari pihak manapun;
- v. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab selalu berorientasi pada outcome, bukan hanya sekedar output, sehingga kualitas output Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi menghasilkan nilai tambah bagi Perusahaan;
- vi. Menggunakan keahlian, pengetahuan, pengalaman, dan berbagai kapasitas diri lainnya, termasuk mengalokasikan waktu secara memadai, secara optimal sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas;
- vii. Secara terus menerus meningkatkan keahlian, pengetahuan, dan kapasitas diri lainnya, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik;
- viii. Bersikap loyal kepada Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris lainnya, dengan prinsip bahwa loyalitas tertinggi adalah terhadap kepentingan Perusahaan;

- ix. Menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga dapat merugikan Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi, Dewan Komisaris, dan Perusahaan;
- x. Menghindari aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan atau yang dapat mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas secara obyektif;
- xi. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun, baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berkepentingan terhadap Perusahaan, yang dapat mengganggu atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan profesional Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi dan/ atau menyebabkan adanya benturan kepentingan;
- xii. Mematuhi sepenuhnya tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi, kebijakan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Perusahaan;
- xiii. Memelihara dan mempertahankan moral dan martabat;
- xiv. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain yang dapat menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan kerugian Perusahaan dengan alasan apapun juga;
- xv. Melaporkan semua hasil pelaksanaan tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi dengan mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan Perusahaan dan/ atau dapat melanggar hukum;
- xvi. Mendorong penerapan good corporate governance;

- xvii. Menghormati keputusan organ Perusahaan, yaitu RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi sesuai dengan fungsi masing-masing;
 - xviii. Menggunakan bahasa yang baik dan profesional dalam melakukan interaksi baik internal maupun eksternal;
 - xix. Menjaga tingkah laku dalam pergaulan agar tidak menciptakan image yang tidak baik bagi Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi dan Perusahaan secara keseluruhan; “
 - xx. kut menciptakan suasana kerja yang bebas dari isu-isu yang tidak bertanggung jawab.
- b. Sikap dan perilaku yang dilarang bagi anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi:
- i. Dilarang berperilaku dan bersikap yang dapat atau patut diduga dapat mengganggu/ menurunkan integritas, independensi, dan obyektivitas Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi;
 - ii. Dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perusahaan, sarana, dan prasarana untuk keuntungan pribadi atau pihak lain;
 - iii. Dilarang bersikap dan berperilaku yang dapat atau patut diduga dapat memprovokasi hal-hal tertentu sehingga menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif;
 - iv. Dilarang memberikan data, informasi, ataupun keterangan yang palsu/ tidak benar;
 - v. Dilarang mengambil keuntungan pribadi dari semua kegiatan Perusahaan, termasuk melakukan insider trading;
 - vi. Dilarang memberi dan/ atau menerima hadiah serta donasi kepada/ dari stakeholder Perusahaan, dalam bentuk uang tunai, bingkisan atau barang berharga dan lain-lain;
 - vii. Dilarang ikut mengelola bisnis rekanan dan pelanggan Perusahaan untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain;
 - viii. Dilarang melakukan diskriminasi dalam hal pembagian kerja dan penilaian pekerjaan, baik karena perbedaan gender, suku, maupun agama;

- ix. Tidak melakukan tindakan atau mengeluarkan ucapan yang bersifat melecehkan atau merendahkan, kepada siapapun dan karena alasan apapun.
5. Selain mengikuti kode etik yang diatur dalam pasal ini, Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi juga wajib berpedoman pada Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tentang Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code of Conduct) Insan PT Pos Indonesia (Persero).
- Tugas Dan Tanggung Jawab**
- Tugas pokok KPMRUI adalah membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko usaha dan rencana investasi yang diusulkan Direksi, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Direksi, serta mengidentifikasi risiko atas rencana investasi yang diajukan manajemen kepada Dewan Komisaris. Berikut rincian tugas KPMRUI:
1. Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
 2. Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
 3. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi sebagai organ pengelola Risiko di bawah Dewan Komisaris memiliki fungsi Manajemen Risiko dengan wewenang, tugas, dan tanggung jawab:
 - i. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsi komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi;
 - ii. melakukan komunikasi dengan kepala unit kerja dan pihak lain dalam Perusahaan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan;
 - iii. melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan Manajemen Risiko dan laporan lainnya terkait penerapan Manajemen Risiko baik Perusahaan maupun Anak Perusahaan;
 - iv. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko Perusahaan maupun Anak Perusahaan;

- v. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan dan Manajemen Risiko Anak Perusahaan;
 - vi. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS; dan
 - vii. Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.
- b. Tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi sebagaimana ditegaskan dalam Piagam Dewan Komisaris, sebagai berikut:
- i. Mengkaji ulang secara berkala atas kebijakan manajemen risiko dan pemberian pendapat kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi atau persetujuan atas kebijakan manajemen risiko.
 - ii. Mengkaji dan mengevaluasi risiko-risiko yang timbul dari pertanggungjawaban Direksi yang berkaitan dengan hubungan bisnis atau kegiatan usaha yang harus menclapatkan rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris.
 - iii. Mengevaluasi dan melakukan analisis risiko atas setiap usulan Direksi yang terkait dengan kerjasama investasi, penyertaan modal, pendirian perusahaan patungan, pendirian anak perusahaan, dan kegiatan lain perusahaan untuk mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Dewan Komisaris.
 - iv. Mengevaluasi dan mengkaji risiko-risiko yang timbul dari RKAP, Rencana Bisnis Perusahaan, RJPP untuk mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Dewan Komisaris.
 - v. Memonitor risiko-risiko utama yang dihadapi Perusahaan dan memastikan bahwa Direksi telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko-risiko tersebut.

- vi. Memberikan masukan-masukan kepada Dewan Komisaris dalam rangka perbaikan dan pengembangan kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan.
- vii. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan Dewan Komisaris.
- c. Tugas lain dari Dewan Komisaris dan ditegaskan dalam Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi ini adalah:
 - i. Membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko usaha dan rencana investasi yang diusulkan Direksi, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Direksi, serta mengidentifikasi risiko atas rencana investasi yang diajukan manajemen kepada Dewan Komisaris.
 - ii. Memantau kebijakan risiko yang diterapkan perusahaan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - iii. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko.
 - iv. Melakukan evaluasi kepatuhan Perusahaan terhadap Anggaran Dasar, peraturan Menteri BUMN, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko.
 - v. Mengevaluasi rencana investasi yang diajukan perusahaan dengan mengacu kepada rencana strategis perusahaan dengan mempertimbangkan risiko-risiko hasil identifikasi manajemen dan kaidah-kaidah biaya manfaat serta peraturan yang berlaku.
 - vi. Mengidentifikasi risiko-risiko usaha dan investasi dan hal-hal lainnya yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
 - vii. Menyampaikan laporan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, berdasarkan hasil analisis cost & benefit dan identifikasi risiko (yang telah disiapkan oleh manajemen) serta melihat berbagai potensi risiko lain yang mungkin belum teridentifikasi oleh manajemen.

Wewenang

Komite memiliki wewenang yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor 170/DEKOM/1024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi PT Pos Indonesia (Persero) yaitu :

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi manajemen risiko terkait tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi;
3. Melibatkan pihak independen di luar Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya, atas persetujuan Dewan Komisaris;
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi berkewajiban:

1. Membuat pedoman kerja yang dituangkan dalam Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi untuk diusulkan kepada Dewan Komisaris;
2. Membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan, untuk diusulkan kepada Dewan Komisaris dan disahkan sebagai kontrak kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi dengan Dewan Komisaris;
3. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan;
4. Membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
5. Membuat Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan pelaksanaan kegiatan Komite sebagai bahan evaluasi Dewan Komisaris dan sekaligus sebagai salah satu sumber informasi untuk penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan kelengkapan pengungkapan informasi dalam Laporan Tahunan Perusahaan;

6. Melakukan pembagian tugas, kerjasama, dan koordinasi yang baik dengan komite lainnya dalam ranah tugas yang beririsan dan/atau berdasarkan arahan khusus dari Dewan Komisaris;
7. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi (self assessment) secara periodik dengan metode yang terukur yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Kinerja dan Pelaksanaan Kegiatan KPMRUI

1. Membahas / mengevaluasi tentang Manajemen Risiko Perusahaan:
KPMRUI telah mengadakan Rapat KPMRUI Triwulan dengan Divisi GRC pada tanggal 30 Juli 2024 mengenai pelaksanaan Manajemen Risiko Triwulan II 2024. Dalam rapat tersebut, KPMRUI memberikan arahan antara lain:
 - a. Fungsi manajemen risiko ini sangat crucial khususnya terkait kinerja produksi maupun kinerja keuangan. Ketidaklinieran capaian kinerja itu juga harus dilakukan mitigasi oleh Divisi GRC, karena banyak program kerja yang tidak linier dengan capaian waktu (hal ini merupakan budaya yang tidak baik)
 - b. PosIND sudah mempunyai RKAP dan sekarang ini tinggal menjalankannya, perlu dilihat program yang inline dengan strategi manajemen risiko Perusahaan. Perlu dilihat apakah kondisi yang ada itu sudah sesuai dengan yang diprognosakan dan bagaimana memitigasinya.
 - c. Perlu dilihat semua apakah risk controlnya sudah berjalan termasuk perlu dilihat juga kinerja sekarang ini yang cukup tertekan. Hal ini perlu di cek juga apakah kondisi yang ada sudah sesuai dengan kertas kerjanya (termasuk untuk Poslog perlu dilihat lebih dalam).
 - d. Sewaktu melihat draf RJPP yang terpikir adalah bagaimana memisahkan seluruh Government project/ Government contract itu didalam satu Direktorat tersendiri dan unit ini nantinya bermain/betempurnya itu di dunia Indusri (hal ini juga sudah disampaikan ke bapak Komut).
 - e. Agar determinasi terhadap capaian risiko ini dan harus benar benar diinternalisasi di manajemen baik di Direksi sampai dengan BOD minus one/ minus two dan juga internalisasi di Dekom

- f. Mendukung untuk dilakukan rasionalisasi dan sekarang ini harus dipilih orang yang benar benar fit bekerja di Pos Indonesia. Kalau hal ini tidak dilakukan maka Perusahaan tidak akan sukses menjalankan transformasi secara materiil.
2. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan RKAP Tahun 2024 secara bulanan, triwulanan, semesteran, maupun tahunan.
 - a. Telaah Atas Laporan Manajemen Bulanan.
 - b. Telaah Atas Laporan Manajemen Triwulanan.
 - c. Telaah Atas Laporan Manajemen Tahunan.

KPMRUI bersama dengan Komite Audit (KA) dan Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) melakukan telaah terhadap:

 - a. Laporan Manajemen bulan Desember 2023 sampai dengan November 2024.
 - b. Laporan Manajemen Triwulan IV tahun 2023, Triwulan I – III tahun 2024.
3. Memberikan Arahan kepada Direksi atas Kebijakan Perusahaan Lainnya
 - a. Telaah atas sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan.
 - b. Telaah atas kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.
 - c. Telaah atas kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.
4. Membahas/mengevaluasi tentang pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.

Pembahasan dengan pihak terkait tentang kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan telah dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2024 dengan beberapa pokok pembahasan sebagai berikut :

 - a. Rencana jangka panjang untuk GLID akan dipegang POSLOG
 - b. Ke depannya POS Properti memang tidak hanya mengelola aset yang dimiliki PosIND saja.
 - c. Untuk Posfin nantinya antara Digital Payment dan Digital Solution ini akan berjalan beriringan. Dalam RJPP Posfin dapat dilihat proyeksi Revenue untuk kedua lini tersebut, nantinya porsi terbesar akan ada di lini Digital Solution.
 - d. Kedepannya akan dikembangkan Join Resources antara Induk dan Anak Perusahaan.
 - e. Diharapkan nantinya peraturan-peraturan yang ada di Anak Perusahaan akan mengikuti semangat yang ada di Induk Perusahaan (POSIND).

5. Memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
Pembahasan dengan pihak terkait tentang AOI GCG telah dilaksanakan pada tanggal 2 September 2024 tahun 2024 dengan beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti terkait aspek di Dewan Komisaris menyangkut 5 (lima) hal yaitu:
 - a. Menandatangani laporan manajemen triwulanan oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 - b. Memperbaharui penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan setiap awal tahun
 - c. Melengkapi muatan Piagam Dewan Komisaris terkait etika rapat
 - d. Menyampaikan undangan rapat Dewan Komisaris sesuai dengan aturan yang berlaku
 - e. Menyimpan risalah rapat Dewan Komisaris di Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan
6. Pembahasan dengan pihak terkait tentang AOI GCG telah dilaksanakan pada tanggal 2 September 2024 tahun 2024 dengan beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti terkait aspek di Dewan Komisaris menyangkut 5 (lima) hal yaitu:
 - a. Menandatangani laporan manajemen triwulanan oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 - b. Memperbaharui penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan setiap awal tahun
 - c. Melengkapi muatan Piagam Dewan Komisaris terkait etika rapat
 - d. Menyampaikan undangan rapat Dewan Komisaris sesuai dengan aturan yang berlaku
 - e. Menyimpan risalah rapat Dewan Komisaris di Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan
7. Evaluasi atas kebijakan Perusahaan Lainnya
 - a. Telaah dan surat rekomendasi atas penghapusbukuan aset perusahaan (dilakukan berdasarkan surat permohonan yang diajukan Direksi). KPRMUI telah melakukan telaah dan tanggapan atas surat permohonan Direksi :
 1. Surat dengan nomor C.Pos.7872/KU 1100/ KU 0202/2024 terkait Permohonan Rekomendasi Penghapusbukuan Bangunan Kantor Cabang Pembantu Dargo 50123A Semarang.

2. Surat dengan nomor C.Pos.7873/KU 1100/KU 0202/2024 terkait Permohonan Rekomendasi Penghapusbukuan Aktiva Tetap Bangunan Eks Kantorpos Cabang Pembantu Darussalam 23111A Banda Aceh.
- b. Rapat atas pengelolaan Piutang Usaha.
KPMRUI Telah melakukan meeting pada tanggal 13 Maret 2024 antara pihak KPMRUI dengan SVP Enterprise Business, SVP Financial Operations & Business Partner, CFO Pos Logistik khusus untuk membahas mengenai pengelolaan Piutang Usaha. Berikut ini adalah tanggapan-tanggapan dari manajemen terkait pertanyaan Komite :
 1. Satgas:
 - a) Sejauh ini belum ada SK tentang Satrgas Piutang (KD sedang berproses).
 - b) Satgas nantinya berfungsi untuk menyelesaikan piutang macet yang umurnya di atas 6 bulan
 2. Kendala-Kendala yang dihadapi antara lain menyangkut:
 - a) Penanganan laporan masih dilakukan secara manual, nanti dengan adanya aplikasi ARSY diharapkan pelaporannya akan semakin baik.
 - b) Masih terjadi perbedaan pencatatan di beberapa Regional.
 - c) Masih ada perbedaan pendapat antara Direktorat Keuangan dengan Direktur Bisnis Kurir dan Logistik menyangkut pencatatan piutang hal ini perlu diseleraskan lebih lanjut.
 - d) Dokumen tidak lengkap misalkan tidak adanya BAST dll
 3. Sebetulnya satu invoicing itu hanya untuk satu term of payment, namun dalam prakteknya di lapangan itu ada bermacam macam cara.
 4. Untuk Jasa Keuangan pada umumnya cukup lancar.
 5. Piutang Samsat itu masih berprogres, adapun permasalahannya itu ada kesalahan di internal menyangkut pencatatan discount.

6. Untuk katagori bad player pada umumnya dikarenakan anggaran (khususnya untuk pemerintah), sementara itu untuk pihak BUMN/Swasta umumnya dikarenakan kesulitan anggaran.
 7. Untuk mencegah terjadinya NPP akan dikeluarkan edaran dimana pelunasan tidak boleh lagi digunakan untuk pembayaran ke pihak lain misalkan untuk vendor. Terkait piutang yang belum dicatat, untuk jurnal baliknya dilakukan setelah NPP cair.
 8. Untuk kebijakan akuntansi menyangkut transaksi dan bentuk jurnalnya itu dalam dokumennya memang tidak muncul secara detail dan itu dituangkan hanya dalam bentuk surat.
 9. Workshop dengan tim cabang terkait penyelesaian rekonsiliasi memang belum pernah dilakukan untuk itu akan dijadwalkan lebih lanjut.
 10. Untuk katagori claim itu antara lain menyangkut denda keterlambatan, denda kehilangan atau kiriman tidak sampai di tempat tujuan. Untuk kedepannya data akan dipisahkan supaya tidak misleading.
- Untuk dispute tarif akan dikurangi pendapatannya, hal ini umumnya menyangkut selisih berat, selisih tarif dan ada wrong entry. Hal ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan timnya Ibu Vivi (akan dibicarakan bersama antara Direktorat keuangan dengan Direktorat bisnis termasuk dengan pihak fronting)
8. Tugas-tugas lainnya dari Dewan Komisaris
Tugas-tugas lainnya dalam program kerja ini sebagaimana sudah ditetapkan dalam Program Kerja KPMRUI tahun 2024 adalah menghadiri rapat progress Audit dengan KAP untuk tahun buku 2024 yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV 2024.
 9. Peningkatan Kapasitas KPMRUI
Peningkatan kapasitas KPMRUI melalui training dilaksanakan pada Triwulan IV 2024.
 10. Rapat
Pada Triwulan III 2024 KPMRUI menyelenggarakan rapat rutin dengan Dewan Komisaris sebanyak 3 kali, yaitu:
26 Juli 2024 melalui Live Video Conference Zoom Meet
28 Agustus 2024 melalui Live Video Conference Zoom Meet
7 September 2024 melalui Live Video Conference Zoom Meet.

11. Pelaporan

Selama tahun 2024 KPMRUI telah menyampaikan Laporan, yakni:

- a. Laporan Realisasi Pelaksanaan Tugas KPMRUI TW IV tahun 2023 telah disampaikan pada tanggal tanggal 13 Januari 2024 melalui surat No. C.Pos.2953/KPM 100/DEKOM/2024.

- b. Laporan Realisasi Pelaksanaan Tugas KPMRUI TW I tahun 2024 telah disampaikan pada tanggal 24 April 2024 melalui surat No. C.Pos.24745/KPM100/DEKOM/2024
- c. Laporan Realisasi Pelaksanaan Tugas KPMRUI TW II tahun 2024 telah disampaikan pada tanggal 26 Juli 2024 melalui surat No. C.Pos.45418/KPM100/DEKOM/2024

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Tata Sugiarta

Lahir : 20 Januari 1970
Usia : 54 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili : Bandung

Dasar Penunjukan :

Surat Keputusan Direksi Nomor SK.1051/DIRUT/0624 tanggal 5 Juni 2024 Tentang Pembebasan dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan PT Pos Indonesia (persero)

Riwayat Pendidikan

1991 Desain Grafis, FSRD Institut Teknologi Bandung

Riwayat Jabatan

- 2000–2009 FP Produksi – Bagian Filateli Kantor Pusat
- 2009–2012 FP Promosi – Bagian Marketing Communication Kantor Pusat
- 2012–2016 Manajer Filateli Kantor Pusat
- 2016–2017 Deputi Jasa Keuangan Ritel dan Properti Reg 2 Padang
- 2017–2018 Manajer MarketingCommunication Kantor Pusat
- 2018–2020 VP Marketing Kantor Pusat
- 2020 VP Product Management dan Marketing Kantor Pusat
- 2020–sekarang Corporate Secretary

Tugas dan Tanggung Jawab

Mengacu pada Keputusan Direksi Nomor: KD115/DIRUT/1121 tanggal 26 November 2021 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Direksi Nomor : KD.77/DIRUT/0821 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pos Indonesia (Persero), Corporate Secretary mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memelihara hubungan baik dengan pemegang saham, regulator dan pemangku kepentingan lainnya serta melaksanakan peran sebagai penghubung (liaison officer) dengan fungsi terkait dalam Perusahaan.
2. Mengendalikan kesekretariatan Direksi, Protokoler Direksi dan sistem administrasi dokumen Perusahaan.
3. Mengendalikan pengelolaan kepentingan Hukum Perusahaan, Direksi dan karyawan dalam menjalankan kebijakan/peraturan yang telah ditetapkan Perusahaan.
4. Mengendalikan kepatuhan Perusahaan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance.
5. Mengendalikan penyelenggaraan program quality, safety, health and environment.

6. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
7. Mengendalikan penatausahaan dan penyimpanan dokumen Perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada daftar pemegang saham, daftar khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.
8. Merencanakan dan mengendalikan Program Pengenalan Korporasi terhadap Direksi dan Dewan Komisaris baru.
9. Menetapkan kebijakan program pengembangan informasi internal maupun eksternal Perusahaan dan mengendalikan implementasinya.
10. Mengelola informasi kepada pihak internal maupun pihak eksternal agar tercipta respon positif dari public atau pelanggan.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut diatas Corporate Secretary memiliki 2 divisi yang berada di bawahnya yakni :

1. Divisi Kesekretariatan
Divisi Kesekretariatan dipimpin oleh Vice President (VP) Kesekretariatan yang bertanggung jawab kepada Corporate Secretary. Tanggung jawab utama VP Kesekretariatan adalah mengorganisasikan, mengendalikan pengelolaan sekretariatan dan protokoler

Direksi, administrasi dokumen Perusahaan, Museum, Perpustakaan,sertamengendalikan program komunikasi baik pihak internal maupun pihak eksternal Perusahaan agar tercipta respon positif dari publik atau pelanggan.

2. Divisi Legal, Governance, and Compliance

Divisi Kesekretariatan dipimpin oleh Vice President (VP) Legal, Governance, and Compliance yang bertanggung jawab kepada Corporate Secretary. Tanggung jawab utama VP Legal, Governance, and Compliance adalah:

- a. Bertanggung jawab atas perlindungan kepentingan hukum Perusahaan, Direksi, dan Karyawan dalam menjalankan kebijakan/peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengelola implementasi kebijakan GCG, kebijakan kepatuhan agar tercapai pengelolaan penyelenggaraan Perusahaan yang bersih, transparan, accountable dan patuh pada ketentuan pemerintah.
- c. Mengelola indeks kepatuhan.

Pelaksanaan Tugas Sekertaris Perusahaan

Dalam kaitan fungsi dan tugasnya, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti beberapa kegiatan terkait dengan stakeholdersdan keterbukaan informasi yang telah dilakukan di tahun 2024 adalah:

1. RUPS : 3 kali
2. Rapat Direksi :51 kali
3. Rapat Komisaris dan Direksi : 12 kali
4. RAPIM : 3 kali

Selain menjalankan tugas-tugas utama, Sekretaris Perusahaan juga telah memfasilitasi pelaksanaan berbagai kegiatan, baik yang bersifat internal maupun yang melibatkan masyarakat umum. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

- Sepanjang tahun 2024, telah dilaksanakan lebih dari 12 kegiatan upacara dan apel di lingkungan Pos Indonesia. Kegiatan ini mencakup Upacara Peringatan Hari Besar Nasional hingga Apel Rutin yang dipimpin langsung oleh Direksi dan jajaran Senior Leader.

- Pada tanggal 28 Mei 2024, diluncurkan program ramah lingkungan bertajuk “PosIND Goes Green”. Program ini diawali dengan pembentukan Komite ESG yang melibatkan pemangku kepentingan lintas fungsi. Pembentukan komite tersebut didahului oleh penunjukan konsultan yang kompeten di bidang ESG.
- Sebagai bagian dari upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas, kecepatan, dan efektivitas kegiatan, Sekretariat Perusahaan juga telah melakukan sejumlah inisiatif, antara lain:
- Seluruh arsip peraturan perusahaan, seperti Keputusan Direksi (KD), Surat Edaran (SE), Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan Surat Keputusan (SK), telah berhasil dialihmediakan secara 100% selama tahun 2024.
- Seluruh proses surat menyurat, baik internal maupun eksternal, telah menggunakan sistem Nota Dinas Elektronik (NDE) guna memudahkan akses, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip.

INTERNAL AUDIT

PT Pos Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dapat mempertanggungjawabkan segala dan hasil usahanya kepada pemegang saham, seluruh pegawai, pelanggan dan stakeholders lainnya. Manajemen dituntut mengelola perusahaan dengan baik (Good Corporate Governance) dengan menjalankan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajiban atas seluruh aktivitas perusahaan, serta menyajikan laporan keuangan/ kegiatan yang informatif, handal dan dapat dipercaya.

Di lain pihak, Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab untuk memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (governance) telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan, serta mengawasi dan memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern dan arahan tentang manajemen risiko perusahaan. Akuntabilitas dan responsibilitas manajemen kepada stakeholder tentu harus dinilai dan dievaluasi, baik dari aspek ketaatan pada peraturan, efisiensi dan efektivitas. Untuk mencapai tujuan dimaksud, Internal Audit PT Pos Indonesia (Persero) selaku unit fungsional yang bertanggung jawab kepada

Direktur Utama dituntut berperan optimal membantu Direktur Utama menjalankan fungsi pengawasan.

The Institute of Internal Auditors (IIA) mendefinisikan audit internal sebagai kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultasi (consulting activities), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola. Internal Audit harus mampu memberikan masukan dan rekomendasi terhadap kelemahan sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan operasional dan keuangan, baik menyangkut ketaatan peraturan, penilaian efisiensi dan efektifitas kegiatan dari seluruh lini organisasi di lingkungan perusahaan. Dalam mengemban tugas dan fungsi tersebut, Internal Audit dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi dan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, objektif, independen dan menjunjung tinggi kode etik serta standar audit.

Internal Audit Charter

Agar Internal audit berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pembentukannya, maka Internal Audit Charter (Piagam Audit Internal) yang dimiliki Pos Indonesia selalu diperbarui. Internal Audit Charter (Piagam Audit Internal) merupakan dokumen formal yang mendefinisikan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab aktivitas audit internal, sesuai dengan misi audit internal dan unsur-unsur wajib yang ditetapkan Internasional Professional Practices Framework (persyaratan dasar praktik profesional internal audit, Kode Etik, Standar dan definisi Audit Internal).

Piagam Audit Internal dituangkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: 244/DEKOM/0922 dan Nomor:KD077/DIRUT/0922 Tentang Piagam Audit Internal di dalamnya ditetapkan antara lain posisi aktivitas audit internal di dalam perusahaan, termasuk alur pelaporannya; kewenangan akses terhadap catatan, personel, dan fisik aset yang relevan dengan penugasannya. Selain itu, di dalamnya juga didefinisikan mengenai lingkup aktivitas audit internal sebagai bentuk kesepakatan terhadap peran aktivitas audit internal yang sesuai dengan standard profesi audit internal yang berlaku. Agar Internal

Audit berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembentukannya, maka diperlukan Internal Audit Charter dengan maksud dan tujuan:

1. Internal Audit Charter (Piagam Internal Audit) dimaksudkan agar terdapat pemahaman bersama terhadap tujuan, wewenang, dan tanggung jawab Internal Audit, oleh Direksi, Komisaris, dan seluruh jajaran manajemen Perusahaan.
2. Internal Audit Charter (Piagam Internal Audit) yang tertulis bermakna sebagai suatu pernyataan pengakuan untuk direviu dan diaksep oleh Manajemen dan Dewan Komisaris serta untuk disetujui bersama.
3. Internal Audit Charter (Piagam Internal Audit) merupakan suatu perjanjian formal Internal Audit dengan Manajemen dan Dewan Komisaris tentang kegiatan audit internal Perusahaan. Sebagai dokumen formal dan tertulis, Internal Audit Charter (Piagam Internal Audit) menjadi sarana untuk melakukan penilaian secara periodik mengenai kecukupan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab aktivitas audit internal, dan sekaligus menjadi alat untuk melakukan revisi secara prudent jika diperlukan penyesuaian.

Tujuan penyusunan Internal Audit Charter (Piagam Internal Audit) adalah sebagai pedoman bagi para Auditor Internal agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi dan Tugas Internal Audit adalah :

Fungsi Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah:

1. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Pengendalian Intern, Manajemen Risiko, dan Proses Tata Kelola Perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan;
2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.

Dalam menjalankan fungsinya, Internal Audit melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Audit Tahunan (PKAT).

2. Menyampaikan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) kepada Komite Audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran dan selanjutnya menyampaikan kepada Direktur Utama untuk mendapat persetujuan.
3. Melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala (triwulan) kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit.
4. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
5. Memberikan rekomendasi dan informasi yang objektif tentang kegiatan Auditee pada semua tingkat manajemen untuk peningkatan kinerja perusahaan.
6. Memberikan konsultasi kepada pihak internal perusahaan untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian internal, pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan.
7. Melakukan audit pendalaman (khusus) apabila diperlukan dan atau atas permintaan Manajemen dalam bentuk audit penugasan tertentu dan atau audit investigatif.
8. Menyusun dan melaporkan hasil audit kepada Direktur Utama dan atau pimpinan unit kerja terkait (auditee), dengan tembusan kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit. Dalam hal audit investigatif, laporan hasil audit dapat disampaikan kepada Direktur terkait atas ijin Direktur Utama.
9. Melaporkan segera atas setiap temuan audit (Management Letter) yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha perusahaan.
10. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut audit internal dan eksternal serta melaporkan setiap triwulan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris c.q. Komite Audit.
11. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai standar dan kode etik.
12. Melaksanakan pendidikan profesional berkelanjutan dan sesuai dengan kompetensi Auditor.
13. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap kehandalan, efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal perusahaan di unit kerja termasuk pelaksanaan tugas khusus dari Direktur Utama (sistem operasional pengawasan).

14. Memberikan kontribusi terhadap perbaikan/peningkatan proses tata kelola (*governance*, manajemen risiko, dan pengendalian internal).
15. Memberikan masukan tentang upaya pencapaian strategi bisnis perusahaan.
16. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Internal Audit bekerja sama dengan Komite Audit.
6. Memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, scope, cara, teknik, dan pendekatan audit yang akan dilakukan.
7. Melakukan audit investigatif atas inisiatif sendiri (untuk pendalaman kasus tertentu) atau berdasarkan permintaan manajemen ataupun pihak lain yang berwenang dengan cara melakukan pemeriksaan yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk BAPK (Berita Acara Permintaan Keterangan) terhadap auditee.

Kewenangan dan Tanggung Jawab Internal Audit

1. Mengakses penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap sumber daya data yang meliputi dokumen, pencatatan, personel dan fisik harta kekayaan perusahaan termasuk sumber daya data transaksi berbasis teknologi informasi di seluruh unit kerja Perusahaan dan anak perusahaan.
2. Menyusun dan mengusulkan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT).
3. Menggunakan jasa pihak eksternal untuk membantu melakukan pelaksanaan audit sekaligus bertujuan transfer of knowledge.
4. Melakukan komunikasi dan koordinasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
5. Melakukan komunikasi dengan pihak eksternal (*Regulator, Auditor Eksternal*) dan keikutsertaan dalam kegiatan Asosiasi dan Forum Komunikasi Internal Audit.
8. Meminta klarifikasi terhadap rekomendasi hasil audit yang tidak ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati dan selanjutnya pejabat yang bertalian wajib memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
9. Melaporkan kepada Direktur Utama terkait pejabat yang tidak melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit, sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
10. Memberikan penilaian dan rekomendasi hasil audit dan memonitor tindak lanjutnya untuk memastikan bahwa rekomendasi tersebut telah dilaksanakan dengan tepat.
11. Memberikan penilaian, konsultasi, informasi dan rekomendasi mengenai proses bisnis perusahaan sesuai dengan Kode Etik dan Standar Audit.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Internal Audit

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KD07/DIRUT/0923 Tanggal 11 September 2023 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.013/DIRUT/0323 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pos Indonesia (Persero), Internal Audit merupakan aparat

pengawas intern Perusahaan yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Internal Audit dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Kepala Internal Audit

Agus Trisyuwanto, Ak, CA, CGAP, CCSA

Lahir : 27 Agustus 1964

Usia : 60 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Domisili : Bandung

Dasar Penunjukan

Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.538/DIRUT/0323 tanggal 15 Maret 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Profesional Perusahaan (TKPP) Di Lingkungan PT Pos Indonesia (Persero)

Periode Jabatan

15 Maret 2023 – Sekarang

Riwayat Pendidikan

- DIII Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) lulus tahun 1986
- DIV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) lulus tahun 1993

Pengalaman Kerja

- Auditor Anggota Tim pada Deputy Bidang Pengawasan Khusus BPKP (1986–1990),
- Auditor Ketua Tim pada BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (1994–1999)
- Kepala Seksi Pengawasan Jasa Perhubungan Darat pada Deputy Pengawasan BUMN/D BPKP (1999–2002)
- Kepala Sub Bagian Keuangan pada BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II (2002–2004)
- Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat Teknis Substantif pada Pusdiklatwas BPKP (2004–2007)

- Kepala Bagian Tata Usaha pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara (2007–2009)
- Kepala Bidang Program dan Sertifikasi pada Pusat Pembinaan Auditor BPKP (2009–2012)
- Kepala Sub Direktorat Pengawasan IP Bidang Polsoskam Lainnya II (2012– 2015)
- Direktur Keuangan PPK GBK (Jan 2016–Mei 2022)
- Auditor Madya BPKP (Juni 2022–sekarang)

Auditor Internal

Anggota Internal Audit wajib memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
3. memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pos, Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
5. mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal.
6. mematuhi kode etik Audit Internal.
7. menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan.
8. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.
9. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terusmenerus.

Persyaratan Profesionalisme Internal Audit

1. Standar Independensi

Unit dan Auditor Internal harus independent terhadap aktivitas yang diauditnya.

a. Unit internal audit Internal audit dapat dikatakan independen apabila pelaksanaan tugas audit dilakukan secara bebas dan objektif. internal audit harus independen secara organisasi dan pribadi serta independen dalam bersikap dan penampilan, dengan demikian auditor dapat memberikan pendapat penting yang tidak memihak dan berprasangka buruk dalam pelaksanaan tugas dan pelaporan auditnya.

b. Status organisasi

Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Semua jajaran dalam Perusahaan berkewajiban mendukung dan bekerja sama dengan Internal Audit untuk memungkinkan tercapainya tanggung jawab auditor yang memadai.

c. Objektivitas

Adalah sikap mental independen yang harus dimiliki dan dipelihara oleh Internal Audit dalam melakukan audit. Auditor Internal tidak boleh mengesampingkan pertimbangan objektivitas dalam melaksanakan tugas audit karena adanya pertimbangan lain. Objektivitas menghendaki auditor Internal harus jujur terhadap diri sendiri, yakin atas kehandalan hasil kerjanya, dapat dipercaya dan bebas dari pengaruh pihak luar. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas audit, Auditor Internal harus mengambil keputusan secara profesional, bebas dan objektif. Untuk menjaga objektivitas auditor Internal harus menghindari audit di unit kerja sebelumnya dalam lingkup kerja yang menjadi tanggung jawabnya minimal dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun.

d. Menjaga Integritas yaitu tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal-hal lain yang patut diduga dapat disalahgunakan baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lainnya yang tidak berhak.

2. Standar Kemampuan dan Keahlian Audit Internal harus dilakukan dengan kecakapan profesional yang memadai dan kecermatan yang seksama.
 - a. Kecakapan profesional merupakan tanggung jawab unit Internal Audit dan individu Auditor Internal. Ka Internal Audit hanya menugaskan kegiatan audit kepada staf yang secara kolektif telah memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas audit tersebut.
 - b. Tanggung jawab unit Internal Audit mengenai kecakapan profesional meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - i. Pemenuhan kebutuhan tenaga auditor Internal Audit untuk memiliki individu yang mempunyai pengetahuan, kecakapan dan disiplin ilmu yang diperlukan dalam melaksanakan tugas auditnya.
 - ii. Penugasan tenaga auditor internal harus memenuhi syarat kemampuan teknis tertentu secara kolektif berdasarkan jenis, luas, serta kompleksitas objek audit.
 - iii. Keharusan untuk memelihara kemampuan teknis audit melalui jenjang pendidikan dan pelatihan berkelanjutan berupa training, seminar dan sebagainya, sehingga tetap mengikuti dan paham tentang perkembangan terakhir standar, prosedur dan teknik audit serta dunia usaha perusahaan.
 - iv. Supervisi atas pelaksanaan audit internal secara berkelanjutan mulai dari perencanaan, audit program, pelaksanaan audit, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut. Supervisi harus dilakukan secara seksama, terdokumentasikan.

- c. Tanggung jawab Auditor Internal mengenai kecakapan dan kecermatan profesional meliputi :
- Kepatuhan terhadap standar audit dan kode etik audit internal.
 - Penguasaan atas pengetahuan, kecakapan dan disiplin ilmu tertentu yang berkaitan dengan tugas audit, termasuk kemampuan menerapkan standar, prosedur dan teknik audit serta praktek-praktek bisnis yang sehat.
 - Kemampuan berkomunikasi baik lisan dan tulisan secara efektif dan baik dengan pihak auditee maupun dengan manajemen perusahaan.
 - Keharusan menjaga tingkat kecermatan dan kewaspadaan terhadap kemungkinan penyimpangan, ketidakcermatan, ketidakefektifan, kelemahan pengendalian internal dengan melakukan pengujian dan verifikasi yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan.
- v. Keharusan menggunakan kemahiran dan kecermatan profesional dengan memperhatikan:
- Cakupan kerja audit yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit yang ditetapkan.
 - Tingkat materialitas atau signifikansi masalah.
 - Tingkat keandalan dan efektifitas pengendalian internal.
 - Biaya audit diperbandingkan dengan manfaat yang diperoleh.
 - Standar operasi yang ada apakah dapat diterima dan dipatuhi.
 - Prinsip empat mata yaitu melaksanakan audit terhadap objek yang berisiko tinggi harus dilakukan minimal 2 (dua) orang auditor.

3. Persyaratan Pengetahuan Auditor Internal harus dilakukan secara profesional sehingga diperlukan standar pengetahuan dan kompetensi teknis yang harus dimiliki auditor supaya pelaksanaan audit dapat dilakukan secara memadai dan seksama. Pimpinan Internal Audit dan Auditor internal harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang :
- a. Pengelolaan keuangan/akuntansi perusahaan dan aspek-aspek hukum dalam proses pelaksanaan audit.
 - b. Proses bisnis internal, peraturan, mekanisme dan prosedur yang ada di objek audit yang diperlukan untuk melakukan audit.
 - c. Data yang diperlukan, cara memperoleh data, baik menggunakan akses teknologi informasi maupun secara manual, dan mampu melakukan pengolahan data yang memadai agar dapat memperoleh bukti audit untuk membuat kesimpulan.
 - d. Pengoperasian komputer sebagai salah satu teknologi informasi dan pengolah data.
 - e. Teknik-teknik pengendalian dan audit berbasis risiko guna menunjang pelaksanaan kegiatan audit yang diwujudkan dengan penyusunan program audit berbasis pada penafsiran risiko dan eksposur yang berdampak pada perusahaan.
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan berkontribusi pada proses manajemen risiko, pengendalian atas pengelolaan (governance) dengan menggunakan pendekatan sistematis dan terstruktur.
 - g. Cara mengkomunikasikan temuan kepada pimpinan auditee dalam bentuk presentasi yang fokus serta runtut dan dalam menyusun laporan hasil audit harus sesuai dengan standar laporan audit yang ditetapkan.
 - h. Pimpinan Internal Audit dan Auditor internal harus memiliki sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) atau yang setara.

Jumlah Pegawai (Auditor Internal) Pada Internal Audit

Jumlah SDM Internal Audit sampai dengan posisi Triwulan IV tahun 2024 berjumlah sebanyak 90 orang. Bila dibandingkan dengan formasi yang ditetapkan oleh Kepala Internal Audit, formasi secara total 93 orang

A. INTERNAL AUDIT PUSAT	FORMASI *)						EKSISTING						DEVIASI (GAP)					
	Kepala	Deputi	Manajer	Auditor	Staf	Jumlah	Kepala	Deputi	Manajer	Auditor	FP	Jumlah	Kepala	Deputi	Manajer	Auditor	FP/Staf	Jumlah
Kepala Internal Audit	1			12	1	14	1	0	0	10	1	12	0	0	0	-2	0	-2
Deputi Pengawasan Keuangan dan Operasional		1				1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Deputi Investigasi dan Tindaklanjuti		1				1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Deputi Bidang Pengembangan Auditor dan Audit pada Anak Perusahaan		1				1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Deputi Audit dan Mitigasi		1				1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Manajer Quality Assurance dan Audit Development			1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Manajer Investigasi			1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Manajer Tindak Lanjut dan Reporting			1			1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Sub Total	1	4	3	12	1	21	1	4	3	10	1	19	0	0	0	-2	0	-2
B. REPRESENTATIVE OFFICE	Kepala	Wakil	Manajer	Auditor	Staf	Jumlah	Kepala	Wakil	Manajer	Auditor	Staf	Jumlah	Kepala	Wakil	Manajer	Auditor	Staf	Jumlah
Representative Office-1	1	2	0	8	1	12	1	2	0	7	1	11	0	0	0	-1	0	-1
Representative Office-2	1	2	0	8	1	12	1	2	0	7	0	10	0	0	0	-1	-1	-2
Representative Office-3	1	2	0	8	0	11	1	2	0	7	0	10	0	0	0	-1	0	-1
Representative Office-4	1	2	0	8	0	11	1	2	0	8	0	11	0	0	0	0	0	0
Representative Office-5	1	2	0	8	2	13	1	2	0	9	2	14	0	0	0	1	0	1
Representative Office-6	1	2	0	12	0	16	1	3	0	14	0	18	0	0	0	2	0	2
Sub Total	6	13	0	52	4	75	6	13	0	52	3	74	0	0	0	0	-1	-1
Total	7	17	3	64	5	96	7	17	3	62	4	93	0	0	0	-2	-1	-3

Sertifikasi Auditor Internal

Sertifikasi yang dimiliki oleh personil SDM Internal Audit PT Pos Indonesia (Persero) Antara lain :

1. Profesional Internal Audit (PIA);
2. Qualified Internal Audit (QIA);
3. Dasar – dasar pemeriksaan;
4. Penyusunan PKAT Berbasis Risiko;
5. Penulisan Hasil Audit yang efektif;
6. Komunikasi dan Psikologi pemeriksaan;
7. Audit forensik;
8. Audit investigasi;
9. Brevet Pajak.

Struktur dan Kedudukan Internal Audit

Berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: 244/DEKOM/0922 dan Nomor:KD077/DIRUT/0922 Tentang Piagam Audit Internal. Struktur dan kedudukan Internal Audit adalah:

1. Posisi Internal Audit dalam struktur organisasi berada langsung di bawah Direktur Utama.
2. Internal Audit dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
3. Kepala Internal Audit dibantu oleh beberapa orang Deputi Internal Audit yang bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Internal Audit.
4. Internal Auditor Pusat bertanggungjawabsecaralangsung kepada Deputi yang ditunjuk dan Internal Auditor Representative Officebertanggungjawab kepada Kepala Representative Office.
5. Internal Audit dilarang melakukan perangkapan tugas dan jabatan dari pelaksanaan internal audit dengan pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan maupun anak Perusahaan dan afiliasinya. Kedudukan Internal dalam struktur perusahaan

berdasarkan Keputusan Direksi Keputusan Direksi Nomor KD07/DIRUT/0923 Tanggal 11 September 2023 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.013/DIRUT/0323 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pos Indonesia (Persero) .

Pelaksanaan Tugas Internal Audit

Program Kerja Internal Audit tahun 2024 meliputi antara lain :

1. Audit Rutin Dengan Framework Risk Based Internal Audit (RBIA) Berdasarkan PKAT di tahun 2024, target Audit KCU/KC tahun 2024 berjumlah 124 objek audit (75 KCU/ KC, 6 Kantor Regional, 31 Divisi Pusat, 12 Audit non PKAT). Realisasi PKAT audit KCU/KC/Divisi sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 berdasarkan Surat Tugas sebanyak 138 objek audit atau 111% dari rencana tahun 2024 sebanyak 124 objek audit dan 85% dari rencana Triwulan IV tahun 2024 sebanyak 44 objek audit.
2. Melaksanakan Audit Penugasan Tertentu
 - Audit tujuan tertentu piutang KCU Jayapura
 - Audit tujuan tertentu Pos Logistik
 - Reviu Seat Management KCP LPU
 - Reviu Penilaian Peringkat Komposit Risiko Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024

- Pendampingan Penyusunan Internal Control Testing Risiko Utama RKAP 2024
 - Reviu Internal Representatives Office 5 Surabaya
 - Audit evaluasi penerapan manajemen resiko
 - Audit CBP tahun 2024
3. Melaksanakan Audit Investigatif
- Pra Audit Investigasi Laporan pengaduan melalui WBS
 - penyimpangan penyaluran beras PNS distrik pedalaman provinsi Papua dan Papua Barat tahun 2023
 - Investigasi penyaluran dana BPNT tahun 2022 dan PKH tahap 4 tahun 2023 Kabupaten Nduga KCU Jayapura
 - Audit Investigasi KCP Batutungku dan KCP Pleihari
 - Investigasi Pos Logistik
 - Investigasi KC Depok
 - Investigasi pengalihan merchant QRIS pada VA Pos Internasional
 - Investigasi dugaan penyalahgunaan wewenang pada divisi GRC
 - Investigasi KCU Kendari
 - Investigasi KCU Pekanbaru
 - Investigasi KCU Bengkulu
4. Monitoring dan Evaluasi
- Monitoring terhadap tindak lanjut hasil audit internal berbasis risiko (RBIA) di Kantor Regional dilakukan oleh Internal Audit Pusat, sedangkan tindak lanjut hasil audit internal berbasis Risiko (RBIA) di KCU/KC dilakukan oleh Representative Office (RO). Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan menggunakan google drivesecara periodik mingguan.
5. Capacity building untuk pengembangan knowledge dan cakrawala auditor dalam rangka meningkatkan kualitas dan performa
- Sertifikasi Auditor: QIA Manajerial
 - Sertifikasi Auditor: QIA Tingkat Lanjutan
 - Sertifikasi Professional Recognition Program (PRP) For Qualified Internal Auditor (QIA)
 - Pelatihan QIA Tingkat Dasar
 - Forum Komunikasi Satuan Pengawas Internal
 - Workshop Investigation & Fraud Detection For Internal Auditors

AKUNTAN PERSEROAN

Usulan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan TJSL PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2024, serta memperhatikan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 PT Pos Indonesia (Persero) tanggal 18 Juli 2024, dengan ini kami selaku RUPS PT Pos Indonesia (Persero) melalui Surat Nomor : S-614/MBU/11/2024 , Menetapkan KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (Nexia International Limited) sebagai auditor eksternal untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) PT Pos Indonesia (Persero) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Berikut daftar Akuntan Publik dan KAP yang melakukan audit atas laporan keuangan perseroan selama 5 Tahun terakhir:

1. 2020 : Drs. Sikanto, Ak, CA, CPA., MM.
2. 2021 : Drs. Sikanto, Ak, CA, CPA., MM.
3. 2022 : Drs. Sikanto, Ak, CA, CPA., MM.
4. 2023 : Leknor Joni, CPA
5. 2024 : Desman P. I. Tobing, CPA

Nama dan tahun KAP yang melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan 5 tahun terakhir

1. 2020 : KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan
2. 2021 : KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan
3. 2022 : KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan
4. 2023 : KAP Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo
5. 2024 : KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono

Selama pelaksanaan audit tidak memperoleh hambatan dalam mengakses dokumen yang dibutuhkan. Hasil audit telah disampaikan dalam laporan audit dan permasalahan yang ada telah disampaikan melalui management letter kepada Direksi. Jasa yg diberikan adalah General Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pos Indonesia (Persero) dan TJSL Tahun 2023 termasuk Audit atas Bantuan Operasional LPU sesuai Prosedur Yang Disepakati. Fee untuk jasa yang diberikan akuntan publik adalah Rp 1.332.000.000,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Akuntan publik juga memberikan jasa:

1. A1. Audit Laporan Keuangan Tahunan;
2. Evaluasi Kinerja Perusahaan;
3. Evaluasi Key Performance Indicators;
4. Audit Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan;
5. Audit Kepatuhan Perusahaan Terhadap Sistem Pengendalian Internal;
6. Audit Laporan Keuangan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
7. Audit Kepatuhan Pelaksanaan TJSL Terhadap Peraturan Perundang-undangan;
8. Audit Kepatuhan Pelaksanaan TJSL Perusahaan Terhadap Sistem Pengendalian Internal;
9. Audit atas penerapan Prosedur yang Disepakati - mengenai Aktivitas Layanan Pos Universal;
10. Audit atas penerapan Prosedur yang Disepakati - pengisian SOE Anaplan BUMN

MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Risiko merupakan bagian dari Tata Kelola Perusahaan, oleh karena itu Pemerintah selaku pemegang saham telah menunjukkan komitmennya terhadap pentingnya manajemen risiko. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan MenteriBUMN Nomor:PER-1/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang perubahan atas Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-5/MBU/09/2022 tanggal 01 September 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara PT Pos Indonesia (Persero) telah memiliki Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko yang terbaru dan telah disesuaikan yaitu dalam bentuk Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD 193/DIRUT/1223 tanggal 29 Desember

2023 tentang Kebijakan dan Pedoman Umum Penerapan Manajemen Risiko. Tujuan penyusunan Pedoman Manajemen Risiko tersebut adalah untuk mengatur pelaksanaan implementasi Manajemen Risiko di lingkungan perusahaan dan memastikan agar pengelolaan risiko bisnis perusahaan dapat berlangsung secara terstruktur dan sistematis.

Sistem Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko Perusahaan, PT Pos Indonesia (persero) didukung dengan teknologi informasi sebagai bagian dari proses asesmen dan mitigasi risiko, sebelumnya telah diatur tentang Daftar Risiko kantor Regional dan Unit Pelaksana Teknis dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.140/DIRUT/1218 tanggal 26 Desember 2018, dan selanjutnya proses asesmen dan mitigasi risiko yang dilakukan di seluruh level Perusahaan baik di Kantor Pusat, Kantor Regional dan Unit Pelaksana Teknis telah terstandarisasi dalam website dengan alamat:<https://simaris.posindonesia.co.id>.

Dalam pemanfaatan website Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARIS) dan agar terdapat panduan atau petunjuk pengisian

dan pelaksanaan kegiatan Asesmen Risiko Mandiri oleh Risk Owner dengan Daftar Risiko (Risk Register) sebagai output atas pelaksanaannya, maka telah ditetapkan Pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yaitu : Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (persero) Nomor: KD.080/DIRUT/0922 tentang Sistem Informasi Manajemen Risiko PT POS Indonesia (PERSERO).

Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko

Manajemen risiko bertujuan untuk menciptakan nilai tambah dan melindungi Perusahaan. Dengan menerapkan manajemen risiko, Perusahaan dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi agar tujuan Perusahaan dapat tercapai. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang digunakan adalah :

1. Terintegrasi (integrated);
2. Terstruktur dan komprehensif (structured and comprehensive);
3. Disesuaikan (customized);
4. Inklusif (inklusive);
5. Bersifat dinamis (dynamic);
6. Informasi terbaik yang tersedia (best available information);
7. Mempertimbangkan faktor manusia dan budaya (human and cultural factor);
8. Perbaikan secara berkelanjutan (continual improvement).

Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Kerangka kerja Manajemen Risiko disusun untuk membantu Perusahaan dalam mengintegrasikan Manajemen Risiko ke sistem manajemen yang berlaku di lingkungan Perusahaan sehingga penerapan Manajemen Risiko dapat berjalan secara efektif dan efisien dan selaras dengan seluruh strategi Perusahaan. Efektivitas penerapan Manajemen Risiko bergantung pada integrasi Manajemen Risiko dengan tata kelola Perusahaan termasuk pada saat pengambilan keputusan Perusahaan. Berikut adalah kerangka kerja Manajemen Risiko yang disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan karakteristik Perusahaan, yaitu:

1. Kepemimpinan dan Komitmen (Leadership and Commitment)
Dalam mengimplementasikan Manajemen Risiko, Direksi sebagai penanggung jawab atas pengelolaan risiko di level perusahaan perlu memberikan arahan kepada seluruh elemen organisasi perusahaan sebagai bentuk nyata adanya komitmen Direksi. Komitmen tersebut dibutuhkan untuk memastikan Manajemen Risiko berjalan dengan efektif dan menciptakan nilai tambah bagi Perusahaan. Direksi dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Mempertimbangkan seluruh aspek perusahaan ke dalam kerangka kerja;
 - b. Mengesahkan kebijakan yang menjabarkan komitmen, rencana dan aksi perusahaan terkait Manajemen Risiko;
 - c. Memastikan tersedianya sumber daya untuk mengelola risiko;
 - d. Memberikan kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas di seluruh level perusahaan sesuai dengan perannya masing-masing.
2. Integrasi (Integration)
Manajemen Risiko diintegrasikan dengan proses bisnis Perusahaan dengan memperhatikan struktur, karakteristik dan konteks Perusahaan. Seluruh Risiko dikelola di setiap level struktur Perusahaan dan seluruh karyawan bertanggung jawab untuk mengelola risiko sampai level yang diterima oleh Perusahaan.
 3. Perancangan Kerangka Kerja
Dalam merancang kerangka kerja Manajemen Risiko, Perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Konteks internal dan eksternal perusahaan;
 - b. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko;

- c. Penetapan peran, wewenang, tanggung jawab dan akuntabilitas seluruh pihak di perusahaan dalam mengelola Manajemen Risiko;
 - d. Alokasi sumber daya;
 - e. Melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Stakeholder.
4. Implementasi (Implementation)
- Untuk mengimplementasikan kerangka kerja Manajemen Risiko di Perusahaan, Perusahaan perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Menerapkan kebijakan dan proses Manajemen Risiko yang relevan dan terintegrasi dengan proses bisnis Perusahaan.
 - b. Membuat rencana kerja Manajemen Risiko yang memuat kegiatan yang akan dilakukan, waktu pelaksanaan, alokasi sumber daya beserta strategi pelaksanaan yang tepat.
 - c. Menetapkan mekanisme pengambilan keputusan dan pihak yang berwenang untuk mengambil keputusan.
 - d. Seluruh kegiatan dan hasil kegiatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Mengomunikasikan dan melakukan konsultasi dengan Stakeholder untuk memastikan bahwa kerangka kerja Manajemen Risiko masih relevan dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai Perusahaan.
5. Evaluasi dan Pengawasan
- Perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap kerangka kerja Manajemen Risiko secara periodik. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa kerangka kerja Manajemen Risiko telah berjalan efektif dan secara berkesinambungan mendukung pencapaian sasaran Perusahaan. Dalam mengevaluasi efektivitas kerangka kerja Manajemen Risiko, Perusahaan perlu melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. Menyusun indikator pengukuran implementasi Manajemen Risiko Perusahaan. Indikator pengukuran harus selaras dengan tujuan Perusahaan menerapkan Manajemen Risiko;
 - b. Melakukan evaluasi dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan secara berkala;
 - c. Mengukur perkembangan dan penyimpangan antara rencana kerja Manajemen Risiko yang telah ditentukan sebelumnya dengan realisasi;
 - d. Melakukan evaluasi secara berkala apakah kerangka kerja, kebijakan dan rencana Manajemen Risiko masih relevan dengan konteks internal dan eksternal Perusahaan terkini;

- e. Mendokumentasikan dan melaporkan pelaksanaan rencana dan kebijakan Manajemen Risiko di lingkungan Perusahaan; dan
 - f. Mengevaluasi efektivitas dari kerangka kerja Manajemen Risiko.
6. Perbaikan (Improvement)
- Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, Perusahaan perlu melakukan penyesuaian kerangka kerja Manajemen Risiko agar kerangka Manajemen Risiko tetap relevan seiring dengan adanya perubahan eksternal dan internal perusahaan. Perbaikan kerangka kerja Manajemen Risiko harus dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas kerangka Manajemen Risiko agar Manajemen Risiko tetap terintegrasi dengan proses bisnis Perusahaan. Perusahaan perlu menindaklanjuti hasil evaluasi kerangka kerja Manajemen Risiko dengan menyusun strategi perbaikan dan/atau penyesuaian, termasuk di dalamnya kebijakan, tata kerja dan perencanaan yang akan dilakukan.

Proses Manajemen Risiko

Secara umum proses pemantauan dan evaluasi manajemen risiko terdiri dari:

- A. Pemantauan dan Evaluasi Risiko atas Pelaksanaan perlakuan Risiko
 - 1. Pemantauan dan evaluasi Risiko dilakukan terhadap Risiko Utama hasil Integrasi Risiko antara Induk dan Anak Perusahaan.
 - 2. Pemantauan dan evaluasi Risiko dilakukan untuk mengevaluasi kualitas pelaksanaan Manajemen Risikosesuaidengan perencanaan Manajemen Risiko yang telah disusun dalam dokumen perencanaan strategis dibandingkan dengan pencapaian kinerja atas target dari sasaran dan strategi yang telah ditetapkan.
 - 3. Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Manajemen Risiko, Usaha dan Investasi (KPMRUI) melakukan evaluasi Risiko Terintegrasi paling sedikit setiap bulan.
 - 4. Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris meliputi realisasi atas pencapaian kinerja, Risiko utama yang masih mempengaruhi sasaran dan strategi perusahaan ke depan hingga akhir tahun dan realisasi pelaksanaan Audit Intern.

B. Pelaporan

Penyampaian laporan Manajemen Risiko pada terdiri dari 2 jenis laporan:

1. Laporan Eksternal kepada Kementerian BUMN
Penyampaian laporan Manajemen Risiko kepada Kementerian BUMN terdiri dari:
 - a. Laporan penerapan Manajemen Risiko.
 - b. Laporan Audit Intern.
 - c. Laporan pencapaian kinerja.Struktur dan muatan informasi masing-masing laporan terdapat dalam Pedoman Pelaporan Manajemen Risiko.
2. Laporan Internal
Penyampaian laporan Manajemen Risiko internal baik yang bersifat rutin maupun insidental mengacu pada kebutuhan dan informasi dari Unit Kerja/Fungsi/Bagian Manajemen Risiko.

C. Evaluasi Kinerja

1. Untuk keperluan penyampaian pelaporan kepada kementerian BUMN, Perusahaan melakukan pemantauan dan evaluasi atas integrasi risiko antara induk dan anak Perusahaan.
2. Pelaksanaan perlakuan risiko utama yang merupakan risiko integrasi perusahaan menjadi tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

3. Proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN tidak memindahkan atau melepaskan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas seluruh Risiko yang dihadapi oleh Perusahaan (baik induk dan anak perusahaan) dan akibat yang ditimbulkan dari Risiko tersebut.
4. Proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris tidak memindahkan atau melepaskan tanggung jawab Pemilik Risiko atas seluruh Risiko di wilayah kerjanya masing-masing.
5. Evaluasi terhadap pelaporan Manajemen Risiko Perusahaan dilakukan secara menyeluruh sebagai bagian dari evaluasi kinerja Perusahaan.
6. Pencapaian kinerja perusahaan merupakan realisasi target dari sasaran dan strategi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis yang penyusunannya telah berbasis risiko.
7. Evaluasi akan dilakukan terhadap kualitas pelaksanaan Manajemen Risiko dan pencapaian kinerja yang menghasilkan peringkat Risiko Perusahaan sebagai indikator penilaian kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

8. Hasil evaluasi kinerja yang berkaitan dengan Manajemen Risiko akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi dan peyiapan kebijakan mitigasi Risiko yang diperlukan di tingkat Perusahaan khususnya serta ditingkat Portofolio BUMN.
9. Proses evaluasi selanjutnya akan dijelaskan tersendiri dalam petunjuk teknis Pelaporan Manajemen Risiko.

Bentuk-bentuk laporan sebagaimana tercantum di atas dapat berbentuk fisik, digital ataupun tersimpan dalam perangkat/sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki Perusahaan.

Organisasi dalam Penerapan Manajemen Risiko PT Pos Indonesia (Persero)

Dalam rangka membangun kapabilitas manajemen risiko di seluruh jajaran dan proses bisnis organisasi yang sering dikenal sebagai Enterprise Risk Management (ERM), maka Perusahaan menerapkan konsep Model Tiga Lini (Three Lines Model). Model Tiga Lini adalah konsep yang bertujuan untuk membantu Perusahaan dalam mengidentifikasi rancangan dan prosedur yang terkemuka dengan menyediakan tata kelola dan manajemen risiko yang kuat guna mendukung Perusahaan

dalam mencapai tujuan. Model Tiga Lini juga bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan dan tujuan organisasi selaras dengan kepentingan pemangku kepentingan baik dari internal maupun eksternal organisasi.

1. Prinsip-prinsip pada Model Tiga Lini

a. Prinsip 1: Tata Kelola

Tata kelola organisasi membutuhkan struktur dan proses-proses yang memadai dan yang memungkinkan:

- i. Akuntabilitas oleh organ pengurus kepada pemangku kepentingan dalam melakukan pengawasan organisasi dengan integritas, kepemimpinan dan keterbukaan.
- ii. Tindakan-tindakan (termasuk mengelola risiko) oleh manajemen untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengambilan keputusan berbasis risiko dan penerapan sumberdaya.
- iii. Keyakinan dan wawasan oleh fungsi Internal Audit yang independen untuk memberikan kejelasan dan keyakinan serta mempromosikan dan memfasilitasi pengembangan berkelanjutan melalui tanya-jawab yang mendalam dan komunikasi yang berwawasan.

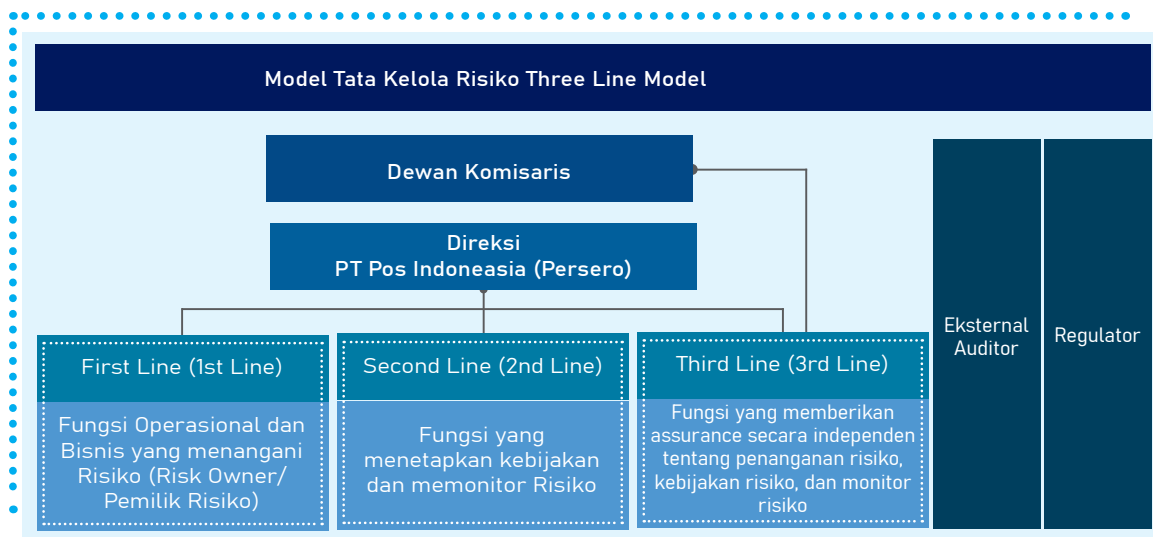
- b. Prinsip 2: Peran Organ Pengurus
- i. Organ pengurus memastikan:
 - Struktur dan proses-proses yang memadai telah tersedia untuk pelaksanaan tata kelola yang efektif.
 - Tujuan dan aktivitas organisasi telah selaras dengan kepentingan utama para pemangku kepentingan.
 - ii. Organ Pengurus:
 - Mendelegasikan tanggung jawab dan menyediakan sumberdaya kepada manajemen untuk mencapai tujuan organisasi serta memastikan terpenuhinya kepatuhan terhadap hukum, ketentuan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.
 - Membentuk dan mengawasi fungsi Internal Audit yang independen, objektif, dan kompeten, guna memberikan kejelasan dan keyakinan atas progres terhadap pencapaian tujuan organisasi.
- c. Prinsip 3: Peran Manajemen dan Lini Pertama dan Kedua
- Tanggung jawab manajemen untuk mencapai tujuan organisasi mencakup peran lini pertama dan kedua. Peran lini pertama secara langsung selaras dengan penyediaan produk dan jasa kepada pelanggan, termasuk fungsi-fungsi pendukung (support) dalam Perusahaan. Peran lini kedua memberikan bantuan dan dukungan terkait dengan penyediaan infrastruktur pengelolaan risiko.
- d. Prinsip 4: Peran Uni Ketiga
- Internal Audit memberikan keyakinan atau jaminan dan advis yang bersifat independen dan objektif mengenai kecukupan dan efektivitas tata kelola dan manajemen risiko. Hal ini dapat tercapai melalui penerapan yang kompeten dari proses-proses, keahlian, dan wawasan yang sistematis dan terstruktur. Internal Audit melaporkan temuannya kepada manajemen dan organ pengurus untuk mendorong dan memfasilitasi pengembangan berkelanjutan.

e. Prinsip 5: Independensi Uni Ketiga

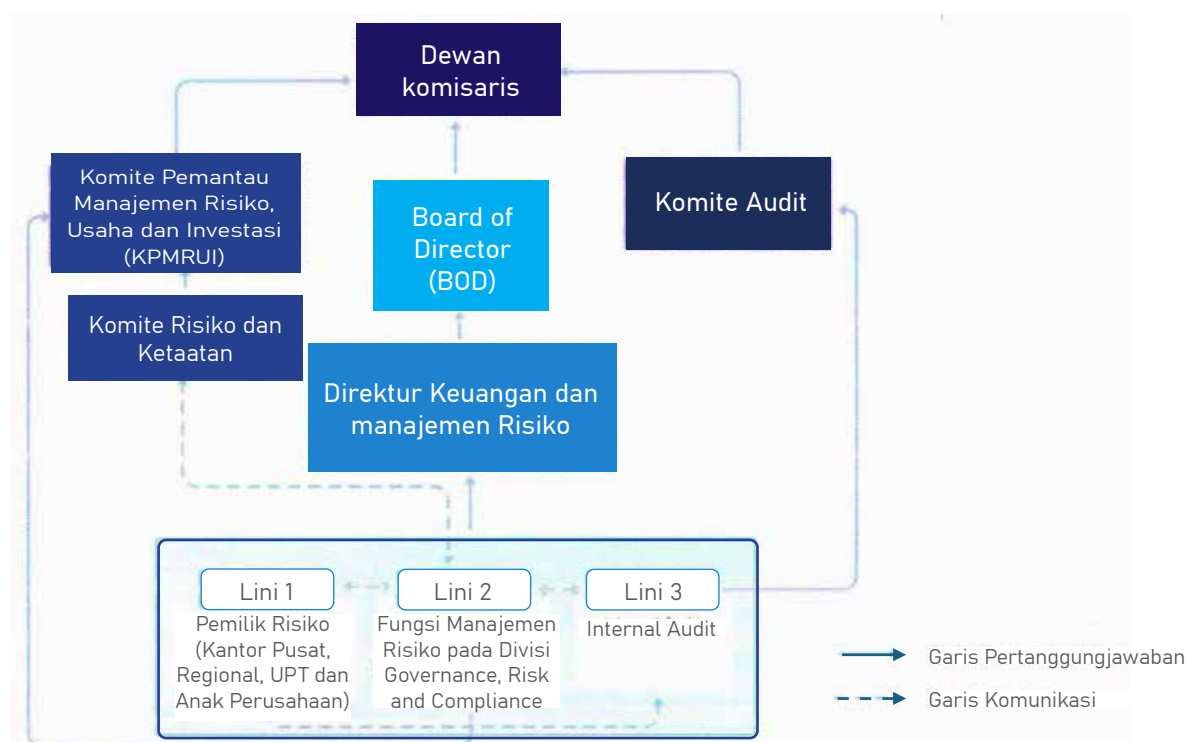
Independensi Internal Audit dari tanggung jawab manajemen adalah krusial terkait keobjektifan, kewenangan, dan kredibilitasnya. Independensi ini dibangun melalui: akuntabilitas kepada organ pengurus, akses tak terbatas pada sumber daya manusia, sumber daya organisasi, dan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya, dan bebas dari bias atau campur tangan pihak lain dalam perencanaan dan menjalankan kegiatan audit.

f. Prinsip 6: Menciptakan dan Melindungi Nilai

Semua peran bekerja Bersama secara kolektif berkontribusi dalam menciptakan dan menjaga nilai dimana semua selaras satu sama lain dan dengan kepentingan yang menjadi prioritas pemangku kepentingan. Keselarasan aktivitas dicapai melalui komunikasi, kerja sama, dan kolaborasi. Hal ini memastikan keandalan, keterkaitan dan transparansi dari informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan keputusan berbasis risiko.



2. Fungsi dan peran masing-masing lini dalam tata kelola Model Tiga lini (*Three Lines Model*)
 - a. Lini 1 (pertama) sebagai unit pemilik risiko merupakan unit yang langsung mengidentifikasi dan mengelola Risiko dalam proses bisnis;
 - b. Lini 2 (kedua) sebagai fungsi Manajemen Risiko dan kepatuhan independen merupakan unit yang mengukur, memantau dan memperlakukan risiko secara agregat, mengembangkan metodologi dan kebijakan Manajemen Risiko perusahaan; dan
 - c. Lini 3 (ketiga) sebagai fungsi Audit Intern merupakan unit yang memastikan tata kelola dan pengendalian Risiko diterapkan secara efektif oleh Perusahaan.
3. Organ pengelola Risiko dalam Penerapan Manajemen Risiko terdiri dari:
 - a. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
 - b. Direksi;
 - c. Komite Audit;
 - d. Komite Pemantau Manajemen Risiko, Usaha dan Investasi (KPMRUI);
 - e. Direktur yang Membidangi Pengelolaan Risiko;
 - f. Direktur yang Membidangi Pengelolaan keuangan; dan
 - g. Internal Audit.



Reviu Sistem Manajemen Risiko Tahun 2023

Penilaian Risk Maturity Index (RMI) 2024 Untuk Kinerja Tahun 2023 PT Pos Indonesia (Persero) Kegiatan Penilaian Risk Maturity Index (RMI) untuk Kinerja Tahun 2023 PT Pos Indonesia (Persero) telah rampung dijalankan oleh Konsultan Independen PT RAP Asia Consulting. Kegiatan penilaian dijalankan dengan mengacu pada Petunjuk Teknis No. SK-8/DKU.MBU/12/2023 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 melalui metode survei kuesioner untuk menjaring persepsi insan PT POS, metode reviu dan analisis data serta dokumen yang berlaku atau diimplementasikan sepanjang 1 Januari - 31 Desember 2023, serta metode wawancara selektif sebagai langkah konfirmasi.

Berdasarkan ketiga metode penilaian tersebut kemudian diperoleh kesimpulan bahwa Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko atau Risk Maturity Index (RMI)

untuk Kinerja Tahun 2023 PT Pos Indonesia (Persero) adalah sebesar 2,2 yang menunjukkan pada bahwa tahun buku/kinerja 2023 Sistem dan Praktik Manajemen Risiko PT Pos Indonesia (Persero) berdasarkan Juknis SK-8 berada di Fase Berkembang.

Hasil penilaian RMI pada tahun kinerja 2023 tersebut dinilai telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, khususnya jika memandang banyaknya hal/kriteria baru sebagai standar acuan penilaian dimana kriteria tersebut baru diperkenalkan dalam PER-2 dan Juknis-juknis yang penetapannya pada tengah dan akhir tahun 2023. Sebagai langkah pengembangan yang berkelanjutan, PT POS kemudian direkomendasikan untuk terus mengembangkan tingkat kematangan manajemen risikonya dengan mengacu pada 4 (empat) konsep rekomendasi utama. Adapun keempat konsep rekomendasi tersebut kemudian akan didetailkan ke dalam 42 aktivitas utama yang harapannya akan dapat ditindaklanjuti dalam kurun waktu 2024 – 2029.

Proyeksi Skor Dimensi RMI, Jumlah Aktivitas Utama dan Aktivitas Rutin
Untuk Tahun 2025 s.d. 2029



- Aktivitas utama adalah aktivitas yang direkomendasikan untuk dijalankan pada tahun berjalan
- Aktivitas rutin adalah aktivitas utama yang perlu dijalankan secara rutin untuk memenuhi kriteria yang terkait
- proyeksi skor merupakan proyeksi skor dimensi RMI dan tidak mempertimbangkan penyesuaian dari skor aspek kinerja

Kategori Risiko Yang Dihadapi

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KD.071/DIRUT/1020 pada tanggal 5 oktober 2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko, risiko-risiko yang dapat mempengaruhi strategi dan tujuan perusahaan dikategorikan menjadi 5 (lima) jenis risiko, yang terdiri dari:

1. Risiko Strategis, yaitu risiko yang disebabkan oleh penetapan strategi dan pengambilan keputusan bisnis perusahaan yang tidak tepat serta kurang responsive terhadap perubahan lingkungan usaha, meliputi: perencanaan (planning), proyek strategis (project strategy), tanggung jawab perusahaan (corporate responsibility), kemampuan bertahan (sustainability), factor eksternal (external factors) dan seterusnya.
2. Risiko Operasi, yaitu risiko yang berhubungan dengan proses bisnis, karyawan serta teknologi yang mempengaruhi operasional perusahaan secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan, meliputi : aset perusahaan, sumber daya manusia, teknologi informasi, kualitas layanan dan mutu, kejadian dari eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi dan seterusnya.

3. Risiko Keuangan, yaitu segala macam risiko yang berkaitan dan berdampak pada keuangan perusahaan, meliputi :akuntansi dan administrasi, kredit atau piutang, likuiditas, perpajakan, penganggaran (budgeting) dan seterusnya.
4. Risiko Hukum dan Kepatuhan, yaitu risiko perusahaan karena adanya kelemahan aspek yuridis yang berdampak pada konsekuensi hukum, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal serta risiko yang berhubungan dengan peraturan/kebijakan dari regulator.
5. Risiko Reputasi, yaitu risiko yang dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap perusahaan atau munculnya publikasi negatif terkait perusahaan yang dapat mengakibatkan kepercayaan stakeholder menurun.

Pengelolaan Risiko

Tahapan penanganan risiko berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KD.071/DIRUT/1020 pada tanggal 5 oktober 2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko, meliputi:

1. Memilih opsi penanganan risiko yang akan dijalankan. Opsi penanganan risiko dapat berupa:

- a. Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, yaitu penanganan terhadap penyebab risiko agar peluang terjadinya risiko semakin kecil.
 - b. Menurunkan dampak terjadinya risiko, yaitu penanganan terhadap dampak risiko apabila risiko terjadi agar dampaknya semakin kecil.
 - c. Mengalihkan risiko, yaitu penanganan risiko dengan memindahkan sebagian atau seluruh risiko, baik penyebab dan/atau dampaknya, ke-instansi/entitas lainnya. Opsi ini diambil dalam hal:
 - Pihak lain tersebut memiliki kompetensi terkait hal tersebut dan memahami level risiko atas kegiatan tersebut
 - Proses mengalihkan risiko tersebut sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - Penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan risk owner.
 - d. Menghindari risiko, yaitu penanganan risiko dengan mengubah/ menghilangkan sasaran dan/atau kegiatan untuk menghilangkan risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila:
 - Upaya penurunan level risiko di luar kemampuan organisasi;
 - Sasaran atau kegiatan yang terkait risiko tersebut bukan merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi; dan
 - Penggunaan opsi ini disetujui oleh atas risk owner
 - e. Menerima risiko, yaitu penanganan risiko dengan tidak melakukan tindakan apapun terhadap risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila:
 - Upaya penurunan level risiko di luar kemampuan organisasi;
 - Sasaran atau kegiatan yang terkait risiko tersebut merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi; dan
 - Penggunaan opsi ini disetujui oleh atas risk owner.
- Opsi penanganan risiko dapat merupakan kombinasi beberapa opsi tersebut dan sedapat mungkin diarahkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko.
2. Menyusun rencana tindak penanganan risiko
 - a. Berdasarkan opsi penanganan risiko yang telah dipilih, disusun rencana aksi penanganan risiko. Rencana aksi penanganan risiko terdiri atas rencana aksi penanganan risiko yang berupa rencana tindak penanganan yang di turunkan dari unit

organisasi yang lebih tinggi dan yang diterapkan pada unit organisasi tersebut.

- b. Rencana tindak penanganan risiko bukan merupakan pengendalian internal yang sudah dilaksanakan. Dalam hal penanganan risiko yang telah dilaksanakan tidak dapat menurunkan level risiko, maka diperlukan penetapan rencana tindak penanganan risiko yang baru. Pemilihan rencana tindak penanganan risiko tersebut mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah yang diberikan bagi organisasi.
 - c. Rencana tindak penanganan risiko tersebut harus memuat informasi berikut :
 - Kegiatan dan tahapan kegiatan berdasarkan opsi penanganan yang dipilih;
 - Target output yang diharapkan atas kegiatan tersebut;
 - Jadwal implementasi kegiatan penanganan risiko; dan
 - Penanggung jawab yang berisi unit yang bertanggung jawab dan unit pendukung atas setiap tahapan kegiatan penanganan risiko.
- Penanganan risiko yang berhasil menurunkan level probabilitas dan/atau level dampak risiko dimasukkan sebagai aktivitas pengendalian pada periode berikutnya, kecuali rencana penanganan risiko yang sifatnya proyek.
3. Menetapkan level risiko residual harapan Level risiko residual harapan merupakan target level risiko apabila penanganan risiko telah dijalankan. Penetapan level risiko residual mempertimbangkan perubahan level kemungkinan dan level dampak.
 4. Menjalankan rencana tindak penanganan risiko Pelaksanaan rencana tindak penanganan risiko dituangkan dalam formulir asesmen risiko mandiri (ARM) serta capaian target output kegiatan tersebut.
 5. Memantau risiko residual Setelah kegiatan penanganan risiko dilaksanakan secara optimal, masih terdapat risiko yang tersisa risiko ini harus diketahui dan dipantau perkembangannya.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Intern adalah serangkaian proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Manajemen dan seluruh Pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan Perusahaan melalui:

1. Pencapaian tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan Operasional Perusahaan yang ekonomis, efektif dan efisien;
2. Keakuratan dan keandalan pelaporan keuangan, Informasi dan kinerja Operasional yang disusun oleh Perusahaan;
3. Pengamanan aset Perusahaan;
4. Kepatuhan/ketaatan terhadap prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian secara menyeluruh baik itu pengendalian keuangan dan operasional dengan meningkatkan akuntabilitas setiap keputusan, meningkatkan transparansi dan akurasi pencatatan transaksi bisnis menjadi komitmen Pos Indonesia untuk mewujudkan GCG secara komprehensif dan menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan.

Untuk mendukung terciptanya pengendalian internal yang sesuai

dengan kerangka yang diakui secara internasional, Pos Indonesia mengupayakan pengembangan Sistem Pengendalian Internal dengan menggunakan pendekatan *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO) dan *Risk Based Internal Audit* (RBIA). Sistem pengendalian internal tersebut mencakup:

1. Lingkungan pengendalian internal dalam perusahaan yang disiplin dan terstruktur;
2. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha;
3. Aktivitas pengendalian;
4. Sistem Informasi dan Komunikasi;
5. Monitoring/pemantauan.

Penerapan Sistem Pengendalian Internal sesuai COSO framework

1. Lingkungan Pengendalian
 - a. Pos Indonesia membangun budaya Perusahaan sebagai panduan bagi para pemegang peran utama dalam membangun pola kepemimpinan dan memperkuat sinergi organisasi, serta mempertinggi *sustainability competitive growth* berdasarkan nilai nilai yang telah dirumuskan dalam budaya AKHLAK. Untuk mendorong dan memastikan

serta menjaga penerapan nilai-nilai budaya Perusahaan AKHLAK oleh seluruh karyawan dilakukan sosialisasi, internal, dan implementasi oleh penggerak budaya perusahaan yang terdiri dari *Culture Change Leader*, *Culture Champion*, *Culture management Squad*, dan *culture squad*.

- b. Pos Indonesia memastikan efektivitas penyelenggaraan aktivitas Internal Audit yang dilaksanakan dengan mengimplementasikan pendekatan *risk based* audit. Pos Indonesia juga memastikan terselenggaranya koordinasi dan kerja sama yang efektif dengan pihak internal maupun pihak eksternal, serta risiko bisnis pada seluruh aktivitas bisnis telah dikelola secara memadai dengan sistem *internal control*.
- c. Pos Indonesia memiliki Direktorat Sumber Daya Manusia yang menetapkan kebutuhan kompetensi Perusahaan. Salah satunya yaitu Stream Finance yang meliputi kompetensi *Corporate Finance* dengan sub area kompetensi Capital Structure dan Working Capital Management (*Treasury Management*) serta *Corporate Tax*. Kemudian, Accounting dengan sub area kompetensi

Financial Accounting, *Management Accounting* dan *Financial Information System*. Kebijakan pengembangan kompetensi ditujukan untuk menciptakan karyawan yang unggul, berkualitas global, dan berdaya saing tinggi.

2. Penilaian Risiko

- a. Pos Indonesia telah menerapkan *Risk-Based Internal Audit* (RBIA) dalam pelaksanaan audit internal, dimana perhitungan dan pemetaan risiko ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor *like lihood* (peluang terjadinya) dan *consequence* (dampak).
- b. Pos Indonesia memiliki beberapa pertimbangan dalam menyusun kebijakan akuntansi seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK), *International Financial Reporting Standards* (IFRS), Undang-undang yang terkait, dan perubahan lingkungan internal yang berdampak.
- c. Pos Indonesia memiliki prinsip asersi keuangan dalam perencanaan *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) yang diperhatikan dengan baik oleh semua karyawan yang terkait.

- d. Pos Indonesia mengelola risiko Perusahaan yang muncul baik internal maupun eksternal dengan mekanisme yang telah ditentukan.
 - e. Pos Indonesia juga menerapkan sistem pengendalian kebijakan anti fraud dan memiliki pencegahan potensi fraud.
3. Aktivitas Pengendalian
- a. Pos Indonesia menetapkan BPO (Business Process Owner) dan AO (Application Owner) yang memiliki tugas dan tanggung jawab terkait ICOFR.
 - b. Kaidah penentuan risiko dan pengendalian internal mengacu pada kebijakan ICOFR yang terdiri dari segregation of duties, otorisasi dan persetujuan, penentuan risiko, dan penentuan pengendalian internal.
 - c. Pos Indonesia memiliki pedoman penerapan sekuriti sistem informasi yang selaras dengan kebutuhan Perusahaan dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.
4. Informasi dan Komunikasi
- a. Pos Indonesia memiliki kebijakan akuntansi yang diterapkan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan IFRS, yang diuraikan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi dan penerapan, termasuk informasi atau data yang terkait dalam proses dan pengungkapan pelaporan keuangan, serta mengatur tentang komponen laporan keuangan konsolidasi.
 - b. Pos Indonesia memiliki kebijakan teknologi informasi yang memberikan kerangka acuan bagi setiap proses maupun unit yang terkait dengan penyelenggaraan TI Perusahaan dalam penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan dan prosedur. Ruang lingkup peraturan TI di Perusahaan Pos Indonesia mencakup aspek tata kelola TI Strategy and Development dan TI Infrastructure operations.
5. Aktivitas Pemantauan
- a. Pos Indonesia memiliki Internal Audit Charter yang mencakup persyaratan auditor di unit Internal Audit, yaitu memiliki integritas dan perilaku yang profesional, pengetahuan tentang risiko dan pengendalian yang penting di bidang pos.
 - b. CEO Pos Indonesia senantiasa meningkatkan awareness dari manajemen terkait audit maupun change management dalam bentuk CEO Notes dan menetapkan Integrated Audit, serta membentuk Probis IFRS.

Reviu Atas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal, PT Pos Indonesia (Persero) membentuk Unit Audit Internal sebagai pelaksana yang disebut Internal Audit. Disamping itu Pos Indonesia membentuk Tim Audit Internal khusus untuk menilai keefektifan penerapan Sistem PT Pos Indonesia (Persero) Terintegrasi. Hasil evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian internal menjadi salah satu dasar evaluasi Manajemen terhadap efektivitas sistem pengendalian internal untuk menentukan perbaikan dan penyempurnaan sistem ataupun kebijakan yang memungkinkan Manajemen menjalankan kegiatan operasional Perusahaan dengan cara yang lebih efektif.

Berikut tahapan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern Perusahaan:

1. Internal Audit melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern Perusahaan;
2. Direksi menindaklanjuti laporan hasil audit yang dilaksanakan Internal Audit maupun Auditor Eksternal dan melaporkan perkembangan tindak lanjut tersebut kepada Komisaris.
3. Komisaris memantau perkembangan tindak lanjut atas laporan hasil audit Internal Audit maupun Auditor Eksternal.

4. Komisaris memberikan penilaian dan masukan terhadap laporan hasil audit Internal Audit dan Auditor Eksternal yang mencakup materi laporan, sasaran audit dan ruang lingkup audit.
5. Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dan tim manajemen dalam menjalankan peraturan perundang-undangan.

Maksud dan tujuan evaluasi adalah:

1. Memberikan keyakinan kepada Direksi dalam pemberian asersi mengenai efektivitas pengendalian intern untuk selanjutnya memberikan keyakinan kepada stakeholder lain bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan telah cukup memadai dalam mencapai tujuan yang diharapkan yaitu kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu, dan efisien/efektivitas dari kegiatan usaha perusahaan.
2. Memberikan rekomendasi kepada Direksi menyangkut perbaikan penerapan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan di masa yang akan datang (areas of improvement).

Kegiatan penilaian terhadap sistem pengendalian internal, Internal Audit bersama Komite Audit (KA) telah melakukan lagi beberapa kali rapat pembahasan baik secara tatap muka langsung maupun melalui video conference. Dalam beberapa kali rapat tersebut dibahas oleh KA dengan SPI berbagai hal, termasuk juga sistem pengendalian internal.

PERKARA PENTING

Sepanjang tahun 2024 terdapat perkara penting yang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun 2024 diantaranya :

No	Lokasi Kantor	Klasifikasi Kasus					Status Kasus	
		Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana Umum	Pidana Khusus	PTUN	On Going	Closed
1	Kantor Pusat	1					0	1
2	Regional I		4				3	1
3	Regional II		1				0	1
4	Regional III	2	1				2	1
5	Regional IV							
6	Regional V	1					0	1
7	Regional VI	3	3			1	2	5
Total		7	9			1	7	10
Anak Perusahaan								
1	PT Pos Finansial	1					1	0
2	PT Pos Properti	2					2	0
Total		3					3	0

No	Lokasi Kantor	Nomor Kasus	Klasifikasi Kasus	Potensi Materiil	Kerugian	Status Kasus
1	Kantor Pusat	76/Pdt.G/2024/Pn Bdg	Wanprestasi	Rp16.767.255.960,00	-	Closed
2	Regional I	42/Pdt.Sus-PHI/PN.Pbr	Perselisihan Hak	0	-	Closed
3	Regional II	39/Pdt.G/2024/PN Cbd	Wanprestasi	Rp120.502.000.000,00	-	On Going
4	Regional VI	22/Pdt.G/2024/PN MII	Perbuatan Melawan Hukum	Rp527.996.963,00	-	Closed
5	Regional VI	160/Pdt.G/2024/PN Mks	Perbuatan Melawan Hukum	Rp1.284.382.874,00	-	Closed
6	Regional VI	274/Pdt.G/2024/PN Jap	Perbuatan Melawan Hukum	Rp15.000.000.000,00	-	On Going

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Penyebarluasan informasi secara transparan baik kepada stakeholders dan shareholder maupun kepada masyarakat umum dipandang sangat perlu. Hal ini sebagai upaya Pos Indonesia untuk memenuhi salah satu prinsip dalam GCG yaitu asas transparansi dan untuk mendukung diberlakukannya Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Media yang selama ini digunakan Pos Indonesia untuk penyebarluasan informasi adalah melalui internet/web, media massa, paparan publik maupun media sosial. Perusahaan memiliki beberapa sumber informasi yang dapat diakses oleh publik melalui:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Melalui RUPS, Pos Indonesia menyampaikan informasi mengenai rencana dan/atau kinerja kepada Pemegang Saham sehingga Pemegang Saham mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi Pos Indonesia dan dapat mengambil keputusan strategis dengan tepat

2. Website resmi Perusahaan: www.posindonesia.co.id

Fungsi website tersebut adalah untuk penyebarluasan informasi secara transparan baik kepada stakeholders dan shareholder maupun kepada masyarakat umum, membangun citra Perusahaan dan sebagai media promosi. Data yang dapat didapatkan melalui website perusahaan antara lain:

- Profil perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris
- Produk dan Jasa yang diberikan
- Solusi bisnis
- Media dan Informasi baik news release, e-paper, dan galeri kegiatan
- Informasi karir di Perusahaan
- Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan.
- Informasi kontak dan media sosial perusahaan
- Lacak Kiriman
- Hitung Tarif Pengiriman
- Pencarian Kantorpos Terdekat
- Program Pos Indonesia

3. Media

Penyebaran informasi melalui media diantaranya adalah secara rutin menerbitkan company profile, mencetak brosur, publikasi melalui surat kabar, majalah dan mengirimkan press release kepada media massa untuk disebarluaskan kepada konsumen dan pemangku kepentingan.

4. Kontak & Media Sosial

- a. Telepon 1500161;
- b. Website:
<http://www.posindonesia.co.id>
- c. Livechat VIDAPOS;
- d. Line Messenger @posindonesia;
- e. Telegram Messenger:
@posindonesia_officialbot;
- f. E-mail:
halopos@posindonesia.co.id;
- g. Facebook:
<http://www.facebook.com/PosIndonesia>;
- h. Twitter @posindonesia;
- i. Instagram @posindonesia.ig;
- j. Channel Youtube Pos Indonesia
<https://www.youtube.com/PosIndonesiaJuara>.

5. Media Internal melalui Wahana Pos

6. Pertemuan / Pameran / expo

KODE ETIK POS INDONESIA

Komitmen untuk melaksanakan praktik - praktik GCG atau Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah salah satunya dengan menginterpretasikan perilaku yang terkait dengan Etika Bisnis dan Tata Perilaku. Dalam penerapannya, Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku berlaku bagi seluruh insan Pos Indonesia dan diperbarui pada setiap awal tahun selain itu setiap pimpinan unit kerja diwajibkan untuk melakukan sosialisasi untuk mempertahankan kejujuran, integritas, dan keadilan dalam seluruh aktivitas bisnis di unit kerjanya. Pos Indonesia memiliki kode etik yang berlaku bagi seluruh level organisasi melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT. Pos Indonesia Nomor 439/DEKOM/1014 dan Nomor KD.85/DIRUT/1014 tentang Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code of Conduct) Insan Pos Indonesia.

Dalam pengembangan GCG, perusahaan telah menyusun Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*). Perusahaan mengupayakan penerapan standar etika terbaik dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan visi, misi dan budaya perusahaan yang berisikan nilai-nilai etika bisnis dan tata perilaku bagi setiap insan Pos Indonesia, yang menjadi acuan dalam kegiatan operasional pekerjaan sehari-hari. Perusahaan menyadari sepenuhnya bahwa hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan dan peningkatan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang hanya dapat dicapai melalui integritas bisnis dalam setiap aktivitas bisnis perusahaan sebagaimana tercantum dalam Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku. Substansi Aturan Perilaku dimaksudkan agar dapat mewujudkan nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh insan Pos menjadi tindakan nyata dalam operasional sehari-hari dalam berinteraksi dengan sesama Insan Pos maupun dengan stakeholders lainnya. Agar Aturan Perilaku ini dapat dijadikan bahan referensi pencegahan timbulnya permasalahan maupun ketika menghadapi situasi dilematis yang sulit diantisipasi.

ETIKA BISNIS DAN TATA PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*)

Pos Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa hubungan yang baik dengan semua stakeholders merupakan syarat utama bagi sustainability Perusahaan. Hubungan baik dibangun oleh komitmen untuk melaksanakan praktik-praktik GCG atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik, salah satunya adalah dengan mengimplementasikan sikap dan/atau sifat yang tertuang dalam Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) Insan Pos Indonesia.

Pos Indonesia memiliki kode etik yang berlaku bagi seluruh level organisasi yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: 446/Dekom/1221 dan Nomor: KD.125/DIRUT/1221 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) Insan Pos Indonesia.

Etika Bisnis dan Tata Perilaku ini disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan sebagai Insan Pos Indonesia dalam mengelola Perusahaan guna mencapai purpose, visi, misi, dan tujuan Perusahaan. Pos Indonesia mengupayakan penerapan standar etika terbaik dalam menjalankan aktivitas bisnisnya yang menjadi acuan dalam kegiatan operasional pekerjaan sehari-hari. Code of Conduct (CoC) juga dapat dipedomani sebagai referensi pencegahan timbulnya permasalahan maupun ketika menghadapi situasi dilematis yang sulit diantisipasi.

Penerapan Etika Bisnis dan Tata Perilaku ini secara terperinci dimaksudkan untuk:

1. Mengidentifikasi nilai-nilai dan standar etika selaras dengan visi dan misi Perusahaan;
2. Menjabarkan tata nilai sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh Insan Pos Indonesia dalam menjalankan tugas;
3. Menjadi acuan perilaku Insan Pos Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan stakeholders Perusahaan;

4. Menjelaskan secara rinci standar etika agar Insan Pos Indonesia dapat menilai bentuk kegiatan yang diinginkan dan membantu memberikan pertimbangan jika menemui keragu-raguan dalam bertindak.

Muatan Aturan Perilaku

Code of Conduct Perusahaan merupakan sekumpulan norma, nilai, serta tindak perbuatan yang diyakini oleh jajaran perusahaan sebagai suatu standar perilaku yang ideal bagi Perusahaan. Perilaku yang ideal tersebut wajib dikembangkan berdasarkan nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menjadi budaya Perusahaan. Dari nilai-nilai luhur yang telah ada pada Perusahaan, ditetapkan aturan perilaku yang secara garis besar berisi sebagai berikut:

1. Standar Etika Bisnis

Perusahaan mengembangkan Pedoman Etika Bisnis yang merupakan standar perilaku dalam berbisnis dan menjadi panduan bagi Perusahaan sebagai suatu entitas dalam berinteraksi dan berhubungan dengan para pemangku kepentingan. Penerapan etika bisnis diharapkan dapat membantu Perusahaan untuk meningkatkan kinerja dengan

tetap memperhatikan kepentingan dari shareholder dan stakeholders secara beretika dan berlandaskan peraturan dan hukum yang berlaku. Standar etika bisnis misalnya mengatur bagaimana setiap insan pos mempunyai integritas dalam melakukan seluruh aktivitas bisnis dan pekerjaannya. Selain itu pada Standar Etika Bisnis diatur etika perusahaan dengan pemegang saham, karyawan (hubungan industrial), konsumen, pesaing, penyedia barang dan jasa, mitra kerja, investor, pemerintah, masyarakat, media massa, pengelolaan lingkungan, serta organisasi profesi. Sistem pengadaan kontrak pekerjaan juga diatur dalam Standar Etika Bisnis ini.

2. Standar Tata Perilaku

Standar tata perilaku harus dimiliki setiap insan Pos Indonesia dan menjadi panduan dalam berinteraksi dan berhubungan, dalam melakukan seluruh aktivitas bisnis dan pekerjaan sehari-hari. Penerapan tata perilaku diharapkan dapat menjadikan insan Pos Indonesia mempunyai integritas, sikap jujur, adil, dan mendahulukan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi. Pada Standar Tata Perilaku diatur tentang etika

kerja sesama insan Pos Indonesia, antara atasan dengan bawahan. Etika menghindarkan diri dari penyuapan, benturan kepentingan, gratifikasi, entertainment, narkoba dan miras, serta penyalahgunaan jabatan diatur juga pada Standar Tata Perilaku. Seluruh karyawan diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan, harta perusahaan, serta keamanan, kesehatan dan keselamatan (K3) saat bekerja. Pada Standar Tata Perilaku juga memuat terkait aturan keterlibatan dalam politik, pernyataan palsu, klaim palsu dan konspirasi serta diatur juga tentang penghormatan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual.

Penyebarluasan Kode Etik

Sosialisasi CoC kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan telah dilakukan menggunakan beberapa media, di antaranya adalah melalui Learning Management System (LMS) dan Google Classroom (GCR). LMS digunakan bagi karyawan organik sedangkan GCR digunakan untuk karyawan non organik. Tahapan sosialisasi pada kedua media tersebut adalah pembelajaran mandiri menggunakan media power point dilanjutkan dengan posttest. Karyawan yang berhasil

mendapatkan nilai minimal 80% dalam posttest tersebut dianggap lulus dan akan mendapatkan sertifikat digital. Sertifikat digital digunakan sebagai Surat Pernyataan Pos Indonesia di mana pada surat tersebut dinyatakan bahwa karyawan yang bersangkutan telah paham dan akan mengimplementasikan CoC dalam pekerjaan sehari-hari.

Pelaporan Pelanggaran

Berikut ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaporan pelanggaran, yaitu:

1. Identitas yang dilaporkan harus jelas
2. Identitas pelapor dijaga kerahasiaannya oleh Perusahaan, kecuali apabila diperlukan dalam tindak lanjut laporan sesuai kebijakan Perusahaan
3. Atasan langsung menindaklanjuti laporan
4. Pelaporan dilakukan secara jujur, dilandasi niat baik disertai data/bukti akurat
5. Insan Pos dilarang melakukan tindakan pemusuhan, pembalasan, dan tindakan merugikan lainnya

Penanganan Pelanggaran

Berikut ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan proses penanganan pelanggaran, yaitu:

1. Laporan ditindaklanjuti melalui pengkajian atau pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian tindakan disiplin, sanksi, atau tindakan perbaikan lainnya

2. Hasil kajian dan usulan perbaikan disampaikan kepada Direktur SDM dan Umum untuk dikaji lebih lanjut, lalu disampaikan ke Direktur Utama untuk persetujuan
3. Jika diperlukan, Direktur Utama dapat memerintahkan SPI untuk pengkajian laporan lebih lanjut
4. Insan Pos yang diduga melanggar etika bisnis (CoC) diberi hak untuk didengar penjelasannya sebelum diputuskan pemberian hukdis/sanksi.

Sanksi

Berikut ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan sanksi dari pelanggaran kode etik yang diterapkan di Perusahaan, yaitu:

1. Perusahaan memberikan sanksi yang tegas dan konsisten kepada Insan Pos yang melanggar etika bisnis (CoC).
2. Pengenaan sanksi atas bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Komisaris dan Direksi, berpedoman pada anggaran dasar Perusahaan dan keputusan RUPS
3. Pengenaan sanksi terhadap karyawan perusahaan dilakukan sesuai ketentuan Perusahaan

Pelanggaran dan Sanksi di Tahun 2024

Tidak terdapat pelanggaran kode etik yang terjadi di Pos Indonesia sepanjang 2024

WHISTLE BLOWING SYSTEM

Whistleblowing System adalah sistem yang mengelola pengaduan/pengungkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya, secara rahasia, anonim, dan mandiri (independent) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan Pos dan mitra kerja dalam mengungkap Pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

Whistleblowing System (WBS) berperan penting dalam sistem pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran, kecurangan maupun pelanggaran etika di Pos Indonesia. Pemanfaatan WBS diperuntukan bagi siapa saja yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pos Indonesia. WBS di lingkungan Pos Indonesia berfokus kepada materi yang dilaporkan sehingga pelapor tidak perlu khawatir identitasnya terungkap karena Pos Indonesia akan merahasiakan identitas diri pelapor/whistleblower.

Whistleblowing system Pos Indonesia diatur dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.026/DIRUT/0322 dan Nomor 072/DEKOM/0322 tanggal 31 Maret 2022 tentang Whistleblowing System di PT Pos Indonesia (Persero). Pengadministrasian WBS adalah Komite Audit Dewan Komisaris PT Pos

Indonesia (Persero) yang ditugaskan mengadministrasikan Pelaporan Pelanggaran mulai dari penerimaan laporan Pelanggaran sampai dengan pembuatan laporan akhir penanganan pelaporan dan penyimpanan dokumen.

Agar pelaksanaan WBS berjalan efisien dan efektif dibentuk Komite WBS/Whistleblowing System Committee (WBS) dengan komposisi sebagai berikut:

1. Komite Pengarah dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum sebagai ketua;
 - b. Direktur Bisnis Kurir dan Logistik sebagai anggota;
 - c. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko sebagai anggota;
2. Komite Pelaksana dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Kepala Internal Audit sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Corporate Secretary sebagai wakil ketua merangkap anggota;
 - c. VP Risk and Fraud Management sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - d. SVP Human Capital Management sebagai anggota;
 - e. SVP Finance;
 - f. VP Legal, Governance and Compliance sebagai anggota;
 - g. Deputi Internal Audit Bidang Pemeriksaan Investigatif dan Tindak Lanjut sebagai anggota;

Penyampaian Pelaporan Pelanggaran

1. Pelapor dapat menyalurkan pengaduan melalui Pengadministrasi WBS, dengan fasilitas sebagai berikut :
 - a. Surat ditujukan kepada : Komite Audit Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) Gedung Pos Ibukota Jalan Gedung Kesenian Nomor 2 Lantai 2 Jakarta 10710 atau Graha Pos Indonesia Jalan Banda nomor 30 Lantai 7 Bandung 40115 (dengan format surat yang telah disediakan)
 - b. Telepon : 021-3521205
 - c. Faksimile : 021-3452533
 - d. Email : wbs@posindonesia.co.id
 - e. Website : wbs.posindonesia.co.id
2. Pelaporan bersifat rahasia;
3. Pelaporan pelanggaran harus ditindaklanjuti oleh Pengelola WBS paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak laporan diterima.

Perlindungan Bagi Pelapor/ Whistleblower

1. Perusahaan berkomitmen untuk melindungi Pelapor pelanggaran yang beritikad baik dan Perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta best practices yang berlaku dalam penyelenggaraan WBS

2. Perlindungan Pelapor diharapkan untuk mendorong terjadinya Pelaporan pelanggaran serta menjamin keamanan Pelapor maupun keluarganya;
3. Perusahaan memberikan jaminan Perlindungan kepada Pelapor (Whistleblower Protection) dalam bentuk sebagai berikut :
 - a. Perlindungan pengamanan atas tindakan balasan baik berupa fisik maupun tekanan dari Terlapor atau Korporasi;
 - b. Perlindungan atas perlakuan yang merugikan yaitu:
 - Pemecatan yang tidak adil;
 - Penurunan atau pembebasan jabatan/grade, pangkat atau gaji;
 - Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
 - Catatan yang merugikan dalam file data pribadi (personal file record).
 - Penghambatan karir
 - c. Perlindungan atas gugatan/ tuntutan hukum :
 - Apabila Pelapor mendapat gugatan balik dari Terlapor, Perusahaan wajib memberikan bantuan hukum sampai dengan selesainya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Apabila Terlapor juga termasuk sebagai saksi, Perusahaan cq. VP Legal, Governace and Compliance dapat mengajukan perlindungan saksi dan korban kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- d. Perlindungan atas identitas pribadi (apabila Pelapor menginginkan dirinya tetap dirahasiakan);
- e. Pelapor yang terlibat dalam perbuatan yang dilaporkan (justice collaborator) mendapatkan perlindungan dan keringanan hukuman disiplin, apabila Pelapor karyawan Perusahaan.
- f. VP Legal, Governace and Compliance dapat mengusahakan agar pemberian keterangan oleh pelapor tanpa bertatap muka dengan Terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penanganan Pengaduan

1. Penerimaan pelaporan

Pelaporan pelanggaran harus segera ditindaklanjuti oleh Pengadministrasi WBS dan Paling lama dalam, waktu 30 hari sejak laporan pelanggaran diterima, sudah diputuskan untuk diteruskan atau tidak ke Whistleblowing System Committee (WBSC).
Perbuatan Yang dapat Dilaporkan:

- a. Tidak Pidana Korupsi;
 - Korupsi Suap Menyuap
 - Korupsi Penggelapan Jabatan
 - Korupsi Tindak Pemerasan
 - Korupsi Gratifikasi
 - Korupsi Benturan Kepentingan
 - Korupsi Perbuatan Curang
 - Korupsi Keuangan Negara
- b. Kecurangan/Fraud;
- c. Perbuatan melanggar hukum antara lain:
 - Penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan;
 - Penggunaan narkoba;
 - Pelecehan dan/atau kesusilaan;
 - Perbuatan kriminal lainnya;
 - Mark-up.

- d. Pelanggaran Pedoman Etika Perusahaan (Code of Conduct) atau Pelanggaran norma-norma kesopanan pada umumnya. Pelanggaran terhadap Pedoman Etika Perusahaan (Code of Conduct) atau Pelanggaran norma-norma kesopanan ini akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Komite Etik dengan Keputusan Direksi dan/ atau Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi;
 - e. Perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non-finansial terhadap Perusahaan atau merugikan kepentingan Perusahaan, misalnya penggunaan media sosial yang tidak sesuai dengan ketentuan.
2. Klarifikasi
- a. Klarifikasi dilakukan oleh Komite WBS yang apabila diperlukan melibatkan tim dari lintas fungsi;
 - b. Klarifikasi Pengadministrasi WBS dengan Pelapor sebelum diteruskan ke WBSC, dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai penanganan kasus yang dilaporkannya (telaah awal apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak);
 - c. Bila Pelapor adalah karyawan, maka Pengadministrasi WBS wajib memberikan informasi perkembangan penanganan hasil Pelaporan Pelanggaran tersebut kepada Pelapor. Pemberian informasi ini dilakukan dengan mengingat asaskerahasiaan antara Pelapor dengan Pengadministrasi WBS, termasuk di dalamnya kerahasiaan terhadap apa yang terjadi pada Terlapor. Pembocoran sifat kerahasiaan ini oleh Pelapor akan menghapuskan kewajiban Perusahaan atas jaminan kerahasiaan yang diberikan kepadanya dan dalam kasus tertentu dapat mengakibatkan hilangnya perlindungan kepada Pelapor;
 - d. Dalam hal Pelapor adalah orang luar (masyarakat) dan bukan karyawan Perusahaan, Kebijakan komunikasi dengan Pelapor ini dapat diberikan. Hal ini berlaku bila ia bersedia menandatangani kesepakatan tertulis tentang kerahasiaan informasi baik yang ia terima dari Perusahaan, maupun yang disampaikan kepada Perusahaan.

3. Investigasi

Semua laporan mengenai pelanggaran akan dilakukan investigasi lebih lanjut, dengan tujuan untuk sedapat mungkin mengumpulkan semua bukti yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah laporan pelanggaran tersebut benar atau bahkan sebaliknya, atau bahkan ditemukan tidak cukup bukti untuk mendukung tindak lanjut. Investigasi dilakukan dalam hal:

- a. Terlapor adalah karyawan atau organ pendukung Dewan Komisaris, investigasi dilakukan oleh WBSK yaitu Internal Audit c.q. Deputi Pemeriksaan Investigasi dan Tindak Lanjut atau Investigasi eksternal yang ditunjuk oleh Direksi;
- b. Terlapor adalah Direksi, Investigasi dilakukan oleh Dewan Komisaris c.q. Komite audit atau investigasi eksternal yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris;
- c. Terlapor adalah Komisaris, Investigasi merupakan kewenangan Pemegang Saham berdasarkan laporan dari dewan komisaris yang menerima masukan dari pengadministrasi WBS.

Independensi petugas investigasi sangat penting karena objektivitas dan kewajaran serta keadilan dalam memberikan penilaian hasil temuan akan menentukan kredibilitas pengelola WBS. Proses investigasi harus bebas dari bias dan dilakukan tidak tergantung dari siapa yang melaporkan atau siapapun terlapor. Terlapor harus diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang ditemui, termasuk pembelaan bila diperlukan.

Pelaksana investigasi terdiri dari Komite WBS, dalam melaksanakan tugasnya dilarang melakukan intimidasi. Dalam hal kasus yang serius dan sensitif, patut dipertimbangkan untuk menggunakan investigator/ auditor eksternal yang independen dalam melakukan investigasi laporan pelanggaran tersebut.

Pelaksana Investigasi terdiri dari Komite WBS; Pelaksana investigasi harus memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Mempunyai integritas yang tinggi;
- b. Mempunyai kemampuan untuk melakukan investigasi;
- c. Mempunyai kemampuan analisis yang tinggi;
- d. Kemampuan melakukan penilaian dengan baik (sound judgement);

- e. Objektif;
- f. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
- g. Memiliki kemampuan diplomasi yang baik.

Pelaksana Investigasi dalam melakukan Investigasi:

- a. tidak diperkenankan melakukan intimidasi;
- b. berhak meminta informasi tentang tugas dan materi Investigasi dari Pengadministrasi WBS dan WBSC;
- c. tidak berhak menerima informasi identitas Pelapor;
- d. berkewajiban merahasiakan atas segala informasi yang diperoleh dari Investigasi;

Pelaksana Investigasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan Investigasi harus melaporkan secara rahasia dan segera kepada WBSC dengan tembusan kepada Pengadministrasi WBS. Untuk menerima informasi tambahan, WBSC dapat meminta Pelaksana Investigasi untuk mempresentasikan hasil laporan Investigasi di dalam rapat WBSC.

4. Penindakan

- a. Apabila berdasarkan investigasi terlapor terbukti melakukan pelanggaran, dilakukan penindakan hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan dan sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

- b. Apabila berdasarkan investigasi terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran, makan nama baik dan seluruh haknya dipulihkan;
- c. Apabila berdasarkan investigasi tidak ditemukan bukti-bukti dan berindikasi laporan palsu atau fitnah, khusus pelapor internal perusahaan dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penindakan dapat juga berupa pelaporan pidana kepada yang berwajib atau gugatan perdata.

5. Laporan Akhir

- a. Laporan akhir atas pelaporan pelanggaran dibuat oleh WBSC dikirimkan kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada pengadministrasi WBS dalam hal ini komite audit dan oleh tim investigasi hasil tersebut dipresentasikan/dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan diinformasikan kepada Pelapor;
- b. Pelanggaran yang berulang dan sistemik dilaporkan kepada direksi yang bertanggung jawab atas permasalahan yang dilaporkan dan mempunyai kewenangan untuk melakukan perbaikan;

- c. Hasil laporan akhir diarsipkan dengan tertib sebagai dokumen dan disimpan dalam waktu sesuai dengan peraturan pengarsipan di Perusahaan. Apabila pelanggaran tersebut diteruskan ke proses pengadilan, dokumen tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

WBS di Pos Indonesia saat ini dikelola oleh:

1. Komite Audit Dewan Komisaris sebagai Pengadministrasi WBS yaitu sebagai pengelola pelaporan pelanggaran mulai dari penerimaan laporan pelanggaran sampai dengan pembuatan laporan akhir penanganan pengaduan dan penyimpanan dokumen;
2. Komite Whistleblowing System (WBSC) Komite WBS sebagai pelaksana WBS yang terdiri dari Komite Pengarah yang diketuai oleh Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum dan Komite Pelaksana yang diketuai oleh Kepala Internal Audit. WBSC mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Hak WBSC adalah :
 - Berhak meminta konfirmasi atas pelaporan Pelanggaran dari Pengadministrasi WBS;
 - Berhak atas akses langsung kepada Direksi dan Dewan Komisaris;

- Meminta VP Hukum untuk melakukan perlindungan kepada Pelapor dan keluarganya dan bantuan hukum apabila diperlukan;
 - Menghadiri rapat pleno yang diselenggarakan oleh Pengadministrasi WBS.
- b. Kewajiban WBSC adalah :
 - Menerima Pelaporan Pelanggaran dari Pengadministrasi WBS;
 - Menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan atas laporan yang diterima dari pengadministrasi WBS;
 - Meminta kepada VP Hukum untuk melakukan perlindungan dan bantuan hukum kepada pelapor dan keluarganya apabila diperlukan;
 - Mempresentasikan hasil tindak lanjut Pelaporan Pelanggaran kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit apabila Pelanggaran dilakukan oleh Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris, apabila Pelanggaran dilakukan oleh Direktur maka presentasi hasil tindak lanjut Pelaporan Pelanggaran kepada Direktur Utama;
 - Merekomendasikan kepada Direktur Utama dan/atau

Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan kepada Terlapor yang oleh tim investigasi yang terdiri dari fungsi dinyatakan cukup bukti telah melakukan Pelanggaran agar diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan;

- Setiap triwulan atau sesuai kebutuhan membuat laporan kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris c.q. Komite Audit sebagai Pengadministrasi WBS atas setiap laporan yang diterima dari Pengadministrasi WBS;
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris atau Pengadministrasi WBS sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal anggota WBSC dalam posisi Terlapor maka:

- a. Anggota yang bertalian harus dinonaktifkan dari keanggotaan WBSC selama tindak lanjut atas proses pelaporan berlangsung.
- b. Apabila laporan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari auditor eksternal/internal dinyatakan terbukti, anggota tersebut diberhentikan sebagai anggota WBSC;

c. Apabila laporan tersebut tidak terbukti kebenarannya, maka anggota yang bertalian dipulihkan kembali keanggotaannya dalam WBSC.

d. Dalam hal Komisaris atau Direksi berada pada posisi Terlapor, WBSC harus membuat laporan kepada Komisaris c.q. Komite Audit.

Pengaduan

Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat pengaduan yang masuk melalui WBS Laporan Administrasi Pengelolaan WBS telah dibuat tiap triwulan dan dikirimkan kepada Dewan Komisaris:

1. Laporan Pengelolaan Administrasi WBS Triwulan IV tahun 2023 dikirim kepada Dewan Komisaris dengan surat Ketua Komite Audit nomor: C.Pos.7968/KAD 100/KA/2024 tanggal 6 Februari 2024, perihal : Laporan Pengelolaan Administrasi Whistle Blowing System (WBS) PT Pos Indonesia (Persero), Triwulan IV Tahun 2023.
2. Laporan Pengelolaan Administrasi WBS Triwulan I tahun 2024 dikirim kepada Dewan Komisaris dengan surat Ketua Komite Audit nomor: C.Pos.29749/KAD 100/KA/2024 tanggal 21 Mei 2024, perihal : Laporan Pengelolaan Administrasi Whistle Blowing System (WBS) PT Pos Indonesia (Persero), Triwulan I Tahun 2024.

3. Laporan Pengelolaan Administrasi WBS Triwulan II tahun 2024 dikirim kepada Dewan Komisaris dengan surat Ketua Komite Audit nomor: C.Pos.45538/KAD 100/KA/2024 tanggal 26 Juli 2024, perihal : Laporan Pengelolaan Administrasi Whistle Blowing System (WBS) PT Pos Indonesia (Persero), Triwulan II Tahun 2024.
4. Laporan Pengelolaan Administrasi WBS Triwulan III tahun 2024 dikirim kepada Dewan Komisaris dengan surat Ketua Komite Audit nomor: C.Pos.69649/KAD 100/KA/2024 tanggal 29 Oktober 2024, perihal : Laporan Pengelolaan Administrasi Whistle Blowing System (WBS) PT Pos Indonesia (Persero), Triwulan III Tahun 2024.

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Definisi Gratifikasi

Menurut penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,

pengobatan cumacuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Definisi di atas menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna sebagai pemberian yang bersifat netral. Berikut ini perbedaan hadiah, gratifikasi, gratifikasi illegal, dan suap:

Hadiah	Pemberian yang wajar, dilakukan karena hubungan baik dan sama sekali tidak terikat dengan jabatan.
Gratifikasi	Pemberian dalam arti luas kepada Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara.
Gratifikasi Illegal	Pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban/tugas pihak penerima.
Suap	Sifatnya transaksional atau adanya kesepakatan pihak pemberi dan penerima.

Regulasi Gratifikasi

Gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi baru yang diatur dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut pasal yang mengatur tentang gratifikasi:

A. Pasal 12B

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Pasal 12C

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima
3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat

Jenis-jenis Gratifikasi

A. Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan

1. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah;
2. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
3. Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoringdan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
4. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari instansi;
5. Dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
6. Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
7. Sebagai akibat dari perjanjian k e r j a s a m a / k o n t r a k / kesepakatan dengan pihak lain;
8. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
9. Merupakan hadiah atau souvenirbagi pegawai/ pengawas/tamu selama kunjungan dinas;

10. Merupakan fasilitas hiburan, fasilitas wisata, voucher oleh pejabat/pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;

11. Dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan / perlakuan pemangku kewenangan;

12. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas pejabat/ pegawai;

- ### B. Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan
- Tidak semua gratifikasi tidak boleh diterima/wajib dilaporkan kepada KPK. Mengingat begitu luasnya ruang lingkup gratifikasi, perlu juga diuraikan bentuk-bentuk gratifikasi di luar yang wajib dilaporkan. Karena secara prinsip terdapat begitu banyak bentuk pemberian yang sesungguhnya tidak terkait sama sekali dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sehingga gratifikasi tersebut tidak wajib dilaporkan.

Terdapat 4 (empat) karakteristik gratifikasi yang boleh diterima yaitu:

1. Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan;
2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan dalam hubungan social antar sesama dalam batasan nilai yang wajar; atau,
4. Merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar
2. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
3. Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum;
4. Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
5. Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
6. Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
7. Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, terdapat 17 (tujuh belas) jenis gratifikasi yang dikecualikan/tidak wajib dilaporkan, yaitu:

1. Pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
2. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
3. Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum;
4. Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
5. Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
6. Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
7. Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau suvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
9. Kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
10. Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
11. Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
12. Pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
13. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
14. Pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
15. Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap

pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

16. Pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
17. Pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Pelaporan Gratifikasi

Gratifikasi yang dianggap suap yaitu gratifikasi yang diberikan dari pihak yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara dan pemberian tersebut dilarang oleh aturan yang berlaku, merupakan jenis gratifikasi yang harus ditolak oleh setiap pegawai negeri/penyelenggara negara. Jika penerima gratifikasi menerima gratifikasi dan melaporkan kepada KPK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima, maka Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara dibebaskan dari ancaman pidana gratifikasi.

Setidaknya terdapat 2 (dua) sikap yang dapat dilakukan apabila seorang Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara berhadapan dengan peristiwa

pemberian gratifikasi, yaitu:

- A. Tolak pada kesempatan pertama, lalu laporkan kepada KPK
 - B. Terima lalu laporkan kepada KPK
- Kondisi pengecualian dimana gratifikasi tidak bisa ditolak di kesempatan pertama, sebagai berikut:
1. Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
 2. Tidak diketahuinya pemberi gratifikasi;
 3. Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima.
 4. Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti: dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/ karier penerima/ada ancaman lain.

Dalam hal gratifikasi yang memenuhi empat kondisi pengecualian di atas, Penerimaan gratifikasi lainnya agar dilaporkan langsung kepada KPK melalui Aplikasi “Gratifikasi Online (GOL)” yang dapat diunduh pada smartphone baik Android maupun iOS. Pada saat pelaporan, ditembuskan ke email upg@posindonesia.co.id

Lapor gratifikasi membawa manfaat, di antaranya adalah:

- Melepaskan ancaman hukuman terhadap penerima
- Memutus konflik kepentingan
- Sebagai cerminan integritas individu

Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian gratifikasi adalah bagian dari upaya pembangunan suatu sistem pencegahan korupsi. Sistem ini bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi. Komitmen Pengendalian Gratifikasi merupakan salah satu tahapan penerapan pengendalian gratifikasi. Salah satu bukti komitmen Pos Indonesia terhadap adanya pengendalian gratifikasi yaitu dengan dibuatnya Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: 448/DEKOM/1221 dan Nomor KD.127/DIRUT/1221 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di PT Pos Indonesia (Persero). Pedoman ini disampaikan kepada seluruh jajaran pejabat dan pegawai, rekanan serta para pemangku kepentingan lainnya.

Komitmen Pengendalian Gratifikasi yang harus dimiliki semua stakeholders Pos Indonesia antara lain:

- Tidak menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga negara/pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestic atau asing;
- Tidak menerima gratifikasi yang dianggap suap dalam bentuk apapun terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- Menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi, termasuk melalui pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG);
- Menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- Menjaga kerahasiaan data pelapor dan memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor gratifikasi;
- Mengupayakan pencegahan korupsi dan/atau gratifikasi yang dianggap suap.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pemegang saham utama Pos Indonesia yaitu Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan bahwa proses pemilihan dan pengangkatan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan bebas dari praktek diskriminatif, terbuka, dan menjaga

keberagaman komposisi Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan PT Pos Indonesia (Persero). Dewan Komisaris yang dipilih adalah yang memenuhi syarat baik itu berdasarkan integritas, kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan oleh PT Pos Indonesia (Persero). Berikut Keberagaman komposisi Komisaris Berdasarkan pendidikan, usia, jenis kelamin, dan keahliannya :

No	Nama	Jabatan	Gender	Usia	Tingkat Pendidikan	Latar Belakang
1	Rhenald Kasali	Komisaris Utama	Pria	64 Tahun	Doktor	Ekonomi dan Bisnis
2	Gunawan Hutagalung	Komisaris	Pria	49 Tahun	Magister	Teknik Informatika
3	Robben Rico	Komisaris	Pria	44 Tahun	Doktor	Hukum, Administrasi, Ekonomi dan Bisnis
4	I Gde Made Kartikajaya	Komisaris	Pria	58 Tahun	Doktor	Ekonomi dan Bisnis
5	Muhammad Budi Djatmiko	Komisaris Independen	Pria	60 Tahun	Doktor	Ekonomi, Manajemen Strategik
6	Fauzi Baadilla	Komisaris Independen	Pria	45 Tahun	Strata 1	Seni, Teknik Informatika

KOMPOSISI DIREKSI

Sebagai perwujudan dari prinsip GCG dan penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam pemilihan dan pengangkatan Direksi, Pemegang Saham Pos Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk selalu terbuka dan tidak diskriminatif. Direksi yang diangkat telah melalui

proses seleksi sesuai dengan jabatan dan keahliannya, sehingga dipastikan memiliki integritas, kemampuan dan kompetensi yang baik dalam memimpin PT Pos Indonesia (Persero) menjadi pemenang di industrinya. Berikut Keberagaman komposisi Direksi Berdasarkan pendidikan, usia, jenis kelamin, dan keahliannya :

No	Nama	Jabatan	Gender	Usia	Tingkat Pendidikan	Latar Belakang
1	Faizal Rochmad Djoemadi	Direktur Utama	Pria	57 Tahun	Doktor	Telekomunikasi
2	Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman	Direktur Keuangan dan Manajemen resiko	Pria	61 Tahun	Magister	Keuangan
3	Tonggo Marbun	Direktur Bisnis Kurir dan Logistik	Pria	54 Tahun	Magister	Kepemimpinan dan Human Capital
4	Hariadi	Direktur Operasi dan Digital Services	Pria	45 Tahun	Magister	Logistik
5	Haris	Direktur Bisnis Jasa Keuangan	Pria	57 Tahun	Magister	Administrasi dan Manajemen
6	Prasabri Pesti	Direktur Business Development dan Portfolio Management	Pria	53 Tahun	Doktor	Manajemen
7	Asih Kurniasari Komar	Direktur Human Capital Management	Wanita	55 Tahun	Magister	Akuntansi, Keuangan, Hukum Bisnis

– Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan





TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Keberadaan PT Pos Indonesia (Persero) dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan perintis dalam sektor usaha yang saat ini banyak diminati oleh pihak swasta selain juga merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden.

Sebagai institusi bisnis PT Pos Indonesia (Persero) dituntut untuk dapat menghasilkan laba sebagaimana layaknya perusahaan-perusahaan bisnis lainnya. Namun di sisi lain, pada saat yang bersamaan PT Pos Indonesia (Persero) dituntut untuk berfungsi sebagai alat pembangunan nasional dan berperan sebagai institusi sosial (*public*). Peran sosial ini mengisyaratkan bukan saja pemilikan dan pengawasannya oleh publik tetapi juga menggambarkan konsep mengenai *public purpose* (sasarannya adalah masyarakat) dan *public interest* (orientasinya pada kepentingan masyarakat). Dengan demikian disadari bahwa posisi PT Pos Indonesia (Persero) ini ibarat memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi berperan sebagai institusi bisnis dan sisi lainnya berperan sebagai institusi sosial karena merupakan alat negara.

Dalam melakukan kegiatan usaha perusahaan tidak semata-mata hanya berorientasi pada aspek ekonomi berupa peraihan pendapatan dan peraihan laba namun juga harus tetap

memperhatikan hal-hal lain yang akan dan berdampak pada sosial dan lingkungan yang di timbulkan dimana usaha perusahaan berada. Hal lain bahwa dalam kegiatan usaha perusahaan harus memperhatikan juga faktor pembangunan usaha perusahaan yang berkelanjutan di mana perusahaan harus mampu menjamin kegiatan usaha perusahaan yang sehat dan dinamis serta peduli dengan lingkungan serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan dan pembangunan ekonomi nasional yang bisa dibuktikan dengan semakin baiknya tingkat kualitas hidup dari karyawan termasuk keluarganya serta masyarakat luas secara umum.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) merupakan salah satu kebijakan strategis perusahaan, sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak kegiatan operasional perusahaan dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, Operasi yang adil serta kewajiban untuk menyediakan tempat yang nyaman dan hubungan kerja yang baik dengan karyawan, mengutamakan terjaganya kesehatan dan keselamatan kerja serta terus-menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya.

PT Pos Indonesia (Persero) menjalankan program-program TJSL

sebagai wujud komitmen Perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan, hukum dan tata kelola bagi seluruh pemangku kepentingan serta dilaksanakan dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis Pos Indonesia.

Pelaksanaan program TJSL didasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

1. UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. UU No.40 Tahun 2007 tentang Perrseroan Terbatas;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Adapun tujuan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pos Indonesia (Persero) adalah:

1. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan;
2. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel;

3. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.

Dalam pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pos Indonesia (Persero) didasarkan pada prinsip:

1. Terintegrasi, yaitu berdasarkan analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan;
2. Terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan;
3. Terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan;
4. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Pelaksanaan program TJSL Pos Indonesia berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta berpedoman kepada ISO 26000 yang meliputi pada 7 core Subject , antara lain:

1. Tata kelola perusahaan
2. Hak asasi manusia
3. Praktek ketenagakerjaan
4. Lingkungan hidup
5. Praktek operasi yang adil
6. Isu-isu konsumen
7. Keterlibatan dan pengembangan komunitas

Dalam pelaksanaan TJSL Pos Indonesia mengacu pada 4 (empat) pilar yang meliputi Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan dan Pilar Hukum dan Tata Kelola. Terdapat 5 (lima) TPB yang akan dijalankan yaitu :

1. TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)
2. TPB 4 (Pendidikan Berkualitas)
3. TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)
4. TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim)
5. TPB 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh)

PT Pos Indonesia (Persero) membentuk 26 Unit kerja untuk melaksanakan program-program TJSL dan diharapkan dapat berkontribusi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan *stakeholder* lainnya di seluruh Indonesia.

Untuk mendukung program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang tepat sasaran sehingga tercipta hubungan yang sehat dan adil dengan seluruh pihak, maka PT Pos Indonesia (Persero) senantiasa melakukan berbagai langkah untuk mewujudkan komitmen dalam merepakan kebijakan dan tata kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan melalui beberapa langkah diantaranya :

1. Identifikasi dan kajian (*due diligence*) atas dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktifitas perusahaan dilakukan melalui metode survei, diskusi atau wawancara, dan riset.
2. Identifikasi tentang *stakeholder* penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari

kegiatan perusahaan. Sampai dengan saat ini, tidak terdapat *stakeholder* yang terdampak buruk dari kegiatan PT Pos Indonesia (Persero) baik dalam kegiatan operasi Perusahaan maupun kegiatan program sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan Perusahaan bahkan dampak positif dari operasi PT Pos Indonesia (Persero) yang telah menjangkau seluruh pelosok Indonesia dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam menjembatani keterbatasan akses yang ada.

3. Identifikasi dan solusi terkait isu-isu penting sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum dan tata kelola administrasi terkait dampak kegiatan perusahaan. PT Pos Indonesia (Persero) dalam menjalankan program TJSL selalu memperhatikan kondisi perekonomian dan keadaan lingkungan sekitar karena kondisi sosial ekonomi dan lingkungan yang beragam membutuhkan strategi dan penanganan yang berbeda pada setiap kondisi, hal ini terlihat dari mitra binaan PT Pos Indonesia (Persero) yang terdiri dari berbagai sektor industri dan skala ekonomi yang beragam.
4. Analisis lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban untuk memastikan bahwa Program TJSL yang dibuat sesuai dengan lingkup yang telah ditetapkan dan bermanfaat bagi sosial ekonomi maupun lingkungan yang menjadi target kegiatan.

Strategi dan Program kerja

Program TJSL PT Pos Indonesia (Persero) secara prinsipnya berpedoman pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan dilakukan dalam berbagai inisiatif yang berfokus pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, pengembangan sosial dan budaya masyarakat, peningkatan kualitas pengelolaan kesehatan, dan pendidikan. Strategi dan program yang dilaksanakan juga memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi kekinian dalam menangani isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam upaya *stakeholders engagement* dan meningkatkan *value* untuk *stakeholder* dan *shareholder*.

Dalam pelaksanaan TJSL PT Pos Indonesia (Persero) harus dilakukan secara sistematis terpadu untuk menjamin pelaksanaan dan pencapaian keberhasilan Program TJSL sesuai dengan prioritas dan/atau pencapaian dari tujuan Program TJSL yang berpedoman pada rencana kerja. Maka dalam penyusunan program kerja TJSL harus dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan;
3. Pengawasan; dan
4. Monitoring dan evaluasi.

Untuk menyusun program TJSL maka Perusahaan membentuk Komite TJSL dengan tujuan merumuskan pelaksanaan dari kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bagi lingkungan di

sekitar Perusahaan, dimana komite TJSL ini berfungsi :

1. Melakukan koordinasi antar unit/direktorat untuk merumuskan tujuan dan petunjuk pelaksanaan Program TJSL Perusahaan;
2. Melakukan pemetaan dan penyusunan Program TJSL Perusahaan;
3. Membantu Direksi dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL Perusahaan.

Pelaksanaan program TJSL yang dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia (Persero) terdiri dari:

1. Pemberian dalam bentuk bantuan modal kerja dan pembinaan bagi usaha mikro dan usaha kecil.
2. Pemberian bentuk bantuan atau kegiatan lainnya bagi masyarakat disekitar Perusahaan yang sifatnya sosial kemasyarakatan.

Sasaran kegiatan TJSL PT Pos Indonesia (Persero) adalah masyarakat sekitar, karyawan, dan pelanggan. Di samping itu, PT Pos Indonesia (Persero) juga berupaya merealisasikan program tanggung jawab sosial dalam penerapan hak asasi manusia dan pengelolaan operasi yang adil dalam kegiatan perusahaan. Berbagai strategi dan program kerja yang dilakukan antara lain:

1. Strategi yang dilakukan untuk kegiatan TJSL pilar sosial, lingkungan adalah bertumpu pada anggota/kelompok masyarakat yang benar-benar memerlukan bantuan untuk pemberdayaan yang diperoleh melalui kajian baik proposal maupun peninjauan lapangan.

2. Strategi untuk kegiatan TJSL pilar ekonomi adalah dengan melakukan selektivitas dalam menetapkan bidang usaha, wilayah dan pemilihan Mitra Binaan serta penyelarasan bidang usaha yang dapat mendukung langkah-langkah kegiatan usaha Perusahaan

Anggaran Biaya

Pelaksanaan program TJSL tahun 2024 berdasarkan Risalah RUPS Nomor : RIS-03/DSI.MBU.B/12/2023 tanggal 01 Desember 2023 tentang Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2024 antara lain :

1. Hasil pemetaan risiko atas aktivitas perusahaan ditetapkan 5 TPB RKA Tahun 2024 berdasarkan program TJSL Prioritas dan *Creating Shared Value* (CSV).
2. Pelaksanaan Program TJSL tahun 2024, dikelompokan dalam 4 pilar sebagai berikut :

NO	JENIS PILAR	RKA 2024 (RP)
1	Pilar Sosial	6.810.000.000
2	Pilar Ekonomi	15.985.000.000
3	Pilar Lingkungan	2.100.000.000
4	Pilar Hukum dan Tata Kelola	200.000.000
Jumlah		25.095.000.000

Program TJSL

1. Program TJSL non PUMK yang dijalankan unit Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (CID) yang diperhitungkan sebagai biaya pada laporan RKAP perusahaan tahun 2024 sebesar Rp 10.895.000.000,-.
2. Program TJSL yang merupakan pelaksanaan Program Pendanaan UMK tahun 2024 sebesar Rp 14.000.000.000,- yang bersumber dari dana bergulir (revolving) sampai dengan akhir tahun 2024 akan dilakukan kolaborasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).
3. Program TJSL Non CID sebesar yang diperhitungkan sebagai biaya pada laporan RKAP perusahaan tahun 2024 sebesar Rp 200.000.000,-.
4. Pengelompokan program TJSL tahun 2024 dengan prioritas TPB sebagai berikut :

a. Program prioritas di bidang pendidikan

No	Program Prioritas	Rp
1	GERNAS Baku	150.000.000
2	Sarana Pendidikan	150.000.000
3	Beasiswa Anak Pensiunan PT Pos	150.000.000
4	Beasiswa ULBI	300.000.000
5	Beasiswa Prestasi	200.000.000
Jumlah		950.000.000

b. Program prioritas di bidang lingkungan

No	Program Prioritas	Rp
1	Bantuan Program Reuse, Reduce & Recycle	300.000.000
2	Bantuan sarana umum	1.750.000.000
3	Green Economy	700.000.000
Jumlah		2.750.000.000

c. Program prioritas di bidang pengembangan UMK

No	Program Prioritas	Rp
1	Bantuan Kewirausahaan	600.000.000
2	Pameran UMK	400.000.000
3	Monitoring-Pengawasan Umum MB	657.000.000
4	Bantuan Sertifikat UMKM	200.000.000
Jumlah		1.857.000.000

d. Program TJSL yang berkomitmen mendukung bisnis inti dan menciptakan Creating Shared Value (CSV) bagi perusahaan

No	Program CSV	Rp
1	Pengelolaan Sampah	500.000.000
2	Bantuan penyediaan Ruang Publik	300.000.000
3	Program Beasiswa ULBI	300.000.000
Jumlah		1.100.000.000

1. KINERJA PROGRAM TJSL SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2024

Kinerja pelaksanaan TJSL sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan realisasi kegiatan TJSL berdasarkan TPB sampai dengan Triwulan IV jika dibandingkan dengan RKA tahun 2024 tercapai 88,75 %. Data seperti pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel Gambaran TPB Keseluruhan yang dilaksanakan PT Pos Indonesia (Persero)

No	TPB	RKA TAHUN 2024	RKA s.d TW IV Th 2024	Realisasi s.d TW IV Th 2024	Persentase Capaian		Divisi Pemilik Sumber Anggaran
					Real/RKA Th 2024	Real/RKA s.d TW IV Th 2024	
1	2	3	4	5	(6) = (5/3)	(7) = (5/4)	8
A	PILAR SOSIAL	6.810.000.000	6.810.000.000	6.486.162.088	95.24	95.24	
1	TPB 3	5.860.000.000	5.860.000.000	5.101.624.985	87.06	87.06	TJSL
	- Bantuan sarana Disabilitas & manula	500.000.000	500.000.000	406.226.610			
	- Bantuan bencana alam	800.000.000	800.000.000	388.491.000			
	- Bantuan sarana ibadah	1.000.000.000	1.000.000.000	2.168.073.655			
	- Bantuan sarana umum	2.500.000.000	2.500.000.000	2.024.503.920			
	- Bantuan ketahanan pangan	460.000.000	460.000.000	30.229.800			
	- Bantuan penyediaan ruang publik	300.000.000	300.000.000				
	- Bantuan prasarana olahraga	300.000.000	300.000.000	84.100.000			
2	TPB 4	950.000.000	950.000.000	1.384.537.103	145.74	145.74	TJSL
	- GERNAS Baku	150.000.000	150.000.000	182.358.450			
	- Sarana Pendidikan	150.000.000	150.000.000	675.652.653			
	- Beasiswa Anak Pensiunan PT Pos	150.000.000	150.000.000	150.634.500			
	- Beasiswa ULBI	300.000.000	300.000.000	300.000.000			
	- Beasiswa Prestasi	200.000.000	200.000.000	75.891.500			
B	PILAR EKONOMI	15.985.000.000	15.985.000.000	15.271.040.428	95.53	95.53	
1	TPB 8	15.985.000.000	15.985.000.000	15.271.040.428	95.53	95.53	TJSL
	- Program TJSL Pendanaan UMK	1.985.000.000	1.985.000.000	2.571.040.428			
	- Monitoring-Pengawasan Umum MB	685.000.000	685.000.000	748.763.306			
	- Bantuan Kewirausahaan	600.000.000	600.000.000	921.544.873			
	- Pameran UMK	400.000.000	400.000.000	750.732.249			
	- Bantuan Sertifikasi UMKM	200.000.000	200.000.000	150.000.000			
	- Bantuan Pelatihan & Service Excellence	100.000.000	100.000.000				
	Kolaborasi dengan BRI	14.000.000.000	14.000.000.000	12.700.000.000	90.71	90.71	
C	PILAR LINGKUNGAN	2.100.000.000	2.100.000.000	477.632.442	22.74	22.74	
1	TPB 13	2.100.000.000	2.100.000.000	477.632.442			TJSL
	- Bantuan program Reuse, Reduce & Recycle	300.000.000	300.000.000	156.214.442			
	- Green Economy	700.000.000	700.000.000	321.409.000			
	- Program Dampak perubahan iklim El Nino	1.100.000.000	1.100.000.000				
D	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	200.000.000	200.000.000	37.105.237	18.55	18.55	
1	TPB 16	200.000.000	200.000.000	37.105.237			TJSL
	- Bantuan perpanjangan SIM untuk driver dan oranger	100.000.000	100.000.000	37.105.237			
	- Bantuan jaminan Ketenagakerjaan	100.000.000	100.000.000				
Jumlah		25.095.000.000	25.095.000.000	22.271.931.195	88.75	88.75	

Tabel Rekapitulasi Penggunaan dana TJSL 2024

No	Rekapitulasi Penggunaan Dana TJSL	RKA Tahun 2024	RKA s.d TW IV Th 2024	Realisasi s.d TW IV Th 2024	Persentase Capaian RKA Tahun 2024
1	Program CID	10.895.000.000	10.895.000.000	9.534.825.988	87,52%
2	Program Non CID	200.000.000	200.000.000	37.105.237	18,55%
3	Penyaluran Kolaborasi dengan BRI	14.000.000.000	14.000.000.000	12.700.000.000	90,71%
Jumlah		25.095.000.000	25.095.000.000	22.271.931.195	

Kegiatan-kegiatan TJSL berdasarkan masing-masing pilar sebagai berikut :

- i. Pilar Sosial terserap sebesar Rp 6.486.162.088,- atau 95,24% dari total RKA 2024.
 - ii. Pilar Ekonomi terserap sebesar Rp 15.271.040.428,- atau 95,53% dari total RKA 2024.
 - iii. Pilar Lingkungan terserap sebesar Rp 477.623.442,- atau 22,74% dari total RKA 2024.
 - iv. Pilar Hukum dan Tata Kelola terserap sebesar Rp 37.105.237,- atau 18,55% dari total RKA 2024.
- b. Pelaksanaan kegiatan program *Create Share Value* yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV tahun 2024. Data seperti pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel Program *Create Share Value*

No	Program	RKA Tahun 2024	RKA s.d Triw IV Tahun 2024	Realisasi s.d Triw IV Tahun 2024	Nilai Manfaat CSV bagi Perusahaan
1	Pengelolaan Sampah	500.000.000	500.000.000	255.000.000	Nilai manfaat CSV dalam program ini sebesar Rp 661.875.000,-
2	Bantuan penyediaan Ruang Publik	300.000.000	300.000.000		
3	Program Beasiswa ULBI	300.000.000	300.000.000	300.000.000	
Jumlah		1.100.000.000	1.100.000.000	555.000.000	

Pada Triwulan IV tahun 2024 program CSV realisasi sebesar Rp 555.000.000,-.

Perhitungan CSV Program Beasiswa ULBI

No	Financial Proxy			Qty	Location	Proxy Value (Rp)	Total Value (Rp)	Adjustment Value				Total Value
	Benefit	Proxy Value	Jenis Proxy					Dead-weight	Displacement	Attribution	Drop-Off	
1	Meringankan biaya pendidikan mahasiswa	Pemberian beasiswa untuk 150 mahasiswa ikatan dinas per tahun senilai Rp 300.000.000,-	Cash Transaction	150	ULBI	2.000.000	300.000.000	0%	0%	0%	0%	300.000.000
2	Peningkatan minat pendaftar	Dengan adanya promosi program ini terjadi peningkatan minat pendaftaran calon mahasiswa/i baru di ULBI sebanyak 400%. Rata-rata biaya promosi per-media seperti stand pameran, baliho, sosial media ads sebesar Rp 20.000.000,-	Resource Allocation	4	ULBI	20.000.000	80.000.000	25%	0%	0%	0%	60.000.000
3	Efisiensi Biaya Rekrutmen	Lulusan program beasiswa ikatan dinas yang direkrut menjadi pegawai PosIND	Cash Transaction	150	ULBI	3.200.000	480.000.000	0%	0%	0%	0%	480.000.000
4	Efisiensi Biaya Pelatihan	Biaya yang dihemat perusahaan karena penerima beasiswa langsung menjadi tenaga kerja tanpa perlu proses rekrutmen dan pelatihan awal besar-besaran	Revealed Preferences	150	ULBI	250.000	37.500.000	0%	0%	0%	0%	37.500.000
5	Penghematan turn over pegawai	Penerima beasiswa biasanya memiliki ikatan moral dan formal untuk bekerja di perusahaan setelah lulus dengan ikatan dinas, sehingga turn over karyawan lebih rendah dibanding tenaga kerja biasa. Dengan estimasi turn over 5% dan biaya pergantian per-karyawan sebesar Rp 20.000.000,-	Cash Transaction	150	ULBI	1.000.000	150.000.000	25%	25%	25%	0%	84.375.000
TOTAL (2+3+4+5) :												661.875.000

Pelaksanaan Program Prioritas TJSL yang sudah dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV tahun 2024. Data seperti pada tabel di bawah ini

Tabel Program Prioritas di Bidang Pendidikan

No	Program Prioritas	TPB	RKA Tahun 2024 (Rp)	RKA s.d Triw IV Tahun 2024 (Rp)	Realisasi s.d Triw IV Tahun 2024 (Rp)
1	GERNAS Baku	4	150.000.000	150.000.000	182.358.450
2	Sarana Pendidikan	4	150.000.000	150.000.000	675.652.653
3	Beasiswa Anak Pensiunan PT Pos	4	150.000.000	150.000.000	150.634.500
4	Beasiswa ULBI	4	300.000.000	300.000.000	300.000.000
5	Beasiswa Prestasi	4	200.000.000	200.000.000	75.891.500
Jumlah			950.000.000	950.000.000	1.384.537.103

Pada Program Prioritas di bidang Pendidikan sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 1.384.537.103,- atau sebesar 145,74% dari RKA tahun 2024.

Tabel Program Prioritas di Bidang Lingkungan

No	Program Prioritas	TPB	RKA Tahun 2024 (Rp)	RKA s.d Triw IV Tahun 2024 (Rp)	Realisasi s.d Triw IV Tahun 2024 (Rp)
1	Bantuan Program Reuse. Reduce & Recycle	13	300.000.000	300.000.000	156.214.442
2	Bantuan Sarana Umum	3	1.750.000.000	1.750.000.000	2.024.503.920
3	Green Economy	13	700.000.000	700.000.000	321.409.000
Jumlah			2.750.000.000	2.750.000.000	2.502.127.362

Pada Program Prioritas di bidang Lingkungan sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 2.502.127.362,- atau sebesar 90,99% dari RKA tahun 2024.

Tabel Program Prioritas di Bidang Pengembangan UMK

No	Program Prioritas	TPB	RKA Tahun 2024 (Rp)	RKA s.d Triw IV Tahun 2024 (Rp)	Realisasi s.d Triw IV Tahun 2024 (Rp)
1	Bantuan Kewirausahaan	8	600.000.000	600.000.000	921.544.873
2	Pameran UMK	8	400.000.000	400.000.000	750.732.249
3	Monitoring-Pengawasan Umum MB	8	657.000.000	657.000.000	748.763.306
4	Bantuan Sertifikat UMKM	8	200.000.000	200.000.000	150.000.000
Jumlah			1.857.000.000	1.857.000.000	2.571.040.428

Pada Program Prioritas di bidang Pengembangan UMK sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 2.571.040.428,- atau sebesar 138,45% dari RKA tahun 2024.

3. KINERJA PROGRAM PUMK SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2024

1.1. Laporan Sumber Dana dan Penggunaan Dana

Pendanaan UMK dalam rangka pemberian bantuan pendanaan modal kerja bagi para UMK dilakukan kolaborasi dengan BRI yang bersumber dari dana bergulir dan jasa administrasi yang diterima dari Mitra Binaan.

Tabel Realisasi Sumber Dana dan Penggunaan Dana

No	Uraian	Program UMK		
		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi s.d Triw IV 2024 (Rp)	%
A. Dana Tersedia :				
1	Saldo Awal (SETARA KAS)	2.975.120.624	2.550.878.685	0.00
2	Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan	12.000.000.000	10.404.955.192	86.71
3	Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	900.000.000	513.595.667	57.07
4	Pendapatan Jasa Giro Bank	4.800.000	5.748.443	0.00
5	Pendapatan Lainnya			0.00
6	Titipan Lainnya		226.124.547	
	Dana Tersedia (jumlah 1 s.d. 6)	15.879.920.624	13.701.302.534	86.28
B. Penggunaan Dana				
1	Penyaluran Pinjaman kepada Mitra			
2	Penyaluran Kolaborasi BRI	14.000.000.000	12.700.000.000	90.71
3	Piutang Lain-lain			
	Jumlah Penggunaan Dana (jumlah 1 s.d. 3)	14.000.000.000	12.700.000.000	90.71
	Sisa Saldo Akhir (A - B)	1.879.920.624	1.001.302.534	

Dana tersedia sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp 13.701.302.534,- yang bersumber dari saldo awal tahun 2024 sebesar Rp 2.550.878.685,- pengembalian pinjaman mitra binaan sebesar Rp 10.404.955.192,- atau 86,71%, jasa administrasi sebesar Rp 513.595.667,- atau 57,07% dan pendapatan jasa giro bank sebesar Rp 5.748.443,-.

Dana penyaluran kolaborasi ke BRI sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp 12.700.000.000,-. Sisa saldo kas dan setara kas s.d Triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp 1.001.302.534,-.

1.2. Laporan Keuangan PUMK

1.2.1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan Komparatif sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 seperti tabel berikut :

Tabel Laporan Posisi Keuangan Komparatif

URAIAN	30/9 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2024	Presentase Capaian	Presentase Capaian
	1	2	3	(3 : 1)	(3 : 2)
ASET LANCAR					
Kas dan Setara Kas	1.879.920.624	2.550.878.684	1.001.302.534	53%	39,25%
Piutang Pinjaman Umum MB - Bersih	4.944.089.078	12.553.209.722	2.844.865.368	58%	23%
Piutang Pinjaman Khusus - Bersih	-	-	-	0%	0%
Piutang Lain-lain Bersih	274.011.861	497.047.669	226.450.565	82,64%	45,56%
JUMLAH ASET LANCAR	7.098.021.563	15.601.136.075	4.072.618.467	57%	26%
ASET TIDAK LANCAR					
Aset Tetap Bersih	1	1	1	100%	100%
Aset Lain-lain					
Aset tidak berwujud (SIM PKBL)	1	1	1	0%	0%
Piutang Bermasalah	83.566.132.834	83.478.878.571	99,90%	99,90%	
Akun Penyusutan Piutang Bermasalah	(83.566.132.834)	(83.478.878.571)	99,90%	99,83%	
Piutang Jangka Panjang	38.211.536.599	24.094.016.266	36.803.118.468	96,31%	152,75%
Jumlah Aset Lain-lain	38.211.536.599	24.094.016.267	36.803.118.467	96,31%	152,75%
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	38.211.536.600	24.094.016.268	36.803.118.468	96,31%	152,75%
JUMLAH ASET	45.309.558.163	39.695.152.343	40.875.736.933	90,21	102,97
LIABILITAS DAN ASET NETO					
LIABILITAS					
Utang Lain-lain	0	90.979.721	46.507.164	0,00%	51%
Kelebihan Pembayaran Angsuran	481.772.544	431.032.945	456.167.844	94,69%	105,83%
JUMLAH LIABILITAS	481.772.544	522.012.666	502.675.008	104,34%	96,30%
ASET NETO					
Aset Neto Tidak Terikat	44.827.785.620	39.079.123.412	39.928.983.738	89,07%	102,17%
Aset Neto Terikat	-	-	-	-	-
JUMLAH ASET NETO	44.827.785.620	39.079.123.412	39.928.983.738	89,07%	102,17%
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO	45.309.558.164	39.601.136.078	40.431.658.747	89,23%	102,10%

Berdasarkan data tabel di atas perbandingan realisasi kas dan setara kas sampai dengan Triwulan IV antara tahun 2023 dengan tahun 2024 sebesar 39,25% yaitu realisasi tahun 2024 sebesar Rp 1.001.302.534,- dan tahun 2023 sebesar Rp 2.550.878.684,-.

1.2.2. Laporan Aktivitas

Laporan Aktivitas sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 seperti tabel dibawah ini :

Tabel Laporan Aktivitas

URAIAN	RKA 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2024	Presentase Capaian	Presentase Capaian
	1	2	3	3:01	3 : 2
PENDAPATAN					
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	1.017.520.333	1.209.898.528	513.595.667	50,48	42,45
Pemulihan cadangan penurunan nilai piutang pinjaman khusus	-	-	-	-	-
Pendapatan Bunga	4.800.000	5,587,990	5,748,443	119,76	102,87
Pendapatan Lain-lain	-	6.447.284	-	0,00%	0,00%
JUMLAH PENDAPATAN	1.022.320.333	1.315.950.068	834.546.000	81,63%	63,42%
BEBAN					
Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman	(3.526.612.989)	1.815.863.320	(671.475.938)	19,04%	(36,98%)
Beban amortisasi aset tdk berwujud	-	-	-	0,00%	0,00%
Beban Hibah BRI	-	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH BEBAN	(3.526.612.989)	1.815.863.320	(330.516.216)	9,37	(18,20%)
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO TIDAK TERIKAT	4.548.933.321	(593.929.518)	849.860.326	18,68%	243,09%
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	4.548.933.321	(593.929.518)	849.860.326	18,68%	243,09%
ASET NETO AWAL TAHUN	40.278.852.298	39.673.052.930	39.079.123.412	97,02%	98,50%
ASET NETO AKHIR TAHUN	44.827.785.620	39.079.123.412	39.928.983.738	89,07%	102,17%

Secara umum aset neto akhir tahun sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar Rp39.928.983,- yang jika dibandingkan dengan RKA tahun 2024 sebesar Rp 44.827.785.620,- maka pencapaiannya sebesar 89,07%. Pencapaian pendapatan Jasa Administrasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 adalah Sebesar 50,48% dari RKA Tahun 2024.

1.2.3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, seperti tabel di bawah ini:

Tabel Laporan Arus Kas

URAIAN	RKA 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2024	Presentase Capaian	Presentase Capaian
	1	2	3	3:1	3 : 2
AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan pengembalian piutang umum MB	11.940.000.000	14.673.164.818	10.239.333.125	85,76%	69,78%
Penerimaan pengembalian piutang khusus MB	-	-	-	-	-
Penerimaan pengembalian piutang Bermasalah	60.000.000	101.714.665	140.487.168	234,15%	138,12%
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	900.000.000	1.209.898.528	513.595.667	0,57	42,45%
Pendapatan bunga jasa giro	4.800.000	5.587.990	5.748.443	119,76%	102,87%
Pendapatan lain-lain	-	6.447.284	-	0,00%	0,00%
(Pembayaran) penerimaan kelebihan angsuran	-	26.667.833	25.134.899	94,25%	-
(Pembayaran) penerimaan premi asuransi penyaluran	-	-	-	0,00%	0,00%
(Pembayaran) penerimaan utang lain-lain	-	(72.760.669)	(44.472.557)	61,12%	-
(Pembayaran) Piutang Lain-Lain	-	1.223.226.682	270.597.104	22,12%	-
Penyaluran Pinjaman Kemitraan secara Mandiri	-	-	-	0,00%	0,00%
Penyaluran Kerjasama BRI	(14.000.000.000)	(17.000.000.000)	(12.700.000.000)	90,71%	74,71%
Penyaluran dana pembinaan UMK					0,00%
KAS NETO DITERIMA (DIGUNAKAN) UNTUK AKTIVITAS OPERASI (1)	(1.095.200.000)	173.947.131	(1.549.576.151)	141,49%	-890,83%
AKTIVITAS INVESTASI					
KAS NETO DITERIMA (DIGUNAKAN) UNTUK AKTIVITAS INVESTASI (2)	-	-	-	0,00%	0,00%
AKTIVITAS PENDANAAN					
Beban Hibah BRI *	-	-	-	0,00%	0,00%
KAS NETO DITERIMA (DIGUNAKAN) UNTUK AKTIVITAS (3)	-	-	-	0,00%	0,00%
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS (4=1+2+3)	(1.095.200.000)	173.947.131	(1.549.576.151)	141,49%	-890,83%
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN (5)	2.975.120.624	2.376.931.553	2.550.878.685	85,74%	107,32%
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN (6=4+5)	1.879.920.624	2.550.878.684	1.001.302.534	53,26%	39,25%

Berdasarkan tabel di atas arus kas dari pendanaan UMK sangat besar dipengaruhi oleh adanya kolektabilitas piutang yang diterima atas angsuran dari UMK mitra binaan.

1.2.4. Kolektibilitas Piutang

Kolektabilitas piutang atas pendanaan UMK sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 seperti tabel di bawah ini:

Tabel Kolektabilitas Piutang dan Piutang Bermasalah

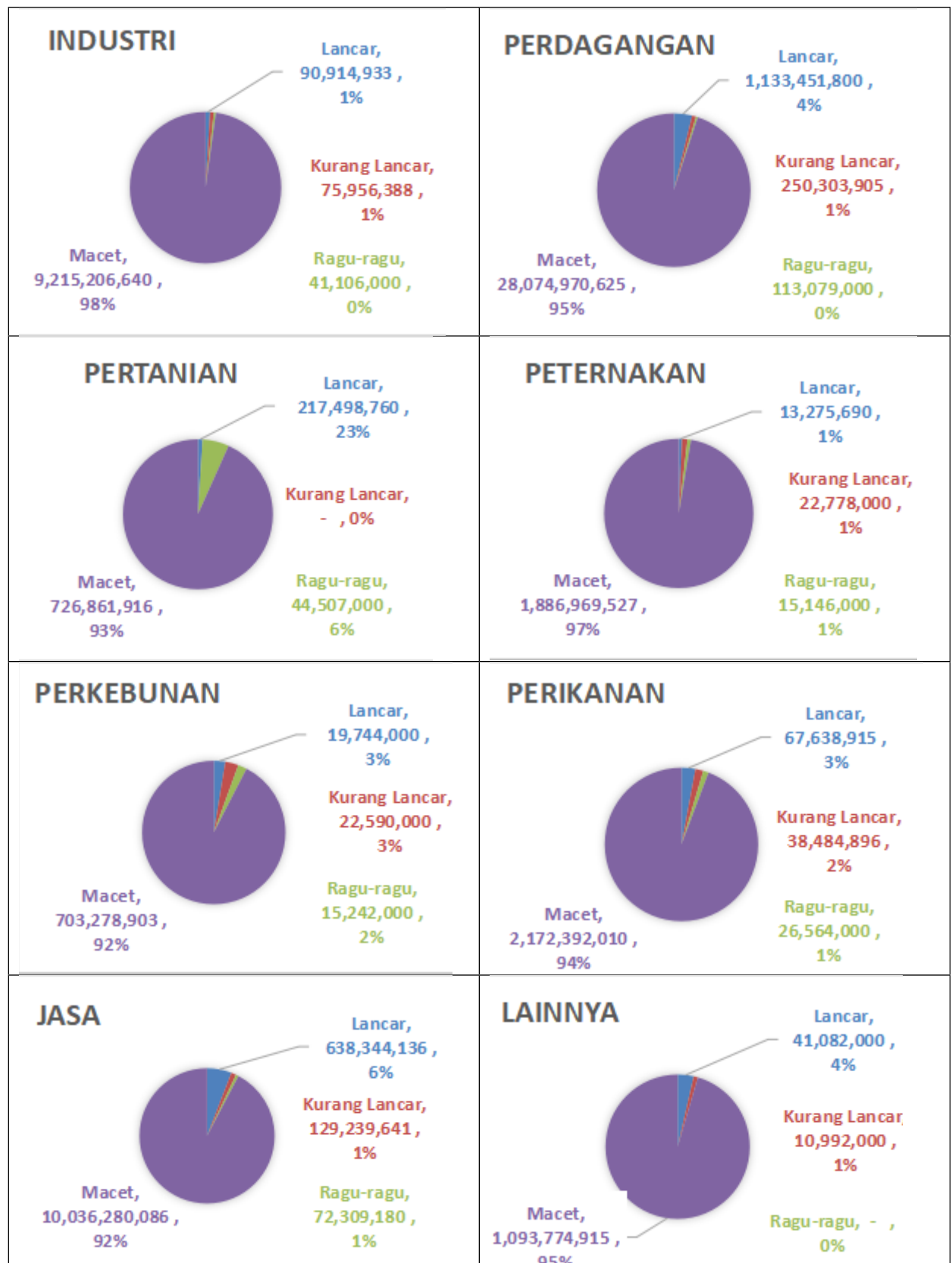
URAIAN	RKA 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2024	Presentase Capaian	Presentase Capaian
	1	2	3	3:1	3:2
1. Kolektibilitas Piutang					
Lancar	7.640.802.893	8.030.985.381	2.012.289.176	26,34%	25,06%
Kurang Lancar	4.188.262.947	2.757.568.084	550.344.830	13,14%	19,96%
Ragu-ragu	1.926.172.837	2.133.450.880	327.953.180	17,03%	15,37%
Macet	53.277.390.791	54.117.650.588	53.909.734.622	101,19%	99,62%
Jumlah 1	67.032.629.468	67.039.654.933	56.800.321.808	84,74%	84,73%
2. Piutang Bermasalah	83.626.132.483	83.619.365.739	83.478.878.572	99,82%	99,83%
Jumlah (1+2)	150.658.761.951	150.659.020.672	140.279.200.381	93,11%	93,11%

Pencapaian kolektabilitas piutang umum dan piutang bermasalah sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 sebesar 93,11% dari RKA tahun 2024 dan 93,11% dari realisasi untuk periode yang sama tahun 2023.

Tabel Kolektibilitas Piutang Umum berdasarkan Sektor Usaha

No	Sektor	Lancar		Kurang Lancar		Ragu-Ragu		Macet		Jumlah	
		MB	Rp	MB	Rp	MB	Rp	MB	Rp	MB	Rp
1	Industri	13	90.914.933	6	75.956.388	2	41.106.000	881	9.215.206.640	902	9.423.183.961
2	Perdagangan	111	1.133.451.800	19	250.303.905	9	113.079.000	2.858	28.074.970.625	2.997	29.571.805.330
3	Pertanian	2	7.837.702	-	-	1	44.507.000	79	726.861.916	82	779.206.618
4	Peternakan	11	13.275.690	1	22.778.000	1	15.146.000	170	1.886.969.527	183	1.938.169.217
5	Perkebunan	3	19.744.000	2	22.590.000	1	15.242.000	58	703.278.903	64	760.854.903
6	Perikanan	7	67.638.915	4	38.484.896	2	26.564.000	151	2.172.392.010	164	2.305.079.821
7	Jasa	47	638.344.136	9	129.239.641	3	72.309.180	972	10.036.280.086	1.031	10.876.173.043
8	Lainnya	4	41.082.000	1	10.992.000	-	-	103	1.093.774.915	108	1.145.848.915
Jumlah		198	2.012.289.176	42	550.344.830	19	327.953.180	5.272	53.909.734.622	5.531	56.800.321.808

Diagram Kolektibilitas Piutang Umum s.d Triwulan IV tahun 2024 berdasarkan sektor usaha



5. KPI Program TJSL sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Bobot	Skor	Nilai
1	Melakukan pengukuran dampak terhadap program TJSL dengan metode Sosial Return on Investment	1. Program Penyediaan Ruang Publik (CSV)	6%	0	0
		2. Pengelolaan Sampah (CSV)	4%	100	4
		3. Program Beasiswa ULBI (CSV)	10%	100	10
2	Menetapkan kebijakan leveling unit kerja TJSL menjadi setingkat BOD-1 atau disesuaikan dengan hasil kajian terkait hal tersebut	BOD-1 (dalam kajian) Dmk Surat Kementrian No. S-683/MBU/10/2022 tgl 24-10-2022	20%	100	20
3	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam program TJSL, termasuk untuk pemenuhan pengisian sistem informasi berbasis	1. Laporan Triwulanan	5%	100	5
		2. Laporan Audited	5%	100	5
		3. Laporan Prognosa	5%	100	5
		4. Laporan RKA	5%	100	5
4	Meningkatkan kolaborasi antar BUMN maupun dengan pihak lain yang sesuai kompetensinya dalam	1. Beasiswa Anak Berprestasi (Pendidikan)	6%	100	6
		2. Air Bersih (Lingkungan)	7%	100	7
		3. Bantuan Pameran UMK (Pengembangan UMK)	7%	100	7
5	Melibatkan peran serta karyawan secara aktif dalam program TJSL	Keterlibatan 15.000 orang Karyawan	20%	100	20
Jumlah					94

7. Pembinaan UMK yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

- 1) Kegiatan monitoring dilakukan kepada 2.280 Mitra Binaan di 19 Unit TJSLD selama Triwulan IV tahun 2024, terlampir pada Lampiran I
- 2) Anggaran atas pelaksanaan kegiatan monitoring, pelatihan dan pameran sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp 2.571.040.428,- dan realisasi program bantuan lain sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp 7.000.890.767,- yang diambil dari anggaran perusahaan.
- 3) Mitra binaan naik kelas sebanyak 38 Mitra binaan.
- 4) Kegiatan-kegiatan pembinaan UMK ini sebagaimana dalam bentuk dokumentasi terlampir pada Lampiran II.

LAMPIRAN I

RINCIAN KEGIATAN PEMBINAAN UMK

1. Monitoring dan Pengawasan Umum sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 yaitu dilaksanakan sebagai berikut :
Monitoring dan pengawasan umum dilakukan di 19 (Sembilan belas) unit, yaitu terdiri dari :
 - a. TJS LD Palangkaraya
 - b. TJS LD Pontianak
 - c. TJS LD Palembang
 - d. TJS LD Batam
 - e. TJS LD Samarinda
 - f. TJS LD Bandar Lampung
 - g. TJS LD Surabaya
 - h. TJS LD Banda Aceh
 - i. TJS LD Padang
 - j. TJS LD Pekanbaru
 - k. TJS LD Ambon
 - l. TJS LD Kendari
 - m. TJS LD Yogyakarta
 - n. TJS LD Denpasar
 - o. TJS LD Palembang
 - p. TJS LD Makassar
 - q. TJS LD Medan
 - r. TJS LD Jakarta
 - s. TJS LD Bandung
2. Pameran selama Triwulan IV Tahun 2024 dilaksanakan di Bandung, Medan, Cirebon, Yogyakarta, Semarang dan Solo, dengan mengikutsertakan 60 Mitra Binaan.

LAMPIRAN II

Dokumentasi Kegiatan Pembinaan UMK Mitra Binaan PT Pos Indonesia

A. KEGIATAN PAMERAN UMKM



Pameran Bandung ICONIC X STUNTING - Bandung



Pameran dan Bazaar Basket Ball ULBI - Bandung

B. KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN & PELATIHAN



Pelatihan Hidroponik Bagi Karyawan Pos Menjelang Pensiun – TJSLD Bandung

C. KEGIATAN WASUM DAN MONITORING



Wasum dan Monitoring – TJSLD Bandung



Wasum Dan Monitoring – TJSLD Jakarta



D. KEGIATAN BANTUAN LAINNYA



Bantuan Bakti Sosial Bencana gempa bumi di pangalengan Jawa Barat



Bantuan Bedah Rumah Pensiunan Pos Wilsus Kantor Pusat Bandung a.n Bpk Ihim



Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Karang Setia – Cikarang, Jawa Barat

Penggunaan Energi Listrik

Penggunaan listrik oleh PT Pos Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari operasional kantor hingga armada kendaraan. Saat ini, PT Pos Indonesia mulai beralih ke kendaraan listrik dan memanfaatkan energi terbarukan seperti tenaga surya untuk mengurangi emisi karbon dan operasional yang lebih efisien.

Berikut adalah rincian penggunaan listrik PT Pos Indonesia:

- **Kendaraan Operasional:**

PT Pos Indonesia secara bertahap mengganti armada kendaraan konvensional berbahan bakar bensin dengan kendaraan listrik, seperti motor listrik dan mobil listrik, untuk operasional kurir dan logistik.

- **Energi Terbarukan:**

Beberapa kantor pos, terutama di Bali, telah memasang panel surya (PLTS) untuk memanfaatkan energi matahari sebagai sumber energi.

- **Infrastruktur Kantor:**

Selain kendaraan, PT Pos Indonesia juga mulai menyediakan infrastruktur pendukung kendaraan listrik seperti wall charging di kantor pusat dan stasiun penukaran baterai (BEX) di kantor pos.

- **Efisiensi Energi:**

PT Pos Indonesia berupaya meningkatkan efisiensi penggunaan energi di kantor-kantor mereka, termasuk penggunaan sistem tadah hujan dan peralihan penggunaan air minum kemasan ke air minum gelas.

Tujuan dari penggunaan energi bersih dan kendaraan listrik ini adalah:

- **Mengurangi Emisi Karbon:**

Dengan beralih ke kendaraan listrik dan energi terbarukan, PT Pos Indonesia berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak negatif terhadap lingkungan.

- **Efisiensi Biaya:**

Penggunaan energi listrik dan kendaraan listrik dapat mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang.

- **Mendukung Program Pemerintah:**

PT Pos Indonesia juga mendukung program pemerintah dalam transisi energi bersih dan kendaraan listrik.



Dengan langkah-langkah ini, PT Pos Indonesia berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan operasional perusahaan yang lebih berkelanjutan.

Berikut terlampir penggunaan energi listrik pada PT Pos Indonesia (dalam rupiah)

Regional 1	6.093.158.299
Regional 2	6.520.821.800
Regional 3	2.184.073.357
Regional 4	3.895.574.611
Regional 5	4.875.766.677
Regional 6	5.508.296.870
kantor pusat	517.167.420
Total	29.594.859.034

Penggunaan Air

PT Pos Indonesia, sebagai perusahaan BUMN, memiliki beberapa inisiatif terkait penggunaan sumber daya air, termasuk penerapan teknologi *rainfed architecture* untuk pemanfaatan air hujan dan program CSR untuk penyediaan air bersih.

Berikut adalah beberapa poin terkait penggunaan sumber daya air oleh PT Pos Indonesia:

- **Rainfed Architecture:**

PT Pos Indonesia menerapkan "rainfed architecture" untuk mendaur ulang air hujan menjadi air bersih yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada sumber air bersih konvensional.

- **Program CSR:**

PT Pos Indonesia juga terlibat dalam berbagai program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berfokus pada penyediaan akses air bersih. Salah satu contohnya adalah proyek penyediaan air bersih di Sentani, Papua, yang didanai melalui program CSR.

- **Jangkauan Layanan:**

PT Pos Indonesia memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia, hal ini memungkinkan perusahaan untuk menjangkau berbagai daerah dan menjalankan program-program terkait sumber daya air di berbagai lokasi.

- **Evolusi Layanan:**

Selain layanan pos dan kurir, PT Pos Indonesia juga mengembangkan layanan keuangan, ritel, dan properti. Ini menunjukkan bahwa perusahaan terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya air.

Berikut terlampir penggunaan sumber daya air pada PT Pos Indonesia (dalam rupiah)

Regional 1	754.494.213
Regional 2	329.359.618
Regional 3	233.305.422
Regional 4	473.284.274
Regional 5	707.030.698
Regional 6	840.096.465
kantor pusat	41.386.800
Total	3.378.957.490

POS iND

Logistik Indonesia



Lampiran A

Laporan Keuangan Konsolidasi

PT POS INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS*
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024/
As of and For the Year Ended December 31, 2024
dan/*and*

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/*INDEPENDENT AUDITORS' REPORT*

**PT POS INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**DAFTAR ISI/
TABLE OF CONTENTS**

Halaman/
Page

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

STATEMENT OF DIRECTOR

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024

*As of And For the Year Ended
December 31, 2024*

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 3	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4 - 5	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	7 - 8	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	9 - 129	<i>Notes to Consolidated Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA/
DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND 2023
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Faizal Rochmad Djoemadi	:	Name
Alamat Kantor	:	Jl. Banda No. 73 Bandung	:	Office Address
Alamat Rumah	:	Jl. Terusan Sutami I No. 6 RT/RW 005/003, Sukagalih, Sukajadi, Bandung, Jawa Barat	:	Domicile Address
Nomor Telepon	:	022-4206195	:	Telephone Number
Jabatan	:	Direktur Utama/ President Director	:	Position
Nama	:	Endy P.R. Abdurrahman	:	Name
Alamat Kantor	:	Jl. Banda No. 73 Bandung	:	Office Address
Alamat Rumah	:	Jl. Durian Barat III No. 3 RT/RW 006/004, Jagakarsa, Jakarta Selatan	:	Domicile Address
Nomor Telepon	:	022-4206195	:	Telephone Number
Jabatan	:	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/ Finance and Risk Management Director	:	Position

Menyatakan bahwa:

State that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Pos Indonesia (Persero) dan Entitas Anaknya;
1. *We are responsible in the preparation and the presentation of the consolidated financial statements of PT Pos Indonesia (Persero) and its Subsidiaries;*
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Pos Indonesia (Persero) dan Entitas Anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
2. *The consolidated financial statements of PT Pos Indonesia (Persero) and its Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
- 3.a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Pos Indonesia (Persero) dan Entitas Anaknya telah dimuat secara lengkap dan benar;
- 3.a. *All information in the consolidated financial statements of PT Pos Indonesia (Persero) and its Subsidiaries has been disclosed in a complete and truthful manner;*
- b. Laporan keuangan konsolidasian PT Pos Indonesia (Persero) dan Entitas Anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
- b. *The consolidated financial statements of PT Pos Indonesia (Persero) and its Subsidiaries do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact; and*
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Pos Indonesia (Persero) dan Entitas Anaknya.
4. *We are responsible for PT Pos Indonesia (Persero) and its Subsidiaries internal control system.*

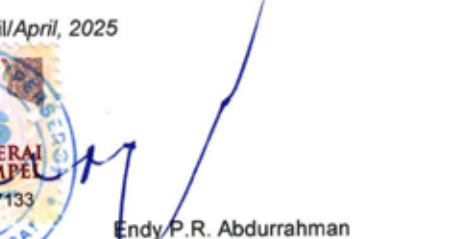
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Bandung, 8 April/April, 2025


Faizal Rochmad Djoemadi
Direktur Utama/ President Director




Endy P.R. Abdurrahman
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/
Finance and Risk Management Director

PT Pos Indonesia (Persero)
Graha Pos Indonesia
Jalan Banda Nomor 30 Bandung 40115
Telp. 022-4213640, 4213641, 4213646
Faks. 022-4267725, 022-4267744
<http://www.posindonesia.co.id>

158

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Laporan No: 00139/3.0357/AU.1/05/0127-1/1/IV/2025

Report No: 00139/3.0357/AU.1/05/0127-1/1/IV/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

The Shareholders, Board of Commissioners and Directors

PT POS INDONESIA (PERSERO)**PT POS INDONESIA (PERSERO)****Opini****Opinion**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pos Indonesia (Persero) dan Entitas Anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Pos Indonesia (Persero) and its subsidiaries "the Group", which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2024, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2024, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis Opini**Basis for Opinion**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Laporan No: 00139/3.0357/AU.1/05/0127-1/1/IV/2025

Report No: 00139/3.0357/AU.1/05/0127-1/1/IV/2025

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Cadangan untuk Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") atas Piutang Usaha

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup mencatat piutang usaha sebesar Rp531.593.829.126, yang mencakup 3,23% dari total aset Grup, dengan total cadangan KKE sebesar Rp194.662.553.192.

Sesuai dengan PSAK 109, "Instrumen Keuangan", Grup menentukan KKE dengan menerapkan pendekatan yang disederhanakan, yang menggunakan KKE sepanjang umur dengan basis masa depan. Tingkat KKE adalah berdasarkan pengalaman gagal bayar dari kelompok segmen pelanggan yang memiliki risiko kredit yang sama, disesuaikan dengan informasi masa depan. Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 3 atas laporan keuangan konsolidasian, penilaian ini melibatkan pertimbangan manajemen dan estimasi yang signifikan.

Pengungkapan Grup mengenai piutang usaha dijelaskan dalam Catatan 7 atas laporan keuangan konsolidasian.

Bagaimana Audit Kami Merespon Hal Audit Utama

Kami telah melaksanakan prosedur dengan memahami dan mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal Grup yang relevan sehubungan dengan penyisihan KKE atas piutang.

Kami mengevaluasi keakuratan dan kelengkapan data yang digunakan dalam model KKE dan memeriksa keakuratan matematis dari perhitungan tersebut.

Kami mengevaluasi kewajaran dari model KKE yang diadopsi manajemen dan asumsi utama (yaitu definisi gagal bayar, pengelompokan pelanggan, karakteristik risiko kredit, dan informasi masa depan) yang digunakan manajemen untuk mengestimasi cadangan KKE.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Allowance for Expected Credit Losses ("ECL") on Trade Receivables

As at December 31, 2024, the Group has trade receivables amounted to Rp531,593,829,126, which accounted for approximately 3.23% of the Group total assets, with total corresponding allowance for ECL of Rp194,662,553,192.

In accordance with SFAS 109, "Financial Instruments", the Group determines ECL by applying the simplified approach, which uses a lifetime ECL on a forward-looking basis. The ECL rates are based on historical defaults rates from groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics, adjusted with forward looking information. As disclosed in Note 3 to the consolidated financial statements, these assessments involve significant management judgment and estimates.

The Group disclosures on the trade receivables are set out in Note 7 to the consolidated financial statements.

How our audit addressed the Key Audit Matter

We performed procedures to understand and evaluate the design and implementation of the Group relevant controls in respect of the allowance for ECL on the receivables.

We evaluated accuracy and completeness of data used in the ECL model and checked mathematical accuracy of the calculation.

We evaluated the reasonableness of key assumptions (i.e. definition of default, grouping of various customer segments, credit risk characteristics, and forward-looking information) used by management to estimate the allowance for ECL.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Laporan No: 00139/3.0357/AU.1/05/0127-1/1/IV/2025

Report No: 00139/3.0357/AU.1/05/0127-1/1/IV/2025

Penilaian Properti Investasi Pada Nilai Wajar**Valuation Of Investment Properties at Fair Value**

Grup mencatat properti investasinya dengan model nilai wajar. Properti investasi yang terdiri dari tanah dan bangunan, dilaporkan sebesar Rp6.785.059.730.800 yang mencakup 41,21% dari total aset Grup. Penilaian aset ini memerlukan bantuan penilai eksternal yang perhitungannya dilakukan dengan pendekatan biaya dan pendekatan pasar. Hal ini penting bagi audit kami karena melibatkan pertimbangan dan estimasi yang signifikan.

The Group accounts for its investment properties using fair value model. Investment properties consist of land and building are reported at Rp6,785,059,730,800 which represents 41.21% of the Group's total assets. The valuation of these assets requires assistance of external appraisers whose assessment is carried out using cost approach and market approach. This matter is significant to our audit because it involves significant judgment and estimates.

Pengungkapan yang berkaitan dengan jumlah nilai wajar disajikan dalam Catatan 12 atas laporan keuangan konsolidasian.

The disclosures relating to fair value amounts are included in Note 12 to the consolidated financial statements.

Bagaimana Audit Kami Merespon Hal Audit Utama**How Our Audit Addressed the Key Audit Matter**

Kami menelaah ruang lingkup, dasar, metodologi, dan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penilai eksternal yang kualifikasi profesional dan objektivitasnya juga dipertimbangkan. Kami membandingkan informasi relevan yang mendukung harga pasar properti serupa dan penyesuaian yang dilakukan terhadap harga pasar. Kami juga meninjau pengungkapan sehubungan dengan nilai wajar aset tersebut.

We reviewed the scope, bases, methodology, and results of the work done by external appraisers whose professional qualifications and objectivity were also taken into consideration. We compared the relevant information supporting to the market price of similar properties and the adjustments made to the market price. We also reviewed disclosures with respect to the fair value of these assets.

Hal Lain**Other Matter**

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian tersebut pada tanggal 26 Maret 2024.

The consolidated financial statements of the Group as at December 31, 2023 and for the year then ended were audited by other independent auditor who expressed an unmodified opinion on those consolidated financial statements on March 26, 2024.

Informasi Lain**Other Information**

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the consolidated financial statement and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain dan kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Laporan No: 00139/3.0357/AU.1/05/0127-1/1/IV/2025

Report No: 00139/3.0357/AU.1/05/0127-1/1/IV/2025

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakakonsistenan material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materiality inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materiality misstated.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian**Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan Keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No: 00139/3.0357/AU.1/05/0127-1/1/IV/2025

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan penungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report No: 00139/3.0357/AU.1/05/0127-1/1/IV/2025

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Laporan No: 00139/3.0357/AU.1/05/0127-1/1/IV/2025

Report No: 00139/3.0357/AU.1/05/0127-1/1/IV/2025

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian – Lanjutan**Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements – Continued**

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggungjawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Laporan No: 00139/3.0357/AU.1/05/0127-1/1/IV/2025

Report No: 00139/3.0357/AU.1/05/0127-1/1/IV/2025

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian – Lanjutan

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements – Continued

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KANAKA PURADIREDDA, SUHARTONO



Desman P.L. Tobing, CPA

Nomor Izin Akuntan Publik No. AP. 0127

License of Public Accountant No. AP. 0127

8 April 2025 / April 8, 2025



(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	3,6,30	2.063.363.227.142	2.653.918.421.743	Cash and Cash Equivalents
Bank				
yang Dibatasi Penggunaannya		33.073.529.725	-	Restricted Bank
Piutang Usaha - Bersih	3,7,30	336.931.275.934	385.402.397.127	Trade Receivables - Net
Persediaan	3,8	34.743.695.888	43.640.166.880	Inventories
Pendapatan yang Masih				
Harus Diterima	9,3	1.016.837.478.050	930.909.600.985	Accrued Revenues
Pajak dibayar dimuka	3,16a	1.506.984.961	592.283.336	Prepaid Taxes
Aset lancar lainnya:				Other Current Assets:
Piutang Layanan				Receivable from
Jasa Keuangan	10a,30	2.011.539.275.002	880.739.688.637	Financial Services
Lainnya	10b	2.338.569.956.643	477.498.955.501	Others
Jumlah Aset Lancar		7.836.565.423.345	5.372.701.514.209	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Penyertaan saham		774.306.716	-	Investment
Taksiran Tagihan				Estimated Claim
Pajak Penghasilan	16f	84.292.629.255	52.552.484.634	for Tax Refund
Aset Tetap - Bersih	3,11	1.162.999.687.246	1.035.327.898.488	Fixed Assets - Net
Properti Investasi	3,12	6.785.059.730.800	6.586.760.726.000	Investment Properties
Aset Takberwujud - Bersih	3,13	121.774.971.326	111.965.551.053	Intangible Assets - Net
Aset Pajak Tangguhan	3,16d	370.705.541.962	388.117.276.057	Deferred Tax Assets
Aset Tidak Lancar Lainnya	14	103.665.446.567	111.413.796.667	Other Non-current Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		8.629.272.313.872	8.286.137.732.899	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		16.465.837.737.217	13.658.839.247.108	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas Jangka Pendek				Current Liabilities
Utang Usaha	3,15,30	651.416.992.385	474.354.916.682	Trade Payables
Utang Pajak	3,16b	76.892.446.168	60.569.447.017	Taxes Payable
Utang Lain-lain	17	722.423.584.092	753.828.360.808	Other Payables
Pinjaman Bank Jangka Pendek	3,18,30	4.421.133.369.864	2.285.604.000.000	Short-term Bank Loans
Pinjaman Jangka Panjang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun:				Current Maturities of Long-term Loans
MTN	19b,30	-	323.361.458.333	MTN
Obligasi	3,19b,30	99.469.166.668	-	Bonds
Liabilitas Sewa	3,19a,30	42.139.256.365	7.734.098.789	Lease Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		6.013.474.815.542	3.905.452.281.629	Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang				Non-current Liabilities
Pinjaman Jangka Panjang-setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun:				Long-Term Loans-Net of Current Maturities:
Obligasi	3,19b,30	398.080.833.339	495.100.000.000	Bonds
Liabilitas Sewa	3,19a,30	88.782.484.359	15.194.867.976	Lease Liabilities
Liabilitas Imbalan Kerja	3,20	1.011.325.062.209	1.108.026.778.901	Employee Benefits Liability
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		1.498.188.379.907	1.618.321.646.877	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		7.511.663.195.449	5.523.773.928.506	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham -				Share Capital -
Nilai Nominal Rp1.000.000				par value Rp1,000,000
per Lembar Saham				per Share
Modal dasar 1.500.000				Authorized Capital
Lembar Saham				1,500,000 Shares
Modal Ditempatkan dan				Capital Issued and
Disetor Penuh Sebesar				Fully Paid
455.023 Lembar Saham	3,21a	455.023.000.000	455.023.000.000	455,023 Shares
Tambahan Modal Disetor	21b	2.344.427.566	2.344.427.566	Additional Paid-In Capital
Saldo Laba				Retained Earnings
Telah Ditentukan				
Penggunaannya		4.019.922.826.530	3.264.314.544.470	Appropriated
Belum Ditentukan				
Penggunaannya		726.936.851.666	755.630.126.731	Unappropriated
Komponen Ekuitas Lainnya	21c	3.794.785.432.195	3.702.780.917.128	Other Equity Component
Jumlah Ekuitas yang				Total Equity Attributable
Dapat Diatribusikan				to Owners of the Parent Entity
kepada Pemilik Entitas Induk		8.999.012.537.957	8.180.093.015.895	Non-Controlling Interest
Kepentingan Non-Pengendali	21d	(44.837.996.189)	(45.027.697.293)	
TOTAL EKUITAS		8.954.174.541.768	8.135.065.318.602	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS				TOTAL LIABILITIES
DAN EKUITAS		16.465.837.737.217	13.658.839.247.108	AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
PENDAPATAN	3,22	5.017.861.008.697	5.479.121.136.675	REVENUES
BEBAN POKOK LAYANAN	3,23	<u>(3.030.806.140.057)</u>	<u>(3.680.789.445.438)</u>	COST OF SERVICES
LABA KOTOR		1.987.054.868.640	1.798.331.691.237	GROSS PROFIT
Beban Pemasaran	3,24	(35.211.233.641)	(70.260.445.072)	Marketing Expenses
Beban Umum dan Administrasi	3,24	(1.159.917.022.630)	(1.110.990.406.688)	General Administrative Expenses
Pendapatan Lainnya	3,25	618.118.287.330	628.728.086.809	Other Income
Beban Lainnya	3,25	<u>(261.185.716.080)</u>	<u>(325.829.958.948)</u>	Other Expenses
LABA USAHA		1.148.859.183.619	919.978.967.338	PROFIT FROM OPERATIONS
Pendapatan Keuangan	3,26	31.530.854.114	43.561.402.355	Finance Income
Beban Keuangan	3,26	<u>(439.234.217.673)</u>	<u>(261.648.866.909)</u>	Finance Costs
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		741.155.820.060	701.891.502.784	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Pajak Kini	3,16c	(2.551.203.481)	(1.395.271.987)	Current Income Tax
Pajak Tangguhan	3,16d	<u>8.529.860.855</u>	<u>27.718.412.803</u>	Deferred Tax
LABA TAHUN BERJALAN		747.134.477.434	728.214.643.600	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				OTHER COMPREHENSIVE INCOME:
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:				Item That Will Not Be Reclassified to Profit or Loss:
Pengukuran Kembali atas Liabilitas Imbalan Kerja	3,20,21c	117.931.585.665	57.572.938.850	Remeasurement of Employee Benefits Obligation
Revaluasi Aset	3,21c	-	412.370.729.903	Asset Revaluation
Pajak Penghasilan Terkait	3,16d	<u>(25.956.839.934)</u>	<u>(12.666.046.547)</u>	Related Income Tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>839.109.223.165</u>	<u>1.185.492.265.806</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (CONTINUED)
December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
LABA TAHUN BERJALAN				
YANG DAPAT				
DIATRIBUSIKAN				PROFIT FOR THE YEAR
KEPADA:				ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		746.936.851.666	748.699.105.099	Owners of the Parent Entity
Kepentingan Non-Pengendali		197.625.768	(20.484.461.499)	Non-Controlling Interest
		747.134.477.434	728.214.643.600	
JUMLAH LABA				
KOMPREHENSIF				
TAHUN BERJALAN				
YANG DAPAT				TOTAL COMPREHENSIVE
DIATRIBUSIKAN KEPADA:				INCOME FOR THE YEAR
KEPADA:				ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		838.941.366.733	1.205.988.688.940	Owners of the Parent Entity
Kepentingan Non-Pengendali		167.856.432	(20.496.423.134)	Non-Controlling Interest
		839.109.223.165	1.185.492.265.806	
LABA PER SAHAM DASAR		1,64	1,60	BASIC
				EARNINGS PER SHARE

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to Owners of the Parent Entity											
	Saldo Laba/Retained Earnings			Pengukuran Kembali			Revaluasi Aset Tetap/ Revaluation of Fixed Assets	Jumlah Komponen Ekuitas Lainnya/ Total Other Equity Component		Kepentingan Non-Pengendali/ Non-Controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity
	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Sudah Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated	Jumlah/Total	Imbalan Kerja/ Remeasurement of Benefit Obligation	Total					
	Modal Saham/ Share Capital										
SALDO PER 31 DESEMBER 2022	455.023.000.000	2.613.945.107.772	650.369.436.698	3.264.314.544.470	(120.026.621.099)	3.365.475.909.885	3.245.449.288.786	6.967.131.260.822	(17.558.208.026)	6.949.573.052.796	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2022
Saldo Laba Sudah Ditentukan Penggunaannya		650.369.436.698	(650.369.436.698)	-	-	-	-	-	(20.484.461.499)	728.214.643.600	Appropriated Retained Earnings Profit for the Period
Laba Periode Berjalan			748.699.105.099	748.699.105.099	-	-	-	748.699.105.099	(6.996.989.403)	-	Other Comprehensive Income for the Year
Penyesuaian			6.931.021.632	6.931.021.632	65.967.771	65.967.771	65.967.771	6.996.989.403	-	-	
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan				-	44.894.930.668	412.370.729.903	457.265.660.571	457.265.660.571	11.961.635	457.277.622.206	
SALDO PER 31 DESEMBER 2023	455.023.000.000	2.344.427.566	755.630.126.731	4.019.944.671.201	(75.065.722.660)	3.777.846.639.788	3.702.780.917.128	8.180.093.015.895	(45.027.697.293)	8.135.065.318.602	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2023
Saldo Laba Sudah Ditentukan Penggunaannya	-	755.630.126.731	(755.630.126.731)	-	-	-	-	-	-	-	Appropriated Retained Earnings Profit for the Year
Laba Tahun Berjalan	-	-	746.936.851.666	746.936.851.666	-	-	-	746.936.851.666	197.625.769	747.134.477.435	
Dividen	-	-	(20.000.000.000)	(20.000.000.000)	-	-	-	(20.000.000.000)	-	(20.000.000.000)	
Penyesuaian	-	-	(21.844.671)	(21.844.671)	-	-	-	(21.844.671)	21.844.671	-	Adjustment Other Comprehensive Income for the Year
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	-	-	-	-	92.004.515.067	-	92.004.515.067	92.004.515.067	(29.769.336)	91.974.745.731	
SALDO PER 31 DESEMBER 2024	455.023.000.000	2.344.427.566	4.019.924.2826.530	4.746.859.678.196	16.938.792.407	3.777.846.639.788	3.794.785.432.195	8.999.012.537.957	(44.837.996.189)	8.954.174.541.768	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2024

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan		5.135.768.429.416	5.098.572.466.567	Cash Received from Customers
Pembayaran Kas kepada Karyawan		(2.285.727.332.109)	(2.443.222.218.208)	Cash Paid to Employees
Pembayaran Kas kepada Pemasok		(4.045.634.540.049)	(2.525.387.089.876)	Cash Paid to Suppliers
Pembayaran Biaya Pemasaran		-	(67.290.010.927)	Payment of Marketing Cost
Pembayaran Pajak		(8.619.025.061)	(11.655.877.865)	Payment of Tax
Penerimaan Restitusi Pajak		(351.810.448)	15.773.122.481	Receipt from Tax Restitution
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		(1.204.564.278.251)	66.790.392.172	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan Aset Tetap dan Aset Takberwujud		(60.348.487.012)	(239.519.595.872)	Acquisition of Fixed Assets and Intangible Assets
Pelepasan Aset Tetap		-	10.890.179.193	Disposal of Fixed Assets
Pelepasan Aset Lain-lain		6.136.800.000	-	Disposal of Other Assets
Pembayaran Dividen		(20.000.000.000)	-	Dividend Payment
Penempatan Bank Garansi		(4.046.482.399)	(95.719.129.156)	Placement Bank Guarantee
Pencairan Bank Garansi		-	100.460.056.756	Withdrawal Bank Guarantee
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi		(78.258.169.411)	(223.888.489.079)	Net Cash Flows Provided by Investing Activities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
CASH FLOWS (CONTINUED)

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pencairan Pinjaman				Drawdown of
Bank Jangka Pendek		15.503.800.000.000	10.024.000.000.000	Short-Term Bank Loans
Pembayaran Pinjaman				Payment of
Bank Jangka Pendek		(13.709.587.821.338)	(8.529.000.000.000)	Short-Term Bank Loans
Pembayaran Pinjaman				Payment of
Bank Jangka Panjang		-	(87.500.000.000)	Long-Term Bank Loans
Pembayaran Bunga Pinjaman		(405.754.936.393)	(251.090.088.514)	Payment of Interest
Pembayaran				Payment of Consumer
Liabilitas Sewa		(10.719.707.191)	(26.249.201.993)	Lease Liabilities
Pembayaran				Payment of
Utang Lain-lain		(81.454.761)	-	Other Payables
Pendanaan Entitas Anak		21.503.552.284	-	Subsidiary Funding
Pembayaran Pemegang Saham		(26.063.111.120)	-	Shareholder Payments
Layanan Jasa Keuangan		(301.202.074.981)	(621.824.422.566)	Financial Services
Pendanaan Lainnya		(388.585.650.488)	-	Other Financing
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi		683.308.796.012	508.336.286.927	Net Cash Provided by Investing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(599.513.651.650)	351.238.190.020	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Dampak dari Perubahan				Exchange Rates
Kurs Terhadap Kas				Fluctuation Effects
dan Setara Kas		8.958.457.049	876.920.800	on Cash and Cash Equivalents
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	6	2.653.918.421.743	2.301.803.310.923	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	6	2.063.363.227.142	2.653.918.421.743	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Entitas

Kantor pos pertama di Indonesia didirikan di Batavia oleh Gubernur Jenderal GW Baron, pada tanggal 26 Agustus 1746 yang pada waktu itu bernama Jawatan PTT. Terjadi pengambilalihan Kantor Pusat PTT di Bandung oleh Angkatan Muda PTT dari pemerintah militer Jepang. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Bakti Postel. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 240 tahun 1961, status Jawatan PTT berubah menjadi Perseroan Negara (PN) Pos dan Telekomunikasi. Pada tahun 1965, PN Pos dan Telekomunikasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu PN Pos dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965, dan PN Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1965. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1978 mengubah status PN Pos dan Giro menjadi Perseroan Umum (Perum) Pos dan Giro. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 tanggal 27 Februari 1995, Perum Pos dan Giro yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1984 dialihkan bentuknya menjadi Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara. Anggaran Dasar disusun sesuai dengan materi yang digariskan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1995, bahwa Perusahaan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan:

- 1) Usaha jasa pos dan giro
- 2) Usaha-usaha lain yang menunjang penyelenggaraan usaha jasa pos dan giro sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) ("Perusahaan") ditetapkan dengan Akta Notaris Achmad Abid, S.H., sebagai pengganti Notaris Sutjipto, S.H., No. 117 tanggal 20 Juni 1995 yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8182 HT.01.01 tahun 1995 tanggal 29 Juni 1995 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 Tambahan No. 7039 tanggal 22 Agustus 1995.

Anggaran Dasar Perusahaan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terhadap UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah dilakukan sesuai dengan Akta No. 164 tanggal 15 Agustus 2008 di hadapan Notaris Sutjipto, S.H. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-78035.AH.01.02.TH.2008 tanggal 24 Desember 2008.

Perubahan terakhir dengan Akta Notaris No. 5 tanggal 5 Agustus 2024 oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., di Jakarta mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham terkait Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. Perubahan tersebut mencakup, antara lain, penyesuaian Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero). Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0019573.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 5 Agustus 2024.

1. GENERAL

a. The Entity's Establishment

The first post office in Indonesia was established in Batavia by Governor General GW Baron on August 26, 1746. Which was then was called Bureau PTT. PTT Headquarter in Bandung was taken over by the Young Generation PTT from the Japanese military government. This date is celebrated as Postel Service Day (Hari Bakti Postel). Based on Government Regulation No. 240 of 1961, the status of PTT Bureau was changed into a State Enterprise (PN) Post and Telecommunications. In 1965, PN Post and Telecommunications was divided into two part, namely PN Post and Giro based on Government Regulation No. 29 of 1965, and PN Telecommunications based on Government Regulation No. 30 of 1965. Government Regulation No. 9 of 1978 changed the status of PN Post and Giro into Perum (Public Company) Post and Giro. Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 5 dated February 27, 1995, Perum Post and Giro which was established through Government Regulation No. 24 of 1984 was changed its form to Limited Company as defined in Law No. 9 of 1969 regarding Stipulation of Government Regulation in lieu of Law No. 1 of 1969 on State Business Forms. The Articles of Association were prepared in accordance with the material outlined in the Government Regulation No. 5 of 1995, wherein the Company was established with the sole purpose of conducting:

- 1) Post and giro services
- 2) Other businesses that support the implementation of postal and giro services in accordance with laws and regulations.

The Articles of Association of PT Pos Indonesia (Persero) ("the Company") were stipulated based on Notarial Deed No. 117 of Achmad Abid, S.H., in lieu of Notary Sutjipto, S.H., dated June 20, 1995, which was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia on in his Decree No. C2-8182 HT.01.01 of 1995 dated June 29, 1995 and was published in the State Gazette No. 67 of the Republic of Indonesia Supplement No. 7039 dated August 22, 1995.

The Company Articles of Association have been amended several times. Amendments to the Company's articles of associations in accordance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies have been made in accordance with deed No. 164 dated August 15, 2008 before notary Sutjipto, S.H., and was approved by Ministry of Law and Human Rights through his degree No. AHU-78035.AH.01.02.TH.2008 dated December 24, 2008.

The latest amendment was in year 2024 by Notarial Deed No. 5 of Notary Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., a notary in Bogor, dated August 5, 2024, regarding the Statement of Shareholders Decision related to the Amendment of the Article of Association of the Company. The amendments include among others, the amendment of Nomenclature Position, Transfer of Tasks, and Appointment of Board of Commissioners of the Company. The deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision No. AHU-0019573.ah.01.11. Year 2024 dated August 5, 2024.

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian Entitas (Lanjutan)

PT Pos Indonesia (Persero) tidak memiliki entitas induk atau merupakan entitas induk terakhir. Perseroan memiliki tiga entitas anak, yaitu PT Pos Finansial Indonesia, PT Pos Logistik Indonesia, dan PT Pos Properti Indonesia.

Perusahaan berdomisili di Bandung dengan kantor pusat di Jalan Banda No. 30, Citarum, Bandung Wetan.

b. Maksud dan Tujuan Perusahaan

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan antara lain meliputi bidang usaha jasa pos dan giro termasuk jasa keuangan secara tunai maupun berbasis giro (account) bidang usaha jasa komunikasi, jasa logistik, jasa retail, jasa keagenan dan jasa-jasa lain yang menunjang penyelenggaraan usaha jasa pos dan giro sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bidang usaha pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki untuk menunjang kegiatan usaha Perusahaan.

c. Merk dan Logo

Perusahaan telah melakukan perubahan merek dan logo baru yang telah disetujui oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dengan Nomor Surat: S-532/MBU/10/2023 perihal Persetujuan Perubahan Merek dan Logo PT Pos Indonesia (Persero) tanggal 23 Oktober 2023.

d. Struktur Organisasi, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

1) Usaha jasa pos dan giro

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Perusahaan memiliki wilayah kerja dan lokasi regional sebagai berikut:

- i. Regional 1 Medan 20004 meliputi wilayah kerja Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung.
- ii. Regional 2 Jakarta 10004 meliputi wilayah kerja Provinsi DKI Jakarta dan Banten, kota Bogor, Bekasi dan Depok.
- iii. Regional 3 Bandung 40004 meliputi wilayah kerja Provinsi Jawa Barat.
- iv. Regional 4 Semarang 50004 meliputi wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- v. Regional 5 Surabaya 60004 meliputi wilayah kerja Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
- vi. Regional 6 Makassar 90004 meliputi wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

1. GENERAL (Continued)

a. The Entity's Establishment (Continued)

PT Pos Indonesia (Persero) does not have a parent or ultimate parent. The Company has three subsidiaries, PT Pos Finansial Indonesia, PT Pos Logistik Indonesia, and PT Pos Properti Indonesia.

The Company is domiciled in Bandung with its headquarter at Jalan Banda No. 30, Citarum, Bandung Wetan.

b. Purposes and Objectives of the Company

According to Article 3 of the Articles of Association, the Company's scope of business activities includes postal and giro services which include financial services of cash-based or giro-based accounts, business communications services, logistics services, retail services, agency services and other services that support the execution of postal and giro services in accordance with the existing legislation and utilization and development of its resources to support the Company's business activities.

c. Brand and Logo

The Company has made changes to its brand and new Company logo which have been approved by the Minister of State-Owned Enterprises with Letter No.: S-532/MBU/10/2023 regarding Approval of Changes to the Brand and Logo of PT Pos Indonesia (Persero) dated October 23, 2023.

d. Organization Structure, Board of Commissioners, Directors and Employees

1) Post and giro services

In conducting its activities, the Company has regional working territories as follows:

- i. Regional 1 in Medan 20004 consists of working area Province of Nanggroe Aceh Darussalam, North Sumatera, West Sumatera, Riau, Riau Islands, South Sumatera, Jambi, Lampung, Bengkulu and Bangka Belitung Islands.
- ii. Regional 2 in Jakarta 10004 consists of working area Province of DKI Jakarta and Banten, City of Serang, Bogor, Bekasi and Depok.
- iii. Regional 3 in Bandung 40004 consists of working area Province of West Java.
- iv. Regional 4 in Semarang 50004 consists of working area Province of Central Java and Special Province of Yogyakarta.
- v. Regional 5 in Surabaya 60004 consists of working area Province of East Java, Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara.
- vi. Regional 6 in Makassar 90004 consists of working area Province of West Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan, East Kalimantan, South Sulawesi, Southeast Sulawesi, West Sulawesi, North Sulawesi, Central Sulawesi, Gorontalo, Maluku, North Maluku, Papua dan West Papua.

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

d. Struktur Organisasi, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (Lanjutan)

d. Organization Structure, Board of Commissioners, Directors and Employees (Continued)

2) Dewan Komisaris dan Direksi

2) Board of Commissioners and Director

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-261/MBU/09/2023 tanggal 21 September 2023, Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 11 tanggal 24 Januari 2024, dan yang terakhir Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 5 tanggal 5 Agustus 2024, susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-261/MBU/09/2023 dated September 21, 2023, Statement of Shareholders' Decision No. 11 dated January 24, 2024, and last Statement of Shareholders' Decision No. 5 dated August 5, 2024, the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2024 and 2023 is as follows:

	5 Agustus - 31 Desember/ August 5 - December 31, 2024	24 Januari - 4 Agustus/ January 24 - August 4, 2024	1 Januari - 23 Januari/ January 1 - January 23, 2024	
Dewan Komisaris				Board of Commissioners
Komisaris Utama	Rhenald Kasali	Rhenald Kasali	Rhenald Kasali	President Commissioner
Komisaris Independen	Muhammad Budi Djatmiko	-	Condro Kirono	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Fauzi Baadilla	-	-	Independent Commissioner
Komisaris	I Gde Made Kartikajaya	I Gde Made Kartikajaya	Robben Rico	Commissioner
Komisaris	Robben Rico	Robben Rico	Guntur Iman Nefianto	Commissioner
Komisaris	-	Guntur Iman Nefianto	Gunawan Hutagalung	Commissioner
Komisaris	Gunawan Hutagalung	Gunawan Hutagalung	-	Commissioner

2023

Dewan Komisaris				Board of Commissioners
Komisaris Utama		Rhenald Kasali		President Commissioner
Komisaris Independen		Condro Kirono		Independent Commissioner
Komisaris		Robben Rico		Commissioner
Komisaris		Guntur Iman Nefianto		Commissioner
Komisaris		Gunawan Hutagalung		Commissioner

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-154/MBU/07/2022 dan yang terakhir SK-260/MBU/09/2023 tanggal 21 September 2023, susunan Dewan Direksi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No.: SK 154/MBU/07/2022 and most recently SK-260/MBU/09/2023 dated September 21, 2023, the composition of the Board of Directors as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	5 Agustus - 31 Desember/ August 5 - December 31, 2024	24 Januari - 4 Agustus/ January 24 - August 4, 2024	1 Januari - 23 Januari/ January 1 - January 23, 2024	
Dewan Direksi				Board of Directors
Direktur Utama	Faizal Rochmad Djoemadi	Faizal Rochmad Djoemadi	Faizal Rochmad Djoemadi	President Director
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Endy P.R. Abdurrahman	Endy P.R. Abdurrahman	Endy P.R. Abdurrahman	Director of Finance and Risk Management
Direktur Bisnis Kurir dan Logistik	Tonggo Marbun	Tonggo Marbun	Siti Choiriana	Director of Courier and Logistic Business
Direktur Bisnis Jasa Keuangan	Haris	Haris	Haris	Director of Finance Services Business
Direktur Human Capital Management	Asih Kumiasari Komar	Asih Kumiasari Komar	Tonggo Marbun	Director of Human Capital Management
Direktur Business Development dan Portofolio Management	Prasabri Pesti	Prasabri Pesti	Prasabri Pesti	Director of Business Development and Portofolio Management
Direktur Operasi dan Teknologi Informasi	Hariadi	Hariadi	Hariadi	Director of Operation and Information Technology

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

d. Struktur Organisasi, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (Lanjutan)

3) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi, Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit PT Pos Indonesia (Persero) No. 233/DEKOM/0923 tanggal 27 September 2023, dan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-56/DEKOM/0424 tanggal 28 Agustus 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan ketua komite audit PT Pos Indonesia (Persero), memberhentikan dengan hormat Sdr. Robben Rico dan mengangkat Sdr. Muhammad Budi Djatmiko sebagai ketua merangkap anggota Komite Audit PT Pos Indonesia (Persero).

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

	2024
<u>Komite Audit</u>	
Ketua	Muhammad Budi Djatmiko
Anggota	Prasojo
Anggota	Venoneta Monetera
Anggota	Robben Rico

Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi PT Pos Indonesia (Persero) No. 90/DEKOM/0724 tanggal 15 Juli 2024 memberhentikan dengan hormat Sdr. Ahmad Syarif Munawi dan mengangkat Sdr. Dewi Hanggraeni sebagai anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi PT Pos Indonesia (Persero).

Susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi (KPMRUI) per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

	2024
<u>Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi</u>	
Ketua	Gunawan Hutagalung
Anggota	Saiful
Anggota	Dewi Hanggraeni

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perubahan terakhir Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan No. SK-57/DEKOM/0424 tanggal 26 April 2024 memberhentikan dengan hormat Sdr. Robben Rico dan mengangkat Sdr. I Gde Made Kartikajaya sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan.

1. GENERAL (Continued)

d. Organization Structure, Board of Commissioners, Directors and Employees (Continued)

3) Audit Committee, Business and Investment Risk Management Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee

Audit Committee

Based on the Decree of the Board of Commissioners concerning the Dismissal and Appointment of the Chairman of the Audit Committee of PT Pos Indonesia (Persero) No. 233/DEKOM/0923 dated September 27, 2023, and the latest based on the Decree of the Board of Commissioners Number SK-56/DEKOM/0424 dated August 28, 2024 concerning the dismissal and appointment of the chairman of the audit committee of PT Pos Indonesia (Persero), honorably dismiss Mr. Robben Rico and appoint Mr. Muhammad Budi Djatmiko as chairman and concurrent member of the Audit Committee of PT Pos Indonesia (Persero).

The composition of the Audit Committee as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2023	<u>Audit Committee</u>
Guntur Iman Nefianto		Chairman
Prasojo		Member
Venoneta Monetera		Member
-		Member

Business and Investment Risk Management Monitoring Committee

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pos Indonesia (Persero) on the Dismissal and Appointment of Members of the Business Risk Management and Investment Monitoring Committee of PT Pos Indonesia (Persero) No. 90/DEKOM/0724 dated July 15, 2024 respectfully dismissed Mr. Ahmad Syarif Munawi and appointed Sdr. Dewi Hanggraeni as a member of the Business Risk Management and Investment Monitoring Committee of PT Pos Indonesia (Persero).

The composition of the Business and Investment Risk Management Monitoring Committee (KPMRUI) as of December 31, 2024 and 2023 as follows:

	2023	<u>Business and Investment Risk Magement Monitoring Committee</u>
Gunawan Hutagalung		Chairman
Syaiful Siliganda		Member
Oerip Soebagyo		Member

Nomination and Remuneration Committee

The latest amendment to the Decree of the Company's Board of Commissioners regarding the Dismissal and Appointment of the Chairman of the Company's Nomination and Remuneration Committee No. SK-57/DEKOM/0424 dated April 26, 2024 honorably dismissed Mr. Robben Rico and appointed Mr. I Gde Made Kartikajaya as a Member of the Company's Nomination and Remuneration Committee.

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

d. Struktur Organisasi, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (Lanjutan)

d. Organization Structure, Board of Commissioners, Directors and Employees (Continued)

3) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi, Komite Nominasi dan Remunerasi (Lanjutan)

3) Audit Committee, Business and Investment Risk Management Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee (Continued)

Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

The composition of the Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024
<u>Komite Nominasi dan Remunerasi</u>	
Ketua	Fauzi Baadilla
Anggota	I Gde Made Kartikajaya
Anggota	Boy Bayu
Anggota	Oerip Soebagyo

	2023	<u>Nomination and Remuneration Committee</u>
	Roben Rico	Chairman
	Boy Bayu Idisonjaya	Member
	Oerip Soebagyo	Member
	-	Member

4) Karyawan & Manajemen Kunci

4) Employees & Key Personnel

Karyawan

Employees

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup mempunyai karyawan masing-masing 14.190 dan 15.783 (tidak diaudit) dengan rincian sebagai berikut:

As of December 31, 2024 and 2023, the Group have 14,190 and 15,783 employees respectively (unaudited) with the following details:

Manajemen Kunci

Key Personnel

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No SK-214, pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan mempunyai key personel dengan rincian sebagai berikut:

Based on the Decree of the Board of Directors No SK-214, as of December 31, 2024 and 2023, the Company has key personnel with the following details:

	2024
<u>Manajemen Kunci</u>	
Risk Management and Financial Policy	Endang Wahyudin
Retail Business	Wilhelmina Lily Selanno
Enterprise Business	Arifin Muchlis
Strategic Planning and Business Development	Ir. Wikandaru Mudjadi
International Post Service	Yanto Parulian Hutajulu
Human Capital Policy and Strategy	Ika Wijayanti
Portfolio Management	Riharsono Prastyantoro
Human Capital Services and Business Partner	Chandra Dewi
Government and Corporate Business	Hendra Sari
Courier and Logistic Operation	Imam Pujono
Financial Operations and Business Partner	Vivi Sofiati
Information Technology	A. Winahyo Pratomo
Fronting Management and Financial Transaction Service	Felix Heru Wibowo
Consumer Business	Zuhed Nur
Wholesale and International Business	Arlia Irishtiana
Internal Audit	Agus Trisyuwanto

	2023	<u>Key Personnel</u>
	Endang Wahyudin	Risk Management and Financial Policy
	Wilhelmina Lily Selanno	Retail Business
	Arifin Muchlis	Enterprise Business
	Ir. Wikandaru Mudjadi	Strategic Planning and Business Development
	Yanto Parulian Hutajulu	International Post Service
	Ika Wijayanti	Human Capital Policy and Strategy
	Riharsono Prastyantoro	Portfolio Management
	Chandra Dewi	Human Capital Services and Business Partner
	Hendra Sari	Government and Corporate Business
	Imam Pujono	Courier and Logistic Operation
	Vivi Sofiati	Financial Operations and Business Partner
	A. Winahyo Pratomo	Information Technology
	Felix Heru Wibowo	Fronting Management and Financial Transaction Service
	Zuhed Nur	Consumer Business
	Arlia Irishtiana	Wholesale and International Business
	Agus Trisyuwanto	Internal Audit

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
 Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)
 As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

e. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan

Pada bulan Desember 2022, Perusahaan menawarkan obligasi pada masyarakat (Catatan 19) yang dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 20 Desember 2022 dengan Nomor S-271/D.04/2022 atas Penawaran umum penerbitan Obligasi I PT Pos Indonesia (Persero) dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 dan telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Desember 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah utang obligasi yang belum jatuh tempo adalah sebesar Rp500.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Obligasi/ <i>Bonds</i>	Jumlah/ <i>Amount</i>	Bunga per Tahun/ <i>Interest per Annum</i>	Tahun/ <i>Years</i>	Tanggal Penerbitan/ <i>Date of Issuance</i>	Jatuh Tempo/ <i>Due Date</i>
Obligasi I PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2023 Seri/Serie				28 Desember/ December 28, 2022	28 Desember/ December 28, 2025
A (POST01A)	100.000.000.000	10,90%	3	28 Desember/ December 28, 2022	28 Desember/ December 28, 2027
Seri/Serie B (POST01B)	400.000.000.000	11,75%	5	28 Desember/ December 28, 2022	28 Desember/ December 28, 2027

f. Informasi tentang Entitas Anak Perusahaan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 persentase kepemilikan Perusahaan dan jumlah aset Entitas Anak adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (Continued)

e. The Company's Bonds Public Offering

On December 2022, the Company offered its bonds to the public (Note 19), which became effective by Financial Services Authority (OJK) on December 20, 2022 based on Letter Number S-271/D.04/2022 on the public offering of Bond I of PT Pos Indonesia (Persero) with a principal amount of Rp500,000,000,000 and has been listed on the Indonesia Stock Exchange on December 28, 2022.

As of December 31, 2024, the outstanding amount of unmatured bond was Rp500,000,000,000 with the following details:

f. Subsidiaries Information

As of December 31, 2024 and 2023 the percentage of ownership of the Company and total asset of the Subsidiaries are as follows:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis Usaha/ Nature of Business	Persentase Komersial Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ Total Assets Before Elimination	
					2024	2023
Dimiliki langsung oleh Perusahaan/Held directly by the Company						
PT Pos Finansial Indonesia ("PFI")	Indonesia	Bisnis jaringan, bisnis akses channel dan switching dan bisnis IT solution/Network business, access channel and system switching business and IT solution business.	54,76%	2019 (dahulu/previously PT Bhakti Wasantara Net)	245.099.473.612	123.766.890.726
PT Pos Logistik Indonesia ("PLI")	Indonesia	Jasa transportasi, jasa pergudangan, jasa pengiriman kargo dan regulated agent atau agen inspeksi/Transportation services, warehousing services, cargo delivery, regulated agent or inspection agent.	99,80%	2012	382.060.133.187	459.483.236.297
PT Pos Properti Indonesia ("PPI")	Indonesia	Bidang properti/ Property business	99,00%	2013	323.369.373.158	259.254.093.301
Dimiliki oleh PT Pos Logistik Indonesia ("PLI")/Held through PT Pos Logistik Indonesia ("PLI")						
PT Pos Properti Indonesia ("PPI")	Indonesia	Properti/ Property	1,00%	2013	323.369.373.158	259.254.093.301

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

f. Informasi tentang Entitas Anak (Lanjutan)

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara bersama-sama disebut sebagai "Grup".

PT Pos Finansial Indonesia (PFI)

PT Pos Finansial Indonesia ("PFI") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 7 dari notaris Ivonne Barnetha Sinyal, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 2 April 2001. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C-02567.HT.01.01.Th.2001 tanggal 28 Juni 2001 serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 11 dan No. 1320 tanggal 5 Februari 2002.

Berdasarkan Akta Notaris No. 69 dari Notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn. Perusahaan mengubah nama PT Bhakti Wasantara Net menjadi PT Pos Finansial Indonesia. Perusahaan mendirikan dan memiliki penyertaan saham pada PFI sebesar 54,76% dari modal ditempatkan dan disetor PFI dengan jumlah investasi sebesar Rp38.578.000.000 atau 38.578 lembar saham. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0022339.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 24 April 2019.

Data PFI telah mengalami perubahan, perubahan terakhir sebagaimana termuat dalam akta No.61 tanggal 17 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Ervina Christina Sembiring, S.H., M.kn mengenai perubahan susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan. Akta tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.AHU-AH.01.09-0289928 tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024.

Masih dalam proses pemenuhan administrasi kelengkapan dokumen untuk permintaan persetujuan pemegang saham (Kementerian BUMN).

PT Pos Logistik Indonesia (PLI)

Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 12 Januari 2012 dari Notaris Etic Srimartini, S.H., M.Kn, Notaris di Bandung. Perusahaan mendirikan dan memiliki penyertaan saham pada PLI sebesar 99,80% dari modal ditempatkan dan disetor PLI, dengan jumlah investasi sebesar Rp174.000.000.000 atau 174.000 lembar saham. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-08351.AH.0101 Tahun 2012, tanggal 17 Februari 2012 dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 17 Februari 2012, tambahan No. 15392.

1. GENERAL (Continued)

f. Subsidiaries Information (Continued)

In these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred as "the Group".

PT Pos Finansial Indonesia (PFI)

PT Pos Finansial Indonesia ("PFI") was established based on Notarial Deed No. 7 of notary Ivonne Barnetha Sinyal, SH, Notary in Jakarta dated April 2, 2001. Deed of establishment was approved by Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. C02567.HT.01.01.Th.2001 dated June 28, 2001 and published in Official Gazette of the Republic of Indonesia No. 11 and No. 1320 dated February 5, 2002.

Based on Notarial Deed No. 69 of Notary Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn. the Company changed the name of PT Bhakti Wasantara Net to PT Pos Finansial Indonesia. The Company established and has an investment in PFI for 54.76% of the issued and paid-up capital of PFI, with a total investment of Rp38,578,000,000 or 38,578 shares. The Articles of Association was approved by Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter Number AHU-0022339.AH.01.02 Year 2019 dated April 24, 2019.

PFI data has undergone changes, the last change as stated in deed No.61 dated December 17, 2024 made before Notary Ervina Christina Sembiring, S.H., M.kn regarding changes to the composition of the Company's directors and board of commissioners. The deed has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on letter No.AHU-AH.01.09-0289928 of 2024, dated December 18, 2024.

Still in the process of fulfilling the administrative requirements for the completeness of the documents for the request for shareholder approval (Ministry of State-Owned Enterprises).

PT Pos Logistik Indonesia (PLI)

Based on Notarial Deed No. 9 dated January 12, 2012 from Notary Etic Srimartini, S.H., M.Kn, Notary in Bandung. The Company established and has an investment in PLI for 99.80% of the issued and paid-up capital of PLI, with a total investment of Rp174,000,000,000 or 174.000 shares. The deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights in his Decision Letter No. AHU-08351.AH.0101 Year 2012, dated February 17, 2012 and has been published in the State Gazette of Republic of Indonesia supplementary No. 34 dated February 17, 2012, addition No. 15392.

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

f. Informasi tentang Entitas Anak (Lanjutan)

PT Pos Logistik Indonesia (PLI) (Lanjutan)

Anggaran dasar PLI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Notaris No. 01 tanggal 2 Agustus 2024 dari Deasi Witanti Kusumaningtyas, S.H., Notaris di Bandung mengenai perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar PLI. Sesuai kesepakatan bersama, PLI melakukan *Debt to Equity Swap* atau konversi utang pokok (*shareholder loan*) untuk menambah saham milik Perusahaan sebanyak 69.500 lembar saham atau setara dengan Rp69.500.000.000. Dengan adanya penambahan saham tersebut, maka yang semula saham milik Perusahaan sebanyak 174.000 lembar saham naik menjadi sebanyak 243.500 lembar saham atau setara dengan Rp243.500.000.000. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam Surat Nomor AHU-AH.01.09-0235288 tanggal 4 Agustus 2024.

PT Pos Properti Indonesia (PPI)

Berdasarkan Akta Notaris No. 35 tanggal 31 Desember 2013 dari Deasi Witanti Kusumaningtyas, S.H., Notaris di Bandung. Perusahaan mendirikan dan memiliki penyertaan saham pada PPI sebesar 99,00% dari modal ditempatkan dan disetor PPI dengan jumlah investasi sebesar Rp99.000.000.000 atau 99.000 lembar saham. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-14137.AH.01.01 Tahun 2014 tanggal 25 April 2014 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 13 Juni 2014, tambahan No. 22310.

Data PPI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Notaris No. 02 tanggal 3 Juli 2023 dari Rahma Fitriani, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Bandung, mengenai perubahan susunan Komisaris dan Direksi PPI. Akta perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0134292 tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023.

1. GENERAL (Continued)

f. Subsidiaries Information (Continued)

PT Pos Logistik Indonesia (PLI) (Continued)

PLI's article of association has been amended several times, most recently by Notarial deed No. 01 dated Augustus 2, 2024 by Deasi Witanti Kusumaningtyas, S.H., Notary in Bandung, concerning in change of Article 4 in PLI's Article of Association. In accordance with mutual agreement, PLI carried out a Debt to Equity Swap or conversion of principal debt (*shareholder loan*) to increase the shares owned by the Company by 69,500 shares or equivalent to Rp69,500,000,000. With the addition of these shares, the original shares are owned by the Company increased from 174,000 shares to 243,500 shares or equivalent of Rp243,500,000,000. This change was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Directorate General of General Law Administration in his Decision Letter No. AHU-AH.01.09-0235288 dated Augustus 4, 2024.

PT Pos Properti Indonesia (PPI)

Based on Notarial Deed No. 35 dated December 31, 2013 by Deasi Witanti Kusumaningtyas, S.H., Notary in Bandung. The Company established and has an investment in PPI for 99.00% of the issued and paid-up capital of PPI with a total investment of Rp99,000,000,000 or 99,000 shares. The deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-14137.AH.01.01 TAHUN 2014 dated April 25, 2014 and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 47 dated June 13, 2014, addition No. 22310.

PPI data has undergone several changes, most recently with Notarial deed No. 02 dated July 3, 2023 from Rahma Fitriani, S.H., M.H., M.Kn., Notary in Bandung, regarding changes to the composition of PPI's Commissioners and Directors. The deed of change has been received and recorded in the legal entity administration system of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Directorate General of General Legal Administration in Letter No. AHU-AH.01.09-0134292 of 2023 dated July 5, 2023.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI

a. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2024)

Dalam tahun berjalan, Grup telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) baru dan revisi termasuk pengesahan amendemen dan penyesuaian tahunan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang dianggap relevan dengan kegiatan operasinya dan mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024.

PSAK dan ISAK baru dan revisi termasuk pengesahan amendemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif dalam tahun berjalan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 116: Sewa. Amendemen tentang liabilitas sewa dalam jual dan sewa balik. Amendemen ini mengatur pengukuran selanjutnya atas transaksi jual dan sewa balik.
- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan. Amendemen tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan. Amendemen ini mengatur bahwa hanya kovenan yang harus dipatuhi entitas pada atau sebelum tanggal pelaporan yang akan memengaruhi klasifikasi liabilitas jangka pendek atau jangka panjang serta pengungkapannya.
- Amendemen PSAK 207: Laporan Arus Kas dan PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Amendemen tentang pengaturan pembiayaan pemasok. Amendemen ini memperjelas pengungkapan terkait pengaturan pembiayaan pemasok..

b. Standar (SAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan

- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing. Amendemen tentang kekurangan ketertukaran. Amendemen ini memperjelas pengaturan terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak bertukar serta pengungkapannya, berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025.
- PSAK 117 memperkenalkan Pendekatan *Block Building*, yang dimodifikasi untuk kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung, yang digambarkan sebagai Pendekatan Biaya Variabel. Terdapat penyederhanaan jika kriteria tertentu terpenuhi dengan menggunakan Pendekatan Alokasi Premi. PSAK 117 ini berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025 dengan penerapan dini diperbolehkan.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”)

a. Statements of Financial Accounting Standards (“PSAKs”) and Interpretation to Financial Accounting Standards (“ISAKs”) Issued and Effective in the Current Year (on or after January 1, 2024)

In the current year, the Group has adopted all of the new and revised Statements of Financial Accounting Standards (“PSAK”) and Interpretation to Financial Accounting Standards (“ISAK”) including amendment and annual improvements issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants that are relevant to their operations and affected to the consolidated financial statements effective for accounting period beginning on or after January 1, 2024.

New and revised PSAKs and ISAKs including amendments and annual improvements effective in the current year are as follows:

- Amendment to PSAK 116: Leases. Amendments on lease liabilities in sale and leaseback. This amendment regulates subsequent measurement of sale and leaseback transactions.
- Amendment to PSAK 201: Presentation of Financial Statements. Amendments on long-term liabilities with covenants. This amendment stipulates that only covenants that an entity must comply with on or before the reporting date will affect the classification of short-term or long-term liabilities and their disclosure.
- Amendments to PSAK 207: Cash Flow Statement and PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures. Amendments on supplier financing arrangements. These amendments clarify disclosures related to supplier financing arrangements.

b. Standards (SAKs) and Interpretation to Financial Accounting Standards (ISAKs) Issued but not Effective in the Current Year

- Amendment to PSAK 221: Effect of Changes in Foreign Exchange Rates. Amendment on lack of convertibility. This amendment clarifies the provisions related to conditions when a currency is not convertible and its disclosure, effective on or after January 1, 2025.
- PSAK 117 introduces the Block Building Approach, which is modified for insurance contracts with direct participation features, described as a Variable Fee Approach. There is simplification if certain criteria are met by using the Premium Allocation Approach. This PSAK 117 is effective for the annual reporting period beginning on or after January 1, 2025 with early application permitted.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI (Lanjutan)

b. Standar (SAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (Lanjutan)

- Amendemen PSAK 117: Kontrak Asuransi - Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 - Informasi Komparatif, berlaku efektif ketika entitas pertama kali menerapkan PSAK 117.

Beberapa dari SAK dan ISAK termasuk amendemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku dalam tahun berjalan dan relevan dengan kegiatan Grup telah diterapkan sebagaimana dijelaskan dalam “Informasi Kebijakan Akuntansi Material”.

Beberapa SAK dan ISAK lainnya yang tidak relevan dengan kegiatan Grup atau mungkin akan mempengaruhi kebijakan akuntansinya dimasa depan sedang dievaluasi oleh manajemen potensi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar ini terhadap laporan keuangan konsolidasian.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan SAK, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, termasuk standar baru dan yang direvisi, amandemen dan penyesuaian tahunan, yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024, serta Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yaitu Peraturan No.VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang berlaku untuk laporan keuangan yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2012.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”) (Continued)

b. Standards (SAKs) and Interpretation to Financial Accounting Standards (ISAKs) Issued but not Effective in the Current Year (Continued)

- Amendment to PSAK 117 – Insurance Contracts – Initial Application of PSAK 117 and PSAK 109 – Comparative Information, effective when the entity first applies PSAK 117.

Several SAKs and ISAKs including amendments and annual improvements that became effective in the current year and are relevant to the Group’s operation have been adopted as disclosed in the “Material Accounting Policies Information”.

Other SAKs and ISAKs that are not relevant to the Group’s operation or might affect the accounting policies in the future are being evaluated by the management the potential impact that might arise from the adoption of these standards to the consolidated financial statements.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICES INFORMATION

a. Compliance with the Financial Accounting Standards (“SAK”)

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with SAK, which comprises the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants, including applicable new and revised standards, amendments and annual improvements, effective on or after January 1, 2024, and Attachment to the Decision of the Chairman of Bapepam – LK (now becoming Indonesian Financial Services Authority or OJK) No. Kep-347/BL/2012 dated June 25, 2012 that is Regulation No.VIII.G.7 regarding Presentation and Disclosures of the Financial Statements of the Public Company that effective for the financial statements that ended on or after December 31, 2012.

b. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost basis, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies and in conformity with Financial Accounting Standard established by the Indonesian Institute of Accountants. The consolidated financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the consolidated statement of cash flows.

The consolidated statement of cash flow is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

**b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian
(Lanjutan)**

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan konsolidasian tahunan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan Manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 4.

c. Prinsip atas Akuntansi Konsolidasi dan Ekuitas

a. Entitas Anak

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan entitas lain ketika Grup terekspos atas, atau memiliki hak untuk, pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal di mana pengendalian dialihkan kepada Grup. Entitas anak tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal dimana Grup kehilangan pengendalian.

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakuisisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Grup mengakui kepentingan non pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non pengendali atas aset neto pihak yang diakuisisi. Kepentingan non pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

**b. Basis of Preparation of Consolidated Financial
Statements (Continued)**

Figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in Rupiah ("Rp"), unless otherwise specified.

The accounting policies applied are consistent with those of the annual consolidated financial statements for the year ended December 31, 2024 which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires Management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 4.

c. Principles of Consolidation and Equity Accounting

a. Subsidiaries

Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They are deconsolidated from the date on which that control ceases.

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.

The Group recognizes any noncontrolling interest in the acquiree on an acquisition-by acquisition basis, either at fair value or at the noncontrolling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Non-controlling interest is reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owner of the parent's equity.

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

**c. Prinsip atas Akuntansi Konsolidasi dan Ekuitas
(Lanjutan)**

a. Entitas Anak (Lanjutan)

Selisih lebih imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dicatat sebagai goodwill. Jika jumlah tersebut lebih rendah dari nilai wajar aset bersih teridentifikasi atas bisnis yang diakuisisi dalam kasus pembelian dengan diskon, selisihnya diakui dalam laba rugi.

Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat sesuai dengan PSAK 239 (revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dalam laporan laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Biaya yang terkait dengan akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar tanggal akuisisi melalui laba rugi. Pihak pengakuisisi mungkin telah mengakui perubahan nilai wajar atas kepentingan ekuitasnya dalam penghasilan komprehensif lain. Jika demikian, jumlah yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika pihak pengakuisisi telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya.

Transaksi, saldo dan keuntungan antar entitas Grup yang belum direalisasi telah dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Jika diperlukan, nilai yang dilaporkan oleh entitas anak telah diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh Grup.

b. Perubahan Kepemilikan

Grup memperlakukan transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya kontrol sebagai transaksi dengan pemilik ekuitas Grup. Perubahan dalam kepemilikan menghasilkan penyesuaian antara nilai tercatat dari kepentingan pengendali dan nonpengendali untuk mencerminkan kepentingan relatifnya di entitas anak. Selisih antara jumlah penyesuaian untuk kepentingan non pengendali dan pertimbangan yang dibayarkan atau diterima diakui dalam cadangan terpisah dalam ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Grup.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

**c. Principles of Consolidation and Equity Accounting
(Continued)**

a. Subsidiaries (Continued)

The excess of the consideration transferred, the amount of any noncontrolling interest in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the net identifiable assets acquired is recorded as goodwill. If those amounts are less than the fair value of the net identifiable assets of the business acquired, in the case of a bargain purchase, the difference is recognized directly in the profit or loss.

Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognized at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed to be an asset or liability are recognized in accordance with PSAK 239 (revised 2014) "Financial Instruments: Recognition and Measurement" in profit or loss. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured, and its subsequent settlement is accounted for within equity.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

If the business combination is achieved in stages, the acquisition date carrying value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss. The acquirer may have recognized changes in the value of its equity interest in other comprehensive income. If so, the amount that was recognized in other comprehensive income shall be recognized on the same basis as would be required if the acquirer has disposed directly of the previously held equity interest.

Intercompany transactions, balances and unrealized gains on transactions between Group companies are eliminated. Unrealized losses are also eliminated. If necessary, amounts reported by subsidiaries have been adjusted to conform to the Group's accounting policies.

b. Changes in Ownership Interests

The Group treats transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control as transactions with equity owners of the Group. A change in ownership interest results in an adjustment between the carrying amounts of the controlling and non-controlling interests to reflect their relative interests in the subsidiary. Any difference between the amount of the adjustment to non controlling interests and any consideration paid or received is recognized in a separate reserve within equity attributable to owners of the Group.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

**c. Prinsip atas Akuntansi Konsolidasi dan Ekuitas
(Lanjutan)**

b. Perubahan Kepemilikan

Ketika Grup tidak lagi mengkonsolidasikan atau mencatat menggunakan metode ekuitas untuk investasi karena hilangnya pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan, maka kepentingan yang masih tersisa atas entitas diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya, dan perubahan nilai tercatat diakui dalam laba rugi. Nilai tercatat awal adalah sebesar nilai wajar untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yang tersisa sebagai entitas asosiasi, ventura bersama atau aset keuangan.

Di samping itu, jumlah yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Grup telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laporan laba rugi.

Jika kepemilikan saham pada ventura bersama atau entitas asosiasi berkurang namun pengendalian bersama atau pengaruh signifikan dipertahankan, hanya sebagian proporsional dari jumlah yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba atau rugi jika diperlukan.

d. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Komponen kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional instrumen kepemilikan yang ada dalam jumlah yang diakui atas aset neto teridentifikasi dari pihak diakuisisi.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

**c. Principles of Consolidation and Equity Accounting
(Continued)**

b. Changes in Ownership Interests

When the Group ceases to consolidate or equity account for an investment because of a loss of control, joint control or significant influence, any retained interest in the entity is remeasured to its fair value at the date when the control is lost, with the change in carrying amount recognized in profit or loss. The fair value is the initial carrying amount for the purposes of subsequently accounting for the retained interest as an associate, joint venture or financial asset.

In addition, any amounts previously recognized in other comprehensive income in respect of that entity are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities. This may mean that amounts previously recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss.

If the ownership interest in a joint venture or an associate is reduced but joint control or significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts previously recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where appropriate.

d. Business Combination

Business combination is a transaction or other event in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination is accounted for by applying the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized as expenses in the periods in which the costs are incurred and the services are received.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Component of non-controlling interests are measured either at fair value or at the present ownership instruments' proportionate share in the recognized amounts of the acquiree's identifiable net assets.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

d. Kombinasi Bisnis (Lanjutan)

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terhadap Grup atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui dalam laba rugi. Apabila pada periode sebelumnya, perubahan nilai wajar yang berasal dari kepentingan ekuitasnya sebelum tanggal akuisisi telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain, jumlah tersebut diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika Grup telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berakibat terhadap pengakuan aset dan liabilitas dimaksud pada tanggal tersebut.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih antara (a) nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap kepentingan non-pengendali, atas (b) jumlah neto teridentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan dari akuisisi entitas anak setelah sebelumnya Manajemen menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam penelaahan tersebut.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas dari Grup yang diperkirakan akan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditempatkan dalam Unit Penghasil Kas tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu Unit Penghasil Kas dan operasi tertentu atas Unit Penghasil Kas tersebut dilepaskan, maka *goodwill* yang terkait dengan operasi yang dilepaskan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi Unit Penghasil Kas yang ditahan.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

d. Business Combination (Continued)

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. When in prior periods, a change in the value of its equity interest in the acquiree prior to the acquisition date had been recognized in other comprehensive income, the amount shall be recognized on the same basis as would be required if the Group had disposed directly of the previously held equity interest.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. In its financial statements, during the measurement period the acquirer adjusts, recognized additional assets or liabilities, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have resulted in the recognition of those assets and liabilities as of that date.

At acquisition date, goodwill is measured at its cost being the excess of (a) the aggregate of the consideration transferred and the amount of any non-controlling interest, over (b) the net of identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously the Management reassesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and all of the liabilities assumed and recognize any additional assets or liabilities that are identified in that review.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For impairment testing, goodwill acquired in a business combination, from the acquisition date, be allocated to each of the Group's Cash Generating Units that is expected to benefit from the synergies of the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those Cash Generating Units.

If goodwill has been allocated to Cash Generating Units and certain operations on the Cash Generating Units is disposed, the goodwill associated with the operation disposed is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or losses on disposal. Disposed goodwill is measured on the basis of relative values of the operation disposed of and the portion of the Cash Generating Units retained.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan konsolidasian diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan konsolidasian.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, transaksi dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada akhir setiap periode pelaporan:

- Pos moneter valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut;
- Pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali; dan
- Pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan.

Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi tahun berjalan. Nilai tukar yang digunakan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024/ December 31, 2024
1 Poundsterling Inggris (GBP)	20.332,61
1 Euro (EUR)	16.851,32
1 Franc Swiss (CHF)	17.920,95
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	16.162,00
1 Dolar Singapura (SGD)	11.919,34
1 Riyal Arab Saudi (SAR)	4.304,14
1 Yen Jepang (JPY)	102,36

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

e. Foreign Currency Transaction and Balances

The consolidated financial statements is measured and presented in the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). The consolidated financial statements are presented in Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Group and the presentation currency for the consolidated financial statements.

In preparing the consolidated financial statements, transactions in currencies other than the entity's functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each the reports:

- Monetary items in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date;
- Non-monetary items measured at historical cost in foreign currencies are not retranslated; and
- Non-monetary item in foreign currencies measured at fair value are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined.

At the consolidated statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date and the resulting gains or losses are credited or charged to current year profit or loss. The exchange rates used were as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
19.760,25		GB Poundsterling 1 (GBP)
17.139,52		Euro 1 (EUR)
18.374,28		Swiss Franc 1 (CHF)
15.416,00		US Dollar 1 (USD)
11.711,64		Singapore Dollar 1 (SGD)
-		Saudi Arabia Riyal 1 (SAR)
109,55		Japan Yen 1 (JPY)

f. Transaction with Related Parties

Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity:

- 1) A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:
 - a) Has control or joint control over the reporting entity;
 - b) Has significant influence over the reporting entity; or
 - c) Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (Lanjutan)

- 2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (1).
 - g) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (1) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - h) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Semua transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian (Catatan 27).

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

f. Transaction with Related Parties (Continued)

- 2) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applied:
- a) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary, and fellow subsidiary is related to the others).
 - b) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - c) Both entities are joint ventures of the same third party.
 - d) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - e) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
 - f) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (1).
 - g) A person identified in (1)(a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity)
 - h) The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influence by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Government related entity can be an entity which controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance that representing as the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the SOE's Ministry as a shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements (Note 27).

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

g. Aset Keuangan

a) Klasifikasi

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar (baik melalui penghasilan komprehensif lain, atau melalui laba rugi), dan
- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas.

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Grup telah melakukan pemilihan takterbatalkan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

b) Pengukuran

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajar ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan pada laba rugi.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Ada tiga kategori pengukuran dimana Grup mengklasifikasikan instrumen utang:

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

g. Financial Assets

a) Classification

The Group classifies its financial assets in the following measurement categories:

- financial asset to be measured subsequently at fair value (either through other comprehensive income, or through profit or loss), and
- financial asset to be measured at amortised cost.

The classification depends on the entity's business model for managing the financial assets and the contractual terms of the cash flows.

For assets measured at fair value, gains and losses will either be recorded in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the Group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income.

The Group reclassifies debt investments when and only when its business model for managing those assets changes.

b) Measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

Debt instrument

Subsequent measurement of debt instruments depends on the Group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the Group classifies its debt instruments:

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

g. Aset Keuangan (Lanjutan)

b) Pengukuran (Lanjutan)

Instrumen utang (Lanjutan)

Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

h. Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, perbedaan antara nilai tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laba rugi. Selain itu, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai FVTOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi, direklasifikasi ke laba rugi.

Sebaliknya, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen ekuitas yang telah dipilih Grup pada pengakuan awal untuk diukur di FVTOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi tidak direklasifikasi ke laba rugi, tetapi dipindahkan ke saldo laba.

i. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian terdiri dari kas ditangan, kas di bank (rekening giro) dan deposito jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan dan tidak dibatasi penggunaannya, dan mana yang memiliki risiko tidak signifikan dari perubahan nilai.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

g. Financial Assets (Continued)

b) Measurement (Continued)

Debt instrument (Continued)

Amortised cost: Assets that are held for collection of contractual cash flows where those cash flows represent solely payments of principal and interest are measured at amortised cost. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at amortised cost and is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss when the asset is derecognised or impaired. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method.

h. Derecognition of Financial Assets

The Group derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

On derecognition of a financial asset measured at amortized cost, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable is recognized in profit or loss. In addition, on derecognition of an investment in a debt instrument classified as at FVTOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the investment revaluation reserve is reclassified to profit or loss.

In contrast, on derecognition of an investment in an equity instrument which the Group has elected on initial recognition to measure at FVTOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the investment revaluation reserve is not reclassified to profit or loss, but is transferred to retained earnings.

i. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents in the consolidated statement of financial position consists of cash on hand, cash in banks and short-term deposits with a maturity of three months or less at the time of placements and not restricted to use, and which are subject to an insignificant risk of changes in value.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

j. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Grup atau pihak lawan.

k. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") yang menggunakan cadangan KKE seumur hidup berdasarkan basis *forward-looking* untuk seluruh saldo piutang usaha dan kontrak aset tanpa komponen pendanaan yang signifikan. Selain untuk piutang usaha dan kontrak aset tanpa komponen pendanaan yang signifikan, Grup menerapkan pendekatan umum untuk mengukur KKE.

Definisi Gagal Bayar

Grup menganggap hal-hal berikut ini merupakan peristiwa gagal bayar untuk tujuan manajemen risiko kredit internal karena pengalaman historis menunjukkan bahwa aset keuangan yang memenuhi salah satu kriteria berikut umumnya tidak dapat dipulihkan:

- Ketika terdapat pelanggaran persyaratan keuangan oleh debitur; atau
- Informasi yang dikembangkan secara internal atau diperoleh dari sumber eksternal menunjukkan bahwa debitur kemungkinan tidak akan membayar kreditornya, termasuk Grup, secara penuh (tanpa memperhitungkan jaminan yang dimiliki oleh Grup).

Terlepas dari analisis di atas, Grup menganggap bahwa gagal bayar telah terjadi ketika aset keuangan tertunggak lebih dari 90 hari kecuali jika Grup memiliki informasi yang wajar dan didukung untuk menunjukkan bahwa kriteria yang lebih panjang lebih tepat.

Grup menilai dengan basis *forward-looking* kerugian kredit ekspektasian terkait dengan instrumen utangnya yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Metodologi penurunan nilai yang diterapkan tergantung pada apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

j. Offsetting Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Group or the counterparty.

k. Impairment of Financial Assets

The Group applies the "simplified approach" to measure the Expected Credit Loss ("ECL") which uses a lifetime expected loss allowance on a forward looking basis for all trade receivables and contract assets without significant financing component. Other than trade receivables and contract assets without significant financing component, the Group applies general model to ensure ECL.

Definition of Default

The Group considers the following as constituting an event of default for internal credit risk management purposes as historical experience indicates that financial assets that meet either of the following criteria are generally not recoverable:

- *When there is a breach of financial covenants by the debtor; or*
- *Information developed internally or obtained from external sources indicates that the debtor is unlikely to pay its creditors, including the Group, in full (without taking into account any collateral held by the Group).*

Irrespective of the above analysis, the Group considers that default has occurred when a financial asset is more than 90 days past due unless the Group has reasonable and supportable information to demonstrate that a more lagging default criterion is more appropriate.

The Group assesses on a forward-looking basis the expected credit losses associated with its debt instruments carried at amortised cost and FVOCI. The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

k. Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)

Kebijakan Penghapusan

Grup menghapuskan aset keuangan ketika ada informasi yang menunjukkan bahwa pihak lawan berada dalam kesulitan keuangan yang buruk dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis, contoh ketika pihak lawan dalam proses likuidasi atau telah memasuki proses kebangkrutan, atau untuk hal piutang usaha, ketika jumlahnya sudah lebih dari 120 hari tertunggak, mana yang terjadi lebih dulu. Aset keuangan yang dihapuskan dapat menjadi subjek aktivitas penagihan dalam prosedur pemulihan Grup, dengan mempertimbangkan nasihat hukum yang sesuai. Setiap pemulihan yang terjadi diakui dalam laba rugi.

l. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih.

Biaya perolehan ditentukan dengan metode masuk pertama keluar pertama (*first-in first-out method*). Penyisihan untuk persediaan usang dan/atau penurunan nilai persediaan ditetapkan untuk menurunkan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi bersih.

Nilai realisasi neto adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal setelah dikurangi dengan taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

m. Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi dan dibebankan pada beban usaha sesuai masa manfaat biaya yang bersangkutan.

Uang muka adalah bagian dari kontrak yang dibayarkan atau diterima di muka untuk barang atau jasa. Uang muka dicatat sebagai aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

n. Aset Tetap

Grup menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai jika ada. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi jika kriteria pengakuan. Sebaliknya pada saat inspeksi utama dilakukan, biaya itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

k. Impairment of Financial Assets (Continued)

Write-off Policy

The Group writes off a financial asset when there is information indicating that the counterparty is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery, e.g. when the counterparty has been placed under liquidation or has entered into bankruptcy proceedings, or in the case of trade accounts receivable, when the amounts are over 120 days past due, whichever occurs sooner. Financial assets written off may still be subject to enforcement activities under the Group's recovery procedures, taking into account legal advice where appropriate. Any recoveries made are recognized in profit or loss.

l. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value.

Acquisition cost is determined by the first in first-out method. Allowance for obsolescence and/or impairment of inventory is determined to reduce the carrying value of inventories to net realizable value.

Net realizable value is the estimated sales price in the normal course of business less estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

m. Prepaid Expenses and Advances

Prepaid expenses are amortized and charged to operating expenses over the periods benefited.

Advances is the portion of a contract paid or received in advance for goods or services. Advances are recorded as asset on the consolidated statements of financial position.

n. Fixed Assets

The Group use the cost model for fixed assets measurement.

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and any impairment, if any. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred if the recognition criteria are met. On the other hand when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as replacement if the recognition criteria are satisfied.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

n. Aset Tetap (Lanjutan)

n. Fixed Assets (Continued)

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) untuk bangunan dan metode saldo menurun ganda (*double declining method*) untuk inventaris dan kendaraan bermotor selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Depreciation is calculated based on the straight-line method for buildings and the double declining method for inventory and vehicles during the useful life of fixed assets as follows:

Jenis Aset Tetap	Tahun/Years	Type of fixed assets
Gedung	20 Tahun/Years	Buildings
Inventaris Kelompok 1	4 Tahun/Years	Office Equipment Group 1
Inventaris Kelompok 2	8 Tahun/Years	Office Equipment Group 2
Inventaris Kelompok 3	16 Tahun/Years	Office Equipment Group 3
Kendaraan Bermotor Kelompok 1	4 Tahun/Years	Vehicles Group 1
Kendaraan Bermotor Kelompok 2	8 Tahun/Years	Vehicles Group 2

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi. Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai beban ditangguhkan sebagai bagian dari akun "Aset takberwujud" pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hak dan umur ekonomis tanah.

Land is stated at cost and is not depreciated. The legal cost of land rights when the land was acquired initially is recognized as part of the cost of the land under the "Fixed Assets" account and is not amortized. Meanwhile the extension or the legal renewal costs of land rights are recognized as deferred charges as part of "Intangible Assets" account in the consolidated statement of financial position and are amortized over the shorter of the right's life and land's economic life.

Gedung dinyatakan berdasarkan biaya perolehan awal aset tersebut ditambahkan dengan biaya perbaikan selama aset tersebut dipergunakan. Grup tidak mengkapitalisasikan biaya pengecatan atas gedung ke dalam nilai perolehan aset. Umur ekonomis gedung adalah 20 tahun, terhitung pada saat gedung tersebut dan perbaikannya mulai digunakan.

Buildings are stated based on the initial cost of the asset plus the cost of repairs if the asset is in use. The Group does not capitalize the cost of painting the buildings into the acquisition value of assets. The economic life of the building is 20 years, from the time the building and its repairs to the building are used.

Inventaris dikelompokkan menjadi 3 jenis kelompok dengan batas minimal kapitalisasi aset minimal sebesar Rp1.000.000. Masa manfaat ekonomis untuk kategori inventaris kelompok 1 adalah 4 tahun, inventaris kelompok 2 adalah 8 tahun dan inventaris kelompok 3 adalah 16 tahun. Grup tidak memiliki barang inventaris yang memiliki umur manfaat ekonomis lebih dari 16 tahun.

Office equipment is grouped into 3 types of group with a minimum asset capitalization limit of at least Rp1,000,000. The economic useful life for office equipment category group 1 is 4 years, office equipment group 2 is 8 years and office equipment group 3 is 16 years. The Group does not have any office equipment that has an economic useful life of more than 16 years.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap (ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dengan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. When assets are sold or retired the cost and related accumulated depreciation and any impairment loss are removed from the accounts. Any gain or loss arising from derecognition of fixed assets (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the item) is included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in the year the item is derecognized.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

n. Aset Tetap (Lanjutan)

Pada setiap akhir periode buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direviu secara prospektif, jika sesuai.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

o. Sewa

Suatu sewa di mana porsi yang signifikan atas risiko dan manfaat kepemilikan aset masih tetap berada di tangan lessor, maka sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi (dikurangi dengan insentif yang diterima dari lessor) dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Sewa aset tetap di mana entitas memiliki secara substansi seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewa atau sebesar nilai kini pembayaran sewa minimum, jika nilai kini jumlahnya lebih dari nilai wajar.

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset tertentu dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Apabila perjanjian mengandung sewa, entitas akan menilai apakah perjanjian sewa tersebut adalah sewa pembiayaan atau sewa operasi. Jika suatu perjanjian mengandung sewa, sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset akan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, sebaliknya akan diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara bagian yang merupakan pelunasan liabilitas dan bagian yang merupakan beban keuangan sedemikian rupa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo pembiayaan. Unsur bunga dalam beban keuangan dibebankan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas setiap periode.

Laba (rugi) penjualan akibat transaksi *sales and leaseback* atas aset pendasar dengan metode *capital lease* ditangguhkan dan diamortisasi secara proporsional sepanjang umur manfaat pendasar yang bersangkutan dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

n. Fixed Assets (Continued)

At the end of each financial period, the assets' residual values, useful life and method of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively if appropriate.

Assets in progress are stated at cost and disclosed as part of the fixed assets. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate fixed assets account when the installation is substantially completed and the asset is ready for its intended use.

o. Lease

Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives received from the lessor) are charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income on a straight-line basis over the period of the lease.

Leases of fixed assets where the entity substantially has all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalized at the lease's commencement at the lower of the fair value of the leased property or the present value of the minimum lease payments.

The determination whether an agreement is, or contains, a lease is based on the substance of the agreement at the lease commencement date and whether the fulfilment of the agreement is dependent on the use of a specific asset and the agreement conveys a right to use the asset. If an agreement contains a lease, the entity will assess whether such a lease is finance or operating lease. If an agreement contains a lease, a lease that transfers substantially to the lessee all the risks and rewards incidental to ownership of the leased item is classified as a finance lease, otherwise it is classified as an operating lease.

Each lease payment is allocated between the liability and finance costs to achieve a constant rate of interest on the outstanding finance balance. The interest element of the finance cost is charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income over the lease period to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

Gain (loss) on sales and leaseback transaction of underlying asset by capital lease method is deferred and amortized proportionally during the useful life of underlying assets and is calculated using straight-line method.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

o. Sewa (Lanjutan)

Aset pendasar diakui dalam laporan dari sewa pembiayaan dimana sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset.

Kebijakan penyusutan aset pendasar menggunakan metode garis lurus selama masa kontrak aset tersebut.

Grup sebagai Penyewa

Grup menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal inisiasi kontrak. Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Grup merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Grup menyewa aset tetap tertentu. Kontrak sewa biasanya dibuat untuk jangka waktu tetap 3 hingga 5 tahun tetapi mungkin memiliki perpanjangan.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

Bunga pinjaman inkremental bergantung pada jangka waktu, mata uang dan tanggal mulai sewa, dan ditentukan berdasarkan serangkaian input, termasuk: tingkat bebas risiko berdasarkan suku bunga obligasi pemerintah; penyesuaian risiko khusus negara; penyesuaian risiko kredit berdasarkan imbal hasil obligasi; dan penyesuaian khusus entitas ketika profil risiko entitas yang melakukan perjanjian sewa berbeda dengan Grup dan sewa tersebut tidak memperoleh manfaat atas jaminan dari Grup.

Jika kepemilikan aset sewaan beralih ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya mencerminkan pelaksanaan pembelian opsi, penyusutan dihitung dengan menggunakan estimasi masa manfaat aset. Aset hak-guna juga mengalami penurunan nilai. Lihat kebijakan akuntansi di bagian Penurunan Nilai aset non-keuangan.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi insentif sewa
- pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tarif, awalnya diukur menggunakan indeks atau tarif pada tanggal dimulainya;
- jumlah yang diharapkan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai sisa;

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

o. Lease (Continued)

The underlying assets are recognized in a report from a finance lease where the lease transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset.

Depreciation policy for underlying assets uses the straight-line method during the contract period.

The Group as a Lessee

The Group assesses whether a contract is or contains a lease, at the inception of the contract. The Group recognizes a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Group recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

The Group leases certain fixed asset. Rental contracts are typically made for fixed periods of 3 to 5 years but may have extension.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Group uses the incremental borrowing rate specific to the lessee.

The incremental borrowing rate depends on the term, currency and start date of the lease and is determined based on a series of inputs including: the risk-free rate based on government bond rates; a country-specific risk adjustment; a credit risk adjustment based on bond yields; and an entity-specific adjustment when the risk profile of the entity that enters into the lease is different to that of the Group and the lease does not benefit from a guarantee from the Group.

If ownership of the leased asset transfers to the Group at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset. The right-of-use assets are also subject to impairment. Refer to the accounting policies in Impairment of non-financial assets section.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

- *fixed payments (including in substance fixed payments), less any lease incentives;*
- *variable lease payment that are based on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;*

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

o. Sewa (Lanjutan)

Grup sebagai Penyewa (Lanjutan)

- harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk melaksanakannya opsi, dan
- pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi tersebut.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Jika Perusahaan dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 237. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Grup menerapkan PSAK 236 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

Sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga tidak diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa dan aset hak-guna. Pembayaran terkait diakui sebagai beban dalam periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi dan dicatat dalam pos "Beban umum dan administrasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

o. Lease (Continued)

The Group as a Lessee (Continued)

- the exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that option, and
- payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee exercising that option.

The lease liability is presented as a separate line in the consolidated statement of financial position.

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

The right-of-use assets comprise the initial measurements of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement day and any initial direct costs. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Whenever the Company incurs an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying assets to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured under PSAK 237. The costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

Right-of-use assets are depreciated over the shorter period of lease term and useful life of the underlying assets. If a lease transfers ownership of the underlying assets or the cost of the right-of-use assets reflects that of the Group expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying assets. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

The Group applies PSAK 236 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

Variable rents that do not depend on an index or rate are not included in the measurements of the lease liability and the right-of-use asset. The related payments are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers those payments occur and are included in the line "General and administrative expenses" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

o. Sewa (Lanjutan)

Opsi Perpanjangan dan Penghentian

Opsi perpanjangan dan penghentian termasuk dalam sejumlah properti dan peralatan sewa Grup. Istilah-istilah ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Mayoritas opsi perpanjangan dan penghentian yang dimiliki hanya dapat dilaksanakan oleh Grup dan bukan oleh lessor yang bersangkutan.

p. Properti Investasi

Properti investasi diukur dengan model biaya (*cost model*) dan selanjutnya model nilai wajar (*fair value model*). Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya jika kriteria pengakuan terpenuhi dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi.

Properti investasi terdiri dari tanah dan bangunan yang dikuasai Grup untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administrasi atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Grup merevaluasi atas aset properti investasi. Revaluasi aset properti investasi bukan untuk tujuan perpajakan tetapi hanya untuk pelaporan komersial.

Properti investasi awalnya diukur berdasarkan biayanya, termasuk biaya transaksi yang terkait dan biaya pinjaman yang berlaku.

Setelah pengakuan awal, properti investasi dicatat sebesar nilai wajarnya. Properti investasi yang sedang dalam pengembangan ulang untuk penggunaan lebih lanjut sebagai properti investasi atau ketika pasar menjadi kurang aktif tetap dicatat sebesar nilai wajarnya. Properti investasi dalam konstruksi diukur menggunakan nilai wajar jika nilai wajar dianggap dapat diukur secara andal. Properti investasi dalam konstruksi yang nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, tetapi Grup mengharapkan nilai wajarnya dapat diukur secara andal ketika konstruksi selesai, diukur senilai biaya dikurangi penurunan nilai sampai nilai wajarnya dapat diukur secara andal atau konstruksi diselesaikan – yang mana yang lebih awal.

Terkadang sulit untuk mengukur secara andal nilai wajar dari properti investasi dalam konstruksi. Untuk mengevaluasi apakah nilai wajar dari properti investasi dalam konstruksi dapat diukur secara andal, Manajemen mempertimbangkan faktor-faktor berikut, antara lain, provisi dari kontrak konstruksi, tahap penyelesaian, apabila properti standar (umum di pasaran) atau tidak standar, tingkat keandalan arus kas masuk setelah penyelesaian, risiko pengembangan spesifik atas properti, pengalaman terdahulu dengan konstruksi serupa dan status izin konstruksi.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

o. Lease (Continued)

Extension and Termination Options

Extension and termination options are included in a number of property and equipment leases of the Group. These terms are used to maximize operational flexibility in terms of managing contracts. The majority of extension and termination options held are exercisable only by the Group and not by the respective lessor.

p. Investment Properties

Investment properties are measured on cost model and then fair value model. Such cost includes the cost of replacing part of the investment properties if the recognition criteria are met and excludes the daily costs on their usage.

Investment properties consist of land and building controlled by the Group which are held to earn rentals or for capital appreciation or both, and not to be used in the production or supply of goods or services for administrative purposes or sale in the daily business activities.

The Group have revalued its investment property. Revaluation of investment property is not for tax purposes but only for commercial reporting.

Investment property is measured initially at its cost, including related transaction costs and where applicable borrowing costs.

After initial recognition, investment property is carried at fair value. Investment properties that is being redeveloped for continuing use as investment property or for which the market has become less active continues to be measured at fair value. Investment properties under construction is measured at fair value if the fair value is considered to be reliably determinable. Investment properties under construction for which the fair value cannot be determined reliably, but for which the Group expects that the fair value of the property will be reliably determinable when construction is completed, are measured at cost less impairment until the fair value becomes reliably determinable or construction is completed - whichever is earlier.

Reliably measuring the fair value of investment properties under construction can be challenging at times. To evaluate the feasibility of accurately assessing the fair value of these properties, the Management considers several factors. These factors include provisions outlined in construction contracts, the stage of completion, whether the property is considered standard (commonly found in the market) or non-standard, the reliability of incoming cash flows after completion, specific development risks associated with the property, experience with similar construction projects and the status of construction permits.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

q. Properti Investasi (Lanjutan)

Nilai wajar ditetapkan berdasarkan harga pasar aktif, dan dapat disesuaikan jika terdapat perbedaan dalam karakteristik, lokasi, atau kondisi aset. Jika informasi tersebut tidak tersedia, Grup menggunakan metode penilaian alternatif, seperti harga terbaru di pasar yang kurang aktif atau proyeksi arus kas yang didiskontokan. Penilaian dilakukan pada tanggal posisi keuangan oleh penilai ahli dengan kualifikasi yang diakui dan relevan dan memiliki pengalaman terbaru atas lokasi dan kategori dari properti investasi dinilai. Penilaian ini membentuk dasar untuk nilai tercatat pada laporan keuangan konsolidasian.

Penambahan selanjutnya dikapitalisasi ke nilai tercatat aset hanya ketika ada keuntungan ekonomi di masa yang akan datang dapat dinikmati oleh Grup dari penambahan tersebut dan hal tersebut dapat diukur secara andal. Biaya perbaikan dan perawatan lainnya akan menjadi biaya saat terjadi. Ketika bagian dari properti investasi digantikan, nilai tercatat dari bagian yang digantikan tersebut akan dihapus.

Perubahan nilai wajar diakui di laba rugi. Properti investasi berhenti diakui ketika dilepas.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laba rugi dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Perpindahan ke properti investasi dilakukan jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Perpindahan dari properti investasi dilakukan jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Jika properti yang digunakan pemilik berubah menjadi properti investasi yang akan dicatat dengan menggunakan nilai wajar, maka entitas menerapkan PSAK 216, "Aset Tetap" untuk properti yang dimiliki dan PSAK 116, "Sewa" untuk properti yang dikuasai oleh penyewa sebagai aset hak-guna sampai dengan tanggal perubahan penggunaannya. Entitas memperlakukan selisih pada tanggal tersebut antara jumlah tercatat properti berdasarkan PSAK 216 atau PSAK 116 dan nilai wajarnya dengan cara yang sama sebagaimana revaluasi sesuai dengan PSAK 216.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

q. Investment Properties (Continued)

The fair value is determined based on active market prices, and being adjusted with differences in the characteristics, location, or condition of the asset, if any. If this information is not available, the Group uses alternative valuation methods, such as recent prices on less active markets or discounted cash flow projections. Valuations are performed as of the financial position date by professional appraiser who hold recognized and relevant professional qualifications and have recent experience in the location and category of the investment property being valued. These valuations form the basis for the carrying amounts in the consolidated financial statements.

Subsequent expenditure is capitalized to the asset's carrying amount only when it is probable that future economic benefits associated with the expenditure will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and maintenance costs are expensed when incurred. When part of an investment property is replaced, the carrying amount of the replaced part is derecognized.

Changes in fair values are recognized in the profit or loss. Investment properties are derecognized when they have been disposed.

An investment property should be derecognized upon disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal of an investment property is credited or charged to operations in the year the asset is derecognized.

Transfer to investment properties is carried out if and only if there is a change of use as indicated by the end of use by the owner, the commencement of operating leases to other parties or the completion of construction or development. Transfer from investment properties are carried out if and only if there is a change of use as indicated by the commencement of owner use or commencement of development for sale.

If an owner-occupied from investment property becomes an investment property that will carried at fair value an entity shall apply PSAK 216, "Fixed Assets" for owned property and PSAK 116, "Lease" for property held by a lease as a right-of-use asset up to the date of change in use. The entity shall treat any difference at that date between the carrying amount of the property in accordance with PSAK 216 or PSAK 116 and its fair value in the same way as a revaluation in accordance with PSAK 216.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

r. Aset Takberwujud

Aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah diukur pada saat pengakuan awal sebesar biaya perolehan. Biaya aset takberwujud yang diperoleh dalam penggabungan usaha adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi. Setelah pengakuan awal aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi penurunan nilai jika ada. Aset takberwujud yang dihasilkan secara internal termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi tidak dikapitalisasi dan pengeluarannya tercermin dalam laporan laba rugi pada tahun di mana pengeluaran tersebut terjadi.

Masa manfaat dari aset takberwujud dapat dianggap memiliki masa manfaat terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas diamortisasi selama masa manfaat ekonomis dan dinilai untuk penurunan nilai apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset takberwujud. Aset takberwujud Grup memiliki taksiran masa umur manfaat ekonomis selama 5 tahun.

Perubahan masa manfaat yang diharapkan atau pola yang diharapkan dari konsumsi manfaat ekonomi masa depan aset takberwujud tersebut dicatat dengan mengubah periode amortisasi atau metode yang sesuai dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas diakui dalam laba rugi dalam kategori biaya sesuai dengan fungsi dari aset takberwujud.

Aset takberwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi tetapi diuji untuk penurunan nilai setiap tahunnya baik secara individual maupun pada tingkat unit penghasil kas. Penilaian masa manfaat tidak terbatas ditinjau setiap tahun untuk menentukan apakah masa manfaat tidak terbatas terus mendukung. Jika tidak ada perubahan, masa manfaat dari tak terbatas menjadi terbatas dilakukan secara prospektif. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset takberwujud diukur sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset dan diakui dalam laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

s. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada akhir setiap periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset. Ketika dasar alokasi yang wajar dan konsisten dapat diidentifikasi, aset Grup juga dialokasikan ke masing masing kelompok unit penghasil kas, atau sebaliknya mereka dialokasikan ke kelompok terkecil dari kelompok unit penghasil kas di mana dasar alokasi yang wajar dan konsisten dapat diidentifikasi.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

r. Intangible Assets

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. The cost of intangible assets acquired in a business combination is its fair value as at the date of acquisition. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any. Internally generated intangible assets including capitalized development cost are not capitalized and expenditure is reflected in profit or loss in the year in which the expenditure is incurred.

The useful lives of intangible assets are assessed either restricted or unrestricted. Intangible assets with restricted lives are amortized over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that intangible assets may be impaired. The Group intangible assets have estimated useful live of 5 years.

Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are recorded by changing the amortization period or method as appropriate and are treated as changes in accounting estimates. The amortization of intangible assets with definite lives is recognized in profit or loss in the expense category consistent with the function of the intangible assets.

Intangible assets with indefinite useful lives are not amortized but are tested for impairment annually either individually or at the cash generating unit level. The assessment of indefinite life is reviewed annually to determine whether indefinite life continues to be supportable. If not, the change in useful life from indefinite to definite is made on a prospective basis. Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in profit or loss when the asset is derecognized.

s. Impairment of Non-Financial Assets

At the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amount of non financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where the asset does not generate cash flows that are independent from other assets, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs. When a reasonable and consistent basis of allocation can be identified, corporate assets are also allocated to individual cash-generating units, or otherwise they are allocated to the smallest group of cash-generating units for which a reasonable and consistent allocation basis can be identified.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

s. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (Lanjutan)

Aset takberwujud dengan masa manfaat tidak terbatas dan aset tak berwujud yang belum tersedia untuk digunakan diuji penurunan nilainya setiap tahun dan ketika terdapat indikasi penurunan nilai.

Jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset dengan estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi, kecuali aset tersebut disajikan pada jumlah revaluasian, di mana kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

Ketika penurunan nilai selanjutnya dibalik, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat ketika kerugian penurunan nilai tidak diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang bersangkutan disajikan pada jumlah revaluasian, dalam hal ini pembalikan kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai kenaikan revaluasi.

t. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL atau pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Liabilitas Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan yang bukan merupakan 1) imbalan kontingen dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, 2) dimiliki untuk diperdagangkan, atau 3) ditetapkan sebagai FVTPL, selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

s. Impairment of Non-Financial Assets (Continued)

Intangible assets with indefinite useful lives and intangible assets not yet available for use are tested for impairment annually, and whenever there is an indication that the asset maybe impaired.

Recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at revaluation amount, in which the impairment loss is treated as a revaluation decrease.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase.

t. Financial Liabilities

Financial liabilities are classified as either financial liabilities "at FVTPL" or "at amortized cost" using the effective interest method.

Financial Liabilities at Amortized Cost

Financial liabilities that are not 1) contingent consideration of an acquirer in a business combination, 2) held-for trading, or 3) designated as at FVTPL, are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

t. Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal

u. Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Ketika Grup bertukar dengan pemberi pinjaman, satu instrumen utang menjadi instrumen lain dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, pertukaran tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Demikian pula, Grup memperhitungkan modifikasi substansial dari ketentuan liabilitas yang ada atau bagian dari liabilitas tersebut sebagai pelepasan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas baru. Diasumsikan bahwa persyaratannya berbeda secara substansial jika nilai kini arus kas yang didiskonto berdasarkan persyaratan yang baru, termasuk setiap *fee* (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi setiap *fee* (imbalan) yang diterima dan didiskonto menggunakan suku bunga efektif orisinal, berbeda sedikitnya 10% dari nilai kini sisa arus kas yang didiskonto yang berasal dari liabilitas keuangan orisinal. Jika modifikasi tidak substansial, maka perbedaan antara: (1) jumlah tercatat liabilitas sebelum modifikasi; dan (2) nilai kini dari arus kas setelah modifikasi, diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian modifikasi dalam keuntungan dan kerugian lainnya.

v. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

t. Financial Liabilities (Continued)

Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

u. Derecognition of Financial Liabilities

The Group derecognizes financial liabilities when, and only when, the Group's obligations are discharged, cancelled or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

When the Group exchanges with the existing lender one debt instrument into another one with the substantially different terms, such exchange is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. Similarly, the Group accounts for substantial modification of terms of an existing liability or part of it as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new liability. It is assumed that the terms are substantially different if the discounted present value of the cash flows under the new terms, including any fees paid net of any fees received and discounted using the original effective rate is at least 10% different from the discounted present value of the remaining cash flows of the original financial liability. If the modification is not substantial, the difference between: (1) the carrying amount of the liability before the modification; and (2) the present value of the cash flows after modification is recognized in profit or loss as the modification gain or loss within other gains and losses.

v. Borrowings

Borrowings are recognized initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in the profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

v. Pinjaman (Lanjutan)

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Biaya pinjaman akan dihentikan pengakuannya dari laporan posisi keuangan ketika kewajiban yang tertulis pada kontrak dibatalkan, atau sudah tidak berlaku. Selisih antara nilai tercatat dari liabilitas keuangan yang sudah berakhir atau dialihkan ke pihak lain, dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset non-kas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lain-lain atau biaya keuangan.

Ketika liabilitas keuangan dinegosiasikan kembali dan entitas mengeluarkan instrumen ekuitas kepada kreditor untuk menyelesaikan seluruh atau sebagian liabilitas (*debt for equity swap*), keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi yang dicatat sebagai selisih antara jumlah tercatat dari liabilitas keuangan.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

w. Biaya Pinjaman

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti biaya diskonto pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai dikonstruksi. Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

v. Borrowings (Continued)

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognized as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalized as a pre-payment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

Borrowing cost are removed from the statement of financial position when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of a financial liability that has been extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognized in profit or loss as other income or finance costs.

Where the terms of a financial liability are renegotiated and the entity issues equity instruments to a creditor to extinguish all or part of the liability (debt for equity swap), a gain or loss is recognized in profit or loss, which is measured as the difference between the carrying amount of the financial liability and the fair value of the equity instruments issued.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

w. Borrowing Cost

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when construction is complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined as the actual borrowing cost incurred during the period, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying assets, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalization rate to the amount expended on the qualifying assets. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying assets.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

x. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas (ketika pengaruh nilai waktu uang bersifat material).

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

y. Imbalan Kerja

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Undang-Undang Cipta Kerja) yang diundangkan pada November 2020, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Grup disyaratkan untuk memberikan imbalan pensiun sekurang-kurangnya seperti imbalan pensiun yang diatur dalam UU 6/2023, yang pada dasarnya adalah program imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai UU lebih besar dari program pensiun yang ada, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun.

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”) menerbitkan siaran pers mengenai “Pengatribusian imbalan pada periode jasa” dan oleh karena itu Grup mengubah kebijakan terkait dengan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 219 “Imbalan Kerja” mengikuti pola fakta umum program pensiun berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020 dan Peraturan Pemerintah No. 35/2021.

Program Iuran Pasti

Iuran pasti untuk program pensiun dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun dimana iuran tersebut terkait.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

x. Provision

Provisions are recognized when the Group have a present obligation (legal or constructive) as a result if because of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits can be made to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows (when the effect of time value of money is material).

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

y. Employee Benefits

In accordance with Government Regulation No. 35 of 2021 for Law Number 11 of 2020 (Job Creation Law) promulgated in November 2020, as amended by Law No. 6 of 2023 concerning Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, the Group is required to provide pension benefits at least as much as the pension benefits stipulated in Law 6/2023, which is essentially a defined benefit plan. If the pension benefits under the Law are greater than the existing pension plan, the difference is recognized as part of the pension benefit liability.

In April 2022, Financial Accounting Standard Boards – Indonesian Institute of Accountant (“IASB-IIA”) published a press release regarding “Attributing benefit to periods of service” and accordingly the Group changed the policy related to attributing benefit to periods of service in accordance with the provisions in PSAK No. 219 “Employee Benefit” following the general fact pattern of pension programs based on the Labor Law No. 11/2020 and Government Regulation No. 35/2021.

Defined Contribution Program

Defined contributions for pension plans are charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in the year in which the contributions are related.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

y. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Program Imbalan Pasti

Surplus dan defisit program imbalan pasti diukur pada:

- Nilai wajar dari aset yang direncanakan pada tanggal pelaporan; dikurangi
- Liabilitas program yang dihitung dengan menggunakan metode projected unit credit yang didiskonto ke nilai kini dengan menggunakan imbal hasil obligasi Pemerintah yang berkualitas tinggi yang tersedia yang memiliki tanggal jatuh tempo yang mendekati persyaratan liabilitas; ditambah
- Biaya servis masa lalu yang tidak diakui; dikurangi
- Dampak persyaratan pendanaan minimum yang disetujui dengan skema wali amanat.

Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti neto diakui langsung dalam ekuitas. Pengukuran kembali tersebut termasuk:

- Keuntungan dan kerugian aktuaris;
- Imbalan atas aset program (tidak termasuk bunga); dan
- Aset dengan efek batas tertinggi (tidak termasuk bunga).

Biaya jasa diakui dalam laba rugi dan termasuk biaya jasa kini dan masa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen.

Beban bunga neto (pendapatan) diakui dalam laba rugi dan dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto untuk mengukur kewajiban imbalan pasti (aset) pada awal periode tahunan hingga pembayaran manfaat selama periode.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan manfaat program atau kurtailmen diakui secara langsung dalam laba rugi.

Penyelesaian program manfaat pasti diakui dalam periode dimana penyelesaian tersebut terjadi.

Manfaat Jasa Jangka Panjang Lain

Imbalan kerja lain yang diharapkan untuk diselesaikan secara keseluruhan dalam 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan disajikan sebagai liabilitas jangka pendek.

Imbalan kerja lain yang tidak diharapkan untuk diselesaikan secara keseluruhan dalam 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang dan dihitung dengan menggunakan metode projected unit credit dan kemudian didiskonto dengan menggunakan imbal hasil obligasi Pemerintah berkualitas tinggi yang tersedia dengan tanggal jatuh tempo mendekati sisa periode yang diharapkan untuk diselesaikan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

y. Employee Benefits (Continued)

Defined Benefit Plan

Defined benefit plan surpluses and deficits are measured at:

- The fair value of plan assets at the reporting date; less
- Plan liabilities calculated using the projected unit credit method discounted to its present value using yields available on high quality Government bonds that have maturity dates approximating to the terms of the liabilities; plus
- Unrecognized past service costs; less
- The effect of minimum funding requirements agreed with scheme trustees.

Remeasurements of the net defined benefit obligation are recognized directly within equity. The remeasurements include:

- Actuarial gains and losses;
- Return on plan assets (interest excluded); and
- Any asset ceiling effects (interest excluded).

Service costs are recognized in profit or loss and include current and past service costs as well as gains and losses on curtailments.

Net interest expense (income) is recognized in the profit or loss and is calculated by applying a discount rate to measure the defined liability (asset) at the beginning of the annual period to the payment of benefits during the period.

Gains or losses arising from changes to scheme benefits or scheme curtailment are recognized immediately in profit or loss.

Settlements of defined benefit schemes are recognized in the period in which the settlement occurs.

Other Long-term Service Benefits

Other employee benefits that are expected to be settled within 12 (twelve) months after the end of the reporting period are presented as current liabilities.

Other employee benefits that are not expected to be settled within 12 (twelve) months after the end of the reporting period are presented as non-current liabilities and calculated using the projected unit credit method and then discounted using yields available on high quality Government bonds that have maturity dates approximating to the expected remaining period to settlement.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

z. Distribusi Laba

Sesuai dengan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan No. 117 tanggal 20 Juni 1995, pembagian laba bersih setelah pajak dipergunakan untuk cadangan dan dividen, (persentasenya ditetapkan tiap tahun dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)).

aa. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pengakuan Pendapatan

Pendapatan diakui menggunakan 5 langkah:

- 1) Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
- 2) Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan.
- 3) Tentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jika pertimbangan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, Grup memperkirakan jumlah imbalan yang diharapkan berhak sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi perkiraan jumlah jaminan tingkat layanan yang akan dibayarkan selama masa kontrak.
- 4) Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya ekspektasian ditambah margin.
- 5) Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dalam kondisi sebagai berikut:

- a) Pada waktu tertentu (biasanya untuk janji dalam memindahkan barang ke pelanggan); atau
- b) Sepanjang waktu (biasanya untuk janji dalam memberikan layanan pada pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Grup memilih ukuran kemajuan yang sesuai untuk menentukan jumlah pendapatan yang harus diakui ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Liabilitas kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

z. Profit Distribution

According to the Articles of Association through Deed No. 117 dated June 20, 1995, share of net profit after tax is used for reserves and dividends (the percentage is set each year in the General Meeting of Shareholders (GMS)).

aa. Revenue and Expenses Recognition

Revenue Recognition

Revenue is recognized using the 5-step assessment:

- 1) Identify contract(s) with a customer.
- 2) Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
- 3) Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.
- 4) Allocate the transaction price to each performance obligation based on the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost-plus margin.
- 5) Recognize revenue when the performance obligation is satisfied by transferring the promised goods or services to the customer (which is when the customer obtains control of the goods or services).

A performance obligation may be satisfied at the following:

- a) A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- b) Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

Payment of the transaction price is different for each contract. A contract asset is recognized once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognized once the consideration paid by customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied.

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

aa. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Pengakuan Pendapatan (Lanjutan)

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"). Grup menelaah pengaturan pendapatannya melalui kriteria tertentu untuk menentukan apakah bertindak sebagai prinsipal atau agen. Grup berkesimpulan bertindak sebagai prinsipal dalam semua pengaturan pendapatan.

Pendapatan Surat Pos dan Paket Pos

Pendapatan dari surat pos dan paket pos yaitu arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari jasa layanan surat pos dan paket pos yang merupakan aktivitas normal Grup.

Pendapatan diakui pada suatu waktu pada saat surat atau paket diserahkan di *front end* untuk dilakukan pemrosesan dan pengiriman.

Pendapatan Ritel dan Properti

Pendapatan ritel dan properti yaitu arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari jasa penjualan ritel dan jasa sewa properti yang merupakan aktivitas normal Grup.

Pendapatan Logistik

Pendapatan logistik yaitu arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari jasa layanan kiriman jumbo dan pergudangan.

Pendapatan logistik diakui ketika Grup telah memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan menyerahkan barang yang dijanjikan kepada pelanggan.

Pendapatan Jasa Keuangan

Pendapatan jasa keuangan yaitu arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari jasa layanan pospay dan jasa keuangan lainnya yang merupakan aktivitas normal Grup.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

ab. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui di dalam laba rugi, kecuali sepanjang pajak tersebut terkait dengan unsur-unsur yang terkait di dalam penghasilan komprehensif lain atau terkait langsung di dalam ekuitas. Dalam hal ini, pajak juga diakui masing-masing di dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui di dalam ekuitas.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

aa. Revenue and Expenses Recognition (Continued)

Revenue Recognition (Continued)

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and Value Added Taxes ("VAT"). The Group assesses its revenue arrangements against specific criteria to determine if it is acting as principal or agent. The Group has concluded that it is acting as a principal in all of its revenue arrangements.

Revenue from Post Mail and Parcel

Revenue from post mail and parcel is gross inflow from economic benefits which arise from post mail and parcel services which are the Group normal operation activity.

Revenue is recognized at point in time when mail and parcel is handed over to the front end for processing and delivery.

Revenue from Retail & Property

Revenue from retail and property is gross inflow from economic benefit which arise from retail sales and property lease which is the Group's, normal operation activity.

Revenue from Logistic

Revenue from logistic is gross inflow from economic benefit which arises from jumbo shipping services and warehousing.

Revenue from logistic recognized when the Group has fulfilled its performance obligations by transferring goods promised to customers.

Revenue from Financial Services

Revenue from financial services is gross inflow from economic benefit which arise from pospay and other financial services which is the Group's normal operation activity.

Expenses Recognition

Expenses are recognized as incurred on an accrual basis.

ab. Taxation

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognise in other comprehensive income or directly in equity. In this case the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity respectively.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(Lanjutan)**

ab. Perpajakan (Lanjutan)

Pajak Kini

Beban pajak penghasilan kini dihitung dengan dasar peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif berlaku pada periode pelaporan. Aset dan/atau liabilitas pajak penghasilan kini terdiri dari kewajiban kepada maupun tagihan dari fiskus terkait dengan periode pelaporan kini atau sebelumnya yang belum dibayar pada akhir setiap periode pelaporan. Aset dan/atau liabilitas pajak penghasilan kini tersebut dihitung berdasarkan tarif pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku pada periode fiskal terkait berdasarkan laba kena pajak periode tersebut. Seluruh beban aset atau liabilitas pajak kini diakui sebagai unsur beban pajak penghasilan di dalam laba rugi.

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Penghasilan Badan diakui sebagai bagian dari Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - periode berjalan, sedangkan untuk SKP selain PPh Badan diakui dalam beban lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembelanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode laporan posisi keuangan pada perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dan nilai tercatatnya didalam laporan keuangan konsolidasian. Aset pajak tangguhan diakui bagi seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang terdapat kemungkinan laba kena pajak di masa depan akan timbul dimana perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan. Liabilitas kena pajak diakui bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak. Manfaat pajak di masa depan seperti akumulasi kerugian pajak yang belum dikompensasi juga diakui selama realisasi manfaat tersebut kemungkinan terjadi.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali bagi liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari:

1. Pengakuan awal *goodwill*; atau
2. Pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang: (1) bukan transaksi kombinasi bisnis; dan (2) pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba/rugi pajak.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang setiap periode pelaporan dan dikurangkan selama tidak terdapat kemungkinan laba kena pajak yang cukup akan timbul untuk memanfaatkan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui dinilai ulang setiap periode pelaporan dan diakui sepanjang terdapat kemungkinan penghasilan kena pajak di masa depan akan memulihkan aset pajak tangguhan.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION
(Continued)**

ab. Taxation (Continued)

Current Tax

The current income tax charge is calculated based on the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. Current income tax assets and/or liabilities comprise those obligations to or claims from tax authorities relating to the current or prior reporting period that are unpaid at the end of each reporting period date. Assets and/or liabilities are calculated according to the tax rates and tax laws applicable to the fiscal periods to which they relate based on the taxable profit for the period. All changes to current tax assets or liabilities are recognized as a component of income tax expense in profit or loss.

The amounts of additional tax principal and penalty imposed through a Tax Assessment Letter (SKP) of Corporate Income Tax are recognized as part of Income Tax Benefit (Expense) – current, while other SKP is recognized as part of other expenses of the current period in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income unless further settlement is submitted. The amounts of tax principal and penalty imposed through an SKP are deferred as long as they meet the asset recognition criteria.

Deferred Tax

Deferred income tax assets and liabilities are recognized using the balance sheet method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences. Future tax benefits such as the carry-forward of unused tax losses are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except for the deferred tax liability arising from:

1. The initial recognition of goodwill; or
2. The initial recognition of an asset or liability in a transaction that is: (1) not a business combination; and (2) at the time of the transaction affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed each reporting period and reduced to the extent that it is not probable that sufficient taxable profit will arise to utilize part or all of the deferred tax assets. Unrecognized deferred tax assets are reassessed each reporting period and recognized to the extent that it is probable that future taxable income will recover the deferred tax assets.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

ab. Perpajakan (Lanjutan)

Pajak Tangguhan (Lanjutan)

Jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada tanggal pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat aset/liabilitas pajak tangguhan diselesaikan/dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika Grup memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset dan liabilitas pajak penghasilan ditangguhkan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan maupun entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda dimana terdapat intensi untuk menyelesaikan saldo pada basis yang sama.

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

1. PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari unsur beban yang diterapkan; dan
2. Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

ac. Persediaan Aset Real Estat

Aset real estat terdiri dari ruko yang siap dijual dan tanah yang sedang dikembangkan dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah.

Biaya perolehan bangunan yang sedang dalam proses konstruksi meliputi biaya perolehan tanah yang telah selesai dikembangkan ditambah dengan biaya konstruksi, biaya lainnya yang dapat diatribusikan pada aktivitas, pengembangan real estat dan biaya pinjaman serta dipindahkan ke bangunan yang siap dijual pada saat selesai dibangun dan siap dijual.

Biaya aktivitas pengembangan real estat yang dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat adalah:

- Biaya pra-perolehan tanah;
- Biaya perolehan tanah;
- Biaya yang secara langsung berhubungan dengan proyek;
- Biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas pengembangan real estat;
- Biaya pra-perolehan tanah atas tanah yang tidak berhasil diperoleh; dan
- Kelebihan biaya dari hasil yang diperoleh atas pembangunan sarana umum yang dikomersialkan yang dijual atau dialihkan sehubungan dengan penjualan unit.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

ab. Taxation (Continued)

Deferred Tax (Continued)

The amount of the deferred tax asset or liability is determined using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the reporting date and are expected to apply when the deferred tax assets/liabilities are settled/recovered.

Deferred tax assets and liabilities are offset when the Group have a legally enforceable right to offset current tax assets against liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to income taxes charged by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

Value Added Tax

Revenue, expenses, and assets are recognized net of the amount of VAT except:

1. Where the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable from the taxation authority in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and
2. Receivables and payables that are stated with the amount of VAT included.

ac. Real Estate Assets Inventories

Real estate assets consisting of shophouse available for sale and land under development are stated at cost or net realizable values, whichever is lower.

The cost of buildings under construction includes the cost of land that has been completed plus construction costs, other costs attributable to activities, real estate development and borrowing costs as well as being transferred to buildings ready for sale when they are completed and ready for sale.

The real estate development costs which are capitalized to the real estate development project are:

- Land pre-acquisition costs;
- Land acquisition cost;
- Costs directly related to the project;
- Cost that are attributable to real estate development activities;
- Pre-acquisition costs of land which is not successfully acquired; and
- Excess of costs over anticipated proceeds on the sale or transfer of commercialized public utilities in connection with the sale of units.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

ac. Persediaan Aset Real Estat

Biaya yang telah dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat dialokasikan ke setiap unit real estat dengan metode identifikasi khusus.

Beban yang diakui pada saat terjadinya adalah biaya yang tidak berhubungan dengan proyek real estat.

ad. Segmen Operasi

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasi utama. Pengambil keputusan operasi utama, yang bertanggung jawab mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, telah diidentifikasi sebagai komite pengarah yang mengambil keputusan strategis.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja terfokus pada kategori pada setiap produk, yang menyerupai informasi segmen yang dilaporkan di periode sebelumnya. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi.

ae. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Namun pengungkapan tidak diperlukan jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian jika adanya kemungkinan arus masuk dari manfaat ekonomi.

af. Modal Saham

Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

ac. Real Estate Assets Inventories

Costs capitalized to real estate project development are allocated to each real estate unit using the specific identification method.

Expenses which are not related to the development of real estate are charged to expense when incurred.

ad. Operating Segment

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the key operating decision-maker. The key operating decision-maker, who is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments, has been identified as the steering committee that makes strategic decisions.

An operating segment is a component of entity which:

- that engages in business activities from which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transactions with other components with the same entity);
- whose operating results are reviewed regularly by key operating decision-maker to make decisions regarding the resources to be allocated to the segment and assess its performance; and
- for which discrete financial information is available.

The information used by the key operating decision-maker for the purpose of resource allocation and performance assessment is more specifically focused on the category of each product, which is similar to the business segment reported in the prior period. All transactions between segments have been eliminated.

ae. Contingencies

Contingent liabilities are not recognized in the consolidated financial statements but are disclosed in the notes to the consolidated financial statements. However, disclosure is not required if an outflow of resources embodying economic benefits is unlikely. Contingent assets are not recognized in the consolidated financial statements but are disclosed in the notes to the consolidated financial statements when there is possibility for inflow of economic benefits.

af. Share Capital

Incremental costs directly attributable to the issue of new ordinary shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

af. Modal Saham (Lanjutan)

Ketika Grup membeli modal saham ekuitas entitas (saham treasuri), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Ketika saham biasa tersebut selanjutnya diterbitkan kembali, imbalan yang diterima, dikurangi biaya tambahan transaksi yang terkait dan dampak pajak penghasilan yang terkait dimasukkan pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas.

ag. Laba per Lembar Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba selama tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode berjalan.

ah. Biaya Emisi Obligasi

Biaya emisi obligasi merupakan biaya transaksi yang harus dikurangkan langsung dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi bersih obligasi. Selisih antara hasil emisi bersih dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi yang bersangkutan.

ai. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal periode pelaporan yang menyediakan informasi tambahan tentang posisi keuangan Grup pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuaian) disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian jika material. Peristiwa setelah tanggal periode pelaporan yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian apabila material.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, akan jarang sekali sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama 12 bulan ke depan dipaparkan di bawah ini.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

af. Share Capital (Continued)

Where the Group purchases the entity's equity share capital (treasury shares), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is deducted from equity attributable to the entity's equity holders until the shares are cancelled or reissued. Where such ordinary share are subsequently reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to the entity's equity holders.

ag. Earning per Share

Basic earnings per share is calculated by dividing net income for the year attributable to the owners of the parent company with the weighted average number of the outstanding issued and fully paid shares during the period.

ah. Bonds Issuance Costs

Bonds issuance costs are transaction costs to be deducted from the proceeds to determine the net proceeds of bonds. The difference between the net proceeds and the nominal value is a discount or premium and will be amortized over the term of the bonds.

ai. Events After the Reporting Period

Events that occur after the reporting period that provide additional information about the Group financial position at the reporting date (adjusting events) are reflected in the consolidated financial statements when material. Events that occur after the reporting period that are not adjusting events are disclosed in the notes to the consolidated financial statements when material.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

Estimates and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

Critical Accounting Estimates and Assumptions

The Group makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, by definition, seldom equal the related actual results. The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next 12 months are addressed below.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting (Lanjutan)

a. Penggunaan Asumsi Kelangsungan Usaha

Dalam menerapkan kebijakan akuntansi Grup, selain yang melibatkan estimasi, manajemen telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan asumsi bahwa Grup akan dapat mempertahankan kelangsungan usaha dalam operasinya di tahun mendatang, yang merupakan pertimbangan penting yang berdampak paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Penilaian asumsi kelangsungan usaha melibatkan pengambilan keputusan oleh manajemen, pada titik waktu tertentu, tentang hasil masa depan dari peristiwa atau kondisi yang secara inheren tidak pasti. Manajemen Grup mempertimbangkan bahwa Grup memiliki kemampuan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan peristiwa atau kondisi utama, yang dapat menimbulkan risiko bisnis, yang secara individual atau kolektif dapat menimbulkan keraguan signifikan atas asumsi kelangsungan usaha.

b. Ketidakpastian Eksposur Perpajakan

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat pada akun tagihan pajak dapat dipulihkan dan direstitusi oleh Kantor Pajak. Lebih lanjut, manajemen mempertimbangkan liabilitas yang mungkin timbul dari hasil pemeriksaan pajak yang masih diajukan keberatannya.

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan maupun pajak lainnya atas transaksi tertentu. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Grup membuat analisis untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak yang belum diakui harus diakui.

c. Imbalan Kerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya/(penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa mendatang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat kewajiban pensiun.

Grup menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu kewajiban pensiun yang terkait.

**4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES
AND ASSUMPTIONS (Continued)**

Critical Accounting Estimates and Assumptions (Continued)

a. The Use of Going Concern Assumption

In the process of applying the Group's accounting policies, apart from those involving estimations, management has prepared the consolidated financial statements on the assumption that the Group will be able to operate as a going concern in the coming years, which is a critical judgement that has the most significant effect on the amounts recognised in the consolidated financial statements. The assessment of the going concern assumption involves making a judgement by the management, at a particular point of time, about the future outcome of events or conditions which are inherently uncertain. The Group's management considers that the Group has the capability to continue as a going concern and the major events or conditions, which may give rise to business risks, that individually or collectively may cast significant doubt upon the going concern.

b. Uncertain Tax Exposures

Based on the tax regulations currently enacted, management assessed whether the amounts recorded in the underestimated claims for tax refund are recoverable and refundable by the Tax Office. Further, the management also assessed the possible liabilities that may arise from the tax assessments under objection.

Significant judgement is involved in determining the provision for corporate income tax and other taxes on certain transactions. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. The Group makes an analysis of all tax positions related to income taxes to determine if a tax liability for unrecognized taxes should be recognized.

c. Employee Benefits

The present value of the pension obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate and future salary increase. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of pension obligations.

The Group determines the appropriate discount rate and future salary increase at the end of each reporting period. The discount rate is interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting (Lanjutan)

c. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Grup mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang.

Asumsi kunci kewajiban pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 20.

d. Estimasi Masa Manfaat Aset Non Keuangan

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset non-keuangan berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset non-keuangan adalah berdasarkan penelaahan Grup terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang sejenis. Estimasi masa manfaat ditelaah minimal setiap akhir periode pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor faktor yang disebutkan di atas.

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset non-keuangan antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

e. Sewa

Grup mempunyai beberapa perjanjian sewa di mana Grup bertindak sebagai penyewa untuk beberapa aset tertentu. Grup mengevaluasi apakah Grup memiliki hak untuk mengendalikan aset sewaan berdasarkan PSAK 116, "Sewa", yang mensyaratkan Grup untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari hak untuk mengendalikan aset sewaan.

**4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES
AND ASSUMPTIONS (Continued)**

Critical Accounting Estimates and Assumptions (Continued)

c. Employee Benefits (Continued)

For the rate of future salary increases, the Group collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans.

Other key assumptions for pension obligations are based in part on current market conditions. Additional information is disclosed in Note 20.

d. Estimating Useful Lives of Non-Financial Assets

The Group estimates the useful lives of its non-financial assets based on expected asset utilisation as supported by business plans and strategies that also consider expected market behavior. The estimation of the useful lives of non-financial assets are based on the Group's assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives are reviewed at least each financial period-end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates caused by changes in the factors mentioned above.

The Group estimates the useful lives of its non-financial assets to be within 4 to 20 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

e. Leases

The Group has various lease agreements where the Group acts as a lessee in respect of certain assets. The Group evaluates whether the Group has the right to control the use of leased asset based on PSAK 116, "Lease", which requires the Group to make judgements and estimates of right to control the leased asset.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting (Lanjutan)

e. Sewa (Lanjutan)

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, Manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu saat sewa terjadi, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, opsi pembelian atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan). Penilaian tersebut ditinjau jika terjadi peristiwa signifikan atau perubahan signifikan dalam situasi yang memengaruhi penilaian ini dan berada dalam kendali Grup.

f. Pengakuan Pendapatan Penjualan Properti

Pertimbangan Penting Dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi Grup

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional dari Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi.

Grup mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan mata uang fungsionalnya seperti mata uang yang mempengaruhi pendapatan, biaya dan aktivitas pendanaan serta mata uang yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya dipertahankan.

Berdasarkan substansi ekonomis dari kondisi yang sesuai dengan Grup, mata uang fungsional telah ditentukan berupa Rupiah Indonesia (IDR), karena hal ini berkaitan dengan fakta bahwa mayoritas bisnis Grup dipengaruhi oleh penetapan harga dengan lingkungan ekonomis lokal.

b. Estimasi Penyisihan atas Penurunan Nilai dari Piutang

Saat mengukur KKE, Grup menggunakan informasi masa depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana penggerak ini akan saling mempengaruhi.

**4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES
AND ASSUMPTIONS (Continued)**

Critical Accounting Estimates and Assumptions (Continued)

e. Leases (Continued)

Since the Group could not readily determine the implicit rate, Management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are some number factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates. In determining an incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

In determining the lease term, the Group considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, purchase option or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated). The lease term is reviewed if a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment and that is within the control of the Group.

f. Revenue Recognition on Sales of Properties

Critical Judgements In Applying The Group's Accounting Policies

a. Functional Currency

The functional currency of the Group is the currency of the primary economic environment in which each entity operates.

The Group considers some factors in determining its functional currency, among others, the currency that mainly influences the revenue, cost and financing activities, and the currency in which receipts from operating activities are usually retained.

Based on the economic substance of the underlying circumstances relevant to the Group, the functional currency has been determined to be Indonesian Rupiah (IDR), as this reflected the fact that majority of the Group operational businesses are influenced by pricing in local economic environment.

b. Estimating Allowance for Impairment Losses on Receivables

When measuring ECL, the Group uses reasonable and supportable forward looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Pertimbangan Penting Dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi Grup (Lanjutan)

b. Estimasi Penyisihan atas Penurunan Nilai dari Piutang (Lanjutan)

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar. Perhitungan didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual terutang dan yang diharapkan akan diterima, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

Probability of default merupakan input utama dalam mengukur KKE. *Probability of default* adalah perkiraan kemungkinan gagal bayar selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, penyisihan penurunan nilai piutang usaha Grup adalah masing-masing sebesar Rp194.662.553.192 dan Rp222.097.356.333 (Catatan 7).

c. Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan

Grup membuat penyisihan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan pada masa mendatang. Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi penurunan nilai persediaan telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penyisihan penurunan nilai persediaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil usaha Grup.

Tidak terdapat penurunan nilai tercatat cadangan nilai persediaan Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Catatan 8).

d. Penurunan Nilai atas Aset Tetap dan Properti Investasi

Masa manfaat setiap aset tetap dan properti investasi Grup ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan dan amortisasi yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak ada penurunan nilai yang diakui dalam aset tetap dan properti investasi Grup (Catatan 11 dan 12)

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

Critical Judgements In Applying The Group's Accounting Policies (Continued)

b. Estimating Allowance for Impairment Losses on Receivables (Continued)

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. *Probability of default* is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

As of December 31, 2024 and 2023, allowance for impairment on the Group's receivables amounting to Rp194,662,553,192 and Rp222,097,356,333 (Note 7).

c. Allowance for Decline in Value of Inventories

The Group provides allowance for decline in value of inventories based on future estimated inventories. While it is believed that the assumptions used in the estimation of the allowance for decline in value of inventories are appropriate and reasonable, significant changes in these assumptions may materially affect the assessment of the allowance for decline in value of inventories, which ultimately will impact the result of the Group's operations.

There were no allowance for impairment inventory as of December 31, 2024 and 2023 (Note 8).

d. Impairment of Fixed Assets and Investment Properties

The useful life of each item of the Group's fixed assets and investment properties are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of fixed assets would affect the recorded depreciation and amortization expense, respectively, and decrease in the carrying values of these assets.

As of December 31, 2024 and 2023, there was no allowance for impairment losses recognized in the Group fixed assets and investment properties (Notes 11 and 12).

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**Pertimbangan Penting Dalam Penentuan Kebijakan
Akuntansi Grup (Lanjutan)**

e. Penentuan Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan

Manajemen menggunakan teknik penilaian, termasuk model diskonto arus kas dalam mengukur nilai wajar dari instrumen keuangan dimana penawaran pasar aktif tidak tersedia.

Dalam menerapkan teknik penilaian, manajemen memanfaatkan input pasar semaksimal mungkin, dan menggunakan estimasi dan asumsi, yang sejauh mungkin, sesuai dengan data yang dapat diobservasi oleh pelaku pasar akan digunakan di dalam penentuan harga instrumen. Dalam hal data yang berlaku tidak dapat dicermati, maka manajemen akan menggunakan estimasi terbaik dimana asumsi akan digunakan oleh pelaku pasar. Perkiraan ini mungkin berbeda dengan harga sebenarnya yang akan dicapai dalam transaksi wajar pada tanggal pelaporan.

f. Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Penentuan provisi untuk pajak penghasilan badan memerlukan pertimbangan yang signifikan dari manajemen. Ada transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya tidak pasti selama kegiatan usaha biasa. Grup mengakui liabilitas atas masalah pajak penghasilan badan yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak penghasilan badan akan terutang. Jika hasil pajak final dari hal-hal tersebut berbeda dari jumlah yang pada awalnya dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan pada periode di mana penentuan tersebut dibuat.

g. Realisasi dari Aset Pajak Tangguhan

Grup melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai aset tersebut sebesar mungkin yang tidak dapat direalisasikan, dimana ketersediaan penghasilan kena pajak memungkinkan untuk menggunakan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut. Penelaahan Grup atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan berdasarkan tingkat dan waktu dari taksiran penghasilan kena pajak untuk periode pelaporan berikutnya.

**4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES
AND ASSUMPTIONS (Continued)**

**Critical Judgements In Applying The Group's Accounting
Policies (Continued)**

e. Determining Fair Value of Financial Instruments

Management uses valuation techniques, including the discounted cash flow model in measuring the fair value of financial instruments where active market quotes are not available.

In applying the valuation techniques, management makes maximum use of market inputs, and uses estimates and assumptions that are, as far as possible, consistent with observable data that market participants would use in pricing the instrument. Where applicable data is not observable, management uses its best estimate about the assumptions that market participants would make. These estimates may vary from the actual prices that would be achieved in an arm's length transaction at the reporting date.

f. Income Tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

Determining provision for corporate income tax requires significant judgment by management. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Where the final tax outcome of these matters are different from the amount that are initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

g. Realization of Deferred Tax Assets

The Group conducted a review of the carrying amount of deferred tax assets at each end of reporting period and reduce the value of such assets by as much as possible which cannot be realized, where the availability of taxable income allow to use all or part of the deferred tax assets. The Group's review on the recognition of deferred tax assets for deductible temporary difference can be deductible based on the level and timing from the estimated taxable income for the next reporting period.

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**Pertimbangan Penting Dalam Penentuan Kebijakan
Akuntansi Grup (Lanjutan)**

g. Realisasi dari Aset Pajak Tangguhan (Lanjutan)

Estimasi tersebut didasarkan pada pencapaian Grup di masa lalu dan ekspektasi masa depan terhadap pendapatan dan beban, serta dengan strategi perencanaan pajak di masa depan. Namun tidak ada kepastian bahwa Grup dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

h. Provisi dan Kontinjensi

Grup, dalam kegiatan usaha normal, menjalankan sesuai ketentuan untuk kewajiban hukum maupun konstruktif, jika ada, sesuai dengan kebijakan pada ketentuan dan kontinjensi. Dalam pengakuan dan pengukuran ketentuan, manajemen mengambil pertimbangan risiko dan ketidakpastian.

Grup tidak mengakui provisi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

**5. DANA PENGGANTIAN PENUGASAN BANTUAN
OPERASIONAL (BO) – LAYANAN POS UNIVERSAL
(LPU)**

Sehubungan dengan penyelenggaraan layanan pos atas penugasan dari pemerintah yang disebut Bantuan Operasional LPU (Layanan Pos Universal) yang sebelumnya pada tahun 2016 disebut kompensasi (subsidi) atas Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) Pos. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), besarnya dana LPU Pos untuk tahun anggaran 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tahun/ Year	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ The Handover of Budget Execution Document	Tanggal/ Date	Jumlah/ Total
2024	SP DIPA-999.08.1.984526/2024	29 Desember/ December 29, 2023	369.802.535.000
2023	SP DIPA-999.08.1.984526/2023	30 Desember/ December 30, 2022	378.269.521.000

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi Nomor 3490/DJPPI.2/HK.04.02/12/2023 dan PKS.352/DIRUT/1223 tanggal Desember 29, 2023 tentang Subsidi Operasional Penyelenggaraan Layanan Pos Universal Tahun Anggaran 2024. Pagu besaran Subsidi Operasional Penyelenggaraan LPU Tahun anggaran 2024 sebesar Rp369.802.535.000.

Pembayaran atas penggantian Bantuan Operasional (BO) LPU dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi secara bertahap per triwulan pada awal tahun 2023. Namun berdasarkan kesepakatan dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, diubah menjadi per bulan sejak periode April 2023. Rincian penerimaan dana LPU periode 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

**4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES
AND ASSUMPTIONS (Continued)**

**Critical Judgements In Applying The Group's Accounting
Policies (Continued)**

g. Realization of Deferred Tax Assets (Continued)

The estimation is based on the achievement of the Group in the past and future expectation toward income and expenses, as well as with the tax planning strategies in the future. But there is no certainty that the Group can generate sufficient taxable income to allow to use part or all of these deferred tax assets.

h. Provisions and Contingencies

The Group, in the ordinary course of business, sets up appropriate provisions for its present legal or constructive obligations, if any, in accordance with its policies on provisions and contingencies. In recognizing and measuring provisions, management takes risk and uncertainties into account.

The Group has not recognized any provision as of December 31, 2024 and 2023.

**5. OPERATIONAL AID FOR UNIVERSAL POST SERVICE
(UPS) ASSIGNMENT**

In connection with the implementation of postal services on assignments from the government called UPS Operational Assistance (Universal Postal Service) which previously in 2016 was called compensation (subsidies) for the Implementation of Postal General Service Obligations (KPU). Based on the Letter of Ratification of the Budget Implementation List (DIPA), the amount of Postal UPS funds for the 2024 and 2023 fiscal years is as follows:

Based on Cooperation Agreement with the Ministry of Communication and Information Number 3490/DJPPI.2/HK.04.02/12/2023 and PKS.352/DIRUT/1223 dated December 29, 2023 concerning Operational Subsidies for the Implementation of Universal Postal Services for Fiscal Year 2024. The ceiling amount of the Operational Subsidy for the Implementation of LPU for fiscal year 2024 is Rp369,802,535,000.

Payment for the replacement of UPS Operational Assistance (OA) was made by the Ministry of Communication and Information in quarterly installments at the beginning of 2023. However, based on an agreement with the Ministry of Communication and Information, it was changed to monthly from the period of April 2023. Details of UPS fund receipts on December 31, 2024 and 2023, are as follows:

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. DANA PENGGANTIAN PENUGASAN BANTUAN OPERASIONAL (BO) – LAYANAN POS UNIVERSAL (LPU) (Lanjutan)

5. OPERATIONAL AID FOR UNIVERSAL POST SERVICE (UPS) ASSIGNMENT (Continued)

2024			
Uraian	Tanggal Penerimaan/ Date of Receipt	Jumlah/ Total	Description
Periode Januari 2024	20 Maret/March 2024	24.171.690.971	Period January 2024
Periode Februari 2024	27 Maret/March 2024	24.924.147.089	Period February 2024
Periode Maret 2024	13 Mei/May 2024	56.761.498.805	Period March 2024
Periode April 2024	31 Mei/May 2024	24.606.837.712	Period April 2024
Periode Mei 2024	28 Juni/June 2024	25.416.597.775	Period May 2024
Periode Juni 2024	6 Agustus/August 2024	42.787.908.321	Period June 2024
Periode Juli 2024	27 Agustus/August 2024	25.695.795.434	Period July 2024
Periode Agustus 2024	25 September/September 2024	24.657.954.522	Period August 2024
Periode September 2024	7 November/November 2024	43.963.623.541	Period September 2024
Periode Oktober 2024	28 November/November 2024	19.297.802.427	Period October 2024
Periode November dan Desember 2024	19 Desember/December 2024	54.560.973.884	Period November and December 2024
Jumlah		366.844.830.481	Total

2023			
Uraian	Tanggal Penerimaan/ Date of Receipt	Jumlah/ Total	Description
Triwulan I/ 2023	31 Mei/ May 2023	73.764.318.244	Quarter I/ 2023
Periode April 2023	27 Juni/ June 2023	31.072.527.610	Period April 2023
Periode Mei 2023	27 Juni/ June 2023	20.382.793.802	Period May 2023
Periode Juni 2023	11 Agustus/ August 2023	38.588.625.318	Period June 2023
Periode Juli 2023	29 Agustus/ August 2023	20.883.437.302	Period July 2023
Periode Agustus 2023	11 September/ September 2023	24.711.633.474	Period August 2023
Periode September 2023	16 November/ November 2023	47.396.169.464	Period September 2023
Periode Oktober 2023	8 Desember/ December 2023	27.155.485.722	Period October 2023
Periode November dan Desember 2023	19 Desember/ December 2023	82.165.593.988	Period November and December 2023
Jumlah		366.120.584.924	Total

Dasar perhitungan untuk pengajuan atas penerimaan dana LPU tersebut adalah dengan menghitung dan menghimpun seluruh kerugian dari kantor-kantor pos terpencil/kantor pos cabang luar kota (KPCLK).

The basis calculation for the proposal of the UPS funds receipt is by calculating and accumulating all the losses from the out-of-town branch post offices (KPCLK).

Dalam pelaksanaan Layanan Pos Universal belum semua beban terakomodir dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22 tahun 2013 yang disesuaikan dengan Kepkominfo Nomor 442 tahun 2024 tentang Pedoman Perhitungan dan Pengawasan Serta Pembayaran Subsidi Operasional Layanan Pos Universal tanggal 26 September 2024.

In the implementation of Universal Postal Services, not all expenses have been accommodated in the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology No. 22 of 2013 which is adjusted to the Decree of the Minister of Communication and Information Technology No. 442 of 2024 concerning Guidelines for Calculation and Supervision and Payment of Operational Subsidies for Universal Postal Services dated September 26, 2024.

Dalam perhitungan penggantian penugasan BO–LPU tahun 2024 dan 2023, formula perhitungan yaitu dengan menyelisihkan biaya operasional dengan pendapatan. Adapun komponen biaya operasional meliputi biaya sumber daya manusia, biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penyusutan sedangkan pendapatan meliputi pendapatan Layanan Pos Universal, pos komersial dan layanan transaksi keuangan.

In the calculation of the replacement of OA–UPS assignments in 2024 and 2023, the calculation formula is by sorting operational cost with revenue. The components of operating costs include human resource cost, operating cost, maintenance cost, administrative and general cost, and depreciation cost while revenue includes Universal Postal Service revenue, commercial post and financial transaction services.

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**5. DANA PENGGANTIAN PENUGASAN BANTUAN
OPERASIONAL (BO) – LAYANAN POS UNIVERSAL
(LPU) (Lanjutan)**

Terkait dengan penggantian biaya pegawai untuk pegawai di kantor LPU hanya dihitung maksimal 2 orang, sedangkan untuk biaya operasional atas beban *switching*, beban sewa atas *software* dikeluarkan dalam perhitungan penggantian biaya operasional. Selanjutnya untuk biaya pengadaan prangko dan biaya alat tulis kantor yang sebelumnya diperhitungkan dengan biaya *joint cost* diubah menjadi biaya *at cost* berdasarkan penggunaan pemakaian di Kantor Pos LPU.

**5. OPERATIONAL AID FOR UNIVERSAL POST SERVICE
(UPS) ASSIGNMENT (Continued)**

Regarding the replacement of employee costs for employees at the UPS office, only a maximum of 2 persons is considered, while the operational expenses related to switching and software rental costs are included in the calculation of operational cost replacement. Furthermore, the expenses for stamp procurement and office stationery previously calculated as joint costs are now changed to cost-at based on their usage at the UPS Post Office.

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)
As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. KAS DAN SETARA KAS

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2024	2023	
Kas - Rupiah	1.252.356.877.770	1.713.766.049.361	Cash - Rupiah
Bank - Rupiah			Banks - Rupiah
Pihak Berelasi (Catatan 27)			Related Parties (Note 27)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	173.105.253.245	45.028.912.392	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	75.234.069.558	525.044.625.494	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	52.554.869.888	36.259.405.362	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	9.327.366.609	23.196.151.363	PT Bank Syariah Indonesia
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	7.714.267.312	8.437.571.702	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri Taspen Pos	1.278.685.910	1.296.789.387	PT Bank Mandiri Taspen Pos
Sub Jumlah	319.214.512.522	639.263.455.700	Sub Total
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Bank Pembangunan Daerah	54.500.002.626	29.610.135.092	PT Bank Pembangunan Daerah
PT Bank CCB Indonesia Tbk	10.174.490.729	-	PT Bank CCB Indonesia Tbk
PT Bank Neo Commerce Tbk	3.901.836.001	-	PT Bank Neo Commerce Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	3.389.613.581	4.949.670.531	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	3.105.155.614	3.036.983.840	PT Bank Maspion Indonesia Tbk
PT Bank Panin Dubai Syariah	3.025.625.174	4.050.820.081	PT Bank Panin Dubai Syariah
PT Bank KB Bukopin Tbk	2.400.597.594	3.124.817.010	PT Bank KB Bukopin Tbk
PT Bank BJB Syariah	2.187.890.226	-	PT Bank BJB Syariah
PT Bank Woori Saudara Tbk	2.175.601.752	2.228.278.072	PT Bank Woori Saudara Tbk
PT Bank DKI	463.222.532	412.110.165	PT Bank DKI
PT Bank CIMB Niaga Tbk	379.605.132	382.313.143	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	321.397.090	236.383.625	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT CIMB Niaga Syariah	208.937.451	209.427.688	PT CIMB Niaga Syariah
PT Bank Permata Tbk	180.671.800	183.875.100	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	176.475.409	120.811.389	PT Bank Artha Graha Internasional Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	138.629.475	2.018.026.489	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk	121.231.036	13.580.224	PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank IBK Indonesia Tbk	108.382.644	-	PT Bank IBK Indonesia Tbk
Bank Lainnya	127.097.659	114.705.301	Others Banks
Sub Jumlah	87.086.463.525	50.691.937.750	Sub Total
Jumlah Kas dan Bank Rupiah	1.658.657.853.817	2.403.721.442.811	Total Cash and Bank Rupiah
Bank - Valuta Asing			Banks - Foreign Currencies
Pihak Berelasi (Catatan 26)			Related Parties (Note 26)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - JPY	89.743.106.400	121.333.526.650	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - JPY
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - USD	25.623.978.252	8.488.127.760	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - USD
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - EUR	9.788.400.724	3.516.858.623	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - EUR
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - CHF Swiss	2.033.788.701	1.134.429.150	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - CHF Swiss
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - SAR	16.099.248	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - SAR
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - SGD	-	659.971.175	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - SGD
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - GBP	-	563.785.928	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - GBP
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	279.646	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Sub Jumlah	127.205.373.325	135.696.978.932	Sub Total
Sub Jumlah Bank	533.506.349.372	825.652.372.382	Sub Total Bank
Deposito			Time Deposit
Pihak Berelasi (Catatan 26)			Related Parties (Note 26)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	105.000.000.000	35.000.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	43.000.000.000	18.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	20.000.000.000	5.500.000.000	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.000.000.000	49.500.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Bank IBK Indonesia Tbk	75.000.000.000	-	PT Bank IBK Indonesia Tbk
PT Bank BJB Syariah	22.000.000.000	6.500.000.000	PT Bank BJB Syariah
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	7.500.000.000	-	PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah
Sub Jumlah Deposito	277.500.000.000	114.500.000.000	Sub Total Time Deposit
Jumlah Kas dan Setara Kas	2.063.363.227.142	2.653.918.421.743	Total Cash and Cash Equivalents

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)
As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS (Continued)

Kas dan setara kas Grup terdiri dari:

The Group's cash and cash equivalent funds consist of:

	2024	2023	
Dana Internal Perusahaan	1.884.481.398.965	1.619.652.583.480	The Company's Internal Fund
Dana Pihak Ketiga			Third Parties Funds
Giropos	124.426.689.411	927.364.642.260	Giropos Services
Jasa Pospay	23.001.054.970	36.042.228.624	Pospay Services
Deposito	18.818.346.150	52.084.422.720	Deposits
Wesel Pos	7.839.919.019	12.550.456.902	Wesel Pos
Jaminan Proyek	4.795.818.627	6.224.087.757	Project Guarantee
Sub Jumlah	178.881.828.177	1.034.265.838.263	Sub Total
Jumlah Kas dan Setara Kas	2.063.363.227.142	2.653.918.421.743	Total Cash and Cash Equivalents

Tingkat suku bunga efektif deposito berjangka adalah sebagai berikut:

The effective interest rate for time deposits are as follows:

	2024	2023	
Tingkat Suku Bunga Deposito			Interest Rates per Annum of
Berjangka per Tahun			Time Deposit
PT Bank IBK Indonesia Tbk	3,98%	-	PT Bank IBK Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4,00%	4,00%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3,25% - 5,75%	4,00% - 4,60%	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4,50% - 5,75%	4,5% - 5,75%	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	5,45% - 6,00%	5,25% - 5,45%	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank BJB Syariah	5,25% - 6,00%	5,25% - 6,00%	PT Bank BJB Syariah
PT Bank Tabungan Negara Syariah	5,65% - 5,85%	-	PT Bank Tabungan Negara Syariah
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	5,50% - 5,85%	-	PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah

Pada akhir periode pelaporan manajemen menempatkan dana dalam bentuk *Deposit On Call* (DOC) dengan tingkat suku bunga 3,25% - 6% pertahun.

At the end of the period management placed funds in the form of *Deposit On Call* (DOC) with an interest rate of 3.25% - 6% per annum.

Grup menandatangani perjanjian kerja sama tentang jasa asuransi gedung dan barang inventaris serta asuransi kas (*Cash in Transit, Cash in Safe and Cash in Cashier Box*) tahun 2023 dengan PT Asuransi Tri Pakarta nomor perjanjian kerjasama: PKS364/DIR1/1223 dan 128/DIR/PKS/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang berlaku sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Dalam perjanjian tersebut terdapat Fidelity Guarantee pada jaminan CIT, CIS, dan CICB yaitu perluasan jaminan atas kerugian atau kehilangan keuangan yang merupakan akibat langsung maupun tidak langsung dari kelalaian, penipuan, ketidakjujuran, kesalahan, kecurangan dan penggelapan yang dilakukan oleh pihak Grup atau orang yang bekerja dibawah kekuasaan Grup dengan limit jaminan Rp60.000.000.

The Group signed a cooperation agreement on building and inventory insurance services and cash insurance (*Cash in Transit, Cash in Safe and Cash in Cashier Box*) in 2023 with PT Asuransi Tri Pakarta cooperation agreement number: PKS364/DIR1/1223 and 128/DIR/PKS/2023 dated December 27, 2023 which is valid from January 1, 2024 to December 31, 2024. In the agreement there is a Fidelity Guarantee on CIT, CIS, and CICB guarantees, namely an expansion of the guarantee for financial losses or losses that are a direct or indirect result of negligence, fraud, dishonesty, errors, fraud and embezzlement committed by the Group or people working under the authority of the Group with a guarantee limit of Rp60,000,000.

Nilai pertanggungan Asuransi *Cash in Transit* dengan menggunakan kendaraan bermotor maksimal Rp30.000.000.000 per pengiriman. Nilai pertanggungan Asuransi *Cash in Transit* dengan menggunakan kendaraan roda dua maksimal Rp500.000.000 per pengiriman. Nilai pertanggungan Asuransi *Cash in Transit* dengan menggunakan kapal motor maksimal Rp3.000.000.000 per pengiriman. Nilai pertanggungan Asuransi *Cash in Transit* dengan menggunakan pesawat terbang reguler maksimal Rp5.000.000.000 per pengiriman. Nilai pertanggungan Asuransi *Cash in Transit* dengan menggunakan pesawat terbang carter reguler maksimal Rp15.000.000.000 per pengiriman. Nilai pertanggungan Asuransi *Cash In Safe* di Kantor Cabang Utama (KCU) dan Kantor Cabang (KC) maksimal Rp198.587.223.772.

Total sum insured *Cash in Transit* Insurance using a motorized vehicle up to Rp30,000,000,000 per shipment. Total sum insured *Cash in Transit* Insurance using two-wheeled vehicles up to Rp500,000,000 per shipment. Total sum insured *Cash in Transit* Insurance using a motorboat up to Rp3,000,000,000 per shipment. Total sum insured *Cash in Transit* Insurance using a regular flight up to of Rp5,000,000,000 per shipment. Total sum insured *Cash in Transit* Insurance using a regular charter flight is up to Rp15,000,000,000 per shipment. Total sum insured *Cash in Safe* insurance at Main Branch Office (KCU) and Branch Office (KC) with maximum of Rp198,587,223,772.

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

Nilai pertanggungan Asuransi Cash in Safe di Locket/PKK/LE maksimal Rp31.616.461.771. Nilai pertanggungan Asuransi Cash In Cashier Box di KCU, KC dan KCP maksimal Rp1.284.540.075.

Jika nilai uang yang dikirim melebihi limit diatas maka Grup wajib memberitahukan kepada PT Asuramsi Tri Pakarta melalui sarana tercepat.

Nilai premi yang dibayarkan Grup untuk asuransi gedung dan kas ini adalah sebesar Rp3.750.000.000 dengan pembayaran dibagi menjadi 2 kali termin pembayaran/per semester.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas kas dan setara kas sebagaimana yang dijabarkan pada Catatan 29.

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS (Continued)

Total sum insured Cash in Safe insurance at Counter/PKK/LE with maximum of Rp31,616,461,771. Total sum insured Cash In Cashier Box insurance at KCU, KC and KCP with maximum of Rp1,284,540,075.

If the value of money sent exceeds the above limit then the Group must notify Bumida through the fastest means.

The premium value paid by the Group for building and cash insurance is Rp3,750,000,000 with the payment divided into 2 times the payment term/per semester.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of cash and cash equivalents is disclosed in Note 29.

7. PIUTANG USAHA – BERSIH

7. TRADE RECEIVABLES – NET

	2024	2023	
Piutang Dalam Negeri	418.299.407.538	484.170.183.340	Domestic Trade Receivables
Piutang Luar Negeri	113.294.421.588	123.329.570.120	Foreign Trade Receivables
Sub Jumlah	531.593.829.126	607.499.753.460	Sub Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(194.662.553.192)	(222.097.356.333)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	336.931.275.934	385.402.397.127	Total Trade Receivables - Net

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: *Movement of allowance for impairment losses are as follows:*

	2024	2023	
Saldo Awal	(222.097.356.333)	(154.742.738.246)	Beginning Balance
Pemulihan Kerugian Penurunan Nilai Tahun Berjalan	32.912.796.801	11.594.071.777	Recovery of Impairment Losses for the Year
Reklasifikasi Piutang Usaha			Trade Receivables Reclassification
Pencadangan Piutang Usaha	(5.477.993.660)	(78.948.689.864)	Allowance for Trade Receivables
Saldo Akhir	(194.662.553.192)	(222.097.356.333)	Ending Balance

Umur piutang usaha dalam negeri per 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut: *Aging of domestic trade receivables as of December 31, 2024 and 2023, are as follows*

	2024	2023	
Piutang Surat Paket, Ritel			Trade Receivables from Mail & Parcel
Properti dan Jasa Keuangan			Retail, Property and Financial Service
Sampai dengan 30 hari	80.152.675.578	69.227.704.379	Up to 30 days
31-60 hari	6.027.988.719	25.499.906.922	31-60 days
61-180 hari	25.630.727.551	12.737.608.014	61-180 days
181-270 hari	34.740.496.720	13.938.373.851	181-270 days
271-360 hari	7.130.815.342	4.305.826.125	271-360 days
Diatas 1 tahun	84.102.888.964	79.462.758.089	More than 1 year
Sub Jumlah	237.785.592.874	205.172.177.380	Sub Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(127.573.974.492)	(112.404.300.528)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah Bersih	110.211.618.382	92.767.876.852	Net Total
Piutang Logistik			Trade Receivable from Logistics
Sampai dengan 30 hari	38.014.555.166	100.680.647.802	Up to 30 days
31-60 hari	11.105.840.326	83.119.254.453	31-60 days
61-180 hari	14.884.795.308	27.795.146.443	61-180 days
181-270 hari	8.272.392.348	7.302.675.091	181-270 days
271-360 hari	55.524.368.898	13.872.812.204	271-360 days
Diatas 1 tahun	49.342.670.164	46.227.469.967	More than 1 year
Sub Jumlah	177.144.622.210	278.998.005.960	Sub Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(53.015.589.929)	(50.641.553.722)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah Bersih	124.129.032.281	228.356.452.238	Net Total

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PIUTANG USAHA – BERSIH (Lanjutan)

Grup membedakan umur piutang usaha logistik dan non-logistik (ritel) dikarenakan jatuh tempo pelunasan yang berbeda. Jatuh tempo piutang logistik adalah 3 bulan, dan untuk piutang usaha non-logistik jatuh tempo tagihan adalah 1 bulan.

Umur piutang usaha luar negeri per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Telah Jatuh Tempo:		
Sampai dengan 2 tahun	76.196.780.944	43.417.781.956
2-3 tahun	8.557.213.330	8.174.071.928
3-4 tahun	5.828.275.792	14.690.230.136
Diatas 4 tahun	22.712.151.522	57.047.486.100
Sub Jumlah	113.294.421.588	123.329.570.120
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(14.072.988.771)	(59.051.502.083)
Jumlah Bersih	99.221.432.817	64.278.068.037

Umur piutang usaha luar negeri per 31 Desember 2024 dan 2023 berdasarkan mata uang Dollar Amerika Serikat adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Telah Jatuh Tempo:		
Sampai dengan 2 tahun	4.144.474,00	2.816.410,35
2-3 tahun	529.465,00	530.233,00
3-4 tahun	360.616,00	952.921,00
Diatas 4 tahun	1.975.370,85	3.700.537,50
Sub Jumlah	7.009.925,85	8.000.101,85
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(870.745,50)	(3.830.533,35)
Jumlah Bersih	13.149.106,20	12.169.670,35

Piutang usaha luar negeri merupakan piutang yang timbul dari tambahan biaya penerusan kiriman barang antar negara, dimana atas kiriman barang tersebut diatur dibawah regulasi UPU.

Lamanya umur piutang usaha luar negeri dikarena proses persetujuan (*accepted*) atas piutang yang diklaim memerlukan waktu maksimal 12 bulan.

Saldo bersih transaksi pos internasional per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

	2024	2023
Piutang Luar Negeri	113.294.421.588	123.329.570.120
Utang Luar Negeri	(129.321.212.720)	(137.458.761.366)
Jumlah	(16.026.791.132)	(14.129.191.246)

Pada 31 Desember 2024 dan 2023 Grup telah membentuk provisi penurunan nilai piutang usaha berdasarkan tingkat penurunan historis secara kolektif dan historis kredit para pelanggan secara individual. Grup tidak membedakan piutang usaha pihak berelasi (Pemerintah) dan piutang usaha pihak ketiga dalam menilai jumlah yang jatuh tempo. Dimana Grup telah melakukan telaah terkait dengan kolektibilitas piutang Pemerintah tersebut.

7. TRADE RECEIVABLES – NET (Continued)

The Group differentiates the age of logistics and non-logistics (retail) trade receivables due to different repayment maturities. The maturity of logistics trade receivables is 3 months, and for non-logistics trade receivable the maturity is 1 month.

The aging of foreign trade receivables as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
Telah Jatuh Tempo:			Over due:
Sampai dengan 2 tahun	76.196.780.944	43.417.781.956	Up to 2 years
2-3 tahun	8.557.213.330	8.174.071.928	2-3 years
3-4 tahun	5.828.275.792	14.690.230.136	3-4 years
Diatas 4 tahun	22.712.151.522	57.047.486.100	More than 4 years
Sub Jumlah	113.294.421.588	123.329.570.120	Sub Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(14.072.988.771)	(59.051.502.083)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah Bersih	99.221.432.817	64.278.068.037	Net Total

Aging of overseas trade receivable as of December 31, 2024 and 2023 is based on USD currency are as follows:

	2024	2023	
Telah Jatuh Tempo:			Over due:
Sampai dengan 2 tahun	4.144.474,00	2.816.410,35	Up to 2 years
2-3 tahun	529.465,00	530.233,00	2-3 years
3-4 tahun	360.616,00	952.921,00	3-4 years
Diatas 4 tahun	1.975.370,85	3.700.537,50	More than 4 years
Sub Jumlah	7.009.925,85	8.000.101,85	Sub Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(870.745,50)	(3.830.533,35)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah Bersih	13.149.106,20	12.169.670,35	Net Total

Receivables from foreign trade represent receivables arising from additional fees for forwarding goods between countries, where the delivery of goods is regulated under UPU regulations.

The longevity of foreign trade receivables is due to the approval process (*accepted*) of the claimed receivables to take a maximum of 12 months.

Net balance of international transaction postal as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
Piutang Luar Negeri	113.294.421.588	123.329.570.120	Domestic Trade Receivables
Utang Luar Negeri	(129.321.212.720)	(137.458.761.366)	Foreign Trade Receivables
Jumlah	(16.026.791.132)	(14.129.191.246)	Total

As of December 31, 2024 and 2023 the Group has established a provision for impairment of trade receivables based on the level of historical decline collectively and the credit history of individual customers. The Group does not distinguish trade receivables from related parties (Government) and trade receivables from third parties in assessing the amounts due. Where the Group has examined the collection of Government receivables.

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PIUTANG USAHA – BERSIH (Lanjutan)

Dalam melakukan perhitungan penyisihan piutang usaha khususnya untuk piutang luar negeri, Grup melakukan *offsetting* antara saldo piutang dan utang untuk negara yang sama, kemudian hasil piutang bersih tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan cadangan penyisihan atas piutang usaha. Sedangkan untuk perhitungan penyisihan piutang usaha dalam negeri, Grup menggunakan data histori (*roll rate*) dengan menambahkan beberapa indikator makro ekonomi yaitu tingkat inflasi, REPO, *Credit Growth* dan GDP pada periode berjalan dengan mempertimbangkan industri sejenis.

Berdasarkan penelaahan terhadap kolektabilitas akun piutang usaha pada akhir periode pelaporan, manajemen Grup berpendapat bahwa pencadangan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutupi kerugian jika terdapat piutang yang tidak dapat tertagih pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Piutang usaha Grup tidak digunakan sebagai jaminan utang bank.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas piutang usaha sebagaimana yang disajikan pada Catatan 29.

7. TRADE RECEIVABLES – NET (Continued)

In calculating the allowance for trade receivables, especially for foreign trade receivables, Group offsets between the balance of trade receivables and trade payables for the same country, then the net trade receivables are used as a basis for calculation of allowance for impairment losses of trade receivables. Meanwhile, the calculation of the allowance for the Group's domestic trade receivables uses historical data (*roll rate*) by adding several macroeconomic indicators, namely inflation rate, REPO, *Credit Growth* and GDP in the current period by considering similar industries.

Based on a review of the collectability of trade receivables at the end of the reporting period, the Group's management believes that the allowance for impairment for receivables of Group is adequate to cover possible losses from uncollectible receivables as of December 31, 2024 and 2023.

Trade receivables of the Group are not used as bank loan collateral.

The maximum exposure to credit risk at the reporting date is the carrying value of each class of trade receivable is disclosed in Note 29.

8. PERSEDIAAN

8. INVENTORIES

	2024	2023	
Persediaan Barang Dagangan			Merchandise Inventories
Barang Dagangan	21.131.293.715	22.376.665.011	Merchandise for Sale
Tanah	2.448.928.603	8.205.056.500	Land
Pengembangan Tanah	5.901.419.136	7.901.082.329	Land Development
Persediaan Bahan Produksi	2.256.750.678	2.035.752.822	Materials Inventory
Sub Jumlah	31.738.392.132	40.518.556.662	Sub Total
Perlengkapan			Supplies
Formulir Serbaguna	2.662.612.431	2.570.460.031	Multi Usage Forms
Prangko	342.691.325	551.150.187	Stamps
Sub Jumlah	3.005.303.756	3.121.610.218	Sub Total
Jumlah	34.743.695.888	43.640.166.880	Total

Barang dagangan merupakan persediaan atas prangko *definitif/tera* yang dicetak sebagai pengganti biaya kiriman surat. Jumlah tercatat berdasarkan nilai intrinsik atas keping prangko yang dicetak.

Tanah merupakan tanah milik PT Pos Properti Indonesia untuk keperluan proyek pengembangan kawasan hunian di daerah Muktiwari sebesar Rp8.205.056.500 dan Karang Bahagia sebesar Rp7.901.082.329. Dalam persediaan tanah terdapat material tanah yang dipergunakan untuk pengembangan hunian Karang Bahagia.

Pada tahun 2023, terdapat penanganan perkara perdata dengan Nomor 80/PDT.G/2023/PN.CKR sehubungan dengan pembayaran ganti rugi kerugian materiil dalam pengembalian uang atas sisa lahan seluas ±5.232m2 yang belum diserahkan oleh pihak tergugat yakni PT Berkah Aslin Mandiri dan Marta Jaya. Pada tanggal laporan keuangan ini, penanganan perkara masih dalam proses persidangan, dengan agenda persidangan adalah penyerahan kesimpulan dari para pihak secara E-litigasi (Catatan 37).

Pengembangan tanah merupakan barang produksi dalam proses untuk proyek perumahan karang bahagia yang terdiri dari sertifikat, perijinan dan advis, raw material dan biaya pengurusan perijinan.

Merchandise is a stock of definitive stamps/marks that are printed as a substitute for the cost of sending letters. The carrying amount is based on the intrinsic value of the stamps printed.

The land is owned by PT Pos Properti Indonesia for the purposes of residential area development projects in the Muktiwari area amounting to Rp8,205,056,500 and Karang Bahagia amounting to Rp7,901,082,329. In the land inventory, there is material which is used for the development of the Karang Bahagia residence.

In 2023, there was a civil case with number 80/PDT.G/2023/PN.CKR in connection with the payment of compensation for material losses in return for the remaining land area of ± 5,232m2 that had not been submitted by the defendants, namely PT Berkah Aslin Mandiri and Marta Jaya. As of the reporting period, the case is still in the process of trial, with the agenda of the trial is submission of conclusions from the parties in E-litigation (Note 37).

Land development is a production item in process for the Karang Selamat housing project which consists of certificates, permits and advice, raw materials and licensing processing costs.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. PERSEDIAAN (Lanjutan)

Tanah Hunian Karang Bahagia yang masih dalam tahap pengembangan terletak di Kp. Pulo Pisang, Desa Karanganyar, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi.

Persediaan bahan produksi merupakan persediaan atas perlengkapan pos seperti kantung pos, *straping band*, helm dan jas pengantar.

Pada tahun 2024 dan 2023, Point Residence berhasil menjual hunian masing-masing sebanyak 21 dan 65 unit.

Prangko filateli merupakan stok persediaan atas prangko filateli, benda filateli dan prangko prisma. Sedangkan perlengkapan prangko definitif merupakan stok persediaan atas prangko tera yang disetarakan sebagai penggantian biaya kirim.

Manajemen berkeyakinan bahwa pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 tidak terdapat indikasi penurunan nilai persediaan.

8. INVENTORIES (Continued)

The Karang Bahagia Residential Land which is still under development is located at Kp. Pulo Pisang, Karanganyar Village, Karang Bahagia District, Bekasi Regency.

Materials inventory is a supply of postal equipment such as post bags, straping bands, helmets and introductory suits.

In 2024 and 2023, Point Residence managed to sell 21 and 65 units of residences respectively.

Definitive stamp is a stock of philatelic stamps, philatelic objects and prism stamps. While definitive stamp equipment is a stock of stamps equivalent to tera stamps as reimbursement of shipping costs.

Management believes that as of December 31, 2024 and 2023 there were no indications of impairment of inventories.

9. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

9. ACCRUED REVENUES

	2024	2023
Pendistribusian Bantuan Logistik	648.690.448.678	493.626.448.174
Penyaluran Bantuan Sosial	249.452.037.166	175.623.282.020
Paket dan Surat Pos Domestik	46.149.882.734	172.975.502.098
Properti	23.522.322.217	14.325.109.120
Materai	21.968.947.798	24.601.648.074
Paket dan Surat Pos Internasional	18.744.720.183	33.975.728.086
Layanan Pos Persepsi	7.295.095.495	15.199.822.410
Bunga Deposito Berjangka	1.014.023.779	582.061.003
Jumlah	1.016.837.478.050	930.909.600.985

Distribution of Logistics Assistance
 Distribution of Social Assistance
 Domestic Mail and Parcels
 Properties
 Stamps
 International Mail and Parcels
 Postal Service Perception
 Time Deposit Interest
 Total

Pendistribusian bantuan logistik merupakan bentuk kerja sama penyaluran bantuan cadangan beras pemerintah yang bekerjasama dengan Perum Bulog untuk periode tahun 2024 dan 2023. Selain itu, Perusahaan bekerjasama dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) terkait dengan penyaluran bantuan stunting kepada masyarakat.

Pada tahun 2024, Perusahaan bekerjasama dengan Perum Bulog untuk pendistribusian Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah yang terbagi dalam 2 tahapan pendistribusian dengan nilai kontrak untuk tahap 1-2 masing-masing sebesar Rp744.128.773.620 dan Rp347.670.817.320. Realisasi pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar 13.355.415 Penerima Bantuan Pangan untuk 6 alokasi di Tahap 1 dan 13.089.056 Penerima Bantuan Pangan untuk 3 alokasi di Tahap 2.

Sampai tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah melakukan penagihan 95% dari nilai kontrak untuk tahap 1 dan termin 1 atau 40% dari nilai kontrak untuk tahap 2 dengan total tagihan sebesar Rp913.335.979.792.

Penyaluran bantuan sosial merupakan bentuk kerja sama dengan Kementerian Sosial terkait dengan penyaluran bantuan yang bersifat tunai kepada masyarakat yang kurang mampu.

Pendapatan yang masih harus diterima atas pendapatan paket dan surat pos merupakan akrual atas transaksi kredit atas pengiriman barang dari pelanggan.

The distribution of logistical assistance is a form of cooperation in distributing government rice reserve assistance in collaboration with Perum Bulog for the 2024 and 2023 period. In addition, the Company is collaborating with PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) regarding the distribution of stunting assistance to the community.

In 2024, the Company collaborated with Perum Bulog for the distribution of Government Rice Reserve Food Assistance which is divided into 2 distribution stages with contract values for stages 1-2 of Rp744,128,773,620 and Rp347,670,817,320 respectively. The work realization until December 31, 2024 is 13,355,415 Food Assistance Recipients for 6 allocations in Phase 1 and 13,089,056 Food Assistance Recipients for 3 allocations in Phase 2.

As of December 31, 2024, the Company has billed 95% of the contract value for phase 1 and term 1 or 40% of the contract value for phase 2 with a total bill of Rp913,335,979,792.

The distribution of social assistance is a form of cooperation with the Ministry of Social Affairs regarding the distribution of cash assistance to underprivileged communities.

The accrued revenue from parcel and postal mail revenue is an accrual for credit transactions for delivery of goods from customers.

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA (Lanjutan)

Pendapatan atas layanan pos persepsi merupakan akrual atas pendapatan penerimaan jasa layanan pembayaran pajak yang ditagihkan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara.

Pada tanggal 29 Desember 2023, Perusahaan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak tentang pekerjaan distribusi dan penjualan materai tempel Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor PKS: PRJ.PPK-116/2024/PJ.0133/2023. Nilai kontrak yang disepakati adalah sebesar Rp294.471.900.000 (termasuk pajak). Akrual atas pendapatan materai merupakan akrual untuk transaksi penjualan materai selama bulan Desember 2024.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas pendapatan yang masih harus diterima sebagaimana yang dijabarkan pada Catatan 29.

Manajemen tidak melakukan pencadangan atas penurunan nilai pendapatan yang masih harus diterima.

9. ACCRUED REVENUES (Continued)

Revenue from postal perception services is an accrual of revenue from tax payment services billed to the Directorate General of State Treasury.

On December 29, 2023, the Company collaborated with the Directorate General of Taxes regarding the work of distributing and selling sticky stamps for the Directorate General of Taxes for the 2024 Fiscal Year with PKS Number: PRJ.PPK-116/2024/PJ.0133/2023. The agreed contract value is Rp294,471,900,000 (including tax). Accrued revenue of stamp represents accrued revenue of stamp for sales transactions during December 2024.

The maximum exposure to credit risk at the reporting date is the carrying value of each class of accrued revenues is disclosed in Note 29.

Management does not make any provision for the impairment of accrued revenues.

10. ASET LANCAR LAINNYA

a. Piutang Layanan Jasa Keuangan

	2024	2023
<i>Prefund</i>	1.327.563.072.752	467.708.900.284
Layanan Western Union	466.535.730.587	407.308.757.028
Layanan Jasa Pengiriman Uang Luar Negeri	209.141.839.474	-
Pembayaran PPOB	4.294.758.137	4.474.667.805
Deposit Agen Pos	3.423.911.621	667.401.089
Program Pembinaan Pelanggan <i>Point Reward</i>	305.506.422	305.506.422
<i>Settlement</i> Layanan Transaksi QRIS	274.456.009	274.456.009
Jumlah	2.011.539.275.002	880.739.688.637

Piutang layanan jasa keuangan merupakan tagihan Grup terkait dengan layanan pembayaran jasa pihak ketiga yang belum ditagihkan pada akhir periode pelaporan. Piutang layanan jasa keuangan ini akan selesai dalam waktu 2-3 hari kerja setelah proses rekonsiliasi harian.

Prefunding merupakan tagihan Grup terkait dengan layanan pembayaran manfaat asuransi oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) yang dilakukan oleh Grup sebagai perantara.

Layanan *western union* merupakan layanan pembayaran wesel kemitraan luar negeri dimana Perusahaan memberikan layanan pembayaran kiriman uang dari luar negeri ke penerima di Indonesia. Kenaikan jumlah piutang layanan jasa keuangan atas *western union* disebabkan karena tingginya produksi transaksi pembayaran wesel *western union*.

Perusahaan telah menerima penggantian pembayaran layanan *western union* ini pada awal Januari 2025.

10. OTHER CURRENT ASSETS

a. Receivables from Financial Services

<i>Prefund</i>
Western Union Services
Foreign Remittance Services
PPOB Services
Postal Agent Deposit
Customer Program
Point Reward
Settlement of QRIS Services
Total

Receivables from financial services represent the Group bills related to third parties payment services that have not been billed at the end of the reporting period. Receivables from financial services will be settled within 2-3 working days after the daily reconciliation process.

Prefunding is a Group bill related to insurance benefit payment services by PT Taspen (Persero) and PT Asabri (Persero) carried out by the Group as an intermediary.

The western union service is an overseas partnership remittance payment service where the Company provides remittance payment services from overseas to recipients in Indonesia. The increase in financial services receivable from western union was due to the high production of western union money order payment transactions.

The Company has received reimbursement for this western union service in early January 2025.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET LANCAR LAINNYA (Lanjutan)

10. OTHER CURRENT ASSETS (Continued)

a. Piutang Layanan Jasa Keuangan (Lanjutan)

Layanan jasa pengiriman uang luar negeri merupakan proyek kemitraan atas pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia, dimana Grup bekerja sama BCA, Transfast, dan BNI sebagai mitra *provider* dari luar negeri.

Deposit agenpos merupakan penerimaan dari agenpos yang belum diterima dan disetorkan pada akhir periode ke loket-loket kantor pos atas transaksi pada akhir bulan. Setoran agenpos diterima Grup pada H+1.

Settlement QRIS merupakan transaksi pembayaran non-kas atas transaksi loket yang dilakukan pelanggan melalui kode QR perbankan yang bekerjasama dengan Grup, diantaranya Bank Mandiri dan Bank BNI. Penggantian atas transaksi QRIS adalah H+1 sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing provider QRIS.

a. Receivables from Financial Services (Continued)

The overseas money transfer service is a partnership project for sending money from overseas to Indonesia, where the Group collaborates with BCA, Transfast, and BNI as overseas provider partners.

Agenpos deposit is a receipt from the postal agent that has not been received and deposited at the end of the period to the post office counters for transactions at the end of the month. The postal agent deposit was received by the Group at D+1.

Settlement QRIS is a non-cash payment transaction for counter transactions by customers through banking QR codes in collaboration with the Group, including between Bank Mandiri and Bank BNI. Reimbursement of QRIS transactions is D+1 in accordance with the agreement of each QRIS provider.

b. Lainnya

b. Others

	2024	2023	
Piutang Karyawan			Employee Receivables
Kelalaian	4.456.672.791	5.492.158.226	Negligence
Kecurangan	30.031.608.966	11.244.728.213	Fraud
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(19.456.698.381)	(9.682.028.882)	Allowance for Impairment Losses
Sub Jumlah	15.031.583.376	7.054.857.557	Sub Total
Biaya Dibayar di Muka			Prepaid Expenses
Kompensasi Cuti Besar	287.385.480.435	234.806.998.514	Long Leave Compensation
Uang Muka Operasi	100.669.935.821	124.849.151.990	Operating Advances
Sewa Gedung	14.100.651.932	9.973.735.415	Building Rental
Sewa Rumah Pegawai	5.602.907.078	17.345.085.509	Employee Houses Rental
Premi Asuransi	4.400.905.154	2.583.384.449	Insurance Premium
Biaya Retensi Karyawan	494.758.563	916.190.475	Employee Retention Cost
Sewa Sarana Produksi			Lease of Production Facilities of
Operasi Layanan Keuangan	521.437.865	286.581.938	the Financial Services Operation
Pemasaran	98.020.400	166.370.500	Marketing
Beasiswa Pendidikan	-	2.447.700.002	Education Scholarship
Lainnya	16.803.302.949	66.600.000	Others
Sub Jumlah	430.077.400.197	393.441.798.792	Sub Total
Aset Keuangan Lainnya	1.815.292.467.566	-	Other Financial Assets
Bank Garansi	78.168.505.504	77.002.299.152	Bank Guarantee
Gedung Siap Dijual	7.490.000	-	
Tanah Siap Dijual	703.177	703.177	Land Available for Sale
Persediaan Rusak	-	6.668.000	Damaged Inventory
Sub Jumlah	1.893.469.166.247	77.009.670.329	Sub Total
Jumlah	2.338.578.149.820	477.506.326.678	Total

Piutang karyawan merupakan hak tagih kepada karyawan dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab yang terjadi akibat berkurangnya aset atau kekayaan Grup yang menjadi tanggung jawab karyawan, terdiri dari:

- Piutang kecurangan/kelalaian karyawan merupakan piutang akibat kecurangan/kelalaian karyawan berdasarkan pemeriksaan internal.

Piutang karyawan tidak digunakan sebagai jaminan utang Bank, tetapi Grup telah melakukan pencadangan penurunan nilai piutang pegawai sesuai dengan PSAK 109.

Employee receivable are amounts rightfully collectible from employees based on the statement of employee responsibility which consists of:

- Fraud/negligence receivables are receivables resulting from employees fraud/negligence which are determined based on internal examination.

The employee receivables are not used as collateral for the Bank loan, but the Group has reserved an allowance for impairment for employee receivables in accordance with PSAK 109.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET LANCAR LAINNYA (Lanjutan)

b. Lainnya (Lanjutan)

Perusahaan bekerjasama dengan PT BRI Life dengan nomor PKS: Addendum 1 PKS.273/DIR JARTEL DAN SDM/1117-B.4197/DIR/OBAK/KPS/XI/2017 tanggal 24 November 2017 untuk penyediaan asuransi jiwa beserta nilai investasi. Asuransi tersebut ditujukan untuk karyawan dan akan diterima manfaat setelah karyawan memasuki usia pensiun (maksimal di usia 54 tahun). Kompensasi cuti besar merupakan premi asuransi yang telah dibayarkan Perusahaan kepada PT BRI Life yang belum jatuh tempo karena karyawan Grup belum memasuki usia pensiun.

Uang muka operasi terdiri dari uang muka untuk talangan pembiayaan atas proyek dan talangan atas settlement layanan untuk transaksi *payment point*. Talangan pembiayaan atas proyek merupakan panjar kerja untuk mendanai proyek-proyek Grup seperti proyek penyaluran bantuan sosial dan proyek logistik. Sedangkan talangan atas *settlement* merupakan talangan diberikan kepada PT Arthajasa untuk melakukan *settlement* atas layanan jasa keuangan (*Payment Point*) kepada mitra *biller*. Nilai uang muka operasi tercatat merupakan nilai *net* setelah dikurangi dengan estimasi cadangan penurunan nilai.

Selain itu pada tahun 2023 Grup menempatkan dana deposit atas kerjasama pengiriman dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Citilink Indonesia untuk keperluan pengiriman kiriman barang melalui moda transportasi udara.

Sewa rumah karyawan merupakan pembayaran atas tunjangan bantuan perumahan karyawan yang diamortisasi selama masa manfaat yang diberikan.

Sewa gedung merupakan biaya sewa kantor operasional (kantor pos) di lokasi-lokasi yang tidak terdapat bangunan milik Grup dengan nilai sewa dibawah Rp100.000.000. Atas biaya tersebut dilakukan amortisasi sesuai dengan masa sewa.

Premi asuransi merupakan premi asuransi untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Bank garansi merupakan kas dan atau bank yang dijaminkan kepada pihak ketiga dalam jangka waktu satu tahun untuk keperluan proyek seperti proyek pengiriman surat kedinasan dengan PT Bukit Asam Tbk, pengiriman tagihan dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan jaminan atas proyek pendistribusian bantuan pangan dengan Perum Bulog.

Aset keuangan lainnya terdiri dari dana pensiun bulanan dari Taspen atau Asabri yang akan dibayar pada bulan Januari 2025 senilai Rp1.018.158.509.500, panjar gagal salur Bantuan Sosial Pemerintah dari Kementerian Sosial 2024 senilai Rp655.085.809.230, dan lain-lain senilai Rp142.048.148.836.

10. OTHER CURRENT ASSETS (Continued)

b. Others (Continued)

The Company collaborates with PT BRI Life with PKS number: Addendum 1 PKS.273/DIR JARTEL DAN SDM/1117B.4197/DIR/OBAK/KPS/XI/2017 dated November 24, 2017 for the provision of life insurance along with investment value. The insurance is intended for employees and benefits will be received after employees enter retirement age (maximum at the age of 54 years). Long leave compensation is an insurance premium that has been paid by the Company to PT BRI Life which has not yet matured because the Company's employees have not entered retirement age.

Operating advance consists of an advance for the bailout of financing for the project and a bailout for the settlement of services for payment point transactions. The bailout of financing for the project is a working force to fund the Group's projects such as social assistance distribution project and logistics project. Meanwhile, the bailout for settlement is a bailout given to PT Arthajasa to settlement financial services (Payment Point) to biller partners. The amount of operating advances is the net value after deduction with impairment reserves.

In addition, in the year 2023 the Group placed funds deposit for the cooperation with PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Citilink Indonesia for the purpose of shipment of goods delivery through air transport mode.

Employee housing rent is a payment for employee housing assistance benefits that are amortized over the life of the benefit provided.

Building rent represents rental cost of operational offices (post offices) in locations where there are no buildings owned by the Group with rental value below Rp100,000,000. These costs are amortized in accordance with the lease period.

Insurance premium is an insurance premium for the Board of Directors and Board of Commissioners.

Bank guarantee is cash and/or bank guaranteed to third parties within one year for project purposes such as the official letter delivery project with PT Bukit Asam Tbk, sending bills with the BPJS Ketenagakerjaan, and guarantees on food aid distribution projects with Perum Bulog.

Other financial assets consist of monthly pension funds from Taspen or Asabri which will be paid in January 2025 amounting to Rp1,018,158,509,500, advances for failed distribution of Government Social Assistance from the Ministry of Social Affairs 2024 amounting to Rp655,085,809,230, and others amounting to Rp142,048,148,836.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP – BERSIH

11. FIXED ASSETS – NET

	2024				Saldo Akhir/ Ending Balance
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	
Harga Perolehan Kepemilikan Langsung:					
Tanah	168.016.853.317	-	-	-	168.016.853.317
Gedung	1.247.072.082.108	6.962.383.881	-	77.810.070.460	1.331.844.536.449
Kendaraan	13.142.203.672	160.183.375	-	25.717.470.805	39.019.857.852
Inventaris	1.242.914.183.677	29.694.686.979	-	1.493.409.331	1.274.102.279.987
Sub Jumlah	2.671.145.322.774	36.817.254.235	-	105.020.950.596	2.812.983.527.605
Aset Hak-Guna:					
Bangunan	26.227.888.264	-	(8.045.621.975)	-	18.182.266.289
Kendaraan	211.192.946.902	2.778.724.210	(3.774.713.058)	(77.724.500.000)	132.472.458.054
Inventaris	81.804.618.773	139.153.968.750	-	-	220.958.587.523
Sub Jumlah	319.225.453.939	141.932.692.960	(11.820.335.033)	(77.724.500.000)	371.613.311.866
Aset dalam Penyediaan:					
Gedung	106.430.649.100	81.090.954.269	-	(27.296.450.596)	160.225.152.773
Inventaris	25.278.696.119	10.032.278.599	-	-	35.310.974.718
Sub Jumlah	131.709.345.219	91.123.232.868	-	(27.296.450.596)	195.536.127.491
Jumlah	3.122.080.121.932	269.873.180.063	(11.820.335.033)	-	3.380.132.966.962
Akumulasi Penyusutan Kepemilikan Langsung:					
Gedung	(633.247.805.935)	(51.691.672.045)	-	-	(684.939.477.980)
Kendaraan	(12.993.563.605)	(11.787.330.018)	-	(53.789.351.090)	(78.570.244.713)
Inventaris	(1.163.538.904.380)	(47.692.534.716)	-	-	(1.211.231.439.096)
Sub Jumlah	(1.809.780.273.920)	(111.171.536.779)	-	(53.789.351.090)	(1.974.741.161.789)
Aset Hak-Guna:					
Bangunan	(12.046.083.160)	(2.919.176.412)	2.717.019.247	-	(12.248.240.325)
Kendaraan	(183.121.247.591)	(2.986.549.988)	3.701.797.404	53.789.351.090	(128.616.649.085)
Inventaris	(81.804.618.773)	(19.722.609.744)	-	-	(101.527.228.517)
Sub Jumlah	(276.971.949.524)	(25.628.336.144)	6.418.816.651	53.789.351.090	(242.392.117.927)
Jumlah	(2.086.752.223.444)	(136.799.872.923)	6.418.816.651	-	(2.217.133.279.716)
Nilai Buku Bersih	1.035.327.898.488				1.162.999.687.246

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP – BERSIH (Lanjutan)

11. FIXED ASSETS – NET (Continued)

	2023				Saldo Akhir/ Ending Balance
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	
Harga Perolehan Kepemilikan Langsung:					
Tanah	170.940.562.403	-	(412.290)	(2.923.296.796)	168.016.853.317
Gedung	1.168.648.396.492	725.835.929	-	77.697.849.687	1.247.072.082.108
Kendaraan	13.604.870.808	-	(462.667.136)	-	13.142.203.672
Inventaris	1.193.873.511.338	24.976.412.730	(34.207.181)	24.098.466.790	1.242.914.183.677
Sub Jumlah	2.547.067.341.041	25.702.248.659	(497.286.607)	98.873.019.681	2.671.145.322.774
Aset Hak-Guna:					
Bangunan	9.311.386.898	16.916.501.366	-	-	26.227.888.264
Kendaraan	206.644.824.014	4.698.122.888	(150.000.000)	-	211.192.946.902
Inventaris	81.804.618.773	-	-	-	81.804.618.773
Sub Jumlah	297.760.829.685	21.614.624.254	(150.000.000)	-	319.225.453.939
Aset dalam Penyelesaian:					
Gedung	20.656.672.058	123.811.792.405	(511.236.200)	(37.526.579.163)	106.430.649.100
Inventaris	16.234.446.599	34.285.932.553	(406.269.199)	(24.835.413.834)	25.278.696.119
Sub Jumlah	36.891.118.657	158.097.724.958	(917.505.399)	(62.361.992.997)	131.709.345.219
Jumlah	2.881.719.289.383	205.414.597.871	(1.564.792.006)	36.511.026.684	3.122.080.121.932
Akumulasi Penyusutan Kepemilikan Langsung:					
Gedung	(591.097.631.395)	(45.256.092.583)	-	3.105.918.043	(633.247.805.935)
Kendaraan	(12.936.590.845)	(519.639.895)	462.667.135	-	(12.993.563.605)
Inventaris	(1.113.951.704.728)	(49.617.307.428)	30.107.776	-	(1.163.538.904.380)
Sub Jumlah	(1.717.985.926.968)	(95.393.039.906)	492.774.911	3.105.918.043	(1.809.780.273.920)
Aset Hak-Guna:					
Bangunan	(9.311.386.898)	(2.734.696.262)	-	-	(12.046.083.160)
Kendaraan	(162.441.482.713)	(20.764.764.878)	83.000.000	-	(183.121.247.591)
Inventaris	(81.804.618.773)	-	-	-	(81.804.618.773)
Sub Jumlah	(253.557.488.384)	(23.499.461.140)	83.000.000	-	(276.971.949.524)
Jumlah	(1.971.543.415.352)	(118.892.501.046)	577.774.911	3.105.918.043	(2.086.752.223.444)
Nilai Buku Bersih	910.175.874.031				1.035.327.898.488

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP – BERSIH (Lanjutan)

11. FIXED ASSETS – NET (Continued)

Alokasi pembebanan penyusutan adalah sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated as follows:

	2024	2023	
Beban Pokok Layanan (Catatan 23)	109.983.887.689	76.979.741.344	Cost of Services (Note 23)
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 24)	26.815.985.234	41.912.759.702	General and Administrative Expense (Note 24)
Jumlah	136.799.872.923	118.892.501.046	Total

Pengurangan atas aset sewa guna kelompok bangunan dikarenakan adanya penghentian kontrak sewa terkait dengan sewa gudang untuk operasional PT Pos Logistik Indonesia.

The reduction in lease assets of the building group was due to the termination of the lease contract related to the warehouse lease for the operations of PT Pos Logistik Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2024 aset tetap bangunan, inventaris dan kendaraan Grup telah diasuransikan kepada PT Asuransi Tri Pakarta berupa asuransi *property all risk* yang memberikan perlindungan atas risiko kerusakan/kerugian gedung dan barang inventaris milik Grup akibat kebakaran, banjir, huru hara, tanah longsor dan risiko lainnya. Nilai pertanggungan asuransi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.531.161.660.926 dan Rp1.528.570.619.626. Nilai premi yang dibayarkan untuk asuransi aset tetap adalah sebesar Rp3.750.000.000 dengan metode pembayaran secara termin setiap semesternya.

As of December 31, 2024, the Group's buildings, office equipments and vehicles were insured to PT Asuransi Tri Pakarta in the form of property all risk insurance which provides protection against risks of damage/loss to buildings and office equipments belonging to the Group due to fire, flood, civil commotion, land landslides and other risks. As of December 31, 2024 and 2023, the insurance coverage amounted to Rp1,531,161,660,926 and Rp1,528,570,619,626, respectively. The value of the premium paid for fixed asset insurance is Rp3,750,000,000 with the payment method on a semi-annual basis.

Perusahaan asuransi yang digunakan Grup dalam mengasuransikan asetnya merupakan pihak ketiga dan tidak terafiliasi dengan Grup.

The insurance used by the Group are third parties and are not affiliated with the Group.

Jenis pemilikan hak atas tanah milik Perusahaan seluruhnya berupa "Hak Guna Bangunan (HGB)". Hak atas tanah tersebut akan berakhir dalam berbagai tanggal dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2030. Manajemen berpendapat bahwa hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui atau diperpanjang kembali pada saat jatuh tempo.

The Company owned its land through land rights known as "Right to Build" (HGB). The land rights will expire on various dates from 2028 until 2030. The Management believes that the land rights can be renewed or extended when they expire.

Berdasarkan hasil penelaahan Manajemen, tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset tetap.

Based on Management review, there are no indications of impairment of fixed assets.

Pengurangan aset tetap dikarenakan adanya penjualan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

The deduction in fixed assets is due to the sale of fixed assets with the following details:

Selain yang diungkapkan diatas, terdapat pelepasan aset tetap yang disebabkan karena disposal dan penyesuaian pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar nihil dan Rp921.604.805.

In addition to those disclosed above, there were disposals of fixed assets due to disposal and adjustments in 2024 and 2023 amounting to nil and Rp921,604,805, respectively.

Aset tetap Grup tidak digunakan sebagai jaminan atas utang bank ataupun utang lainnya.

The Group's fixed assets are not used as collateral for bank or other debts.

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PROPERTI INVESTASI

12. INVESTMENT PROPERTIES

Properti investasi merupakan aset tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa (*lessee*) melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak digunakan untuk kegiatan operasional.

Investment properties consist of lands or buildings or parts of a building or both which are controlled by the owner or tenant (lessee) through financial lease used to generate rental income or increasing its value or both and not used for operational activities.

Rincian saldo dan mutasi properti investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Balances and movements of investment properties for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

2024							
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Revaluasi/ <i>Revaluation</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Aset							Assets
Tanah	6.100.990.310.000	-	-	-	157.730.542.000	6.258.720.852.000	Land
Bangunan	485.770.416.000	-	-	-	40.568.462.800	526.338.878.800	Buildings
Jumlah	6.586.760.726.000	-	-	-	198.299.004.800	6.785.059.730.800	Total

2023							
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Revaluasi/ <i>Revaluation</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Aset							Assets
Tanah	5.496.220.390.000	-	-	2.904.593.619	601.865.326.381	6.100.990.310.000	Land
Bangunan	537.620.716.700	-	-	(43.271.491.522)	(8.578.809.178)	485.770.416.000	Buildings
Jumlah	6.033.841.106.700	-	-	(40.366.897.903)	593.286.517.203	6.586.760.726.000	Total

Aset properti investasi dicatat menggunakan metode nilai wajar atau berdasarkan nilai pasar dimana pada saat penetapan awal terdapat perubahan metode pencatatan dari metode biaya menjadi metode nilai wajar, kenaikan/penurunan nilai dicatat sebagai bagian dari laba rugi.

Investment property assets are recorded using the fair value method or based on market value where at the time of initial determination there is a change in the recording method from the cost method to the fair value method, the increase/decrease in value is recorded as part of profit or loss.

Skema kerjasama yang dilakukan oleh Perusahaan dalam mengelola aset properti terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan *cluster* luasan aset yaitu sewa murni (*tenant* sekolah/kampus dan perkantoran), kerja sama (*Creative Hub* dan *Shopping Center*), swakelola (*Co-living*, *Co-working* dan *Hotel/Guest House*).

The cooperation scheme carried out by the Company in managing property assets is divided into 3 types based on asset area clusters, namely pure rent (school/campus tenants and offices), cooperation (Creative Hub and Shopping Center), self-management (Co-living, Co-working and Hotel/Guest House).

Pada 31 Desember 2024 aset properti Perusahaan telah dinilai oleh KJPP Asmawi dan Rekan, laporan hasil KJPP telah diterbitkan Nomor 01081/2-0119-00/PI/11/0222/1/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024.

As of December 31, 2024, the Company's property assets has been assessed by KJPP Asmawi and Partners, the KJPP results report has been issued Number 01081/2-0119-00/PI/11/0222/1/XII/2024 dated December 31, 2024.

Tujuan penilaian aset properti investasi Grup adalah untuk penyusunan laporan keuangan bukan untuk tujuan perpajakan. Metode yang digunakan dalam penilaian aset properti menggunakan pendekatan biaya dan sesuai dengan tujuan aset tersebut untuk didayagunakan dan komersialisasi aset dalam pelaporan keuangan.

The purpose of valuation of the Group's investment property assets is for the preparation of financial statements, not for taxation purposes. The methods used in the appraisal of property assets that have been carried out using a cost approach and in accordance with the objectives of those assets to be utilized and commercialized assets in financial reporting.

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KD.103/DIR-1/1223 tanggal 10 Desember 2023, Perusahaan menetapkan kembali 16 titik aset baru sebagai aset properti investasi mengingat pemanfaatan aset tersebut telah dapat dikategorikan sebagai properti investasi.

Based on the Decree of the Board of Directors Number KD.103/DIR-1/1223 dated December 10, 2023, the Company re-designated 16 new asset points as investment property assets considering that the utilization of these assets can be categorized as investment property.

Per 31 Desember 2024 terdapat kenaikan properti investasi sebesar Rp198.299.004.800 yang dicatat dalam pendapatan lainnya setelah eliminasi (Catatan 25).

As of December 31, 2024, there was an increase in investment properties of Rp198,299,004,800 which was recorded in other income after elimination (Note 25).

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TAKBERWUJUD

Aset takberwujud Grup sepenuhnya dipergunakan untuk menunjang proses operasional Grup, adapun batasan kapitalisasi aset takberwujud Grup adalah pembiayaan minimal Rp1.000.000 untuk aset takberwujud dan Rp10.000.000 untuk biaya yang ditangguhkan. Aset takberwujud yang dimiliki Grup berupa aplikasi *software*, jasa konsultan bisnis, dan jasa riset.

13. INTANGIBLE ASSETS

The Group's intangible assets are fully used to support the Group's operational process, while the limitation of the Group's intangible asset capitalization is a minimum financing of Rp1,000,000 of intangible assets and Rp10,000,000 of deferred costs. Intangible assets owned by the Group in the form of software applications, business consulting services, and research services.

		2024						
		Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>		
Harga Perolehan							Acquisition Cost	
Perangkat Lunak							Business	
Transformasi Bisnis							Transformation	
dalam Penyelesaian	42.743.057.940	13.736.634.672	-	(26.237.098.730)	30.242.593.882	Software in Process	Business	
Perangkat Lunak							Transformation	
Transformasi Bisnis	237.005.324.118	14.141.736.734	-	26.237.098.730	277.384.159.582	Software		
Biaya yang								
Ditangguhkan	37.782.247.199	9.639.808.392	-	-	47.422.055.591	Deferred Charge		
Sub Jumlah	317.530.629.257	37.518.179.798	-	-	355.048.809.055	Sub Total		
Akumulasi Amortisasi							Accumulated Amortization	
Perangkat Lunak							Business	
Transformasi Bisnis	(176.696.364.392)	(23.443.028.679)	-	-	(200.139.393.071)	Software		
Biaya yang								
Ditangguhkan	(28.868.713.809)	(4.265.730.849)	-	-	(33.134.444.658)	Deferred Charge		
Sub Jumlah	(205.565.078.201)	(27.708.759.528)	-	-	(233.273.837.729)	Sub Total		
Jumlah	111.965.551.056				121.774.971.326	Total		
		2023						
		Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>		
Harga Perolehan							Acquisition Cost	
Perangkat Lunak							Business	
Transformasi Bisnis							Transformation	
dalam Penyelesaian	14.668.796.428	46.046.024.955	-	(17.971.763.443)	42.743.057.940	Software in Process	Business	
Perangkat Lunak							Transformation	
Transformasi Bisnis	201.802.389.287	16.481.921.388	-	18.721.013.443	237.005.324.118	Software		
Biaya yang								
Ditangguhkan	27.318.103.458	10.464.143.741	-	-	37.782.247.199	Deferred Charge		
Sub Jumlah	243.789.289.173	72.992.090.084	-	749.250.000	317.530.629.257	Sub Total		
Akumulasi Amortisasi							Accumulated Amortization	
Perangkat Lunak							Business	
Transformasi Bisnis	(156.252.603.921)	(20.443.760.471)	-	-	(176.696.364.392)	Software		
Biaya yang								
Ditangguhkan	(27.016.960.254)	(1.851.753.555)	-	-	(28.868.713.809)	Deferred Charge		
Sub Jumlah	(183.269.564.175)	(22.295.514.026)	-	-	(205.565.078.201)	Sub Total		
Jumlah	60.519.724.998				111.965.551.056	Total		

Aset takberwujud berupa perangkat lunak termasuk pelatihan dan implementasi dalam rangka menunjang kegiatan usaha Grup, seperti sistem operasi, layanan jasa keuangan, dan pengolahan data akuntansi dalam pelaporan keuangan.

Intangible assets represent software including training and implementation that are used to support business activities the Group such as operating systems, financial services, and accounting system used in financial reporting.

Biaya yang ditangguhkan merupakan pengurusan sertifikat bukan hak milik (Hak Guna Bangunan/Hak Guna Usaha) yang diamortisasi selama 4 tahun dengan metode garis lurus.

Deferred costs represent deferred maintenance of the certificates which are not property rights (Building Use Rights/Operating Use Rights) which are amortized over 4 years using the straight-line method.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TAKBERWUJUD (Lanjutan)

13. INTANGIBLE ASSETS (Continued)

Pembebanan amortisasi adalah sebagai berikut:

Amortization expense was allocated as follows:

	2024	2023	
Pemilikan Langsung:			<i>Direct Acquisitions:</i>
Beban Pokok Layanan (Catatan 23)	17.367.446.556	13.539.777.558	<i>Cost of Services (Note 23)</i>
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 24)	10.341.312.972	8.755.736.468	<i>General and Administrative Expense (Note 24)</i>
Jumlah	27.708.759.528	22.295.514.026	<i>Total</i>

14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

14. OTHER NON - CURRENT ASSETS

	2024	2023	
Piutang Kerugian Grup	337.162.247.521	285.768.747.682	<i>Receivable from the Group's Losses</i>
Cadangan Kerugian Penurunan atas Kerugian Grup	(323.350.438.754)	(271.956.938.915)	<i>Allowance for Impairment on Receivable from The Group's Losses</i>
Piutang Kerugian Grup - Neto	13.811.808.767	13.811.808.767	<i>Receivable from the Group's Losses - Net</i>
Klaim Lebih Bayar Pajak	-	41.848.358.590	<i>Claim for Tax Refund</i>
Biaya Dibayar di Muka Jangka Panjang	86.335.012.641	35.895.066.132	<i>Long-term Prepaid Expenses</i>
Aset Sitaan	-	14.507.000.000	<i>Confiscated Assets</i>
Bank Garansi	3.312.415.581	5.098.075.601	<i>Guarantee Bank</i>
Aset Jaminan	198.016.023	246.116.022	<i>Guarantee Assets</i>
Aset Lainnya	378	378	<i>Other Assets</i>
Sub Jumlah	89.845.444.623	97.594.616.723	<i>Sub Total</i>
Jumlah	103.657.253.390	111.406.425.490	<i>Total</i>

Mutasi cadangan penurunan nilai piutang atas kerugian Grup adalah sebagai berikut :

Movement of allowance for impairment losses on receivable from the Group's losses are as follows:

	2024	2023	
Saldo Awal	271.956.938.915	271.087.858.903	<i>Beginning Balance</i>
Pemulihan Akumulasi Penyisihan Piutang Kerugian Perusahaan	(34.199.034.936)	(5.680.816.729)	<i>Recovery of Accumulated Allowance Receivable from Company's Losses</i>
Reklasifikasi dari Akumulasi Penyisihan Piutang Kerugian Perusahaan	85.592.534.775	6.549.896.741	<i>Reclassification from Accumulated Allowance Receivable from Company's Losses</i>
Jumlah	323.350.438.754	271.956.938.915	<i>Total</i>

Piutang kerugian Grup merupakan piutang yang tidak tertagih sesuai tingkat kolektibilitas untuk piutang usaha dan piutang lainnya. Nilai buku tercatat merupakan aset yang dapat dijamin kepada Grup.

Receivable from the Group's losses represent the uncollectible of trade receivables and other receivables according to the collectibility level. Net book value is an asset that can be guaranteed to the Group.

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi akun piutang kerugian Grup pada akhir periode pelaporan, Manajemen berpendapat bahwa pencadangan kerugian atas penurunan nilai piutang sudah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul apabila terdapat piutang yang tidak tertagih pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

According to examination of the receivables from the Group's losses at the end of the period, the Management believes that the allowance for impairment of receivables has been adequate to cover the losses arising from uncollectible receivables as of December 31, 2024 and 2023.

Pada tahun 2024, telah terjadi pelepasan aset sitaan dari entitas anak perusahaan (PT Pos Finansial Indonesia) ke PT Pos Properti Indonesia.

In 2024, there was a release of confiscated assets from a subsidiary entity (PT Pos Finansial Indonesia) to PT Pos Properti Indonesia.

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (Lanjutan)

Klaim lebih bayar pajak penghasilan merupakan jumlah keberatan yang diajukan oleh Perusahaan atas SKPLB untuk tahun 2015 (Catatan 16g). Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4447/B/PK/Pjk/2024 tanggal 22 Oktober 2024, Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan menolak permohonan peninjauan kembali dari Perusahaan dan menyatakan gugatan dari Perusahaan tidak diterima. Jumlah keberatan yang diajukan oleh Perusahaan dicadangkan seluruhnya.

Aset lainnya merupakan aset kendaraan roda 2 dan roda 4 yang tidak laku terjual selama lelang tahun 2010 dan tahun 2015. Kendaraan tersebut merupakan bekas kendaraan operasional yang telah habis masa manfaatnya dan tidak dioperasionalkan kembali sebanyak 377 unit dan 1 unit aset yang belum dilelang pada tahun 2023. Mutasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo Awal	378	377
Penambahan		
Nilai Perolehan Kendaraan	-	200.000.000
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	-	(199.999.999)
Pengurangan	-	-
Jumlah	378	378

14. OTHER NON - CURRENT ASSETS (Continued)

Claim for overpayment of income tax is the amount of objections filed by the Company on the SKPLB for 2015 (Note 16g). Based on the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 4447/B/PK/Pjk/2024 dated October 22, 2024, the Supreme Court of the Republic of Indonesia decided to reject the application for judicial review from the of Company and stated that the lawsuit from the Company was not accepted. The amount of objections filed by the Company was reserved in full.

Other assets represent assets of 2-wheeler vehicle and 4-wheeler vehicle which are not sold during auction in 2010 and 2015. The vehicle is a secondhand operational vehicle that has expired its benefits and is not operationalized again as many as 377 units and 1 unit of assets that have not been auctioned in 2023.

15. UTANG USAHA

Utang usaha merupakan kewajiban Grup kepada vendor atas transaksi operasional serta kepada mitra *biller* atas transaksi *settlement biller*.

	2024	2023
Utang Layanan Keuangan		
Weselpos		
Weselpos Kemitraan Dalam Negeri	9.409.339.778	8.638.435.352
Weselpos Remittance	3.374.362.726	3.912.021.550
Sub Jumlah	12.783.702.504	12.550.456.902
Utang Layanan Keuangan Giropos		
Giropos	79.276.578.206	52.346.984.948
Sub Jumlah	79.276.578.206	52.346.984.948
Utang Pospay		
Kemitraan Perbankan		
Tabungan E-Batara dan Setoran BTN	2.827.986.388	-
Angsuran Asuransi dan Mitra Lainnya	364.279.500	1.088.401.930
Angsuran Kredit CIMB Niaga	225.385.200	543.533.243
Sub Jumlah	3.417.651.088	1.631.935.173

15. TRADE PAYABLES

Trade payables is the Group's obligation to vendors for operational transactions and to biller partners for settlement biller transactions.

Weselpos Financial Services Payables
Weselpos Domestic Subscription
Weselpos Remittance
Sub Total
Giropos Financial Services Payable
Giropos
Sub Total
Pospay Services Payables
Banking Partner
E-Batara Saving and BTN Deposits
Installment Insurance and Other Partners
Installment Loan from CIMB Niaga
Sub Total

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)
As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. UTANG USAHA (Lanjutan)

15. TRADE PAYABLES (Continued)

	2024	2023	
<u>Kemitraan Pembiayaan</u>			<u>Leasing Partner</u>
Angsuran Kredit Adira Finance	16.566.770.886	10.516.738.045	Installment Loan from Adira Finance
Angsuran Kredit Mega Auto Finance	7.986.733.033	1.062.753.632	Installment Loan from Mega Auto Finance
Angsuran Kredit Mandiri Tunas Finance	6.336.442.855	3.762.753.783	Installment Loan from Mandiri Tunas Finance
Angsuran Kredit Astra Credit Company	4.495.449.500	-	Installment Loan from Astra Credit Company
Angsuran Kredit Mandiri Utama Finance	3.576.990.843	3.815.719.485	Installment Loan from Mandiri Utama Finance
Angsuran Kredit Bussan Auto Finance	2.565.074.955	5.796.242.799	Installment Loan from Bussan Auto Finance
Angsuran Kredit FIF Finance	2.212.579.462	4.236.224.548	Installment Loan from FIF Finance
Angsuran Kredit Summit Oto Finance	1.290.650.850	593.416.010	Installment Loan from Summit Oto Finance
Angsuran OTO Kredit Mobil	874.733.250	1.539.574.240	Installment Loan from OTO Kredit Mobil
Angsuran Kredit Clipan Finance	836.349.646	1.241.638.942	Installment Loan from Clipan Finance
Angsuran Kredit Jaccs MPM Finance	787.507.000	883.625.500	Installment Loan from Jaccs MPM Finance
Angsuran Kredit			Installment Loan from
Indomobil Finance Indonesia	444.330.664	536.467.858	Indomobil Finance Indonesia
Angsuran Kredit Suzuki Finance	-	1.234.810.635	Installment Loan from Suzuki Finance
Nusa Surya Ciptadana (NSC)	-	585.835.023	Nusa Surya Ciptadana (NSC)
Angsuran Kredit Artha Asia Finance	-	245.779.715	Installment Loan from Artha Asia Finance
Angsuran Kredit Pembiayaan Lainnya	8.243.813.197	6.887.146.851	Installment Loan from Others
Sub Jumlah	56.217.426.141	42.938.727.066	Sub Total
<u>Kemitraan Billir</u>			<u>Biller Partnership</u>
E-Wallet	5.567.919.000	4.285.841.424	E-Wallet
Kemitraan Billers Lainnya	5.536.580.255	1.155.633.652	Other Billers Partnership
BPJS Kesehatan	4.884.558.129	576.999.996	BPJS Health
Penbayan Gadai Pengadaian	4.239.542.176	-	Pegadaian Pawn Payment
Pembayaran Rekening Listrik	2.848.722.789	-	Electricity Payment
Setoran Telekomunikasi dan Seluler	467.304.899	291.731.715	Payment of Cellular Telecommunication
Penjualan Tiket	28.664.550	27.969.500	Sales of Ticket
Setoran PAM/PDAM	22.480.127	547.231.472	Payment of Water - PAM/PDAM
E-Commerce	-	533.457.580	E-Commerce
Setoran TV Kabel	-	60.155.072	Cable TV Deposits
Sub Jumlah	23.595.771.925	7.479.020.411	Sub Total
Utang Ritel dan Properti			Trade Retail and Property
Jasa Properti	2.284.019.968	663.654.836	Property Service
Materai	123.120.000	-	Stamp Duty
Konsinyasi Lainnya			Other Consignment
(Sampul, Percetakan)	464.758.052	597.312.833	(Cover, Printing)
Sub Jumlah	2.871.898.020	1.260.967.669	Sub Total
Utang Layanan dan Pos Internasional			International Post Service Payables
Terminal Dues	97.918.640.664	98.596.095.784	Terminal Dues
Embalance EMS	17.615.173.906	20.850.540.816	Embalance EMS
Inward Land Rate	12.512.765.858	16.768.276.104	Inward Land Rate
IACD/Service Interior	951.456.940	1.108.240.824	IACD/Service Interior
Layanan Pos Domestik	111.814.000	135.607.838	Domestic Post Service
E-Parcel	323.175.352	-	E-Parcel
Sub Jumlah	129.433.026.720	137.458.761.366	Sub Total
Utang Usaha Biaya	343.820.937.781	218.653.323.077	Cost Payables
Utang Angsuran Kredit	-	34.740.070	Bank Credit Installment Payables
Sub Jumlah	343.820.937.781	218.688.063.147	Sub Total
Jumlah	651.416.992.385	474.354.916.682	Total

Utang usaha biaya merupakan saldo utang usaha atas transaksi beban operasional yang belum dibayarkan ke vendor Grup, proses pembayaran dilakukan secara terjadwal mengikuti aturan Grup yaitu setiap Jumat untuk vendor internal dan setiap tanggal 15 dan 30 untuk vendor eksternal.

Cost payables is the balance of account payables for operational expense transactions that have not been paid to the Group's vendors, the payment process is carried out on a scheduled basis following the Group's rules, which are every Friday for internal vendors and every 15th and 30th for external vendors.

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. UTANG USAHA (Lanjutan)

Utang layanan jasa keuangan weselpos merupakan saldo utang kiriman uang yang belum diambil oleh penerima. Saldo utang weselpos dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu saldo wesel kemitraan yang bekerja sama dengan beberapa vendor pengiriman uang, dan weselpos yang merupakan produk wesel yang dikelola oleh Grup.

Utang layanan jasa keuangan Pospay harus diselesaikan oleh Grup dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan masing-masing Perjanjian Kerja Sama dengan para mitra yaitu antara 2 hari setelah tanggal transaksi sampai dengan tanggal 20 setiap bulan. Jika melebihi jangka waktu tertentu tersebut Grup akan dikenakan denda antara 1 permil sampai dengan 5% untuk setiap hari keterlambatan.

Utang layanan jasa keuangan giropos merupakan saldo mengendap dari outstanding dana virtual account pelanggan. Akun pelanggan tersebut dipotong dengan biaya pemeliharaan rekening untuk rekening yang bersifat umum, tetapi untuk rekening yang bersifat khusus seperti rekening yang digunakan untuk penyaluran dana pemerintah ataupun swasta tidak dipotong dengan biaya pemeliharaan seperti penyaluran dana bantuan sosial tunai dan pembayaran gaji pensiun.

Utang layanan jasa keuangan weselpos dan pospay akan diselesaikan pada H+0, H+1, dan H+2 sesuai dengan perjanjian kerjasama untuk masing-masing mitra yang bekerjasama dengan Grup.

Eksposur maksimum terhadap risiko likuiditas pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat utang usaha sebagaimana yang diungkapkan di Catatan 29.

15. TRADE PAYABLES (Continued)

Weselpos financial service payables is a balance of remittance debt that has not been taken by the recipient of the remittance. The balance of weselpos financial service payables is grouped into 2, which are the balance of partnership money orders in collaboration with several remittance vendors and weselpos which are products managed by the Group.

Pospay financial services payables should be completed by the Group within a specified period in accordance with their respective cooperation agreement with the partners which is between two days after the date of transaction until the 20th day of every month. If it exceeds a certain period, the Group will be fined of 1 permil until 5% for each day of delay.

Giropos financial service payables is a deposited balance of outstanding customer virtual account funds. The customer account is deducted from the account maintenance fee for general purposed accounts, but for specialized bank accounts such as accounts used for the distribution of government or private funds are not deducted with maintenance costs such as disbursement of cash social assistance funds and payment of pension salaries.

Weselpos and Pospay financial service payables will be settled at H+0, H+1, and H+2 in accordance with the cooperation agreement for each partner who cooperates with the Group.

The maximum exposure to liquidity risk at the end of the reporting period is the carrying amount of trade payable as disclosed in Note 29.

16. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar di Muka

	2024	2023
Perusahaan		
Pajak Pertambahan Nilai	481.555.228	-
Entitas Anak		
Pajak Pertambahan Nilai	893.527.380	592.283.336
Pajak Penghasilan:		
Pasal 28a	-	-
Pajak Lainnya	131.902.353	-
Jumlah	1.506.984.961	592.283.336

b. Utang Pajak

	2024	2023
Perusahaan:		
Pajak Pertambahan Nilai	36.021.988.035	23.051.466.343
PPN WAPU	8.750.299.835	6.258.669.052
Pajak Penghasilan:		
Pasal 21	21.953.266.037	19.211.180.130
Pasal 22	89.696.295	230.010.636
Pasal 23	3.048.200.948	3.972.225.599
Pasal 4(2)	1.495.932.696	934.763.744
Pajak Lainnya	-	174.451.076

16. TAXATION

a. Prepaid Taxes

The Company
Value Added Tax
Subsidiaries
Value Added Tax
Income Taxes:
Article 28a
Other Taxes
Total

b. Taxes Payable

The Company:
Value Added Tax
Value Added Tax WAPU
Income Taxes:
Article 21
Article 22
Article 23
Article 4(2)
Other Taxes

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

16. TAXATION (Continued)

b. Utang Pajak (Lanjutan)

b. Taxes Payable (Continued)

	2024	2023	
Entitas Anak:			Subsidiaries:
Pajak Pertambahan Nilai	815.438.301	1.607.811.131	Value Added Tax
Pajak Penghasilan:			Income Taxes:
Pasal 21	200.608.556	419.310.192	Article 21
Pasal 23	1.150.392.217	1.981.743.441	Article 23
Pasal 25	10.562.530	15.836.278	Article 25
Pasal 29	680.132.292	2.315.426.644	Article 29
Pasal 4(2)	2.434.823.327	357.791.944	Article 4(2)
Pajak Lainnya	241.105.099	38.760.807	Other Taxes
Jumlah	76.892.446.168	60.569.447.017	Total

c. Taksiran Pajak Penghasilan Tahun Berjalan

c. Estimated Current Income Tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between consolidated profit before income tax, as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	741.155.820.060	701.891.502.784	Profit before Income Tax per Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Dikurangi:			Less:
Laba Entitas Anak yang Dikonsolidasi Sebelum Pajak Penghasilan dan Eliminasi	23.810.893.356	31.211.824.422	Profit of Consolidated Subsidiaries Before Income Tax and Elimination
Laba Sebelum Pajak Penghasilan - Perusahaan	764.966.713.416	733.103.327.206	Profit Before Income Tax - Company
Beda Tetap:			Permanent Differences
Bantuan Pelayanan Publik LPU	(366.844.830.481)	(366.120.584.914)	Public Service of UPS
Selisih Nilai Wajar Properti			Difference in Fair Value of Investment Properties
Investasi	(198.299.004.800)	(180.908.787.300)	Tax Penalty and Final Tax
SKPKB Denda Pajak dan Pajak Final	17.343.085.246	22.416.023.429	Allowance For Meals And Pension
Tunjangan Pangan dan Duka Pensiun	55.725.312.252	55.024.775.831	Physical and Spiritual Guidance
Pembinaan Jasmani dan Rohani	5.130.191.935	1.445.705.800	Property Marketing
Pemasaran Properti	-	107.734.832.157	Donation and Disaster
Sumbangan dan Bencana Alam	45.678.930	49.540.000	Income Already Subjected to Final Income Tax
Pendapatan yang Dikenakan PPh Final	(27.082.336.708)	(58.821.064.097)	Depreciation
Penyusutan	(4.760.441.396)	(298.948.783)	Others
Lainnya	57.439.998.703	(71.514.399.975)	Total Permanent Differences
Jumlah Beda Tetap	(461.302.346.319)	(490.992.907.852)	Timing Differences:
Beda Waktu:			Employee Benefit Liabilities
Liabilitas Imbalan Kerja	20.149.190.472	(43.629.000.714)	Provision (Recovery) for Impairment of Receivables
Provisi (Pemulihan) Penurunan Nilai	224.466.814	87.847.586.791	Depreciation
Penyusutan	22.096.498.510	-	Leasing
Leasing	(13.628.071.350)	-	Total Timing Differences
Jumlah Beda Waktu	28.842.084.446	44.218.586.077	Estimated Taxable Income of the Company Current Year
Taksiran Laba Fiskal Perusahaan Tahun Berjalan	332.506.451.543	286.329.005.431	

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

16. TAXATION (Continued)

c. Taksiran Pajak Penghasilan Tahun Berjalan
(Lanjutan)

c. Estimated Current Income Tax (Continued)

	2024	2023	
Rugi Fiskal Tahun Sebelumnya			Tax Loss Carry Forward
Tahun 2022	(40.603.061.985)	(40.603.061.985)	Year 2022
Tahun 2021	(154.490.936.592)	(154.490.936.592)	Year 2021
Tahun 2020	(152.511.331.472)	(152.511.331.472)	Year 2020
Tahun 2019	(733.536.207.230)	(733.536.207.230)	Year 2019
Tahun 2018	-	(453.970.147.338)	Year 2018
Jumlah Rugi Fiskal Tahun Sebelumnya	(1.081.141.537.279)	(1.535.111.684.617)	Total Tax Loss Carry Forward
Taksiran Penghasilan Kena Pajak			Estimated Taxable Loss After Compensation of
Setelah Kompensasi Rugi Fiskal	(748.635.085.736)	(1.248.782.679.186)	Tax Loss Carry Forward
Taksiran Laba (Rugi) Kena Pajak			Estimated Taxable Income (Loss)
Perusahaan	(748.635.085.736)	(1.248.782.679.186)	The Company
Entitas Anak			Subsidiaries
PT Pos Logistik Indonesia	1.630.520.000	(2.377.907.000)	PT Pos Logistic Indonesia
PT Pos Finansial Indonesia	(2.865.969.000)	(6.826.800.000)	PT Pos Finansial Indonesia
PT Pos Properti Indonesia	1.891.301.000	576.138.000	PT Pos Properti Indonesia
Jumlah	(747.979.233.736)	(1.257.411.248.186)	Total
Beban Pajak Kini Konsolidasian			Consolidated Current Tax Expense
Perusahaan - Penyesuaian Hasil Pemeriksaan			The Company - Adjustment of
Fiskus Tahun Sebelumnya	1.776.402.789	193.336.281	Previous Year's Audit Result
Entitas Anak			Subsidiaries
PT Pos Logistik Indonesia	358.714.472	1.075.185.346	PT Pos Logistic Indonesia
PT Pos Finansial Indonesia	-	-	PT Pos Finansial Indonesia
PT Pos Properti Indonesia	416.086.220	126.750.360	PT Pos Properti Indonesia
Jumlah Beban Pajak Kini Konsolidasian	2.551.203.481	1.395.271.987	Total Consolidated Current Tax Expense

Mengacu pada SKPLB No 00027/406/22/093/24 tanggal 20 Mei 2024 atas pemeriksaan pajak tahun 2022, hasil pemeriksaan pajak didapati kekurangan pembayaran pajak penghasilan tahun 2022 Perusahaan sebesar Rp1.776.402.789. Berdasarkan standar yang berlaku kelebihan tersebut dicatat sebagai Pajak Kini Perusahaan.

Referring to the SKPLB No. 00027/406/22/093/24 dated May 20, 2024 for the 2022 tax audit, the results of the tax audit found a shortfall in the Company's 2022 income tax payment of Rp1,776,402,789. Based on applicable standards, the excess is recorded as the Company's Current Tax.

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. TAXATION (Continued)

d. Deferred Tax

75

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

16. TAXATION (Continued)

d. Pajak Tanggungan (Lanjutan)

d. Deferred Tax (Continued)

	2022	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dibebankan ke Penghasilan Komp rehensif Lain/ Charged to Other Comprehensive Income	Penyesuaian/ Adjustment	2023
Aset (Liabilitas) Pajak Tanggungan Perusahaan:					
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang dan Uang Muka	91.587.414.155	19.326.469.094	-	-	110.913.883.249
Imbalan Pasca Kerja	265.403.584.218	(9.598.380.157)	(12.707.192.559)	-	243.098.011.502
Pembayaran Sewa Pembiayaan	(18.506.986.958)	(1.679.891.928)	-	-	(20.186.878.886)
Penyusutan Aset Hak Guna	15.691.084.965	1.679.891.928	-	-	17.370.976.893
Sub Jumlah	354.175.096.380	9.728.088.937	(12.707.192.559)	-	351.195.992.758
Aset (Liabilitas) Pajak Tanggungan Entitas Anak:					
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	10.752.504.283	897.513.358	-	-	11.650.017.641
Imbalan Pasca Kerja	477.540.412	35.536.692	41.146.012	-	554.223.116
Penyusutan Aset Tetap	370.155.791	47.747.943	-	(242.555.617)	175.348.117
Penyusutan Aset Sewa Guna Usaha	(7.088.535.580)	905.242.143	-	-	(6.183.293.437)
Penyisihan Piutang Usaha	5.811.221.351	4.681.920.448	-	2.210.999.740	12.704.141.539
Penyisihan Piutang Lain-lain	46.547.926	3.740.000.000	-	-	3.786.547.926
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	1.419.124.667	2.471.149.277	-	2.354.000.000	6.244.273.944
Provisi Jangka Panjang	(294.190.100)	-	-	294.190.100	-
Aset Hak Guna	(171.703.404)	71.440.236	-	-	(100.263.168)
Rugi Fiskal	7.567.148.075	523.139.546	-	-	8.090.287.621
Sub Jumlah	18.889.813.421	13.373.689.643	41.146.012	4.616.634.223	36.921.283.299
Jumlah	373.064.909.801	23.101.778.580	(12.666.046.547)	4.616.634.223	388.117.276.057
Deferred Tax Assets (Liabilities) of the Company:					
Allowance for Impairment of Trade Receivables and Advance Employee Benefits					
Payment of Finance Leases					
Depreciation Right-of-use Assets					
Sub Total					
Deferred Tax Assets (Liabilities) Subsidiaries:					
Allowance for Impairment of Trade Receivables					
Employee Benefits					
Depreciation of Fixed Assets					
Depreciation of Leased Assets					
Allowance for Trade Receivable					
Allowance for Other Receivable					
Accrued Revenue					
Long-term Provision					
Right-of-use Assets					
Fiscal Loss					
Sub Total					
Total					

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

16. TAXATION (Continued)

e. Manfaat Pajak

e. Income Tax Benefit

	2024	2023
Perusahaan		
Pajak Kini	-	-
Pajak Kini - Penyesuaian dari Tahun Sebelumnya	(1.776.402.789)	(193.336.281)
Pajak Tangguhan	6.345.258.575	9.728.088.937
Sub Jumlah	4.568.855.786	9.534.752.656
Entitas Anak		
Pajak Kini	774.800.692	(126.750.360)
Pajak Kini - Penyesuaian dari Tahun Sebelumnya	-	(1.075.185.346)
Pajak Tangguhan	2.197.598.318	17.990.323.866
Sub Jumlah	2.972.399.010	16.788.388.160
Jumlah	7.541.254.796	26.323.140.816

The Company
 Current Income Tax
 Current Tax - Prior Year
 Adjustment
 Deferred Tax
 Sub Total
 Subsidiaries
 Current Income Tax
 Current Tax - Prior Year
 Adjustment
 Deferred Tax
 Sub Total
 Total

f. Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan

f. Estimated Claim for Tax Refund

Akun ini merupakan taksiran kelebihan pembayaran pajak penghasilan Grup yang menurut Manajemen dapat diperoleh kembali, dengan rincian sebagai berikut:

Estimated claims for tax refund represent the Group's over payment of income tax which in the Management's opinion can be refunded, with details as follows:

	2024	2023
Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan		
Perusahaan		
2024	32.270.324.767	-
2023	26.854.913.133	16.270.091.198
2022	-	12.255.864.517
Sub Jumlah Perusahaan	59.125.237.900	28.525.955.715
Entitas Anak		
2024	10.467.322.987	-
2023	14.700.068.368	15.150.581.961
2022	-	8.875.946.958
Sub Jumlah Entitas Anak	25.167.391.355	24.026.528.919
Jumlah	84.292.629.255	52.552.484.634

Estimated Claim for
 Tax Refund
 The Company
 2024
 2023
 2022
 Sub Total the Company
 Subsidiaries
 2024
 2023
 2022
 Sub Total Subsidiaries
 Total

Pada tanggal 26 April 2023, Perusahaan menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Pajak Penghasilan Badan No.00196A, atas kelebihan pembayaran PPh Badan untuk tahun pajak 2021 sebesar Rp10.697.271.653, dengan kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP sebesar Rp282.353.588, sehingga jumlah dibayarkan sebesar Rp10.414.918.065. Perusahaan telah menerima kelebihan pajak ini pada tanggal 4 Mei 2023.

On April 26, 2023, the Company received an Tax Overpayment Refund Order (SPMKP) of Corporate Income Tax No.00196A, regarding the overpayment of Corporate Income Tax for the 2021 fiscal year amounting to Rp10,697,271,653, with tax payable compensation through SPMKP deductions amounting to Rp282,353,588, so that the amount paid amounting to Rp10,414,918,065. The Company has received this excess tax on May 4, 2023.

Perusahaan menghapus selisih estimasi tagihan pajak penghasilan badan tersebut sebesar Rp193.336.281 dan dicatat sebagai Pajak Kini – Penyesuaian dari Tahun Sebelumnya.

The Company wrote off the difference in the estimated claim for corporate income tax amounting to Rp193,336,281 and recorded it as Current Tax - Prior Year Adjustment.

Pada tanggal 18 September 2024, PLI menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Pajak Penghasilan Badan No.01018A, atas kelebihan pembayaran PPh Badan untuk tahun pajak 2022 sebesar Rp8.318.160.835, dengan kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP sebesar Rp747.318.398, sehingga dibayarkan kepada perusahaan sebesar Rp7.570.842.437.

On September 18, 2024, PLI received on Tax Overpayment Refund Order of Corporate Income Tax No.01018A, regarding the overpayment of Corporate Income Tax for the 2022 fiscal year amounting to Rp8,318,160,835, with tax payable compensation through SPMKP deductions amounting to Rp747,318,398, so that it was paid to the company in the amount of Rp7,570,842,437.

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

f. Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Pada tanggal 8 Mei 2023, Entitas anak PLI menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Pajak Penghasilan Badan No.00549A, atas kelebihan pembayaran PPh Badan untuk tahun pajak 2021 sebesar Rp6.476.465.972, dengan kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP sebesar Rp1.118.261.556, sehingga jumlah dibayarkan sebesar Rp5.358.204.416. PLI telah menerima kelebihan pajak ini pada tanggal 31 Mei 2023.

PLI menghapus selisih estimasi tagihan pajak penghasilan badan tersebut sebesar Rp1.075.185.346 dan dicatat sebagai Pajak Kini – Penyesuaian dari Tahun Sebelumnya.

Perusahaan mengajukan restitusi atas Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2022 sebesar Rp12.255.864.517. Pada tanggal 19 Juni 2024, Perusahaan telah menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor 00278A berdasarkan SKPKPP Nomor: KEP-000054/PPH/KPP.1904/2024 sebesar Rp8.453.983.295 dengan memperhitungkan kompensasi utang pajak melalui potongan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penghasilan Tahun 2022 sebesar Rp613.452.059. Pada tanggal 26 Juni 2024 Perusahaan menerima Pengembalian Pajak Penghasilan sebesar Rp7.840.531.236.

PLI mengajukan restitusi atas Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2022 sebesar Rp8.501.558.107. Sampai pada saat pelaporan Perusahaan masih dalam proses pemeriksaan pajak.

g. Pemeriksaan Pajak

Pada tanggal 6 Desember 2019, Direktur Jendral Pajak mengeluarkan surat Nomor S-3885/WPJ 19/2019 tentang Surat Uraian Banding atas Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP01018/KEB/WPJ19/2019, dalam surat tersebut Direktur Jendral Pajak sebagai Terbanding memberi tanggapan atas permohonan banding Perusahaan (pemohon banding) atas keberatan dilakukannya koreksi terhadap penyesuaian fiskal negatif berupa Bantuan Operasional Layanan Pos Universal (BO-LPU) sebesar Rp341.598.000.000 dalam SPT Badan tahun 2016. Berdasarkan tanggapan Terbanding, dasar hukum koreksi atas penyesuaian fiskal negatif terhadap BO-LPU yang dilakukan Terbanding adalah berlandaskan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun pertimbangan hukumnya adalah bahwa BO-LPU yang diterima pemohon banding dari pemerintah RI (selaku pemegang saham) tersebut dianggap:

- a. Termasuk sebagai "Penghasilan" karena memenuhi unsur sebagai tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak, oleh karenanya "dianggap" sebagai objek pajak (Vide, Pasal 4 ayat 1 UU PPH).

16. TAXATION (Continued)

f. Estimated Claim for Tax Refund (Continued)

On May 8, 2023, subsidiaries PLI received an Tax Overpayment Refund Order of Corporate Income Tax No.00549A, regarding the overpayment of Corporate Income Tax for the 2021 fiscal year amounting to Rp6,476,465,972, with tax payable compensation through SPMKP deductions amounting to Rp1,118,261,556, so that it was paid amounting to Rp5,358,204,416. PLI has received this excess tax on May 31, 2023.

PLI wrote off the difference in the estimated claim for corporate income tax amounting to Rp1,075,185,346 and recorded it as Current Tax - Prior Year Adjustment.

The Company filed for the restitution of Corporate Income Tax for the 2022 fiscal year amounting to Rp12,255,864,517. On 19 June 2024, the Company received Tax Overpayment Refund Order (SPMKP) Number: 00278A based on SKPKPP Number: KEP-000054/PPH/KPP.1904/2024, amounted to Rp 8,453,983,295 less tax payable compensation through deduction of Tax Assessment Letter interest on penalty of Income Tax year 2018 amounting to Rp 613,452,059. On 26 June 2024 the Company received Income Tax Return amounted to Rp7,840,531,236.

PLI filed for the restitution of Corporate Income Tax for the 2022 fiscal year amounting to Rp8,501,558,107. Up to the date of this report, the Company is still undergoing tax audit.

g. Tax Assessments

On December 6, 2019, the Director General of Taxes issued a letter Number S-3885/WPJ 19/2019 concerning Letter of Appeals on the Decree of the Director General of Taxes No. KEP-01018/KEB/WPJ19/2019, in that letter the Director General of Taxes as Apellee responding to the Company's appeal petition (appellant) against the objection to the correction of negative fiscal adjustments in the form of Universal Post Service Operational Assistance (OA-UPS) amounting to Rp341,598,000,000 in the Annual Income Tax Return fiscal year 2016. Based on Apellee's responses, the legal basis for correction of negative fiscal adjustments to the OA-UPS conducted by the Apellee is based on tax legislation. The legal consideration is that the OA-UPS received by the appellant from the Government of Republic of Indonesia (as a shareholder) is considered:

- a. Included as "Income" because it fulfills the element as an additional economic ability by name and in any form that can be used for consumption or to add to the wealth of Taxpayer, therefore "considered" as a tax object (Vide, Article 4 paragraph 1 of the Income Tax Law).

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

- b. Tidak termasuk dikecualikan sebagai objek pajak, karena BO-LPU in litis, kedudukannya oleh Terbandingdipersamakan dengan “bantuan dan sumbangan” yang diterima oleh WP/Pemohon Banding (Pihak/Pihak BO-LPU) dari pemerintah RI selaku pemegang sahamnya (Pihak/WP Pemberi BO-LPU) karena antara para pihak tersebut terdapat hubungan kerja usaha dan hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan satu sama lain. Sehingga terhadap BO-LPU in litis dilakukan koreksi atas Penyesuaian Fiskal Negatif dalam SPT Badan tahun 2016.

Pada tanggal 2 Desember 2019, Perusahaan mendapatkan putusan salinan pajak atas gugatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Nomor 00024/406/17/093/19 tahun pajak 2017 tanggal 7 Mei 2019 yang membatalkan seluruh koreksi yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak sebesar Rp588.551.106.

Pada tanggal 16 Januari 2020, Perusahaan mengeluarkan Surat Bantahan Nomor 58/Dir-1/0120 terhadap Surat Direktur Jendral Pajak Nomor S-3885/WPJ 19/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Surat Uraian Banding atas Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-01018/KEB/WPJ19/2019, dalam suratnya Perusahaan dalam hal ini sebagai Pemohon Banding dengan berdasarkan argumentasi hukum tidak sependapat dengan seluruh dasar dan pertimbangan hukum serta alasan koreksi yang didalilkan dan ditetapkan oleh Terbanding, karena dasar yang dikonstatir, pertimbangan dan alasan hukum koreksi yang dikonstitusinya tidak sesuai dengan hukum pajak yang berlaku dan tidak mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya (tidak sesuai dengan sifat usaha WP). Sehingga hasil koreksi atas penyesuaian fiskal negatif berupa Bantuan Operasional Layanan Pos Universal (BO-LPU) sebesar Rp341.598.000.000 harus dibatalkan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak tersebut telah diterima oleh Perusahaan pada tahun 2020 sebesar Rp42.903.902.988. Perusahaan mengajukan kembali kelebihan pembayaran pajak atas BO-LPU tahun 2015 sebesar Rp41.848.358.688 sampai dengan tanggal laporan ini diterbitkan Perusahaan masih dalam proses pengadilan pajak.

Pada tanggal 4 Januari 2023, Perusahaan menerima memori peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak Nomor PUT-014103.99/2021/PP/M.VIIIB tahun 2022 tanggal 28 September 2022 tentang pengembalian keterlanjuran kelebihan pembayaran pajak atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) 2015 tentang pajak Bantuan Operasional Layanan Pos Universal (BO-LPU) bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan.

16. TAXATION (Continued)

g. Tax Assessments (Continued)

- b. Not excluded as a tax object, because OA-UPS in litis, its position by Appellee is equivalent to "assistance and donations" received by Taxpayer/Appellant (Parties/Parties of OA-UPS) from the Indonesian Government as its shareholders (Parties/Taxpayer Giving OA-UPS) because between the parties there is a business employment relationship and ownership or control relationship with each other. So that the OA-UPS in litis was corrected for the Negative Fiscal Adjustment in the Annual Tax Return fiscal year 2016.

On December 2, 2019, the Company obtained a copy of tax decision on the lawsuit against the Income Tax Assessment Letter (SKPLB) of Income Tax Number 00024/406/17/093/19 fiscal year 2017 dated May 7, 2019 which canceled all corrections made by the Director General of Taxes amounting to Rp588,551,106.

On January 16, 2020, the Company issued an Objection Letter Number 58/Dir-1/0120 to the Director General of Taxes Letter Number S-3885/WPJ19/2019 dated December 6, 2019 concerning Letter of Appeal to the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-01018/KEB/WPJ19/2019, in his letter the Company in this case as an Appellant based on legal arguments does not agree with all legal basis and law considerations and the reasons for correction which are postulated and determined by the Appellee, because the basis is constrained, the legal considerations and reasons for correction whose constitution is not in accordance with the applicable tax law and does not reflect actual business activities (not in accordance with the nature of Taxpayer business). So that the correction results of the negative fiscal adjustment in the form of Universal Postal Service Operational Assistance (OA-UPS) amounting to Rp341,598,000,000 must be canceled.

The refund for the overpayment of tax has been received by the Company in 2020 amounting to Rp42,903,902,988. The company resubmitted the overpayment of tax on OA-UPS in 2015 amounting to Rp41,848,358,688 until the date of this report, the case is still in the tax court process.

On January 4, 2023, the Company proposed a files for judicial review of tax court decisions Number PUT014103.99/2021/PP/M.VIIIB of 2022 dated September 28, 2022 regarding the refund of tax overpayment on the Tax Assessment Letter (SKP) of 2015 concerning the Universal Postal Service Operational Assistance (OA-UPS) tax not an Income Tax Object.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

16. TAXATION (Continued)

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

g. Tax Assessments (Continued)

Pada tahun 2024 dan 2023 Grup menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, 4 ayat 2 dan PPN dengan rincian sebagai berikut:

In 2024 and 2023, the Group received Tax Collection Letter (STP) on Income Tax Articles 21, 23, 4 (2) and VAT with the following details:

Surat Pajak/ <i>Tax Assessment Letters</i>	Jenis Pajak/ <i>Type of Tax</i>	Total/ <i>Amounts</i>
<u>2024</u>		
Surat Tagihan Pajak		
00001/101/21/332/24	PPh Pasal 21	123.613
00001/101/24/923/24	PPh Pasal 21	13.039
00001/103/23/824/24	PPh Pasal 21	100.352
00002/101/21/332/24	PPh Pasal 21	412.196
00002/101/24/221/21	PPh Pasal 21	14.733
00002/101/24/608/24	PPh Pasal 21	104.837
00003/101/24/922/24	PPh Pasal 21	105.321
00004/101/24/119/24	PPh Pasal 21	14.154
00004/201/21/655/23	PPh Pasal 21	689.864
00005/101/24/217/24	PPh Pasal 21	194.238
00005/101/24/647/24	PPh Pasal 21	8.848
00008/101/21/327/23	PPh Pasal 21	52.205
00009/101/20/645/24	PPh Pasal 21	10.476
00009/101/21/327/23	PPh Pasal 21	272.448
00011/101/22/203/24	PPh Pasal 21	40.817
00012/101/22/203/24	PPh Pasal 21	33.607
00012/101/24/327/24	PPh Pasal 21	72.833
00013/101/22/203/24	PPh Pasal 21	12.659
00014/101/22/203/24	PPh Pasal 21	23.566
00014/101/23/656/24	PPh Pasal 21	113.478
00014/101/24/702/24	PPh Pasal 21	100.000
00014/106/23/093/24	PPh Pasal 21	1.000.000
00015/101/22/203/24	PPh Pasal 21	32.401
00015/101/23/925/23	PPh Pasal 21	21.918
00015/101/24/605/24	PPh Pasal 21	170.611
00016/101/22/203/24	PPh Pasal 21	13.763
00016/101/24/602/24	PPh Pasal 21	10.275
00017/101/22/203/24	PPh Pasal 21	12.481
00018/101/22/203/24	PPh Pasal 21	42.520
00021/101/24/211/24	PPh Pasal 21	101.614
00029/101/24/642/24	PPh Pasal 21	15.277
00042/101/20/327/23	PPh Pasal 21	100.000
00042/101/21/106/23	PPh Pasal 21	639.302
00042/101/23/951/24	PPh Pasal 21	75.521
00043/101/21/106/23	PPh Pasal 21	70.945
00049/101/23/954/24	PPh Pasal 21	60.087
00061/101/21/128/23	PPh Pasal 21	319.455
00062/101/21/128/23	PPh Pasal 21	102.138
00064/101/23/816/24	PPh Pasal 21	100.000

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

16. TAXATION (Continued)

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

g. Tax Assessments (Continued)

Surat Pajak/ Tax Assessment Letters	Jenis Pajak/ Type of Tax	Total/ Amounts
<u>2024</u>		
Surat Tagihan Pajak		
00071/101/23/942/23	PPh Pasal 21	100.000
00083/101/23/419/23	PPh Pasal 21	100.000
00084/101/24/307/24	PPh Pasal 21	100.000
00091/101/24/423/24	PPh Pasal 21	18.136.961
00099/101/21/126/23	PPh Pasal 21	84.490
00099/101/23/922/24	PPh Pasal 21	100.684
00100/101/21/126/23	PPh Pasal 21	179.256
00100/101/21/126/23	PPh Pasal 21	85.500
00101/101/21/126/23	PPh Pasal 21	510.595
00102/101/21/126/23	PPh Pasal 21	207.360
00103/101/23/902/23	PPh Pasal 21	45.452
00113/103/20/419/23	PPh Pasal 21	217.047
00117/101/23/703/23	PPh Pasal 21	100.000
00121/101/23/093/23	PPh Pasal 21	100.000
00121/101/23/942/23	PPh Pasal 21	100.000
00133/101/23/404/24	PPh Pasal 21	272.203
00133/103/19/941/23	PPh Pasal 21	33.936
00134/103/20/723/23	PPh Pasal 21	100.000
00140/101/23/941/24	PPh Pasal 21	2.294
00150/101/23/401/23	PPh Pasal 21	100.000
00158/101/24/211/24	PPh Pasal 21	45.300
00159/101/23/419/23	PPh Pasal 21	100.000
00163/101/23/417/23	PPh Pasal 21	100.000
00178/103/20/626/23	PPh Pasal 21	100.000
00189/101/23/942/23	PPh Pasal 21	100.000
00221/101/23/093/23	PPh Pasal 21	100.000
00222/101/23/093/23	PPh Pasal 21	100.000
00223/101/23/093/23	PPh Pasal 21	100.000
00224/101/23/093/23	PPh Pasal 21	100.000
00240/101/21/727/23	PPh Pasal 21	100.000
00242/101/20/108/23	PPh Pasal 21	185.089
00245/101/20/108/23	PPh Pasal 21	471.959
00252/101/19/723/23	PPh Pasal 21	80.103
00254/101/19/941/23	PPh Pasal 21	21.033
00256/101/23/911/23	PPh Pasal 21	96.062
00259/101/23/821/23	PPh Pasal 21	100.000
00294/101/23/701/23	PPh Pasal 21	100.000
00311/101/24/426/24	PPh Pasal 21	100.000
00350/101/24/423/24	PPh Pasal 21	100.000
00355/101/23/453/24	PPh Pasal 21	376.765
00377/101/22/417/23	PPh Pasal 21	2.154.579
00463/101/23/821/23	PPh Pasal 21	100.000
00675/101/20/821/23	PPh Pasal 21	100.000
00676/101/20/821/23	PPh Pasal 21	100.000
00795/101/23/903/23	PPh Pasal 21	161.292
00796/101/23/903/23	PPh Pasal 21	227.233

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

16. TAXATION (Continued)

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

g. Tax Assessments (Continued)

Surat Pajak/ Tax Assessment Letters	Jenis Pajak/ Type of Tax	Total/ Amounts
<u>2024</u>		
Surat Tagihan Pajak		
00940/101/23/404/23	PPh Pasal 21	100.000
01176/101/23/403/23	PPh Pasal 21	100.000
01276/101/23/453/23	PPh Pasal 21	100.000
0166/101/233/942/23	PPh Pasal 21	100.000
0166/101/233/942/23	PPh Pasal 21	100.000
02049/101/23/416/23	PPh Pasal 21	100.000
70000/202312/124841/49	PPh Pasal 23	100.000
00003/140/22/093/24	PPh Pasal 4 Ayat (2)	800.000
Surat Ketetapan Pajak		
00002/187/22/093/24	PPN WAPU	43.473.615
00002/243/22/093/24	PPh Pasal 21 Final	429.373.761
00016/201/22/093/24	PPh Pasal 21	1.327.558.372
00027/406/22/093/24	PPh Badan	(8.453.983.295)
00128/207/22/093/24	PPN	108.957.683
00128/207/22/093/24	PPN	123.652.052
Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan		
S-534/P2DK/KPP.2606/2023	PPh Pasal 21	2.424.557
S-534/P2DK/KPP.2606/2023	PPh Pasal 21	207.000
S-701/P2DK/KPP.2702/2023	PPh Pasal 21	1.789.046
S-701/P2DK/KPP.2702/2023	PPh Pasal 21	530.985
S-701/P2DK/KPP.2702/2023	PPh Pasal 21	362.250
Total		(6.382.657.189)
Surat Pajak/ Tax Assessment Letters	Jenis Pajak/ Type of Tax	Total/ Amounts

2023

Surat Tagihan Pajak

00002/101/22/822/23	PPh Pasal 21	100.000
00002/101/23/954/23	PPh Pasal 21	12.041
00004/101/19/832/23	PPh Pasal 21	100.353
00008/101/20/832/23	PPh Pasal 21	100.000
00009/101/20/302/23	PPh Pasal 21	100.000
00009/101/23/804/23	PPh Pasal 21	167.337
00011/101/23/804/23	PPh Pasal 21	97.597
00012/101/21/127/23	PPh Pasal 21	462.499
00012/101/21/647/23	PPh Pasal 21	316.600
00012/101/22/513/23	PPh Pasal 21	21.126
00015/201/19/655/23	PPh Pasal 21	309.785
00016/101/21/303/23	PPh Pasal 21	471.570
00016/201/19/655/23	PPh Pasal 21	401.410

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

16. TAXATION (Continued)

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

g. Tax Assessments (Continued)

Surat Pajak/ Tax Assessment Letters	Jenis Pajak/ Type of Tax	Total/ Amounts
<u>2023</u>		
Surat Tagihan Pajak		
00017/201/19/655/23	PPh Pasal 21	5.072.602
00020/101/20/303/23	PPh Pasal 21	100.000
00020/101/23/093/23	PPh Pasal 21	100.000
00022/101/21/629/23	PPh Pasal 21	2.092
00022/101/21/804/23	PPh Pasal 21	100.000
00023/101/21/629/23	PPh Pasal 21	412.747
00023/101/21/813/23	PPh Pasal 21	100.000
00027/101/21/116/23	PPh Pasal 21	541.728
000281/101/19/952/23	PPh Pasal 21	1.772
00029/101/20/313/23	PPh Pasal 21	200.000
00030/101/22/541/23	PPh Pasal 21	56.148
00031/101/21/127/23	PPh Pasal 21	23.055
00031/101/23/942/23	PPh Pasal 21	30.983
00038/101/21/803/23	PPh Pasal 21	100.000
00046/101/20/813/23	PPh Pasal 21	100.000
00047/101/19/813/23	PPh Pasal 21	100.000
00050/101/22/101/23	PPh Pasal 21	4.789
00057/101/22/221/23	PPh Pasal 21	11.133
00059/101/22/629/23	PPh Pasal 21	222
00063/101/20/822/23	PPh Pasal 21	100.000
00066/101/21/822/23	PPh Pasal 21	100.000
00067/101/20/822/23	PPh Pasal 21	487.398
00068/101/20/952/23	PPh Pasal 21	100.000
00072/101/22/093/23	PPh Pasal 21	161.330
00077/103/20/629/23	PPh Pasal 21	100.000
00078/103/20/629/23	PPh Pasal 21	100.000
00079/101/22/517/23	PPh Pasal 21	143.345
00082/101/22/956/23	PPh Pasal 21	4.459
00089/101/22/526/23	PPh Pasal 21	52.136
00096/101/21/605/23	PPh Pasal 21	205.431
00100/101/19/804/23	PPh Pasal 21	100.000
00103/101/20/332/23	PPh Pasal 21	100.000
00105/101/20/309/23	PPh Pasal 21	100.000
00109/101/20/803/23	PPh Pasal 21	100.000
00116/101/11/127/22	PPh Pasal 21	17.880
00117/101/11/127/22	PPh Pasal 21	343.911
00118/101/11/127/22	PPh Pasal 21	27.362
00123/101/21/419/23	PPh Pasal 21	322.660
00125/101/21/419/23	PPh Pasal 21	720.067
00126/101/19/804/23	PPh Pasal 21	17.857
00129/101/21/307/23	PPh Pasal 21	181.400
00138/101/18/952/23	PPh Pasal 21	43.922
00149/101/22/542/23	PPh Pasal 21	14.951
00158/101/22/729/23	PPh Pasal 21	26.957
00162/101/22/824/22	PPh Pasal 21	100.000
00168/101/22/642/23	PPh Pasal 21	17.363
00182/101/20/419/23	PPh Pasal 21	100.000

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

16. TAXATION (Continued)

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

g. Tax Assessments (Continued)

	Surat Pajak/ Tax Assessment Letters	Jenis Pajak/ Type of Tax	Total/ Amounts
<u>2023</u>			
Surat Tagihan Pajak			
	00182/101/20/954/23	PPh Pasal 21	100.000
	00182/101/22/419/22	PPh Pasal 21	100.000
	00187/101/22/419/23	PPh Pasal 21	913.894
	00188/101/19/626/23	PPh Pasal 21	53.934
	00193/101/22/423/23	PPh Pasal 21	38.893.356
	00204/101/20/423/23	PPh Pasal 21	100.000
	00241/101/19/438/23	PPh Pasal 21	12.801
	00247/101/20/304/23	PPh Pasal 21	100.000
	00304/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
	00305/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
	00306/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
	00307/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
	00308/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
	00326/101/22/543/22	PPh Pasal 21	30.104
	00350/101/22/407/23	PPh Pasal 21	559.654
	00373/101/20/307/23	PPh Pasal 21	100.000
	00385/101/19/402/23	PPh Pasal 21	154.905
	00387/101/19/429/23	PPh Pasal 21	535.549
	00457/101/19/905/23	PPh Pasal 21	108.671
	00514/101/22/732/23	PPh Pasal 21	100.000
	00003/103/19/608/23	PPh Pasal 23	100.000
	00003/103/19/733/23	PPh Pasal 23	19.206
	00004/103/19/733/23	PPh Pasal 23	100.000
	00007/103/20/442/23	PPh Pasal 23	100.000
	00008/103/19/509/23	PPh Pasal 23	918.412
	00011/103/19/832/23	PPh Pasal 23	2.534
	00014/103/19/203/23	PPh Pasal 23	106.652
	00018/103/19/626/23	PPh Pasal 23	100.000
	00022/103/19/406/23	PPh Pasal 23	100.000
	00022/103/19/645/23	PPh Pasal 23	100.000
	00023/103/19/645/23	PPh Pasal 23	100.000
	00024/103/19/645/23	PPh Pasal 23	100.000
	00025/103/19/645/23	PPh Pasal 23	100.000
	00028/103/19/735/23	PPh Pasal 23	100.000
	00032/103/19/804/23	PPh Pasal 23	137.474
	00044/103/19/712/23	PPh Pasal 23	100.000
	00045/103/19/649/23	PPh Pasal 23	100.000
	00046/103/19/647/23	PPh Pasal 23	200.000
	00047/103/19/647/23	PPh Pasal 23	100.000
	00047/103/19/741/23	PPh Pasal 23	100.000
	00049/103/19/645/23	PPh Pasal 23	100.000
	00050/103/19/645/23	PPh Pasal 23	82.328
	00054/103/21/438/23	PPh Pasal 23	17.955
	00071/103/19/727/23	PPh Pasal 23	100.000
	00074/103/20/646/23	PPh Pasal 23	100.000
	00092/103/19/093/23	PPh Pasal 23	100.000
	00099/103/19/217/23	PPh Pasal 23	116.732

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

16. TAXATION (Continued)

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

g. Tax Assessments (Continued)

Surat Pajak/ Tax Assessment Letters	Jenis Pajak/ Type of Tax	Total/ Amounts
<u>2023</u>		
Surat Tagihan Pajak		
00105/103/20/438/23	PPh Pasal 23	100.000
00107/103/19/646/23	PPh Pasal 23	100.000
00192/103/20/655/23	PPh Pasal 23	100.000
00193/103/20/655/23	PPh Pasal 23	100.000
00282/101/22/727/23	PPh Pasal 23	2.706
00409/103/19/416/23	PPh Pasal 23	166.689
00410/103/19/416/23	PPh Pasal 23	133.650
00004/106/18/093/23	PPh Pasal 29	1.000.000
00019/140/21/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00020/140/21/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00021/140/21/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00022/140/21/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00030/140/20/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00031/140/20/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00032/140/20/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00033/140/20/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00035/140/19/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00030/187/21/093/23	PPN	673.169
00031/187/21/093/23	PPN	74.022
00032/187/21/093/23	PPN	107.683
00033/187/21/093/23	PPN	3.633.174
00034/187/21/093/23	PPN	370.065
00035/187/21/093/23	PPN	2.141.765
00036/187/21/093/23	PPN	6.869.269
00037/187/21/093/23	PPN	14.518.608
00038/187/21/093/23	PPN	6.688.365
00039/187/21/093/23	PPN	30.767.236
00053/207/21/093/23	PPN	109.627.742
00066/107/21/093/23	PPN	101.659.611
00256/107/22/955/23	PPN	500.000
01000/107/22/955/23	PPN	500.000
04071/107/22/955/23	PPN	500.000
Surat Ketetapan Pajak		
00002/243/21/093/23	PPh Pasal 21	16.090.789
00005/202/21/093/23	PPh Pasal 22	2.686.544
00007/201/21/093/23	PPh Pasal 21	2.259.871.386
00009/240/21/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	1.101.826.599
00010/240/21/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	246.930.346
00012/203/21/093/23	PPh Pasal 23	564.744.823
00015/201/19/093/21	PPh Pasal 21	226.759.840
00015/202/19/093/21	PPh Pasal 22	48.909.284
00017/240/19/093/21	PPh Pasal 4 ayat (2)	240.501.360
00035/203/19/093/21	PPh Pasal 23	406.884.280
00054/207/21/093/23	PPN	2.033.192.221
00093/207/19/093/2	PPN	884.118.952

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

16. TAXATION (Continued)

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

g. Tax Assessments (Continued)

Surat Pajak/ Tax Assessment Letters	Jenis Pajak/ Type of Tax	Total/ Amounts
Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan		
S-1030/IMB/KPP.2706/06/2023	PPh Pasal 21	1.454.404
S-1717/P2DK/KPP.2506/2022	PPh Pasal 21	3.345.000
S-3019/KPP.2808/2022	PPh Pasal 21	346.644
S-577/KPP.2507/2022	PPh Pasal 21	384.000
S-620/KPP.2808/2022	PPh Pasal 21	1.524.001
S-765/KPP.2502/2022	PPh Pasal 21	14.793.725
S-871/KPP.0301/2022	PPh Pasal 21	2.454.271
S-99/P2DK/KPP.2505/2023	PPh Pasal 21	9.123.385
SP2DK-3/WPJ.09/KP.05/2022	PPh Pasal 21	3.989.296
SP2DK-379/WPJ.08/KP.05/2022	PPh Pasal 21	1.584.000
SP2DK-602/WPJ.29/KP.09/2022	PPh Pasal 21	546.449
SP2DK-663/WPJ.29/KP.09/2022	PPh Pasal 21	471.562
Laporan Hasil Penelitian		
LAP-140/LHPT/KPP.260607/2023	PPh Pasal 21	5.026.603
Total		8.418.163.697
Surat Pajak/ Tax Assessment Letters	Jenis Pajak/ Type of Tax	Total/ Amounts
<u>PLI</u>		
Surat Tagihan Pajak		
00202/107/22/078/24	PPN	12.955.822
Surat Ketetapan Pajak		
00308/207/22/078/24	PPN	69.790
00309/207/22/078/24	PPN	199.439.038
00053/240/22/078/24	PPh Pasal 4 Ayat (2)	181.618.828
01234/201/22/078/24	PPh Pasal 21	575.768
00126/507/22/078/24	PPh Pasal 23	352.659.152
<u>PPI</u>		
Surat Tagihan Pajak		
00631/101/24/441/24	PPh Pasal 21	121.653
00628/101/24/441/24	PPh Pasal 21	320.551
00629/101/24/441/24	PPh Pasal 21	327.454
00630/101/24/441/24	PPh Pasal 21	164.235
00409/106/24/441/24	PPh Pasal 25	831.983
00836/107/24/441/24	PPN	6.483.552
Total		755.567.826

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

16. TAXATION (Continued)

h. Administrasi Pajak

h. Tax Administration

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, dan pengurangan tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu dan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dari sebelumnya 10% menjadi 11% efektif mulai dari 1 April 2022 dan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025.

On October 29, 2021, the Government issue Law of the Republic of Indonesia No. 7 year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the fiscal year 2022 onwards, and a further reduction of the tax rate by 3% for domestic taxpayers who meet certain requirements and increase of the value added tax rate from previously 10% to become 11% effective from April 1, 2022 and become 12% no later than January 1, 2025.

17. UTANG LAIN-LAIN

17. OTHER PAYABLES

	2024	2023	
Utang Lain-lain			Other Payables
Utang Kepegawaian	40.272.657.054	56.652.393.250	Employee Payables
Pendapatan Diterima di Muka			
Pemanfaatan Aset	48.697.126.075	58.618.995.767	Prepaid Income on Assets Utilization
Utang atas Penyelesaian Investasi	92.952.017.906	45.324.750.466	Payable of Working Investment
Utang Uang Jaminan	9.620.980.222	6.224.087.757	Fund Guarantee Payables
Deposit Layanan Payment Point	-	4.299.165.685	Deposit Payment of Point Service
Deposit atas Penyelenggaraan			Deposits on the Operation of Foreign
Layanan Surat dan Paket:			Letter and Package Services:
Deposit Agen	17.005.312.974	17.770.194.400	Agent Deposits
Luar Negeri	17.784.047.137	7.097.813.277	International
Deposit atas Jaminan Sewa Properti	8.132.276.074	158.000.000	Deposit for Property Rental Guarantee
Jaminan Penyelenggaraan Layanan			Guaranteed Service Delivery
Wesel Langganan	274.000.000	200.000.000	Subscription
Sub Jumlah	234.738.417.442	196.345.400.602	Sub Total
Utang Lancar Lainnya	8.697.909.661	75.071.385.880	Other Current Payables
Provisi Jangka Pendek			Short-term Provision
Jasa Produksi	46.500.804.572	120.880.593.816	Production Service
Tantiem	11.771.851.338	28.672.438.082	Tantiem
Sub Jumlah	58.272.655.910	149.553.031.898	Sub Total
Biaya yang Masih Harus Dibayar			Accrued Expenses
Honorarium Petugas Agen Pos	99.922.530.868	11.089.227.095	Honorarium of Post Agents
Sewa	92.316.722.157	61.188.027.651	Lease
Angkutan Pos	89.567.789.155	166.960.257.755	Postal Delivery
Administrasi	36.165.221.392	38.067.491.347	Administration
Beban Bunga Pinjaman	12.600.013.889	10.665.097.222	Loan Interest Expense
Pengerjaan Kiriman Pos Luar Negeri	11.449.591.023	5.517.220.438	International Mailing Delivery
Konstruksi	11.316.430.273	5.704.935.518	Construction
Biaya Lembur Tenaga Kontrak			Overtime Allowance for Non-permanent
Karya	5.272.433.045	1.381.629.112	Employees
Keamanan	4.117.820.824	443.643.200	Security
Pemeliharaan	4.065.246.371	264.747.056	Maintenance
Pajak Final	1.102.034.912	1.212.650.386	Final Tax
Pengembangan Properti	957.200.000	150.105.381	Property Development
Tunjangan Karyawan Lainnya	205.975.838	57.616.155	Other Employee Allowance
Fee Konsultan	-	1.454.428.500	Consultant Fee
Sub Jumlah	369.059.009.747	304.157.076.816	Sub Total
Utang Pemegang Saham Minoritas	51.971.718.279	28.701.465.612	Debt of Minority Shareholders
Jumlah	722.739.711.039	753.828.360.808	Total

Manajemen telah mencadangkan provisi untuk pembayaran jasa produksi untuk karyawan dan tenaga kerja kontrak pembayaran tantiem untuk direksi dan komisaris.

The Management has made a provision for payment of production services for employees and payment of bonuses for directors and commissioners.

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
 Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)
 As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. UTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)

Utang kepegawaian merupakan utang gaji dan manfaat karyawan yang sampai dengan akhir periode pelaporan laporan keuangan belum dibayarkan kepada pegawai. Utang kepegawaian terdiri dari uang kontrak rumah pegawai, uang cuti tahunan dan uang cuti tahap akhir.

Utang uang jaminan adalah penerimaan kas atau bank yang diterima dari pihak ketiga (mitra) sebagai utang uang jaminan di awal kerjasama dengan Grup. Tujuan uang jaminan ini adalah untuk menghindari kerugian yang mungkin dialami oleh Grup dalam pelaksanaan pekerjaan.

Biaya yang masih harus dibayar merupakan beban akrual Grup dimana manfaat atas penggunaan beban tersebut telah diterima Grup pada masa periode pelaporan. Beban akrual angkutan pos merupakan beban akrual atas angkutan pengiriman barang kiriman pos baik itu menggunakan moda angkutan darat dan udara yang mana proses penagihan *invoice* dilakukan kurang lebih 2 - 3 bulan dari tanggal transaksi.

Penurunan akrual atas angkutan pos selama 2024 dikarenakan angkutan pos dikelola langsung oleh entitas anak (PT Pos Logistik Indonesia).

Kenaikan akrual atas sewa kendaraan merupakan biaya akrual dari proyek pengiriman bantuan cadangan beras pemerintah yang merupakan kerjasama Grup dengan Perum Bulog. Angka tersebut merupakan cadangan atas 3 tahap pekerjaan proyek pengiriman.

17. OTHER PAYABLES (Continued)

Employee payables is a payable of salaries and employee benefits that until the end of the reporting period has not been paid to employees. The employee payables consist of employee's housing contract money, annual leave money and final stage leave money.

Fund guarantee payable is bank or cash received from third parties (partners) as security deposits that were paid at the beginning of cooperation agreement with the Group. The purpose of deposits is to avoid losses that might experienced by the Group in the implementation of the work.

Accrued expenses are the accrual of the Group's expenses where the benefits of using expenses have been received by the Group during the reporting period. Accrued postal delivery expense is an accrued expenses on postal delivery freight transport whether by land and air transportation mode where the invoice billing process is approximately 2 - 3 months from the date of transaction.

The decrease in accruals for postal transportation during 2024 was due to postal transportation being managed directly by a subsidiary (PT Pos Logistik Indonesia).

The increase in accrual of rental of vehicles is an accrual expenses for the delivery project of government rice reserve assistance which is a collaboration between the Group and Perum Bulog. This amount is a reserve for 3 stages of delivery project work.

18. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK

Akun ini merupakan pinjaman bank jangka pendek Grup dengan rincian sebagai berikut:

18. SHORT-TERM BANK LOAN

This account pertains to short-term bank loan of the Group with details are as follows:

	2024	2023	
Pihak Berelasi (Catatan 27)			Related Parties (Note 27)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	449.986.907.517	370.604.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	370.000.000.000	300.000.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Sub Jumlah	819.986.907.517	670.604.000.000	Sub Total
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Bank Central Asia Tbk	1.400.000.000.000	665.000.000.000	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	750.000.000.000	500.000.000.000	PT Bank Maspion Indonesia Tbk
PT Bank Dubai Panin Syariah Tbk	400.000.000.000	400.000.000.000	PT Bank Dubai Panin Syariah Tbk
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	251.346.462.347	-	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
PT Bank IBK Indonesia Tbk	200.000.000.000	-	PT Bank IBK Indonesia Tbk
PT Bank KB Bukopin Tbk	200.000.000.000	-	PT Bank KB Bukopin Tbk
PT Bank Neo Commerce Tbk	200.000.000.000	-	PT Bank Neo Commerce Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk	100.000.000.000	50.000.000.000	PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	99.800.000.000	-	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Sub Jumlah	3.601.146.462.347	1.615.000.000.000	Sub Total
Total	4.421.133.369.864	2.285.604.000.000	Total

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

18. SHORT-TERM BANK LOAN (Continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perjanjian Kredit	: Perjanjian Kredit Modal Kerja I No.CRO.KP/206/KMK/12 Addendum XII (keduabelas) tanggal 23 September 2024
Plafond	: Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh milyar rupiah)
Jangka Waktu	: 26 September 2024 sampai dengan 25 September 2025
Tujuan	: Modal kerja untuk memenuhi kebutuhan dana transaksi harian
Tingkat Bunga	: 8,5% per tahun
Provisi	: 0,25% per tahun dari total limit
Jaminan	: Tanpa Jaminan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perjanjian Kredit	: Perjanjian Kredit Modal Kerja II No.WCO.KP/444/KMK/21 Addendum III (ketiga) tanggal 23 September 2024
Plafond	: Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah)
Jangka Waktu	: 26 September 2024 sampai dengan 25 September 2025.
Tujuan	: Modal kerja untuk memenuhi kebutuhan dana transaksi harian
Tingkat Bunga	: 8,5% per tahun
Provisi	: 0,25% per tahun dari total limit
Jaminan	: Tanpa Jaminan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perjanjian Kredit	: Perjanjian Kredit Fasilitas Non-Cash Loan No. WCO.KP/1535/NCL/2023, Addendum I (pertama) tanggal 23 September 2024
Plafond	: Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)
Jangka Waktu	: 25 September 2024 sampai dengan 25 September 2025
Tujuan	: Bank Garansi untuk keperluan tender dan retensi atau pemeliharaan proyek kerja sama dengan Pemerintah dan pengiriman surat atau paket atau logistik Perusahaan
Provisi	: 0,25% per tahun dari total limit
Jaminan	: Tanpa Jaminan
Perjanjian Kredit	: Perjanjian Kredit Fasilitas Non-Cash Loan No. WCO.KP/1535/NCL/2023, Addendum I (pertama) tanggal 23 September 2024

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Loan Agreement	: Working Capital Loan Agreement I No.CRO.KP/206/KMK/12 Addendum XII (twelfth) dated September 23, 2024
Limit	: Rp350,000,000,000 (three hundred and fifty billion rupiah)
Period	: September 26, 2024 until September 25, 2025
Purposes	: Working capital to meet the needs of daily transaction funds
Interest Rate	: 8.5% per annum
Provision	: 0.25% per annum of the limit
Collateral	: Clean basis

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Loan Agreement	: Working Capital Loan Agreement II No.WCO.KP/444/KMK/21 Addendum III (third) dated September 23, 2024
Limit	: Rp150,000,000,000 (one hundred fifty billion rupiah)
Period	: September 26, 2024 until September 25, 2025
Purposes	: Working capital to meet the needs of daily transaction funds
Interest Rate	: 8.5% per annum
Provision	: 0.25% per annum of the limit
Collateral	: Clean basis

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Loan Agreement	: Credit Agreement of Non-Cash Loan Facility No. WCO.KP/1535/NCL/2023, Addendum I (first) dated September 23, 2024
Limit	: Rp100,000,000,000 (one hundred billion rupiah)
Period	: September 25, 2024 until September 25, 2025
Purposes	: Bank Guarantee for tender purposes and retention or maintenance of cooperation projects with the Government and delivery of letters or packages or Company logistics
Provision	: 0.25% per annum of the limit
Collateral	: Clean basis
Loan Agreement	: Credit Agreement of Non-Cash Loan Facility No. WCO.KP/1535/NCL/2023, Addendum I (first) dated 23 September 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
 Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)
 As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

18. SHORT-TERM BANK LOAN (Continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perjanjian Kredit	: Persetujuan Kredit No. 62 tanggal 14 Maret 2024 Addendum XIII (Ketiga Belas)
Plafond	: Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah)
Jangka Waktu	: 17 Maret 2024 sampai dengan 16 Maret 2025
Tujuan	: Modal Kerja usaha jasa logistik, pengiriman dan jasa keuangan
Jenis Kredit	: <i>Term Loan</i>
Tingkat Bunga	: 9,75%
Jaminan	: Tanpa Jaminan

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perjanjian Kredit	: Persetujuan Kredit No. 09 tanggal 14 Maret 2024 Addendum XIV (Keempat Belas)
Plafond	: Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)
Jangka Waktu	: 17 Maret 2024 sampai dengan 16 Maret 2025
Tujuan	: Pembiayaan Belanja Modal Perusahaan
Jenis Kredit	: <i>Term Loan</i>
Tingkat Bunga	: 9,50%, sejak Oktober 2023 menjadi 9,75%
Jaminan	: Tanpa Jaminan

PT Bank Central Asia Tbk

Perjanjian Kredit	: Perjanjian Kredit No. 376/Add-KCK/2024 Tanggal 28 Oktober 2024
Fasilitas Kredit	: Time loan revolving dengan limit Rp1.400.000.000.000 (satu triliun empat ratus miliar rupiah) Fasilitas kredit lokal dengan limit Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)
Jangka Waktu	: 28 Oktober 2024 sampai dengan 29 Oktober 2025
Tujuan	: Modal Kerja Operasional Perusahaan, khususnya pembayaran kepada Pihak Ketiga
Jenis Kredit	: <i>Time Loan Revolving</i>
Tingkat Bunga	: 8,60% per tahun

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

<i>Loan Agreement</i>	: <i>Loan Approval No. 62, dated March 14, 2024 Addendum XIII (thirteenth)</i>
<i>Limit</i>	: <i>Rp150,000,000,000 (one hundred fifty billion rupiah)</i>
<i>Period</i>	: <i>March 17, 2024 until March 16, 2025</i>
<i>Purposes</i>	: <i>Working Capital for logistics, shipping, and financial services businesses</i>
<i>Type of Credit</i>	: <i>Term Loan</i>
<i>Interest Rate</i>	: <i>9.75% per annum</i>
<i>Collateral</i>	: <i>Clean basis</i>

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

<i>Loan Agreement</i>	: <i>Loan Approval No. 09, dated March 14, 2024 Addendum XIV (Fourteenth)</i>
<i>Limit</i>	: <i>Rp250,000,000,000 (two hundred fifty billion rupiah)</i>
<i>Period</i>	: <i>March 17, 2024 until March 16, 2025</i>
<i>Purposes</i>	: <i>To Finance the Company's Capital Expenditure</i>
<i>Type of Credit</i>	: <i>Term Loan</i>
<i>Interest Rate</i>	: <i>9.50%, since October 2023 to 9.75%</i>
<i>Collateral</i>	: <i>Clean basis</i>

PT Bank Central Asia Tbk

<i>Loan Agreement</i>	: <i>Credit Agreement No. 376/Add-KCK/2024 dated October 28, 2024</i>
<i>Credit Facilities</i>	: <i>Time loan revolving with limit facilities Rp1,400,000,000,000 (one trillion four hundred billion rupiah) Local credit facility with limit facilities Rp100,000,000,000 (one hundred billion rupiah)</i>
<i>Period</i>	: <i>October 28, 2024 until October 29, 2025</i>
<i>Purposes</i>	: <i>Operational Working Capital of the Company, especially payment to Third Parties</i>
<i>Type of Credit</i>	: <i>Time Loan Revolving</i>
<i>Interest Rate</i>	: <i>8.60% per annum</i>

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

18. SHORT-TERM BANK LOAN (Continued)

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Perjanjian Kredit	: Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 22 Februari 2024
Fasilitas Kredit	: Demand loan dengan limit Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) dan tambahan Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)
Jangka Waktu	: 22 Februari 2024 sampai dengan 22 Februari 2025
Tujuan	: Modal Kerja usaha jasa logistik, pengiriman dan jasa keuangan
Tingkat Bunga	: 8,25% per tahun
Provisi	: 0,10% untuk tambahan dan 0,05% untuk perpajakan per tahun dari besarnya limit kredit
Jaminan	: Tanpa Jaminan

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Perjanjian Kredit	: Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 125 Tanggal 25 Juni 2024.
Fasilitas Kredit	: Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) dengan limit Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar rupiah)
Jangka Waktu	: 29 Juni 2024 sampai dengan 29 Juni 2025
Tujuan	: Modal Kerja usaha penyaluran bantuan Pemerintah
Tingkat Bunga	: 8,35% per tahun
Provisi	: 0,25% per tahun dari besarnya limit kredit
Jaminan	: Tanpa Jaminan

PT Bank Sinarmas Tbk

Perjanjian Kredit	: Perjanjian Kredit No. 002-Corp. Banking/P-005/DL/VIII/2024-3 tanggal 22 Agustus 2024
Fasilitas Kredit	: Demand Load (Revolving – Uncommitted) dengan limit Rp350.000.000.000
Jangka Waktu	: 30 Agustus 2024 sampai dengan 30 Agustus 2025
Tujuan	: Modal Kerja Operasional Perusahaan, khususnya pembayaran kepada pihak ketiga
Tingkat Bunga	: 9,50%
Provisi	: 0,25% per tahun dari besarnya plafon
Jaminan	: Tanpa Jaminan

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Loan Agreement	: Loan Approval No. 03 dated February 22, 2024
Credit Facilities	: Demand loan with a limit of Rp500,000,000,000 (five hundred billion rupiah) and an additional Rp250,000,000,000 (two hundred and fifty billion rupiah)
Period	: February 22, 2024 until February 22, 2025
Purposes	: Operational Working Capital for logistics, shipping and financial service
Interest Rate	: 8.25% per annum
Provision	: 0.10% for additional and 0.05% for extension per year of the credit limit amount
Collateral	: Clean basis

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Loan Agreement	: Addendum of Musyarakah Financing Agreement No. 05 dated June 25, 2024.
Credit Facilities	: Musyarakah Sharia Current Account Financing (PRKS) with limit facilities Rp400,000,000,000 (four hundred billion rupiah)
Period	: June 29, 2024 until June 29, 2025
Purposes	: Working Capital for government aid distribution
Interest Rate	: 8.35% per annum
Provision	: 0.25% per annum of the limit provided
Collateral	: Clean Basis

PT Bank Sinarmas Tbk

Loan Agreement	: Loan Approval No. 002-Corp. Banking/P-005/DL/VIII/2024-3 dated August 22, 2024
Credit Facilities	: Demand Load (Revolving – Uncommitted) with limit facilities Rp350,000,000,000
Period	: August 30, 2024 until August 30, 2025
Purposes	: Operational Working Capital of the Company, especially payment to third parties
Interest Rate	: 9.50%
Provision	: 0.25% per annum of the limit provided
Collateral	: Clean Basis

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
 Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)
 As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

18. SHORT-TERM BANK LOAN (Continued)

PT Bank KB Bukopin Tbk

Perjanjian Kredit	: Perjanjian Kredit No LIV/128/KB BUKI/ADD-PK-REG/XI/2024 tanggal 21 November 2024
Fasilitas Kredit	: Rp200.000.000.000 (Dua ratus miliar rupiah)
Jangka Waktu	: 7 Desember 2024 sampai dengan 7 Desember 2025
Tujuan	: Modal Kerja Operasional Perusahaan, khususnya pembayaran kepada pihak ketiga
Tingkat Bunga	: 8,5%
Provisi	: 0,10% per tahun dari besarnya limit kredit
Jaminan	: Tanpa Jaminan

PT Bank KB Bukopin Tbk

Loan Agreement	: Credit Agreement No LIV/128/KB BUKI/ADD-PK-REG/XI/2024 dated November 21, 2024
Credit Facilities	: Rp200,000,000,000 (Two hundred billion Rupiah)
Period	: December 7, 2024 until December 7, 2025
Purposes	: Operational Working Capital of the Company, especially payment to third parties
Interest Rate	: 8.5%
Provision	: 0.10% per annum of the limit provided
Collateral	: Clean Basis

PT Bank IBK Indonesia Tbk

Perjanjian Kredit	: Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 26 Juni 2024
Fasilitas Kredit	: Rp200.000.000.000 (Dua ratus miliar rupiah)
Jangka Waktu	: 26 Juni 2024 sampai dengan 26 Juni 2025
Tujuan	: Modal Kerja
Tingkat Bunga	: 8,5%
Provisi	: 0,25% per tahun dari besarnya limit kredit
Jaminan	: Tanpa Jaminan

PT Bank IBK Indonesia Tbk

Loan Agreement	: Credit Agreement No 4 dated June 26, 2024
Credit Facilities	: Rp200,000,000,000 (Two hundred billion rupiah)
Period	: June 26, 2024 until June 26, 2025
Purposes	: Working Capital
Interest Rate	: 8.5%
Provision	: 0.25% per annum of the limit provided
Collateral	: Clean Basis

PT Bank Neo Commerce Tbk

Perjanjian Kredit	: Perjanjian Kredit Nomor 110 tanggal 29 Juli 2024
Fasilitas Kredit	: Rp. 200.000.000.000 (Dua ratus miliar rupiah)
Jangka Waktu	: 29 Juli 2024 sampai dengan 29 Juli 2025
Tujuan	: Tambahan Modal Kerja usaha jasa logistik, pengiriman dan jasa keuangan
Tingkat Bunga	: 8,5%
Provisi	: 0,25% per tahun dari besarnya limit kredit
Jaminan	: Tanpa Jaminan

PT Bank Neo Commerce Tbk

Loan Agreement	: Credit Agreement No 110 dated July 29, 2024
Credit Facilities	: Rp200,000,000,000 (Two hundred billion rupiah)
Period	: July 29, 2024 until July 29, 2025
Purposes	: Additional Working Capital for logistics, shipping, and financial services businesses
Interest Rate	: 8.5%
Provision	: 0.25% per annum of the limit provided
Collateral	: Clean Basis

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Perjanjian Kredit	: Perjanjian Kredit Nomor 110 tanggal 29 Juli 2024
Fasilitas Kredit	: Rp. 100.000.000.000 (Seratus miliar rupiah)
Jangka Waktu	: 29 Juli 2024 sampai dengan 29 Juli 2025
Tujuan	: Tambahan Modal Kerja usaha jasa logistik, pengiriman dan jasa keuangan
Tingkat Bunga	: 8,5%
Provisi	: 0,25% per pencairan
Jaminan	: Tanpa Jaminan

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Loan Agreement	: Credit Agreement No 110 dated July 29, 2024
Credit Facilities	: Rp100,000,000,000 (One hundred billion rupiah)
Period	: July 29, 2024 until July 29, 2025
Purposes	: Additional Working Capital for logistics, shipping, and financial services businesses
Interest Rate	: 8.5%
Provision	: 0.25% per disbursement
Collateral	: Clean Basis

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

18. SHORT-TERM BANK LOAN (Continued)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Perjanjian Kredit : Perjanjian Kredit Nomor 83 Tanggal 30 Desember 2024
Fasilitas Kredit : Rp. 150.000.000.000 (Seratus lima puluh miliar rupiah)
Jangka Waktu : 30 Desember 2024 sampai dengan 30 Desember 2025
Tujuan : Tambahan Modal Kerja usaha jasa logistik, pengiriman dan jasa keuangan
Tingkat Bunga : 8,5%
Provisi : 0,25% per pencairan
Jaminan : Tanpa Jaminan

Loan Agreement : Credit Agreement No 83 dated December 30, 2024
Credit Facilities : Rp150,000,000,000 (One hundred and fifty billion rupiah)
Period : December 30, 2024 until December 30, 2025
Purposes : Additional Working Capital for logistics, shipping, and financial services businesses
Interest Rate : 8.5%
Provision : 0.25% per disbursement
Collateral : Clean Basis

Berikut uraian pembatasan masing-masing fasilitas pinjaman bank:

The following is a description of the restrictions on each bank loan facilities:

<u>Nama Bank/ Bank Name</u>	<u>Rasio/ Ratio</u>	<u>Batasan/ Covenants</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rasio cakupan layanan utang/Debt service coverage ratio	Minimal 1x/Minimum 1x
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rasio lancar/Current ratio Rasio utang terhadap ekuitas/Debt equity ratio Rasio cakupan layanan utang/Debt service coverage ratio	Minimal 1x/Minimum 1x Maksimal 2,2x/Maximum 2.2x Minimal 1x/Minimum 1x
PT Bank Central Asia Tbk	Rasio lancar/Current ratio Rasio kewajiban terhadap ekuitas/Liabilities to equity ratio	Minimal 1x/Minimum 1x Maksimal 2,5x/Maximum 2.5x
PT Bank Maspion Tbk	Rasio cakupan layanan utang/Debt service coverage ratio Rasio lancar/Current ratio Rasio kewajiban terhadap ekuitas/Liabilities to equity ratio	Minimal 1x/Minimum 1x Minimal 1x/Minimum 1x Maksimal 2,5x/Maximum 2.5x
PT Bank Sinarmas Tbk	Rasio lancar/Current ratio Rasio cakupan layanan utang/Debt service coverage ratio	Minimal 1x/Minimum 1x Minimal 1x/Minimum 1x
PT Bank IBK Indonesia Tbk	Rasio lancar/Current ratio Rasio cakupan layanan utang/Debt service coverage ratio Rasio utang terhadap ekuitas/Debt equity ratio	Minimal 1x/Minimum 1x Minimal 1x/Minimum 1x Maksimal 3x/Maximum 3x
PT Bank Neo Commerce Tbk	Rasio lancar/Current ratio Rasio cakupan layanan utang/Debt service coverage ratio Rasio utang terhadap ekuitas/Debt equity ratio	Minimal 1x/Minimum 1x Minimal 1x/Minimum 1x Minimal 3x/Minimum 3x
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	Rasio lancar/Current ratio Rasio utang terhadap ekuitas/Debt equity ratio Rasio cakupan layanan utang/Debt service coverage ratio	Minimal 1x/Minimum 1x Maksimal 1x/Maximum 1x Minimal 2x/Minimum 2x
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Rasio lancar/Current ratio Rasio utang terhadap ekuitas/Debt equity ratio Rasio cakupan layanan utang/Debt service coverage ratio	Minimal 1x/Minimum 1x Maksimal 2,5x/Maximum 2.5x Minimal 100%/Minimum 100%

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
 Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)
 As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG

19. LONG-TERM LOANS

a. Liabilitas Sewa

a. Lease Liabilities

	2024	2023	
Liabilitas Sewa			Lease Liabilities
Liabilitas Sewa	130.921.740.724	22.928.966.765	Lease Liabilities
Dikurangi Bagian Utang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	(42.139.256.365)	(7.734.098.789)	Less Current Maturities
Jumlah	88.782.484.359	15.194.867.976	Total

b. Utang Pinjaman Jangka Menengah dan Obligasi

b. Medium Term Notes and Bonds

	2024	2023	
Nilai Nominal			Par Value
Obligasi I Seri A	100.000.000.000	100.000.000.000	Obligasi I Seri A
Obligasi I Seri B	400.000.000.000	400.000.000.000	Obligasi I Seri B
MTN Posindo 03 tahap 1	-	325.000.000.000	MTN Posindo 03 stage 1
Sub Jumlah	500.000.000.000	825.000.000.000	Sub Total
Dikurangi Biaya Penerbitan yang Belum Diamortisasi	(2.449.999.993)	(6.538.541.667)	Less unamortized Issuance Cost
Jumlah MTN & Obligasi - Bersih	497.550.000.007	818.461.458.333	Total MTN & Bonds - Net
Dikurangi Bagian Utang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	(99.469.166.668)	(323.361.458.333)	Less Current Portion
Jumlah Jangka Panjang	398.080.833.339	495.100.000.000	Total Long-term Portion

Pinjaman Jangka Menengah

Utang MTN merupakan surat utang berjangka menengah (*Medium Term Notes*) yang diterbitkan oleh PT Pos Indonesia (Persero) guna mendukung penyediaan dana untuk penggantian kewajiban yang ada (kredit perbankan/KMK) dengan kewajiban utang lain (*refinancing*). Dalam melakukan penerbitan ini Perusahaan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris berdasarkan surat No.356/DEKOM/1218 tanggal 18 Desember 2018 dan No.278/DEKOM/0821 tanggal 16 Agustus 2021.

Medium Term Notes diterbitkan secara bertahap terdiri dari beberapa seri dengan nilai pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000 yang diterbitkan secara berseri.

MTN Posindo-03 Tahap I Tahun 2021 telah disahkan oleh Notaris Fathiah Helmi SH No. 39 tanggal 29 Desember 2021 dengan cara penempatan dana terbatas (*private placement*) dengan jumlah sebesar Rp325.000.000.000 dengan tenor 3 tahun sejak tanggal penerbitan yaitu 29 Desember 2021 dengan bunga 10,50%.

Berdasarkan perjanjian MTN, Perusahaan memiliki kewajiban untuk memastikan dan menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to Equity Ratio (DER)* Maksimal 5
2. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* Minimal 100%

Pada tanggal 24 Desember 2024, Perusahaan telah melakukan pelunasan atas MTN Posindo-03 Tahap I.

Medium Term Notes

MTN debt is a medium-term note issued by PT Pos Indonesia (Persero) to support the provision of funds for the obligation replacement (bank credit/KMK) with other debt obligations (refinancing). In conducting this issuance, the Company has received approval from the Board of Commissioners based on letter No.356/DEKOM/1218 dated December 18, 2018 and No.278/DEKOM/0821 dated August 16, 2021.

Medium Term Notes are issued in stages consisting of several series with maximum principal value amounting to Rp1,000,000,000,000.

MTN Posindo-03 Phase I of 2021 has been ratified by Notary Fathiah Helmi SH No. 39 dated December 29, 2021 by private placement of funds in the amount of Rp325,000,000,000 with a tenor of 3 years from the issuance date which is December 29, 2021 with an interest of 10.50%.

Based on the MTN agreement, the Company has an obligation to ensure and maintain financial ratios as follows:

1. *Debt to Equity Ratio (DER)* Maximum 5
2. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* Minimum 100%

On December 24, 2024, the Company has made full payment of MTN Posindo-03 Phase I.

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

19. LONG-TERM LOANS (Continued)

b. Utang Pinjaman Jangka Menengah dan Obligasi (Lanjutan)

b. Medium Term Notes and Bonds (Continued)

Obligasi

Perusahaan telah menerbitkan Obligasi pada tahun 2022 untuk mendukung ketersediaan dana dan operasional Perusahaan. Perusahaan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dalam surat No. S-596/MBU/09/2022 perihal persetujuan Rencana Penerbitan Obligasi dan/atau Surat Berharga Lainnya PT Pos Indonesia (Persero) pada tanggal 21 September 2022.

Obligasi I Pos Indonesia telah disahkan oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 87 tanggal 13 Desember 2022 tentang Addendum III dan pernyataan kembali perjanjian emisi obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022 bahwa PT Pos Indonesia (Persero) menerbitkan Obligasi sebesar Rp500.000.000.000 dengan ketentuan Obligasi Seri A sebesar Rp100.000.000.000 dengan tenor 3 tahun sejak tanggal penerbitan yaitu 28 Desember 2022 dengan bunga 10,90%. Obligasi Seri B sebesar Rp400.000.000.000 dengan tenor selama 5 tahun sejak tanggal penerbitan yaitu 28 Desember 2022 dengan bunga 11,75%.

Pada tanggal 31 Desember 2023, peringkat Obligasi Perusahaan telah memperoleh hasil pemeringkatan dengan peringkat irA- dari PT Kredit Rating Indonesia (KRI) tanggal 7 Agustus 2023.

Perusahaan sudah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat.

Perusahaan menunjuk PT Bahana Sekuritas dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi Perusahaan.

Biaya penawaran umum adalah sebesar Rp9.690.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Bonds

The Company has issued Bond in 2022 to support the availability of funds and the Company's operations. The Company has obtained approval from the Board of Commissioners in letter No. S-596/MBU/09/2022 regarding the approval of the Planned Issuance of Bond and/or Other Securities of PT Pos Indonesia (Persero) on September 21, 2022.

Pos Indonesia's Bond I have been certified by Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 87 dated December 13, 2022 concerning Addendum III and restatement of the I Pos Indonesia's bond issuance agreement for 2022 that PT Pos Indonesia (Persero) issues bonds of Rp500,000,000,000 with the provisions for Series A Bonds of Rp100,000,000,000 with a tenor of 3 years from the issuance date, which is December 28, 2022 with an interest of 10.90%. Series B bonds of Rp400,000,000,000 with a tenor of 5 years from the issuance date, December 28, 2022 with an interest of 11.75%.

As of December 31, 2023, the Company's bond rating has been rated irA- by PT Kredit Rating Indonesia (KRI) dated August 7, 2023.

The Company has appointed PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk as trustee.

As underwriters for the issuance of Bond, the Company has appointed PT Bahana Sekuritas and PT Aldiracita Sekuritas Indonesia.

The cost of the public offering is Rp9,690,000,000 and with details as follows:

No.	Uraian/ Description	Jumlah Biaya/ Total Cost
1.	Biaya Jasa Untuk Penjaminan Emisi Efek/Underwriting Fee	
	Biaya Jasa Manajemen/Management Fee	4.000.000.000
	Biaya Jasa Penjaminan/Underwriting Fee	1.400.000.000
	Biaya Jasa Penjualan/Selling Fee	1.400.000.000
	Sub Jumlah/Sub Total	6.800.000.000
2.	Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal/Capital Market Support Professional Fees	
	Biaya Jasa Akuntan Publik/Audit Fee	1.245.000.000
	Biaya Jasa Konsultan Hukum/Legal Fee	600.000.000
	Biaya Notaris/Notary Fee	100.000.000
		1.945.000.000
3.	Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal/Capital Market Supporting Institution Fees	450.000.000
4.	Biaya Lain-lain/Other Fees	495.000.000
Jumlah/Total		9.690.000.000

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

19. LONG-TERM LOANS (Continued)

c. Utang Pinjaman Jangka Menengah dan Obligasi (Lanjutan)

c. Medium Term Notes and Bonds (Continued)

Obligasi (Lanjutan)

Bonds (Continued)

Yang termasuk biaya lain-lain adalah biaya pernyataan pendaftaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), biaya pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI), biaya-biaya untuk Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), biaya penyelenggaraan penawaran awal, biaya percetakan prospektus awal dan prospektus, formulir, biaya iklan koran dan audit penjaminan.

Other costs include OJK registration statement fee, IDX listing fee, fees for KSEI, initial bidding costs, printing costs for initial prospectus and prospectus, forms, newspaper advertising fees and allotment audits.

Utang obligasi ini mensyaratkan Perusahaan untuk mempertahankan rasio keuangan pada laporan keuangan akhir tahun (Desember) *audited* sebagai berikut:

Bonds payable requires the Company to maintain financial ratios on year end audited financial statements (December) as follows:

1. Rasio Lancar Minimal 1x
2. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Minimal 100%

1. Current Ratio Minimum 1x
2. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Minimum 100%

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan memenuhi semua persyaratan *covenant* yang ditentukan dalam perjanjian.

As of December 31, 2024, the Company has fulfilled all covenant requirements within the agreement.

Eksposur maksimum terhadap risiko likuiditas pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat utang obligasi sebagaimana yang diungkapkan di Catatan 29.

The maximum exposure to liquidity risk at the end of the reporting period is the carrying amount of bonds payable as disclosed in Note 29.

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA

20. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

Imbalan kerja yang diberikan kepada karyawan merupakan imbalan pasti sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.

Employee benefits granted to employees is a defined benefit in accordance with Law No. 06/2023.

Perusahaan mengakui penyisihan imbalan kerja sesuai dengan PSAK No. 219 (Revisi 2013) dan Undang-undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020. Penyisihan ini didasarkan pada perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra, sebagaimana tercantum dalam laporan No. 0081/RP-PSAK/KKA.AB/III/25 tanggal 18 Maret 2025.

The Company recognizes the provision for employee benefits in accordance with PSAK 219 (Revised 2013) and the Omnibus Law No. 11 of 2020. This provision is based on calculations done by Arya Bagiastra Actuarial Consulting Firm, as stated in report No. 0081/RP-PSAK/KKA.AB/III/25 dated March 18, 2025.

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Details of employee benefit obligations are recognized in the consolidated statement of financial position is as follows:

	2024	2023	
Pesangon			Severance
Perusahaan	1.007.095.042.256	1.104.990.961.370	The Company
Entitas anak	4.230.019.953	3.035.817.531	Subsidiaries
Jumlah	<u>1.011.325.062.209</u>	<u>1.108.026.778.901</u>	Total

Beban imbalan kerja yang diakui dalam laba rugi sebagai beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

Employee benefits expenses recognized in the profit or loss as general and administrative expenses are as follows:

	2024	2023	
Biaya Bunga	92.367.208.652	99.041.729.730	Interest Expense
Biaya Jasa Kini	64.333.326.808	80.367.230.162	Current Service Cost
Biaya Jasa Lalu	-	(98.756.178.563)	Past Service Cost
Harapan Hasil Investasi	(18.605.174.828)	(15.078.071.402)	Return on Plan Assets at BoP - Expected
Provisi untuk Imbalan Terminasi	38.030.200	44.128.000	Provision for Excess Benefit Payment
Jumlah	<u>138.133.390.832</u>	<u>65.618.837.927</u>	Total

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

20. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (Continued)

Beban imbalan kerja yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain adalah:

Employee benefits expenses recognized in the other comprehensive income are as follows:

	2024	2023	
(Keuntungan)/Kerugian Aktuarial pada Kewajiban:			Actuarial (Gain) or Loss on Obligation:
Perubahan Asumsi Keuangan	(19.183.219.406)	9.534.106.273	Change in Financial Assumption
Penyesuaian Pengalaman	(395.376.032.666)	(20.110.076.057)	Experience Adjustment
(Keuntungan)/Kerugian Aktuarial pada			Actuarial (Gain)/Loss on
Nilai Wajar Aktiva Program	296.539.149.915	(46.996.969.066)	Plan Assets
Jumlah	(118.020.102.157)	(57.572.938.850)	Total

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas imbalan kerja serta rekonsiliasi nilai kini liabilitas imbalan pasti dan liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of the present value of defined benefit liabilities, and the reconciliation of the present value of defined benefit obligations and liabilities recognized in the consolidated statements of financial position were as follows:

	2024	2023	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti			Present Value of Defined Benefit
Awal Periode	1.107.177.044.090	1.209.887.794.624	Obligations
Beban Tahun Berjalan	138.133.390.832	65.618.837.927	Current Year Expense
Pembayaran Manfaat	(117.356.998.095)	(109.611.722.659)	Benefit Payments
(Keuntungan)/Kerugian Aktuarial	(118.020.102.157)	(57.572.938.850)	Actuarial (Gain)/Loss
Iuran Perusahaan Selama Periode Berjalan	1.124.809.893	(239.154.319)	Company Contribution Paid In Year
Penyesuaian	266.917.646	(56.037.822)	Adjustment
Jumlah	1.011.325.062.209	1.108.026.778.901	Total

Penyesihan imbalan kerja di atas dihitung dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* modifikasi IFRIC berdasarkan perhitungan aktuarial pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuarial Arya Bagiastra, aktuaris independen, dengan asumsi aktuarial utama sebagai berikut:

The estimated liabilities on employee benefits are computed using the *Projected Unit Credit* method IFRIC modification based on the actuarial reports as of December 31, 2024 and 2023 conducted by Arya Bagiastra Actuarial Consulting Firm, independent actuaries, with the following principal assumptions:

	2024	2023	
Tingkat Kenaikan Gaji	5,00%-6,50%	5,50%	Salary Increase Rate
Tingkat Bunga Diskonto	7,10%	6,67%	Interest Discount Rate
Usia Pensiun Normal	56 tahun/years old	56 tahun/years old	Normal Retirement Age
Tingkat Pengunduran Diri	10%	10%	Resignation Rate
Tingkat Cacat	1%	1%	Disability Rate
Tingkat Mortalitas	Tabel Mortalita Indonesia 2019/ Indonesian Mortality Table 2019		Mortality Rate

Dasar penetapan tingkat diskonto dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

The factors considered in determining the charge in discount rate are as follows:

1. Kelangsungan Usaha Perusahaan.
2. Pengembangan terhadap aset program pada Dana Pensiun Pos Indonesia diharapkan berada di atas 10% sebagaimana tingkat bunga aktuarial yang dipergunakan pada Dana Pensiun Pos Indonesia saat ini adalah 10%.
3. Informasi yang diperoleh dari PT Pos Indonesia (Persero) tentang imbal hasil investasi yang telah dilakukan selama ini.

1. The Going Concern of the Company
2. Development of the assets in the Pension Fund program of Pos Indonesia was expected to be over 10% as an actuarial interest rate on Pension Fund program of Pos Indonesia is 10%.
3. Information obtained from PT Pos Indonesia (Persero) about the yield of investments that have been made so far.

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Berikut adalah analisa ekspektasi jatuh tempo dari manfaat pasca kerja tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

	2024
Dalam 0 dan 2 tahun	453.895.944.272
Antara 2 dan 5 tahun	405.712.305.115
Antara 5 dan 10 tahun	399.178.908.607
Diatas 10 tahun	2.725.138.564.815

Liabilitas Imbalan Kerja PT Pos Finansial Indonesia (PFI)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 saldo Liabilitas Imbalan Kerja PFI adalah sebesar Rp1.293.812.359 dan Rp944.069.123.

Liabilitas Imbalan Kerja PT Pos Properti Indonesia (PPI)

PPI membuat cadangan jangka panjang untuk direksi dan karyawan pengkaryaan yang telah bekerja minimal 6 bulan di PT Pos Properti Indonesia. Tidak terdapat pendanaan sehubungan dengan liabilitas imbalan kerja. Total liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp1.415.908.913 dan Rp849.734.811.

Liabilitas Imbalan Kerja PT Pos Logistik Indonesia (PLI)

Imbalan kerja untuk tahun berjalan dicerminkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta laporan posisi keuangan. Saldo liabilitas imbalan kerja kepada karyawan sesuai PSAK 219 (Revisi 2013) pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.520.298.681 dan sebesar Rp1.242.013.597.

Analisis Sensitivitas

Sensitivitas dari nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja per 31 Desember 2024 dan 2023 terhadap perubahan asumsi aktuaria adalah sebagai berikut:

	2024
Analisa Sensitivitas Tingkat Diskonto	
Jika Tingkat +1%	967.801.622.029
Jika Tingkat -1%	1.101.949.952.400
Analisa Sensitivitas Kenaikan Gaji	
Jika Tingkat +1%	1.053.882.771.229
Jika Tingkat -1%	965.333.043.755

21. EKUITAS

a. Modal Saham

Berdasarkan Akta Notaris Sutjipto. SH.M.Kn.. No.164 tanggal 15 Agustus 2008, susunan pemilikan saham Perusahaan adalah Negara Republik Indonesia sebanyak 425.000 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp425.000.000.000.

20. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (Continued)

Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefit are as follow:

	2023	
515.708.561.999		Within 0 and 2 years
577.180.093.856		Between 2 and 5 years
483.451.322.322		Between 5 and 10 years
3.481.285.556.464		Above 10 years

Employee benefits liability of PT Pos Finansial Indonesia (PFI)

As of December 31, 2024 and 2023, the balance of PFI'S Post-Employment Benefit Liabilities are Rp1,293,812,359 and Rp944,069,123.

Employee Benefits Liability of PT Pos Properti Indonesia (PPI)

PPI makes long-term reserves for directors and employees who have worked for at least 6 months at PT Pos Properti Indonesia. There is no funding in relation to employee benefit liabilities. The total employee benefit liabilities as of December 31, 2024 and 2023 are Rp1,415,908,913 and Rp849,734,811.

Employee Benefits Liability of PT Pos Logistik Indonesia (PLI)

Employee benefits for the current year are reflected in the statement of profit or loss and other comprehensive income and the statement of financial position. The balance of the employee benefits obligation in accordance with PSAK 219 (Revised 2013) as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp1,520,298,681 and Rp1,242,013,597 respectively.

Sensitivity Analysis

The sensitivity of post-employment benefit as of December 31, 2024 and 2023 to changes in the actuarial assumptions is as follows:

	2023	
1.344.517.768.767		Discount Rate Sensitivity Analysis
1.427.165.035.669		If Rate +1%
		If Rate -1%
1.428.772.681.255		Salary Increase Sensitivity Analysis
1.342.291.463.602		If Rate +1%
		If Rate -1%

21. EQUITY

a. Share Capital

Based on Notarial Deed No.164 of Sutjipto. SH. M.Kn. dated August 15, 2008, the shareholding of the Company is fully owned by the Republic of Indonesia with 425,000 shares or Rp425,000,000,000.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. EKUITAS (Lanjutan)

a. Modal Saham (Lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari. SH. M.Kn. No. 3 tanggal 3 Januari 2013 para pemegang saham mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sejumlah 30.023 saham, masing-masing saham dengan nilai Rp1.000.000, sehingga seluruhnya seharga Rp30.023.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.
2. Penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam saham Perusahaan sebesar Rp30.023.000.000 dengan cara sebagai berikut:
 - Sebesar Rp30.022.899.470 yang berasal dari pengalihan barang milik negara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 2012.
 - Sebesar Rp100.530 yang berasal dari kapitalisasi sebagian cadangan Perusahaan sampai dengan tahun buku 2011.
3. Peningkatan modal ditempatkan/ disetor Perusahaan yang semula Rp425.000.000.000 menjadi sebesar Rp455.023.000.000.

21. EQUITY (Continued)

a. Share Capital (Continued)

Based on Notarial Deed of Aryanti Artisari. SH. M.Kn. No. 3 dated January 3, 2013, shareholders decided as follows:

1. Approving expenses/shares placement that is still in deposits consisting of 30,023 shares, with par value of Rp1,000,000, thereby the total amount will be Rp30,023,000,000 which all part taken by the Government of Republic of Indonesia.
2. Increase in the Government of Republic of Indonesia capital to the Company, amounted to Rp30,023,000,000 as follows:
 - Amounted to Rp30,022,899,470 that originated from the transfer of goods owned by the state as stated in Government Regulation No. 67 year 2012.
 - Amounted to Rp100,530 that originated from part of the capitalization of the Company's allowance until book year 2011.
3. Increase in the Company's paid-up capital from Rp425,000,000,000 to Rp455,023,000,000.

2024 dan/and 2023

	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Number of Share Issued and Fully Paid</i>	Persentase Pemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i>	Nominal per Lembar saham <i>Nominal Share</i>	Jumlah Modal Disetor/ <i>Total Paid-up Capital</i>	
Pemegang Saham					Shareholders
Negara Republik Indonesia	455.023	100%	1.000.000	455.023.000.000	Negara Republik Indonesia
Jumlah	455.023	100,00%	1.000.000	455.023.000.000	Total

b. Tambahan Modal Disetor

Tambahan modal disetor berasal dari program pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang diikuti oleh entitas anak pada tahun 2016 mengacu pada surat keterangan pengampunan pajak Nomor: KET-22467/PP/WPJ.06/2016 tanggal 2 November 2016 atas setoran pajak tahun 2015 senilai Rp2.344.427.566.

b. Additional Paid-in Capital

Additional paid-in capital arise from tax amnesty program that the Subsidiary participated in 2016 referring to the tax amnesty certificate Number: KET-22467/PP/WPJ.06/2016 dated November 2, 2016 for tax payments in 2015 amounting to Rp2,344,427,566.

c. Komponen Ekuitas Lainnya

c. Other Equity Components

	2024				
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Keuntungan (Kerugian) tahun Berjalan/ <i>Profit (Loss) For the Year</i>	Penyesuaian/ <i>Adjustment</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Pengukuran Kembali					Remeasurement of
Imbalan Pasti	(75.065.722.660)	91.974.745.731	29.769.336	16.938.792.407	Defined Benefit
Selisih Lebih Revaluasi					Surplus of Revaluation
Aset Tetap	3.777.846.639.788	-	-	3.777.846.639.788	of Fixed Assets
Jumlah	3.702.780.917.128	91.974.745.731	29.769.336	3.794.785.432.195	Total

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
 Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)
 As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. EKUITAS (Lanjutan)

21. EQUITY (Continued)

c. Komponen Ekuitas Lainnya (Lanjutan)

c. Other Equity Components (Continued)

	2023				
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Keuntungan (Kerugian) tahun Berjalan/ <i>Profit (Loss) For the Year</i>	Penyesuaian/ <i>Adjustment</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	(120.026.621.099)	44.894.930.668	65.967.771	(75.065.722.660)	Remeasurement of Defined Benefit
Selisih Lebih Revaluasi Aset Tetap	3.365.475.909.885	412.370.729.903	-	3.777.846.639.788	Surplus of Revaluation of Fixed Assets
Jumlah	<u>3.245.449.288.786</u>	<u>457.265.660.571</u>	<u>65.967.771</u>	<u>3.702.780.917.128</u>	Total

d. Kepentingan Non-Pengendali

d. Non-Controlling Interest

	2024				
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Bagian atas Laba (Rugi) Neto/ <i>Share in Net Profit (Loss)</i>	Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Other Comprehensive Income</i>	Penyesuaian/ <i>Adjustment</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>
PT Pos Finansial Indonesia	(45.460.211.440)	195.375.279	(29.809.307)	-	(45.294.645.468)
PT Pos Logistik Indonesia	432.514.147	2.250.489	39.971	21.844.672	456.649.279
Jumlah/Total	<u>(45.027.697.293)</u>	<u>197.625.768</u>	<u>(29.769.336)</u>	<u>21.844.672</u>	<u>(44.837.996.189)</u>

	2023				
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Bagian atas Laba (Rugi) Neto/ <i>Share in Net Profit (Loss)</i>	Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Other Comprehensive Income</i>	Penyesuaian/ <i>Adjustment</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>
PT Pos Finansial Indonesia	(17.938.001.455)	(20.491.252.597)	11.781.505	(7.042.738.893)	(45.460.211.440)
PT Pos Logistik Indonesia	379.793.429	6.791.098	180.130	45.749.490	432.514.147
Jumlah/Total	<u>(17.558.208.026)</u>	<u>(20.484.461.499)</u>	<u>11.961.635</u>	<u>(6.996.989.403)</u>	<u>(45.027.697.293)</u>

e. Laba per Saham Dasar

e. Earnings Per Share

Perhitungan laba per saham dasar berdasarkan pada informasi berikut:

The basic earnings per share is based on the following:

	2024	2023	
Laba yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	746.936.851.666	748.699.105.099	Profit Attributable to Owners of the Company
Rata-rata Tertimbang Saham Biasa untuk Perhitungan Laba Per Saham Dasar	455.023	455.023	Weighted Average Number of Ordinary Shares for Computation of Basic Earning Per Share
Laba Per Saham	<u>1.641.536,48</u>	<u>1.645.409,36</u>	Earnings Per Share

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)
As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. PENDAPATAN

22. REVENUES

	2024	2023	
Logistik	2.061.931.398.556	2.176.037.721.479	Logistics
Paket Pos	1.254.282.573.393	1.456.773.750.070	Parcels
Jasa Keuangan	1.070.500.710.572	1.256.664.342.262	Financial Services
Surat Pos	457.650.739.942	437.098.907.316	Postal Main
Properti	173.495.586.234	152.546.415.548	Properties
Jumlah	5.017.861.008.697	5.479.121.136.675	Total

23. BEBAN POKOK LAYANAN

23. COST OF SERVICES

Rincian beban pokok layanan berdasarkan jenis layanan sebagai berikut:

The details of cost of services based on type of services are as follows:

	2024	2023	
Logistik	1.106.845.846.656	1.292.873.463.760	Logistics
Paket Pos	739.792.208.752	1.033.396.472.132	Parcels
Jasa Keuangan	727.653.780.368	861.135.232.956	Financial Services
Surat Pos	382.649.769.003	457.326.475.717	Postal Main
Properti	64.352.580.960	32.497.117.053	Properties
Lainnya	9.511.954.318	3.560.683.820	Others
Jumlah	3.030.806.140.057	3.680.789.445.438	Total

Rincian beban pokok layanan berdasarkan jenis biaya sebagai berikut:

The details of cost of services based on type of expenses are as follows:

	2024	2023	
Pegawai	1.519.144.818.899	1.617.844.499.098	Employees
Operasi	1.166.726.043.496	1.781.439.099.547	Operations
Administrasi	178.293.707.285	162.528.013.005	Administration
Penyusutan (Catatan 11)	109.983.887.689	76.979.741.344	Depreciations (Note 11)
Umum	39.290.236.132	28.458.314.886	General
Amortisasi (Catatan 13)	17.367.446.556	13.539.777.558	Amortizations (Note 13)
Jumlah	3.030.806.140.057	3.680.789.445.438	Total

24. BEBAN USAHA

24. OPERATING EXPENSES

	2024	2023	
Beban Pemasaran			Marketing Expenses
Jasa Keuangan	24.678.323.012	20.852.622.808	Financial Services
Surat Pos dan Paket Pos	4.468.275.731	32.948.917.992	Postal Mails and Parcels
Properti	2.869.976.674	3.061.803.960	Properties
Ritel	1.612.572.022	1.567.100.992	Retails
Logistik	1.230.793.917	11.588.025.107	Logistics
Filateli	351.292.285	241.974.213	Philately
Sub Jumlah	35.211.233.641	70.260.445.072	Subtotal
Beban Umum dan Administrasi			General and Administration Expenses
Pegawai	798.300.058.344	766.640.619.187	Employees
Operasi	174.569.733.627	132.339.444.248	Operations
Umum	126.098.183.919	144.642.714.545	General
Penyusutan (Catatan 11)	26.815.985.234	41.912.759.702	Depreciations (Note 11)
Administrasi	23.791.748.534	16.699.132.538	Administration
Amortisasi (Catatan 13)	10.341.312.972	8.755.736.468	Amortizations (Note 13)
Sub Jumlah	1.159.917.022.630	1.110.990.406.688	Subtotal
Jumlah	1.195.128.256.271	1.181.250.851.760	Total

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)
As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. PENDAPATAN (BEBAN) LAINNYA

25. OTHER INCOME (EXPENSES)

	2024	2023	
Pendapatan Lainnya			Other Income
Pendapatan Donasi LPU	366.844.830.481	366.120.584.914	UPS Donation Income
Kenaikan Nilai Wajar			Increase in Fair Value of
Properti Investasi (Catatan 12)	172.463.187.446	168.004.840.966	Investment Property (Note 12)
Pendapatan Pemulihan Kerugian			Income from
Perusahaan	54.527.828.809	59.177.796.699	Recovery Losses
Pendapatan Pelepasan Aset Tetap	-	12.283.680.595	Gain on Fixed Asset Disposal
Pendapatan QSF-Penyelenggaraan Pos	798.944.464	923.349.130	QSF Revenue - Postal Maintenance
Lainnya	23.483.496.130	22.217.834.505	Others
Sub Jumlah	618.118.287.330	628.728.086.809	Sub Total
Beban Lainnya			Other Expenses
Purna Bakti	(166.258.048.293)	(175.301.843.409)	Pension Cost
Beban yang Tidak Didistribusikan	(73.265.007.094)	(122.190.027.207)	Undistributed Cost
Denda Pajak	(20.609.212.766)	(27.935.892.177)	Penalty Tax
Kerugian Aset Tetap	(1.007.768.997)	(352.656.105)	Loss of Fixed Assets
Sumbangan Bencana Alam	(45.678.930)	(49.540.050)	Natural Disaster Donations
Sub Jumlah	(261.185.716.080)	(325.829.958.948)	Sub Total
Jumlah	356.932.571.250	302.898.127.861	Total

Beban lainnya dengan kategori purna bakti adalah beban - beban yang dikeluarkan Grup untuk pembayaran pensiunan eks karyawan Grup seperti bantuan kesehatan, bantuan pangan dan perbaikan gizi.

Other expenses in the after-service category are the burdens issued by the Group for the payment of retired ex-employees of the Group such as health assistance, food assistance and nutritional improvements.

Beban yang tidak didistribusikan merupakan kelompok beban lainnya yang tidak terkait langsung dengan kegiatan produksi seperti beban kesekretariatan, kegiatan hukum, lainnya.

Undistributed expenses represent other costs that are not directly related to production activities such as the secretarial cost, legal activity, and others.

26. PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGAN

26. FINANCE INCOME (COST)

	2024	2023	
Pendapatan Keuangan			Finance Income
Pendapatan Selisih Kurs	16.830.894.477	30.322.878.977	Foreign Exchange Diff Income
Pendapatan Jasa Giro	7.215.430.062	10.004.759.893	Current Account Service Income
Pendapatan Penempatan Dana di Bank	7.484.529.575	3.233.763.485	Fund Placement Income in Bank
Sub Jumlah	31.530.854.114	43.561.402.355	Sub Total
Beban Keuangan			Finance Cost
Bunga Pinjaman	(317.302.182.402)	(170.439.111.903)	Loan Interest
Bunga Kupon MTN	(92.025.000.000)	(92.025.000.000)	MTN Coupon Interest
Beban Pendanaan	(14.684.058.340)	(14.254.784.262)	Funds Expense
Pengelolaan <i>Treasury</i>	(2.923.118.584)	(6.429.191.554)	Treasury Management
Selisih Kurs atas Transaksi Valas	(7.872.437.428)	26.687.614.147	Exchange Difference on Forex
Beban Administrasi Bank	(4.427.420.919)	(5.188.393.337)	Bank Administration Expense
Sub Jumlah	(439.234.217.673)	(261.648.866.909)	Sub Total
Jumlah	(407.703.363.559)	(218.087.464.554)	Total

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI

27. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Tabel berikut ini adalah ikhtisar pihak-pihak berelasi yang bertransaksi dengan Grup, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya:

The following table is a summary of related parties who have transactions with the Group, and includes the nature of the relationship and transaction:

No	Pihak Berelasi/Related Parties	Sifat Hubungan/Nature of Relationship	Transaksi/Transaction
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Sepengendalian / Under Common Control	Penempatan dana di rekening bank fasilitas pinjaman dari bank, dan piutang usaha/ Account bank, loans bank facility, and trade receivables
2	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Sepengendalian / Under Common Control	Penempatan dana di rekening bank, piutang usaha dan utang usaha/ Account bank, trade receivables and trade payables
3	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Sepengendalian / Under Common Control	Penempatan dana di rekening bank dan piutang usaha/ Account bank and trade receivables
4	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sepengendalian / Under Common Control	Penempatan dana di rekening bank fasilitas pinjaman dari bank, dan piutang usaha/ Account bank, loans bank facility, and trade receivables
5	PT Bank Mandiri Taspen	Sepengendalian / Under Common Control	Penempatan dana di rekening bank dan piutang usaha/ Account bank and trade receivables
6	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Sepengendalian / Under Common Control	Penempatan dana di rekening bank Account bank
7	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Sepengendalian / Under Common Control	Piutang usaha/ Trade receivables
8	Perum Bulog	Sepengendalian / Under Common Control	Piutang usaha/ Trade receivables
9	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Sepengendalian / Under Common Control	Piutang usaha dan utang usaha/ Trade receivables and trade payables
10	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Sepengendalian / Under Common Control	Piutang usaha dan utang usaha/ Trade receivables and trade payables
11	PT Pertamina (Persero)	Sepengendalian / Under Common Control	Piutang usaha/ Trade receivables
12	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Sepengendalian / Under Common Control	Piutang usaha dan utang usaha/ Trade receivables and trade payables
13	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	Sepengendalian / Under Common Control	Piutang usaha dan utang usaha/ Trade receivables and trade payables
14	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Sepengendalian / Under Common Control	Piutang usaha/ Trade receivables
15	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Sepengendalian / Under Common Control	Piutang usaha/ Trade receivables
16	PT Asabri (Persero)	Sepengendalian / Under Common Control	Piutang usaha dan utang usaha/ Trade receivables and trade payables
17	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Sepengendalian / Under Common Control	Piutang usaha/ Trade receivables

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)
As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI
(Lanjutan)

27. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTIES (Continued)

Rincian akun dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The details of transactions with related parties are as follows:

	Persentase Terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas/ Percentage to Total Assets and Liabilities				
	Saldo/ Amount				
	2024	2023	2024	2023	
Bank (Catatan 6)					Bank (Note 6)
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	75.234.069.558	525.044.625.494	0,31%	3,84%	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	173.105.253.245	45.028.912.392	0,72%	0,33%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	52.554.869.888	36.259.405.362	0,22%	0,27%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	9.327.366.609	23.196.151.363	0,04%	0,17%	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	7.714.267.312	8.437.571.702	0,03%	0,06%	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri Taspen	1.278.685.910	1.296.789.387	0,01%	0,01%	PT Bank Mandiri Taspen
Jumlah	319.214.512.522	639.263.455.700	1,33%	4,68%	Total

	Persentase Terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas/ Percentage to Total Assets and Liabilities				
	Saldo/ Amount				
	2024	2023	2024	2023	
Bank (Catatan 6)					Bank (Note 6)
<u>Yen Jepang</u>					<u>Japanese Yen</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	89.743.106.400	121.333.526.650	0,37%	0,90%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
<u>Dolar AS</u>					<u>US Dollar</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	25.623.978.252	8.146.977.846	0,11%	0,06%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
<u>Euro Eropa</u>					<u>European Euro</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.788.400.724	3.516.858.623	0,04%	0,03%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
<u>Poundsterling Inggris</u>					<u>Great Britain Poundsterling</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	563.785.928	0,00%	0,00%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
<u>Dolar Singapura</u>					<u>Singapore Dollar</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	659.971.175	0,00%	0,00%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
<u>Saudi Arabian Riyal</u>					<u>Saudi Arabian Riyal</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	16.099.248	-	0,00%	0,00%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
<u>CHF Swiss</u>					<u>Swiss CHF</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.033.788.701	1.134.429.150	0,01%	0,01%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah	127.205.373.325	135.355.549.372	0,53%	1,00%	Total

	Saldo/ Amount		Persentase Terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas/ Percentage to Total Assets and Liabilities		
	2024	2023	2024	2023	
Deposito Berjangka (Catatan 6)					Time Deposits (Note 6)
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	105.000.000.000	35.000.000.000	0,44%	0,26%	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.000.000.000	49.500.000.000	0,02%	0,36%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	43.000.000.000	18.000.000.000	0,18%	0,13%	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	20.000.000.000	5.500.000.000	0,08%	0,04%	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Jumlah	173.000.000.000	108.000.000.000	0,72%	0,79%	Total

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI (Lanjutan) **27. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)**

	Saldo/ Amount		Persentase Terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas/ Percentage to Total Assets and Liabilities		
	2024	2023	2024	2023	
Pendapatan Diterima di Muka					Accrued Revenues
Rupiah					Rupiah
PT Bank Mandiri Taspen	1.837.564.931	-	0,01%	0,00%	PT Bank Mandiri Taspen
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.664.061.608	-	0,01%	0,00%	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.563.706.982	-	0,01%	0,00%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bio Farma (Persero) Tbk	1.102.833.889	-	0,00%	0,00%	PT Bio Farma (Persero) Tbk
Perum Bulog	471.739.004.268	286.236.015.716	1,97%	2,10%	Perum Bulog
PT Rajawali Nusantara Indonesia	81.772.905.659	103.629.226.557	0,34%	0,76%	PT Rajawali Nusantara Indonesia
Jumlah	553.511.909.927	389.865.242.273	2,31%	2,86%	Total

	Persentase Terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas/ Percentage to Total Assets and Liabilities				
	Saldo/ Amount				
	2024	2023	2024	2023	
Aset Lancar Lainnya					Other Current Assets
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk	231.971.557.450	234.806.998.514	0,97%	1,72%	PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	76.428.117.631	76.383.325.096	0,32%	0,56%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	9.299.738.942	9.349.738.942	0,04%	0,07%	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	1.700.582.143	0,00%	0,01%	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	15.257.262	0,00%	0,00%	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jumlah	317.699.414.023	322.255.901.957	1,32%	2,36%	Total

	Saldo/ <i>Amount</i>		Persentase Terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas/ <i>Percentage to Total Assets and Liabilities</i>		
	2024	2023	2024	2023	
Utang Lainnya					<i>Other Payables</i>
<u>Rupiah</u>					<u><i>Rupiah</i></u>
PT Telekomunikasi Indonesia					<i>PT Telekomunikasi Indonesia</i>
(Persero) Tbk	4.591.394.607	4.591.394.607	0,02%	0,13%	<i>(Persero) Tbk</i>
PT Bank Rakyat Indoensia					<i>PT Bank Rakyat Indoensia</i>
(Persero) Tbk	-	7.062.205.000	0,00%	0,08%	<i>(Persero) Tbk</i>
Jumlah	4.591.394.607	11.653.599.607	0,02%	0,21%	<i>Total</i>

	Saldo/ Amount		Persentase Terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas/ Percentage to Total Assets and Liabilities		
	2024	2023	2024	2023	
Pinjaman Bank (Catatan 17)					Bank Loans (Note 17)
Rupiah					Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	449.986.907.517	370.604.000.000	1,88%	6,71%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk	370.000.000.000	300.000.000.000	1,54%	5,43%	PT Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah	819.986.907.517	670.604.000.000	3,42%	12,14%	Total

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI (Lanjutan)

Jumlah imbalan (penghasilan) berupa gaji, honorarium dan tunjangan dibayarkan untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebesar Rp36.397.969.845 dan Rp18.120.988.959 sampai dengan 31 Desember 2024 dan Rp26.947.964.975 dan Rp16.713.310.728 periode yang sama tahun 2023.

27. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)

The amount of compensation (income) in the form of salary, honorarium and allowances paid to the Board of Directors and Board of Commissioners is Rp36,397,969,845 and Rp18,120,988,959 until December 31, 2024 and Rp26,947,964,975 and Rp16,713,310,728 for the same period in 2023.

28. PERJANJIAN PENTING

Grup mengadakan perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut:

28. SIGNIFICANT AGREEMENTS

The Group has the following significant agreements are as follows:

Mitra/ Partners	Nomor Perjanjian/ Agreements Number	Perjanjian/ Agreements	Jangka Waktu	
			Awal/Start	Akhir/End
PT Lion Express	PKS.296/DIR-3/1222	Pendistribusian Kirimanpos Udara Dalam Negeri/Domestic Air Mail Distribution	30 Desember/ December 2022	29 Desember/ December 2024
	06/LE-PKS/SLS/1/2022			
PT Stefany Jaya Sentosa (Agen dari Asiana Air)	PKS 117/DIR-3/0523	Perjanjian Kerja Sama Layanan Pengangkutan Kirimanpos Internasional/ Cooperation Agreement on the Transportation Service of International Mail	26 Mei/ May 2023	25 Mei/ May 2025
Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial	6/3.4/HK.01/1/2024	Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2024/ Distribution of Social Assistance for the Family Hope Program for the Year 2024	26 Januari/ January 2024	31 Desember/ December 2024
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial	01/5.4/PKS/HK.01/01/2024	Penyaluran Program Sembako Tahun 2024/Distribution of Basic Food Program for the Year 2024	19 Januari/ January 2024	31 Desember/ December 2024
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan	PRJ.PPK-116/2024/PJ.0133/2023	Pekerjaan Distribusi dan Penjualan Meterai Tempel Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2024/ Distribution and Sales Work of Directorate General of Taxes Stamps for Fiscal Year 2024	1 Januari/ January 2024	31 Desember/ December 2024
Perusahaan Umum (Perum) Bulog	PJ-02/DP303/PG.04/01/2024	Perjanjian Jasa Angkutan Pendistribusian Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2024/Transportation Services Agreement for the Distribution of Government Rice Reserve Food Assistance in 2024	1 Januari/ January 2024	30 Juni/ June 2024
	PKS001/DIRUT/0124			
Perusahaan Umum (Perum) Bulog	PJ-652/DP303/PG.04/07/2024	Perjanjian Jasa Angkutan Pendistribusian Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2024/Agreement for Transportation Services in the Distribution of Government Rice Reserve Food Aid for the Year 2024	1 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December 2024
	PKS209/DIRUT/0724			
PT Taspen (Persero)	JAN-116/DIR/2024 PKS.174/DIR-4/0624	Pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Melalui Rekening/Payment of Pension Time Savings, Pension, Work Accident Benefit and Death Benefit through an account	21 Juni/ June 2024	20 Juni/ June 2026

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

28. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

Mitra/ Partners	Nomor Perjanjian/ Agreements Number	Perjanjian/ Agreements	Jangka Waktu	
			Awal/Start	Akhir/End
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	2375/DJPPI.2/HK.04.02/09/2024	Subsidi Operasional Penyelenggaraan Layanan Pos Universal/ <i>Operational Subsidies for the Implementation of Universal Postal Services</i>	1 Januari/ January 2024	31 Desember/ December 2024
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	PKS 238/SVP Finance Operation/1222 WHS/052/01122022	Layanan Cash Management/ <i>Cash Management Services</i>	1 Januari/ January 2023	31 Desember/ December 2024
Emudhra Pte Limited	45/DIR-POSFIN/PKS/2019	Pemasangan Fasilitas Certifying Authority dan Kegiatan Lain yang Terkait/ <i>Installation of Certifying Authority Facilities and Other Related Activities</i>	03 Desember/ December 2019	02 Desember/ December 2024
PT Asuransi Tri Pakarta	PKS.364/DIR-1/1223 128/DIR/PKS.2023	Jasa Asuransi Gedung dan Barang Inventaris Serta Asuransi Kas Tahun 2024/ <i>Building And Inventory Insurance Services And Cash Insurance For 2024</i>	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2024
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	5/S.Pj-UP/RNI.01/VIII/2024 PKS231/DIRUT/0824	Pengadaan Jasa Transporter untuk Distribusi Bantuan Pangan Program Stunting Pemerintah 2024/ <i>Procurement of Transporter Services for the Distribution of Government Stunting Food Aid Program 2024</i>	5 Agustus/ August 2024	31 Desember/ December 2024
PT Eka Jaya Agung	54	Perjanjian Kerja Sama Tentang Pemanfaatan Tanah Milik PT. Pos Indonesia (Persero) di Jalan Teuku Umar Denpasar/ <i>Cooperation Agreement Regarding the Utilization of Land Owned by PT. Pos Indonesia (Persero) on Teuku Umar Street, Denpasar</i>	23 Agustus/ August 2004	Sampai dengan berakhirnya masa laku/ <i>Until the expiration of the validity period</i>
PT Arkan Global Utama	211/Penj/Korp/1023 001/ARKAN-POS/PKSCBP BAPANG/IX/2023	Perjanjian Kerjasama Tentang Proses Mid Miles Penyediaan Jasa Angkutan Pendistribusian Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah Perum Bulog Tahap II Jawa Timur Tahun 2023/ <i>Cooperation Agreement on Mid Miles Process for Providing Transportation Services for the Distribution of Government Rice Reserve Food Aid by Perum Bulog Phase II East Java 2023</i>	11 September/ September 2023	31 Desember/ December 2023
PT Yasa Artha Trimanunggal	212/Penj/Korp/1023 002/PKS/YASA-POS/CBP BAPANG/IX/2023	Perjanjian Kerjasama Tentang Proses Last Miles Penyaluran Bantuan Bapang CBP (Cadangan Beras Pemerintah) Perum Bulog Tahap II Jawa Timur Tahun 2023/ <i>Cooperation Agreement on the Last-Mile Process for the Distribution of Government Rice Reserve Aid (CBP) by Perum Bulog Phase II East Java 2023</i>	8 September/ September 2023	30 November/ November 2023
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial	82/4.4/PR.07.00/1/2024 PKS015/DIR-4/0124	Penyaluran Bantuan Perumahan Bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2024/ <i>Distribution of Food Assistance for People with Disabilities in 2024</i>	12 Januari/ January 2024	30 Juni/ June 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

28. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

Mitra/ Partners	Nomor Perjanjian/ Agreements Number	Perjanjian/ Agreements	Jangka Waktu	
			Awal/Start	Akhir/End
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial	124/4.3/HK.01/1/2024	Penyaluran Bantuan Permakanan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal Tahun 2024/ <i>Distribution of Food Assistance for Elderly Single Families in 2024</i>	22 Januari/ January 2024	31 Desember/ December 2024
Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial Kementerian Sosial	01/5.2/PKS-HIBAH/HK.01/1/2024	Penyaluran Bantuan Sosial Program Pahlawan Ekonomi Nusantara Tahun 2024/ <i>Distribution of Social Assistance for the National Economic Heroes Program for the Year 2024</i>	29 Januari/ January 2024	31 Desember/ December 2024
PT Bank BTPN Tbk	PKS.227/DIR-4/0824	Pembayaran Manfaat Pensiun Di Kantor Pos Secara Host to Host/ <i>Host to Host Pension Benefit Payment at Post Office</i>	3 Juli/ July 2024	2 Juli/ July 2026
Koperasi Simpan Pinjam Nusantara	026/PKS-KSP-Nusantara/LGL/VII/2020	Kerja Sama Operasi Pelayanan Jasa Keuangan Bagi Pensiunan secara Terintegrasi/ <i>Operation Cooperation for Integrated Financial Services for Pensioners</i>	29 Juli/ July 2020	28 Juli/ July 2024
PT Dapensi Dwikarya	1015/SVP-Financial-Service/0423481/IV/2023	Distribusi Kiriman Pos Rute Tersier Berbasis Chargeable Weight Di Wilayah Kerja Regional 1 Medan (Eks Regional Palembang)/ <i>Chargeable Weight Based Tertiary Route Postal Shipment Distribution in Regional Working Area 1 Medan (Former Palembang Regional)</i>	1 Maret/ March 2024	31 Mei/ May 2024
China Airlines	3/Subdit IPS/0124	Pengangkutan Kirimanpos International ke Luar Negeri/ <i>Transportation of International Postage to Overseas</i>	1 Januari/ January 2024	30 Juni/ June 2024

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Manajemen risiko keuangan Grup bersifat dinamis dengan bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memetakan, dan mengembangkan alternatif penanganan risiko atas portofolio instrumen keuangan. Dalam pelaksanaan manajemen risiko keuangan, Grup mengidentifikasikan risiko-risiko yang dihadapi terkait dengan instrumen keuangan, yaitu risiko pasar (tingkat suku bunga dan nilai tukar), risiko likuiditas, dan risiko kredit. Masing-masing risiko tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

The Group's financial risk management is dynamic with the purpose to identify, measure, map, and developed alternatives for portfolio risk management of financial instruments. In the implementation of financial risk management, the Group identify the risks faced relating to financial instruments, namely market risk (interest rate and exchange rate), liquidity risk, and credit risk, each of these risks can be explained as follows:

a. Risiko Kredit

Risiko kredit dalam piutang adalah ketidakpastian pelanggan pos untuk dapat membayar utangnya sesuai dengan PKS yang ditetapkan. Risiko ini teridentifikasi dari status debitur (pelanggan) dalam posisi bangkrut. Kesulitan likuiditas (permintaan penjadwalan ulang pembayaran) dan tidak dikenal alamat terakhir.

a. Credit Risk

Credit risk in receivables is due to the uncertainty of postal customers to pay their amounts due in accordance with the agreement. These risks are identified from the status of the customer in a position of bankruptcy. Difficulty in liquidity (request for rescheduling of payment), and no last known address.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

a. Credit Risk (Continued)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit mendekati nilai tercatat bersih dari aset keuangan dengan rincian sebagai berikut:

As of December 31, 2024 and 2023, the maximum Group exposure of the credit risk approximates the net carrying amounts of the outstanding financial assets with details as follows:

	2024	2023	
Kas dan Setara Kas	2.063.363.227.142	2.653.918.421.743	Cash and Cash Equivalents
Bank yang Dibatasi Penggunaannya	33.073.529.725	-	
Piutang Usaha	336.931.275.934	385.402.397.127	Trade Receivables
Piutang Layanan Jasa Keuangan	2.011.539.275.002	880.739.688.637	Receivable from Financial Services
Aset Lancar Lainnya	2.338.569.956.643	477.506.326.678	Other Current Assets
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	1.016.837.478.050	930.909.600.985	Accrued Revenues
Piutang Kerugian termasuk dalam Aset Tidak Lancar Lainnya	13.811.808.767	13.811.808.767	Receivable Losses include in Other Non-Current Assets
Jumlah	7.814.126.551.263	5.342.288.243.937	Total

Tabel berikut memberikan kualitas kredit dan analisis umur aset keuangan sesuai dengan peringkat kredit debitur pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

The following table provides the credit quality and age analysis of financial assets according to credit ratings of debtors as of December 31, 2024 and 2023:

		2024			
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Ada Penurunan Nilai/ Neither Past Due Nor Impaired	Jatuh Tempo Tetapi Tidak Ada Penurunan/ Past Due But Not Impaired <1 Tahun/Year	Telah Jatuh Tempo Dan Ada Penurunan/ Past Due and Impaired	Jumlah/ Total	
Kas dan Setara Kas	2.063.363.227.142	-	-	2.063.363.227.142	Cash and Cash Equivalents
Bank yang Dibatasi Penggunaannya	33.073.529.725	-	-	33.073.529.725	Restricted Bank
Piutang Usaha	-	-	336.931.275.934	336.931.275.934	Trade Receivables
Piutang Layanan Jasa Keuangan	2.011.539.275.002	-	-	2.011.539.275.002	Receivable from Financial Services
Aset Lancar Lainnya	-	-	2.338.569.956.643	2.338.569.956.643	Other Current Assets
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	1.016.837.478.050	-	-	1.016.837.478.050	Accrued Revenues
Piutang Kerugian termasuk dalam Aset Tidak Lancar Lainnya	-	-	13.811.808.767	13.811.808.767	Receivable Losses include in Other Non-Current Assets
Jumlah	5.124.813.509.919	-	2.689.313.041.344	7.814.126.551.263	Total

		2023			
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Ada Penurunan Nilai/ Neither Past Due Nor Impaired	Jatuh Tempo Tetapi Tidak Ada Penurunan/ Past Due But Not Impaired <1 Tahun/Year	Telah Jatuh Tempo Dan Ada Penurunan/ Past Due and Impaired	Jumlah/ Total	
Kas dan Setara Kas	2.653.918.421.743	-	-	2.653.918.421.743	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha	-	-	385.402.397.127	385.402.397.127	Trade Receivables
Piutang Layanan Jasa Keuangan	880.739.688.637	-	-	880.739.688.637	Receivable from Financial Services
Aset Lancar Lainnya	-	-	477.506.326.678	477.506.326.678	Other Current Assets
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	930.909.600.985	-	-	930.909.600.985	Accrued Revenues
Piutang Kerugian termasuk dalam Aset Tidak Lancar Lainnya	-	-	13.811.808.767	13.811.808.767	Receivable Losses include in Other Non-Current Assets
Jumlah	4.465.567.711.365	-	876.720.532.572	5.342.288.243.937	Total

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Risiko Kredit (Lanjutan)

Kualitas kredit instrumen keuangan dikelola oleh Grup menggunakan peringkat kredit internal. Instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai "tidak jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai" termasuk instrumen dengan kualitas kredit yang tinggi karena hanya terdapat sedikit atau tidak terdapat riwayat gagal bayar atas persyaratan yang dijaminan berdasarkan surat kuasa, surat jaminan atau *promissory note*.

"*Past due but not impaired*" adalah barang-barang dengan sejarah *default* sering namun jumlahnya masih tertagih. Terakhir, "*past due and impaired*" adalah mereka yang lama beredar dan telah dilengkapi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang.

Manajemen yakin akan kemampuan Grup untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimum dengan membentuk penyisihan penurunan nilai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang berdasarkan data historis kerugian yang ada (Catatan 7).

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Grup dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Grup menghadapi risiko pasar, risiko pertukaran mata uang asing tertentu.

Risiko nilai tukar mata uang adalah risiko yang timbul dari perubahan nilai tukar Rupiah sebagai mata uang pelaporan terhadap mata uang asing, terutama USD, EUR, GBP, SGD dan CHF.

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur Grup terhadap fluktuasi nilai tukar berasal dari selisih nilai tukar antara Rupiah dan US Dolar.

Bagian signifikan dari risiko nilai tukar mata uang asing merupakan kontribusi secara tunai dalam mata uang USD, EUR, GBP, SGD dan CHF pada kas di bank.

Grup memantau fluktuasi nilai tukar asing dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil tindakan yang diperlukan paling diuntungkan kepada Grup pada waktunya. Manajemen saat ini tidak mempertimbangkan kebutuhan untuk masuk ke dalam setiap mata uang *forward/swaps*.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Credit Risk (Continued)

The credit quality of financial instruments is managed by the Group using internal credit ratings. Financial instruments classified as "neither past due nor impaired" includes high grade credit quality instruments because there was few or no history of default on the agreed terms based on the letter of authorization, letter of guarantee or promissory note.

"Past due but not impaired" are items with history of frequent default nevertheless the amount due are still collectible. Lastly, "past due and impaired" are those that are long outstanding and has been provided with allowance for impairment loss on receivables.

Management is confident in its ability to continue to control and sustain minimal exposure of credit risk to the Group with set sufficient allowance for impairment losses to cover incurred losses arising from uncollectible receivables based on historical loss (Note 7).

b. Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market price. The Group are exposed to market risks, particularly interest rate risk and foreign currency exchange risk.

Foreign Exchange Risk

The Group are exposed to market risks, in particular foreign currency exchange risk.

Foreign currency exchange risk is the risk that arises from the changes of exchange rate of Rupiah as the reporting currency against foreign currencies, especially USD, EUR, GBP, SGD and CHF currencies.

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur Grup terhadap fluktuasi nilai tukar berasal dari selisih nilai tukar antara Rupiah dan US Dolar.

The significant portion of the foreign currency exchange risk is contributed by USD, EUR, GBP, SGD and CHF denominated cash in banks.

The Group monitors the foreign exchange rate fluctuation and market expectation so it can take necessary actions benefited most to the Group in due time. The Management currently does not consider the necessity to enter into any currency forward/swaps.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko Pasar (Lanjutan)

b. Market Risk (Continued)

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing (Lanjutan)

Foreign Exchange Risk (Continued)

Risiko nilai tukar adalah potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena fluktuasi nilai tukar. Risiko nilai tukar berdampak langsung pada penerimaan atau kewajiban karena Grup melakukan transaksi dengan menggunakan valuta asing. Risiko ini sangat jelas tergambar atas transaksi pos internasional baik untuk jasa pos internasional ataupun dalam bidang administrasi pos (UPU). Berbagai kurs valuta asing digunakan terkait dengan counterpart negara masing-masing.

Exchange rate risk is the potential deviation from expected results due to exchange rate fluctuations. Exchange rate risk has a direct impact on revenues or liabilities because the Group use transactions using foreign currency. This risk is clearly illustrated by the transaction to postal international either for the international postal services or in the field of postal administrations (UPU). A variety of foreign exchange rates are used in connection with their respective state counterparts.

Namun pada umumnya risiko nilai tukar dimulai pada saat mengakui transaksi pos internasional yang dimulai dengan kurs SDR. Penempatan dana pada portofolio valas, diyakini mampu untuk memitigasi risiko nilai tukar tersebut.

But in general, exchange rate risk begins at recognition of international postal transactions that began with the SDR exchange rate. Placement of funds in foreign currency portfolio that is believed to be able to mitigate the exchange rate risks.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, dengan pendapatan sebelum pajak yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023:

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in the Rupiah exchange rate against foreign currency, with all other variables held constant, to the Company and Subsidiaries income before tax for the period ended December 31, 2024 and 2023:

		Kenaikan (Penurunan) Mata Uang Asing/ Increase (Decrease) Foreign Currencies	Pengaruh pada Laba Sebelum Pajak/ Effect on Income Before Tax	
31 Desember 2024	USD	2,64%	3.153.598.338	December 31, 2024
		-2,64%	(3.153.598.338)	
	EUR	6,18%	-	
		-6,18%	-	
	SGD	0,00%	-	
		0,00%	-	
	GBP	0,00%	-	
		0,00%	-	
	CHF Swiss	4,74%	-	
		-4,74%	-	
	JPY	7,75%	-	
		-7,75%	-	
	SAR	2,73%	-	
		-2,73%	-	

		Kenaikan (Penurunan) Mata Uang Asing/ Increase (Decrease) Foreign Currencies	Pengaruh pada Laba Sebelum Pajak/ Effect on Income Before Tax	
31 Desember 2023	USD	0,0119%	83.311.205	December 31, 2023
		-0,0119%	(83.311.205)	
	EUR	0,0552%	387.136.609	
		-0,0552%	(387.136.609)	
	SGD	0,2102%	1.475.179.950	
		-0,2102%	(1.475.179.950)	
	GBP	0,8622%	6.051.744.102	
		-0,8622%	(6.051.744.102)	
	CHF Swiss	0,1312%	921.095.908	
		-0,1312%	(921.095.908)	
	JPY	0,0471%	330.930.151	
		-0,0471%	(330.930.151)	

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko Likuiditas

c. Liquidity Risk

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Grup tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (*cash-in*) dan kas keluar (*cash-out*) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Tabel dibawah merupakan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

Liquidity risk is the risk that the Group are unable to meet its obligations when they fall due. The management evaluates and monitors cash-in flows and cash-out flows to ensure the availability of funds to settle the due obligation. The tables below summarize the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual undiscounted payments at December 31, 2024 and 2023:

	2024			
	Dibawah 1 tahun/ <i>Below 1 year</i>	Past due but >1 tahun <i>>1 year</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Utang Usaha	651.416.992.385	-	651.416.992.385	Trade Payable
Utang Lainnya	612.179.209.903	-	612.179.209.903	Other Payables
Obligasi	99.469.166.668	398.080.833.339	497.550.000.007	Bond
Pinjaman Bank	4.421.133.369.864	-	4.421.133.369.864	Bank Loans
Liabilitas Sewa	42.139.256.365	-	42.139.256.365	Lease Liabilities
Jumlah	5.826.337.995.185	398.080.833.339	6.224.418.828.524	Total

	2023			
	Dibawah 1 tahun/ <i>Below 1 year</i>	Past due but >1 tahun <i>>1 year</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Utang Usaha	474.354.916.682	-	474.354.916.682	Trade Payable
Utang Lainnya	753.828.360.808	-	753.828.360.808	Other Payables
MTN dan Obligasi	323.361.458.333	495.100.000.000	818.461.458.333	MTN & Bond
Pinjaman Bank	2.285.604.000.000	-	2.285.604.000.000	Bank Loans
Liabilitas Sewa	7.734.098.789	15.194.867.976	22.928.966.765	Lease Liabilities
Jumlah	3.844.882.834.612	510.294.867.976	4.355.177.702.588	Total

Berikut adalah analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan:

The following is an anlysis of the maturity of the Group's financial liabilities based on contractual payments that are not discounted:

	2024				
	Nilai Buku Tercatat/ <i>Book Value</i>	Arus Kas Wajib/ <i>Cash Flow</i>	Liabilitas yang Harus Dilunasi 2025/ <i>Obligation to be Paid 2025</i>	Liabilitas yang Harus Dilunasi 2026/ <i>Obligation to be Paid 2026</i>	Liabilitas yang Harus Dilunasi 2027/ <i>Obligation to be Paid 2027</i>
Pinjaman Bank/ <i>Bank Loan</i>	4.421.133.369.864	4.421.133.369.864	4.421.133.369.864	-	-
Obligasi/ <i>Bonds</i>	500.000.000.000	500.000.000.000	100.000.000.000	-	400.000.000.000
Jumlah/Total	500.000.000.000	500.000.000.000	100.000.000.000	-	400.000.000.000

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko Likuiditas (Lanjutan)

c. Liquidity Risk (Continued)

Pengelolaan Modal

Capital Management

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

The main objective of the Group's capital management is to ensure the maintenance of a healthy capital ratio to support the business and maximize rewards for shareholders.

Kebijakan Grup adalah untuk mempertahankan struktur permodalan yang sehat dalam rangka untuk mengamankan akses untuk membiayai dengan biaya yang wajar.

The Group policy is to maintain a healthy capital structure to secure access to finance at a reasonable cost.

Tabel dibawah merupakan ringkasan jumlah modal Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

The table below summarizes the total capital of the Group as of December 31, 2024 and 2023:

	2024	2023	
Modal	455.023.000.000	455.023.000.000	Share Capital
Tambahan Modal Disetor	2.344.427.566	2.344.427.566	
Saldo Laba	4.746.859.678.196	4.019.944.671.201	Retained Earnings
Komponen Ekuitas Lainnya	3.794.785.432.195	3.702.780.917.128	Other Equity Component
Jumlah	8.999.012.537.957	8.180.093.015.895	Total

Perjanjian Bank

Bank Covenant

Kreditur/Creditors

Syarat Kredit/Covenant

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
 Rasio Lancar (kali)

Current Asset/Current Liabilities
 * Total Utang : Total Ekuitas
 (Total utang = Total utang dikurangi dengan Kas)
 EBITDA : (Angsuran pokok jatuh tempo + Bunga)

Rasio Utang ke Ekuitas (kali)
 Rasio *Debt Service Coverage* (kali)

Current Asset : Current Liabilities
 (EBITDA + Pendapatan Donasi LPU) : (Total Utang jatuh tempo + Biaya Bunga)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
 Rasio Lancar (kali)
 Rasio *Debt Service Coverage* (kali)

Current Asset : Current Liabilities
 EBITDA : (Angsuran pokok + Bunga jatuh tempo)

PT Bank Sinarmas Tbk
 Rasio Lancar (kali)
 Rasio *Debt Service Coverage* (kali)

Total Aktiva Lancar : Total Kewajiban Lancar
Total Kewajiban/ Utang : Total Ekuitas

PT Bank Central Asia Tbk
 Rasio Lancar (kali)
 Rasio Utang ke Ekuitas (kali)

PT Bank KB Bukopin Tbk
Current Ratio

Cash + Account Receivable + Inventory : Utang Usaha + Utang Pajak
 EBITDA : (Pokok + Bunga)

Debt Service Coverage Ratio

PT Bank Maspion Indonesia Tbk
Current Ratio
Liabilities to Equity Ratio

Current Asset : Current Liabilities
 * Total Kewajiban/ Utang : Total Ekuitas
 *Utang Bank + Utang Usaha + MTN + Obligasi
 EBITDA disetahunkan /Utang Berbunga + Beban Bunga

Debt Service Coverage Ratio

PT Bank IBK Indonesia Tbk
Current Ratio
Debt to Equity Ratio
Debt Service Coverage Ratio

Current Asset : Current Liabilities
Jumlah Liabilitas : Jumlah Ekuitas
 EBITDA : (Angsuran pokok + Bunga jatuh tempo)

PT Bank Neo Commerce Tbk
Current Ratio
Debt to Equity Ratio
Debt Service Coverage Ratio

Current Asset : Current Liabilities
Jumlah Liabilitas : Jumlah Ekuitas
 EBITDA : (Angsuran pokok + Bunga jatuh tempo)

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko Likuiditas (Lanjutan)

c. Liquidity Risk (Continued)

Perjanjian Bank (Lanjutan)

Bank Covenant (Continued)

Kreditur/Creditors

Svarat Kredit/Covenant

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Current Ratio

Debt to Equity Ratio

Debt Service Coverage Ratio

Current Asset : Current Liabilities

Jumlah Liabilitas : Jumlah Ekuitas

EBITDA : (Angsuran pokok + Bunga jatuh tempo)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Current Ratio

Debt to Equity Ratio

Debt Service Coverage Ratio

Current Asset : Current Liabilities

Jumlah Liabilitas : Jumlah Ekuitas

EBITDA : (Angsuran pokok + Bunga jatuh tempo)

Obligasi

Current Ratio

Debt Service Coverage

Total Aktiva Lancar : Total Kewajiban Lancar

EBITDA : (Angsuran pokok jatuh tempo + Bunga)

Kreditur	Syarat Kredit/Covenant	Hasil/ Result	Creditors
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Rasio Lancar (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	1,31	Current Ratio (times)
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (kali)	Maksimal 2,2x/Maximum 2.2x	0,84	Debt to Equity Ratio (times)
Rasio Debt Service Coverage (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	0,19	Debt Service Coverage Ratio (times)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Rasio Lancar (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	1,31	Current Ratio (times)
Rasio Debt Service Coverage (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	0,27	Debt Service Coverage Ratio (times)
PT Bank Sinarmas Tbk			PT Bank Sinarmas Tbk
Rasio Lancar (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	1,31	Current Ratio (times)
Rasio Debt Service Coverage (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	0,19	Debt Service Coverage Ratio (times)
PT Bank Central Asia Tbk			PT Bank Central Asia Tbk
Rasio Lancar (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	1,31	Current Ratio (times)
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (kali)	Maksimal 2,5x/Maximum 2.5x	0,84	Debt to Equity Ratio (times)
PT Bank KB Bukopin Tbk			PT Bank KB Bukopin Tbk
Rasio Lancar (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	3,34	Current Ratio (times)
Rasio Debt Service Coverage (kali)	Minimal 1,25x/Minimum 1.25x	0,19	Debt Service Coverage Ratio (times)
PT Bank Maspion Indonesia Tbk			PT Bank Maspion Indonesia Tbk
Rasio Lancar (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	1,31	Current Ratio (times)
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (kali)	Maksimal 2,5x/Maximum 2.5x	0,62	Debt to Equity Ratio (times)
Rasio Debt Service Coverage (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	0,39	Coverage Ratio (times)
PT Bank IBK Indonesia Tbk			PT Bank IBK Indonesia Tbk
Rasio Lancar (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	1,31	Current Ratio (times)
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (kali)	Maksimal 3x/Maximum 3x	0,84	Debt to Equity Ratio (times)
Rasio Debt Service Coverage (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	0,19	Coverage Ratio (times)
PT Bank Neo Commerce Tbk			PT Bank Neo Commerce Tbk
Rasio Lancar (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	1,31	Current Ratio (times)
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (kali)	Maksimal 3x/Maximum 3x	0,84	Debt to Equity Ratio (times)
Rasio Debt Service Coverage (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	0,19	Coverage Ratio (times)

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko Likuiditas (Lanjutan)

c. Liquidity Risk (Continued)

Perjanjian Bank (Lanjutan)

Bank Covenant (Continued)

Kreditur	Syarat Kredit/Covenant	Hasil/ Result	Creditors
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk			PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Rasio Lancar (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	1,31	Current Ratio (times)
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (kali)	Maksimal 2x/Maximum 2x	0,84	Debt to Equity Ratio (times)
Rasio <i>Debt Service Coverage</i> (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	0,19	Coverage Ratio (times)
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk			PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Rasio Lancar (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	1,31	Current Ratio (times)
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (kali)	Maksimal 2,5x/Maximum 2.5x	0,84	Debt to Equity Ratio (times)
Rasio <i>Debt Service Coverage</i> (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	0,19	Coverage Ratio (times)
Obligasi			Bond
Rasio Lancar (kali)	Minimal 1x/Minimum 1x	1,31	Current Ratio (times)
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (kali)	Maksimal 5x/Maximum 5x	0,84	Debt to Equity Ratio (times)

30. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

30. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar.

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value.

Nilai wajar dari kas dan setara kas, piutang usaha, pendapatan yang masih harus diterima, piutang layanan usaha, piutang pegawai, utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, utang lainnya dan pinjaman bank jangka pendek mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

The fair value of cash and cash equivalents, trade receivables, accrued income, trade receivable from business services, employee receivables, trade payable, accrued expenses, other payable and short-term bank loan approximate their carrying amounts largely due to short-term maturities of these financial instruments.

Nilai wajar dari pinjaman bank, utang pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha mendekati nilai tercatat karena tingkat suku bunganya diasumsikan mendekati tingkat diskonto pasar.

Fair value of bank loans, consumer financing, and lease payable approximately at their carrying values largely due to their interest rates assuming close to the market discount rate.

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrument keuangan Grup yang tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian.

The table below presents comparison by class of the carrying amounts and fair value of the Group financial instrument that are carried in the consolidated financial statements.

	2024		2023		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
<u>Aset keuangan</u>					<u>Financial assets</u>
Kas dan setara kas	2.063.363.227.142	2.063.363.227.142	2.653.918.421.743	2.653.918.421.743	Cash and Cash Equivalents
Bank yang Dibatasi Penggunaannya	33.073.529.725	33.073.529.725	-	-	Restricted Bank
Piutang usaha - Bersih	336.931.275.934	336.931.275.934	385.402.397.127	385.402.397.127	Trade Receivables - Net
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	1.016.837.478.050	1.016.837.478.050	930.909.600.985	930.909.600.985	Accrued Income
Piutang Layanan Jasa Keuangan	2.011.539.275.002	2.011.539.275.002	880.739.688.637	880.739.688.637	Financial Services Receivable
Piutang Karyawan	15.031.583.376	15.031.583.376	7.054.857.557	7.054.857.557	Receivable to Employee
Piutang Kerugian Perusahaan	13.811.808.767	13.811.808.767	13.811.808.767	13.811.808.767	Company Loss Receivables

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
 Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)
 As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

30. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(Continued)

	2024		2023		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
<u>Liabilitas keuangan</u>					<u>Financial liabilities</u>
Liabilitas Keuangan Dicatat					Financial Liabilities
Berdasarkan Biaya Perolehan					Measured at
Diamortisasi					Amortized Cost
Utang Usaha	651.416.992.385	651.416.992.385	474.354.916.682	474.354.916.682	Trade Payables
Pinjaman Bank Jangka Pendek	4.421.133.369.864	4.421.133.369.864	2.285.604.000.000	2.285.604.000.000	Short-term Bank loan
Utang Lain-lain	612.179.209.903	612.179.209.903	753.828.360.808	753.828.360.808	Other Payables
Liabilitas Sewa	130.921.740.724	130.921.740.724	22.928.966.765	22.928.966.765	Lease Liabilities
Pinjaman Jangka					Medium Term Note
Menengah dan Obligasi	497.550.000.007	497.550.000.007	818.461.458.333	818.461.458.333	and Bond

31. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING

31. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

Saldo aset dan liabilitas dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Balances of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are as follows:

	2024		2023		
	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	
<u>Aset</u>					<u>Assets</u>
Kas dan Setara Kas					Cash and Cash Equivalents
EUR	580.868,83	9.788.400.724	205.190,03	3.516.858.623	EUR
USD	1.585.446,00	25.623.978.252	550.605,07	8.488.127.759	USD
CHF	113.486,72	2.033.788.700	61.740,06	1.134.429.150	CHF
SGD	-	-	56.351,73	659.970.893	SGD
GBP	-	-	28.531,33	563.786.071	GBP
SAR	3.740,41	16.099.248	-	-	SAR
JPY	876.740.000,00	89.743.106.400	1.107.563.000,00	121.333.526.650	JPY
Piutang Usaha					Account Receivables
USD	7.009.925,85	113.294.421.588	8.000.101,85	123.329.570.120	USD
Jumlah Aset		240.499.794.912		259.026.269.266	Total Assets
<u>Liabilitas</u>					<u>Liabilities</u>
Utang Usaha					Trade Payables
USD	8.001.560,00	129.321.212.720	8.907.833,00	137.323.153.528	USD
Utang Lainnya					Other Payables
USD	986.699,00	15.947.029.238	588.389,00	9.070.604.824	USD
Jumlah Liabilitas		145.268.241.958		146.393.758.352	Total Liabilities
Aset Bersih		95.231.552.954		112.632.510.914	Net Assets

32. KONTINJENSI

32. CONTINGENCIES

Perseroan memiliki potensi kerugian yang cukup signifikan disebabkan oleh praktik kecurangan pegawai. Sampai saat ini beberapa kasus masih dalam tahap pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh pihak penyidik yang telah memberikan estimasi kerugian sekurang - kurangnya sebesar Rp34.488.281.757 dan Rp17.523.102.627 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

The Company has significant potential losses caused by fraudulent practices of its employees. Currently some cases are still under inspection, investigation, inquiry, and prosecution on courts, being performed by prosecutors, who has given the estimated losses of at least Rp34,488,281,757 and Rp17,523,102,627 as of December 31, 2024 and 2023 with details as follows:

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. KONTINJENSI (Lanjutan)

32. CONTINGENCIES (Continued)

	2024	2023	
Perseroan			Company
Regional 1 Medan	9.557.004.888	2.485.900.378	Regional 1 Medan
Regional 2 Jakarta	1.742.608.404	281.722.094	Regional 2 Jakarta
Regional 3 Bandung	4.716.188.938	4.518.103.349	Regional 3 Bandung
Regional 4 Semarang	4.128.100	267.617.210	Regional 4 Semarang
Regional 5 Surabaya	1.036.533.793	757.714.865	Regional 5 Surabaya
Regional 6 Makassar	16.119.313.878	7.233.352.766	Regional 6 Makassar
Regional HO	618.378.965	618.378.965	Regional HO
Entitas Anak			Subsidiary
PT Pos Properti Indonesia	-	1.360.313.000	PT Pos Properti Indonesia
PT Pos Logistik Indonesia	441.815.123	-	PT Pos Logistik Indonesia
PT Pos Finansial Indonesia	252.309.668	-	PT Pos Finansial Indonesia
Jumlah	34.488.281.757	17.523.102.627	Total

33. PERENCANAAN MANAJEMEN

33. MANAGEMENT PLAN

Dengan mempertimbangkan Aspirasi Pemegang Saham, pencapaian tahun 2023, dan berbagai pembelajaran dari hasil evaluasi kinerja tahun 2023, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan ("RKAP") PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2024 mengangkat tema: "Mewujudkan Pos Indonesia sebagai Orkestrator Logistik yang Terpercaya dan Terkemuka dalam Ekosistem BUMN" dengan strategi pengembangan masing-masing bisnis sebagai berikut.

Taking into account Shareholder Aspirations, 2023 achievements, and various lessons learned from the results of the 2023 performance evaluation, in 2024 PT Pos Indonesia (Persero) Corporate Budget Work Plan ("RKAP") raises the theme: "Realizing Pos Indonesia as a Trusted and Leading Logistics Orchestrator in the BUMN Ecosystem" with the development strategy of each business as follows.

Strategi Usaha

Business Strategy

Strategi Pengembangan Bisnis Logistik

Logistics Business Development Strategy

- Memperkuat posisi strategis (*reinforce strategic positioning*) PT Pos Indonesia (Persero) dalam ekosistem logistik, dengan model bisnis *3rd Party Logistic* (3PL) atau *4th Party Logistic* (4PL), fokus segmen pelanggan pada Pemerintah dan BUMN, serta fokus jenis kargo pada *general cargo dan dry bulk*, dengan harapan dapat memberikan solusi layanan logistik secara *end-to-end* sebagai *logistic orchestrator* melalui pembangunan platform logistik terintegrasi.
- Menyelaraskan strategi bisnis grup (*group strategic business alignment*) dengan menjadikan anak usaha sebagai *operating business* dari logistik untuk menghindari *double presence* atau *overlapping business* antara induk dan anak perusahaan.
- Memulai kerja sama strategis dengan Logistics Service Provider (LSP) BUMN (*operatorship* atau *partnership*) dan LSP Global (*strategic alliance*).

- Reinforce the strategic positioning of PT Pos Indonesia (Persero) in the logistics ecosystem, with a 3rd Party Logistic (3PL) or 4th Party Logistic (4PL) business model, customer segment focus on the Government and BUMN, and cargo type focus on general cargo and dry bulk, with the hope of providing end-to-end logistics service solutions as a logistics orchestrator through the development of an integrated logistics platform.
- Aligning group strategic business alignment by making subsidiaries the operating business of logistics to avoid double presence or overlapping business between parent and subsidiaries.
- Initiate strategic cooperation with state-owned Logistics Service Providers (LSP) (operatorship or partnership) and global LSP (strategic alliance).

Dengan menjalankan 3 (tiga) strategi utama bisnis logistik tersebut, PT Pos Indonesia (Persero) diharapkan dapat memasuki posisi baru pada ekosistem logistik di Indonesia.

By carrying out the 3 (three) main strategies of the logistics business, PT Pos Indonesia (Persero) is expected to enter a new position in the logistics ecosystem in Indonesia.

Strategi Pengembangan Bisnis Kurir

Courier Business Development Strategy

- Membangun integrated channel sebagai saluran distribusi barang dan informasi yang terintegrasi pada rantai suplai hulu ke hilir.
- Menyediakan layanan kurir yang fleksibel dan terpercaya (reliable) melalui omnichannel logistik yang memberikan *fulfillment* yang fleksibel, pengiriman yang cepat, dan memiliki fitur *track and trace*.

- Building an integrated channel as a distribution channel for goods and information that is integrated in the upstream to downstream supply chain.
- Provide flexible and reliable courier services through omnichannel logistics that provide flexible fulfillment, fast delivery, and have track and trace features.

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

Strategi Usaha (Lanjutan)

Strategi Pengembangan Bisnis Kurir (Lanjutan)

- Menyediakan layanan retur mencakup *supply chain end-to-end* hingga layanan retur dari pengguna kembali ke *manufacturer*.

Dengan menjalankan 3 (tiga) strategi utama bisnis logistik tersebut, PT Pos Indonesia (Persero) diharapkan dapat memasuki posisi baru pada ekosistem logistik di Indonesia.

Strategi Pengembangan Bisnis Jasa Keuangan

- Membangun ekosistem jasa keuangan secara *end-to-end* yang lengkap dan mudah diakses oleh konsumen.
- Memperkuat sub-bisnis *Payment* dan *Saving* sebagai produk jangkar yang kuat, di mana Pos dapat menyelenggarakan secara mandiri atau memiliki peran yang ekstensif dan kolaboratif.
- Memperkuat keterikatan masing-masing produk jasa keuangan sehingga memperbesar potensi *upselling* atau *cross-selling*.

Dengan menjalankan 3 (tiga) strategi utama bisnis logistik tersebut, PT Pos Indonesia (Persero) diharapkan dapat memasuki posisi baru pada ekosistem logistik di Indonesia.

Strategi Pengembangan Bisnis Properti

- Mengembangkan aset properti melalui adanya pembangunan properti, utamanya perumahan dengan biaya rendah (*low cost housing*), dan bangunan medium & *high-rise* atau apartemen serta bangunan perkantoran.
- Mengelola aset yang dimiliki melalui utilisasi kotak ruang ataupun bangunan kepemilikan menetap dalam rangka *generating income* dari *leasing* aset terhadap pihak ketiga.
- Memelihara serta menjaga kebersihan dan keamanan pada aset-aset tersebut untuk memberikan kenyamanan bagi *end-customer*.

Dengan menjalankan 3 (tiga) strategi utama bisnis logistik tersebut, PT Pos Indonesia (Persero) diharapkan memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian pendapatan dan *brand image* Perusahaan yang semakin tinggi.

Kebijakan

Adapun kebijakan-kebijakan yang menjadi pegangan dalam melaksanakan kegiatan usaha Perusahaan antara lain sebagai berikut:

33. MANAGEMENT PLAN (Continued)

Business Strategy (Continued)

Courier Business Development Strategy (Continued)

- Provides return services covering the *end-to-end* supply chain to return services from the user back to the *manufacturer*.

By carrying out the 3 (three) main strategies of the logistics business, PT Pos Indonesia (Persero) is expected to enter a new position in the logistics ecosystem in Indonesia.

Financial Services Business Development Strategy

- Building a complete *end-to-end* financial services ecosystem that is easily accessible to consumers.
- Strengthen the *Payment* and *Saving* sub-business as a strong anchor product, which Pos can deliver independently or have an extensive and collaborative role.
- Strengthen the attachment of each financial services product so as to increase the potential for *upselling* or *cross-selling*.

By carrying out the 3 (three) main strategies of the logistics business, PT Pos Indonesia (Persero) is expected to enter a new position in the logistics ecosystem in Indonesia.

Property Business Development Strategy

- Develop property assets through property development, mainly low cost housing, and medium & high-rise buildings or apartments and office buildings.
- Managing assets owned through the utilization of space boxes or buildings of settled ownership in order to generate income from leasing assets to third parties.
- Maintaining and safeguarding the cleanliness and security of these assets to provide comfort for *end-customers*.

By carrying out the 3 (three) main strategies of the logistics business, PT Pos Indonesia (Persero) is expected to have a significant impact on the achievement of higher revenue and *brand image* of the Company.

Policy

The policies that are used as a guideline in carrying out the Company's business activities include the following:

Jenis Kegiatan/ <i>Type of Activity</i>	Nama Kebijakan/ <i>Policy Name</i>
Pengelolaan Aset/ <i>Asset Management</i>	- Kebijakan Pengelolaan Aset/<i>Asset Management Policy</i> - Kebijakan Investasi/<i>Investment Policy</i>
RR BUMN	- PER-01/MBU/03/2023 - PER-05/MBU/04/2021 - Kebijakan RR, Kebijakan Pemberian Jasa Konsultasi, Kebijakan Pengelolaan Aset dan Kebijakan Investasi/RR Policy, Consulting Services Policy, Asset Management Policy and Investment Policy

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

33. MANAGEMENT PLAN (Continued)

Kebijakan (Lanjutan)

Policy (Continued)

Jenis Kegiatan/Type of Activity	Nama Kebijakan/Policy Name
Investasi/ <i>Investment</i>	- Kebijakan Investasi/<i>Investment Policy</i> - Kebijakan Kerjasama/<i>Cooperation Policy</i> - Pedoman Investasi/<i>Investment Guide</i> - Komite Investasi dan Manajemen Risiko/<i>Investment and Risk Management Committee</i>
Jasa Konsultasi/ <i>Consulting Services</i>	- Kebijakan Pemberian Jasa Konsultasi/<i>Consulting Services Provision Policy</i> - Kebijakan Pengelolaan Aset/<i>Asset Management Policy</i>
Pengelolaan Anak Perusahaan/ <i>Subsidiary Management</i>	- Kebijakan Penanganan Anak Perusahaan/<i>Subsidiary Handling Policy</i> - Kebijakan Investasi Anak Perusahaan/<i>Subsidiary Investment Policy</i> - Kebijakan Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan/<i>Income Determination Policy for Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries and Subsidiary Companies</i>
Pengelolaan NPL Perbankan/ <i>Banking NPL Management</i>	Kebijakan Pengelolaan NPL Perbankan/<i>Banking NPL Management Policy</i>
Pendanaan atau Sumber Pembiayaan/ <i>Funding or Financing Sources</i>	Kebijakan Pendanaan/<i>Funding Policy</i>

Program Kerja

Work Program

Terdapat 48 (empat puluh delapan) Program Kerja RKAP 2024 yang diturunkan dari 13 *Strategic Initiatives* dan dibagi ke dalam 8 (delapan) grup.

There are 48 (forty eight) RKAP 2024 Work Programs derived from 13 *Strategic Initiatives* and divided into 8 (eight) groups.

Direktur Bisnis Kurir dan Logistik (7 Program Kerja)

Director of Courier and Logistics Business (7 Work Programs)

- 1) SVP Retail Business (2 Program Kerja)
 - a. Kolaborasi PosAja dengan UMKM dan E-Commerce untuk Mendorong Pertumbuhan Bisnis Kurir dan Ekosistem Digital melalui Peningkatan Jejaring Touchpoint dan *Strategic Partnership* dengan Anggaran Pendapatan Usaha Rp1,280 Miliar, *Opex* Rp59 Miliar, dan *Capex* Rp10 Miliar.
 - b. Meningkatkan Layanan Digital Channel PosAja dan *Brand Engagement* di Kota Besar dengan Anggaran Pendapatan Usaha Rp10 Miliar dan *Opex* Rp20 Miliar.
- 2) SVP Enterprise Business (2 Program Kerja)
 - a. Mengembangkan Enterprise Logistics Solution dengan prioritas Segmen Pemerintah & BUMN dengan Anggaran Pendapatan Usaha Rp1.000 Miliar dan *Opex* Rp48 Miliar.
 - b. Mengembangkan Enterprise CEP Solution pada Segmen Korporat/ B2B dengan Anggaran Pendapatan Usaha Rp500 Miliar dan *Opex* Rp22 Miliar.

- 1) SVP Retail Business (2 Work Programs)
 - a. PosAja Collaboration with MSMEs and E-Commerce to Drive Courier Business Growth and Digital Ecosystem through Increased Touchpoint Network and *Strategic Partnerships* with an Operating Revenue Budget of Rp1.280 Billion, *Opex* of Rp59 Billion, and *Capex* of Rp10 Billion.
 - b. Improving PosAja Digital Channel Services and *Brand Engagement* in Big Cities with an Operating Revenue Budget of Rp10 billion and *Opex* of Rp20 billion.
- 2) SVP Retail Business (2 Work Programs)
 - a. Develop Enterprise Logistics Solution with prioritization of Government & State-Owned Enterprise Segments with an Operating Revenue Budget of Rp1,000 Billion and *Opex* of Rp48 Billion.
 - b. Developed Enterprise CEP Solution in the Corporate/ B2B Segment with an Operating Revenue Budget of Rp500 Billion and *Opex* of Rp22 Billion.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

33. MANAGEMENT PLAN (Continued)

Program Kerja (Lanjutan)

Work Program (Continued)

Direktur Bisnis Kurir dan Logistik (7 Program Kerja)

Director of Courier and Logistics Business (7 Work Programs) (Continued)

- 3) SVP *Wholesale and International Business* (3 Program Kerja)
 - a. Eksekusi Pengembangan Produk Internasional Baru (Non UPU Platform) dengan Anggaran Pendapatan Usaha Rp155 Miliar dan Opex Rp1.6 Miliar.
 - b. Percepatan Skalabilitas dan Operational Excellence dengan Anggaran Opex sebesar Rp1.1 Miliar dan Capex Rp4.4 Miliar.
 - c. Mengembangkan Kurir Internasional dan Wholesale melalui Strategic Partnership dengan Anggaran Pendapatan Usaha Rp470 Miliar dan Opex Rp4.02 Miliar.

- 3) SVP *Wholesale and International Business* (3 Work Programs)
 - a. Execution of New International Product Development (Non UPU Platform) with an Operating Revenue Budget of Rp 155 Billion and Opex of Rp1,6 Billion.
 - b. Acceleration of Scalability and Operational Excellence with an Opex Budget of Rp1,1 billion and Capex of Rp 4,4 billion.
 - c. Developed International Courier and Wholesale through Strategic Partnership with an Operating Revenue Budget of Rp470 Billion and Opex of Rp4,02 Billion.

Direktur Bisnis Jasa Keuangan (6 Program Kerja)

Director of Financial Service Business (6 Work Programs)

- 1) SVP *Wholesale and International Business* (3 Program Kerja)
 - a. Memperluas Penetrasi Layanan melalui Peningkatan Biller dan Soft-selling Campaign dengan Anggaran Pendapatan Usaha Rp592 Miliar dan Opex Rp76,2 Miliar.
 - b. Meningkatkan Pendapatan Penyaluran Dana dari Sektor Pemerintahan dan Korporasi dengan Anggaran Pendapatan Usaha Rp250 Miliar dan Opex Rp150 Miliar.
 - c. Memperluas Penetrasi Layanan Tabungan dan Kredit Pensiun Pos melalui Percepatan Digitalisasi dengan Anggaran Pendapatan Usaha Rp185 Miliar, Opex Rp33,35 Miliar, dan Capex Rp27 Miliar.
- 2) SVP *Consumer Business* (3 Program Kerja)
 - a. *Enhancement* Layanan Jasa Keuangan Digital Pos pada Aplikasi Pospay dengan Anggaran Opex sebesar Rp0,85 Miliar.
 - b. *Enhancement* Layanan Jasa Keuangan pada Ekosistem *Consumer Business* dengan Anggaran Pendapatan Usaha Rp160 Miliar dan Opex Rp31,1 Miliar.
 - c. Menjamin Terlaksananya Layanan Jasa Keuangan Sesuai dengan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan Anggaran Opex Rp0,83 Miliar.

- 1) SVP *Wholesale and International Business* (3 Work Programs)
 - a. Expanding Service Penetration through Increased Biller and Soft-selling Campaign with an Operating Revenue Budget of Rp592 Billion and Opex of Rp76.2 Billion.
 - b. Increase Fund Disbursement Revenue from Government and Corporate Sectors with an Operating Revenue Budget of Rp250 Billion and Opex of Rp150 Billion.
 - c. Expanding Penetration of Postal Savings and Pension Credit Services through Accelerating Digitalization with an Operating Income Budget of Rp185 Billion, Opex of Rp33.35 Billion, and Capex of Rp27 Billion.
- 2) SVP *Consumer Business* (3 Work Programs)
 - a. Enhancement of Postal Digital Financial Services on the Pospay Application with an Opex Budget of Rp. 0.85 . Billion.
 - b. Enhancement of Financial Services in the Consumer Business Ecosystem with an Operating Revenue Budget of Rp160 Billion and Opex of Rp31.1 Billion.
 - c. Ensure the Implementation of Financial Services in accordance with the Principles of Good Corporate Governance (GCG) with an Opex Budget of Rp 0.83 Billion.

Direktur Human Capital Management (7 Program Kerja)

Director of Human Capital Management (7 Work Programs)

- 1) SVP *Human Capital Policy and Strategy* (3 Program Kerja)
 - a. Mengembangkan Organisasi dan SDM yang Mendorong Budaya Kolaborasi dan Memperkuat Kapabilitas Logistik dengan Anggaran Opex Rp1,4 Miliar.
 - b. Menyusun Strategi HC yang Menyeluruh, Berfokus kepada Penguatan Kapabilitas SDM dalam Rangka Menjawab Tuntutan Bisnis Perusahaan dengan Anggaran Opex Rp3,4 Miliar.
 - c. Productivity Enhancement melalui Program Rightsizing sebagai Exit Strategy dengan Anggaran Opex Rp800 Miliar.

- 1) SVP *Human Capital Policy and Strategy* (3 Work Programs)
 - a. Develop Organization and People that Encourage a Culture of Collaboration and Strengthen Logistics Capabilities with an Opex Budget of Rp1.4 Billion.
 - b. Developing a Comprehensive HC Strategy, Focusing on Strengthening HR Capabilities to Respond to the Company's Business Demands with an Opex Budget of Rp3.4 Billion.
 - c. Productivity Enhancement through Rightsizing Program as Exit Strategy with Opex Budget of Rp800 Billion.

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

Program Kerja (Lanjutan)

Direktur Human Capital Management (7 Program Kerja)
(Lanjutan)

- 2) SVP Human Capital Service and Business Partner (3 Program Kerja)
 - a. Mengembangkan Sistem Informasi untuk Mendukung Pengambilan Keputusan yang Lebih Cepat, Tepat, dan Akurat dengan Anggaran Opex Rp3 Miliar.
 - b. Mengembangkan Kompetensi Karyawan sesuai dengan Kebutuhan Bisnis dengan Anggaran Opex Rp22,1 Miliar.
 - c. Memenuhi Ketersediaan Talent sesuai Kebutuhan Bisnis dengan Anggaran Opex Rp40,45 Miliar.
- 3) VP General Support (1 Program Kerja)
 - a. Digitalisasi Updating Aplikasi E-Procurement dengan Anggaran Opex Rp0,15 Miliar.

Direktur Business Development and Portfolio Management
(3 Program Kerja)

- 1) SVP Strategic Planning and Business Development (2 Program Kerja)
 - a. Mengoptimalkan Data, Informasi, dan Hasil Analisis untuk Aksi Korporasi Pos Indonesia Group Tahun 2024-2025 dengan Anggaran Opex Rp16 Miliar dan Capex Rp 131 Miliar.
 - b. Mengembangkan Customer Experience Layanan Pos Indonesia dengan Anggaran Opex Rp4 Miliar.
- 2) SVP Portfolio Management (1 Program Kerja)
 - a. Akselerasi Implementasi Paradigma Baru Pengelolaan LPU, Pengawasan Regulasi, dan INDI 4.0 dengan Anggaran Pendapatan LPU Rp369 Miliar dan Opex Rp134,3 Miliar.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko (5 Program Kerja)

- 1) SVP Strategic Planning and Business Development (2 Program Kerja)
 - a. Akselerasi Implementasi Paradigma Baru Pengelolaan LPU, Pengawasan Regulasi, dan INDI 4.0 dengan Anggaran Pendapatan LPU Rp369 Miliar dan Opex Rp134,3 Miliar.
- 2) SVP Risk Management and Financial Policy (2 Program Kerja)
 - a. Peningkatan Peran GCG dan Penguatan Implementasi GRC untuk Meminimalkan Potensi Kerugian dengan Anggaran Opex Rp4,41 Miliar dan Capex Rp0,782 Miliar
 - b. Digitalisasi Bidang Keuangan dan Akuntansi serta Akselerasi Pencapaian Realisasi Capex dengan Anggaran Opex Rp1,05 Miliar dan Capex Rp1 Miliar.

33. MANAGEMENT PLAN (Continued)

Work Program (Continued)

Director of Human Capital Management (7 Work Programs)
(Continued)

- 2) SVP Human Capital Service and Business Partner (3 Work Programs)
 - a. Developing an Information System to Support Faster, More Precise, and Accurate Decision Making with an Opex Budget of IDR 3 Billion.
 - b. Developing Employee Competencies in accordance with Business Needs with an Opex Budget of Rp22.1 Billion.
 - c. Fulfill Talent Availability as per Business Needs with Opex Budget of IDR 40.45 Billion.
- 3) VP General Support (1 Work Program)
 - a. Digitalization of E-Procurement Application Updating with an Opex Budget of Rp0.15 Billion.

Director of Business Development and Portfolio Management
(3 Work Programs)

- 1) SVP Strategic Planning and Business Development (2 Work . Programs)
 - a. Optimizing Data, Information, and Analysis Results for Pos Indonesia Group Corporate Actions in 2024-2025 with an Opex Budget of Rp16 Billion and Capex of Rp. 131 Billion.
 - b. Developing Pos Indonesia's Customer Experience Services with an Opex Budget of IDR 4 Billion.
- 2) SVP Portfolio Management (1 Work Program)
 - a. Acceleration of the Implementation of the New Paradigm of LPU Management, Regulatory Oversight, and INDI 4.0 with an LPU Revenue Budget of Rp369 billion and Opex of Rp134.3 billion.

Director of Finance and Risk Management (5 Work Programs)

- 1) SVP Strategic Planning and Business Development (2 Work . Programs)
 - a. Acceleration of the Implementation of the New Paradigm of LPU Management, Regulatory Oversight, and INDI 4.0 with an LPU Revenue Budget of Rp369 billion and Opex of Rp134.3 billion.
- 2) SVP Risk Management and Financial Policy (2 Work Programs)
 - a. Improving the Role of GCG and Strengthening the Implementation of GRC to Minimize Potential Losses with an Opex Budget of Rp4.41 Billion and Capex of Rp0.782 Billion.
 - b. Digitalization of Finance and Accounting and Acceleration of Capex Realization Achievement with Opex Budget of Rp1.05 Billion and Capex of Rp 1 Billion.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

33. MANAGEMENT PLAN (Continued)

Program Kerja (Lanjutan)

Work Program (Continued)

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko (5 Program Kerja) (Lanjutan)

Director of Finance and Risk Management (5 Work Programs) (Continued)

- 3) VP *Asset Management* (2 Program Kerja)
 - a. Optimalisasi dan Penyelesaian Aset Bermasalah dengan Anggaran Pendapatan Usaha Rp35 Miliar dan Opex Rp4 Miliar.
 - b. Pembaharuan Brand Attribute pada *Physical Assets* melalui Standardisasi Tampilan Gedung dan Sarana Kerja serta Pengembangan SIM Aset Perusahaan dengan Anggaran Opex Rp157,96 Miliar dan Capex Rp161,86 Miliar.

- 3) VP *Asset Management* (2 Work Programs)
 - a. Optimization and Settlement of Troubled Assets with an Operating Income Budget of Rp35 billion and Opex of Rp4 billion.
 - b. Renewal of Brand Attribute on Physical Assets through Standardization of Building Display and Work Facilities and Development of Company Asset SIM with Opex Budget of Rp157.96 Billion and Capex of Rp161.86 Billion.

Direktur Operasi dan Digital Services (10 Program Kerja)

Director Operation and Digital Services (10 Work Programs)

- 1) SVP Digital Services (5 Program Kerja)
 - a. Program Kerja 12.1 – Mengembangkan Core System & Platform untuk Menunjang Kebutuhan Bisnis dengan Anggaran Opex Rp32 Miliar dan Capex Rp31,53 Miliar.
 - b. Mengembangkan Kompetensi dan Pemenuhan Syarat Compliance IT dengan Anggaran Opex Rp10,65 Miliar dan Capex Rp11,05 Miliar.
 - c. Modernisasi Infrastruktur Supporting IT dengan Anggaran Opex Rp21,02 Miliar dan Capex Rp15,05 Miliar.
 - d. Manage Service Infrastructure IT dengan Anggaran Opex Rp203,2 Miliar.
 - e. Integrasi Sistem Support dan Digitalisasi Proses Bisnis dengan Anggaran Capex Rp11,91 Miliar.
- 2) SVP International Post Service (3 Program Kerja)
 - a. Meningkatkan Kapabilitas Operasi dan Kepatuhan untuk Mendorong Terciptanya Kolaborasi Berskala Internasional dengan Anggaran Opex Rp299 Miliar dan Capex Rp12,95 Miliar.
 - b. Membenahi End-to-End dan Value Added Services, termasuk Aplikasi dan IT Pendukung dengan Anggaran Opex Rp1,3 Miliar dan Capex Rp0,15 Miliar.
 - c. Mendorong Utilisasi Mitra Global dalam Meningkatkan Penetrasi Pasar Internasional dengan Anggaran Opex Rp143,88 Miliar.
- 3) SVP Courier and Logistics Operation (1 Program Kerja)
 - a. Memperkuat Kapasitas Operasi & Standarisasi War Room dengan Anggaran Opex Rp0,1 Miliar dan Capex Rp21,2 Miliar.
- 4) SVP Fronting Management and Financial Transaction Service (1 Program Kerja)
 - a. Modernisasi Peralatan Pendukung Operasional untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan dengan Anggaran Capex Rp12,2 Miliar.

- 1) SVP Digital Services (5 Work Programs)
 - a. Work Program 12.1 - Develop Core System & Platform to Support Business Needs with Opex Budget of Rp32 Billion and Capex of Rp31.53 Billion.
 - b. Developing Competencies and Fulfilling IT Compliance Requirements with an Opex Budget of Rp 10.65 Billion and Capex of Rp11.05 Billion.
 - c. Modernization of IT Supporting Infrastructure with an Opex budget of Rp21.02 billion and Capex of Rp 15.05 billion.
 - d. Manage IT Service Infrastructure with an Opex Budget of Rp203.2 Billion.
 - e. Support System Integration and Business Process Digitalization with Capex Budget of Rp11.91 Billion.
- 2) SVP International Post Service (3 Work Programs)
 - a. Enhancing Operations and Compliance Capabilities to Drive International Collaboration with an Opex Budget of Rp299 Billion and Capex of Rp 12.95 Billion.
 - b. Improving End-to-End and Value Added Services, including Applications and IT Support with an Opex Budget of Rp1.3 Billion and Capex of Rp0.15 Billion.
 - c. Encourage Utilization of Global Partners in Increasing International Market Penetration with an Opex Budget of Rp143.88 Billion.
- 3) SVP Courier and Logistics Operation (1 Work Program)
 - a. Strengthening War Room Operation Capacity & Standardization with Opex Budget of Rp0.1 Billion and Capex of Rp21.2 Billion.
- 4) SVP Fronting Management and Financial Transaction Service (1 Work Program)
 - a. Modernization of Operational Support Equipment to Improve Service Quality with a Capex Budget of Rp12.2 Billion.

Non Direktorat (2 Program Kerja)

Non Directorate (2 Work Programs)

- 1) *Corporate Secretary* (1 Program Kerja)
 - a. Meningkatkan *Brand Awareness* Masyarakat tentang Identitas Baru Perusahaan dengan Anggaran Opex Rp5 Miliar.

- 1) *Corporate Secretary* (1 Work Program)
 - a. Increasing Public Brand Awareness of the Company's New Identity with an Opex Budget of Rp5 Billion.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

Program Kerja (Lanjutan)

Non Direktorat (2 Program Kerja) (Lanjutan)

- 2) *Internal Auditor* (1 Program Kerja)
 a. Implementasi Audit Berbasis Manajemen Risiko dengan Anggaran Opex Rp6,2 Miliar.

Anak Perusahaan (8 Program Kerja)

- 1) Direktur PT Pos Logistik Indonesia (3 Program Kerja)
 a. Peningkatan Pendapatan Bisnis pada Sektor Logistik Pemerintah/ Perusahaan Swasta, Peningkatan Kapasitas, Kapabilitas & Kompetensi SDM, Pencapaian *Operasional Excellence* dengan Anggaran Pendapatan Usaha sebesar Rp707 Miliar, Opex Rp1,2 Miliar, dan Capex Rp3,33 Miliar.
 b. Peningkatan Pendapatan Bisnis pada Sektor Logistik BUMN, dan Penetrasi Market BUMN dengan Kerjasama Strategis Pos Indonesia Grup dengan Anggaran Pendapatan Usaha sebesar Rp450 Miliar dan Capex Rp1,8 Miliar.
 c. Peningkatan pendapatan bisnis dengan strategi *blue ocean* dan penguatan Infrastruktur Platform Digital Logistik dengan Anggaran Pendapatan Usaha sebesar Rp56 Miliar, Opex Rp0,4 Miliar, dan Capex Rp0,8 Miliar.
- 2) Direktur PT Pos Properti Indonesia (2 Program Kerja)
 a. Optimalisasi Aset dan Pengembangan Bisnis dengan Anggaran Pendapatan Usaha Rp76,6 Miliar, Opex Rp59,6 Miliar, dan Capex Rp42,3 Miliar.
 b. Pengelolaan Aset melalui *Building Management* dan Manajemen Konstruksi dengan Anggaran Pendapatan Usaha Rp104,1 Miliar, Opex Rp91,6 Miliar, dan Capex Rp51,7 Miliar.
- 3) Direktur PT Pos Finansial Indonesia (3 Program Kerja)
 a. Peningkatan Daya Saing Pospay Agen dengan Anggaran Pendapatan Usaha Rp30,3 Miliar dan Opex Rp23,9 Miliar.
 b. Mengembangkan Bisnis Aggregator untuk Memperkuat Perusahaan sebagai *Single Aggregator* dengan Anggaran Pendapatan Usaha Rp7,6 Miliar dan Opex Rp3 Miliar.
 c. Menjadi Penyedia Aplikasi dan Barang IT dengan Anggaran Pendapatan Usaha Rp71,2 Miliar, Opex Rp49,7 Miliar, dan Capex Rp0,392 Miliar.

34. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS

Informasi transaksi non kas yang signifikan yang tidak mempengaruhi aktivitas arus kas sebagai berikut:

33. MANAGEMENT PLAN (Continued)

Work Program (Continued)

Non Directorat (2 Work Programs)

- 2) *Internal Auditor* (1 Work Program)
 a. *Implementation of Risk Management-Based Audit with Opex Budget of Rp6.2 Billion.*

Subsidiaries (8 Work Programs)

- 1) *Director PT Pos Logistik Indonesia (3 Work Programs)*
 a. *Increased Business Revenue in the Government/ Private Company Logistics Sector, Increased Capacity, Capability & Competence of Human Resources, Achievement of Operational Excellence with a Business Revenue Budget of Rp707 Billion, Opex Rp1.2 Billion, and Capex Rp 3.33 Billion.*
 b. *Increased Business Revenue in the SOE Logistics Sector, and SOE Market Penetration with Strategic Cooperation with the Pos Indonesia Group with a Business Revenue Budget of Rp450 Billion and Capex of Rp 1.8 Billion.*
 c. *Increased business revenue with a blue ocean strategy and strengthened Digital Logistics Platform Infrastructure with an Operating Revenue Budget of Rp56 billion, Opex of Rp0.4 billion, and Capex of Rp 0.8 billion.*
- 2) *Director PT Pos Properti Indonesia (2 Work Programs)*
 a. *Asset Optimization and Business Development with an Operating Income Budget of Rp76.6 billion, Opex of Rp59.6 billion, and Capex of Rp42.3 billion.*
 b. *Asset Management through Building Management and Construction Management with an Operating Revenue Budget of Rp104.1 billion, Opex of Rp91.6 billion, and Capex of Rp51.7 billion.*
- 3) *Director PT Pos Finansial Indonesia (3 Work Programs)*
 a. *Increased Competitiveness of Pospay Agents with an Operating Revenue Budget of Rp30.3 Billion and Opex of Rp 23.9 Billion.*
 b. *Develop Aggregator Business to Strengthen the Company as a Single Aggregator with an Operating Income Budget of Rp7.6 Billion and Opex of Rp 3 Billion.*
 c. *Become an Application and IT Goods Provider with an Operating Revenue Budget of Rp71.2 Billion, Opex of Rp49.7 Billion, and Capex of Rp 0.392 Billion.*

34. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASH FLOWS

Significant non-cash transactions that do not affect the cash flows activities are as follows:

	2024	2023	
Penambahan Aset Hak Guna melalui Liabilitas Sewa	-	(21.614.624.254)	Addition of Right-of-Use Assets from Lease Liabilities
Pembayaran Bunga melalui Akun Bunga	-	(10.665.097.222)	Interest Expenses from Interest Accrued
Penambahan Aset Tetap dengan Mendebitkan (Mengkreditkan) Utang Usaha	-	30.183.414.172	Additions of Property & Equipment Debited (Credited) Account Payables
Pelepasan Aset Tetap melalui Penggantian (Ruislag)	-	1.458.913.692	Disposal of Fixed Assets through Replacement (Ruislag)
Penempatan Bank Garansi melalui Non Cash Loan	-	(20.604.000.000)	Placement Bank Guarantee through Non Cash Loan

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
 Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)
 As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

34. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASH FLOWS (Continued)

Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan:

Reconciliation of Liabilities Arising from Financing Activities:

	Arus Kas Pendanaan Financing Cash Flows			Perubahan Non Kas/ Non-Cash Changes		31 Desember/ December 31, 2024
	31 Desember/ December 31, 2023	Penambahan/ Addition	Pembayaran/ Payment	Pergerakan Valuta Asing/ Foreign Exchange Movement	Lain-lain/ Others	
Utang Pembiayaan Konsumen/ Customer Financing Payable	22.928.966.765	-	(10.719.707.191)	-	118.712.481.150	130.921.740.724
Utang Bank Jangka Pendek/ Short-Term Bank Loan	2.285.604.000.000	15.503.800.000.000	(13.709.587.821.338)	-	341.317.191.202	4.421.133.369.864
Utang Bank Jangka Panjang/ Long-Term Bank Loan	-	-	-	-	-	-
Utang Obligasi/Bonds Payable	323.361.458.333	-	(323.361.458.333)	-	-	-
Pinjaman Jangka Menengah/ Medium Term Notes	492.650.000.000	-	-	-	4.900.000.007	497.550.000.007
Utang Bunga/Interest Payable	10.665.097.222	-	-	-	54.609.969	10.719.707.191

	Arus Kas Pendanaan Financing Cash Flows			Perubahan Non Kas/ Non-Cash Changes		31 Desember/ December 31, 2023
	31 Desember/ December 31, 2022	Penambahan/ Addition	Pembayaran/ Payment	Penambahan Aset Tetap/ Additional in Fixed Assets	Pergerakan Valuta Asing/ Foreign Exchange Movement	
Utang Pembiayaan Konsumen/ Customer Financing Payable	44.480.045.870	-	(26.249.201.993)	-	4.698.122.888	22.928.966.765
Utang Bank Jangka Pendek/ Short-Term Bank Loan	770.000.000.000	10.024.000.000.000	(8.529.000.000.000)	-	20.604.000.000	2.285.604.000.000
Utang Bank Jangka Panjang/ Long-Term Bank Loan	87.500.000.000	-	(87.500.000.000)	-	-	-
Utang Obligasi/Bonds Payable	321.573.958.333	-	-	-	1.787.500.000	323.361.458.333
Pinjaman Jangka Menengah/ Medium Term Notes	492.650.000.000	-	-	-	-	492.650.000.000
Utang Bunga/Interest Payable	2.057.782.444	-	(251.090.088.514)	-	259.697.403.292	10.665.097.222

35. REKLASIFIKASI AKUN

35. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2023 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2024, yaitu sebagai berikut:

Certain accounts in the consolidated financial statements for 2023 have been reclassified to conform with the consolidated financial statements presentation as of December 31, 2024 as follows:

	31 Desember 2023/December 31, 2023			STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME NET REVENUE COST OF SERVICES GROSS PROFIT OPERATING EXPENSES Marketing General and Administrative Other Income Other Expenses OPERATIONS PROFIT Finance Income Finance Costs INCOME BEFORE INCOME TAX INCOME TAX (EXPENSES) BENEFITS PROFIT FOR THE YEAR
	Dilaporkan Sebelumnya/ As Previously Reported	Direklasifikasi/ Reclassification	Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF	5.479.121.136.675	-	5.479.121.136.675	
PENDAPATAN BERSIH	(3.879.740.711.952)	198.951.266.514	(3.680.789.445.438)	
BEBAN POKOK LAYANAN	1.599.380.424.723		1.798.331.691.237	
LABA KOTOR				
BEBAN USAHA				
Pemasaran	(70.260.445.072)	-	(70.260.445.072)	
Umum dan Administrasi	(911.643.322.302)	(199.347.084.386)	(1.110.990.406.688)	
Pendapatan Lain-lain	628.728.086.809	-	628.728.086.809	
Beban Lain-lain	(326.225.776.820)	395.817.872	(325.829.958.948)	
LABA USAHA	919.978.967.338		919.978.967.338	
Pendapatan Keuangan	43.561.402.355	-	43.561.402.355	
Beban Keuangan	(261.648.866.909)	-	(261.648.866.909)	
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	701.891.502.784		701.891.502.784	
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	26.323.140.816	-	26.323.140.816	
LABA TAHUN BERJALAN	728.214.643.600		728.214.643.600	

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. INFORMASI SEGMENT

36. SEGMENT INFORMATION

	2024													
	Regional 1 Medan	Regional 2 Jakarta	Regional 3 Bandung	Regional 4 Semarang	Regional 5 Surabaya	Regional 6 Makassar	Kantor Pusat/ Head Office	Jumlah Induk/ Total Parent	Pos Finansial Indonesia	Pos Logistik Indonesia	Pos Properti Indonesia	Induk & Anak/ Parent & Subsidiaries	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasi/ Consolidated
Pendapatan/Revenues														
Pendapatan an Surat dan Paket Pos/ Revenue from Post Mail and Parcel	203.995	429.744	148.456	296.101	378.928	254.710	-	1.711.934	-	-	-	1.711.934	-	1.711.934
Pendapatan an Jasa Keuangan dan Ritel/ Revenue from Financial Service and Retail	220.129	153.509	124.757	129.358	198.055	234.719	-	1.060.527	24.433	-	-	1.084.960	(89.542)	995.418
Pendapatan an Properti/ Revenue from Property	814	539	330	977	4.601	153.675	10.164	171.100	-	-	207.679	378.779	(52.605)	326.174
Pendapatan an Logistik/ Revenue from Logistic	436.125	206.265	498.535	366.589	159.590	139.254	-	1.806.358	-	544.533	-	2.350.891	(254.562)	2.096.329
Pendapatan an Teknologi Informasi/ Revenue from Information Technology	-	-	-	-	-	-	-	-	74.025	-	-	74.025	-	74.025
Jumlah Pendapatan/ Total Revenue	861.063	790.057	772.078	793.025	741.174	782.358	10.164	4.749.919	98.458	544.533	207.679	5.600.589	(396.709)	5.203.880
Pendapatan an Lainnya/ Other Revenue	120.282	14.435	33.069	65.191	103.145	(48.185)	198.136	486.073	1.370	1.575	1.688	490.706	(25.836)	464.870
Jumlah Pendapatan Keuangan/ Total Financial Revenue	12.513	13.083	10.545	13.270	14.011	8.355	-	71.777	47	515	5.190	77.529	(45.997)	31.532
Jumlah/Total	993.858	817.575	815.692	871.486	858.330	742.528	208.300	5.307.769	99.875	546.623	214.557	6.168.824	(468.542)	5.700.282
Beban Pegawai/ Employee Expense	(435.118)	(594.557)	(269.001)	(282.366)	(417.495)	(346.838)	-	(2.345.375)	(10.029)	(67.071)	(62.365)	(2.484.840)	-	(2.484.840)
Beban Operasi/ Operating Expense	(213.692)	(242.730)	(129.228)	(167.060)	(236.873)	(224.132)	(1)	(1.213.716)	(59.909)	(441.728)	(79.319)	(1.794.672)	349.920	(1.444.752)
Beban Administrasi/ Administration Expense	(26.685)	(5.294)	(6.741)	(6.042)	(9.402)	(7.656)	-	(61.820)	(41)	(538)	(683)	(63.082)	-	(63.082)
Beban Umum/ General Expense	(51.320)	(56.009)	(40.016)	(44.527)	(69.295)	(62.939)	-	(324.106)	(1.990)	(15.907)	(10.589)	(352.592)	19.734	(332.858)
Beban Penurunan Nilai Aset Tetap/ Impairment of Fixed Asset Expense	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.279)	-	-	(4.279)	-	(4.279)
Beban Penyusutan dan Amortisasi/ Depreciation and Amortization Expenses	(29.686)	(26.233)	(20.038)	(21.187)	(23.418)	(20.802)	-	(141.364)	(22.272)	(17.451)	(12.995)	(194.082)	20.518	(173.564)
Beban Lainnya/ Other expenses	(3.376)	(3.728)	(3.174)	(3.375)	(2.854)	(1.890)	-	(18.397)	(898)	(3.421)	(2.839)	(25.555)	9.056	(16.499)
Beban Keuangan/ Finance Cost	(83.694)	(76.909)	(58.998)	(62.894)	(111.651)	(43.878)	-	(438.024)	(22)	(1.325)	(53)	(439.424)	176	(439.248)
Jumlah Beban/ Total Expense	(843.571)	(1.005.460)	(527.196)	(587.451)	(870.988)	(708.135)	(1)	(4.542.802)	(99.440)	(547.441)	(168.843)	(5.358.526)	399.404	(4.959.122)
Laba Sebelum Pajak/ Profit Before Tax	150.287	(187.885)	288.496	284.035	(12.658)	34.393	208.299	764.967	435	(818)	45.714	810.298	(69.138)	741.160

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)
As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

36. SEGMENT INFORMATION (Continued)

	2023										Eliminasi/ Elimination	Konsolidasi/ Consolidated	
	Regional 1 Medan	Regional 2 Jakarta	Regional 3 Bandung	Regional 4 Semarang	Regional 5 Surabaya	Regional 6 Makassar	Kantor Pusat/ Head Office	Jumlah Induk/ Total Parent	Pos Financial Indonesia	Pos Logistik Indonesia	Pos Properti Indonesia	Induk & Anak/ Parent & Subsidiaries	
Pendapatan/Revenues													
Pendapatan Surat dan Paket Pos/ Revenue from Post Mail and Parcel	205.118	541.391	158.321	301.876	438.343	248.824	-	1.893.873	-	-	-	1.893.873	1.893.873
Pendapatan Jasa Keuangan dan Ritel/ Revenue from Financial Service and Retail	265.108	170.771	153.869	165.372	232.210	250.922	-	1.238.252	23.325	-	-	1.261.577	1.256.535
Pendapatan Properti/ Revenue from Property	2.339	3.085	934	1.863	4.786	2.572	39.842	55.421	-	-	136.297	191.718	151.544
Pendapatan Logistik/ Revenue from Logistic	266.521	191.230	351.338	73.411	479.000	397.698	-	1.759.198	-	926.624	-	2.685.822	2.176.037
Pendapatan Teknologi Informasi/ Revenue from Information Technology	-	-	-	-	-	-	-	-	44.602	-	-	44.602	128
Jumlah Pendapatan/ Total Revenue	739.086	906.477	664.462	542.522	1.154.339	900.016	39.842	4.946.744	67.927	926.624	136.297	6.077.592	5.478.117
Pendapatan Lainnya/ Other Revenue	116.496	20.062	49.004	78.830	109.305	86.203	168.092	627.992	2.240	8.329	4	638.565	628.816
Jumlah Pendapatan Keuangan/ Total Financial Revenue	7.986	9.873	4.798	8.065	13.291	7.792	-	51.805	16	325	3.280	55.426	43.561
Jumlah/Total	863.568	936.412	718.264	629.417	1.276.935	994.011	207.934	5.626.541	70.183	935.278	139.581	6.771.583	6.150.494
Beban Pegawai/ Employee Expense	(469.960)	(494.101)	(283.710)	(317.642)	(492.962)	(387.751)	-	(2.446.126)	(8.284)	(71.325)	(33.094)	(2.558.829)	(2.558.829)
Beban Operasi/ Operating Expense	(263.420)	(290.800)	(197.168)	(203.689)	(379.123)	(313.581)	-	(1.647.781)	(59.482)	(816.614)	(40.294)	(2.564.171)	(1.972.645)
Beban Administrasi/ Administration Expense	(16.633)	(3.896)	(5.991)	(4.134)	(9.729)	(7.942)	-	(48.325)	(30)	(639)	(912)	(49.906)	(49.906)
Beban Umum/ General Expense	(61.699)	(66.393)	(50.733)	(30.644)	(80.824)	(58.583)	-	(348.876)	(50.708)	(20.590)	(8.680)	(428.854)	(428.596)
Beban Penyusutan dan Amortisasi/ Depreciation and Amortization Expenses	(22.894)	(16.022)	(12.592)	(13.971)	(25.821)	(22.836)	-	(114.136)	(6.352)	(17.364)	(10.016)	(147.868)	(140.387)
Beban Lainnya/ Other expenses	(3.006)	(5.558)	(2.729)	(2.384)	(4.997)	(3.943)	-	(22.617)	(5.278)	(848)	(1.407)	(30.150)	(30.150)
Beban Keuangan/ Finance Cost	(43.687)	(50.915)	(45.216)	(10.577)	(65.878)	(37.441)	-	(253.714)	(844)	(5.923)	(11.428)	(271.909)	(268.090)
Jumlah Beban/ Total Expense	(881.299)	(927.685)	(598.139)	(583.041)	(1.059.334)	(832.077)	-	(4.881.575)	(130.978)	(933.303)	(105.831)	(6.051.687)	(5.448.603)
Labu Sebelum Pajak/ Profit Before Tax	(17.731)	8.727	120.125	46.376	217.601	161.934	207.934	744.966	(60.795)	1.975	33.750	719.896	701.891

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

37. LITIGASI

PT Pos Properti Indonesia

- Perusahaan menggugat Sdr Widodo Iswantoro, SH., MH dan Dr. H. Fahmi, SH., MH berkenaan dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak memenuhi kewajibannya dalam pengembalian uang sebesar Rp3.190.000.000 ditambah bunga 2% setiap bulannya. Hal ini terdaftar dalam register perkara No.62/PDT.G/2023/PN.BDG di Pengadilan Negeri Bandung. Pada tanggal laporan keuangan perkara ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung.
- Perusahaan menggugat PT Berkah Aslin Mandiri dan Marta Jaya berkenaan dengan pembayaran ganti kerugian materiil dalam pengembalian atas sisa lahan seluas 5.232 m2 atau senilai Rp1.360.313.000. Hal ini terdaftar dalam register perkara No.80/PDT.G/2023/PN.CKR di Pengadilan Negeri Cikarang. Pada tanggal laporan keuangan, atas perkara ini majelis hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan PT Pos Properti Indonesia untuk sebagian;
 - Menyatakan Marta Jaya melakukan perbuatan wanprestasi;
 - Menghukum Marta Jaya untuk membayar ganti rugi kepada PT Pos Properti Indonesia sejumlah 3 Milyar.
- Pada tanggal 20 Februari 2024, PT Berkah Aslin Mandiri/ Marta Jaya melakukan upaya banding melalui sistem e-court, sehingga pada saat ini Putusan Pengadilan Negeri belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- Pada tahun 2024, terdapat lanjutan penanganan perkara perdata tingkat banding dengan nomor 188/PDT/2024/PT BDG.
- Pada tanggal 16 Desember 2024 sudah diterima Amar Putusan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon (Marta Jaya) Ditolak / yang berarti pada pokoknya kembali pada Putusan Tingkat Banding, sebagai berikut:
 1. Menyatakan Marta Jaya melakukan wanprestasi.
 2. Menghukum Marta Jaya membayar ganti rugi sebesar Rp1.360.313.000,- secara tunai dan sekaligus pada Pospro.
- Sebagai tambahan informasi bahwa saat ini Salinan Putusan Kasasi secara resmi belum diterima oleh Para Pihak, tindak lanjut dari pelaksanaan Putusan Kasasi (telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*) baru dapat diajukan permohonan ke Pengadilan oleh Pospro setelah Relas pemberitahuan putusan kasasi diterima oleh para pihak.
- Sampai dengan tanggal terbit laporan, penanganan perkara masih dalam proses minatusi oleh Majelis.

37. LITIGATION

PT Pos Properti Indonesia

- *The Company sued Mr. Widodo Iswantoro, S.H., M.H. and Dr. H. Fahmi, S.H., M.H. in connection with the act of default for not fulfilling its obligation to refund Rp3,190,000,000 plus 2% interest per month. This is registered in case register No.62/PDT.G/2023/PN.BDG at the Bandung District Court. At reporting date the case is still in process examined by the Panel of Judges at the Bandung Hight Court.*
- *The Company sued PT Berkah Aslin Mandiri and Marta Jaya regarding the payment of material compensation in return for the remaining land area of 5,232 m2 or worth Rp1,360,313,000. This is registered in case register No.80/PDT.G/2023/PN.CKR at the Cikarang District Court. At reporting date the case is still in process submitting conclusions from the parties in E-litigation.*
 - *Granting PT Pos Properti Indonesia's lawsuit in part;*
 - *Declare Marta Jaya to have committed an act of default;*
 - *Punish Marta Jaya to pay compensation to PT Pos Properti Indonesia in the amount of 3 billion.*
- *On February 20, 2024, PT Berkah Aslin Mandiri / Marta Jaya filed an appeal through the e-court system, so that at this time the District Court Decision does not yet have permanent legal force (inkracht).*
- *In 2024, there was continued handling of civil cases at the appellate level with number 188/PDT/2024/PT BDG.*
- *On December 16, 2024, the Decision on the Cassation Petition filed by the Applicant (Marta Jaya) was received, which means that it basically returns to the Appeal Level Decision, as follows:*
 1. *Declare Marta Jaya in default.*
 2. *Punish Marta Jaya to pay compensation of Rp1,360,313,000, - in cash and at once to Pospro.*
- *As additional information that currently the official copy of the Cassation Decision has not been received by the Parties, the follow-up to the implementation of the Cassation Decision (has been legally binding/inkracht) can only be submitted to the Court by Pospro after the notification of the cassation decision is received by the parties.*
- *As of the date of publication of the report, the handling of the case is still in the process of being minuted by the Tribunal.*

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

**PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)**

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

38. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

1. Berdasarkan RKAP 2024 untuk program kerja 13.1 penerbitan obligasi sebesar maksimal Rp1.500.000.000.000, telah dilakukan penerbitan instrumen utang dalam bentuk Sukuk. Bentuk penawaran instrumen utang dalam bentuk PUB (Penawaran Umum Berkelanjutan) yang terbagi menjadi PUB I tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Based on the 2024 RKAP for work program 13.1, the issuance of bonds of a maximum of Rp1,500,000,000,000, has been carried out in the form of Sukuk, a debt instrument issuance. The form of debt instrument offering is in the form of PUB (Continuous Public Offering) which is divided into PUB I in 2024 with the following details:

- | | | |
|---|---|---|
| a. Penerbit/Issuer | : | PT Pos Indonesia (Persero) |
| b. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah/Amount of Remaining Ijarah Reward | : | Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang akan ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), yang terbagi dalam 3 (tiga) seri yang akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)/The remaining amount of Ijarah Rewards that will be offered is a maximum of Rp1,000,000,000,000 (one trillion Rupiah), which is divided into 3 (three) series that will be guaranteed with Full Commitment: |
| | | i. Seri A: Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah/one billion rupiah) |
| | | ii. Seri B: Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah/seven hundred and fifty billion rupiah) |
| | | iii. Seri C: Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah/one hundred and fifty billion rupiah) |
| c. Jangka Waktu/Time Period | : | Seri A : 3 (tiga/three) tahun/years
Seri B : 5 (lima/five) tahun/years
Seri C : 7 (tujuh/seven) tahun/years |
| d. Cicilan Imbalan Ijarah/Ijarah Reward Installments | : | Seri A :Rp8.500.000.000 (delapan miliar lima ratus juta rupiah/eight billion five hundred million rupiah)
Seri B : Rp73.125.000.000 (tujuh puluh tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah/seventy three billion one hundred twenty five million rupiah)
Seri C : Rp14.850.000.000 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah/fourteen billion eight hundred and fifty million rupiah) |
| e. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah/ Ijarah Reward Installment Payment | : | Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan/Ijarah Reward Installments will be paid every 3 (three) months. |
| f. Hasil Pemeringkatan/Ranking Results | : | A(idn) (Single A) dari PT Fitch Ratings Indonesia/A(idn) (Single A) from PT Fitch Ratings Indonesia |

Penjatahan dilakukan pada tanggal 6 Januari 2025, good fund diterima pada tanggal 8 Januari 2025 pencatatan di BEI tanggal 9 Januari 2025.

Allotment was made on January 6, 2025, good funds were received on January 8, 2025, listing on the IDX on January 9, 2025.

2. Berdasarkan Akta Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. 16 Tanggal 20 Maret 2025 oleh Notaris Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn di Jakarta Selatan, para pemegang saham memutuskan untuk menetapkan perubahan jenis saham pada PT Pos Indonesia (Persero) yang semula tanpa Seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B dengan rincian sebagai berikut:

2. Based on the Deed of Notification of Amendment to the Articles of Association No. 16 dated March 20, 2025 by Notary Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn in South Jakarta, the shareholders decided to determine the change in the type of shares in PT Pos Indonesia (Persero) which were originally without a Series to consist of Series A Dwiwarna shares and Series B shares with the following details:

- a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.000.000; dan
- b. 455.022 (empat ratus lima puluh lima ribu dua puluh dua) saham seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp455.022.000.000 (empat ratus lima puluh lima miliar dua puluh dua juta).

- a. 1 (one) Series A Dwiwarna share with a total nominal value of Rp1,000,000; and
- b. 455,022 (four hundred fifty five thousand twenty two) series B shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (one million rupiah) or a total nominal value of Rp455,022,000,000 (four hundred fifty five billion twenty two million).

**PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)**

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

***PT POS INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (CONTINUED)***

As of and For the Year Ended December 31, 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**39. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Dewan Direksi bertanggung jawab atas persiapan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang telah diselesaikan dan disetujui pada tanggal 8 April 2025.

**39. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY AND APPROVAL
OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

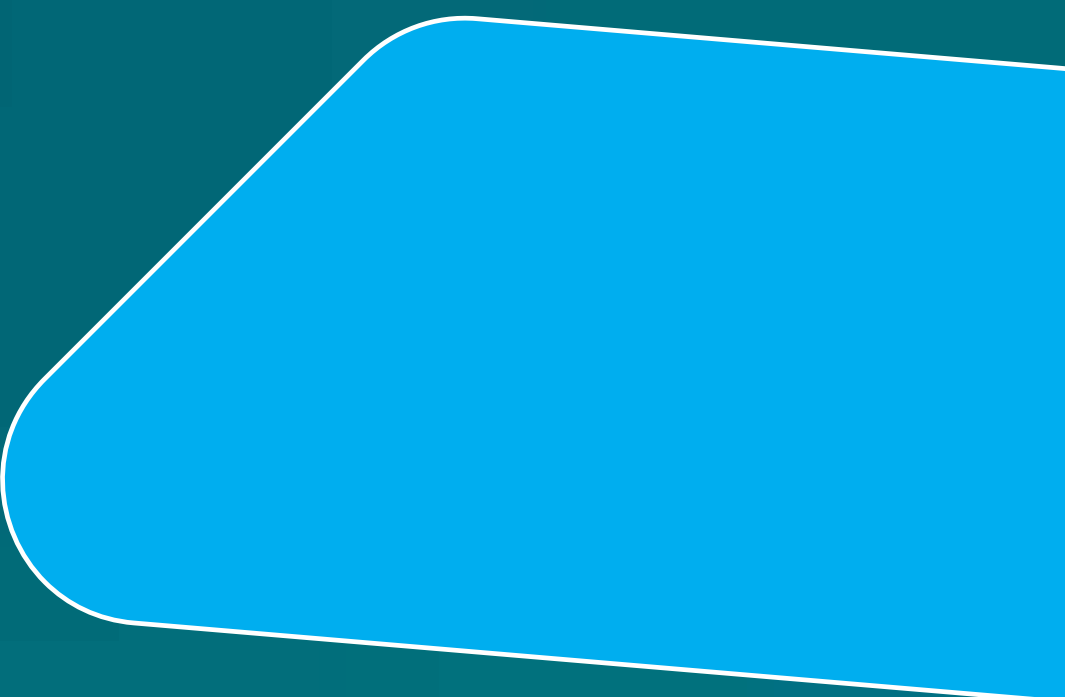
The Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of consolidated financial statements that have been completed and approved on April 8, 2025.

Halaman Sengaja di Kosongkan



POS iND

Logistik Indonesia





Lampiran B

Laporan Audit TJSL

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)

LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Tanggal Berakhir 31 Desember 2024

dan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)**

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN KEUANGAN

PADA DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024

LAPORAN POSISI KEUANGAN	1 -2
LAPORAN AKTIVITAS	3
LAPORAN ARUS KAS	4
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	5 - 29

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	2b,4	1.001.302.535	2.550.878.685
Piutang Pinjaman Mitra Binaan - Neto			
(Dikurangi penyisihan per 31 Desember 2024 dan 2023			
masing-masing sebesar Rp 53.955.456.441			
dan Rp 54.486.445.211)	2c,5	2.844.865.367	12.553.209.722
Piutang lain-lain	2f,6	226.450.565	497.047.669
Jumlah Aset Lancar		4.072.618.467	15.601.136.076
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang kerjasama PUMK kepada			
Mitra binaan - Neto (setelah dikurangi			
penyisihan penurunan nilai masing-masing			
sebesar Rp 340.959.722 dan Rp Nihil pada			
tanggal 31 Desember 2024 dan 2023)	7	27.093.473.397	7.636.781.699
Piutang kerjasama PUMK kepada			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8	9.709.645.067	16.457.234.567
Piutang Bermasalah - Neto	2d,2e,9		
(Dikurangi penyisihan per 31 Desember 2024 dan			
2023 masing-masing sebesar Rp 83.478.878.571			
dan Rp 83.619.365.739)		-	-
Aset tetap			
(Dikurangi akumulasi penyusutan per			
31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing			
sebesar Rp 1.862.847.578)	2h,10	1	1
Aset Takberwujud			
(Dikurangi akumulasi amortisasi per			
31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing			
sebesar Rp 394.999.999)	2i,11	1	1
Jumlah Aset Tidak Lancar		36.803.118.466	24.094.016.268
JUMLAH ASET		40.875.736.933	39.695.152.344

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN - Lanjutan
31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
LIABILITAS DAN ASET NETO			
Liabilitas Jangka Pendek			
Kelebihan Pembayaran Angsuran	2k,12	456.167.844	431.032.945
Utang Lain-lain	13	46.507.165	90.979.721
Jumlah Kewajiban		502.675.009	522.012.666
ASET NETO			
Aset Neto Tidak Terikat	2g,14	39.928.983.738	39.079.123.412
Jumlah Aset Neto		39.928.983.738	39.079.123.412
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		40.431.658.747	39.601.136.078

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
LAPORAN AKTIVITAS
 Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT			
PENDAPATAN	15		
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman		513.595.667	1.209.898.528
Pendapatan Bunga		5.748.443	5.587.990
Pendapatan Lain-lain		-	6.447.284
JUMLAH PENDAPATAN		519.344.110	1.221.933.802
BEBAN			
Beban Penyisihan Piutang pinjaman	16	(671.475.938)	1.815.863.320
Beban Penyisihan Piutang kolaborasi BRI		340.959.722	-
JUMLAH BEBAN		(330.516.216)	1.815.863.320
KENAIKAN ASET NETO TIDAK TERIKAT		849.860.326	(593.929.518)
ASET NETO AWAL TAHUN		39.079.123.412	39.673.052.930
ASET NETO AKHIR TAHUN	14	39.928.983.738	39.079.123.412

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan pengembalian pinjaman			
Mitra Binaan Umum		10.239.333.125	14.673.164.818
Penerimaan piutang lain-lain jangka pendek		270.597.104	1.223.226.682
Penerimaan pendapatan jasa			
administrasi pinjaman		513.595.667	1.209.898.528
Penerimaan pengembalian pinjaman Mitra			
Binaan bermasalah		140.487.168	101.714.665
Penerimaan kelebihan angsuran		25.134.899	26.667.833
Penerimaan pendapatan lainnya		-	6.447.284
Penerimaan pendapatan bunga jasa giro		5.748.443	5.587.990
(Pembayaran) penambahan utang lain-lain		(44.472.556)	(72.760.669)
Pembayaran penyaluran kolaborasi BRI		<u>(12.700.000.000)</u>	<u>(17.000.000.000)</u>
Arus Kas Bersih Diperoleh dari			
(Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		<u>(1.549.576.150)</u>	<u>173.947.131</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH			
KAS DAN SETARA KAS		<u>(1.549.576.150)</u>	<u>173.947.131</u>
KAS DAN BANK AWAL TAHUN		<u>2.550.878.685</u>	<u>2.376.931.554</u>
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	3	<u><u>1.001.302.535</u></u>	<u><u>2.550.878.685</u></u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

a. Latar Belakang Pendirian

Kantor pos pertama di Indonesia didirikan di Batavia oleh Gubernur Jenderal GW Baron pada tanggal 26 Agustus 1746 yang pada waktu itu bernama Jawatan PTT. Terjadi pengambilalihan Kantor Pusat PTT di Bandung oleh Angkatan Muda PTT dari pemerintah militer Jepang. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Bakti Postel. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 240 Tahun 1961, status Jawatan PTT berubah menjadi Perseroan Negara (PN) Pos dan Telekomunikasi. Pada tahun 1965, PN Pos dan Telekomunikasi dibagi dua menjadi PN Pos dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965 dan PN Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1965. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1978 mengubah status PN Pos dan Giro menjadi Perseroan Umum (Perum) Pos dan Giro. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 tanggal 27 Februari 1995, Perum Pos dan Giro yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1984 dialihkan bentuknya menjadi Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara. Anggaran Dasar disusun sesuai dengan materi yang digariskan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1995.

Bidang usaha Perusahaan sangat beragam antara lain:

- a. Usaha jasa pos dan giro.
- b. Usaha-usaha lain yang menunjang penyelenggaraan usaha jasa pos dan giro sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PT Pos Indonesia (Persero) ("Perusahaan") merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang *Postal Services*, yaitu surat, paket dan jasa keuangan. Sebagai BUMN, PT Pos Indonesia (Persero) berkewajiban ikut berperan serta menunjang program pemerintah dalam rangka melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk pemberdayaan masyarakat serta mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui usaha mandiri serta pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja. Selain itu, kegiatan TJSL diharapkan dapat memberikan kesempatan berusaha bagi usaha kecil dan koperasi, dan menjalankan tanggung jawab sosial korporat terhadap komunitas di lingkungannya.

Program ini digulirkan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1983 yang telah diamanatkan kepada semua BUMN untuk dapat turut membantu pengembangan usaha kecil dan sebagai tindak lanjutnya telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1232/KMK.013/1989, tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil oleh BUMN yang kemudian disusul dengan Surat Keputusan ("SK") Menteri Keuangan No.316/XMX.016/1994, tanggal 27 Juni 1994, tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ("PUKK") melalui pemanfaatan laba BUMN.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM – Lanjutan

a. Latar Belakang Pendirian - Lanjutan

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan didirikan pada tahun 1994 berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro No. 222/PEG/DIRUTPOS/1994 tanggal 28 Desember 1994 dengan nama Gugus Bina Mitra Pos. Berdasarkan Keputusan Direksi No.45/DIRUT/0803 tanggal 21 Agustus 2003 nama program diubah menjadi Unit Pembinaan Kemitraan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK). Kemudian pada tahun 2006 diubah kembali menjadi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (TJSL) sesuai dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No.65/DIRUT/1106 tanggal 10 November 2006. Selanjutnya pada tahun 2007 berdasarkan Keputusan Direksi No.45/DIRUT/0807 tanggal 31 Agustus 2007 Unit PKBL berubah nama menjadi Divisi PKBL.

Pada tanggal 17 Juni 2003, Menteri BUMN Republik Indonesia mengeluarkan SK Menteri No. 236/MBU/2003, tentang Program Kemitraan dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN Republik Indonesia No. SE-433/MBU/2003, tanggal 16 September 2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan, yang saat ini disebut dengan PKBL. Peraturan ini kemudian disempurnakan oleh Surat Keputusan Menteri No. 05/MBU/2007, tanggal 27 April 2007.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 yang kemudian mengalami beberapa perubahan. Perubahan selanjutnya dimuat dalam PER-02/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, pada Bab II pasal 2 ayat (2) berbunyi: "Perseroan Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)". Perubahan terakhir dimuat dalam PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Bab II Pasal 2: BUMN wajib melaksanakan Program TJSL BUMN dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. Pelaksanaan Bina Lingkungan diatur dalam Surat Edaran No. SE.29/DIR-6/0519 tanggal 17 Mei 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan *Corporate Social Responsibility* PT Pos Indonesia (Persero).

Pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, penamaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tidak dipakai lagi dan menjadi Program Tanggung Jawab Sosial (TJSL). Kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/09/2022 tanggal 8 September 2022 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya perubahan terakhir pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berdomisili di Jalan Banda No. 30 Telp. (022) 4213640 Fax. (022) 87805094 Bandung 40115.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM - Lanjutan

a. Latar Belakang Pendirian - Lanjutan

Maksud dan tujuan didirikannya Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah:

1. Merupakan wujud tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya atau lebih dikenal Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah bentuk konkrit BUMN dalam memberdayakan masyarakat agar tumbuh lebih mandiri dan diharapkan hubungan dengan para *stakeholders* menjadi lebih baik dan langgeng sehingga kelangsungan usaha Perusahaan dapat terjaga.
2. Untuk meningkatkan kemampuan tata kelola usaha para pengusaha kecil, menengah dan Koperasi yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan mereka untuk mandiri, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan sekaligus dapat menciptakan iklim usaha yang sehat, inovatif dan dinamis bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
3. Untuk menciptakan hubungan saling menunjang antara PT Pos Indonesia (Persero), dengan para pengusaha kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha mereka dan jangkauan layanan PT Pos Indonesia (Persero) dalam berbagai layanan jasa pos tel dan keuangan yang semakin luas.
4. Perbaikan mutu SDM di sekitar Perusahaan melalui Program Bina Lingkungan seperti pendidikan dan penelitian, peningkatan kesehatan dan pelestarian lingkungan.
5. Membantu masyarakat setempat yang berlokasi di sekitar Perusahaan, melalui bantuan sosial kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan dan sarana peribadatan.

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“PUMK”)

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari BUMN Pembina untuk disalurkan kepada usaha kecil dengan syarat-syarat berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000.
2. Milik Warga Negara Indonesia.
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
4. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi.
5. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.
6. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan.
7. Belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*) atau lembaga keuangan non bank.

Ketentuan sebagaimana nomor 7 (tujuh), tidak berlaku bagi usaha kecil yang baru dibentuk atau berdiri atas inisiatif BUMN Pembina sebagai bagian dari PUMK BUMN Pembina.

Bentuk dan status bantuan dan pembinaan dalam Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
- b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM - Lanjutan

a. Latar Belakang Pendirian - Lanjutan

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“PUMK”) - Lanjutan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Pasal 22, memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Program Pendanaan UMK dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Pinjaman tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek paling lama 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Modal kerja yang diberikan dalam bentuk pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki besaran jasa administrasi sebesar:
 - a. 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun;
 - b. Suku bunga flat yang setara dengan 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun; atau
 - c. Ketentuan lain yang ditetapkan Menteri, dengan jangka waktu/tenor pinjaman paling lama 3 (tiga) tahun.
- 3) Apabila pembiayaan dalam bentuk syariah diberikan berdasarkan:
 - a. Prinsip jual beli, maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar jasa administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - b. Prinsip bagi hasil, maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN adalah mulai dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) berdasarkan perjanjian.

b. Susunan Pengurus dan Pengawas

Agar tujuan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat tercapai seperti yang diinginkan, maka perlu dibentuk Divisi tersendiri yang bertugas khusus melaksanakan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil atau selanjutnya disebut sebagai Divisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perusahaan secara keseluruhan dengan satuan gugus tugas di bawah ini:

- a. TJSL melakukan fungsi pembinaan (evaluasi, penyaluran, penagihan, pelatihan, monitoring, promosi dan lainnya termasuk fungsi administrasi dan keuangan).
- b. TJSL dibentuk dengan memperhatikan jumlah dana yang dikelola, luas wilayah binaan dan jumlah mitra binaan serta mempertimbangkan kondisi Perusahaan.
- c. TJSL bertanggung jawab langsung kepada Direksi Perusahaan yang ditetapkan dalam rapat Direksi, sedangkan karyawan yang ditunjuk untuk menangani divisi TJSL memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan karyawan lain di BUMN Pembina yang bersangkutan.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM - Lanjutan

b. Susunan Pengurus

Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada PT Pos Indonesia (Persero) di bawah Divisi PKBL PT Pos Indonesia (Persero), dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 222/PEG/DIRUTPOS/1994 tanggal 28 Desember 1994 dengan nama Gugus Bina Mitra Pos. Keputusan tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: KD.013/DIRUT/0323 tanggal 1 Maret 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja di PT Pos Indonesia (Persero).

Sesuai dengan Surat Sekretaris Perusahaan tanggal 26 Mei 2017 Nomor: 1946/SETPER- 1/0517 terdapat pemberitahuan perubahan nomenklatur Direksi menjadi Direktorat Jaringan, Ritel, dan Sumber Daya.

Pada tanggal 21 Januari 2019, terdapat perubahan berdasarkan keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.008/DIRUT/0119 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divisi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Pada tanggal 12 Juli 2019, terdapat perubahan berdasarkan surat Nomor: KD.59/DIRUT/0719 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) dan Nomor: KD.72/DIRUT/0718 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pos Indonesia (Persero).

Pada tanggal 20 Oktober 2021, terdapat perubahan berdasarkan keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.103/DIRUT/1021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Pos Indonesia (Persero).

Pada tanggal 30 Desember 2021, terdapat keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.123/DIRUT/1221 tentang Pembentukan Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT Pos Indonesia (Persero).

Pada tanggal 1 Maret 2023, terdapat keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.013/DIRUT/0323 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pos Indonesia (Persero).

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM - Lanjutan

b. Susunan Pengurus - Lanjutan

	2024	2023
Anggota Direksi		
Direktur Pembina :	Faizal Rochmad Djoemadi	Faizal Rochmad Djoemadi
<i>Corporate Secretary</i> :	Tata Sugiarta	Tata Sugiarta
Vice President Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan :	Salman	Salman
Manajer Perencanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan :	Yadi Haryadi	Robertus Edhie Prijo
Manajer Pengawasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan :	Ady Chandra	Wardono
Manajer Operasional Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan :	Nur Zamaludin	Selo Edi
FP Akuntansi :	Dessyana	Yadi Haryadi
FP Akuntansi :	Kusumatresna	Dessyana
FP Administrasi Mitra Binaan :	Budy Eriawan	Kusumatresna
FP Verifikasi dan Data Entry :	Yana Dwi Santana	Budy Eriawan
FP Pengelola SIM TJSL :	Rifat Ari Azhar	Yana Dwi Santana
FP Pelatihan dan Pendaringan :	Dudin Saripudin	Rifat Ari Azhar
FP Keuangan dan Bina Lingkungan :	Erni Patmawati	Dudin Saripudin
FP Perencanaan :	Gemilau Aida	Erni Patmawati
		-

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Pos Indonesia (Persero) diselenggarakan di 6 (enam) kantor regional yang terbagi dalam 26 unit daerah yang berkedudukan di kantor Regional dan KCU yang berkedudukan di Ibukota Provinsi. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan memiliki masing-masing sejumlah 43 dan 46 karyawan.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam mengelola Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan di PT Pos Indonesia (Persero) mengacu pada Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SE-02/NBU/WK/2012, tanggal 23 Februari 2012, tentang Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dan SE-01/D5.MBU/2012, tanggal 17 Maret 2012, tentang Petunjuk Teknis Penerapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Revisi 2012.

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Revisi 2012, dimaksudkan agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (ISAK 35), serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Basis akuntansi dalam menyusun laporan keuangan menggunakan dasar akrual.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun menggunakan dasar akrual kecuali laporan arus kas disusun menggunakan dasar kas dengan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang disusun menggunakan metode langsung (*direct method*).

b. Kas dan Bank

Kas dan bank terdiri dari uang kas dan uang yang ada di bank yang tidak dibatasi penggunaannya.

c. Piutang Pinjaman Mitra Binaan

Piutang Pinjaman Khusus dan Umum

Piutang pinjaman khusus dan umum pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya historis dan diamortisasi, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang. Penyisihan penurunan nilai piutang dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo piutang.

Pemberian pinjaman kepada Mitra Binaan dicatat sebagai piutang sebesar pokok pinjaman dan akrualisasi jasa administrasi pinjaman dengan status lancar dan kurang lancar setelah jatuh tempo, tapi tidak diakrual untuk status piutang diragukan.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL - Lanjutan

c. Piutang Pinjaman Mitra Binaan - Lanjutan

Piutang Pinjaman Mitra Binaan disajikan sebesar jumlah bersih dalam Laporan Posisi Keuangan pada kelompok Aset Lancar yang diharapkan dapat ditagih dari Mitra Binaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, pengelolaan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

- a. **Lancar** apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau tidak terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi yaitu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
- b. **Kurang lancar** apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
- c. **Diragukan** apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
- d. **Macet** apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Penyaluran pinjaman kepada mitra binaan dicatat sebagai piutang sebesar nilai pokok pinjaman yang diberikan dikurangi dengan penerimaan angsuran pokok pinjaman. Jasa administrasi dari pinjaman akan dicatat sebagai penghasilan/pendapatan pada periode diterimanya pendapatan tersebut.

Pada Peraturan sebelumnya pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 Pasal 12 yang berlaku pada periode tersebut memiliki besaran jasa administrasi sebesar 6% (enam persen) pertahun dengan jangka waktu/tenor pinjaman maksimal selama 3 (tiga) tahun, dan telah berganti dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, besarnya jasa administrasi pinjaman dapat dirinci sebagai berikut:

- Modal kerja yang diberikan dalam bentuk pinjaman memiliki besaran jasa administrasi sebesar 3% (tiga persen) efektif per tahun dengan suku bunga *flat* (tetap) yang setara dengan 3% (tiga persen) efektif per tahun.
- Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar jasa administrasi.
- Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (10:90) sampai dengan paling banyak 50% (50:50) berdasarkan perjanjian.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL - Lanjutan

d. Piutang Pinjaman Bermasalah

Pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya dengan cara penjadwalan kembali (*Rescheduling*) dan pengkondisian kembali (*Reconditioning*) namun tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aset lain-lain dengan nama akun Piutang Pinjaman Bermasalah.

e. Penyisihan Penurunan Nilai Piutang

1) Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Mitra Binaan

Penyisihan piutang pinjaman adalah besarnya penyisihan atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih. Penyisihan piutang pinjaman yang dilakukan pada akhir tahun dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yaitu secara kolektif berdasarkan persentase tingkat ketertagihan data historis yang ada (minimal 2 tahun). Penyisihan piutang pinjaman Mitra Binaan dihitung dan dicatat sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas pinjaman yaitu:

Kualitas Pinjaman				
Piutang	Jangka Waktu	2024	2023	
Lancar	0-30 hari	0,65 %	0,98%	
Kurang Lancar	31-60 hari	2,02 %	3,23%	
Ragu-ragu	61-270 hari	6,55 %	9,43%	
Macet	di atas 270 hari	100,00%	100,00%	

2) Alokasi Penyisihan Piutang Pinjaman Bermasalah

Alokasi pembentukan penyisihan piutang pinjaman bermasalah diukur dan dicatat sebesar 100% dari saldo piutang pinjaman bermasalah.

Alokasi pembentukan penyisihan piutang pinjaman bermasalah disajikan dalam laporan posisi keuangan pada kelompok akun Aset Lain-lain sebagai pengurang piutang pinjaman bermasalah.

Tata cara penghapusbukuan piutang pinjaman bermasalah mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN.

f. Piutang Lain-lain

Piutang lain-lain adalah piutang yang tidak dapat dikelompokkan pada kategori piutang di atas. Termasuk piutang lain-lain adalah panjar dan piutang pendapatan jasa pinjaman.

g. Aset Neto

Aset Neto dinyatakan bahwa tidak ada pemisahan aset neto tidak terikat dan aset neto terikat.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL - Lanjutan

h. Aset Tetap

Aset tetap diakui berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap.

Biaya perolehan mencakup pengeluaran untuk pengadaan baru dan pengeluaran untuk perbaikan, penggantian, atau pemugaran sepanjang dapat meningkatkan daya guna aset tetap dan jumlahnya signifikan. Termasuk juga dalam biaya perolehan adalah Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aset tetap tersebut yang tidak dapat dikreditkan atau tidak dikreditkan oleh Perusahaan.

Jenis Aset	Metode Penyusutan	Tarif
Inventaris Kantor	Garis Lurus	25,0%
Kendaraan	Garis Lurus	12,5%

i. Aset Takberwujud

Aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah diukur pada pengakuan awal pada biaya. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi penurunan nilai, jika ada. Aset takberwujud yang dihasilkan secara internal, termasuk biaya pengembangan, tidak dikapitalisasi dan pengeluaran tercermin dalam laporan laba rugi pada tahun di mana pengeluaran tersebut terjadi.

Masa manfaat dari aset takberwujud dinilai sebagai terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas diamortisasi selama masa manfaat ekonomis dan dinilai untuk penurunan nilai apabila terdapat indikasi bahwa aset takberwujud mungkin terganggu. Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat yang terbatas ditinjau setidaknya pada setiap akhir periode pelaporan.

j. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang masih harus dibayar diakui pada saat diterimanya jasa/prestasi selama tahun berjalan tetapi belum dilakukan pembayaran. Biaya yang masih harus dibayar diukur dan dicatat sebesar jumlah biaya tahun berjalan yang belum dibayar.

k. Kelebihan Pembayaran Angsuran

Kelebihan pembayaran angsuran adalah penerimaan angsuran yang melebihi saldo piutang Mitra Binaan. Kelebihan pembayaran angsuran disajikan dalam laporan posisi keuangan pada kelompok liabilitas jangka pendek. Kelebihan pembayaran angsuran akan dikembalikan kepada Mitra Binaan sebagai restitusi.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL - Lanjutan

l. Angsuran Belum Teridentifikasi

Angsuran belum teridentifikasi adalah penerimaan angsuran yang belum dapat diklasifikasi atau diidentifikasi nama Mitra Binaannya sampai dengan tanggal laporan keuangan. Angsuran belum teridentifikasi disajikan dalam Laporan posisi keuangan sebagai liabilitas jangka pendek.

m. Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman

Pendapatan jasa administrasi pinjaman diakui secara akrual. Pendapatan jasa administrasi pinjaman diukur dan dicatat sebesar nilai yang telah jatuh tempo yang disesuaikan dengan kontrak. Jasa administrasi pinjaman diakui secara akrual hanya pada piutang dengan status lancar dan kurang lancar.

n. Perpajakan

Seluruh perpajakan yang terkait dengan Program Pendanaan UMK menjadi beban atau tanggung jawab BUMN Pembina dan dilaporkan atas nama Perum Perhutani.

o. Dana Pembinaan Kemitraan

Merupakan jumlah dana yang dibayarkan dalam rangka pelaksanaan pembinaan kemitraan, antara lain untuk bantuan pendidikan, pelatihan, promosi, pameran, pengkajian dan penelitian serta kegiatan lain.

p. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Program Pendanaan UMK Perum Perhutani melakukan transaksi dengan pihak-pihak seperti yang didefinisikan dalam SAK ETAP tentang “Pengungkapan Pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa”, yang didefinisikan antara lain:

- 1) Pihak yang memiliki pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas entitas;
- 2) Personel manajemen kunci dari entitas; dan
- 3) Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

a. Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Program Pendanaan UMK, Pengelola telah membuat pertimbangan-pertimbangan dan estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan.

Implementasi Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 dan Perubahannya sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020.

Peraturan tersebut mensyaratkan bahwa beban operasional Program Pendanaan UMK menjadi beban Perum Perhutani selaku BUMN Pembina. Dengan demikian, beban tersebut tidak dicatat oleh Program Pendanaan UMK dalam laporan aktivitas.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI - Lanjutan

b. Estimasi dan Asumsi

Penyisihan Penurunan Nilai Pinjaman

Program Pendanaan UMK mengevaluasi adanya bukti objektif atas piutang yang mengalami penurunan nilai pada tiap akhir periode pelaporan. Penyisihan penurunan nilai dilakukan secara kolektif yang mencerminkan jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Penyisihan penurunan nilai pinjaman secara kolektif dihitung berdasarkan kajian nilai terkini dan historis tingkat ketertagihan dari pinjaman, berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada.

4. KAS DAN BANK

Kas dan bank terdiri dari uang kas dan uang di bank yang tidak dibatasi penggunaannya. Seluruh kas dan bank merupakan penempatan giro di PT Pos Indonesia (Persero) unit operasional PT Pos Indonesia TJSL. Rincian saldo kas dan bank per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Kas		
Kas Program Pendanaan UMK	<u>541.017</u>	<u>7.989.370</u>
Bank		
Program Pendanaan UMK		
Giro Pos Program (Pendanaan UMK)	962.254.973	1.822.549.959
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Program Pendanaan UMK	<u>38.506.545</u>	<u>720.339.356</u>
Jumlah kas di bank	<u>1.000.761.518</u>	<u>2.542.889.315</u>
Jumlah Kas dan Bank	<u><u>1.001.302.535</u></u>	<u><u>2.550.878.685</u></u>

5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN - NETO

Rincian piutang pinjaman Mitra Binaan adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Piutang pinjaman mitra binaan	56.800.321.808	67.039.654.933
Penyisihan atas kerugian penurunan nilai	<u>(53.955.456.441)</u>	<u>(54.486.445.211)</u>
Jumlah	<u><u>2.844.865.367</u></u>	<u><u>12.553.209.722</u></u>

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN – NETO - Lanjutan

a. Rincian saldo piutang pinjaman Mitra Binaan berdasarkan sektor usaha mitra sebagai berikut:

	2024	2023
Sektor Perdagangan	29.571.805.330	35.295.856.088
Sektor Jasa	10.876.173.043	13.574.966.777
Sektor Industri	9.423.183.961	10.189.166.975
Sektor Perikanan	2.305.079.821	2.690.242.431
Sektor Peternakan	1.938.169.217	2.213.214.432
Sektor Pertanian	779.206.618	886.072.728
Sektor Perkebunan	760.854.903	929.978.087
Sektor Lainnya	1.145.848.915	1.260.157.415
Sub Jumlah	56.800.321.808	67.039.654.933
Penyisihan penurunan nilai Piutang	(53.955.456.441)	(54.486.445.211)
Jumlah	2.844.865.367	12.553.209.722

b. Rincian saldo piutang pinjaman Mitra Binaan berdasarkan daerah Mitra Binaan sebagai berikut:

	2024	2023
Nanggroe Aceh Darussalam	2.615.885.442	3.466.377.953
Sumatera Utara	2.088.913.905	2.247.175.612
Sumatera Barat	1.488.929.865	1.630.495.584
Riau	2.851.469.105	2.941.741.105
Jambi	877.857.967	1.121.384.274
Bengkulu	2.436.248.839	2.879.174.547
Sumatera Selatan	2.631.246.183	3.146.719.475
Lampung	455.491.011	649.985.788
DKI Jakarta	3.825.830.354	4.048.248.217
Jawa Barat	6.837.297.331	10.097.786.148
Jawa Tengah	1.547.137.181	1.786.788.624
DI Yogyakarta	799.238.879	1.030.011.163
Jawa Timur	1.933.622.927	2.316.450.235
Bali	704.617.173	968.009.673
Nusa Tenggara Barat	1.722.963.337	2.135.874.231
Sub Jumlah	32.816.749.499	40.466.222.629

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN – NETO - Lanjutan

b. Rincian saldo piutang pinjaman Mitra Binaan berdasarkan daerah Mitra Binaan sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo pindahan	32.816.749.499	40.466.222.629
Nusa Tenggara Timur	1.568.957.464	1.736.034.737
Kalimantan Barat	3.867.073.861	4.175.032.754
Kalimantan Tengah	1.749.857.713	1.851.749.841
Kalimantan Timur	1.038.071.067	1.191.620.768
Kalimantan Selatan	1.524.922.068	1.653.979.782
Sulawesi Utara	3.324.076.101	4.264.316.224
Sulawesi Tengah	2.375.005.281	2.515.701.281
Sulawesi Tenggara	3.118.977.153	3.343.413.461
Sulawesi Selatan	2.870.866.969	3.158.135.969
Maluku	1.121.097.974	1.178.662.885
Batam	262.733.777	342.851.721
Papua	1.161.932.881	1.161.932.881
Sub Jumlah	56.800.321.808	67.039.654.933
Penyisihan penurunan piutang mitra binaan	(53.955.456.441)	(54.486.445.211)
Jumlah	2.844.865.367	12.553.209.722

c. Rincian saldo piutang pinjaman Mitra Binaan berdasarkan daerah Mitra Binaan sebagai berikut:

	2024	2023
Lancar	2.012.289.176	8.030.985.381
Kurang lancar	550.344.830	2.757.568.084
Diragukan	327.953.180	2.133.450.880
Macet	53.909.734.622	54.117.650.588
Jumlah piutang pinjaman Mitra Binaan	56.800.321.808	67.039.654.933
Penyisihan penurunan piutang mitra binaan	(53.955.456.441)	(54.486.445.211)
Jumlah	2.844.865.367	12.553.209.722

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN – NETO - Lanjutan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-06/MBU/09/2022 dan PER-1/MBU/03/2023 tingkat suku bunga/jasa administrasi penyaluran Program Pendanaan UMK dikenakan sebesar 3% per tahun terhitung sejak tanggal 8 September 2022 dan 3 Maret 2023.

Rincian saldo Alokasi Penyisihan Piutang Pinjaman Mitra Binaan berdasarkan tingkat kolektibilitas sebagai berikut:

Kualitas Pinjaman	Umur Piutang	Saldo Piutang	Persentase Penyisihan	31 Desember 2024		Beban (Pemulihan) Penyisihan
				Alokasi Penyisihan		
				2024	2023	
Lancar	0-30 hari	2.012.289.176	0,65%	13.159.935	78.562.180	(65.402.245)
Kurang Lancar	31-60 hari	550.344.830	2,02%	11.094.570	89.108.463	(78.013.893)
Diragukan	61-270 hari	327.953.180	6,55%	21.467.314	201.123.980	(179.656.666)
Macet	di atas 270 hari	53.909.734.622	100,00%	53.909.734.622	54.117.650.588	(207.915.966)
Jumlah		56.800.321.808		53.955.456.441	54.486.445.211	(530.988.770)

Kualitas Pinjaman	Umur Piutang	Saldo Piutang	Persentase Penyisihan	31 Desember 2023		Beban (Pemulihan) Penyisihan
				Alokasi Penyisihan		
				2023	2022	
Lancar	0-30 hari	8.030.985.381	0,98%	78.562.180	124.754.055	(46.191.875)
Kurang Lancar	31-60 hari	2.757.568.084	3,23%	89.108.463	143.342.531	(54.234.068)
Diragukan	61-270 hari	2.133.450.880	9,43%	201.123.980	142.638.491	58.485.489
Macet	di atas 270 hari	54.117.650.588	100,00%	54.117.650.588	52.158.132.150	1.959.518.438
Jumlah		67.039.654.933		54.486.445.211	52.568.867.227	1.917.577.984

Mutasi penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan:

	2024	2023
Saldo Awal	54.486.445.211	52.568.867.227
Pemulihan piutang mitra binaan	(530.988.770)	1.917.577.984
Saldo Akhir	53.955.456.441	54.486.445.211

Pengelola Program Pendanaan UMK berkeyakinan bahwa penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang yang telah dibentuk telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang pinjaman mitra binaan tersebut.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Merupakan kelebihan pembayaran angsuran-angsuran tahun 2023 dan 2022 yang masing-masing senilai:

	2024	2023
Uang Muka Operasional	147.482.072	242.446.431
Uang Muka Operasional CSR	78.968.493	254.601.238
Jumlah	226.450.565	497.047.669

Uang muka operasional pada tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp 147.482.072 dan Rp 242.446.431 merupakan biaya operasional yang dibiayai oleh Perusahaan.

Uang muka operasional CSR pada tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp 78.968.493 dan Rp 254.601.238 merupakan biaya CSR.

7. PIUTANG KERJASAMA PUMK KEPADA MITRA BINAAN - BERSIH

Saldo piutang jangka panjang yang merupakan saldo penyaluran dana PUMK kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan piutang pendapatan jasa administrasi atas penyaluran dana PUMK tersebut per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai:

	2024	2023
Saldo awal	7.636.781.699	-
Penyaluran dana oleh BRI kepada mitra binaan	25.345.100.000	9.182.000.000
Pengembalian piutang Mitra Binaan yang diterima BRI	(5.582.308.610)	(1.545.218.301)
Jumlah Piutang	27.399.573.089	7.636.781.699
Akumulasi penyisihan penurunan piutang mitra binaan	(340.959.722)	-
Jumlah Piutang - setelah penyisihan	27.058.613.367	7.636.781.699
Piutang atas akrual jasa administrasi	34.860.030	-
Jumlah piutang mitra binaan - kerjasama BRI	27.093.473.397	7.636.781.699

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PIUTANG KERJASAMA PUMK KEPADA MITRA BINAAN – BERSIH - Lanjutan

Rincian piutang kerjasama PUMK kepada mitra binaan - bersih per sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Industri	1.168.544.620	793.838.721
Jasa dunia usaha	3.394.593.334	1.831.520.299
Konstruksi	25.404.758	50.000.000
Lain-lain	14.761.845.934	149.939.449
Pengangkutan	144.514.494	108.083.600
Perdagangan, hotel, dan restoran	7.253.222.939	4.246.279.890
Pertanian	651.447.010	447.119.740
Sosial Masyarakat	-	10.000.000
Jumlah Piutang - setelah penyisihan	27.399.573.089	7.636.781.699
Akumulasi penyisihan penurunan piutang mitra binaan	(340.959.722)	-
Jumlah Piutang - setelah penyisihan	27.058.613.367	7.636.781.699
Piutang atas akrual jasa administrasi	34.860.030	-
Jumlah piutang mitra binaan - kerjasama BRI	27.093.473.397	7.636.781.699
Mutasi penyisihan atas kerugian penurunan nilai:		
	2024	2023
Saldo awal	-	-
Penambahan	340.959.722	-
Pemulihan	-	-
Saldo akhir	340.959.722	-

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PIUTANG KERJASAMA PUMK KEPADA MITRA BINAAN – BERSIH - Lanjutan

Rincian piutang kerjasama kepada mitra binaan - bersih berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

31 Desember 2024				
Kolektibilitas	Jumlah Piutang	Tarif Penyisihan	Penyisihan	Setelah Penyisihan Penurunan Nilai Piutang
Lancar	26.743.717.656	0,56%	148.927.214	26.594.790.442
Kurang Lancar	330.890.562	9,47%	31.341.043	299.549.519
Diragukan	186.859.338	12,09%	22.585.932	164.273.406
Macet	138.105.533	100,00%	138.105.533	-
Jumlah	<u>27.399.573.089</u>		<u>340.959.722</u>	<u>27.058.613.367</u>
31 Desember 2023				
Kolektibilitas	Jumlah Piutang	Tarif Penyisihan	Penyisihan	Setelah Penyisihan Penurunan Nilai Piutang
Lancar	7.611.155.807	0%	-	7.611.155.807
Kurang Lancar	25.625.892	0%	-	25.625.892
Diragukan	-	0%	-	-
Macet	-	100%	-	-
Jumlah	<u>7.636.781.699</u>		<u>-</u>	<u>7.636.781.699</u>

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PIUTANG KEPADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Berdasarkan surat Kementerian BUMN Nomor: S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 perihal Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“Kerja Sama Program PUMK”) yang telah ditindaklanjuti kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Pos Indonesia (Persero) dengan Nomor Surat BRI: PKS B 53/BMD/12/2022 dan Nomor Surat Pos Indonesia: PKS.266/DIR-6/1222 tanggal 20 Desember 2022 tentang Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, jangka waktu perjanjian selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani. Berita Acara Penyetoran Dana Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun 2022 dengan Nomor Surat BRI: B.304-MBD/PDT/12/2022 dan Nomor Surat Pos: 1338/DIR-6/1222 tanggal 29 Desember 2022 telah dilakukan penyetoran dana PUMK kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk senilai Rp7.000.000.000 per tanggal 30 Desember 2022.

Pada tahun 2023, PT Pos Indonesia (Persero) telah menyetorkan dana PUMK kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Nomor Surat BRI: B.604-MBD/09/2023 dan Nomor Surat Pos: 866/SETPER/0923 tanggal 1 September 2023 senilai Rp10.000.000.000 per tanggal 4 September 2023. Kemudian PT Pos Indonesia melakukan penyetoran dana PUMK kembali kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Nomor Surat BRI: B.853-MBD/11/2023 dan Nomor Surat Pos: 1312/SETPER/1123 tanggal 24 November 2023 senilai Rp7.000.000.000.

Pada Laporan Penyaluran PUMK 2023 dengan Nomor Surat BRI: B.212/MBD/01/2024 tanggal 24 Januari 2024, pendapatan jasa administrasi atas penyaluran dana PUMK yang dilaporkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada PT Pos Indonesia (Persero) senilai Rp 94.016.266 untuk tahun 2023.

Pada Laporan Penyaluran PUMK 2024 dengan Nomor Surat BRI: B.124/MBD/01/2025 tanggal 30 Januari 2025, pendapatan jasa administrasi atas penyaluran dana PUMK yang dilaporkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada PT Pos Indonesia (Persero) senilai Rp 315.201.890 untuk tahun 2024.

Laporan penyaluran Program UMK tahun 2024 dan 2023 oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Saldo awal	16.457.234.567	7.000.000.000
Penambahan:		
Penyaluran dana PUMK kepada BRI	12.700.000.000	17.000.000.000
Pengembalian Piutang Mitra Binaan diterima BRI	5.582.308.610	1.545.218.301
Pendapatan jasa administrasi yang diterima	315.201.890	94.016.266
Pengurang:		
Penyaluran dana oleh BRI kepada Mitra Binaan	<u>(25.345.100.000)</u>	<u>(9.182.000.000)</u>
Jumlah	<u>9.709.645.067</u>	<u>16.457.234.567</u>

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PIUTANG BERMASALAH – Neto

Akun ini merupakan pinjaman modal kerja yang diberikan kepada Mitra Binaan yang masuk ke dalam piutang bermasalah dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo awal piutang bermasalah	83.619.365.739	83.721.080.406
Pengurangan atas angsuran	(140.487.168)	(101.714.667)
Alokasi Penyisihan Penurunan Nilai Piutang	(83.478.878.571)	(83.619.365.739)
Jumlah	-	-

Rincian saldo piutang bermasalah Mitra Binaan berdasarkan daerah mitra binaan:

	2024	2023
Nanggroe Aceh Darussalam	5.177.976.733	5.177.976.733
Sumatera Utara	3.382.830.980	3.391.274.580
Sumatera Barat	2.086.300.835	2.086.300.835
Riau	3.065.590.971	3.067.090.971
Jambi	1.200.666.640	1.205.766.640
Bengkulu	1.798.810.262	1.798.810.262
Sumatera Selatan	2.438.395.933	2.465.283.404
Lampung	1.286.911.888	1.303.443.888
DKI Jakarta	7.841.610.632	7.866.131.507
Jawa Barat	6.894.191.292	6.894.191.292
Jawa Tengah	3.922.007.801	3.936.788.380
DI Yogyakarta	1.844.669.980	1.856.545.980
Jawa Timur	2.722.736.312	2.742.303.812
Bali	836.982.725	838.934.725
Nusa Tenggara Barat	2.731.467.243	2.733.632.596
Nusa Tenggara Timur	2.578.053.042	2.578.616.982
Kalimantan Barat	1.381.575.776	1.381.575.776
Kalimantan Tengah	2.067.241.146	2.067.241.146
Kalimantan Timur	1.883.797.454	1.883.797.454
Kalimantan Selatan	2.357.791.278	2.362.609.128
Sulawesi Utara	4.689.800.283	4.689.800.283
Sulawesi Tengah	4.893.161.408	4.894.941.408
Sulawesi Tenggara	2.071.896.699	2.071.896.699
Sulawesi Selatan	3.998.601.492	3.998.601.492
Maluku	4.726.769.534	4.726.769.534
Batam	5.599.040.233	5.599.040.233
Jumlah	83.478.878.572	83.619.365.740

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:

	2024 dan 2023			
	Sado awal	Perubahan tahun berjalan		Saldo akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Harga perolehan				
Inventaris	1.691.367.579	-	-	1.691.367.579
Kendaraan	171.480.000	-	-	171.480.000
Jumlah	1.862.847.579	-	-	1.862.847.579
Akumulasi penyusutan				
Inventaris	1.691.367.578	-	-	1.691.367.578
Kendaraan	171.480.000	-	-	171.480.000
Jumlah	1.862.847.578	-	-	1.862.847.578
Nilai buku	1			1

11. ASET TAKBERWUJUD

Rincian aset takberwujud adalah sebagai berikut:

	2024 dan 2023			
		Perubahan tahun berjalan		
	Sado awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Harga perolehan				
Kepemilikan langsung				
Aplikasi WEB SIM TJSL	395.000.000	-	-	395.000.000
Jumlah	395.000.000	-	-	395.000.000
Akumulasi penyusutan				
Kepemilikan langsung		-	-	-
Aplikasi WEB SIM TJSL	394.999.999	-	-	394.999.999
Jumlah	394.999.999	-	-	394.999.999
Nilai buku	1			1

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. KELEBIHAN PEMBAYARAN ANGSURAN

Rincian kelebihan pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Saldo Awal	431.032.945	404.365.111
Kelebihan (Kekurangan) Pembayaran Angsuran	<u>25.134.899</u>	<u>26.667.834</u>
Jumlah	<u>456.167.844</u>	<u>431.032.945</u>

Kelebihan pembayaran angsuran pada tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp 456.167.844 dan Rp 431.032.945 merupakan penerimaan angsuran yang melebihi saldo piutang Mitra Binaan akibat kesalahan pengakuan pembayaran piutang Mitra Binaan yang tidak sesuai dengan ID Mitra yang seharusnya, sedangkan pengurangan kelebihan pembayaran angsuran merupakan koreksi setelah ditemukannya ID Mitra yang melakukan pembayaran sebenarnya.

13. UTANG LAIN-LAIN

Rincian utang lain-lain adalah sebagai berikut :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Titipan angsuran mitra binaan	44.334.680	80.160.742
Lain-lain	<u>2.172.485</u>	<u>10.818.979</u>
Jumlah	<u>46.507.165</u>	<u>90.979.721</u>

Utang lain-lain pada tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp 46.507.165 dan Rp 90.979.721 merupakan utang yang harus segera dibayar atas angsuran Mitra Binaan.

Titipan angsuran Mitra Binaan sebesar Rp 44.334.680 digunakan untuk melunasi pinjaman Mitra Binaan yang bersangkutan.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. ASET NETO

Aset Neto terdiri dari aset neto tidak terikat dan aset neto terikat. Aset Neto tidak terikat merupakan sumber dan yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Aset Neto terikat merupakan sumber dan penggunaannya dibatasi, rincian Aset Neto Tidak Terikat sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Aset Neto Tidak Terikat		
Saldo awal	39.079.123.412	39.673.052.930
Kenaikan (penurunan) Aset Neto Tidak Terikat	<u>849.860.326</u>	<u>(593.929.518)</u>
Jumlah	<u>39.928.983.738</u>	<u>39.079.123.412</u>

15. PENDAPATAN

Rincian pendapatan tahun 2024 dan 2023 terdiri dari:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	513.595.667	1.209.898.528
Pendapatan jasa administrasi pinjaman		
- kerjasama BRI (Catatan 7)	315.201.890	94.016.266
Pendapatan akrual - kerjasama BRI (Catatan 7)	34.860.030	-
Pendapatan bunga jasa giro	5.748.443	5.587.990
Pendapatan Lain-lain - <i>Fee based Insurance</i>	<u>-</u>	<u>6.447.284</u>
Jumlah	<u>869.406.030</u>	<u>1.315.950.068</u>

16. BEBAN

Rincian beban tahun 2024 dan 2023 terdiri dari:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Alokasi penyisihan penurunan piutang (Catatan 5)	(530.988.770)	1.917.577.987
Pembayaran angsuran piutang bermasalah (Catatan 9)	(140.487.168)	(101.714.667)
Beban penyisihan piutang kolaborasi BRI (Catatan 7)	<u>340.959.722</u>	<u>-</u>
Jumlah	<u>(330.516.216)</u>	<u>1.815.863.320</u>

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI

Program Pendanaan UMK melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Rincian saldo dan transaksi signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

(i) Kas di bank (Catatan 4)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, seluruh kas di bank ditempatkan pada pihak berelasi.

(ii) Piutang kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 8)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, terdapat penyaluran kepada mitra Program Pendanaan UMK melalui pihak berelasi.

Sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

<u>Pihak-pihak berelasi</u>	<u>Sifat Hubungan</u>	<u>Jenis Transaksi</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Penempatan kas dan penyaluran kepada UMK
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Penempatan kas

18. REKLASIFIKASI AKUN LAPORAN KEUANGAN

PUMK PT Pos Indonesia (Persero) melakukan reklasifikasi akun-akun pada laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut untuk menyesuaikan penyajian laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Akun-akun yang dipengaruhi atas reklasifikasi diikhtisarkan sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023</u>		
	<u>Sebelum Reklasifikasi</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Setelah Reklasifikasi</u>
ASET			
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang kerjasama PUMK kepada Mitra binaan - Neto	-	7.636.781.699	7.636.781.699
Piutang kerjasama PUMK kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	16.457.234.567	16.457.234.567
Piutang kerjasama PUMK	24.094.016.266	(24.094.016.266)	-
Jumlah	24.094.016.266	-	24.094.016.266

PT POS INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**18. TANGGUNG JAWAB PENGURUS ATAS LAPORAN KEUANGAN PROGRAM
PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**

Pengurus Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2025.

Halaman Sengaja di Kosongkan